



# RKPD 2022

Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah  
Kabupaten Klaten



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)  
KABUPATEN KLATEN



---

---

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2022**

---

---

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58);
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022;
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.



### Pasal 3

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- g. BAB VII : PENUTUP.

### Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI KLATEN,

Cap  
Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2022



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Daftar Tabel</b> .....	ii
<b>Daftar Gambar</b> .....	ix
<b>Daftar Grafik</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I
1.1. Latar Belakang .....	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I – 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I – 5
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I – 6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....	I – 7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	II
2.1. Kondisi Umum Daerah .....	II – 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2020 Dan Realisasi RPJMD .....	II – 197
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II – 234
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	III
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III – 3
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III – 8
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	IV
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV – 1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022 .....	IV – 5
4.3. Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2022 .....	IV – 15
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	V
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 .....	V – 1
5.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2022 .....	V – 21
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b> ..	VI
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 .....	VI – 1
6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..	VI – 2
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	VII
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2016-2020 .....	II – 14
Tabel 2.2.	Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 16
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2020 .....	II – 17
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 .....	II – 20
Tabel 2.5.	Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 .....	II – 20
Tabel 2.6.	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 22
Tabel 2.7.	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 22
Tabel 2.8.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah).....	II – 25
Tabel 2.9.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) .....	II – 26
Tabel 2.10.	Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2016-2020 di Solo Raya.....	II – 28
Tabel 2.11.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 29
Tabel 2.12.	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020.....	II – 32
Tabel 2.13.	Perkembangan Upah Minimal Kabupaten Kota (UMK) Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020.....	II – 34
Tabel 2.14.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 34
Tabel 2.15.	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 35
Tabel 2.16.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2020 .....	II – 35
Tabel 2.17.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 36
Tabel 2.18.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 38
Tabel 2.19.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten 2016-2020 .....	II – 38
Tabel 2.20.	Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 39
Tabel 2.21.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 40
Tabel 2.22.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 40
Tabel 2.23.	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2016-2020 .....	II – 41
Tabel 2.24.	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2020 .....	II – 42



Tabel 2.25.	Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 43
Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2016-2020 .....	II - 43
Tabel 2.27.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 45
Tabel 2.28.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 45
Tabel 2.29.	Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 46
Tabel 2.30.	Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016-2020 .....	II – 47
Tabel 2.31.	Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 48
Tabel 2.32.	Data Realisasi Kelompok Nelayan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 49
Tabel 2.33.	Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2016-2020.....	II – 50
Tabel 2.34.	Perkembangan Indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 50
Tabel 2.35.	Jumlah Penyelenggaraan Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 51
Tabel 2.36.	Jumlah Sarpras Penyelenggaraan Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 52
Tabel 2.37.	Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 52
Tabel 2.38.	Daftar Organisasi Kepemudaan yang masuk dalam wadah KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Klaten Tahun 2020 .....	II – 54
Tabel 2.39.	Perkembangan Kepemudaan & Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 55
Tabel 2.40.	Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020 .....	II - 58
Tabel 2.41.	Perkembangan Jumlah Siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 58
Tabel 2.42.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 59
Tabel 2.43.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 60
Tabel 2.44.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 62
Tabel 2.45.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 63
Tabel 2.46.	Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 64
Tabel 2.47.	Perkembangan Target Kinerja dari Angka Putus Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 65
Tabel 2.48.	Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 65

Tabel 2.49.	Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 66
Tabel 2.50.	Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 67
Tabel 2.51.	Sebaran Sarana Pendidikan Di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Unit).....	II. - 70
Tabel 2.52.	Perkembangan AKB Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 72
Tabel 2.53.	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 73
Tabel 2.54.	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020...	II - 74
Tabel 2.55.	Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020...	II - 75
Tabel 2.56.	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 76
Tabel 2.57.	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 77
Tabel 2.58.	Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 77
Tabel 2.59.	Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 78
Tabel 2.60.	Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kab. Klaten Tahun 2016-2020.....	II - 78
Tabel 2.61.	Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 80
Tabel 2.62.	Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan yang Berizin di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 81
Tabel 2.63.	Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ...	II - 86
Tabel 2.64.	Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 .....	II - 88
Tabel 2.65.	Kondisi DI di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 89
Tabel 2.66.	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 90
Tabel 2.67.	Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2016 - 2020 .....	II - 92
Tabel 2.68.	Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 93
Tabel 2.69	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 94
Tabel 2.70.	Jumlah Linmas dan Persentase Penegakan Perda Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 96
Tabel 2.71.	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Pelacuran Oleh Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 96
Tabel 2.72.	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2016-2020 .....	II.- 97
Tabel 2.73.	Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ....	II - 98
Tabel 2.74.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016-2020 .....	II - 98

Tabel 2.75.	Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2020.....	II – 99
Tabel 2.76.	Tingkat Penyelesaian K3 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 99
Tabel 2.77.	Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 100
Tabel 2.78.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada.....	II – 101
Tabel 2.79.	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentramaan Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 101
Tabel 2.80.	Perkembangan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 .....	II – 103
Tabel 2.81.	Kondisi Jalur Evakuasi Merapi di Kabupaten Klaten Tahun 2020 .....	II – 106
Tabel 2.82.	Kondisi Jalur Evakuasi Merapi berdasarkan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2019 .....	II – 106
Tabel 2.83.	Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan tahun 2016-2020 .....	II – 109
Tabel 2.84.	Jumlah Disabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020 .....	II - 110
Tabel 2.85.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Klaten Tahun 2020 .....	II - 112
Tabel 2.86.	Timbulan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	II - 113
Tabel 2.87.	Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 .....	II – 115
Tabel 2.88.	Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2020 .....	II - 116
Tabel 2.89.	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 118
Tabel 2.90.	Penduduk Kabupaten Klaten Belum Memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2016-2020.....	II - 118
Tabel 2.91.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020.....	II - 119
Tabel 2.92.	Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 120
Tabel 2.93.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 121
Tabel 2.94.	Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kab Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 122
Tabel 2.95.	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 127
Tabel 2.96.	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2019.....	II - 128
Tabel 2.97.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & Sejahtera 1.....	II – 128
Tabel 2.98.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020.....	II – 129
Tabel 2.99.	Indikator Kinerja Program Diskominfo Tahun 2016-2020 .....	II - 131
Tabel 2.100.	Perkembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020.....	II – 132
Tabel 2.101.	Data Terkait Kepustaakan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 135
Tabel 2.102.	Data Terkait Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 136

Tabel 2.103. Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten.....	II – 136
Tabel 2.104. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2016-2020.....	II – 138
Tabel 2.105. Tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat .....	II – 139
Tabel 2.106. Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020 .....	II – 140
Tabel 2.107. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 140
Tabel 2.108. Perkembangan Jumlah Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara serta Indek Kabupaten Peduli HAM Kab Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 141
Tabel 2.109. Klasifikasi Nilai (SKOR) Indeks Kabupaten Peduli HAM..	II – 142
Tabel 2.110. Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2019 .....	II – 143
Tabel 2.111. Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klaten Tahun 2017-2019 .....	II - 144
Tabel 2.112. Persentase, Jumlah, dan Tindak Lanjut Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 146
Tabel 2.113. Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 148
Tabel 2.114. Capaian Level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 149
Tabel 2.115. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 149
Tabel 2.116. Perkembangan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 150
Tabel 2.117. Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 151
Tabel 2.118. Opini BPK pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 152
Tabel 2.119. Opini BPK pada Laporan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 152
Tabel 2.120. Perkembangan Penetapan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 152
Tabel 2.121. Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 155
Tabel 2.122. ASN & Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 155
Tabel 2.123. Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar di Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020.....	II – 156
Tabel 2.124. Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020 .....	II – 156
Tabel 2.125. Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020	II – 160
Tabel 2.126. Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2014– 2018.....	II – 172
Tabel 2.127. Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020 .....	II – 173



Tabel 2.128. Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 174
Tabel 2.129. Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 175
Tabel 2.130. Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II - 176
Tabel 2.131. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 177
Tabel 2.132. Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 177
Tabel 2.133. Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	II – 178
Tabel 2.134. Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 178
Tabel 2.135. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020.....	II – 179
Tabel 2.136. Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 180
Tabel 2.137. Data Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 180
Tabel 2.138. Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2020 .....	II – 181
Tabel 2.139. Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 182
Tabel 2.140. Jumlah KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 184
Tabel 2.141. Jumlah Pelanggan PLN Di Kabupaten Klaten Hingga Tahun 2020 .....	II – 184
Tabel 2.142. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Km) .....	II – 185
Tabel 2.143. Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2019 dalam km .....	II – 186
Tabel 2.144. Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten .....	II – 186
Tabel 2.145. Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 187
Tabel 2.146. Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 188
Tabel 2.147. Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 189
Tabel 2.148. Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	II – 190
Tabel 2.149. Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 191
Tabel 2.150. Realisasi Kinerja Indikator Perindustrian Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 191
Tabel 2.151. Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 194
Tabel 2.152. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 195
Tabel 2.153. Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2020 .....	II – 196
Tabel 2.154. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	II – 198

Tabel 2.155.	Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 ...	II – 208
Tabel 2.156.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II – 234
Tabel 2.157.	Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah .....	II – 251
Tabel 3.1.	Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2022 .....	III – 6
Tabel 3.2.	Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2022	III – 7
Tabel 3.3.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 serta Rencana APBD Tahun Anggaran 2021	III – 10
Tabel 3.4.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 .....	III – 14
Tabel 3.5.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 serta Rencana APBD Tahun Anggaran 2022.....	III – 17
Tabel 3.6.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 dan Rencana APBD Tahun Anggaran 2021 serta Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 .....	III – 20
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022 .....	IV – 3
Tabel 4.2.	Sasaran Makro Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 .	IV – 13
Tabel 4.3.	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Nasional .....	IV – 13
Tabel 5.1.	Ringkasan Pagu Indikatif Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah...	V – 20
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2022 .....	VI – 1
Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	VI – 2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 .....	I – 2
Gambar 1.2. Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 dengan Dokumen Perencanaan.....	I – 6
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Klaten .....	II – 1
Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Klaten .....	II – 2
Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Klaten .....	II – 3
Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten .....	II – 4
Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Klaten .....	II – 4
Gambar 2.6. Peta Hidrologi Kabupaten Klaten.....	II – 5
Gambar 2.7. Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten.....	II – 13
Gambar 2.8. Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah.....	II – 13
Gambar 2.9. Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten.....	II – 14
Gambar 2.10. Peta Kondisi Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2020 .....	II - 87
Gambar 2.11. Peta Jalur Evakuasi Merapi Kabupaten Klaten .....	II - 107
Gambar 2.12. Peta Sebaran Terminal di Kabupaten Klaten .....	II - 182
Gambar 2.13. Rencana Jalan Tol Solo-Yogya.....	II – 249



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2016-2020 .....	II – 15
Grafik 2.2.	Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	II – 21
Grafik 2.3.	Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 22
Grafik 2.4.	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 .....	II – 24
Grafik 2.5.	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 27
Grafik 2.6.	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 28
Grafik 2.7.	Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020 .....	II – 30
Grafik 2.8.	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2016-2020 .....	II – 31
Grafik 2.9.	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2016-2020 .....	II – 32
Grafik 2.10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 33
Grafik 2.11.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 57
Grafik 2.12.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 57
Grafik 2.13.	Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 59
Grafik 2.14.	Grafik Perkembangan APK PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 60
Grafik 2.15.	Perkembangan APK Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 61
Grafik 2.16.	Perkembangan APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 62
Grafik 2.17.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 63
Grafik 2.18.	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 64
Grafik 2.19.	Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2016-2020 .....	II – 65
Grafik 2.20.	Perkembangan Angka Melanjutkan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 67
Grafik 2.21.	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 71
Grafik 2.22.	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 72
Grafik 2.23.	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 73
Grafik 2.24.	Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 74
Grafik 2.25.	Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 75



Grafik 2.26.	Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 79
Grafik 2.27.	Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 80
Grafik 2.28.	Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu) .	II – 82
Grafik 2.29.	Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu) .	II – 83
Grafik 2.30.	Kondisi DI di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 89
Grafik 2.31.	Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 94
Grafik 2.32.	PPKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016-2020 ...	II – 109
Grafik 2.33.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020.	II – 113
Grafik 2.34.	Jumlah Penanganan sampah yang tertangani di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 116
Grafik 2.35.	Indikator Kinerja Program Diskominfo tahun 2016 – 2020 .....	II – 131
Grafik 2.36.	Trend Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar di Kabupaten Tahun 2016 – 2020 ....	II – 133
Grafik 2.37.	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2020 .....	II – 138
Grafik 2.38.	Jumlah Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 146
Grafik 2.39.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 153
Grafik 2.40.	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020...	II – 154
Grafik 2.41.	Pertumbuhan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 .....	II – 192
Grafik 2.42.	Capaian IPM Nasional, Provinsi Jateng dan Kabupaten Klaten Tahun 2020 .....	II – 196

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

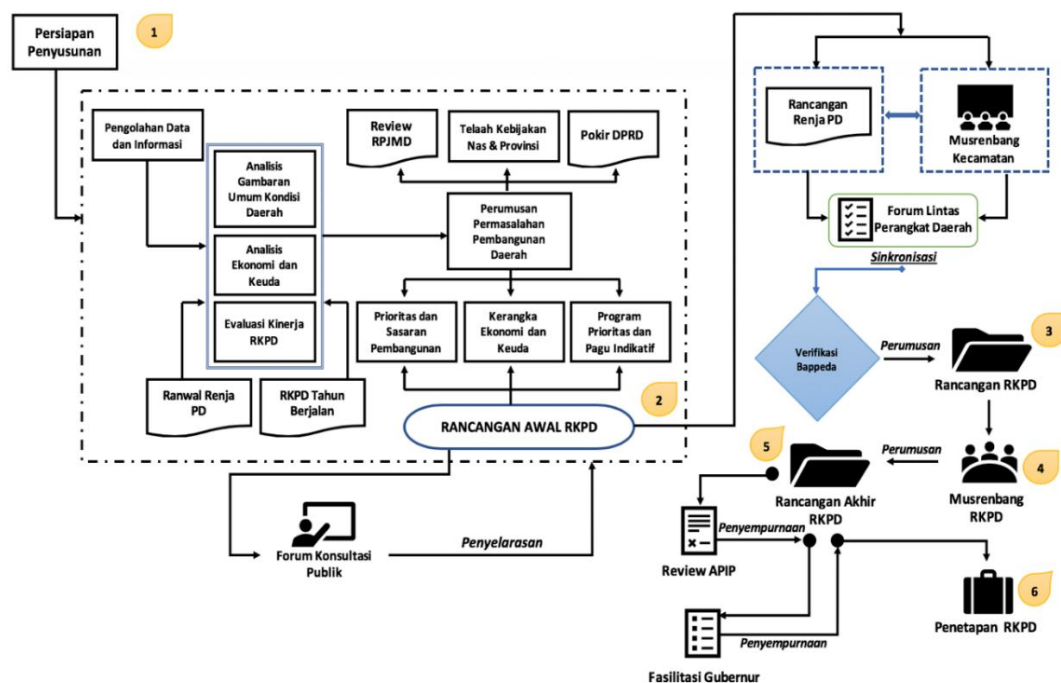
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 265 ayat (3) menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022. Hal ini sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 ditempuh dengan memperhatikan 5 aspek pendekatan perencanaan, yaitu: teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis dengan berorientasi secara holistik, tematik, integratif dan spasial. Aspek pendekatan perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 bersifat strategis, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjangkaran aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilakukan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

Penyusunan RKPD mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana isu strategis yang terjadi mulai tahun 2020 adalah munculnya wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia yang efeknya juga berimbas pada rencana arah kebijakan daerah di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, perencanaan daerah di tahun 2022 membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak dari wabah virus corona di tahun 2020. Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022, disusun melalui 6 tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.

Secara lengkap, tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2022 disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.  
Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 1.1. sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan Pasal 11 Ayat (2) Huruf c Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Serta sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah dijelaskan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Memperhatikan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, RKPD sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka konsekuensi dari pelaksanaan atas pasal-pasal tersebut, rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan APBD. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 wajib diintegrasikan dan diselaraskan dengan program-program pemerintah (Pusat, dan Provinsi) melalui tahapan konsolidasi seiring dengan perodesasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

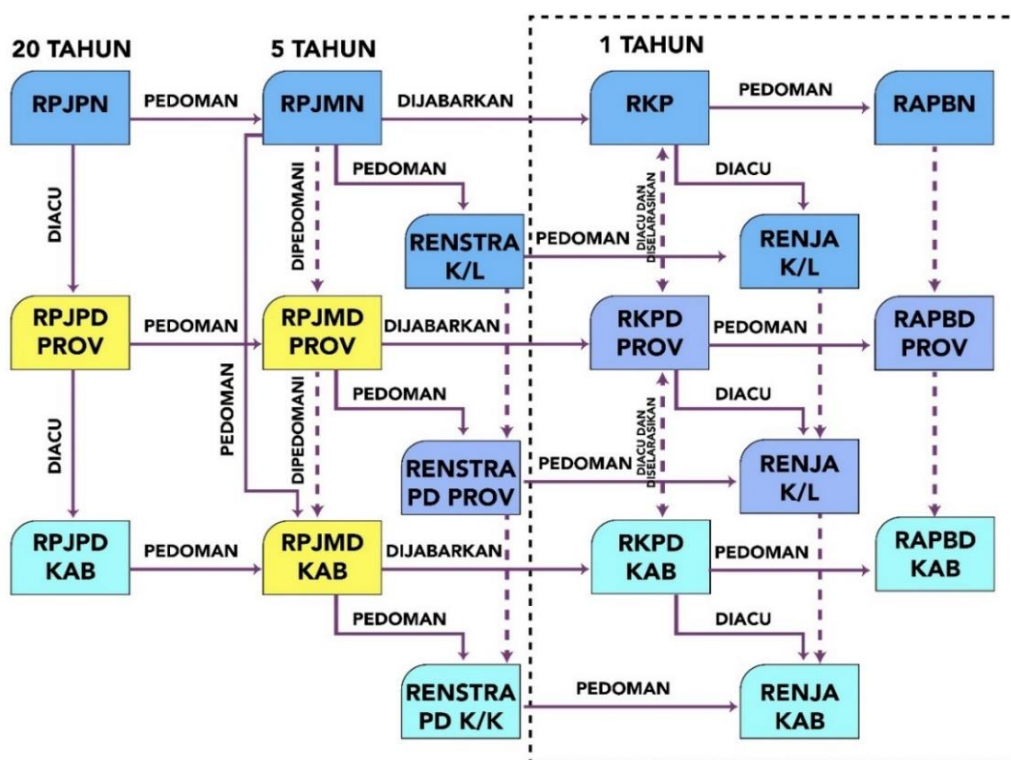
### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kabupaten Klaten.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten

Klaten Tahun 2022 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan di Kabupaten Klaten, maupun dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun gambar hubungan antar dokumen sebagai berikut:



Gambar 1.2.  
Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 dengan Dokumen Perencanaan

## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 guna memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2022, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022.

#### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 yaitu:

- a. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Diperoleh hanya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2022.
- c. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun 2022.
- d. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

#### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 dengan berpedoman Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan rancangan awal RKPD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat kondisi umum Daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek potensi Daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; serta menguraikan permasalahan pembangunan Daerah;

##### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; arah kebijakan ekonomi Daerah serta arah kebijakan keuangan Daerah;

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD;

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022.

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan target indikator kinerja Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bentuk pedoman dalam pencapaian kinerja tahunan pada RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

#### **LAMPIRAN**

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. KONDISI UMUM DAERAH

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

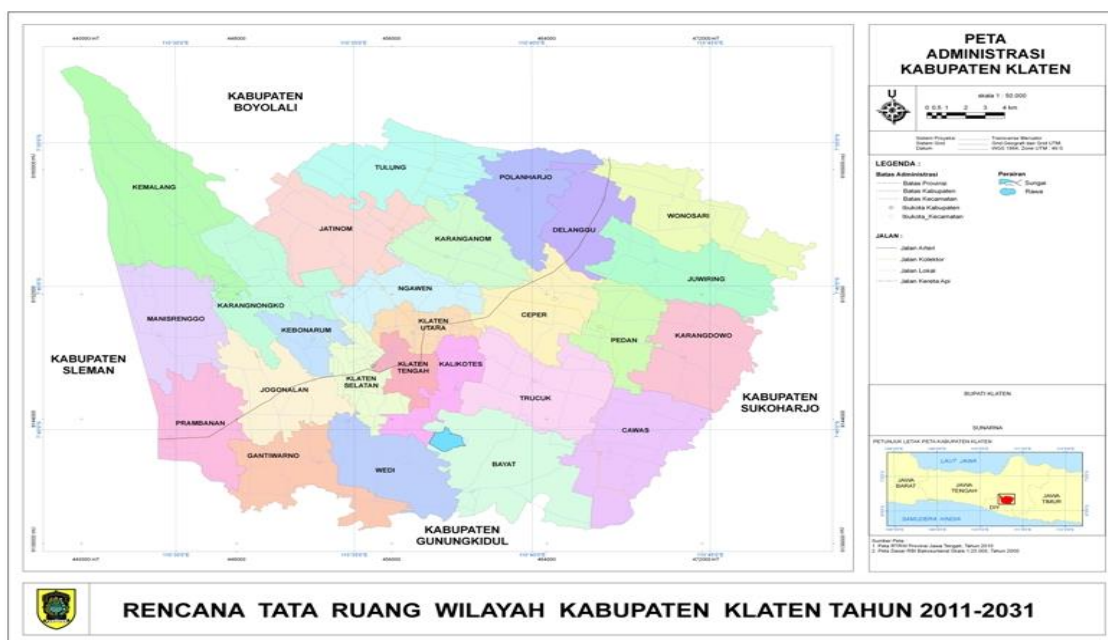
Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32`19" Lintang Selatan sampai 7°48`33" Lintang Selatan dan antara 110°26`14" Bujur Timur sampai 110°47`51" Bujur Timur.

#### 2.1.1.1. Letak Administrasi

Luas Wilayah Kabupaten Klaten sebesar 70.152,02 hektar atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambar Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



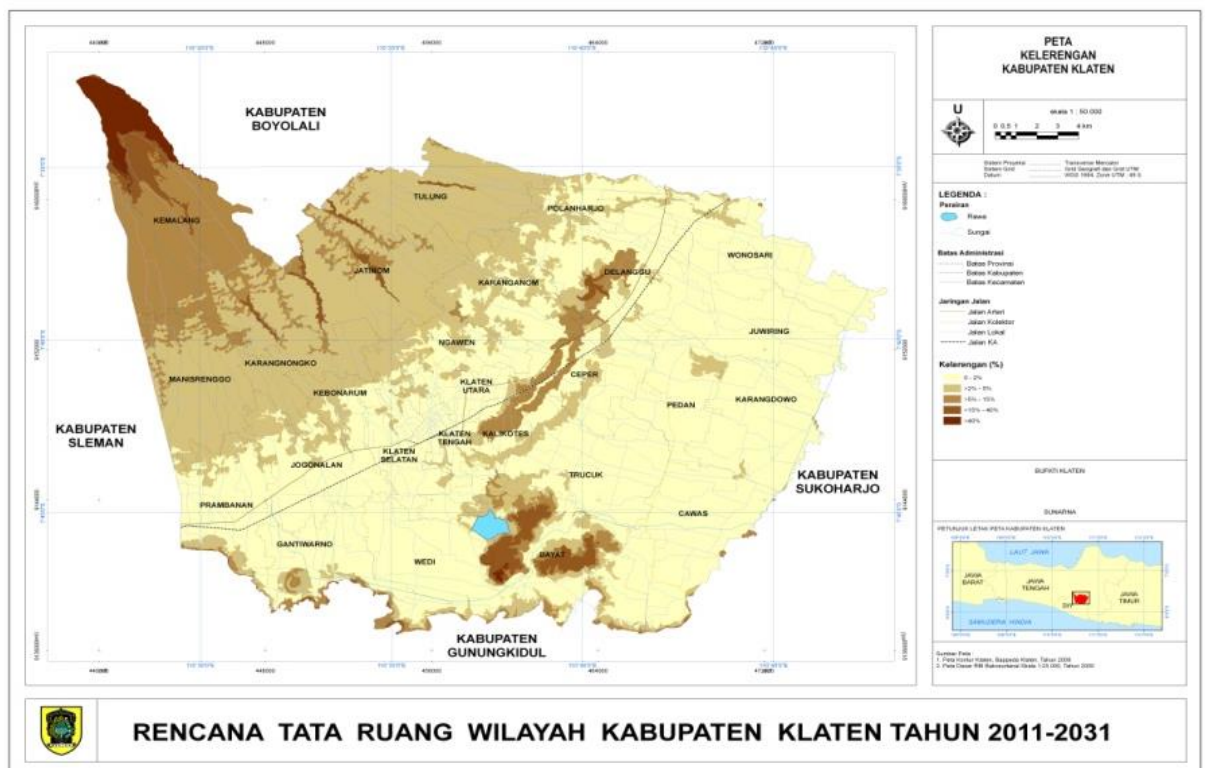
Gambar 2.1.  
Peta Wilayah Kabupaten Klaten

### 2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu. dan dengan ketinggian antara 76–1.600 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi : Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom, dan Tulung;
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah : Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, dan Polanharjo; dan
3. Wilayah berbukit/gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas, dan Gantiwarno.

Peta Kelerengn Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2.  
Peta Kelerengn Kabupaten Klaten

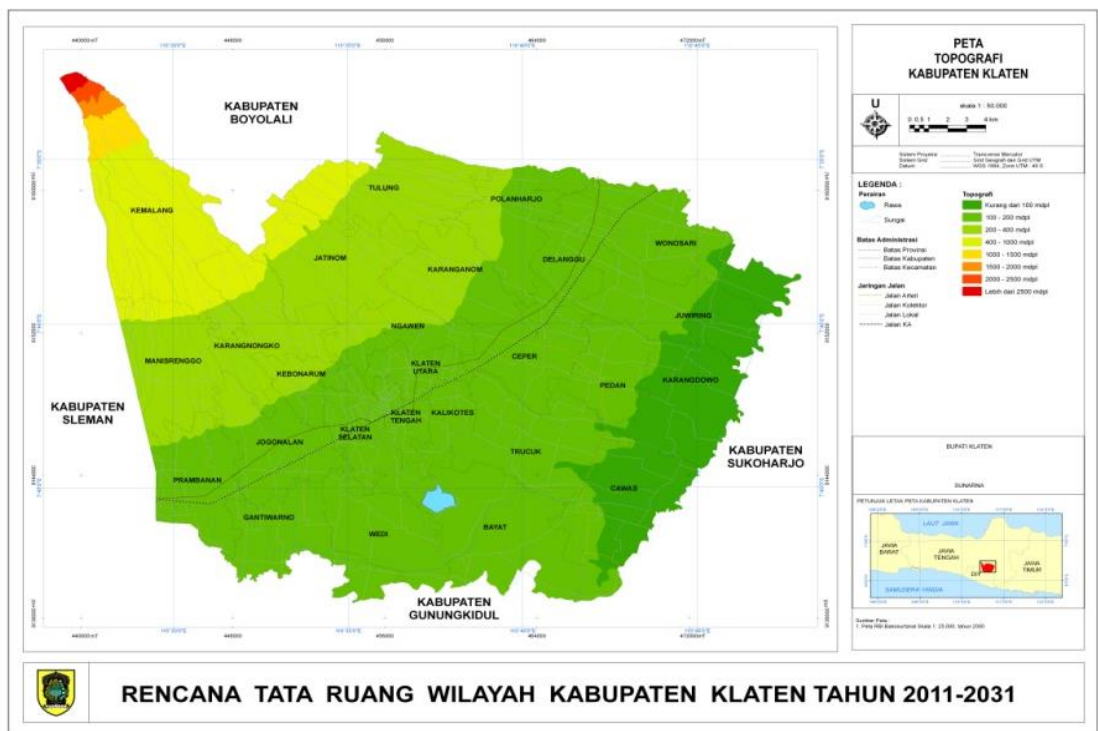
Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten. terinci sebagai berikut:

Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas;

1. Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian

- timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat);
- Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat);
  - Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
  - Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.

Peta Topografi Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 2.3.

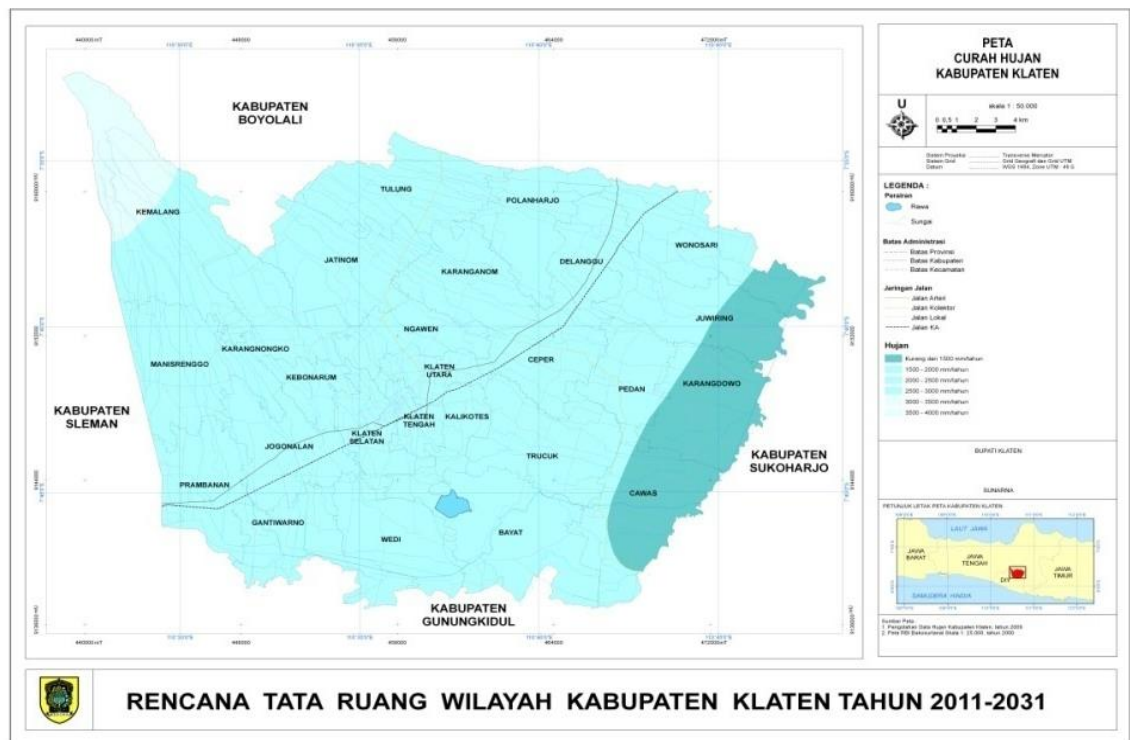


Gambar 2.3.  
Peta Topografi Kabupaten Klaten

### 2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28-30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20-25 km/jam. Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Region II Jawa Tengah, rata-rata curah hujan berada pada kisaran 400-500 mm. Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 2.4.



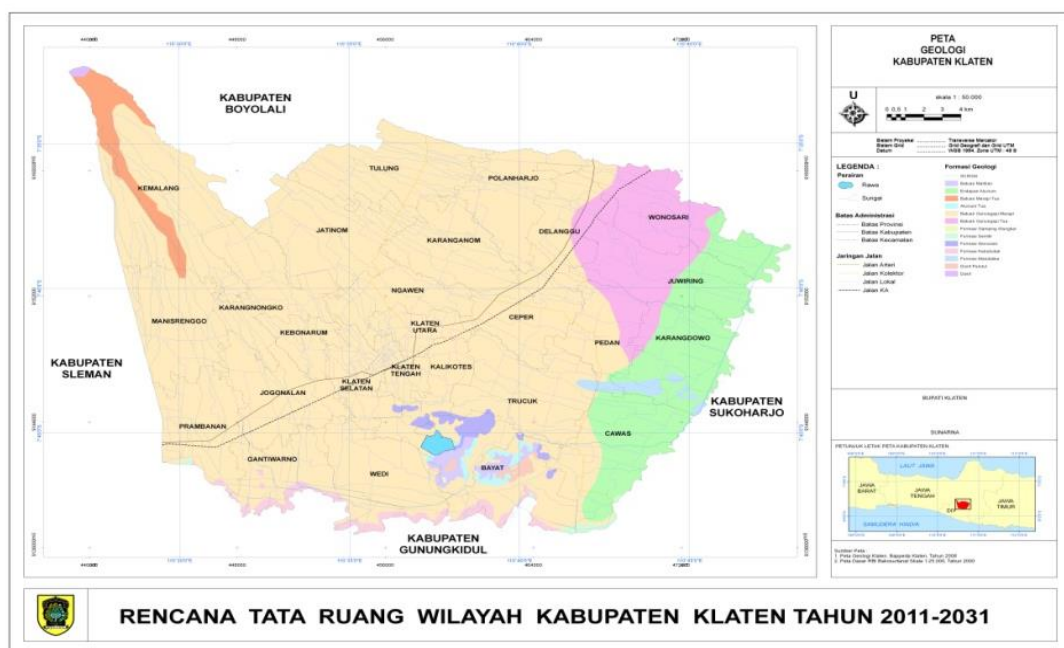


Gambar 2.4.  
Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten

**2.1.1.4. Kondisi Geologi**

Kondisi geologi di Kabupaten Klaten tersusun oleh beberapa satuan batuan, yaitu : Aluvium tua, batuan gunung api Merapi, batuan gunung api tua, batuan malihan, batuan merapi tua, desit, diorit pendul, endapan aluvium, batuan formasi gamping wungkal, batuan vormasi mandalika, batuan formasi semilir, dan batuan formasi Wonosari. Sedangkan sebaran dari masing-masing batuan tersebut dapat dilihat pada Peta Geologi Kabupaten Klaten (Sumber RTRW Kab. Klaten Tahun 2011-2031).

Peta Geologi Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5.  
Peta Geologi Kabupaten Klaten

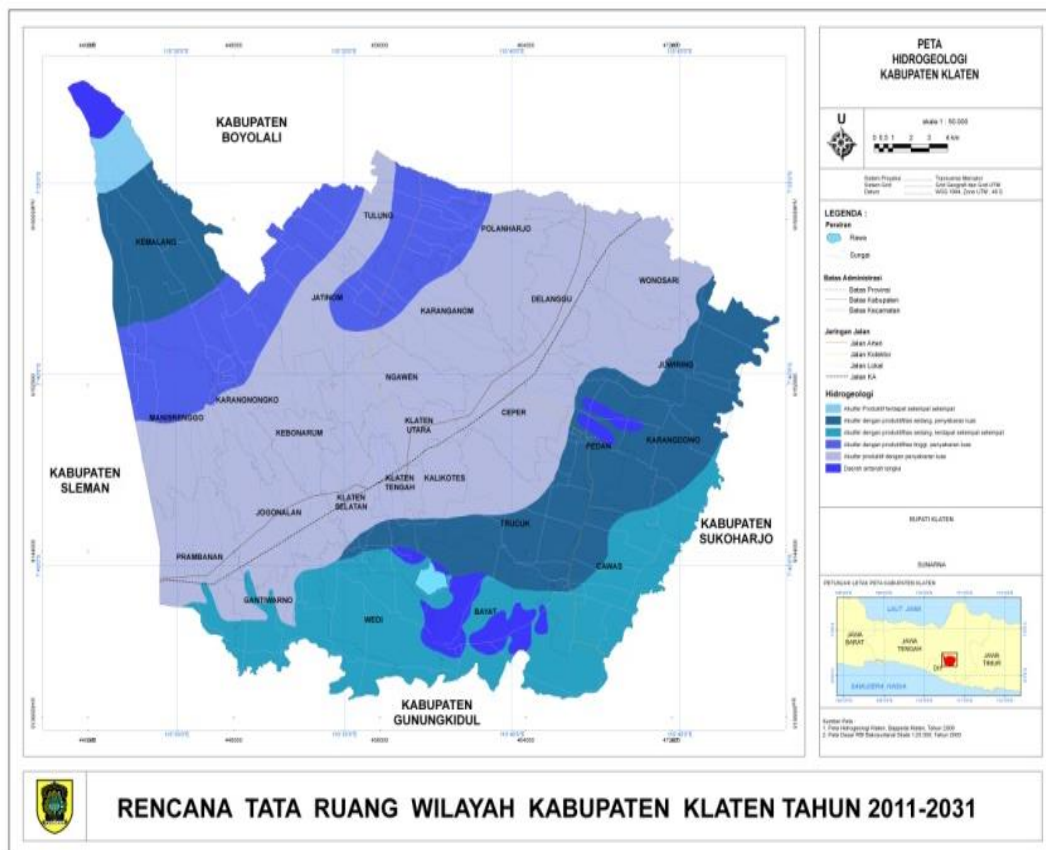
### 2.1.1.5. Kondisi Hidrologi dan Geohidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu:

- 1 (satu) sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo;
- 1 (satu) sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng;
- 24 (dua puluh empat) sungai dengan klasifikasi Ordo II; dan
- 54 (lima puluh empat) sungai dengan Ordo III.

Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Mata air yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 206 yang tersebar di 20 kecamatan, dimana 38 diantaranya berlokasi di Kecamatan Tulung. Dari 206 mata air tersebut 17 diantaranya dalam kondisi mati. Sumber air lainnya adalah embung, dimana sampai tahun 2020 sudah terbangun 17 embung di Kabupaten Klaten.

Geohidrologi di Kabupaten Klaten dapat dibedakan menjadi 6 (enam) akuifer yaitu akuifer produktif terdapat setempat-setempat, akuifer produktifitas sedang dengan penyebaran luas, akuifer produktifitas tinggi dengan penyebaran luas, akuifer produktifitas sedang penyebaran setempat-setempat, akuifer dengan produktifitas tinggi penyebaran luas, akuifer produktif penyebaran luas dan daerah air tanah langka (sumber RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031). Secara spasial sebaran air tanah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten (Gambar 2.6).



Gambar 2.6.  
Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten

#### **2.1.1.6. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan pertanian selama 5 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun 2016-2020 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah pada tahun 2016 sebesar 33.066 Ha, pada tahun 2017 sebesar 33.021 Ha, pada tahun 2018 sebesar 31.943 Ha, pada tahun 2019 menjadi 31.943 Ha, dan pada tahun 2020 menjadi 34.682,71 Ha (DPU PR, 2021). Perubahan luas Kabupaten Klaten secara administratif menjadi 70.152,02 hektar di tahun 2020 berdasarkan pada hasil pengecekan lapangan dan peta administrasi yang mendapat persetujuan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta kesepakatan dengan kementerian ATR/BPN.

Pada tahun 2016 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,392 Ha, dengan perincian peruntukan : Perumahan 33,058 Ha, Industri 8,910 Ha, Perusahaan 0,113 Ha, dan Jasa 3,311 Ha. Tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,761 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,2981 Ha, Industri 4,515 Ha, dan Jasa 0,948 Ha. Tahun 2018 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 61,840 Ha, dengan perincian peruntukan : Perumahan 48,897 Ha, Industri 13,744 Ha, dan Jasa 0,740 Ha. Tahun 2019 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 81,6 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 55,5 Ha, Industri 18,2 Ha, Perusahaan 0,5 Ha, dan Jasa 7,5 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian mencapai 93,180 Ha, dengan rincian peruntukan: Perumahan 56,1038 Ha, Industri 10,332 Ha, Perusahaan 25,516 Ha, dan jasa 1,228 Ha.

#### **2.1.1.7. Pengembangan Potensi Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan mengacu pada Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung; Kawasan hutan lindung mencakup luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Bayat.
2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air meliputi:

Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.

3. Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan perlindungan setempat terdiri atas: sempadan sungai, kawasan sempadan sungai mencakup luasan kurang lebih 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang tersebar di wilayah kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. dataran sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
  - b. dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
  - c. dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
4. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk dan Kawasan sekitar danau atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air dan atau waduk tertinggi, dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat.
5. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan luas kurang lebih 8.557 (delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar atau 42 (empat puluh dua) persen dari luas kawasan perkotaan kurang lebih 20.018 (dua puluh ribu delapan belas) hektar.
6. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya; terdiri atas :
  - a. Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang;
  - b. Kawasan cagar budaya meliputi:
    - 1) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, CandiLor/ Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar;
    - 2) Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
    - 3) Kawasan Sunan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.

- B. Kawasan Budidaya; terdiri atas:
1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi; terdiri atas :
    - a. Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bayat.
    - b. Hutan produksi tetap mencakup luasan kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes.
  2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat; Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup luasan kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar meliputi: Kecamatan Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung, dan Wedi.
  3. Kawasan Peruntukan Pertanian; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 28.949 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Kawasan peruntukan hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar meliputi : Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karangnongko, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari.
    - b. Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas:
      - 1) Kelapa deres meliputi: Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo, dan Wedi;
      - 2) Kapuk meliputi: Kecamatan Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan Tulung;
      - 3) Kopi meliputi: Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Tulung, dan Manisrenggo;
      - 4) Tembakau rajangan dan asepan meliputi: Kecamatan Bayat, Ceper, Kalikotes, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Prambanan, Karangnongko, Tulung, Manisrenggo, dan Kemalang;
      - 5) Tembakau Virginia meliputi: Kecamatan Pedan, dan Trucuk;
      - 6) Tembakau *Vorsternland* meliputi: Kecamatan Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Utara, dan Wedi;
      - 7) Cengkeh meliputi: Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, dan Tulung; dan
      - 8) Tebu meliputi: Kecamatan Bayat, Ceper, Pedan, Jatinom, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara, dan Prambanan.

- c. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan di antaranya penangkaran burung, sapi, kelinci, ayam, kambing dengan luasan kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar yang tersebar di semua kecamatan.
  - d. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).
4. Kawasan Peruntukan Perikanan; terdiri atas :
- a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap; Kawasan peruntukan perikanan tangkap mencakup seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
  - b. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya; meliputi :
    - 1) Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat.
    - 2) Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi : Kecamatan Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan, Wonosari dan Tulung.
  - c. Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan nila meliputi: Kecamatan Karanganom, Polanharjo, Tulung, Ngawen, Klaten Selatan dan Kebonarum.
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan; Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas mineral serta minyak dan gas bumi, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:
    - 1) Pertambangan andesit berada di Kecamatan Karangdowo;
    - 2) Pertambangan batu gamping berada di Kecamatan Kalikotes;
    - 3) Pertambangan lempung alluvial meliputi: Kecamatan Ceper, Gantiwarno, Jogonalan, Karanganom, Karangnongko, dan Ngawen.
    - 4) Pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Kemalang.
  - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral merupakan wilayah pertambangan rakyat.
  - c. Pertambangan batuan ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.
  - d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi seluruh wilayah di kabupaten.
6. Kawasan Peruntukan Industri; meliputi :
- a. Kawasan peruntukan industri besar meliputi :

- 1) Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar;
  - 2) Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar; dan
  - 3) Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.
- b. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi :
- 1) Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar;
  - 2) Kecamatan Karanganom dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
  - 3) Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar; dan
  - 4) Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar.
- c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi:
- 1) Industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper;
  - 2) Industri pandai besi meliputi: Kecamatan Delanggu, Jatinom, Karanganom, Manisrenggo, dan Polanharjo.
  - 3) Industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan Pedan.
  - 4) Industri konveksi meliputi: Kecamatan Ceper, Kalikotes, Klaten Selatan, Ngawen, Pedan, dan Wedi.
  - 5) Industri genteng meliputi: Kecamatan Ceper, Kalikotes, Karanganom, Klaten Selatan, Ngawen, dan Wonosari.
  - 6) Industri meubel/furniture meliputi: Kecamatan Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Ngawen, Trucuk, dan Wonosari.
  - 7) Industri gerabah/keramik meliputi: Kecamatan Bayat, Wedi, dan Wonosari.
  - 8) Industri pengolahan tembakau meliputi: Kecamatan Gantiwarno, Wedi, Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk, dan Wedi.
  - 9) Industri soun meliputi: Kecamatan Ngawen dan Tulung.
  - 10) Industri makanan kecil meliputi: Kecamatan Jogonalan dan Polanharjo.
  - 11) Industri tatah sungging dan bordir berada di Kecamatan Wonosari
7. Kawasan Peruntukan Pariwisata meliputi :
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya mencakup:
- 1) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan;



- 2) Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko;
  - 3) Museum Gula Jawa Tengah berada di Kecamatan Jogonalan;
  - 4) Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu berada di Kecamatan Jatinom;
  - 5) Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat;
  - 6) Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada di Kecamatan Trucuk;
  - 7) Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari;
  - 8) Makam Panembahan Romo berada di Kecamatan Klaten Selatan;
  - 9) Makam Kyai Melati berada di Kecamatan Klaten Tengah; dan
  - 10) Keunikan lokal desa wisata meliputi desa:
    - a) Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan;
    - b) Desa wisata Bugisan Kecamatan Prambanan;
    - c) Desa wisata Brajan Kecamatan Prambanan;
    - d) Desa Wisata Melikan Kecamatan Wedi;
    - e) Desa Wisata Duwet (Soran) Kecamatan Ngawen;
    - f) Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo;
    - g) Desa Wisata Nganjat Kecamatan Polanharjo;
    - h) Desa Kauman Kecamatan Polanharjo;
    - i) Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat;
    - j) Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat;
    - k) Desa Wisata Paseban Kecamatan Bayat;
    - l) Desa Wisata Tlingsing Kecamatan Cawas;
    - m) Desa Wisata Pokak Kecamatan Ceper;
    - n) Desa Wisata Balerante Kecamatan Kemalang;
    - o) Desa Wisata Sidorejo Kecamatan Kemalang;
    - p) Desa Wisata Tegalmulyo Kecamatan Kemalang;
    - q) Desa wisata Danguran Kecamatan Klaten Selatan;
    - r) Desa wisata Soropaten Kecamatan Karangnongko; dan
    - s) Desa Wisata Desa Politan Kecamatan Klaten Tengah, Kalikotes dan Kecamatan Bayat;
    - t) Desa wisata Karangnongko Kecamatan Karangnongko;
    - u) Desa wisata lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
- 1) Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang;
  - 2) Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat;
  - 3) Kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat; dan
  - 4) Umbul Pelem dan Nganten di Kecamatan Tulung dan Polanharjo;
  - 5) Pemandian Umbul Ponggok berada di Kecamatan Polanharjo.



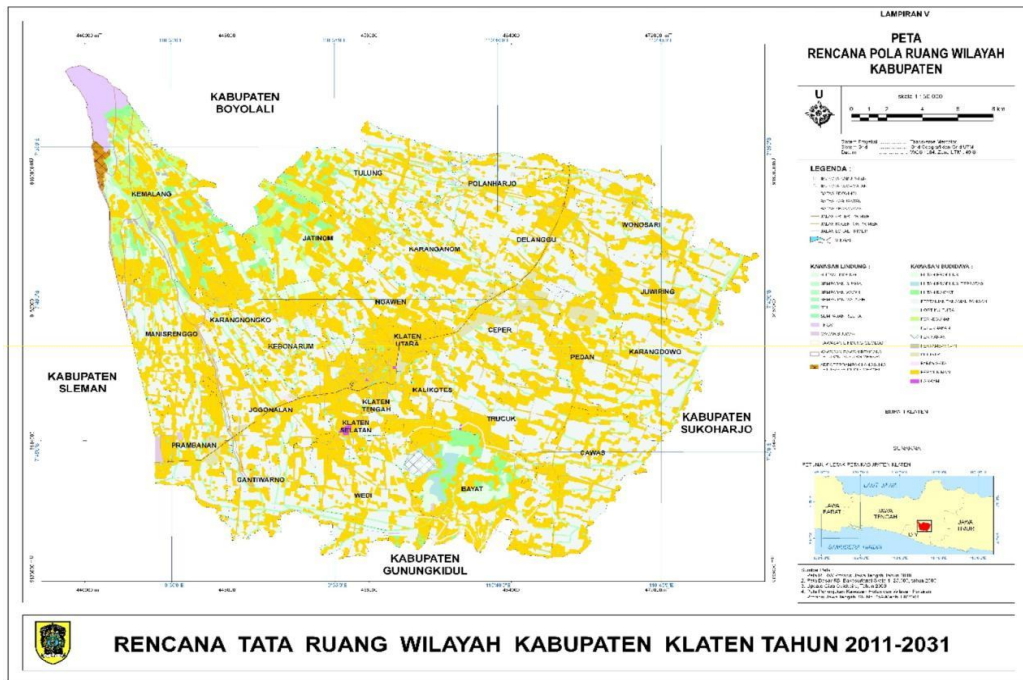


- 6) Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:
  - a) Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat;
  - b) Obyek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Pemandian Lumban Tirto Kecamatan Tulung dan Pemancingan Janti berada di Kecamatan Polanharjo;
  - c) Pemandian Jolotundo berada di Kecamatan Karangnom; dan
  - d) Pemandian Tirtomulyono dan Pemandian Tirtomulyani berada di Kecamatan Kebonarum.
8. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi;
  - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan mencakup luasan kurang lebih 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) hektar meliputi desa dan kelurahan pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.
  - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan mencakup luasan kurang lebih 19.935 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten.
  - c. Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan.
9. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan kawasan peruntukan lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi:

  - a. Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di Kecamatan Klaten Selatan dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar;
  - b. Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten berada di Kecamatan Klaten Tengah dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
  - c. Kepolisian Resort (Polres) Klaten berada di Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
  - d. Lapangan tembak berada di Kecamatan Trucuk dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
  - e. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan
  - f. Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di wilayah Kabupaten.

Peta Pola Ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada Gambar 2.7.



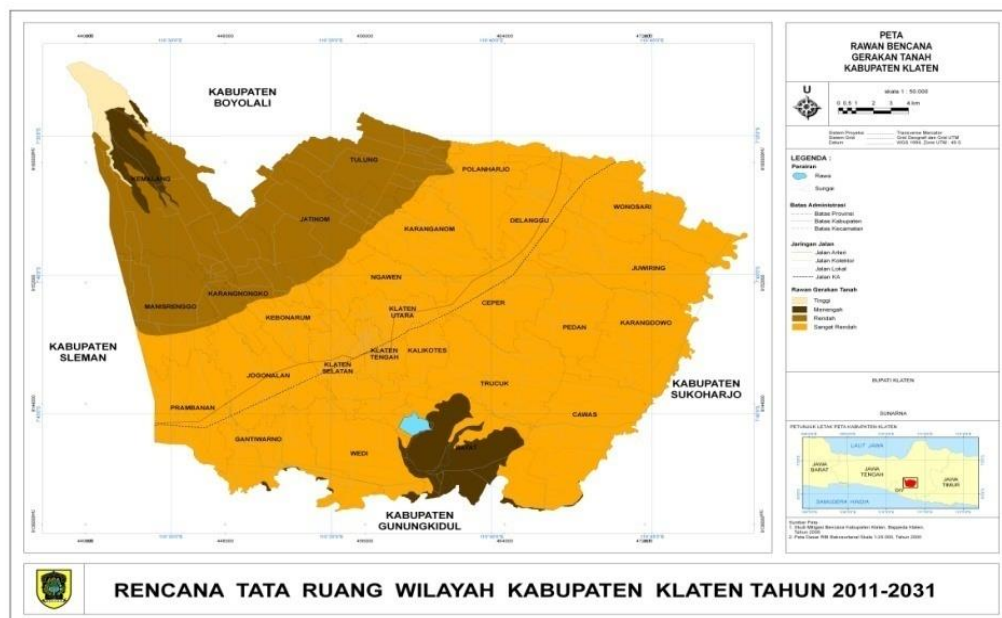
Gambar 2.7.  
Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten

10. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, dan beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi: Kecamatan Bayat; Cawas; Gantiwarno; Kemalang; Manisrenggo; Prambanan dan Wedi.

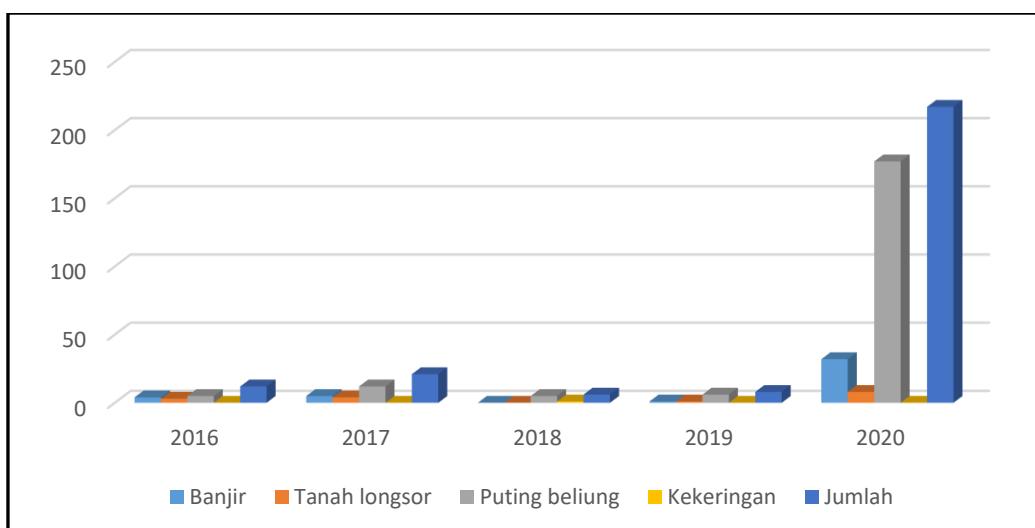
Peta kawasan rawan tanah longsor disajikan pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8.  
Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah

- b. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi: Kecamatan Bayat; Cawas; Ceper; Gantiwarno; Juwiring; Karangdowo; Pedan; Prambanan;





Grafik 2.1.  
Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2016-2020

Dari grafik dan tabel tersebut, bencana banjir selama 5 tahun khususnya di tahun 2020 terakhir sebanyak 217 kali, banjir 32 kali, longsor 8 kali, puting beliung 177 kali. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan) serta lahan pertanian.

Banjir yang terjadi tanggal 6 sampai 8 Maret 2019, melanda 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Wedi (Desa Pacing dan Melikan), Kecamatan Trucuk (Desa Gaden dan Kalikebo), Kecamatan Bayat (Desa Paseban, Desa Beluk, Desa Kebon, Desa Krikilan, Desa Tawangrejo, Desa Wiro, Desa Talang) serta Kecamatan Cawas (Desa Karangasem, Desa Bawak dan Desa Japanan). Banjir ini juga menyebabkan terendamnya tanaman padi seluas 50 hektar di Desa Karangasem, Cawas).

#### 2.1.1.7. Kondisi Daerah

##### a. Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2020 sebanyak 1.327.577 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Trucuk yaitu 82.226 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Kebonarum yaitu 21.140 jiwa. Jika dilihat dari pertumbuhannya, angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan. Angka pertumbuhan penduduk di tahun 2016-2017 sebesar 0,62%, tahun 2017-2018 sebesar 1,00%, tahun 2018-2019 sebesar 0,51%, dan tahun 2019-2020 sebesar 0,30%.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Dengan luas wilayah mencapai 655.56 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 1.327.577 jiwa di

tahun 2020, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten mencapai 2.025 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Klaten Tengah yaitu 4.805 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan untuk kepadatan terendah yaitu 781 jiwa/km<sup>2</sup> terdapat di Kecamatan Kemalang. Sebaran jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.  
Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Pertumbuhan Penduduk 2019-2020	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) 2019-2020	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
		2016	2017	2018	2019	2020				
1	Prambanan	51.861	52.112	52.662	52.824	52.957	133	0,25	24,43	2.168
2	Gantiwarno	40.618	41.060	40.609	40.696	41.443	747	1,84	25,64	1.616
3	Wedi	53.673	54.068	54.681	54.507	54.672	165	0,30	24,38	2.242
4	Bayat	64.399	64.680	65.148	65.649	65.771	122	0,19	39,43	1.668
5	Cawas	60.509	60.047	61.359	60.690	60.704	14	0,02	34,47	1.761
6	Trucuk	79.930	79.409	80.740	81.715	82.226	511	0,63	33,81	2.432
7	Kalikotes	37.465	20.532	20.910	20.935	38.217	205	82,55	12,98	2.944
8	Kebonaram	20.833	59.808	61.117	61.237	21.140	690	-65,48	9,67	2.186
9	Jogonalan	59.725	43.245	44.181	44.373	61.927	-37	39,56	26,7	2.319
10	Manisrenggo	43.521	37.371	38.247	38.096	44.336	271	16,38	26,96	1.645
11	Karangnongko	37.613	66.196	66.963	67.619	38.367	569	-43,26	26,74	1.435
12	Ngawen	46.039	48.592	48.831	48.990	47.304	10	-3,44	16,99	2.784
13	Ceper	65.587	46.144	45.176	45.256	68.188	301	50,67	24,44	2.790
14	Pedan	48.235	60.953	60.686	61.155	49.000	170	-19,88	19,17	2.556
15	Karandowo	45.617	64.494	64.760	64.770	45.557	-415	-29,66	29,23	1.559
16	Juwiring	60.211	43.917	43.248	43.661	61.325	-156	40,46	29,79	2.059
17	Wonosari	64.846	42.886	42.783	42.969	64.355	210	49,77	31,14	2.067
18	Delanggu	43.354	47.102	47.585	47.602	43.505	-196	-8,61	18,77	2.318
19	Polanharjo	42.551	55.386	55.283	55.419	43.179	386	-22,09	23,84	1.811
20	Karanganom	47.111	61.475	61.905	62.312	47.406	-129	-23,92	24,06	1.970
21	Tulung	54.401	39.467	39.721	40.064	55.805	279	39,29	32	1.744
22	Jatinom	60.262	46.697	46.697	47.368	62.183	-64	31,28	35,53	1.750
23	Kemalang	38.502	37.877	37.943	38.116	40.343	101	5,84	51,66	781
24	Klaten Selatan	44.474	48.315	48.416	49.265	45.546	-9	-7,55	14,43	3.156
25	Klaten Tengah	41.907	42.361	42.264	42.634	42.865	231	0,54	8,92	4.805
26	Klaten Utara	47.462	44.518	44.965	45.687	49.256	-141	7,81	10,38	4.745
<b>Jumlah</b>		<b>1.300.706</b>	<b>1.308.712</b>	<b>1.316.880</b>	<b>1.323.609</b>	<b>1.327.577</b>	3.968	3.968	655,56	<b>2.025</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, 2020

## b. Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pekerjaannya sangat beragam. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki

mata pencahariaan sebagai buruh harian lepas. Kemudian jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan status pelajar/ mahasiswa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan  
Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang/Jiwa)
1	Belum/tidak bekerja	226.291
2	Mengurus rumah tangga	135.582
3	Pelajar/Mahasiswa	244.874
4	Pensiunan	15.318
5	Pegawai Negeri Sipil	18.166
6	Tentara Nasional Indonesia	1.756
7	Kepolisian RI	1.724
8	Perdagangan	12.280
9	Petani/Pekebun	24.702
10	Peternak	746
11	Nelayan/Perikanan	33
12	Industri	506
13	Konstruksi	296
14	Transportasi	494
15	Karyawan Swasta	123.889
16	Karyawan BUMN	4.803
17	Karyawan BUMD	500
18	Karyawan Honorer	4.085
19	Buruh Harian Lepas	355.407
20	Buruh Tani/Perkebunan	34.596
21	Buruh Nelayan/Perikanan	101
22	Buruh Peternakan	205
23	Pembantu Rumah Tangga	454
24	Tukang Cukur	94
25	Tukang Listrik	99
26	Tukang Batu	2.238
27	Tukang Kayu	4.024
28	Tukang Sol Sepatu	42
29	Tukang Las/Pandai Besi	371
30	Tukang Jahit	2.620

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Orang/ Jiwa)</b>
31	Tukang Gigi	21
32	Penata Rias	176
33	Penata Busana	27
34	Penata Rambut	67
35	Mekanik	775
36	Seniman	311
37	Tabib	20
38	Paraji	25
39	Perancang Busana	17
40	Penterjemah	7
41	Imam Mesjid	15
42	Pendeta	125
43	Pastor	37
44	Wartawan	85
45	Ustadz/Mubaligh	68
46	Juru Masak	59
47	Promotor Acara	1
48	Anggota DPR-RI	0
49	Anggota DPD	0
50	Anggota BPK	2
51	Presiden	0
52	Wakil Presiden	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1
54	Anggota Kabinet/Kementerian	0
55	Duta Besar	0
56	Gubernur	0
57	Wakil Gubernur	0
58	Bupati	1
59	Wakil Bupati	0
60	Walikota	0
61	Wakil Walikota	0
62	Anggota DPRD Provinsi	4
63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	50
64	Dosen	728
65	Guru	10.529
66	Pilot	1

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang/ Jiwa)
67	Pengacara	55
68	Notaris	58
69	Arsitek	34
70	Akuntan	13
71	Konsultan	79
72	Dokter	527
73	Bidan	708
74	Perawat	1.511
75	Apoteker	168
76	Psikiater/Psikolog	10
77	Penyiar Televisi	1
78	Penyiar Radio	4
79	Pelaut	426
80	Peneliti	16
81	Sopir	2.836
82	Pialang	6
83	Paranormal	11
84	Pedagang	22.417
85	Perangkat Desa	2.606
86	Kepala Desa	399
87	Biarawati	28
88	Wiraswasta	55.103
89	Lainnya	11.113
<b>Jumlah</b>		<b>1.327.577</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2020

### c. Penduduk Menurut Struktur Umur

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten 68,73% didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 – 64 tahun yang mencapai 912.459 jiwa. Sedangkan 31,27% lainnya yaitu 415.118 jiwa merupakan penduduk usia non produktif dari usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.4.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2020

No	Usia	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4 tahun	80.567
2	5 - 9 tahun	92.845
3	10 - 14 tahun	95.917
4	15 - 19 tahun	93.806
5	20 - 24 tahun	92.918
6	25 - 29 tahun	91.066
7	30 - 34 tahun	90.076
8	35 - 39 tahun	105.717
9	40 - 44 tahun	101.588
10	45 - 49 tahun	94.533
11	50 - 54 tahun	93.544
12	55 - 59 tahun	81.393
13	60 - 64 tahun	67.818
14	65 - 69 tahun	50.598
15	70 - 74 tahun	34.335
16	75 tahun ke atas	60.856
<b>Jumlah</b>		<b>1.327.577</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2020

#### d. Piramida Penduduk

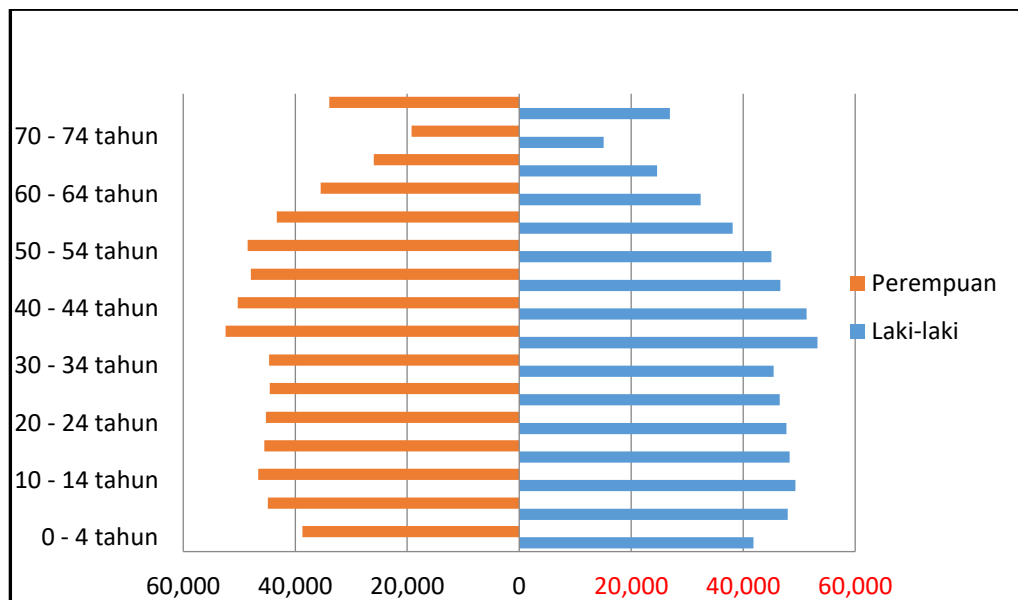
Piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dua diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya bisa menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri dan penduduk wanita di sebelah kanan. Grafik dapat menunjukkan jumlah penduduk atau prosentase jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total.

Tabel 2.5.  
Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten  
Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4 tahun	41.857	38.710	80.567
2	5 - 9 tahun	47.968	44.877	92.845
3	10 - 14 tahun	49.297	46.620	95.917
4	15 - 19 tahun	48.305	45.501	93.806
5	20 - 24 tahun	47.703	45.215	92.918

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
6	25 - 29 tahun	46.504	44.562	91.066
7	30 - 34 tahun	45.411	44.665	90.076
8	35 - 39 tahun	53.258	52.459	105.717
9	40 - 44 tahun	51.345	50.243	101.588
10	45 - 49 tahun	46.629	47.904	94.533
11	50 - 54 tahun	45.026	48.518	93.544
12	55 - 59 tahun	38.106	43.287	81.393
13	60 - 64 tahun	32.375	35.443	67.818
14	65 - 69 tahun	24.644	25.954	50.598
15	70 - 74 tahun	15.097	19.238	34.335
16	75 tahun ke atas	26.931	33.925	60.856
<b>Jumlah</b>		<b>660.456</b>	<b>667.121</b>	<b>1.327.577</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.2.  
Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020

Penduduk di Kabupaten Klaten sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia (usia 65 tahun ke atas). Namun jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif di Kabupaten Klaten masih sebesar 68,73%, sehingga masih didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 – 64 tahun sehingga angka ketergantungan penduduk tidak terlalu tinggi.

Berdasarkan jumlah penduduk yang tervalidasi, mengakibatkan pergeseran Rasio Beban Tanggungan (RBT) sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6.  
Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
		0-14	15-64	65+		
1	2016	267.469	906.650	126.587	1.300.706	43,46%
2	2017	275.208	907.665	125.839	1.308.712	44,18%
3	2018	263.474	911.174	142.232	1.316.880	44,53%
4	2019	272.466	903.579	147.564	1.323.609	46,49%
5	2020	269.329	912.459	145.789	1.327.577	45,49%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2020

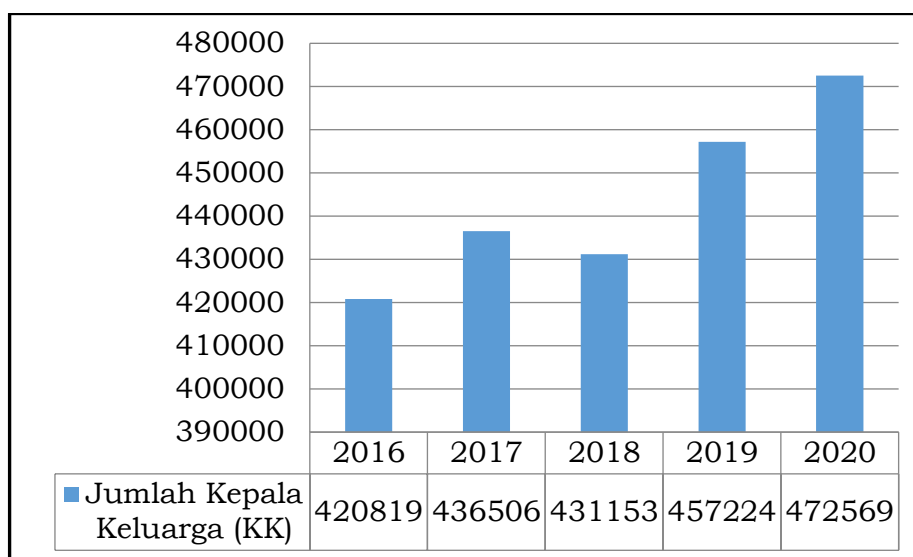
Disamping RBT sebagaimana tersebut di atas. jumlah Kepala Keluarga (KK) yang semula sejumlah 457.224 KK pada Tahun 2019 menjadi 472.569 KK pada Tahun 2020 (atau bertambah sebanyak 15.345 KK). Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri).

Tabel 2.7.  
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1	Tahun 2016	420.819
2	Tahun 2017	436.506
3	Tahun 2018	431.153
4	Tahun 2019	457.224
5	Tahun 2020	472.569

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2020

Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 2.3.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.3.

Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

## **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

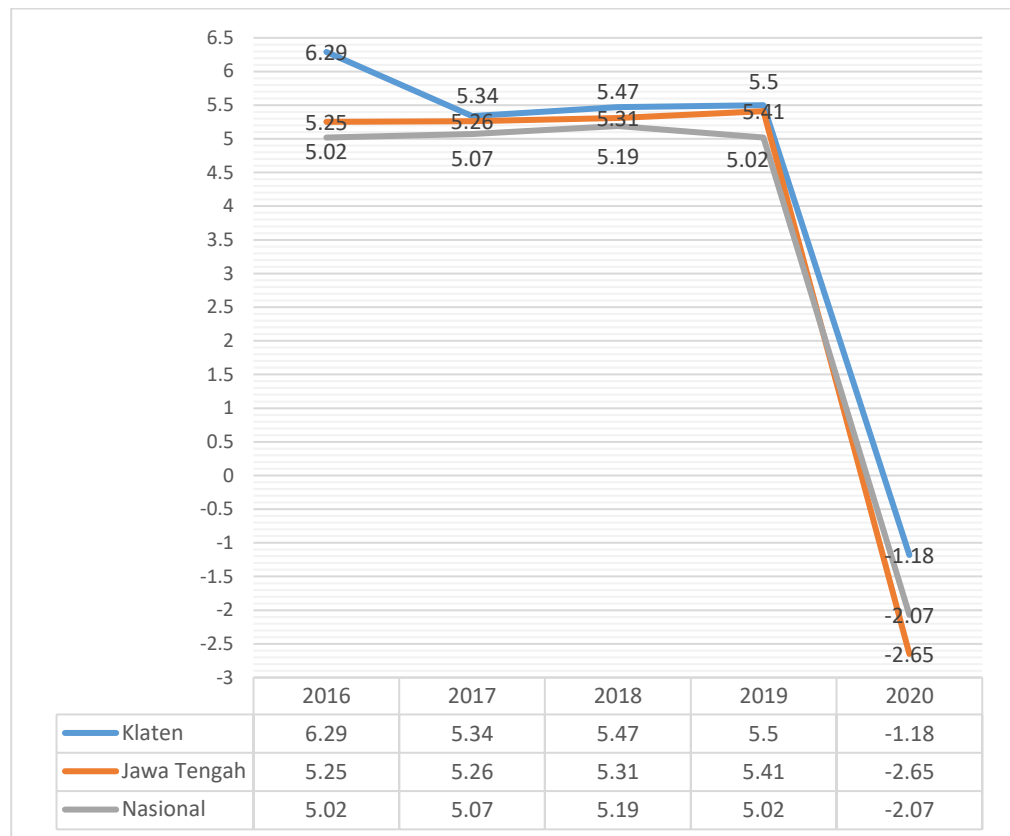
#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2019 menunjukkan kinerja positif. Hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Pada Tahun 2016 sebesar 6,29%, Tahun 2017 sebesar 5,34%, Tahun 2018 sebesar 5,47%, dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,50%. Hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang melambat dan mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar (1,18), hal ini disebabkan adanya dampak wabah pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan pergerakan masyarakat untuk berkerumun. Dimana jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka banyak sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan kecuali sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami kenaikan.

Demikian juga untuk pertumbuhan ekonomi baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional semuanya mengalami kontraksi yang menurun. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional mengalami kontraksi sebesar (2,65)%. Untuk pertumbuhan ekonomi provinsi mengalami kontraksi sebesar (2,07)%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi secara positif baik di tingkat nasional maupun daerah pada prinsipnya sama, yaitu untuk lapangan usaha sektor Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Disamping itu beberapa lapangan usaha yang memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap PDRB daerah maupun PDB yang dominan juga mengalami kontraksi menurun, sehingga hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Sektor lapangan usaha yang dominan tersebut meliputi lapangan usaha sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Industri Pengolahan.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 2.4.



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2021

Grafik 2.4.

Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2016-2019 tumbuh secara positif yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 - 2017 tumbuh melambat, sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tumbuh secara positif. Dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (1,18)%.

Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun  
2016-2020 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai (juta Rp)	(%)	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.814.072,15	2,99	2.845.097,06	1,10	2.908.070,61	2,21	2.925.616,92	0,60	2.987.750,18	2,12
B	Pertambangan dan Penggalian	635.553,28	2,93	664.166,20	4,50	685.313,55	3,18	706.900,93	3,15	705.045,28	(0,26)
C	Industri Pengolahan	8.004.239,75	6,15	8.504.714,04	6,25	9.013.718,21	5,98	9.601.710,72	6,52	9.485.050,46	(1,21)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	41.588,12	6,20	44.249,82	6,40	47.094,12	6,43	49.644,40	5,42	51.883,91	4,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.047,34	2,16	12.826,81	6,47	13.532,60	5,50	14.308,02	5,73	14.735,75	2,99
F	Konstruksi	1.435.985,49	5,87	1.531.575,76	6,66	1.635.233,26	6,77	1.745.775,03	6,76	1.711.576,48	(1,96)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.362.061,18	3,63	4.531.078,43	3,87	4.719.954,10	4,17	4.923.412,16	4,31	4.687.427,19	(4,79)
H	Transportasi dan Pergudangan	566.772,32	4,07	597.101,45	5,35	625.692,51	4,79	656.720,86	4,96	468.118,98	(28,72)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	883.680,17	6,11	944.707,06	6,91	1.018.074,62	7,77	1.098.344,48	7,88	1.043.075,16	(5,03)
J	Informasi dan Komunikasi	908.551,37	7,52	1.026.807,26	13,02	1.147.054,83	11,71	1.282.866,12	11,84	1.511.722,42	17,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	821.907,83	7,07	857.588,05	4,34	887.591,04	3,50	915.313,03	3,12	947.598,17	3,53
L	Real Estate	361.069,45	6,23	382.324,67	5,89	401.354,47	4,98	420.057,59	4,66	419.048,02	(0,24)
M.N	Jasa Perusahaan	77.484,45	9,19	83.734,52	8,07	90.076,27	7,57	96.931,07	7,61	90.106,90	(7,04)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	591.863,52	2,96	610.862,34	3,21	631.265,14	3,34	641.455,60	1,61	633.375,54	(1,26)
P	Jasa Pendidikan	1.520.064,74	5,66	1.607.474,21	5,75	1.720.401,03	7,03	1.842.721,54	7,11	1.839.363,29	(0,18)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260.226,42	7,86	282.328,51	8,49	307.894,68	9,06	336.313,36	9,23	364.377,77	8,34
R.S.T.U	Jasa lainnya	428.573,40	8,03	466.467,08	8,84	508.328,89	8,97	553.417,66	8,87	522.657,38	(5,56)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		23.725.740,98	5,17	24.993.103,27	5,34	26.360.649,93	5,47	27.811.509,49	5,50	27.482.912,88	(1,18)

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan Tabel 2.8. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dari sebesar Rp 23.725.740,98 juta pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar Rp 27.482.912,88 juta pada Tahun 2020 (naik sebesar Rp 3.757.171,90 atau 15,84%).

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada Tahun 2020, kontribusi terbesar atas dasar harga konstan masih disumbang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 37,39 % atau Rp 14.936.275,20 juta. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun dimana tumbuh tidak saja ditunjukkan dengan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah. Namun yang untuk tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan (1,21)% atau sebesar Rp 9.601.710,72 juta.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.810.348,98	12,05	3.880.677,98	11,36	4.085.964,24	11,04	4.181.908,12	10,51	4.371.379,48	10,94
B	Pertambangan dan Penggalian	1.030.613,84	3,26	1.112.144,57	3,25	1.177.376,22	3,18	1.245.553,58	3,13	1.253.648,24	3,14
C	Industri Pengolahan	11.381.482,63	36,00	12.446.837,51	36,42	13.611.869,50	36,79	14.727.480,24	37,03	14.936.275,20	37,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44.053,13	0,14	50.784,96	0,15	55.741,58	0,15	58.861,29	0,15	61.152,53	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.246,78	0,04	14.143,63	0,04	14.964,95	0,04	16.371,66	0,04	17.009,23	0,04
F	Konstruksi	1.914.709,83	6,06	2.094.601,40	6,13	2.333.361,55	6,31	2.552.697,54	6,42	2.520.283,15	6,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.292.431,30	16,74	5.631.766,56	16,48	6.000.014,15	16,22	6.430.015,48	16,17	6.145.077,58	15,38
H	Transportasi dan Pergudangan	645.183,06	2,04	690.596,13	2,02	729.681,82	1,97	779.971,91	1,96	572.539,83	1,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.091.254,92	3,45	1.180.067,24	3,45	1.284.456,54	3,47	1.404.195,46	3,53	1.357.399,84	3,40
J	Informasi dan Komunikasi	948.913,65	3,00	1.119.938,75	3,28	1.252.092,63	3,38	1.419.789,34	3,57	1.674.713,98	4,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.081.527,12	3,42	1.175.828,75	3,44	1.259.961,03	3,41	1.321.513,91	3,32	1.366.776,47	3,42
L	Real Estate	409.338,03	1,29	444.310,49	1,30	477.618,78	1,29	509.514,95	1,28	510.799,94	1,28
M,N	Jasa Perusahaan	102.585,38	0,32	115.088,85	0,34	126.797,73	0,34	139.716,72	0,35	132.489,52	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	792.119,46	2,51	844.376,28	2,47	882.410,22	2,39	908.656,78	2,28	910.583,18	2,28
P	Jasa Pendidikan	2.160.832,68	6,83	2.379.643,26	6,96	2.606.214,15	7,04	2.881.198,28	7,24	2.898.739,98	7,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	372.019,69	1,18	409.870,96	1,20	452.676,88	1,22	495.228,51	1,25	550.782,80	1,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	528.580,71	1,67	584.142,53	1,71	642.768,49	1,74	703.188,73	1,77	670.824,63	1,68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		31.619.241,19	9,07	34.174.819,85	8,08	36.993.970,46	8,16	39.775.862,50	7,52	39.950.475,58	0,44

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan Tabel 2.9, dapat diketahui bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dari sebesar Rp 31.619.241,19 juta pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar Rp 39.950.475,58 juta pada Tahun 2020 atau naik sebesar 26,39%.

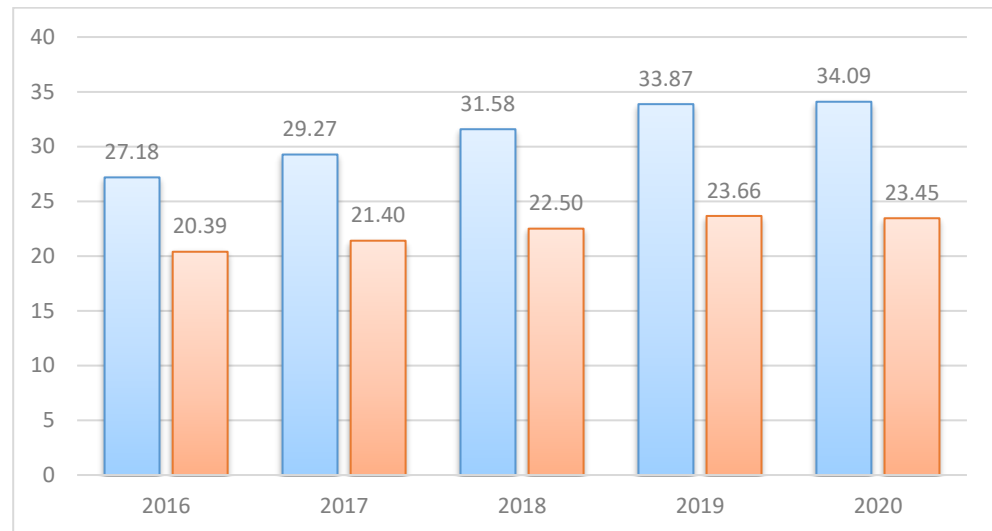
Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha juga terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang mengalami penurunan. Pada Tahun 2020, kontribusi terbesar Atas Dasar Harga Berlaku masih disumbang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 37,79% atau Rp 14.936.275,20 juta.

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Klaten rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.



Perkembangan PDRB perkapita di Klaten atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PDRB perkapita Kabupaten Klaten sebesar 27,18 juta rupiah, naik ditahun 2020 menjadi 34,09 juta rupiah. Berikut perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Gambaran pertumbuhan PDRB per Kapita sebagaimana Grafik 2.5.



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2021

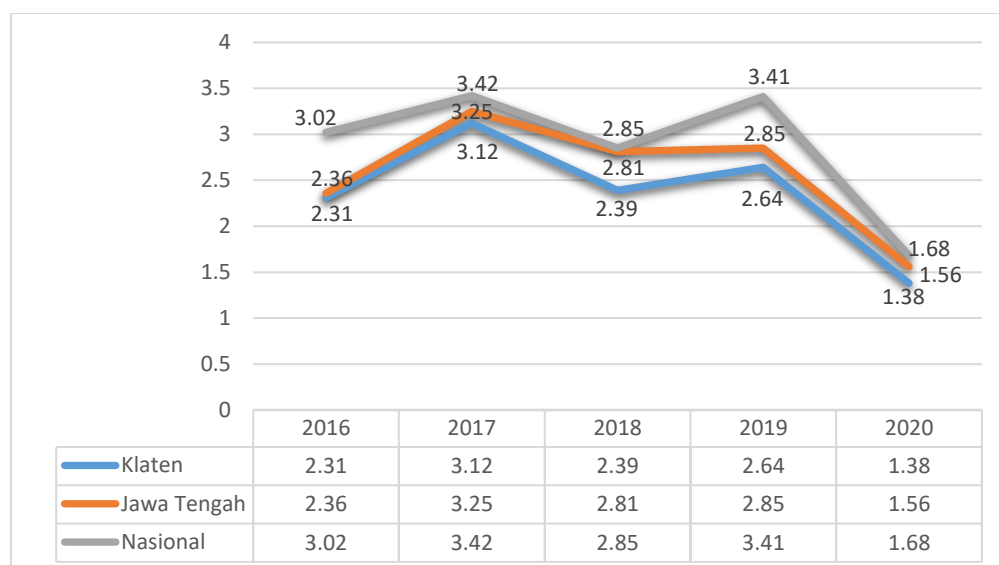
Grafik 2.5.

Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

## B. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016 sebesar 2,31%, atau lebih tinggi dibanding Tahun 2020 sebesar 1,38%. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh tingkat perubahan harga barang kebutuhan pokok dan penurunan daya beli masyarakat yang terpengaruh oleh dampak Covid-19. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Grafik 2.6.





Sumber : BPS Kab. Klaten dan Bank Indonesia, 2020

Grafik 2.6.

### Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 2.6. di atas, laju inflasi selama Tahun 2016-2019 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Tabel 2.10.

### Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2016-2020 di Solo Raya

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Surakarta	2,15	3,10	2,45	2,94	1,38
2.	Boyolali	2,65	3,08	2,19	2,75	NA
3.	Sukoharjo	2,69	3,40	2,31	NA	NA
4.	Karanganyar	1,93	3,15	2,48	NA	NA
5.	Wonogiri	2,94	2,32	2,63	NA	NA
6.	Sragen	2,49	3,18	2,49	2,44	NA
7.	<b>Klaten</b>	<b>2,31</b>	<b>3,12</b>	<b>2,39</b>	<b>2,64</b>	<b>1,38</b>
8.	<b>Jawa Tengah</b>	<b>2,36</b>	<b>3,71</b>	<b>2,82</b>	<b>2,85</b>	<b>1,56</b>
9.	<b>Nasional</b>	<b>3,02</b>	<b>3,61</b>	<b>3,13</b>	<b>3,41</b>	<b>1,68</b>

Sumber : Bank Indonesia Solo, 2021

Berdasarkan tabel 2.10, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Klaten sebesar 1,38% dimana data ini diambil dari tingkat inflasi Kota Surakarta yaitu sebesar 1,38%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak melaksanakan penghitungan tingkat inflasi daerah.

## C. Kemiskinan

### 1. Persentase Penduduk Miskin

Pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan selama ini diklasifikasikan ke dalam kemiskinan secara makro dan kemiskinan secara mikro. Kemiskinan makro oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang maupun masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan diukur dari sisi pengeluaran. Pengukuran ini menghasilkan data yang disebut dengan garis kemiskinan yang berfungsi sebagai acuan penentuan jumlah penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan yang diklasifikasikan ke dalam kemiskinan secara mikro didasarkan pada hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020. Kemiskinan makro lebih lanjut bermanfaat untuk perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan sebagai “*Early Warning System*”. sedangkan kemiskinan mikro bermanfaat sebagai intervensi program kegiatan “*By Name, By Address, By Case*”.

Berdasarkan hasil survey dari BPS, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sebesar Rp.419.510,00. sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2020 sebanyak 151.800 jiwa dengan persentase 12,89%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

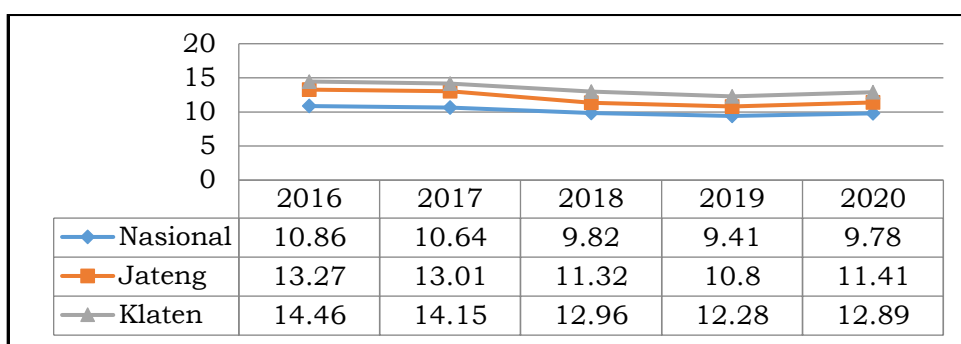
Tabel 2.11.  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
2016	1.486.426	1.163.218	168.010	14,46
2017	1.308.712	1.166.100	164.990	14,15
2018	1.314.781	1.171.411	151.700	12,96
2019	1.319.530	1.174.986	144.140	12,28
2020	1.327.577	1.178.501	151.800	12,89

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2021

Gambar kemiskinan Kabupaten Klaten pada rentang waktu tahun 2016-2019 menunjukkan penurunan angka sebagai perwujudan kinerja positif dengan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada DTKS tepat waktu. Akan tetapi gambar mengalami peningkatan pada tahun 2020 dikarenakan dampak dari wabah Covid-19. Persentase kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,61% yaitu dari tahun 2019 sebesar 12,28% naik menjadi 12,89% pada tahun 2020. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan guna menanggulangi peningkatan angka kemiskinan pasca Wabah Covid-19 melalui kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Jaring Pengaman Sosial Stimulus Covid-19 antara lain Kartu Pra-Kerja, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Listrik, Program Keluarga Harapan, dan Program Sembako.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2020

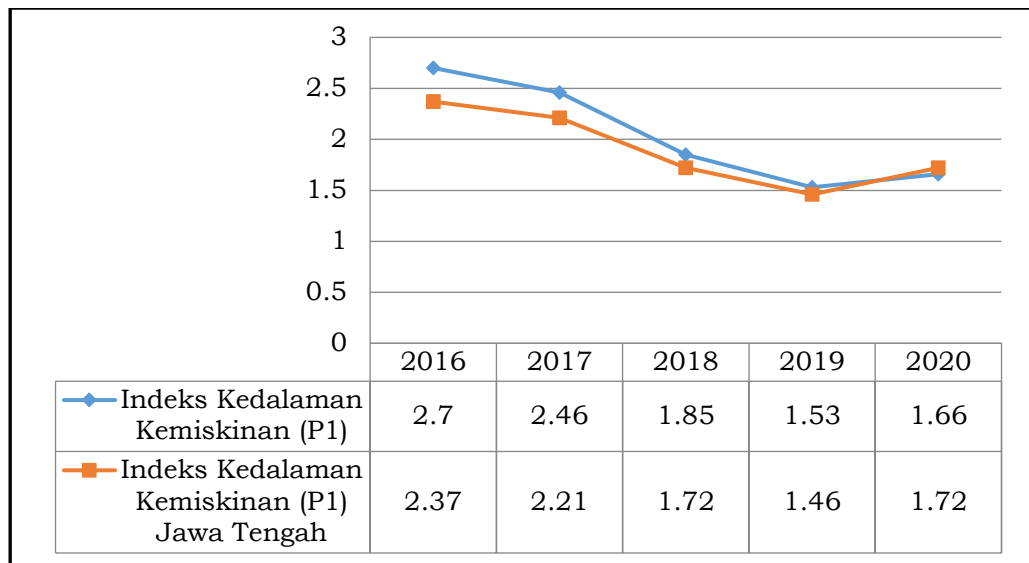
Grafik 2.7.

Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Kondisi kemiskinan baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional pada periode waktu Tahun 2016-2019 menunjukkan penurunan angka, meskipun pada tahun 2020 kondisi kemiskinan mengalami kenaikan pasca Covid-19. Persentase kemiskinan Kabupaten Klaten pada tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional.

## 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020 lebih tinggi daripada Jawa Tengah hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Klaten semakin menjauh dari garis kemiskinan, hanya saja Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2020 lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah dikarenakan dampak Covid-19. Gambaran posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik 2.8.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten. 2020

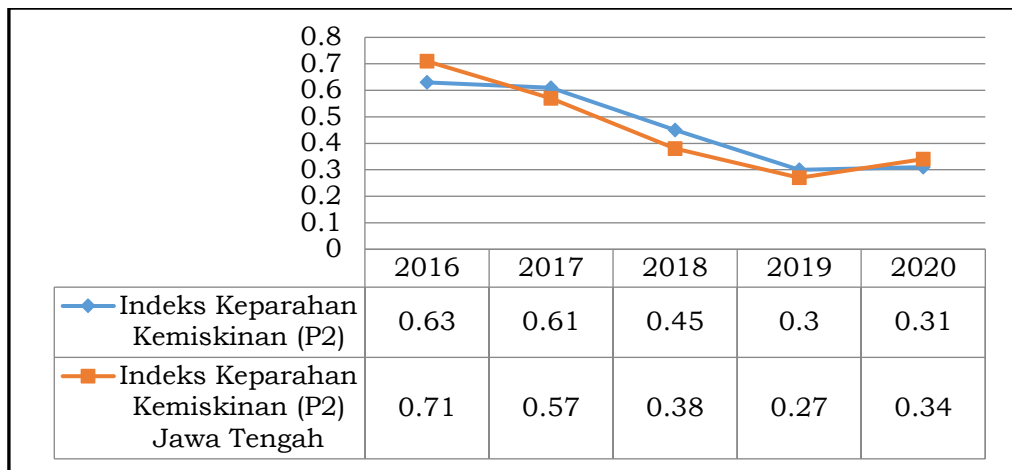
Grafik 2.8.

### Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2016-2020

Pada Grafik 2.8. menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 1,66 berada di bawah posisi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,72. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dalam kurun waktu empat tahun terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016-2019 perkembangan relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah, namun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten lebih rendah pada tahun 2020.

### 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016-2017, P2 Kabupaten Klaten berada dibawah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada tahun 2017-2019 P2 Kabupaten Klaten berada di atas Provinsi Jawa Tengah, dan pada tahun 2019-2020 P2 Kabupaten Klaten kembali berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 2.9.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten. 2020

Grafik 2.9.

### Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2016-2020

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi angka. Posisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 0,27 yang naik menjadi 0,31 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Klaten yang semakin tinggi.

## 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### A. Bidang Tenaga Kerja

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Gambaran perkembangan indikator kependudukan dan ketenagakerjaan Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2019 dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

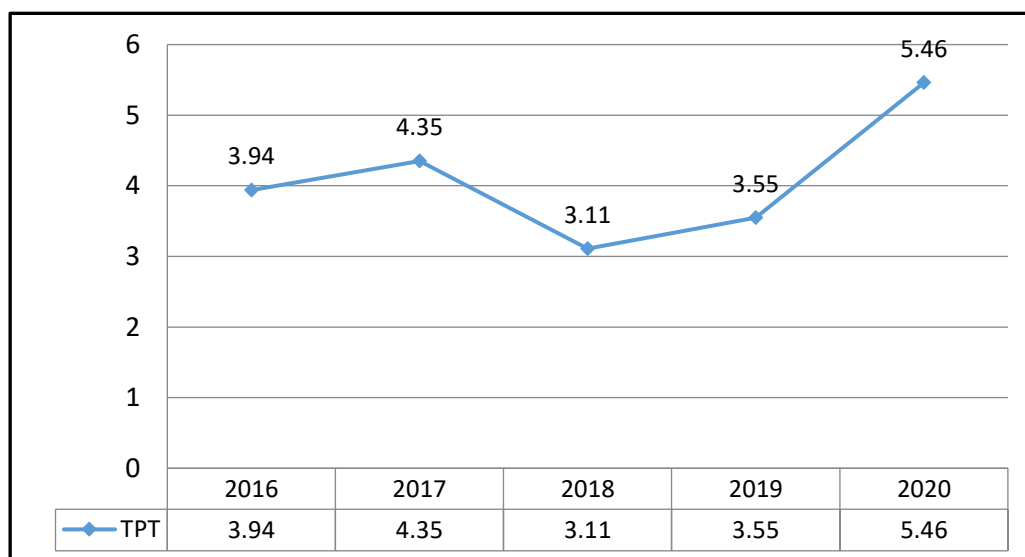
Tabel 2.12.  
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Satuan
Angka partisipasi angkatan kerja	84,76	66,93	73,58	81	68,79	%
Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,46	70,46	75,64	81,00	68,79	%

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Satuan
Tingkat pengangguran terbuka	3,94	4,35	3,11	3,55	5,46	%
Rasio penduduk yang bekerja	0,99	1,01	0,87	1	0,96	%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2020

Kondisi partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Klaten periode 2016-2020 bersifat fluktuatif, namun pada rentang tahun 2018-2020 kondisi partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Klaten mayoritas berasal dari luar daerah, sehingga meski usia produktif penduduk Kabupaten Klaten meningkat, namun jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten masih rendah karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga banyak lowongan kerja di Kabupaten yang belum terisi. Keadaan ini diperburuk dengan adanya Covid-19, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi penempatan tenaga kerja lewat sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara) ataupun penyelenggaraan pelatihan kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Grafik 2.10

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 selalu meningkat dengan ditunjukkan meningkatnya persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Perkembangan UMK tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13.  
Perkembangan Upah Minimal Kabupaten Kota (UMK) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
UMK	1.400.000	1.528.478	1.661.632.35	1.795.061.43	1.947.821.16

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2020.

Perhitungan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) menurut PP Nomor 78 Tahun 2015 perhitungannya melihat Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) tahun sebelumnya. Inflasi Nasional dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jika dilihat dari tabel diatas Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) mengalami kenaikan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) yang hampir setiap tahun mengalami kenaikan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini memunculkan banyak permasalahan tidak hanya di bidang kesehatan namun di bidang ketenagakerjaan juga terkena dampak dengan banyaknya para pekerja yang terkena PHK.

### 1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Dalam sebuah perusahaan. baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Hal tersebut disebabkan karena masih ada perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berikut angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.14.  
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	20	6,38	4,47	10,06	11,98	%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Klaten masih tinggi pada tahun 2019. Sementara di tahun 2020 juga mengalami kenaikan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terdapat kegiatan PSBB, sehingga banyak perusahaan/industri terkena dampaknya.

## 2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Perjanjian Besama (PB) merupakan jalan keluar yang ditempuh dalam hubungan industrial agar hubungan kerja dapat berjalan harmonis antara pihak pengusaha/perusahaan dan pekerja. Di Kabupaten Klaten. berikut besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Tabel 2.15.  
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun						Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	20	29,41	79	57,10	66,7	55,56	%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa belum semua kasus di Kabupaten Klaten dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama. Masih ada permasalahan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Di sisi lain Pemerintah Daerah belum mempunyai kewenangan untuk menindak pengusaha yang tidak mematuhi sistem pengupahan atau peraturan tenaga kerja lainnya.

## 3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Pencari kerja yang terdaftar dapat difasilitasi penempatannya melalui sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Berikut besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020.

Tabel 2.16.  
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	35,15	22,19	20,56	17,27	21,11	%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan di Kabupaten Klaten masih rendah. Lowongan kerja



yang ada belum sesuai dengan kultur, skill, dan ketrampilan angkatan kerja karena investasi yang masuk cenderung membutuhkan keahlian khusus sehingga penempatan tenaga kerja masih rendah. Sehingga, perlu dilakukan beberapa upaya untuk memperbesar peluang kerja seperti pemenuhan target jumlah lowongan kerja yang tersedia, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, serta pemenuhan jumlah sarana dan prasana pelatihan yang memadai.

#### 4. Keselamatan dan perlindungan

Dalam pasal 86 Undang-Undang No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Di Kabupaten Klaten, keselamatan dan perlindungan bagi pekerja masih rendah dimana Tahun 2015 sebesar 9,24% dan tahun 2016 turun menjadi 8,69%. Sementara untuk tahun 2017-2020 tidak tersedia data. Untuk mengatasi hal tersebut, perlunya diberlakukannya perlindungan K3 yang bertujuan guna memelihara keselamatan dan juga kesehatan pekerja di lingkungan kerja. Dengan begitu, risiko terjadinya kecelakaan kerja dan hilangnya nyawa manusia karena beban profesi menjadi lebih kecil. Perusahaan pun terhindar dari sanksi karena dianggap lalai menjaga keselamatan para bawahannya.

#### 5. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Selain keselamatan dan perlindungan bagi pekerja juga diwajibkan setiap pekerja menjadi peserta program jamsostek. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan program perlindungan sosial-ekonomi tenaga kerja yang merupakan hak setiap pekerja di Indonesia. Prinsipnya juga sama dengan asuransi, Jamsostek mengalihkan pertanggung jawaban risiko karyawan kepada pihak ketiga, sehingga perusahaan tidak dibayangi oleh ketidakpastian.

Tabel 2.17.  
Besaran pekerja/buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	99,18	86,04	82,59	71,48	43,12	%

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menurun, dikarenakan jumlah tenaga kerja juga menurun sehingga kedepannya diperlukan peningkatan jumlah pekerja/buruh yang didaftarkan pula menjadi Peserta Program Jamsostek.

#### **6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**

Pelatihan kewirausahaan (*Entrepreneurship Training Program*) merupakan program yang cenderung fokus dalam membangun pengetahuan dan keterampilan secara eksplisit dalam persiapan untuk memulai suatu usaha, dimana dalam program pelatihan ini menuntun peserta untuk terlibat kedalam praktek. Dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 yaitu 59,26%. Kondisi tersebut masih diperlukan peningkatan dikarenakan terdapat tujuan dan manfaat pelatihan sebagai berikut: 1) mempersingkat masa belajar untuk memenuhi standar kinerja yang ditentukan, 2) meningkatkan kinerja pekerjaan, 3) membentuk sikap dan tingkah laku para pengusaha dalam menjalin hubungan baik antar pengusaha, pengusaha dengan patner bisnis, pengusaha dengan karyawan, maupun pengusaha dengan konsumen, 4) memecahkan masalah-masalah operasional perusahaan sehari-hari, 5) mempersiapkan para pengusaha memperoleh keahlian dalam bidang tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai pelatihan kewirausahaan.

### **B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **1. Pemberdayaan Perempuan**

Negara telah menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara yang tertuang dalam UUD 1945. Setidaknya terdapat 27 (dua puluh tujuh) hak-hak konstitusional perempuan yang secara umum dibagi dalam 3 (tiga) kategori yakni: hak-hak sipil, hak-hak sosial, dan hak-hak politik.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Berikut

persentase dan proporsi partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, parlemen, dan swasta yang ada di Kabupaten Klaten.

**a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2016 yaitu 25,86% dimana kemudian kondisinya semakin menurun pada tahun 2018 yaitu 22,67%. Namun kemudian, meningkat di tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga pemerintahan semakin tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.  
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	25,86	23,1	22,67	59,87	60,45	%

Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2020

**b. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR**

Meningkatkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak partisipasi perempuan di bidang politik untuk bangkit dari ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan, seperti politik, ekonomi, hukum serta bidang lainnya. Upaya ini sekaligus mendukung kemajuan pembangunan di bidang lain, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kesetaraan gender. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Klaten pada tahun 2016-2018 yaitu 6% meningkat pada tahun 2019 yaitu 18%. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan untuk berpartisipasi menjadi anggota DPR semakin tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.  
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR  
Kab. Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	NA	6,00	6,00	18,00	16,00	%

Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2020

**c. Rasio KDRT**

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Angka rasio KDRT di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 0,68% kemudian meningkat menjadi signifikan menjadi 3,36% di tahun 2019, meskipun di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 nilai rasio KDRT sudah menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.20.  
Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio KDRT	0,68	0,25	0,29	3,36	0,0048	%

Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio KDRT Klaten 2020} &: \frac{\text{Angka KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga 2020}} \times 100\% \\ &: \frac{21}{434282} \times 100\% = 0.0048\% \end{aligned}$$

Rasio KDRT yang semakin menurun menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran perempuan untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain menjadi suatu permasalahan karena masih banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu perlu upaya perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

**d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Untuk mengetahui kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Klaten semakin meningkat, dimana pada tahun 2015 sebesar 9,95 dan di tahun 2016 sebesar 10,26. Pada tahun 2020 diperkirakan partisipasi perempuan di lembaga swasta semakin rendah karena dampak dari pandemi Covid-19 yang menghentikan sebagian sektor perekonomian.

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1) Indeks Pembangunan Gender (IPG);**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja

peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	73,97	96,54	96	96,04	96,17

Sumber :BPS. Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2020.

Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Klaten cukup baik. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Klaten menempati urutan ke enam se Jawa Tengah dengan capaian IPG 96,17. Capaian IPG ini menunjukkan rendahnya kesenjangan gender serta semakin baiknya pembangunan responsive gender.

## 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22.  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	NA	6,00	6,00	18,00	16,00
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager. Profesional. Administrasi. Teknisi (%)	NA	43,65	52,71	55,73	60,72
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	NA	37,76	37,77	37,81	37,72
4	IDG	NA	59,60	60,25	72,35	69,42

Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.22 sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2016-2020 bersifat relatif naik. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

## 2. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan

perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2016-2020

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2016	11	16	2	8	0	29	0	6	0	1	73
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57
2020	4	11	1	8	0	13	0	3	0	0	40
Jumlah	37	48	17	29	5	91	5	30	1	1	264

Sumber :P2TP2A Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.23 sebagaimana tersebut di atas, di tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami penurunan sebesar 17 kasus dari Tahun 2019 sebesar 57 kasus menjadi 40 kasus di Tahun 2020. Hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang penanganan pertama pada kasus kekerasan di wilayah setempat. Pada umumnya warga masyarakat masih malas untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikarenakan hal tersebut dianggap tabu atau memalukan jika diketahui oleh banyak orang.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Klaten akan berdampak besar terhadap pemutusan hubungan kerja bagi pekerja baik laki-laki maupu perempuan, sehingga hal ini membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah daerah untuk memberikan akses pelatihan dan usaha dengan lebih memberdayakan kaum perempuan agar lebih berdaya dalam menghadapi dampak Covid-19 ini.

Dengan pemutusan hubungan kerja ini juga akan berdampak pada kondisi psikis yang diakibatkan karena kondisi ekonomi keluarga yang akan berdampak pada banyak kondisi, seperti terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyak kerentanan-kerentanan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Peran dan kontrol pemerintah daerah sangat penting dalam hal ini.

### C. Bidang Pangan

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten untuk komoditas beras saat ini mencapai surplus, namun demikian dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang belum juga menampakkan adanya tanda-tanda adanya penurunan penyebaran, bahkan kondisi saat ini semakin menunjukkan



adanya peningkatan penyebaran virus sehingga mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan (*social distancing*), bahkan di Jawa-Bali, saat ini juga diberlakukan adanya diterapkannya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 360/016/32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Klaten mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021 yang pasti akan berdampak pada masyarakat, terutama di sisi ekonomi khususnya pada sektor pangan. Masyarakat banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan yang berdampak pada penurunan pendapatan.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sembako maupun relaksasi subsidi pajak kepada masyarakat yang terdampak dan telah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi serta adanya peningkatan daya beli masyarakat, tetapi perekonomian belum bisa pulih seperti semula. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya ketahanan pangan dan cadangan pangan daerah dengan pengembangan pertanian yang berkonsep Pengembangan Pertanian Terpadu Berbasis Teknologi, agrowisata dan agropolitan serta menerapkan pola tanam yang benar, Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Diversifikasi Pangan Lokal, stabilitas harga dan stok cadangan pangan, serta jaminan pembelian produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan Lumbung Pangan yang bekerjasama dengan Bumdes dengan memberdayakan masyarakat. Jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun terakhir (2020) disajikan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.  
Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2020

No	Komoditi	Prod	Ketersediaan	Kebutuhan	+/-	Konsumsi Per Kapita	Faktor Konversi
		(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(kg/kap/tahun)	(100-angka susut)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Padi	450.411,66	267.611,10	126.542,93	141.068,17	95,90	62,74%
2	Jagung	86.430,44	76.923,09	1.055,62	75.867,46	0,80	89,00%
3	Kedelai	1.282,34	1.213,87	13.195,30	-11.981,43	10,00	94,66%
4	Kacang Tanah	912,10	788,87	131,95	656,92	0,10	86,49%
5	Kacang Hijau	810,36	753,63	263,91	489,73	0,20	93,00%
6	Ubi Kayu	24.190,76	23.191,68	8.576,95	14.614,73	6,50	95,87%
7	Ubi Jalar	520,04	457,64	1.319,53	-861,89	1,00	88,00%
8	Gula	3.195,97	3.164,65	5.827,92	-2.663,27	4,42	99,02%
9	Daging	2.194,44	2.084,72	8.313,04	1.398,73	6,30	95,00%
10	Telur	10954,85	10.730,28	8.972,80	1.757,47	6,80	97,95%
11	Susu	6.133,73	5.170,73	2.771,01	2.399,72	2,10	84,30%
12	Ikan	28.415,34	27.562,88	20.584,67	6.978,22	15,60	97,00%

No	Komoditi	Prod	Ketersediaan	Kebutuhan	+/-	Konsumsi Per Kapita	Faktor Konversi
		(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(kg/kap/tahun)	(100-angka susut)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Cabai Merah	516,17	500,69	3.853,03	-3.352,34	2,92	97,00%
14	Cabai Rawit	522,19	516,97	4.816,28	-4.299,31	3,65	99,00%
15	Bawang Merah	95,00	92,15	3.694,68	-3.602,54	2,80	97,00%

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2021

Berdasarkan Tabel 2.24 sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa pada Tahun 2020 ketersediaan padi surplus sebesar 141.068,17 ton. Peningkatan ini dipengaruhi dengan penggunaan bibit varietas unggul, teknik pola tanam yang tepat, dan pengendalian hama serta cuaca/iklim yang mendukung. Sedangkan untuk komoditas kedelai dan ubi jalar, perkembangannya masih melambat karena cuaca ekstrim yang tidak menentu, sehingga banyak tanaman kedelai dan ubi jalar yang mengering sebelum waktunya panen. Hasil produksi tanaman pangan padi, kedelai, jagung maupun ketahanan pangan dan cadangan pangan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap perolehan skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah. Berikut gambaran dari indikator pertanian yang meliputi Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Penguatan cadangan pangan, dan Penanganan daerah rawan pangan.

Tabel 2.25.  
Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	91,7	91,9	92,5	92,75	84,80
Penguatan cadangan pangan (Kg)	7.725	9.000	12.000	11.250	36.000
Penanganan daerah rawan pangan (lokasi)	8	4	2	1	4

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2020

Tabel 2.26.  
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,7	91,9	92,5	92,75	84,80
2.	Ketersediaan pangan utama (beras)	ton	239.374,00	225.935,00	265.060,98	279.174,31	267.611,10



No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita/hari	2.638	2.717	2.798	2.881	3.003
4.	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	71,38	73,52	75,72	77,99	80,87
5.	Penguatan cadangan pangan	Kg	7.725	9.000	12.000	11.250	36.000
6.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	lokasi	8	4	2	1	4
7.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	57	60	65	73	78

Sumber : DPKPP Kabupaten Klaten, 2021

Pada tabel tersebut diketahui bahwa pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Klaten hingga tahun 2019 meningkat menjadi 92,75, tapi pada tahun 2020 menurun menjadi 84,80. Hal ini disebabkan akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap keanekaragaman asupan bahan pangan bergizi berkurang. Namun demikian, di sisi lain untuk penguatan cadangan pangan meningkat signifikan dari 11.250 kg di tahun 2019 menjadi 36.000 kg di tahun 2020. Hal tersebut juga dikarenakan akibat adanya pandemi Covid-19 yang menganjurkan masyarakat untuk tetap tinggal dirumah, tidak berkerumun atau melakukan aktivitas publik lainnya sehingga menurunkan keragaman maupun konsumsi pangan. Di sisi lain dengan adanya kebijakan program pemerintah berupa pemberian bantuan kebutuhan pangan kepada masyarakat sehingga dapat membantu menguatkan cadangan pangan masyarakat. Namun demikian cadangan pangan masyarakat perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian untuk mengatasi dan menangani kondisi rawan pangan di daerah di Kabupaten Klaten, pada tahun 2020 penanganannya dilakukan di 4 (empat) lokasi. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 1 (satu) lokasi.

Sedangkan indikator secara langsung yang mempengaruhi skor Pola Pangan Harapan tersebut antara lain kecukupan gizi masyarakat dan kebutuhan akan kalori. Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/ Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/ Permentan/ OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2200 kkal/hari bagi setiap

penduduk dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah adalah 2000 kkal.

Pemahaman angka kecukupan gizi adalah suatu kecukupan masyarakat merupakan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein. Ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Klaten semakin meningkat hingga tahun 2020. Berikut ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Klaten

Tabel 2.27.  
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan energi per kapita (kkal/ kapita/ hari)	2.638	2.717	2.798	2.881	3.003
Ketersediaan protein per kapita (kkal/ kapita/ hari)	71,38	73,52	75,72	77,99	80,87

Sumber : DPKPP Kabupaten Klaten, 2020

Selain memperhatikan kebutuhan perkapita akan kalori maupun asupan gizi masyarakat, masih diperlukan juga adanya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan diperlukan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena pencemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/ perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Berikut kondisi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.28.  
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	57	60	65	73	78

Sumber : DPKPP Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu meningkat. Namun angka tersebut masih di bawah standar mutu Nasional (100%). Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah secara garis besar diarahkan pada kegiatan: (1) koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar; dan (2) pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar. Namun pada pelaksanaannya, secara garis besar arah kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meminimalkan beberapa permasalahan, seperti: (1) kurangnya komitmen daerah terhadap penanganan keamanan pangan; (2) rendahnya pemahaman produsen, konsumen termasuk aparat mengenai penanganan keamanan pangan segar; (3) adanya pelaku usaha buah dan sayur yang belum menerapkan *good practices* pada kegiatannya; (4) kendala administrasi dalam pencairan anggaran; (5) terbatasnya SDM, sarana prasarana dan laboratorium yang telah diakreditasi; (6) masih kurangnya kerja sama/koordinasi antara instansi terkait dalam mempromosikan keamanan pangan segar; (7) belum optimalnya perencanaan kegiatan, dan lain-lain.

Disamping itu, dalam upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah Kabupaten Klaten sudah memiliki beberapa kelompok tani dengan cakupan bina kelompok tani yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini dapat dilihat perkembangan cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.29.  
Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Bina Kelompok Tani	29,90	30,25	31,19	31,19	32,50

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020

Langkah-langkah operasional diperlukan untuk penguatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kendati lembaga kelompok tani telah demikian banyak dibentuk, namun cukup sulit saat ini untuk menemukan kelompok tani yang aktif, di mana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja usahatani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain: (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan

akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota.

Secara teknis upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meskipun demikian, pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM dan organisasi lainnya yang dipandang mampu untuk dilibatkan dalam penguatan kelompok tani.

Disamping itu sampai dengan Tahun 2019 jumlah gapoktan sesuai SK Bupati Kabupaten Klaten adalah 397 Gapoktan, tetapi baru 20 Gapoktan yang telah mendapatkan kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), sehingga masih banyak Gapoktan yang perlu mendapatkan penguatan sebagai Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Sebaran lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.30. Pada tahun 2020 kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan.

Tabel 2.30.

Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016-2020

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelompok</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	2016	20	14	20
2	2017	22	13	22
3	2018	15	12	15
4	2019	16	10	16
5	2020	49	21	49
	Jumlah	122	70	122

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021

Berdasarkan Tabel 2.30 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa lokasi pemanfaatan lahan pekarangan/rumah pangan lestari mengalami kenaikan pada Tahun 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya sudah banyaknya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan dan makin sempitnya lahan pekarangan yang dimiliki serta adanya bantuan pengembangan rumah pangan lestari bagi Kelompok Wanita Tani (KWT).



#### D. Bidang Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Klaten memiliki sumber daya alam, khususnya sumber mata air yang melimpah hampir di seluruh kawasan lereng merapi. Keberadaan sumber mata air ini merupakan potensi lokal daerah yang banyak dimanfaatkan oleh petani dan masyarakat setempat untuk budidaya ikan di sawah, kolam dan keramba.

Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan kolam.

Gambaran Produksi Ikan dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31.  
Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi benih ikan (ekor)	133.000.780	131.106.900	132.814.750	137.635.312	109.000.000
Produksi perikanan (ton)	28.316.54	25.029.97	26.680.87	28.276.03	27.603.83
Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	17,78	18,50	19,18	20,04	20,28

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa produksi perikanan mengalami peningkatan hingga tahun 2019, dan penurunan di tahun 2020. Peningkatan produksi perikanan dipengaruhi oleh adanya bantuan benih ikan serta subsidi pakan ikan dan berbagai pelatihan manajemen tata kelola budidaya ikan, dan salah satu penyebab penurunan produksi ikan yaitu adanya bencana banjir yang melanda lahan pembudidaya.

Sedangkan perkembangan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten tidak terlalu signifikan, dimana tingkat konsumsi ikan pada tahun 2019 sebesar 20.04 Kg/kapita/Tahun dan tahun 2020 yaitu sebesar 20.28 Kg/kapita/Tahun. Pencapaian tersebut masih jauh dari target provinsi sebesar 33.48 Kg per kapita dan target nasional yang sebesar 56.39 Kg per kapita per tahun. Untuk mendorong pencapaian tingkat konsumsi ikan di kalangan masyarakat, perlu adanya sosialisasi dan pelaksanaan gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARI). Selain itu nelayan atau pembudidaya ikan juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kabupaten Klaten terutama dalam hal peningkatan kesejahteraannya.

Berikut beberapa kelompok nelayan yang masuk dalam cakupan bina kelompok nelayan dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Tabel 2.32.  
Data Realisasi Kelompok Nelayan di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan bina kelompok nelayan	299	299	299	299	299	pokdakan
Produksi perikanan kelompok nelayan	496,2	506,1	516,5	153	184	ton
Nilai tukar nelayan	109,24	112,51	118,91	120,68	109,09	NTN

Sumber: DPKPP Kab. Klaten. 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Klaten ada 299 pokdakan dengan produksinya setiap tahun mengalami penurunan. Sehingga diperlukan fasilitasi dalam peningkatan penguatan kelembagaan kelompok nelayan melalui penyuluhan-penyuluhan. Dan pada tahun 2019 nilai tukar nelayan mengalami peningkatan, namun di 2020 mengalami penurunan dampak dari pandemi Covid- 19.

Mewabahnya pandemi Covid-19 juga berdampak di sektor kelautan dan perikanan, sehingga terjadi penumpukan bahan baku ikan atau *over stock* karena belum dapat disuplai ke luar daerah sebagaimana biasanya serta meningkatnya harga pakan ikan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu adanya fasilitasi bantuan bibit ikan lele dan nila, pakan ikan dan bioflog sebagai tempat budidayanya, perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ikan melalui media online untuk pemasarannya, serta kampanye gemar makan ikan dalam rangka untuk meningkatkan protein guna meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh.

#### E. Bidang Transmigrasi

Jumlah transmigran di Kabupaten Klaten masih tergolong rendah dikarenakan kurang minatnya masyarakat Kabupaten Klaten untuk bertransmigrasi. Daerah persebaran penempatan transmigrasi juga dari tahun ke tahun yang diminati masyarakat adalah hanya di 3 (tiga) lokasi yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Berikut peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.33.



Tabel 2.33.  
Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan  
Tahun 2016-2020

TAHUN	Sumatra		Kalimantan		Sulawesi	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	5	20	10	46	4	17
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-
2019	-	-	14	65	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sumber : Disperinaker Kabupaten Klaten. 2020

Berdasarkan Tabel 2.33 sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan berkurangnya kuota penempatan transmigran asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan kuota dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di tahun 2020 tidak ada penempatan transmigran dikarenakan terdampak pandemi Covid-19 dan *refocusing* anggaran yang lebih diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi tersebut.

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### A. Bidang Kebudayaan

##### 1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Beberapa indikator yang termasuk seni budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yaitu Penyelenggaraan festival seni dan budaya; Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi; dan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Berikut perkembangan indikator yang termasuk Seni Budaya:

Tabel 2.34.  
Perkembangan Indikator Seni Budaya Kab. Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	30	31	31	40	7	Even
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	93	93	93	98	132	Lokasi
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	0	1	-
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	0	0	0	3	-

Sumber : Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olah Raga, 2020

Kabupaten Klaten terkenal dengan seni budayanya yang khas seperti seni lurik, ketoprak, wayang, dan lainnya. Namun berdasarkan tabel tersebut diatas, kondisi Pandemi Covid-19 tahun 2020 mempengaruhi penyelenggaraan festival seni dan budaya sebab adanya PSBB mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya, karena otomatis kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan yang merupakan salah satu larangan atau aturan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Namun saat ini Pemerintah Kabupaten Klaten mengizinkan pentas seni dan budaya, serta hiburan di tengah masyarakat. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Klaten Nomor 431/484/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyelenggaraan Pentas Seni Budaya atau Hiburan Masyarakat, Hajatan dan Pembukaan Situs Cagar Budaya Tertentu pada Masa Pandemi Covid-19. Harapannya dengan adanya perizinan tersebut meningkatkan kegiatan seni dan budaya serta kreativitas masyarakat di bidang seni dan budaya sehingga pelestarian seni dan budaya tetap terjaga, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan klaster baru kasus Covid-19. Inventarisasi cagar budaya pada tahun 2020 jumlahnya meningkat berdasarkan hasil survey di sepanjang Trans Jalur Tol Yogyakarta – Solo. Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu tersebut merupakan Cagar Budaya yang dijadikan obyek wisata dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.35.  
Jumlah Penyelenggaraan Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020	
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	30	31	31	40	7	Even

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyelenggaraan festival seni budaya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 terdapat penurunan 33 event kegiatan karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan gambaran jumlah sarana prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya yaitu sebagai berikut:





2. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Gambaran jumlah sarana prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.36.  
Jumlah Sarpras Penyelenggaraan Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	93	93	93	98	132	Lokasi
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	0	1	
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	0	0	0	3	

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020

Kabupaten Klaten memiliki keuntungan geografis karena berada di tengah kawasan Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan pusat perpaduan peradaban antar zaman. Sejak tahun 2019 terdapat peningkatan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten. mengingat Kabupaten Klaten memiliki banyak potensi benda cagar budaya sehingga perlu upaya pelestarian untuk melindungi benda, situs dan kawasan cagar budaya. Dibutuhkan sarana prasarana pendukung sebagai langkah pelestarian benda cagar budaya di wilayah Kabupaten Klaten.

**B. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Perkembangan indikator yang termasuk kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.  
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase organisasi pemuda yang aktif	55	69	69	69	76	%
Persentase wirausaha muda pemula	10	15	15	15	19	%
Cakupan pembinaan olahraga	34	36	36	36	36	Cabor
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	55	57	60	67	80	Orang
Cakupan pembinaan atlet muda	465	390	475	500	330	Orang
Jumlah atlet berprestasi (Dinas)	166	5	167	178	111	Orang
Jumlah atlet berprestasi (KONI)	150	165	188	175	100	Orang
Jumlah prestasi olahraga	103	32	120	83	0	Orang

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pada indikator Persentase organisasi pemuda yang aktif, Persentase wirausaha muda pemula, Cakupan pembinaan olahraga, dan Cakupan Pelatih yang bersertifikasi kondisinya meningkat sampai dengan Tahun 2020. Namun untuk indikator Cakupan pembinaan atlet muda, Jumlah atlet berprestasi (KONI) pada tahun 2020 kondisinya menurun, dimana untuk indikator jumlah atlet berprestasi (Dinas) 111 orang yang mendapat peringkat 1 (satu) s.d 3 (tiga) di POPDA tingkat Eks Karisidenan Surakarta, sedangkan jumlah prestasi olahraga 0. Kondisi tersebut disebabkan karena pandemi Covid-19 sehingga event olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional yang direncanakan setelah bulan Maret 2020 batal dilaksanakan. Selain itu ada beberapa permasalahan terkait kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi :

**Permasalahan Kepemudaan:**

1. Masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan penggunaan zat adiktif;
2. Pembinaan akhlak dan karakter kepribadian pemuda belum optimal dan merata;
3. Sarana dan prasarana pengembangan bidang pemuda perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
4. Jiwa kewirausahaan dan kompetitif di kalangan pemuda masih rendah;
5. Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan;
6. Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda belum optimal.

**Permasalahan Keolahragaan:**

1. Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan;
2. Kurang optimalnya pembinaan pemanduan bibit dan atlit;
3. Prestasi olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang olahraga;
4. Masih kurangnya kompetisi olahraga;
5. Daya dukung pemerintah masih perlu ditingkatkan;
6. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga belum mencukupi;
7. Belum terbentuknya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD);
8. Budaya olahraga di masyarakat perlu ditingkatkan.

Beberapa Lembaga atau organisasi kepemudaan dan Keolahragaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi:

1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
2. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda;



3. Organisasi Pemuda Partai Politik;
4. Lembaga Sosial Pemuda. Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk yayasan;
5. Organisasi Kemahasiswaan;
6. Praja Muda Karana (Pramuka);
7. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA;
8. Karang Taruna;
9. Organisasi Pemuda Kedaerahan;
10. Lembaga Pemuda Profesi;
11. Perkumpulan Pemuda di bidang Seni;
12. Klub Ilmuwan Muda;
13. Lembaga Pemuda Pencinta Alam;
14. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
15. NPC (National Paralympic Committee) Kab Klaten;
16. Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI)

Organisasi Kepemudaan yang bernaung di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Klaten dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Klaten. KNPI merupakan wadah penyalur aspirasi dari organisasi-organisasi kepemudaan dalam meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional. Sedangkan organisasi kepemudaan yang masuk dalam wadah KNPI Kabupaten Klaten sampai dengan saat ini yaitu:

Tabel 2.38.

Daftar Organisasi Kepemudaan yang masuk dalam wadah KNPI Kabupaten Klaten Tahun 2020

1.	Pemuda Muhammadiyah	11.	Pemuda Panca Marga
2.	Nasiyatul Aisyiyah	12.	Ikatan Pelajar Putri
3.	Ikatan Pelajar Muhammadiyah	13.	GM FKPPi
4.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	14.	BM KOSGORO 1957
5.	GP Anshor	15.	AMPI
6.	Fatayat NU	16.	Pemuda Katholik
7.	Ikatan Pelajar Putra Nahdatul Ulama	17.	Perada Hindu
8.	Ikatan Pelajar Putri	18.	Pemuda LDII
9.	Nahdatul Ulama	19.	Pemuda Kristen
10.	Barisan Muda PAN	20.	OMK Orang Muda Katholik
11.	Patria Budha	21.	Pemuda Pancasila

Wirausaha muda pemula yang ada di Kabupaten Klaten berjumlah kurang lebih 250 orang. Keberadaan wirausaha muda diharapkan bisa mengurangi tingkat pengangguran dan bisa meningkatkan



perekonomian masyarakat sekitarnya. Kreatif dan inovatif merupakan kunci untuk bisa menjadi wirausaha muda yang sukses dan mandiri. Secara lengkap perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.  
Perkembangan Kepemudaan & Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase organisasi pemuda yang aktif	55	69	69	69	76	%
Persentase wirausaha muda pemula	10	15	15	15	19	%
Cakupan pembinaan olahraga	34	36	36	36	36	Cabor
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	55	57	60	67	80	Orang
Cakupan pembinaan atlet muda	465	390	475	500	330	Orang
Jumlah atlet berprestasi (Dinas)	166	5	167	178	111	Orang
Jumlah atlet berprestasi (KONI)	150	165	188	175	100	Orang
Jumlah prestasi olahraga	103	32	120	83	0	Orang

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Klaten, 2020.

Jumlah prestasi olahraga di tahun 2019 semakin menurun. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa permasalahan terkait pengembangan olahraga yaitu:

1. Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan;
2. Kurang optimalnya pembinaan pemanduan bibit dan atlit;
3. Prestasi olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang olahraga;
4. Masih kurangnya kompetisi olahraga;
5. Daya dukung pemerintah masih perlu ditingkatkan;
6. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga belum mencukupi;
7. Belum terbentuknya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD);
8. Budaya olahraga di masyarakat perlu ditingkatkan.

Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang aktif tahun 2020 mengalami kenaikan. Jumlah OKP yang aktif sebanyak 19 OKP, sedangkan total jumlah OKP berdasar data terakhir dari Komite Nasional Pemuda Indonesia berjumlah 25 OKP. Terkait dengan pembinaan dan pelatihan pemuda meliputi pembinaan akhlak, karakter, jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan. Sampai saat ini

terdapat kurang lebih 1400 pemuda yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (dari jumlah total pemuda sebesar 244.733 orang). Beberapa permasalahan kepemudaan antara lain :

1. Masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan penggunaan zat adiktif;
2. Pembinaan akhlak dan karakter kepribadian pemuda belum optimal dan merata;
3. Sarana dan prasarana pengembangan bidang pemuda perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
4. Jiwa kewirausahaan dan kompetitif di kalangan pemuda masih rendah;
5. Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan;
6. Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda belum optimal.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Gambaran kondisi Kabupaten Klaten pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus layanan wajib dan layanan pilihan. dan selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

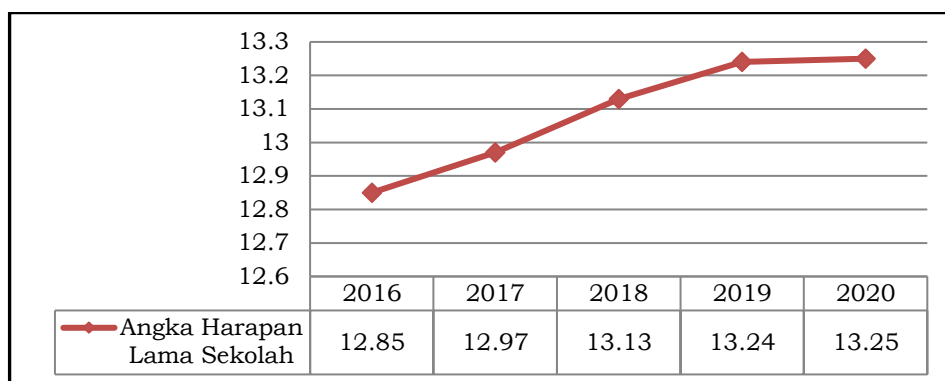
#### **2.1.3.1. Fokus Pelayanan Wajib Dasar**

##### **A. Bidang Pendidikan**

##### **1) Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Klaten adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2020. Pada dua tahun terakhir Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan 13,24% pada Tahun 2019 menjadi sebesar 13,25 % pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Grafik 2.11.



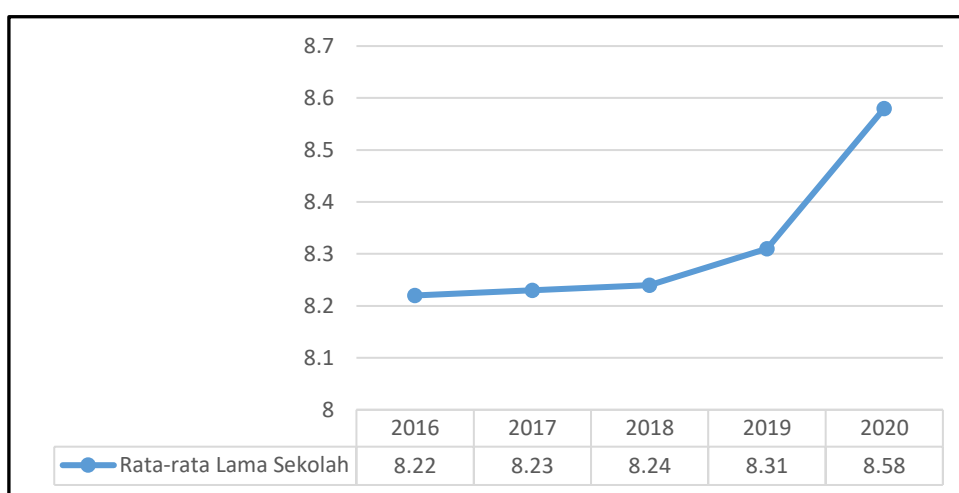
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Grafik 2.11.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

## 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2020, yaitu dari sebesar 8,22% pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,58% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi semakin baik disamping juga disebabkan karena adanya intervensi kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah dalam mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Grafik 2.12.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di tahun terakhir dimana terjadi

kenaikan sebesar 0,27% dari Tahun 2019 sebesar 8,31% menjadi 8,58% pada Tahun 2020.

### 3) Jumlah Anak Umur 0-6 Tahun yang mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Penyelenggaraan PAUD yang bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut khususnya kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Berikut perkembangan akses dan partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.

Tabel 2.40.  
Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	p		
<b>PAUD</b>		<b>1.521</b>	<b>22.656</b>	<b>21.546</b>	<b>44.202</b>	<b>3.788</b>
1	Satuan PAUD sejenis	125	1.314	1.379	2.693	274
2	Taman Penitipan Anak	30	243	219	462	74
3	Kelompok Bermain	428	4.119	4.068	8.187	1.055
4	RA/ BA	358	7.667	7.180	14.847	888
5	TK	580	9.313	8.700	18.013	1.497

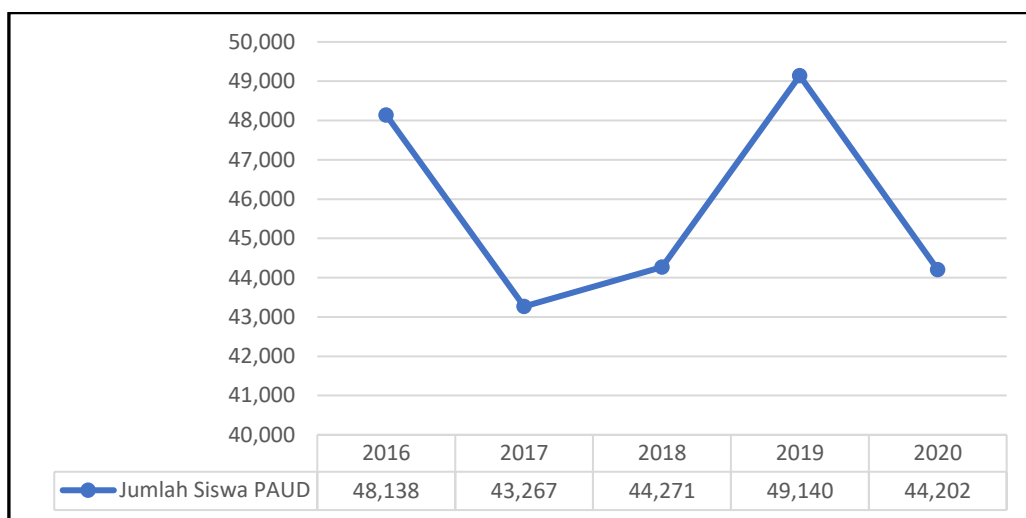
Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2020

Sedangkan perkembangan jumlah siswa PAUD selama Tahun 2016-2020 di Kabupaten Klaten cukup fluktuatif, dimana tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan, mengalami peningkatan di tahun 2018 hingga tahun 2019, sedangkan tahun 2020 terdapat penurunan jumlah siswa PAUD, sebagaimana yang terlihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.41.  
Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kab. Klaten Tahun 2016-2020

2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
48.138	43.267	44.271	49.140	44.202	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten. 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.13.

Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih tergantung pada partisipasi dan kemudahan orang tua untuk mencapai sekolah anak-anaknya. Sementara itu pendidikan usia dini masih kurang partisipasinya dari masyarakat dikarenakan pengetahuan akan pentingnya pendidikan usia dini sangat minim informasi dan sosialisasi tergantung pada pemangku kebijakan khususnya di Kabupaten Klaten. Selengkapnya APK PAUD di Kabupaten selama lima tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

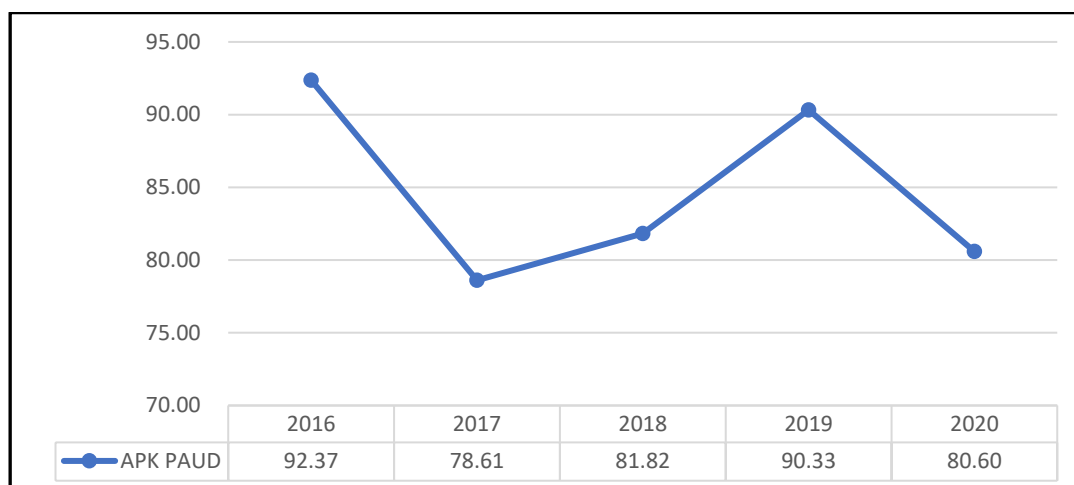
Tabel 2.42.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD	92,37	78,61	81,82	90,33	80,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020





Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.14.  
Grafik Perkembangan APK PAUD Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

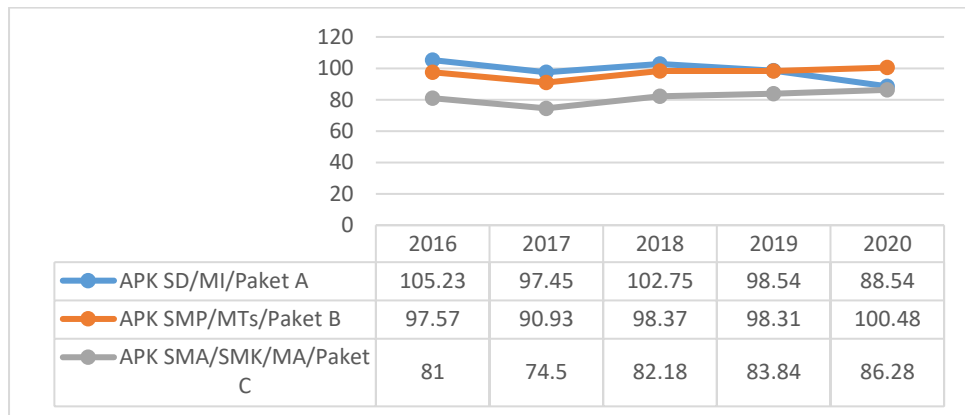
#### 4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan APK SD/MI/Paket A tahun 2016 sudah mencapai 105,23% seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada Tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 98,54% dan 96,02%. Namun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun capaian APK SD mengalami fluktuasi. Kondisi yang sama juga terjadi jenjang SMP. APK SMP/MTs/Paket B di Tahun 2016 sebesar 97,57%. dan pada Tahun 2019 dan 2020 naik menjadi 98,31% dan 100,48%. Secara akumulasi dari Tahun 2016-2020 APK SMP/MTs/Paket B mengalami kenaikan. Sedangkan APK SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2016 sudah mencapai 81,00% seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada Tahun 2019 dan 2020 naik menjadi 83,84% dan 86,28%. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43.  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan  
Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator APK	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
APK SD/MI/Paket A	105,23	97,45	102,75	98,54	88,54	%
APK SMP/MTs/Paket B	97,57	90,93	98,37	98,31	100,48	%
APK SMA/SMK/MA/Paket C	81,00	74,50	82,18	83,84	86,28	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.15.

Perkembangan APK Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

APK pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Klaten tahun 2020 menunjukkan penurunan karena jumlah siswa sekolah dasar dan menengah meningkat sehingga mengurangi tingkat partisipasi pendidikan. Penurunan jumlah siswa tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

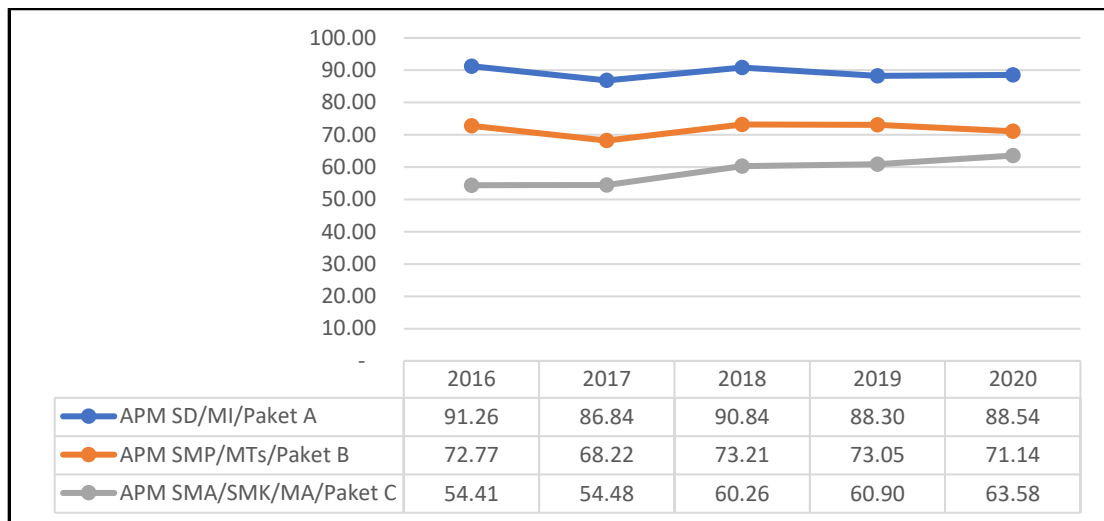
**5) Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/Paket A Tahun 2016 sudah mencapai 91,26%, naik menjadi 88,30% di tahun 2019 dan 88,54% di tahun 2020. Selama 5 (lima) tahun pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2016 sudah mencapai 72,77% menjadi 73,05% dan 71,14% pada Tahun 2019 dan 2020. Selama 5 (lima) tahun pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C pada Tahun 2016 sudah mencapai 54,41% menjadi 60,90% di tahun 2019 dan 63,58% di tahun 2020. Selama 5 (lima) tahun pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.44.  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator APM	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
APM SD/MI/Paket A	91,26	86,84	90,84	88,30	88,54	%
APM SMP/MTs/Paket B	72,77	68,22	73,21	73,05	71,14	%
APM SMA/SMK/MA/Paket C	54,41	54,48	60,26	60,90	63,58	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.16.

Perkembangan APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 2.44. sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo.

## 6) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

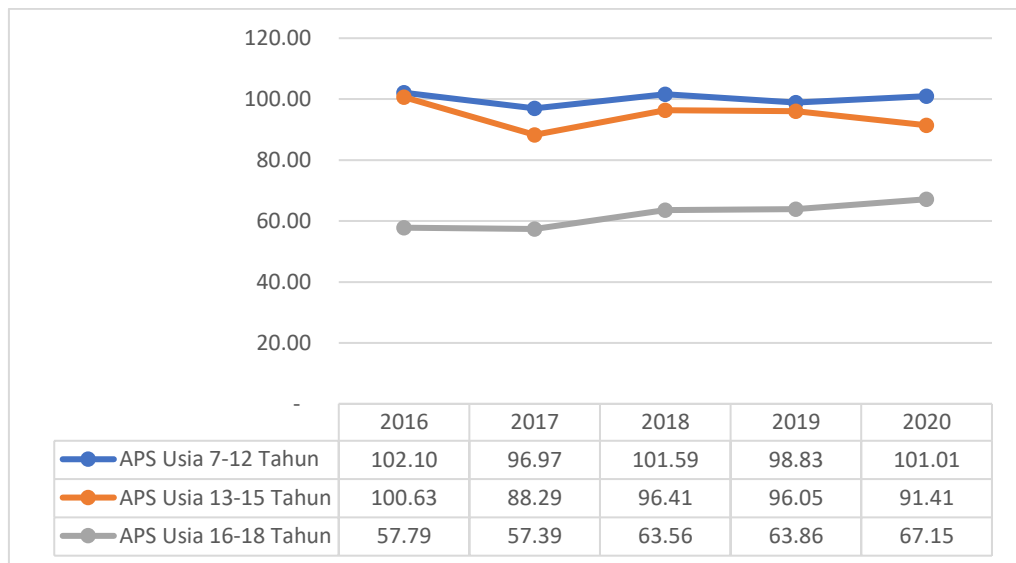
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.45.  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020 (%)

Indikator APS	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APS Usia 7-12 Tahun	102,10	96,97	101,59	98,83	101,01
APS Usia 13-15 Tahun	100,63	88,29	96,41	96,05	91,41
APS Usia 16-18 Tahun	57,79	57,39	63,56	63,86	67,15

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 terbanyak adalah APS direntang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Sedangkan untuk APS Usia 16-18 masih rendah dikarenakan saat ini masih banyak warga yang belum mampu mengakses layanan pendidikan. Hal itu terlihat dari rendahnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) terutama pada jenjang pendidikan menengah.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.17.  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

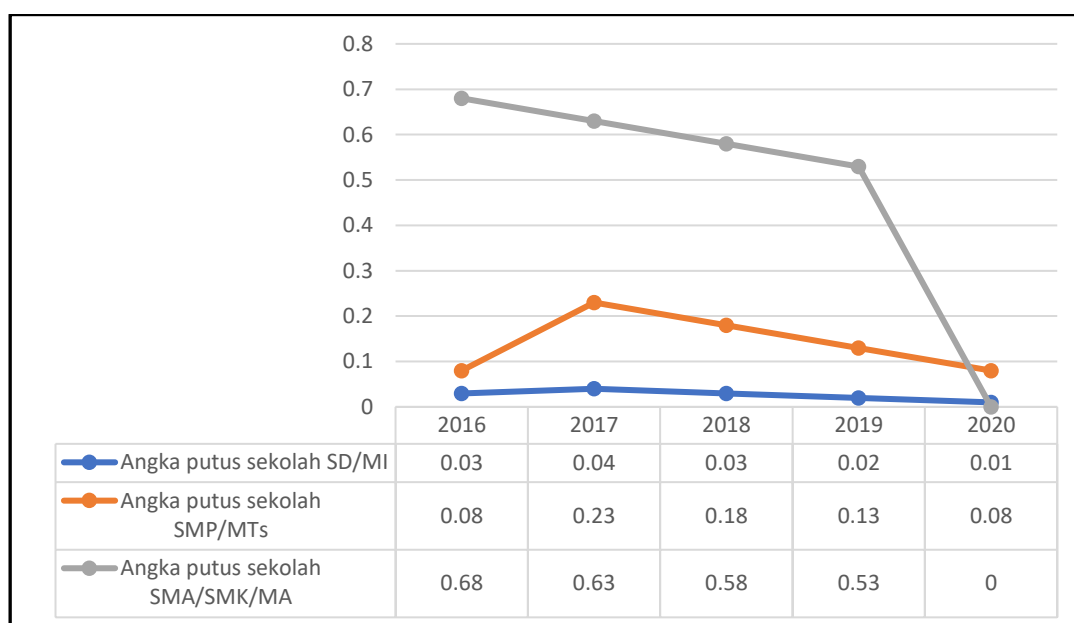
## 7) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama Tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46.  
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020 (%)

Indikator Angka Putus Sekolah (APS)	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka putus sekolah SD/MI	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	%
Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,23	0,06	0,05	0,08	%
Angka putus sekolah SMA/SMK/MA	0,69	0,63	0,67	0,53	0	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.18.  
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten  
Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari Tahun 2018 sebesar 0,03% menjadi 0,02% dan 0,01% di Tahun 2019 dan 2020. Sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS dari 0,18% di Tahun 2018 menjadi 0,13% dan 0,08% di Tahun 2019 dan 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya program pemerintah antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedangkan berdasarkan target kinerja, perkembangan realisasi Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 melebihi target.

Tabel 2.47.  
Perkembangan Target Kinerja dari Angka Putus Sekolah (APS)  
Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka putus sekolah SD/MI	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01	%
Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,23	0,18	0,13	0,08	%
Angka putus sekolah SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

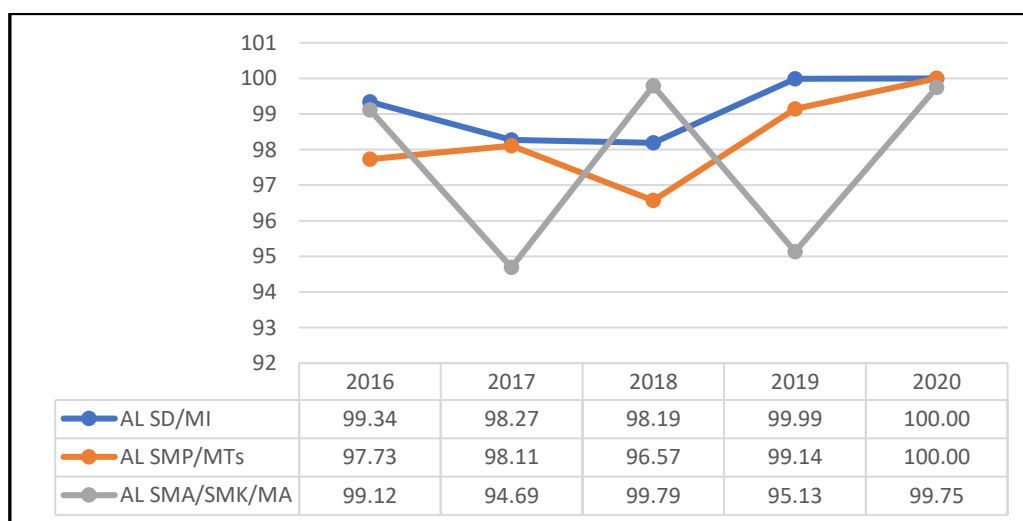
### 8) Angka Kelulusan (AL)

Kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.  
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020 (%)

Indikator Angka Kelulusan (AL)	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
AL SD/MI	99,34	98,27	98,19	99,99	100,00	%
AL SMP/MTs	97,73	98,11	96,57	99,14	100,00	%
AL SMA/SMK/MA	99,12	94,69	99,79	95,13	99,75	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.19.  
Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 2.19 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI maupun SMP/MTs pada

tahun 2020 sebesar 100%. Kenaikan angka kelulusan dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 dimana sistem pembelajaran dan ujian nasional dilaksanakan dengan metode *On Line* Dalam Jaringan (Daring) dan pemberian tugas dengan cara memberikan lembar tugas (luring) tidak dengan tatap muka di sekolah. Dampak kondisi ini mengakibatkan kelulusan tidak didasari dan tidak ditentukan oleh Nilai Ujian Nasional.

### 9) Angka Melanjutkan Sekolah

Indikator Angka melanjutkan merupakan salah satu hal untuk mengetahui manajemen pelayanan pendidikan. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.49.  
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020 (%)

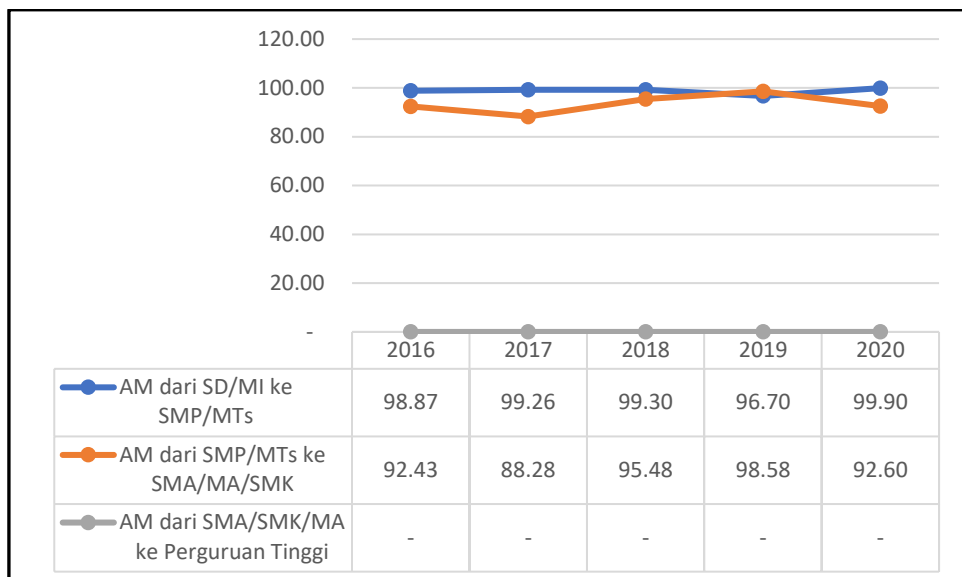
Indikator Angka Melanjutkan (AM)	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
AM dari SD/MI ke SMP/MTs	98,87	99,26	99,30	96,70	99,90	%
AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	92,43	88,28	95,48	98,58	92,60	%
AM dari SMA/SMK/MA ke Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada Tahun 2016-2020 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal itu berarti bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019, yaitu sebesar 3,2%. Perkembangannya dari sebesar 96,70% di tahun 2019 menjadi 99,90% di tahun 2020. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs di luar Klaten, karena mengikuti orang tua yang bekerja, atau melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren.

Sedangkan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami penurunan sebesar 5,9% dari tahun 2019 sebesar 98,58% menjadi 92,60% di Tahun 2020. Hal ini sangat dipengaruhi oleh penerapan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.20.  
Perkembangan Angka Melanjutkan Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

## 10) Sarana dan Prasarana Sekolah

Fasilitas Pendidikan meliputi kondisi sarana prasarana, rasio ketersediaan sekolah, rasio ketersediaan guru, proporsi dan partisipasi penduduk, yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.50.  
Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator Fasilitas Pendidikan	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>SARANA PRASANA</b>						
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	71,09	81,00	79,00	67,18	68,87	%
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85,11	96,30	80,00	87,37	74,35	%
<b>RASIO</b>						
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 79	1 : 74	1 : 78	1 : 74	1 : 71	%
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1 : 25	1 : 22	1 : 25	1 : 26	1 : 25	%



Indikator Fasilitas Pendidikan	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio guru/murid SD/MI dasar	1 : 15	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	Rasio
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 15	Rasio
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	1 : 32	1 : 30	1 : 28	1 : 28	1 : 28	Rasio
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP/MTs	1 : 30	1 : 30	1 : 32	1 : 32	1 : 32	Rasio
<b>PROPORSI &amp; PARTISIPASI PENDUDUK</b>						
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	91,52	96,13	96,11	96,58	100	%
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. perempuan dan laki-laki	99,57	99,62	99,57	99,66	99,59	%
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	1.031.449	1.016.376	1.032.228	1.031.503	1.035.959	Orang
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87,83	76,97	84,45	87,07	87,97	%
Penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI. SMP/MTs)	90,86	92,31	91,98	92,74	94,10	%
Penduduk usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-	-	1,44	5,79	%
Penduduk usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	82,05	78,54	82,33	80,98	83,02	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, untuk kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Klaten untuk jenjang pendidikan SD menurun di tahun 2019 dan 2020, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA cenderung meningkat. Kemudian berdasarkan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten telah terpenuhi termasuk untuk rasio ketersediaan guru. Sedangkan proporsi dan partisipasi penduduk dalam pendidikan telah terpenuhi.

## 11) Dampak Pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Klaten

Virus yang mewabah dunia termasuk Indonesia semenjak akhir Desember 2019 dan sampai pada ditetapkannya wabah ini sebagai pandemi global oleh WHO tanggal 11 Maret 2020 berdampak pada semua aspek kehidupan. Tak terkecuali bidang pendidikan juga terdampak besar oleh kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai strategi pemutusan rantai penularan Covid-19.

Kebijakan pemerintah yang meliburkan dan memindahkan dari proses belajar mengajar di sekolah/madrasah menjadi di rumah tidak semuanya berjalan lancar. Ketidaksiapan stakeholder sekolah/madrasah melaksanakan pembelajaran dengan metode *Daring* menjadi salah satu kendala. Meskipun pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan kelas atau kelulusan di saat darurat sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 ini namun hal ini tidak begitu mudah untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan penguasaan IT yang cukup.

Seperti halnya di Kabupaten Klaten, terdapat beberapa kendala terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dengan metode *Daring* ini, diantaranya sebagai berikut:

**Pertama**, kurangnya sumber daya pendidik yang kompeten di bidang IT. Hal ini menjadi permasalahan utama dikarenakan tidak semua guru melek teknologi. **Kedua**, keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung pada setiap guru juga menjadi masalah akibat dari kesejahteraan guru yang masih rendah sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan teknologi dalam menunjang proses belajar mengajar. Di samping itu tidak semua orangtua bisa memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Tidak semua orangtua juga faham teknologi dan bisa membimbing anaknya untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. **Ketiga**, pembelajaran *Daring* tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah/madrasah, kondisi titik lokasi guru/siswa terkoneksi jaringan internet, karena letak geografis berpengaruh terhadap kestabilan koneksi jaringan internet.

Ketersediaan sarana pendidikan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Sarana pendidikan skala lingkungan yaitu TK/ RA/ BA dan SD/ MI yang ada di Kabupaten Klaten

mencapai 580 unit TK, 358 unit RA/ BA dan 738 unit SD, 85 unit MI. Sedangkan untuk SMP/ MTs dan SMA/ MA/SMK yang ada di Kabupaten Klaten mencapai 116 unit SMP, 21 unit MTs, 28 unit SMA. 8 unit MA dan 53 unit SMK. Di Kabupaten juga terdapat 9 perguruan tinggi yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Klaten dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51.  
Sebaran Sarana Pendidikan Di Kabupaten Klaten  
Tahun 2020 (Unit)

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	PT
1	Prambanan	22	9	30	2	3	1	2	1	3	-
2	Gantiwarno	23	3	26	1	5	1	1	-	2	-
3	Wedi	25	9	32	-	7	1	1	-	1	-
4	Bayat	25	11	37	4	5	1	1	-	1	-
5	Cawas	26	18	38	1	7	1	1	-	2	-
6	Trucuk	43	20	38	9	6	1	-	-	1	-
7	Kalikotes	8	12	21	4	2	-	-	-	-	-
8	Kebonarum	10	7	12	2	1	-	-	-	-	1
9	Jogonalan	30	13	28	2	3	-	2	-	5	-
10	Manisrenggo	21	10	29	4	4	-	-	-	1	-
11	Karangnongko	14	13	22	2	2	1	1	-	-	-
12	Ngawen	7	32	23	6	4	-	1	-	1	-
13	Ceper	28	24	34	9	3	2	1	1	4	2
14	Pedan	20	15	26	3	4	1	1	-	4	-
15	Karangdowo	18	12	26	5	4	1	1	-	-	-
16	Juwiring	33	15	35	7	6	1	1	-	1	-
17	Wonosari	33	9	37	2	4	1	1	1	2	-
18	Delanggu	21	11	29	-	8	-	1	-	2	1
19	Polanharjo	25	10	28	6	3	-	1	-	-	-
20	Karanganom	31	16	28	5	6	1	1	1	-	-
21	Tulung	25	18	30	7	4	1	-	-	1	-
22	Jatinom	21	22	36	1	5	2	1	1	2	-
23	Kemalang	15	5	23	-	4	1	-	-	-	-
24	Klaten Selatan	15	12	21	-	4	-	3	-	5	1
25	Klaten Tengah	21	15	30	-	4	1	-	-	5	2
26	Klaten Utara	20	17	19	3	8	2	6	3	10	2
<b>Jumlah</b>		<b>580</b>	<b>358</b>	<b>738</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>9</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2020

Sebaran sarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sudah merata di seluruh kecamatan. Hanya tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi yang belum tersedia di setiap kecamatan. Kecamatan yang belum tersedia sarana pendidikan menengah atas adalah Kecamatan Kemalang, Kalikotes, dan Kebonarum. Sarana pendidikan

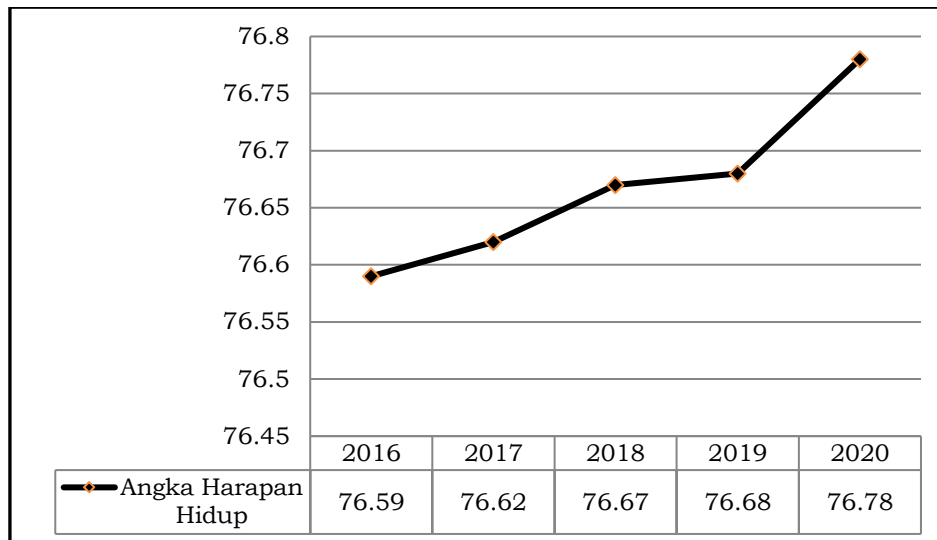
menengah atas dan sarana pendidikan tinggi sebagian besar berada di kawasan perkotaan Klaten dan sekitarnya.

## B. Bidang Kesehatan

### 1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan dan ukuran peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat UHH dihitung dari hasil sensus dan survey kependudukan. Pada periode tahun 2016-2020 UHH di Kabupaten Klaten cenderung mengalami peningkatan. Hal ini antara lain didukung dengan suksesnya program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. UHH di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2020. Pada dua tahun terakhir UHH mengalami kenaikan sebesar 0,1 % yaitu dari angka 76,68 % di Tahun 2019 menjadi 76,78 % di Tahun 2020.

Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 2.21.



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020

Grafik 2.21.

Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

### 2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

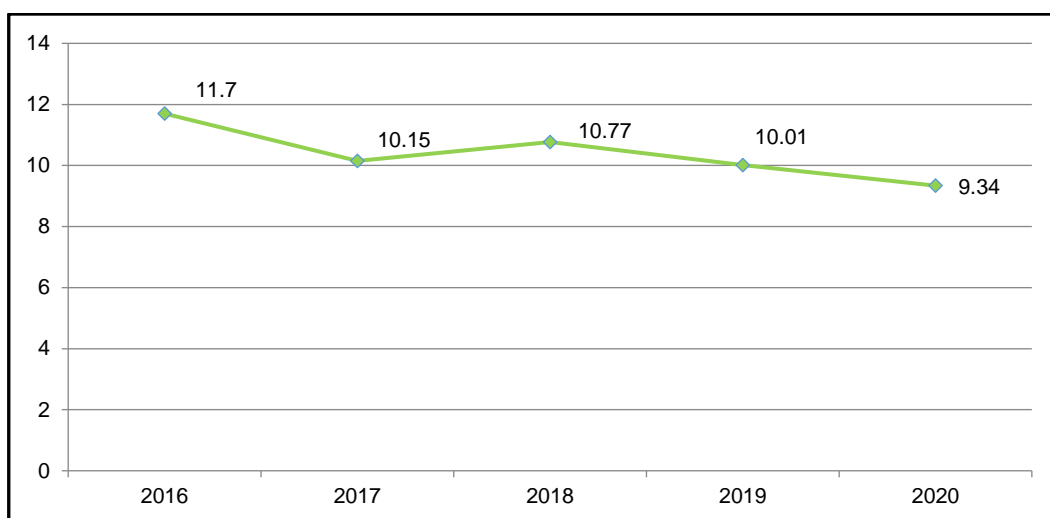
Merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran

hidup). Berikut perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.52.  
Perkembangan AKB Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11,7	10,15	10,77	10,01	9,34	/ 1000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.22.

### Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Angka kematian bayi merupakan cerminan dari tingkat pembangunan kesehatan suatu wilayah serta kualitas hidup masyarakatnya. Berdasarkan data tersebut di atas, Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif, dimana angka tersebut dianggap masih tinggi meskipun dimasa pandemi. Bidan desa tetap melakukan kunjungan neonatus (bayi) namun penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah asfiksia, prematur, dan sepsis. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, beberapa upaya dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Menerapkan perilaku sehat; 2. Imunisasi sebagai upaya pencegahan; 3. Pengentasan kemiskinan; 4. Akses kepada layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah.

### 3) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

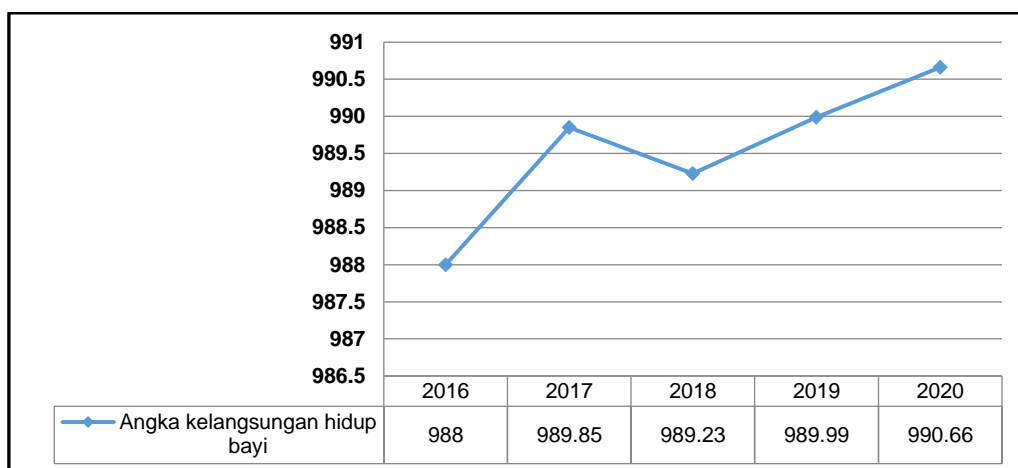
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah tingkat kemungkinan (probabilitas) bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun.

Berikut perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.53.  
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kelangsungan hidup bayi	988	989,85	989,23	989,99	990,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.23.  
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan data tersebut di atas, Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin meningkat kecuali di Tahun 2018. Angka Kelangsungan Hidup Bayi pada Tahun 2020 meningkat dari Tahun 2019 disebabkan karena menurunnya angka kematian bayi. Untuk mempertahankan angka tersebut atau meningkatkan angka tersebut, disarankan bagi seorang ibu untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, mengonsumsi gizi secara seimbang, dan bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### 4) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Berikut perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

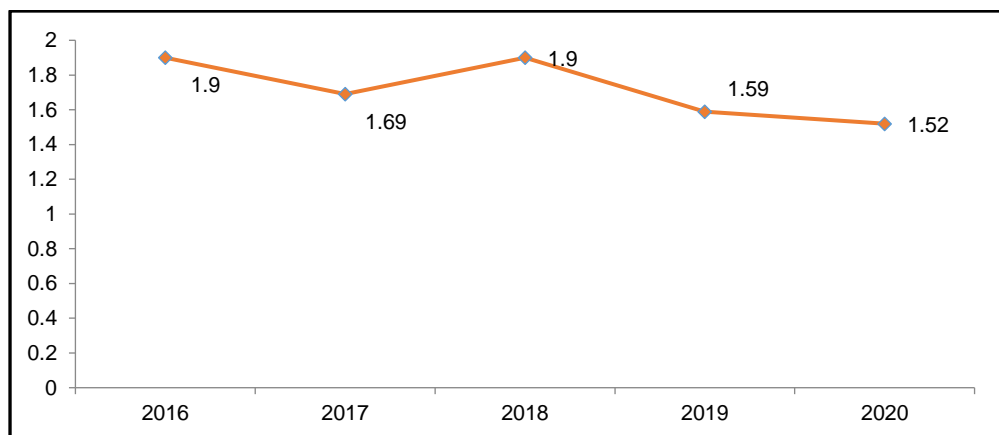
Tabel 2.54.  
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,90	1,69	1,9	1,59	1,52	/ 1000 kh

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif.

Di masa pandemi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita masih berjalan walaupun tidak maksimal. Kematian balita tetap ada karena memang ada penyakit penyerta seperti kelainan jantung, dll.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.24.

#### Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kematian balita sebesar 0,07/1000 kelahiran dari angka kematian tahun 2019. Hal ini disebabkan sudah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup; 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan; 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan; 4)

meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin.

### 5) Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

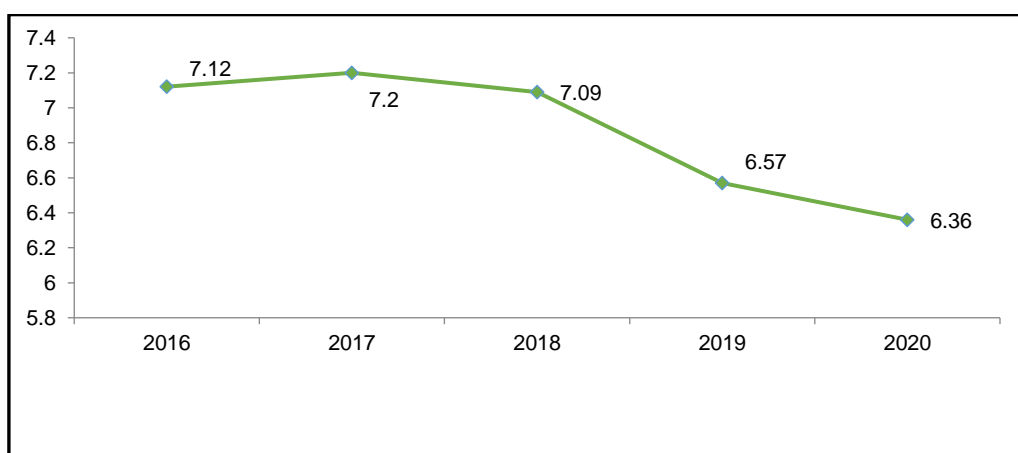
Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Berikut perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.55.

Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	7,12	7,20	7,09	6,57	6,36	/1000 kh

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2020. diolah

Grafik 2.25.

Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan data tersebut di atas, Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin menurun kecuali di tahun 2017. Angka tersebut dapat menurun karena sudah dilakukan upaya sebagai berikut: 1) Melakukan revitalisasi Posyandu, 2) Memperkuat kelembagaan Pokjandal Posyandu, 3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA, 4) Memperkuat kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus. dan 6) Pemantauan di Posyandu.



## 6) Kasus Kematian Ibu

Kasus Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Berikut perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.56.  
Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kasus Kematian Ibu	18	18	13	12	17	kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, kasus kematian ibu Kabupaten Klaten Tahun 2016-2019 semakin menurun kasusnya, namun pada tahun 2020 ini meningkat kembali dengan adanya 17 kasus. Menurunnya kasus di tahun 2015-2019 tersebut tak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti: 1) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, 2) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, 3) memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil. Sedangkan meningkatnya kasus kematian ibu di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19, ada beberapa ibu hamil yang akan menjalani persalinan namun takut ke fasyankes, sudah ada faktor resiko sebelum hamil di masa pandemi dan mempunyai komorbid (penyakit penyerta), dan kurang optimalnya pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) yang hanya lewat telepon dan tidak seperti jika bisa memeriksa langsung ke Fasyankes.

## 7) Rasio ketersediaan fasilitas kesehatan

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasaran serta tenaga medis di Kabupaten Klaten sebagai salah satu alat/indikator untuk mengetahui ketersediaan dalam pelayanan kesehatan kepada penduduk khususnya Kabupaten Klaten. Berikut perkembangannya.

Tabel 2.57.  
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio posyandu per satuan balita	26,16	26,88	27,63	27,99	28,00
Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio dokter per satuan penduduk	1,302	0,896	0,896	0,237	0,026
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,349	0,253	0,253	0,074	0,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rasio posyandu per satuan balita pada setiap tahunnya meningkat dikarenakan adanya penambahan jumlah posyandu. Sedangkan rasio puskesmas, RS, dokter, dan tenaga medis di Kabupaten Klaten masih diperlukan peningkatan.

#### 8) Cakupan Kebidanan

Berikut perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.58.  
Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97,88	101,58	89,01	83,28	84,40	%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	99,98	99,99	99,99	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2020 meningkat dikarenakan banyaknya penemuan kasus komplikasi pada ibu hamil, sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan.



## 9) Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* dan cakupan penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020 adalah 100%. Berikut perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.59.  
Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

## 10) Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

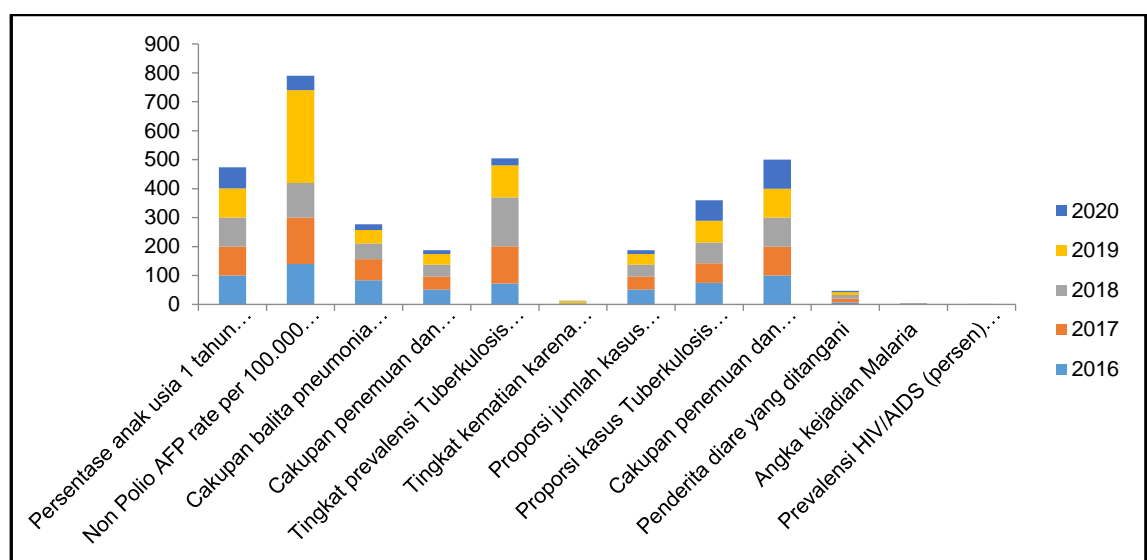
Berdasarkan data yang ada, semua indikator terkait cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten semakin menurun. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang terdiri dari:

Tabel 2.60.  
Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita  
Penduduk Kab. Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR	99,6	99,5	101,3	99,8	88,4	%
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	140	160	120	320	83,33	%
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	83,3	72,6	54,1	47,0	29,33	%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	51,0	45,9	41,0	36,5	29,98	%
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	72,3	128,4	169,6	109,7	46,04	Per 100.000 penduduk
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,1	1,5	1,9	6,7	1,96	Per 100.000 penduduk
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	51,0	45,9	41,0	36,5	31,44	%
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	74,8	66,7	72,7	74,7	71,63	%

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	%
Penderita diare yang ditangani	7,4	13,2	11,6	9,8	4,4	%
Angka kejadian Malaria	0,5	0,7	0,8	0,4	0,0033	Per 100.000 penduduk
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,011	0,012	0,011	0,012	0,011	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.26.

### Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk dikarenakan di masa pandemi Covid-19 kegiatan penanganan penyakit selain Covid-19 agak dikesampingkan. Permasalahan yang muncul dari cakupan penanganan penyakit di Kabupaten Klaten adalah perlu upaya peningkatan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

### 11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pelayanan kesehatan terganggu. Sebab sebagian besar pelayanan dan termasuk anggaran difokuskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dari beberapa indikator yang ada pada cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2020 hampir

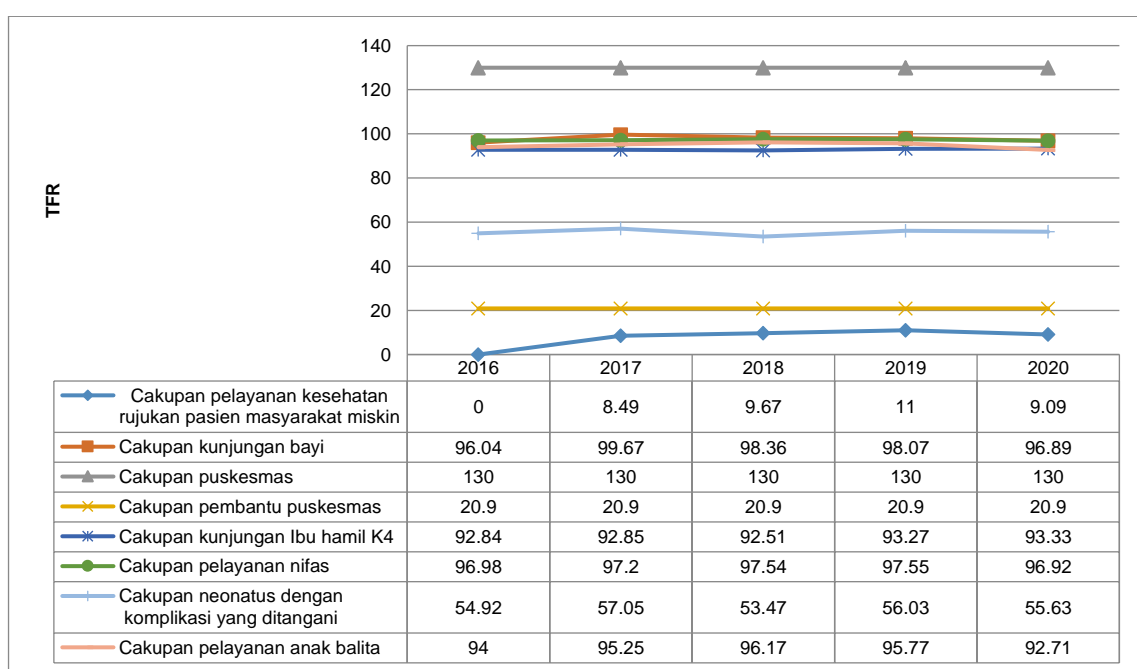
semua mengalami penurunan. Sehingga untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk Covid-19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.61.

Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	9,10	8,49	9,67	11	9,09	%
Cakupan kunjungan bayi	96,04	99,67	98,36	98,07	96,89	%
Cakupan puskesmas	130	130	130	130	130	%
Cakupan pembantu puskesmas	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	%
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92,84	92,85	92,51	93,27	93,33	%
Cakupan pelayanan nifas	96,98	97,2	97,54	97,55	96,92	%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	54,92	57,05	53,47	56,03	55,63	%
Cakupan pelayanan anak balita	94	95,25	96,17	95,77	92,71	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.27.

Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Dari tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19 dimana kunjungan pasien ke puskesmas menurun sehingga rujukan pasien masyarakat miskin juga menurun.

Sedangkan cakupan kunjungan bayi juga menurun dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal, ketakutan masyarakat datang ke fasyankes, tidak semua balita bisa di kunjungi bidan desa karena pandemi dan tugas bidan desa terfokus permasalahan Covid-19.

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meskipun masa pandemi Covid-19, pelayanan dan pemantauan ibu hamil tetap bisa dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) lewat telepon, sedangkan untuk cakupan pelayanan nifas tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kematian ibu pada masa nifas, dimana pelayanan tidak bisa optimal karena pandemi dan beban ganda bidan desa. Cakupan pelayanan anak balita pada grafik di atas terlihat menurun dikarenakan adanya pandemi membuat pelayanan pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal, ketakutan masyarakat datang ke fasyankes, tidak semua balita bisa di kunjungi bidan desa karena pandemi dan tugas bidan desa terfokus permasalahan Covid-19.

## 12) Tenaga Medis dan Sarpras Kesehatan

Berikut ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang berizin di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.

Tabel 2.62.  
Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan yang Berizin di  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
<b>SWASTA</b>						
1	Rumah Sakit	9	9	8	9	9
2	Balai Pengobatan	17	17	-	-	-
3	Rumah Bersalin	--	-		-	-
4	Dokter Praktek	559	713	344	306	408
5	Apotek	44	44	176	184	194
6	Toko Obat				11	8
<b>NEGERI</b>						
1	Rumah Sakit Umum	2	2	2	2	2
2	Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1
3	Apotek Daerah	-	-	1	1	1
4	Toko Obat Berijin	3	3	3	3	0

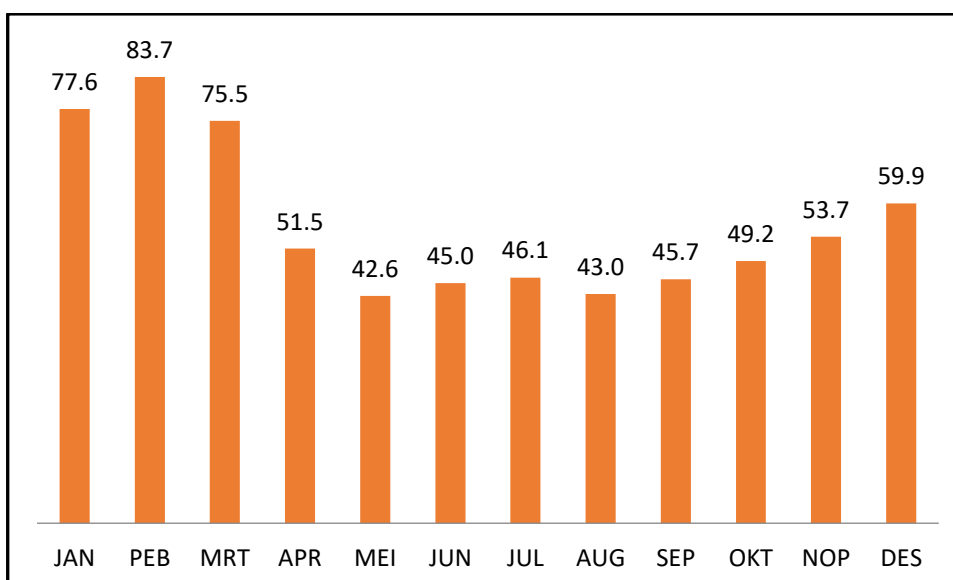
Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
5	Balai Pengobatan Kesehatan Paru Masyarakat	-	-	1	1	1
6	Puskesmas / Balai Pengobatan	34	34	34	34	34
7	Puskesmas Pembantu	84	84	84	84	84
8	Puskesmas Yang Ada Fasilitas Rawat Inap	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa sarana kesehatan yang sangat menonjol adalah tenaga medis swasta berijin yakni tenaga dokter yang pada tahun terakhir (2017) berjumlah 713 orang. Sementara sarana prasarana fasilitas kesehatan yang lain baik swasta maupun negeri jumlahnya relatif masih rendah. Sehingga ke depan diperlukan peningkatan peran serta pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana kesehatan tersebut, agar supaya setiap lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin dapat mengaksesnya.

### 13) Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2020 adalah 56% dengan jumlah per bulan disajikan pada Grafik 2.28.

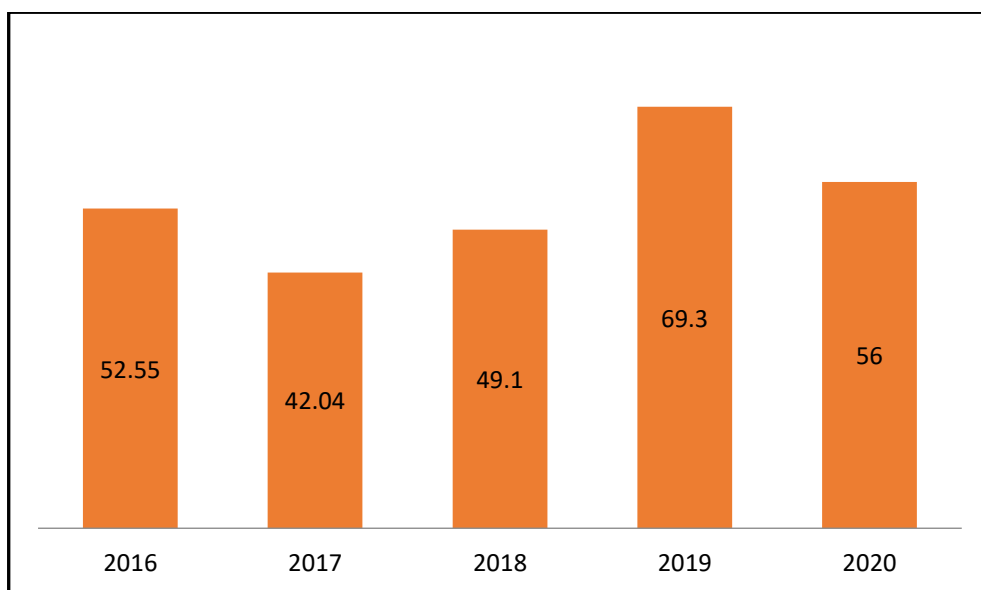


Sumber : RSD Bagas Waras Kab. Klaten, 2021

Grafik 2.28.

Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Pada Tahun 2020, jumlah kunjungan pasien sebanyak 110.810 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 8.305 orang/Tahun (atau rata-rata 23 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 90.627 orang/Tahun (atau rata-rata 248 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 11.878 orang/Tahun (atau rata-rata 33 orang/hari). Adapun kinerja pelayanan RSD Bagas Waras dapat dilihat pada Grafik 2.29.



Sumber : RSUD Bagaswaras Kab. Klaten, 2021

Grafik 2.29.

Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Berdasar pada Grafik 2.28 dan Grafik 2.29 indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2020 terjadi Penurunan Persentase pemakaian tempat tidur dibanding Tahun 2019 sebesar 12.4.

#### **14) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Kesehatan di Kabupaten Klaten.**

Wabah Pandemi Covid 19 ini merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dinas Kesehatan sebagai OPD pengampu urusan kesehatan berkewajiban membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kabupaten guna pencegahan dan penanganan Covid-19. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Klaten antara lain:

- a. Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan covid dari tingkat kabupaten sampai tingkat beserta posko Covid-19 di Kabupaten.
- b. Menyiapkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 baik dari Anggaran Dinas Kesehatan maupun anggaran



Kabupaten melalui Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- c. Meningkatkan Promosi Kesehatan melalui media cetak dan elektronik mengenai segala sesuatu terkait Covid-19 dan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- d. Penyediaan logistik pencegahan dan penanganan Covid seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, *hand sanitizer*, desinfektan. dll
- e. Melakukan penyemprotan desinfektan terutama di tempat-tempat seperti pasar, terminal, perkantoran, dll
- f. Menyediakan Call center terkait Covid-19 melalui hotline matur dokter dan pelaporan mengenai Covid-19 secara resmi melalui Humas Kabupaten Klaten
- g. Menyiapkan rumah sakit rujukan covid lini 1 yaitu RS Suraji Tirtonegoro dan rumah sakit lini 2 yaitu RSD Bagas Waras dan RS Islam Klaten baik sarana prasarana mauapun SDM nya serta melaksanakan koordinasi terkait pembiayaan pasien
- h. Menetapkan Prosedur Tetap (Protap) dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 seperti Protap penanganan pasien, Protap pemulasaran jenazah Covid-19, dll.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Covid-19 ini ada beberapa masalah yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya kebiasaan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran Covid-19 ini sehingga susah untuk melaksanakan himbauan-himbauan dari pemerintah seperti *social/physical distancing*, melaksanakan belajar, bekerja, dan ibadah dari rumah, dll
- c. Adanya arus mudik terutama dari daerah terjangkit Covid-19 dan banyak yang tidak melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari.
- d. Sulitnya mendapatkan logistik pencegahan dan penanganan Covid-19 di pasaran karena barang terbatas dan harga sangat mahal.
- e. Koordinasi selama Covid-19 dilaksanakan secara online terkendala peralatan dan jaringan internet.

Adanya status Kejadian Luar Biasa ini menjadikan kegiatan-kegiatan terpusat pada pencegahan dan penanganan Covid-19. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah lain diantaranya :

- a. Angka kematian ibu dan anak meningkat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelayanan kesehatan ibu hamil selama mengandung dan pelayanan persalinan mengalami kendala dari fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan lebih mengutamakan penanganan pasien terduga Covid-19 sehingga menomorduakan pelayanan ibu bersalin terutama yang dianggap tidak gawat darurat.
- b. Kasus penyakit seperti Demam Berdarah dan HIV meningkat. Hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan kesehatan terpusat pada Covid-19 sehingga pencegahan penyakit lainnya agak dikesampingkan.

### **C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus ditangani sesuai kewenangan Kabupaten meliputi jalan dan jembatan, sumber daya air, air minum dan sanitasi.

#### 1. Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020 yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 33,52 km, jalan provinsi sepanjang 41,36 km, dan jalan kabupaten sepanjang 715,89 km seperti terlihat pada tabel 2.63.

- a. **Aksesibilitas**, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- b. **Mobilitas**, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Angka mobilitas tahun 2020 sebesar 5,39 km/ 10.000 jiwa.
- c. **Keselamatan**, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, tingkat keselamatan lalu lintas Tahun 2019 sebesar 99,7308 %. Sedangkan ditahun 2020 menjadi 99,758%.

**d. Kondisi jalan,** dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Adanya pandemi Covid 19 telah berpengaruh besar terhadap penganggaran daerah, di mana sebagian besar anggaran mengalami *refocusing* untuk penanganan Covid-19. Salah satunya adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dimana anggaran peningkatan jalan dan rehabilitasi jembatan juga mengalami *refocusing* dan hanya menyisakan anggaran pemeliharaan rutin. Hal ini berdampak pada penurunan jalan kondisi baik dari 533,56 km tahun 2019 menjadi 474,26 km di tahun 2020. Selain itu juga dengan berlakunya SK Bupati Klaten No 611.51/208 Tahun 2020 tentang status Ruas – Ruas Jalan di Kabupaten Klaten Sebagai Jalan Kabupaten, dimana dari 361 ruas jalan menjadi 338 ruas jalan dengan panjang jalan dari 769,63 km menjadi 715,89 km. Adapun Kondisi jalan dapat dilihat pada tabel 2.63.

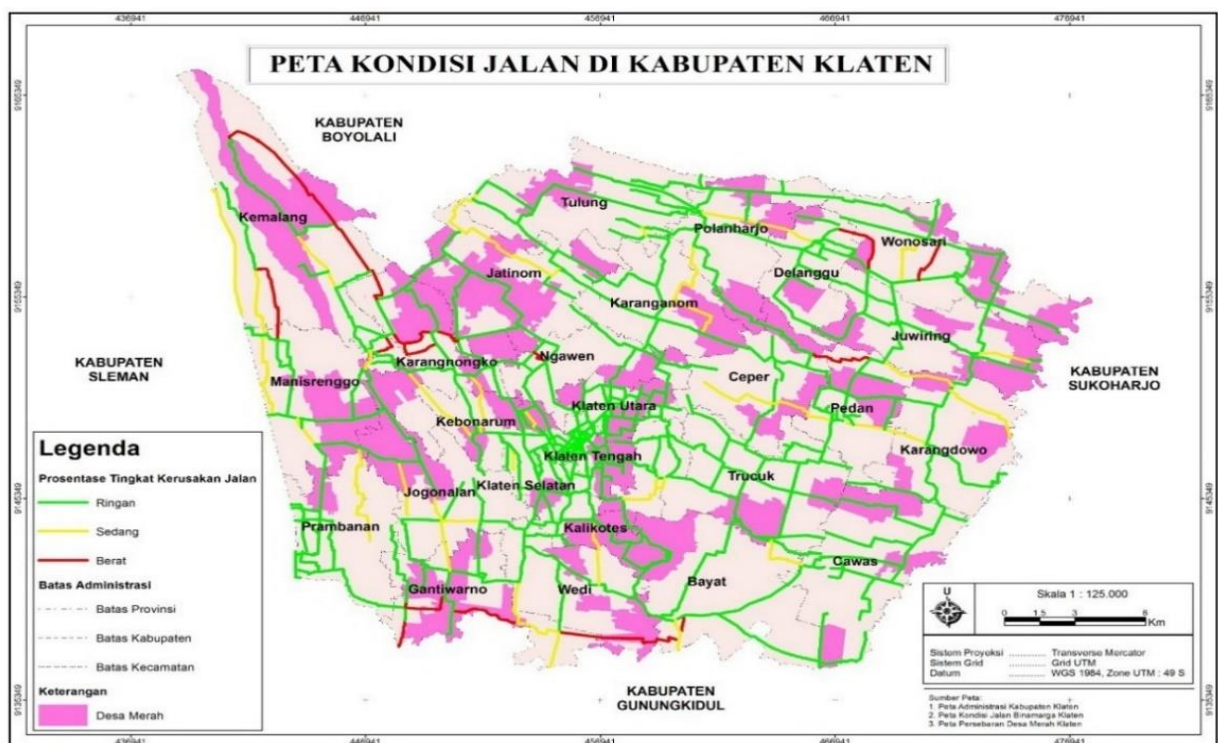
Tabel 2.63.  
Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Keadaan		Status Jalan						
		Jalan Negara 2020	Jalan Provinsi 2020	Jalan Kabupaten				
				2016	2017	2018	2019	2020
I	Jenis Permukaan							
	a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet (km)	33,52	41,36	753,94	725,29	725,29	689,66	605,19
	b. Berbatu/Macadam (km)	-	-	3,16	-	-	-	-
	c. Hotmix (km)	-	-	-	-	-	-	-
	d. Kerikil (km)	-	-	-	2,9	2,9	2,1	11,55
	e. Tanah/Jalan Belum Tembus (km)	-	-	12,53	-	-	-	-
	f. Beton (km)	-	-	-	41,44	41,44	77,87	99,14
	Jumlah – I (km)	33,52	41,36	769,63	769,63	769,63	769,63	715,89
II	Kondisi Jalan							
	a. Baik (km)	3,9	25,76	432,91	470,61	517,27	533,56	474,26
	(Persentase)			56,25%	61,15%	67,20%	69,33%	66,25%
	b. Sedang (km)	29,62	15,61	190,92	169,03	140,34	128,47	170,64
	Persentase			24,81%	21,96%	18,23%	16,69%	23,84%
	c. Rusak Ringan (km)	-	-	63,51	62,9	56,86	52,04	59,44
	Persentase			8,25%	8,17%	7,39%	6,76%	8,3%
	d. Rusak Berat (km)	-	-	82,29	67,09	55,16	55,56	11,55
	Persentase			10,69%	8,72%	7,17%	7,22%	1,61%

Keadaan	Status Jalan						
	Jalan Negara 2020	Jalan Provinsi 2020	Jalan Kabupaten				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah – II	33.52	41,37	769,63	769,63	769,63	769,63	715,89
Persentase			100%	100%	100%	100%	100%
III	Kelas Jalan						
	a.Kelas I (km)	-	-	-	-	-	-
	b.Kelas II (km)	-	-	-	-	-	-
	c.Kelas III (km)	-	41,36	-	-	-	-
	d.Kelas IIIA (km)	33,52	-	-	-	-	-
	e.Kelas IIIB (km)	-	-	-	-	-	-
	f.Kelas IIIC (km)	-	-	769,63	769,63	769,63	715,89
	g.Kelas IV (km)	-	-	-	-	-	-
	h.Kelas Tidak Dirinci (km)	-	-	-	-	-	-
Jumlah – III (km)	33.52	41,36	769,63	769,63	769,63	769,63	715,89

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2020

Tahun 2020 jalan dalam kondisi baik sepanjang 474,26 km atau 66,25%, jalan kondisi sedang sepanjang 170,64 atau 23,83 %, dan rusak ringan sebesar 8,3% atau sepanjang 59,44 km. Untuk jalan rusak berat sepanjang 11, 55 km atau 1,61% yang berlokasi di Kecamatan Kemalang, Delanggu, Cawas, Bayat dan Gantiwarno.



Gambar 2.10.  
Peta Kondisi Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2020

**e. Kondisi jembatan**, dengan indikator tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Total jembatan yang ada di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2019 tercatat ada 340 buah jembatan, kondisi jembatan tersebut 311 buah kondisinya baik sedangkan 29 buah kondisinya sedang dan ringan. Selain dampak pandemi Covid-19, dengan berlakunya SK Bupati Klaten No 611.51/208 Tahun 2020 tentang status Ruas – Ruas Jalan di Kabupaten Klaten Sebagai Jalan Kabupaten juga berdampak pada jumlah jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga dengan perubahan kriteria jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu jembatan dengan panjang bentang minimal 4 meter. Ketiga hal tersebut berdampak pada kondisi jembatan di Kabupaten Klaten, sehingga pada tahun 2020 jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten menjadi 313 jembatan, dimana dalam kondisi baik sejumlah 200 jembatan, kondisi sedang, dan ringan sejumlah 113 jembatan sedangkan yang rusak berat tidak ada. Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.64.

Tabel 2.64.

Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

No	Kondisi Jembatan	Tahun (buah)			
		Prosentase			
		s/d 2017	2018	2019	2020
a.	Baik	308	308	311	200
		90,59%	90,59%	91,47%	63,9%
b.	Sedang dan Ringan	29	29	29	113
		8,53%	8,53%	8,53%	36,1%
d.	Rusak Berat	3	3	0	0
		0,89%	0,89%	0%	0%
Jumlah		<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>313</b>

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

## 2. Prasarana Sumber Daya Air

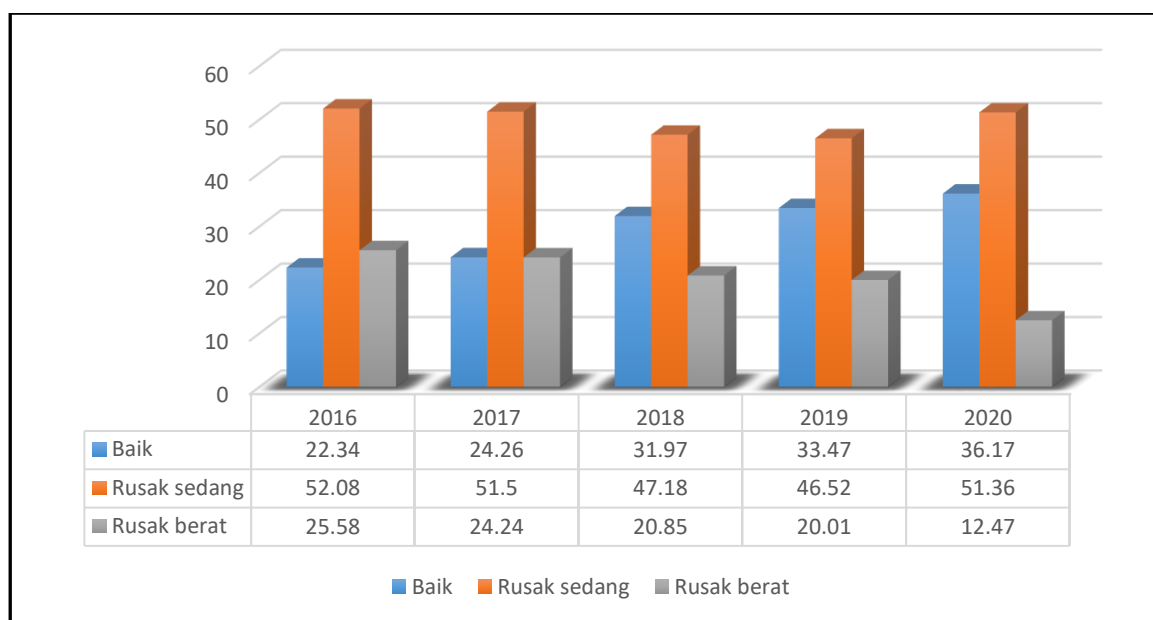
Berdasarkan Permen PU PR No. 14 tahun 2015 bahwa luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang

menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN. APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Kondisi DI Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.  
Kondisi DI di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kondisi DI	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Baik	6.636	22.34	7.208	24.26	9.499	31.97	9.945	33.47	10.747	36.17
Rusak sedang	15.476	52.08	15.303	51.5	14.019	47.18	13.822	46.52	15.261	51.36
Rusak berat	7.601	25.58	7.202	24.24	6.195	20.85	5.946	20.01	3.705	12.47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020



Grafik 2.30.  
Kondisi DI di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi DI di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 yang rusak berat mengalami kecenderungan penurunan. sedangkan DI yang baik mengalami kenaikan, dapat dikatakan bahwa penanganan DI di Kabupaten Klaten sudah baik tapi perlu adanya peningkatan penanganan terutama DI yang kondisinya rusak sedang, karena selama lima tahun terakhir mengalami stagnan.

Selain untuk kepentingan irigasi, pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air juga diarahkan untuk penanganan banjir di Kabupaten Klaten. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten yang meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/ tebing sungai, sesuai dengan kewenangan. Sungai di Kabupaten Klaten yang sering menimbulkan banjir (Sungai Dengkeng dan beberapa anak sungainya) merupakan kewenangan Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Sungai) sehingga untuk penanganannya Klaten berkoordinasi dengan BBWS. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang, terdapat kegiatan pengendalian banjir Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo Kabupaten Klaten, yang didanai dari anggaran APBN senilai 100 Milyar untuk tahun 2020-2024.

### 3. Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Capaian tahun 2016 sebesar 87,20% meningkat menjadi 91,77% ditahun 2020 dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 95,06% dan wilayah perdesaan sebesar 89,81%. Selengkapnya cakupan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.  
Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

NO	SEKTOR	SKALA	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Minum	Kabupaten	1.290.796	1.168.413	1.193.028	1.195.297	1.218.317
		%	87,2	87,31	89,15	91,14	91,77
	Perkotaan	531.477	464.778	464.778	483.169	487.910	
		%	90,02	90,15	92,48	95,03	95,06
	Perdesaan	759.319	703.635	728.250	719.495	731.327	
		%	84,38	84,47	87,15	88,71	89,81
2	Sanitasi	Kabupaten	1.286.924	1.227.771	1.282.234	1.339.762	1.327.577

NO	SEKTOR	SKALA	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
		%	88,22	91,75	95,82	100	100
		Perkotaan	487.035	466.889	485.515	502.572	513.253
		%	89,01	92,9	96,61	100	100
		Perdesaan	822.189	757.052	796.719	839.925	814.324
		%	87,43	90,6	95,35	100	100

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2021

Sesuai Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024, diharapkan cakupan untuk pelayanan air minum dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum pada Tahun 2024. Untuk cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2019, Kabupaten Klaten sudah mencapai akses (dasar) 100%. Untuk penuhi akses air minum ada permasalahan karena kesulitan sumber air di daerah lereng Merapi (Kecamatan Kemalang) dan sumber air asin di beberapa kecamatan. Beberapa desa di Kecamatan Kemalang yang mengalami kesulitan sumber air, yaitu Desa Tlogowatu, Desa Tegalmulyo, Desa Sidorejo, Desa Tangkil, Desa Kendalsari dan Desa Talun. Sedangkan daerah dengan sumber air asin berada di Kecamatan Cawas (Desa Bogor, Desa Pogung), Kecamatan Bayat (Desa Krikilan, Desa Ngerangan), Kecamatan Juwiring (Desa Gondangsari), Kecamatan Karangdowo (Desa Tumpukan, Desa Demangan, Desa Tambak, Desa Mungging) dan Kecamatan Pedan (Desa Kalangan, Desa Kaligawe). Untuk akses sanitasi, sejak tahun 2019 Kabupaten Klaten sudah mencapai akses (dasar) 100%. Upaya pemenuhan target terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, CSR, DAK, Hibah Air Minum, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya. Untuk peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jomboran, serta layanan lumpur tinja terjadwal yang akan segera direalisasikan.

#### 4. Penataan Ruang

Pada Tahun 2019 sedang dilakukan Revisi Perda RTRW Periode Tahun 2011-2031, yang sampai dengan Tahun ini (tahun 2020) belum ada bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/Kota.



Meskipun materi teknis RDTR sudah tersusun, Tahun 2020 ini proses revisi Perda RTRW Periode Tahun 2011-2031 sudah sampai pada pengurusan persetujuan substansi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sedangkan untuk petanya sudah mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Pada aspek pengendalian tata ruang, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren penurunan simpangan pemanfaatan ruang dari 21,02 % di tahun 2016 menjadi 12% pada tahun 2021 (tabel 2.67). Masih adanya simpangan pemanfaatan ruang (12%) di tahun 2020 ini, menunjukkan perlu adanya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perlu peningkatan kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Tabel 2.67.  
Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang  
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Persentase (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	6	6	6	0.23	0.23
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	5.98	5.98	5.98	0.1	0.1
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	25.06	25.06	25.06	25	25
4	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	15.82	15.82	15.82	11	11
5	Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel KA	61.36	61.36	61.36	12	12
6	Persentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	11.9	11.9	11.9	1	1
<b>Total Simpangan (%)</b>		<b>21.02</b>	<b>21.02</b>	<b>21.02</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

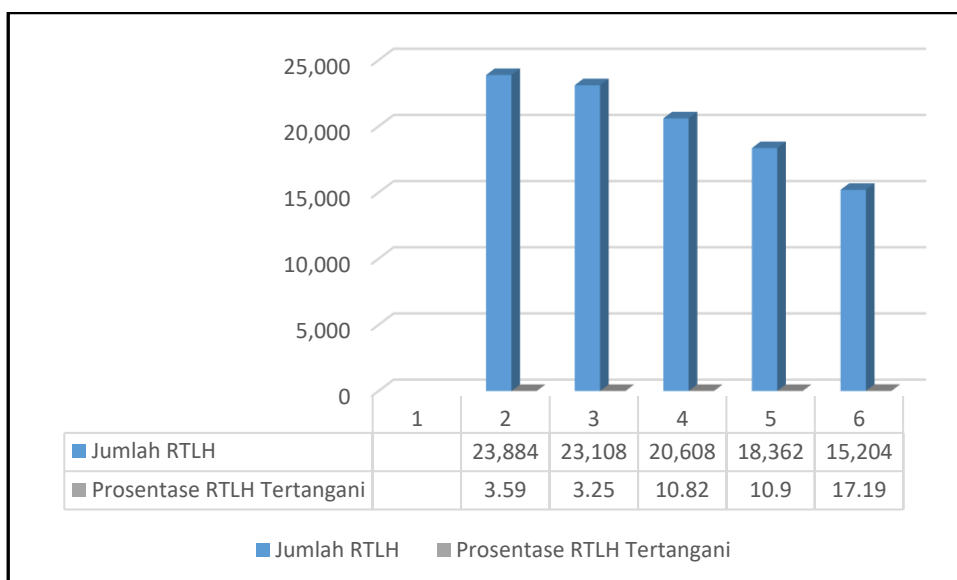
#### D. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator yang ditangani dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah penanganan rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana permukiman. Jumlah rumah tidak layak huni pada Tahun 2016 sebanyak 23.884 unit berkurang menjadi 20.608 unit pada tahun 2018, atau 6,18% dari total rumah di Kabupaten Klaten yang sebesar 333.567 unit (BPS 2017). Sedangkan tahun 2020 jumlah rumah tidak layak huni sebesar 15.204 unit. Peta penyebaran rumah tidak layak huni Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.  
Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2108	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1	Bayat	4.309	4.261	4.157	4.037	3.903
2	Cawas	1.299	1.263	1.159	986	685
3	Ceper	348	295	188	104	30
4	Delanggu	207	190	103	103	32
5	Gantiwarno	461	427	318	189	99
6	Jatinom	1.947	1.890	1.789	1.679	1.299
7	Jogonalan	453	418	321	242	199
8	Juwiring	741	698	576	447	369
9	Kalikotes	386	379	316	265	28
10	Karanganom	518	474	346	230	197
11	Karangdowo	1.075	1.038	950	808	734
12	Karangnongko	1.232	1.201	1.121	1.058	942
13	Kebonharjo	167	154	111	75	49
14	Kemalang	1.341	1.314	1.197	1.132	1.029
15	Klaten Selatan	159	141	64	64	42
16	Klaten Tengah	369	360	325	295	260
17	Klaten Utara	195	184	122	68	48
18	Manisrenggo	1.013	975	858	757	684
19	Ngawen	514	492	405	322	291
20	Pedan	414	400	288	213	32
21	Polanharjo	143	119	36	35	10
22	Prambanan	719	695	607	549	332
23	Trucuk	2.842	2.803	2.649	2.461	2.243
24	Tulung	1.051	1.013	903	770	701
25	Wedi	1.248	1.214	1.101	1.011	662
26	Wonosari	733	710	598	462	369
Total RTLH		23.884	23.108	20.608	18.362	15.204
Total RTLH Tertangani		890	776	2.500	2.246	3.158
Prosentase RTLH Tertangani		3,59	3,25	10,82	10,9	17,19

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klaten, 2020



Grafik 2.31.  
Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Dari Gambar Grafik diatas terlihat bahwa Prosentase (Rumah Tidak Layak Huni) RTLH tertangani di Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, harapannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga sudah tidak ada lagi (Rumah Tidak Layak Huni) RTLH di Kabupaten Klaten.

Permasalahan permukiman yang lain adalah masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Klaten. Data awal Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten adalah 236,50 ha (SK Bupati Nomor 050/373/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Klaten). Dari hasil penanganan Program Kotaku dengan Bantuan Dana Investasi (BDI) dari pusat serta penanganan APBD Kabupaten Tahun 2017, luasan kumuh bisa berkurang sebesar 73,31 hektar. Pada tahun 2019, selain dengan APBD, Penangan Kawasan Kumuh Kabupaten Klaten mendapatkan alokasi Bantuan Dana Investasi (BDI) program Kotaku sebesar 11 Milyar sehingga luasan kawasan kumuh tinggal 41,65 hektar atau sebesar 0,14 (%) dari luas kawasan permukiman perkotaan. Penangan kawasan kumuh di Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.69.  
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Luas kawasan permukiman kumuh perkotaan (ha)	236,5	163,19	139,21	41,65	41,65

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Prosentase kawasan permukiman kumuh perkotaaan (%)	0,78	0,54	0,46	0,14	0,14
Pengurangan luasan kumuh perkotaaan (ha)	0	73,31	23,98	97,56	0
Prosentase Pengurangan Kumuh (%)	0	31	10,14	41,25	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klaten, 2020

## **E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Memperhatikan luas wilayah 70.098,38 yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49 dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 91 dan 92 di tahun 2020 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya di masa pandemi Covid-19 di tahun ini adalah untuk mengurangi aktifitas dan berkumpulnya masyarakat untuk mencegah Penularan Covid-19.

### **1. Jumlah Linmas dan Penegakan Perda**

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya:



koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga lainnya.

Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatar belakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).

Tabel 2.70.

Jumlah Linmas dan Persentase Penegakan Perda Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	31	31	31	31	31	orang
Persentase Penegakan PERDA	91	91,25	91,50	91,60	92	%

Sumber : Satpol PP Kab. Klaten, 2020

## 2. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 kasusnya bersifat fluktuatif dimana data kondisinya disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Pelacuran Oleh Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL OPERASI PENERTIBAN					
			PGOT		PSK/ WTS	PASANGAN TIDAK RESMI	ANJAL / PUNK	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2016	12	14	7	8	46	12	4
2	2017	15	15	8	6	58	12	14
3	2018	15	8	6	10	78	18	7
4	2019	20	12	5	12	37	38	8
5	2020	16	17	15	6	54	31	17
SANKSI BAGI PELANGGAR								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Panti Resos Wanitatama Kota Surakarta selama 6 bulan ;</li> <li>- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ;</li> <li>- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut;</li> <li>- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di kantor SATPOL PP.</li> </ul>								

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2020

Tabel 2.72.  
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah dan Bir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
2	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
3	2018	0	0	0	0	0
4	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
5	2020	4	0	45 botol	2 dos dan 18 botol	2 dus dan 138 botol
<b>SANKSI</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;</li> <li>- Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.</li> </ul>						

*Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2020*

Berdasarkan Tabel 2.72 sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi pemicu tindak kriminal yang mengiringinya dan di masa pandemi Covid-19 di tahun ini untuk mengurangi aktifitas dan berkumpulnya masyarakat untuk mencegah Penularan Covid-19.

### **3. Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)**

Data yang tersaji tentang berbagai jenis pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) beserta jumlah penyelesaian. Salah satu jenis pelanggaran K3 yang menonjol yaitu kasus pelanggaran reklame dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 kasusnya bersifat fluktuatif, sedangkan jumlah kasus yang mengalami penurunan adalah kasus bangunan liar dimana data kondisinya disajikan pada Tabel 2.73.



Tabel 2.73  
Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan  
(K3) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelanggaran	Tahun (Jumlah Kejadian)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
(1)	(2)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
		Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian
1.	Reklame	383	207	402	387	800	750	750	710	658	620
2.	Perijinan Usaha	80	78	75	70	58	44	60	49	10	9
3.	Menara Telekomunikasi	7	6	15	13	10	8	15	12	13	13
4.	PKL	102	100	102	100	360	330	350	305	255	220
5.	Bangunan Liar	45	45	44	40	15	14	14	14	14	12

Sumber : Satpol PP Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.73 sebagaimana tersebut di atas, pelanggaran reklame memiliki jumlah pelanggaran yang tertinggi. Ini terjadi karena pelanggaran dapat dilakukan dengan mudah karena cukup memasang reklame tanpa ijin dan menempelkannya di pohon atau tiang listrik. Setelah reklame ditertibkan oleh petugas, pemasang reklame biasanya akan menempelkan reklamenya kembali yang menurutnya tindakan tersebut paling mudah dan cepat dilakukan untuk promosi produknya daripada harus mengurus proses perijinan selesai. Jenis pelanggaran tertinggi selanjutnya adalah PKL yang berdagang tidak mematuhi aturan. Pelanggaran ini dilakukan demi mencukupi nafkah keluarga maka para PKL tidak mengindahkan aturan dan merasa apabila mematuhi aturan maka mereka khawatir dagangannya akan tidak laku. Jenis pelanggaran lain yaitu perijinan usaha, menara telekomunikasi, dan bangunan liar karena melakukan pelanggaran tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). Perijinan usaha tidak memiliki IMB karena pengusaha ingin cepat beroperasi tanpa menunggu proses perijinan selesai. Pengusaha menara telekomunikasi kesulitan mengurus IMB karena sebagian penduduk setempat ada yang tidak setuju ada tower di lingkungannya, dan bangunan liar tidak memiliki IMB karena merasa bangunannya menyalahi aturan sehingga tidak akan terbit IMB nya.

Tabel 2.74.  
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016-2020

No.	Jumlah Desa	Tahun (Jumlah Realisasi)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	401	320	305	355	355	250

Sumber : Satpol PP Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan tabel 2.74 diatas, untuk cakupan patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016 – 2020,

Patroli Wilayah Kabupaten yang meliputi 26 kecamatan, 401 Desa dan Kelurahan. Patroli tidak bisa mencakup seluruh wilayah Kabupaten Klaten dikarenakan di tahun ini ada Pandemi Covid-19 sehingga Patroli difokuskan untuk Operasi Pendisiplinan Pemakaian Masker dan sekaligus mensosialisasikan gerakan perilaku Protokol Kesehatan untuk pencegahan Covid-19 dengan cara 3 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak)

Tabel 2.75.  
Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016–2020

No	Tahun	Rasio per 10.000 penduduk	Jumlah Personil Satpol PP	Jumlah Penduduk
1	2016	0,4	56	1.433.869
2	2017	0,4	67	1.308.712
3	2018	0,4	62	1.316.880
4	2019	0,4	61	1.323.609
5	2020	0,4	52	1.319.530

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2020

Berdasar tabel 2.75 diatas, untuk Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja masih rendah dimana semua data yang tersaji adalah tentang berbagai jenis pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) beserta jumlah penyelesaian.

Tabel 2.76  
Tingkat Penyelesaian K3 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun						Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	91	91,00	91,25	91,5	91	92	%

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2020

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja. Salah satu jenis pelanggaran K3 yang menonjol yaitu kasus pelanggaran reklame dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 dimana kasusnya bersifat fluktuatif. Sedangkan jumlah kasus yang mengalami penurunan adalah kasus bangunan liar.

#### 4. Tanggap Bencana (Kebakaran)

Dalam tanggap bencana khususnya kebakaran masih terdapat permasalahan yang perlu dilakukan peningkatan penanganan. Masalah tersebut diantaranya tingkat kejadian kebakaran masih





cukup tinggi di wilayah manajemen kebakaran Kabupaten Klaten dan tidak terpenuhi layanan kebakaran dalam waktu tanggap oleh pemadam kebakaran. Selengkapnya data terkait tanggap bencana (kebakaran) di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77  
Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	66,6	64,20	70,10	67,63	63,00	%
Waktu tanggap (response Time) penanganan kebakaran	13,0	13,8	15,1	15,9	14,9	menit

Sumber : Satpol PP Kab. Klaten, 2020

Tingkat resiko kejadian kebakaran masih tinggi karena belum dapat memenuhi waktu tanggap kebakaran. Hal tersebut terjadi karena belum terpenuhinya jumlah pos layanan pemadam kebakaran, jumlah SDM pemadam kebakaran kurang, dan belum terpenuhinya sarana prasarana pemadam kebakaran.

##### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Mendasari Peraturan dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan membentuk Tim penerapan SPM Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam mengoordinasikan pelaksanaan SPM di daerahnya, lebih terkoordinasi dalam melakukan pengumpulan dan penyediaan data yang valid serta aktual sesuai dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu target SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mendasari Permendagri No. 100 Tahun 2018 adalah pemerintah daerah dapat mencapai target 100% dalam Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Pelaksanaan indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klaten diterapkan mulai tahun 2020. Berikut angka

realisasi dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada.

Tabel 2.78.  
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat  
Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Laporan Masuk	Yang Diselesaikan (terrealisasi)	Capaian 2019 (%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	941	866	92

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2020

Tabel 2.78. diatas menggambarkan Realisasi Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja pada jenis pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2020, dan di masa pandemi Covid-19 di tahun ini, untuk mengurangi aktifitas dan berkumpulnya atau berkerumunnya masyarakat untuk mencegah Penularan Covid-19. Keberhasilan penanganan tersebut tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Klaten terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan melalui alokasi/pagu anggaran.

## 6. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.  
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum di Kabupaten  
Klaten Tahun 2016-2020

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	17	-	-	1	-
2.	Konflik Sara	17	3	1	-	8
3.	Gerakan Radikalisme	21	9	2	1	-
4.	Kenakalan Remaja	4	3	4	1	-

Sumber: Kantor Kesbangpol Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.79 sebagaimana tersebut di atas, jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Ancaman terorisme yang terjadi pada Tahun 2019 adalah diketemukannya perempuan yang berasal dari Desa Joton Kecamatan Jogonalan namun sudah lama berdomisili/pindah ke Jakarta. Tersangka merupakan jaringan Abu Hamzah Sibolga Sumatera Utara. Untuk konflik SARA tidak terjadi sedangkan gerakan radikalisme terjadi pada demonstrasi/unjuk rasa pada Bulan Oktober 2019. Rata-rata jumlah dari jenis permasalahan di tahun terakhir mengalami penurunan hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir konflik SARA. Konflik SARA mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu berjumlah delapan.

### 1. Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI )

Indeks Demokrasi Indonesia dirumuskan :

$$\frac{\text{Jumlah indikator indeks demokrasi indonesia}}{\text{Jumlah total indikator indeks demokrasi indonesia}} \times 100\% \quad |$$

- a. Tahun 2016 : 66,71; angka ini turun 3,04 poin dibandingkan dengan IDI 2015 sebesar 69,75.  
Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 66,06; aspek Hak-hak Politik sebesar 67,24; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 66,69
- b. Tahun 2017 : 70,85; angka ini naik 4,14 poin dibandingkan dengan IDI 2016 sebesar 66,71.  
Angka IDI 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 69,07; aspek Hak-hak Politik sebesar 67,24; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 78,82.
- c. Tahun 2018 : 72,17; angka ini naik 1,32 poin dibandingkan dengan IDI 2017 sebesar 70,85.  
Angka IDI 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 76,21; aspek Hak-hak Politik sebesar 66,92; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 75,42.
- d. Tahun 2019 : 77,22; angka ini naik 5,75 poin dibandingkan dengan IDI 2018 sebesar 72,17.

Angka IDI 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 78,43; aspek Hak-hak Politik sebesar 67,91; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 90,50.

(Sumber BPS Klaten dan Tim Pokja IDI Kab. Klaten, 2019)

Tabel 2.80  
Perkembangan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  
Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	IDI	Variabel			Keterangan
			Kebebasan Sipil	Hak-Hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi	
1	2016	69,75	79,44	67,28	61,48	Kategori Sedang
2	2017	66,71	66,06	67,24	66,69	Kategori Sedang
3	2018	70,85	69,07	67,24	78,82	Kategori Sedang
4	2019	72,17	76,21	66,92	75,42	Kategori Sedang
5	2020	77,22	78,43	67,91	90,50	Kategori Sedang

Sumber: Kesbangpol Kab. Klaten, 2020

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi dimana tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu :

- a. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*)
- b. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)
- c. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution Of Democracy*)

Metodologi pengukuran IDI berdasarkan 4 sumber data, yaitu dari

- a. *Review* surat kabar lokal.
- b. *Review* dokumen (peraturan daerah, peraturan bupati, dll).
- c. *Focus Group Discussion* (FGD)
- d. Wawancara yang mendalam

Tiga aspek tersebut terjabarkan dalam 11 variabel dan 28 indikator.

Tingkat demokrasi di Kabupaten Klaten dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 dikategorikan pada level sedang yaitu berkisar pada angka indeks 60 – 80.

Indeks demokrasi selama empat tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini akibat dari dinamika politik pengaruh hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi. Sedangkan aspek hal-hal politik dikarenakan berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengoreksi kinerja pemerintah.

Adapun aspek lembaga demokrasi disebabkan turunnya kinerja dan peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah. Metodologi penghitungan IDI ini menggunakan 4 sumber data, yaitu *review* surat kabar lokal, *review* dokumen (perda, pergub, dan lain-lain), *focus group discussion*, dan wawancara mendalam. Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif Indikator IDI sebanyak 28 poin.

Pada Tahun 2016 ada 2 indikator baru dari variabel peran birokrasi pemerintah daerah untuk menyempurnakan variabel demokrasi. Namun pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,38 poin pada aspek kebebasan sipil. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,01 poin pada aspek kebebasan sipil. Pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,14 poin yaitu pada aspek kebebasan sipil dan lembaga-lembaga politik. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,32 poin yaitu pada aspek kebebasan sipil.

Adapun perkembangan dinamika politik di Kabupaten Klaten selama Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat pada hasil pemilihan umum Tahun 2019 yaitu keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024 meningkat sebesar 33% dari periode sebelumnya. Angka keterwakilan perempuan sebesar 18% dari jumlah anggota dewan seluruhnya atau 9 orang (wanita) menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dalam parlemen. Harapan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Klaten, baik melalui pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal.

Dilihat dari angka kepesertaan pemilih dalam pemilu pada Tahun 2019 meningkat sebesar 12% dari Tahun 2018. Dimana angka kepesertaan pemilih dalam pemilu pada Tahun 2018 sebesar 70,85%, dan pada Tahun 2019 sebesar 82,34%. Pada tahun 2020 kepesertaan pemilu sebesar 81,4%.

## **7. Kebencanaan**

Kejadian bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2020 yang disajikan di Tabel 2.1 langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sampai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Di Kabupaten Klaten beberapa mitigasi baik struktural maupun non struktural telah

dilakukan antara lain: pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan siaga bencana, pembangunan taman kebencanaan, pelatihan tanggap bencana, pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana, penyelenggaraan Sekolah Sungai, pembentukan Desa Tangguh Bencana, pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC). Sampai dengan Tahun 2019, ada tiga desa tangguh bencana yang terbentuk yaitu Desa Ngandong (Kecamatan Gantiwarno) dari dana APBD Provinsi, Sidorejo (Kemalang), dan Balak (Cawas) dari dana APBD Kabupaten. Sedangkan di Tahun 2020 hanya ada dua Desa Tangguh Bencana juga yaitu di Desa Sumopuro Kecamatan Jogonalan dan Desa Towangsan Kecamatan Gantiwarno.

Salah satu ancaman bencana di Kabupaten Klaten adalah potensi Erupsi Gunung Merapi. Untuk itu diperlukan akses jalan guna mengevakuasi warga Lereng Merapi apabila terjadi peningkatan aktifitas Gunung Merapi yang berpotensi mengancam keselamatan warga. Total panjang jalur evakuasi Merapi di Kabupaten Klaten mencapai 63.81 km yang terhubung ke 3 (tiga) tempat evakuasi akhir (TEA): Kebondalem Lor (Prambanan), Malangjiwan (Kebonarum), dan Demakijo (Karangnongko). Dari Tabel 2.81 terlihat masih ada jalur evakuasi bencana yang masih dalam kondisi rusak (ringan, sedang, berat) dimana sebaran kondisi jalur evakuasi yang rusak per ruas jalan dapat dilihat juga pada tabel tersebut. Mengingat kondisi Gunung Merapi yang aktif maka penanganan/perbaikan jalur evakuasi menjadi hal mendesak/prioritas untuk di lakukan. Besarnya biaya untuk penanganan jalur evakuasi Merapi memerlukan peran serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat melalui skema pembiayaan bankeu provinsi maupun DAK infrastruktur. Pada tahun 2020 bantuan yang bersumber dari bantuan Gubernur Jawa Tengah sebesar 14 Milyar untuk peningkatan ruas jalan Tegalmulyo-Surowono, yang baru terlaksana di tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2021 bantuan keuangan Gubernur untuk penangan jalur evakuasi merapi sebesar 16 milyar untuk ruas jalan Surowono-Jatirajeg. Untuk APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak ada alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur jalan karena fokus untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pada beberapa ruas jalur evakuasi yang sudah terbangun masih memerlukan penanganan sarana keselamatan jalan,

seperti marka jalan, lampu penerangan jalan (PJU), cermin cekung, guadril.

Tabel 2.81.  
Kondisi Jalur Evakuasi Merapi di Kabupaten Klaten  
Tahun 2020

Kondisi Jalur Evakuasi	Panjang (km)	Prosentase
Baik	35,67	58,73
Rusak Sedang	12,24	20,15
Rusak Ringan	10,76	17,72
Rusak Berat	2,07	3,41
Jumlah	60,73	100

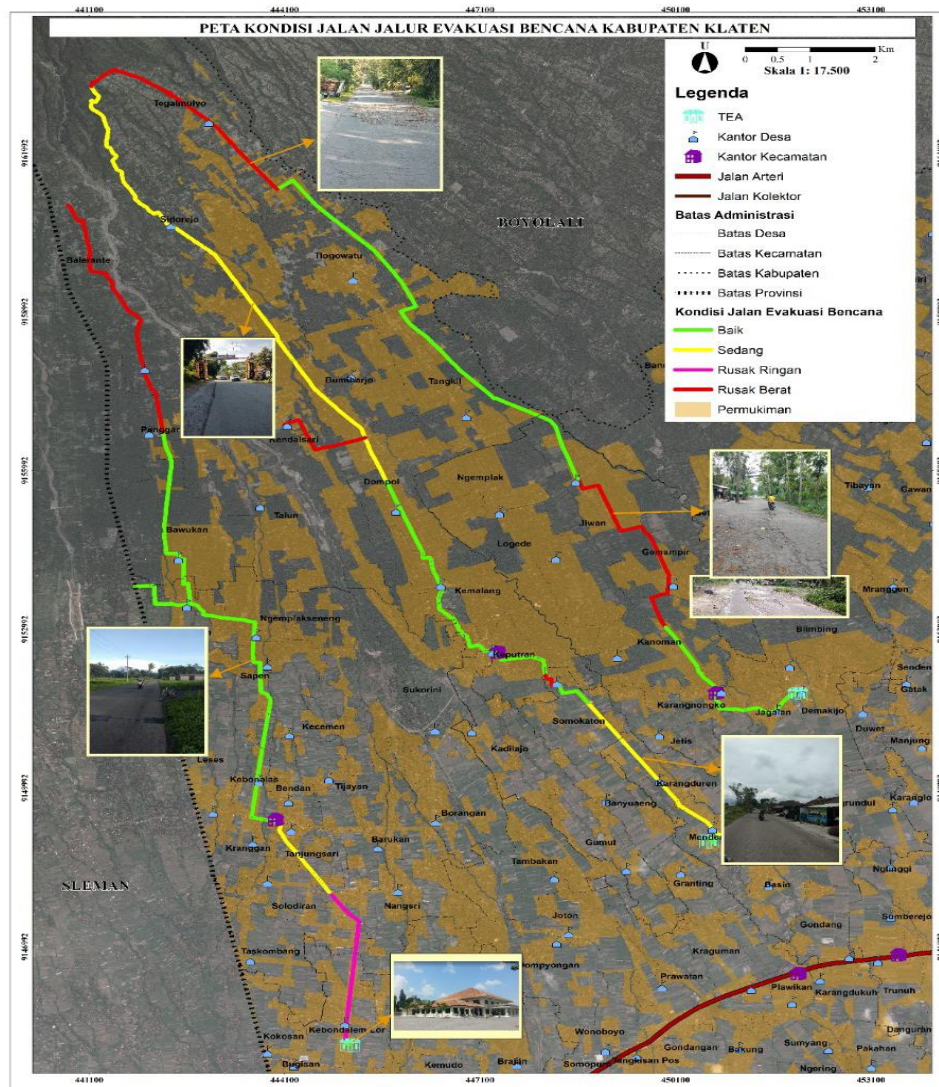
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2020

Tabel 2.82.  
Kondisi Jalur Evakuasi Merapi berdasarkan Ruas Jalan Kabupaten  
Tahun 2020

Nama Ruas	Kondisi jalan (km)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Dengok-Nangsri	3,30	0,60		
Kepurun-Panggung	2,41	0,30	0,88	
Manisrenggo-Genengsari	1,83	0,8		
Nangsri-Tanjungsari	1,25	0,3		
Ngemplakseneng-Batas DIY	1,33	0,5		
Ngemplakseneng-Genengsari	1,50	0,2		
Panggung-Balerante	0,1	1,4	2,39	
Dompol-Kaliwuluh	1,14	0,71	1,3	
Dompol-Kendalsari/Woro	0,10	0,56	1	
Kaliwuluh-Deles	0,10	2,2	1,85	0,6
Mipitan-Pasar Kembang	1,3	0,19		
Pasar Kembang-Dompol	3,63	0,1		
Gemampir-Jiwan	3,09			
Gorosan-Gemampir	0,76	0,10		
Kecamatan Karangnongko-Gorosan	1,45			
Tegalmulyo-Surowono	3,44	0,44	1,8	0,95
Pasar Kembang-Kadilaju	0,45			0,52
Kadilaju-Manisrenggo	4,61	1,0		
Sendanglebak-Puluhwatu	0,82			
Basin-Mipitan	0,15	2,6	1,55	
Mipitan-Kadilaju	1,84	0,24		
Karangnongko-Sendanglebak	1,08			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2020

Gambar 2.11 menunjukkan peta jalur evakuasi bencana di Kabupaten Klaten. Pada gambar tersebut kondisi jalan untuk evakuasi bencana terbagi dalam beberapa kondisi antara lain: kondisi jalan dengan keadaan baik, keadaan sedang, dan rusak berat.



Gambar 2.11.  
Peta Jalur Evakuasi Merapi Kabupaten Klaten

### 8. Bencana Non Alam Covid-19

Di akhir tahun 2019 muncul wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang bermula dari Kota Wuhan Negara Cina. Awal tahun 2020 Covid-19 terus menyebar secara cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga menjadi pandemi global. Hingga saat ini. Adanya wabah Pandemi Covid-19 telah mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta menimbulkan kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi seluruh dunia. Di Indonesia, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi adanya 2 orang pasien positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah orang positif Covid-19 terus bertambah, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Melihat penyebaran virus yang sangat cepat ini dan juga kerugian ekonomi yang ditimbulkannya serta jatuhnya korban jiwa hingga ratusan orang, maka pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020

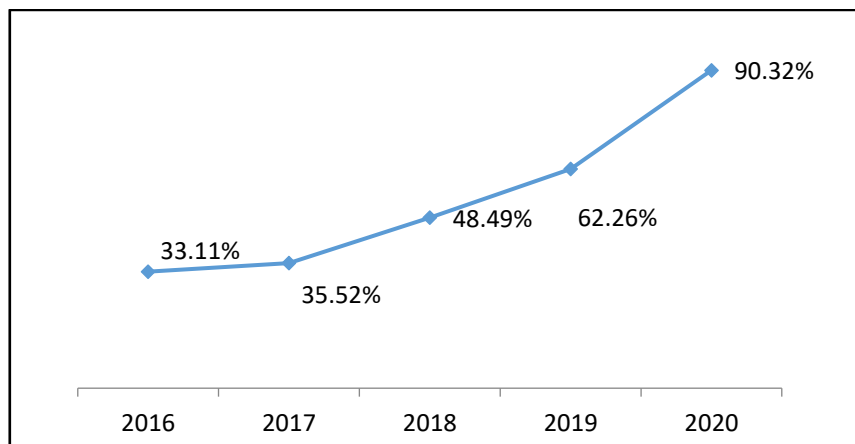


tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan adanya status darurat kesehatan ini Presiden Joko Widodo meminta semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penanganan wabah ini dengan melakukan perubahan anggaran untuk fokus penanganan Covid-19. Salah satunya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, di mana semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan *refocussing* alokasi penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu juga Surat Keputusan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ. Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pemerintah Daerah diminta untuk untuk melakukan penyesuaian target pendapatan serta rasionalisasi belanja, dimana untuk belanja modal dan belanja barang/jasa agar dirasionalisasi minimal 50%. Pada tanggal 1 April 2020 Di Kabupaten Klaten ditemukan kasus Positif Covid-19 sebanyak 1 orang sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa). Adapun langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam percepatan penanganan dan penyebaran penyebaran Covid-19 ini, di antaranya dengan mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana, memperkuat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga tingkat RW dan RT serta mengalihkan anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.

## **F. Bidang Sosial**

Pengentasan Pemerlu Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PPKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja layanan sosial diukur dengan PPKS yang memperoleh

bantuan dan persentase PPKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Lainnya. Perkembangan PPKS yang memperoleh bantuan dapat Tahun 2016 – 2020 disajikan pada Grafik 2.32.



Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kab. Klaten, 2020.

Grafik 2.32.

#### PPKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016–2020

Berdasarkan Grafik 2.32. sebagaimana tersebut di atas, karena dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PPKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terhadap keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak. Dari grafik diatas dapat dilihat perkembangan penanganan PPKS di Kabupaten Klaten 5 (lima) tahun terakhir, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penurunan persentase bukan berarti ada penurunan kinerja. Dikarenakan pada tahun tersebut dilakukan penanganan secara bertahap sehingga belum mempengaruhi jumlah secara angka absolute penanganan PPKS yang ada. Tahun 2020 penanganan PPKS sebanyak 156.127 dari 172.857 yang seharusnya mendapatkan bantuan atau sebesar 90.32%.

Tabel 2.83.

#### Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan

Sumber Dana	2016	2017	2018	2019	2020
APBN	605.162	605.162	597.896	615.118	519.412
APBD Prov	8.086	8.086	12.303	28.629	8.396
APBD Kab	32.400	32.400	36.900	54.500	59.832
Jumlah	645.648	645.648	647.099	698.247	587.640

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kab. Klaten, 2019

Berdasar tabel 2.83 bahwa jaminan perlindungan sosial bidang Kesehatan dengan jumlah dana yang bersumber dari APBN pada Tahun

2016–2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2018 mengalami penurunan, dan meningkat lagi pada Tahun 2019. Jumlah dana yang bersumber dari APBD Provinsi pada Tahun 2017 - 2019 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup tajam. Pada Tahun 2017 sebesar 8.086 dan pada Tahun 2019 menjadi sebesar 28.629. Demikian juga jumlah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten pada Tahun 2016-2020 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup tajam. Pada Tahun 2016 sebesar 32.400 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 54.500. Akan tetapi pada tahun 2020 sumber dana APBN dan APBD Provinsi mengalami penurunan dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Sedangkan untuk jaminan perlindungan sosial (APBD Kabupaten) mengalami kenaikan Masyarakat mendapat Jaring Pengaman Sosial (JPS ) berupa bahan sembako.

Tabel 2.84.  
Jumlah Disabilitas Kabupaten Klaten  
Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	JENIS KECACATAN												Jml
		Daksa	Netra	Rungu	Wicara	Tuna Rungu dan Wicara	Tuna Netra dan Daksa	Tuna Netra. Rungu. Wicara	Tuna Rungu. Wicara. dan Daksa	Tuna Rungu. Wicara. Netra dan Daksa	Cacat Mental Restardasi	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	Fisik dan Mental	
1	BAYAT	164	90	56	30	18	11	7	4	10	132	55	45	622
2	CAWAS	185	83	57	28	25	16	4	16	14	156	75	98	757
3	CEPER	108	55	44	15	24	22	5	22	7	175	75	103	655
4	DELANGGU	73	43	26	20	12	10	4	11	7	126	48	67	447
5	GANTIWARNO	166	51	45	19	25	12	5	8	8	134	52	98	623
6	JATINOM	130	48	49	18	18	14	5	6	7	144	29	52	520
7	JOGONALAN	150	79	44	17	18	12	7	9	10	109	47	50	552
8	JUWIRING	141	84	75	25	26	17	8	21	5	109	45	90	646
9	KALIKOTES	106	43	13	13	10	4	3	4	6	70	33	38	343
10	KARANGANOM	92	49	14	20	20	8	4	7	10	129	52	55	460
11	KARANGDOWO	148	71	31	20	12	8	9	4	5	121	42	39	510
12	KARANGNONGKO	122	34	20	8	22	8	7	3	2	146	35	78	485
13	KEBONARUM	40	18	10	1	8	4			2	52	19	44	198
14	KEMALANG	87	50	25	8	18	7	5	5	2	86	23	53	369
15	KLATEN SELATAN	111	33	20	12	11	6	3	7	2	105	31	50	391
16	KLATEN TENGAH	36	21	8	5	6	4	5	4	2	69	23	31	214
17	KLATEN UTARA	55	33	18	8	4	3	2	2	8	45	17	27	222
18	MANISRENGGO	94	41	44	14	22	13	10	7	3	121	44	64	477
19	NGAWEN	117	69	27	5	7	6	5	2	7	144	36	28	453
20	PEDAN	135	59	33	21	20	6	8	11	3	96	38	52	482
21	POLANHARJO	115	45	37	14	9	4	6	9	9	108	40	84	480
22	PRAMBANAN	135	44	37	16	20	8	8	12	8	133	29	39	489

No	Kecamatan	JENIS KECACATAN												Jml
		Daksa	Netra	Rungu	Wicara	Tuna Rungu dan Wicara	Tuna Netra dan Daksa	Tuna Netra. Rungu. Wicara	Tuna Rungu. Wicara. dan Daksa	Tuna Rungu. Wicara. Netra dan Daksa	Cacat Mental Restardasi	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	Fisik dan Mental	
23	TRUCUK	144	79	103	39	21	21	12	12	12	144	55	83	725
24	TULUNG	135	56	22	16	12	12	3	13	1	86	31	35	422
25	WEDI	174	67	59	26	24	10	4	7	6	177	52	58	664
26	WONOSARI	138	58	45	29	15	9	12	10	10	117	37	56	536
	<b>2020</b>	<b>3101</b>	<b>1403</b>	<b>962</b>	<b>447</b>	<b>427</b>	<b>255</b>	<b>151</b>	<b>216</b>	<b>166</b>	<b>3.034</b>	<b>1.063</b>	<b>1.517</b>	<b>12.742</b>
	<b>2019</b>	<b>3100</b>	<b>1402</b>	<b>960</b>	<b>446</b>	<b>426</b>	<b>254</b>	<b>150</b>	<b>215</b>	<b>165</b>	<b>3.033</b>	<b>1.062</b>	<b>1.516</b>	<b>12.729</b>
	<b>2018</b>	<b>2579</b>	<b>1257</b>	<b>864</b>	<b>378</b>	<b>362</b>	<b>218</b>	<b>129</b>	<b>181</b>	<b>142</b>	<b>2.787</b>	<b>873</b>	<b>1.268</b>	<b>11.038</b>
	<b>2017</b>	<b>2585</b>	<b>1268</b>	<b>870</b>	<b>383</b>	<b>367</b>	<b>221</b>	<b>132</b>	<b>184</b>	<b>144</b>	<b>2.703</b>	<b>886</b>	<b>1.279</b>	<b>11.022</b>
	<b>2016</b>	<b>2621</b>	<b>1296</b>	<b>883</b>	<b>389</b>	<b>381</b>	<b>226</b>	<b>132</b>	<b>183</b>	<b>147</b>	<b>2.717</b>	<b>903</b>	<b>1.298</b>	<b>11.176</b>

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kab. Klaten, 2020

Berdasar tabel 2.84, jumlah disabilitas pada semua jenis kecacatan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 jumlahnya mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2016 berjumlah 11.176 meningkat menjadi 12.742 pada Tahun 2020. Penanganan PPKS pada jenis ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan bagi yang memerlukan pelayanan disabilitas. Penanganan bagi yang memerlukan pelayanan disabilitas pun dapat berupa bantuan sosial bagi pemerlu pelayanan disabilitas berat.

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa di semua bidang terutama di bidang sosial. Seperti halnya di wilayah Kabupaten Klaten sendiri. Berikut dampak sosial Pandemi Covid-2019 di bidang sosial Kabupaten Klaten;

1. Dengan bertambah besarnya Penerima manfaat ( PPKS ) PGOT Di rumah Singgah berakibat pada peningkatan penghuni rumah singgah, sehingga perlu difikirkan untuk peningkatan sarpras di Rumah Singgah tersebut.
2. Meningkatnya Permasalahan anak baik pelaku maupun korban akibat terdampak permasalahan pandemi Covid-19, dimana Data ADSR (Anak Dalam Situasi Rentan) sebanyak 2.653 orang sampai bulan Oktober 2020. Disamping itu terdapat peningkatan jumlah anak berhadapan dengan hukum sejumlah 84 anak, sehingga total sampai dengan Desember 2020 sejumlah total 2.737 anak.
3. Meningkatnya permasalahan kemiskinan/keluarga miskin di masyarakat akibat terdampak Covid-19 dikarenakan banyak kegiatan usaha yang terhenti sehingga mengalami kerugian yang secara langsung berdampak pada ekonomi keluarga. Banyaknya karyawan yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga akan memunculkan penambahan angka kemiskinan di Kabupaten

Klaten.

4. Sebagian karyawan yang ter-PHK adalah kaum perempuan, maka diperlukan kebijakan khusus dalam rangka Pemberdayaan Perempuan Korban Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
5. Banyaknya *Drop Out* KB dikarenakan pelayanan terbatas dengan adanya wabah Covid-19 (karena pelayanan harus memakai APD sesuai dengan protokol kesehatan).
6. *Total Fertility Rate* (TFR) atau angka kelahiran meningkat dengan adanya kebijakan untuk di rumah saja. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan terjadinya angka kehamilan dan secara otomatis menyebabkan angka kelahiran meningkat.

### 2.1.3.2. Fokus Pelayanan Wajib Non Dasar

#### A. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

##### 1. Lingkungan Hidup

Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Klaten di masa datang yang menyangkut lingkungan hidup adalah penyediaan air bersih, sanitasi, sampah, dan persoalan limbah.

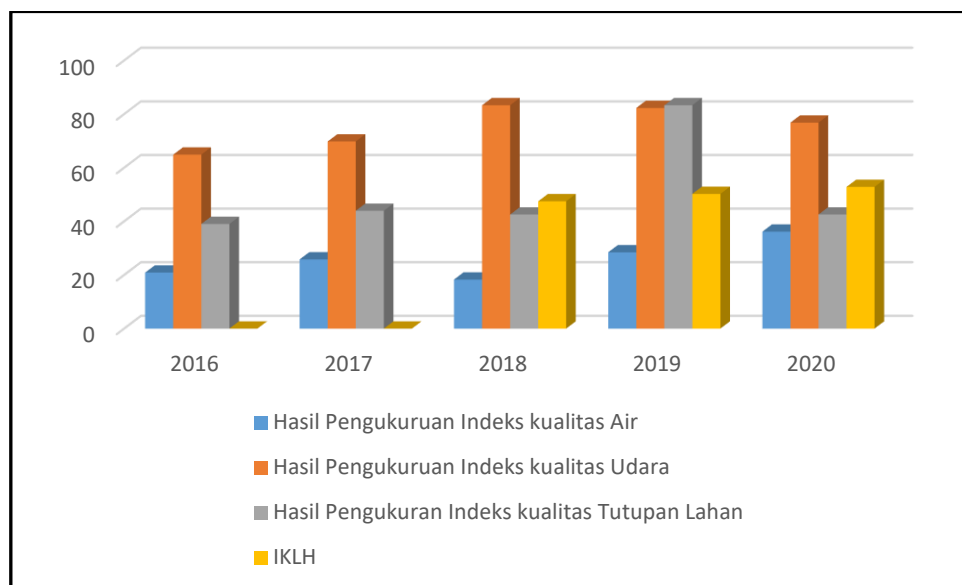
Pengujian kualitas air permukaan tahun 2020 dilakukan di 13 titik 7 sungai dari target 10 sungai. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sampel adalah Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur, (DAS Bengawan Solo). Untuk kualitas air tahun 2020 sebesar 36,15% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara Kabupaten Klaten sebesar 76,82% (baik). Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 sebesar 42,54% mengalami penurunan juga dari tahun sebelumnya. Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 dari 50,24% menjadi 52,85% sebagaimana terlihat pada tabel 2.85.

Tabel 2.85.  
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	16	18,28	18,28	28,46	36,15
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	60,95	83,3	83,17	82,29	76,82

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	41,64	42,54	42,54	42,54	42,54
<b>IKLH</b>	<b>39,74</b>	<b>47,49</b>	<b>47,45</b>	<b>50,24</b>	<b>52,85</b>

Sumber : DLHK Kab. Klaten, 2021



Sumber: DLHK Kab. Klaten, 2021

Grafik 2.33.

#### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Dari Grafik diatas diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Klaten cenderung mengalami kenaikan dari lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020.

Tabel 2.86.  
Timbunan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No.	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan * (kg)	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan * (kg)
1	Bayat	65.505	19.652	65.771	19.731.3
2	Cawas	61.266	18.380	60.704	18.211.2
3	Ceper	67.322	20.197	68.188	20.456.4
4	Delanggu	43.215	12.965	43.505	13.051.5
5	Gantiwarno	40.437	12.131	41.443	12.432.9
6	Jatinom	61.966	18.590	62.183	18.654.9
7	Jogonalan	61.328	18.398	61.927	18.578.1
8	Juwiring	60.840	18.252	61.325	18.397.5
9	Kalikotes	37.993	11.398	38.217	11.465.1
10	Karanganom	47.638	14.291	47.406	14.221.8
11	Karangdowo	45.300	13.590	45.557	13.667.1
12	Karangnongko	38.327	11.498	38.367	11.510.1

No.	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan * (kg)	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan * (kg)
13	Kebonarum	20.955	6.287	21.140	6.342.0
14	Kemalang	39.961	11.988	40.343	12.102.9
15	Klaten Selatan	45.126	13.538	45.546	13.663.8
16	Klaten Tengah	42.255	12.677	42.865	12.859.5
17	Klaten Utara	48.613	14.584	49.256	14.776.8
18	Manisrenggo	44.227	13.268	44.336	13.300.8
19	Ngawen	46.983	14.095	47.304	14.191.2
20	Pedan	48.994	14.698	49.000	14.700.0
21	Polanharjo	42.923	12.877	43.179	12.953.7
22	Prambanan	52.137	15.641	52.957	15.887.1
23	Trucuk	81.152	24.346	82.226	24.667.8
24	Tulung	55.497	16.649	55.805	16.741.5
25	Wedi	54.627	16.388	54.672	16.401.6
26	Wonosari	64.943	19.483	64.355	19.306.5
<b>JUMLAH</b>		<b>1.319.530</b>	<b>395.859</b>	<b>1.327.577</b>	<b>398.273.1</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan tabel 2.86 di atas, jumlah timbulan sampah Tahun 2019 sebesar 395.859 ton. Sedangkan jumlah rata-rata sampah yang terangkut ke TPA Troketon setiap hari sebesar 94.286 ton (berdasar timbangan di TPA). Sehingga total sampah yang terangkut ke TPA Troketon. sebesar 23.82% dari total timbulan sampah. Sedangkan di tahun 2020 jumlah timbulan sampah 398.273,1 ton dan jumlah rata-rata sampah yang terangkut ke TPA Troketon setiap hari sebesar 94.286 ton. Sehingga total sampah yang terangkut ke TPA Troketon sebesar 50,66% dari total timbulan sampah di tahun 2020.

Saat ini Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) yang beroperasi di Kabupaten Klaten hanya satu, yaitu TPA Troketon yang berlokasi di Kecamatan Pedan, sedangkan TPA Beteng, Jomboran, dan Joho, dan TPA Candirejo sudah tidak beroperasi lagi.

Selain diangkut ke TPA Troketon, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dilakukan dengan menggalakkan kegiatan pengurangan sampah melalui pembangunan TPS3R, baik yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri maupun yang dibangun oleh pemerintah serta pembentukan bank sampah di masyarakat. Hingga tahun 2019 di Kabupaten Klaten tercatat sudah ada 45 kelompok bank sampah dan 17 TPS3R skala kecamatan. Untuk TPS3R skala kecamatan

mampu mengolah sampah 25 ton per 30 hari atau sekitar 0,83 ton per hari sedangkan untuk bank sampah baru mampu mengolah sampah 50-60 kg/hari.

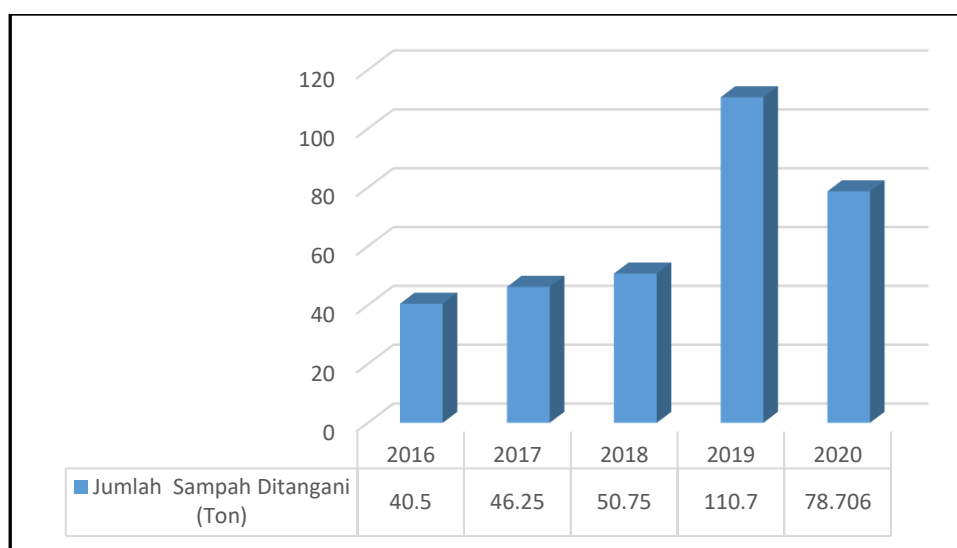
Tabel 2.87.  
Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016 - 2020

Unit	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Bank sampah	Jumlah Unit			45	45	45
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	N/A	N/A	0,05	0,05	0,05
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	N/A	N/A	0,05	0,05	0,05
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	N/A	N/A	0,57%	0,57%	0,57%
TPS3R	Jumlah Unit	N/A	N/A	14	17	17
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	N/A	N/A	0,83	0,83	0,83
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	N/A	N/A	11,66	14,17	14,17
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	N/A	N/A	2,95%	3,58%	3,58%
TPA Troketon	Jumlah Unit	1	1	1	1	1
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	40,5	46,25	50,75	94,286	78,706
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	40,5	46,25	50,75	94,286	78,706
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	12,89%	14,72%	16,16%	23,82%	50,66%
<b>TOTAL SAMPAH TERTANGANI</b>	<b>Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)</b>	<b>N/A</b>	<b>46,25</b>	<b>50,75</b>	<b>N/A</b>	<b>78,706</b>
	<b>Jumlah Sampah ditangani (ton)</b>	<b>40,5</b>	<b>46,25</b>	<b>50,75</b>	<b>110,7</b>	<b>78,706</b>



Unit	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah</b>	<b>12,89%</b>	<b>14,72%</b>	<b>16,16%</b>	<b>27,97%</b>	<b>50,66%</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2020  
DLHK Kab Klaten, 2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten. tahun 2020

Grafik 2.34.

Jumlah Penanganan sampah yang tertangani di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

## 2. Kehutanan

Hutan di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung seluas 810,6 Ha dan Hutan Produksi seluas 639,8 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh Perum Perhutani, sedangkan hutan lainnya adalah Hutan Rakyat seluas 1.202 Ha.

Luas Lahan Kritis di Kabupaten Klaten tahun 2020 tercatat seluas 375,46 hektar, lahan sangat kritis seluas 418,91 hektar, dan lahan agak kritis seluas 0 hektar, sebagaimana terlihat pada tabel 2.88.

Tabel 2.88.

Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Kecamatan	Tingkat Kekritisannya (Ha) tahun 2019			Tingkat Kekritisannya (Ha) tahun 2020		
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
1	Bayat	742,13	22,5	-	-	-	-
2	Cawas	17,37	-	-	-	-	-
3	Ceper	-	-	-	-	-	-
4	Delanggu	-	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Tingkat Kekritisian (Ha) tahun 2019			Tingkat Kekritisian (Ha) tahun 2020		
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
5	Gantiwarno	60,18	-	-	-	-	-
6	Jatinom	1.580,04	-	-	-	-	-
7	Jogonalan	-	-	-	-	-	-
8	Juwiring	-	-	-	-	-	-
9	Kalikotes	-	-	-	-	-	-
10	Karanganom	-	-	-	-	-	-
11	Karangdowo	-	-	-	-	-	-
12	Karangnongko	1.165,32	-	-	-	-	-
13	Kebonarum	-	-	-	-	-	-
14	Kemalang	3.186,68	0,29	99,25	-	375,46	418,91
15	Klaten Selatan	-	-	-	-	-	-
16	Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-
17	Klaten Utara	-	-	-	-	-	-
18	Manisrenggo	1.308,53	-	-	-	-	-
19	Ngawen	0,73	-	-	-	-	-
20	Pedan	-	-	-	-	-	-
21	Polanharjo	-	-	-	-	-	-
22	Prambanan	423,21	3,41	-	-	-	-
23	Trucuk	17,48	-	-	-	-	-
24	Tulung	300,79	-	-	-	-	-
25	Wedi	22,86	-	-	-	-	-
26	Wonosari	-	-	-	-	-	-
Kab. Klaten		8.825,32	26.2	99,25	-	375,46	418,91

Sumber: Cabang Dinas Kehutanan (CDK) X Surakarta, 2020

## B. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 4 (empat) bidang, yaitu: (i) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (ii) Pelayanan Pencatatan Sipil, (iii) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan (iv) Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), Surat Keterangan Kependudukan (SKK), Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah/Datang), Kartu Identitas Anak (KIA), Pelayanan Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte

Pengakuan/Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dengan produk dokumen perjanjian kerjasama dengan Instansi Pemerintah/Rumah Sakit/Sekolah/Dunia Usaha dan Industri serta inovasi-inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Perkembangan jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89.  
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Akte	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelahiran	22.356	23.256	27.755	23.295	19.511
2	Kematian	615	1.400	2.116	3.585	2.922
3	Perkawinan	441	450	473	440	397
4	Perceraian	58	58	71	63	160

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.89 sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa pelayanan akte bidang pencatatan sipil mengalami fluktuasi dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Untuk pelayanan akte kelahiran pada Tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena cakupan kepemilikan akte kelahiran sudah tinggi yaitu 91,87%. Secara keseluruhan pelayanan akte pencatatan sipil mengalami peningkatan terutama pelayanan Akte Perceraian karena adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk setiap perceraian (Non Muslim) supaya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2016–2020 dapat disajikan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90.  
Penduduk Kabupaten Klaten Belum Memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2016-2020

No	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2016	927.310	106.872
2	2017	894.986	93.846
3	2018	877.190	91.538
4	2019	845.224	71.223
5	2020	827.614	19.522

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.90 sebagaimana tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2016–2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020

penduduk yang belum memiliki KTP elektronik berkurang sebanyak 51.701, sedangkan untuk penduduk yang belum memiliki Akte Lahir pada tahun 2020 berkurang sebanyak 17.610. Hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP. Rekam data biometric bagi penduduk wajib KTP serta pencetakan KTP bagi penduduk wajib KTP, selain itu dengan adanya inovasi pelayanan berupa pelayanan jemput bola adminduk bagi masyarakat di sekolah dan desa-desa. Disamping itu kesadaran masyarakat Klaten akan arti pentingnya dokumen kependudukan meningkat.

### C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan agar masyarakat dan desa di suatu wilayah dapat lebih berkualitas dan sejahtera, sehingga pemerintah membentuk program-program ataupun kegiatan dan lembaga-lembaga yang bertujuan sebagai sarana pemberdayaan. Tabel berikut menggambarkan perkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.91.  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten  
Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	26	39	52	65	78	%
Persentase LPMD	391	391	391	391	391	Desa
Jumlah PKK aktif (Kelembagaan PKK )	428	428	428	428	428	Desa / Kelurahan
Jumlah Posyandu aktif	2.262	2.272	2.272	2.313	2.313	Kelompok

Sumber: Dispermades Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, LPMD di Kabupaten Klaten cukup berkembang dengan adanya peningkatan dari kelompok binaan PKK, jumlah PKK aktif, dan jumlah posyandu aktif. Hal ini harus terus dipertahankan dan tingkatkan. Karena fungsi LPMD sendiri adalah membantu pemerintah desa dalam hal penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Pasar Desa.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu Tahun 2013-2014 masih relatif rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa. Peningkatan mulai terlihat pada Tahun 2015 ketika Dana Desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 300 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. BUM Desa Dasar sejumlah 120;
2. BUM Desa Tumbuh sejumlah 159;
3. BUM Desa Berkembang sejumlah 14;
4. BUM Desa Maju sejumlah 7.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUM Desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUM Desa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan lembaga ekonomi Pedesaan Tahun 2015–2020 disajikan pada Tabel 2.92. Data disajikan mulai tahun 2015, dikarenakan tahun ini merupakan tahun pertama terlihatnya peningkatan pementukan BUMDes.

Tabel 2.92.  
Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan di Kab Klaten Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah BUMDes</b>	<b>Jumlah Pasar Desa</b>	<b>Pasar Desa Dikelola oleh Desa</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
2015	31	41	3
2016	86	41	3
2017	90	41	3
2018	54	41	3
2019	6	41	3
2020	57	41	41
Jumlah	357	41	41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.92, dapat dilihat bahwa jumlah BUMDes dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan jumlah BUMDes sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 357 BUMDes. Sedangkan untuk jumlah pasar desa dari tahun ke tahun sama sebanyak 41 pasar desa yang mana dari tahun 2015-2019 hanya 3 pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, baru mulai tahun 2020 pengelolaan pasar desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa.

Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan

masyarakat desa, dengan diserahkannya tata kelola semua pasar desa ke Pemerintahan Desa pada awal tahun 2020. Semua pasar desa menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Desa untuk mengelolanya, dengan harapan terjadi peningkatan perekonomian desa dan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Guna Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan pelatihan Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Pelatihan Teknologi Tepat Guna di perdesaan dari kurun waktu Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93.  
Pelatihan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono. Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo, Kecamatan Polanharjo	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Nangsri, Kec Manisrenggo	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Jurangjero. Kec. Karanganom 2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Karang. Kec. Karanganom 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Karanganom, Kec. Karanganom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Jungkare, Kec. Karanganom 5. Pelatihan pertanian	-

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
					hidroponik di Desa Kahuman, Kec. Ngawen	
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karangnom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karangnom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar Desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi 2. Posyantek Antar Desa TA 2018 di Kec. Wedi	1. Posyantek antar Desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar Desa Kec. Trucuk	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten. 2020.

Berdasarkan Tabel 2.93 sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan). Kemudian proses pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) antar desa dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2020 tidak ada data perkembangan pemanfaatan teknologi tepat guna di pedesaan maupun pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) karena anggaran kena refocusing akibat pandemi Covid-19.

Tabel 2.94.

Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kab Klaten  
Tahun 2016-2020

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
2016	Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan	Kecamatan Wedi : Ds. Kaligayam, Ds. Kadilanggon, Ds. Melikan	Sudah menyusun RPKP	SK Bupati No. 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kab. Klaten

<b>Tahun</b>	<b>Nama / Tema Kawasan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
2017	Kawasan Sentra Batik	Kecamatan Bayat : Ds. Jarum, Ds. Banyuripan, Ds. Beluk, Ds. Kebon	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik	Kecamatan Cawas : Ds. Tlingsing, Ds. Mlese, Ds. Balak. Baran	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi	Kecamatan Manisrenggo : Ds. Taskombang, Ds. Solodiran, Ds. Kranggan, Ds. Nangsri	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang : Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Bumiharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
2018	Kawasan Wisata Budaya	Kecamatan Prambanan : Ds. Tlogo, Ds. Bugisan, Ds. Kemuda	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kab. Klaten
	Kawasan Pertanian Organik	Kecamatan Karanganyam : Ds. Gempol, Ds. Jeblog, Ds. Ngabeyan, Ds. Pondok	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Terpadu	Kecamatan Kebonarum : Ds. Gondang, Ds. Basin, Ds. Pluneng, Ds. Malangjiwan, Ds. Karangduren, Ds. Ngrundul, Dan Ds. Menden	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan IRT dan Pangan Lestari	Kecamatan Polanharjo : Ds. Kranggan, Ds. Keprabon, Ds. Kebonharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Air dan Pertanian	Kecamatan Polanharjo : Ds. Janti, Ds. Sidowayah, Ds. Sidoharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
2019	Kawasan Peternakan Kambing	Kecamatan Ngawen: Ds. Gatak, Ds. Duwet, Ds. Manjung	Proses SK Bupati	
	Kawasan Wisata Air dan Perikanan	Kecamatan Tulung: Ds. Wunut, Ds. Cokro, Ds. Daleman, Ds. Dalangan	Proses Persetujuan Kerjasama antar Desa	
	Kawasan Pertanian Terpadu	Kecamatan Delanggu: Ds. Dukuh, Ds. Jetis, Ds. Butuhan, Ds. Banaran, Ds. Bowan, Ds. Sribit, Ds. Mendak, Ds. Krecek, Ds. Karang, Ds. Sabrang, Ds. Tlobong, Ds. Gatak, Ds.	Proses Persetujuan Kerjasama antar Desa	



Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
		Delanggu, Ds. Kepanjen, Ds. Segaran, Ds. Sidomulyo.		
2020	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2020.

Dari data yang tersaji, pada Tahun 2016 hanya ada 1 data pengembangan kawasan pedesaan, yaitu pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan Wedi. Pengembangan kawasan pedesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Penempatan lokasi tersebut didasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada Tahun 2017-2018, pengembangan kawasan pedesaan ada 9 pengembangan kawasan pedesaan, dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu

- 1). Pengembangan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk, dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pengembangan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.
- 2). Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak, dan Baran di Kecamatan Cawas. Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 3). Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nangsri di Kecamatan Manisrenggo. Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 4). Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi tersebut sudah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi.
- 5). Pengembangan Kawasan Pertanian Organik meliputi Desa Gempol, Desa Jeblog, Desa Ngabeyan, dan Desa Pondok Kecamatan Karangnom. Pengembangan kawasan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

- 6). Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu meliputi Desa Gondang, Desa Basin, Desa Pluneng, Desa Malang jiwana, Desa Karangduren, Desa Ngrundul, dan Desa Menden Kecamatan Kebonarum. Pengembangan kawasan wisata terpadu tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 7). Pengembangan Kawasan Industri Rumah Tanggapan Pangan Lestari meliputi Desa Kranggan, Desa Keprabon, dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo. Pengembangan kawasan industri rumah tangga dan pangan lestari tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 8). Pengembangan Kawasan Wisata Air dan Pertanian meliputi Desa Janti, Desa Sidowayah, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo. Pengembangan kawasan wisata air dan pertanian tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 9). Pengembangan Kawasan Wisata Budaya meliputi Desa Taji, Desa Kemudo, Desa Bugisan, Desa Tlogo, dan Desa Kebon dalem Kidul Kecamatan Prambanan. Pengembangan kawasan wisata budaya tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Berdasarkan Tabel 2.94 sebagaimana tersebut di atas, ada 9 (sembilan) kawasan dengan desa sebanyak 40 (empat puluh) desa yang akan dikembangkan berbasis kawasan perdesaan yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan ada 3 kawasan perdesaan yang sedang berproses untuk kerja sama dalam kawasan (untuk Ngawen sudah terjadi kesepakatan dan berproses untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati).

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global termasuk di Indonesia dan Kabupaten Klaten khususnya memberikan dampak bukan hanya secara kesehatan tapi juga dampak di sektor ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan baik mulai dari tingkat atas sampai pada level terbawah yaitu desa. Pada tahun 2020 tidak melakukan sosialisasi pembentukan kawasan pedesaan karena anggaran kena refocusing akibat pandemi Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan masyarakat Desa adalah terbentuknya gugus tugas pencegahan dan pengendalian yang disebabkan *Corona Disease 2019* (Covid-19) di seluruh desa/ kelurahan. Gugus tugas ini terdiri dari kepala desa, ketua dan anggota BPD, sekdes, Perangkat desa, ketua RT/RW, lembaga non pemerintah, dan tokoh masyarakat. Salah satu tugas gugus ini adalah melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui

Pencatatan tamu yang masuk ke desa; pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain; pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP); serta memastikan tidak ada warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya. Adanya gugus tugas ini diharapkan dapat meminimalisir dampak Covid-19 di tingkat desa baik dari di aspek kesehatan, perekonomian dan bahkan pertahanan kemanan sampai pada level desa. Peran sertanya dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dari sisi kesehatan yaitu banyak memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait protokol kesehatan, diantaranya dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta air mengalir, pemakaian masker dan isolasi mandiri bagi pendatang baru, serta mengadakan penyemprotan desinfektan secara rutin di masing-masing wilayah. Dari sisi pertahanan kemanan, gugus tugas ini memiliki peran menyusun dan menetapkan SOP yang harus dipatuhi masyarakat terutama bagi pendatang, baik SOP dari segi kesehatan maupun keamanan. SOP bagi pendatang diantaranya adalah kewajiban lapor RT dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah. Selain itu, di setiap desa telah dibuat ruang isolasi yang berfungsi untuk mengisolasi pendatang selama 14 hari.

#### **D. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Indikator pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diantaranya:

##### **1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif**

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan tersebut karena merupakan dampak dari pemutakhiran data/validasi data peserta baru update menggunakan nomor KK, Peserta KB Aktif dengan tren yang meningkat antara tahun 2016-2017. Pada Tahun 2017 cakupan sangat tinggi mencapai 80,17%. Pada tahun tersebut dilakukan pemutakhiran data menggunakan nomor KK sehingga cakupan peserta aktif menurun menjadi 69,7% pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 pencapaian peserta KB aktif meningkat menjadi 71,39%. Sedangkan pada Tahun 2020 peserta KB aktif menurun lagi menjadi 70,94 disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga akseptor takut

untuk datang ke faskes KB. Sedangkan target nasional *Contraceptive Prevalensi Rate /CPR* tahun 2020 adalah 61,78% dan Tahun 2024 63,41%, sehingga capaian *Contraceptive Prevalensi Rate/CPR* di Kabupaten Klaten sudah jauh melampaui target. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, dan juga kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB baru dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95.  
Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	PUS	Peserta KB baru		Peserta KB Aktif	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2016	201.950	26.461	13.10	158.943	78.70
2017	211.577	23.783	11.24	169.626	80.17
2018	196.717	15.565	7.91	137.109	69.70
2019	197.949	12.923	6.52	141.315	71.39
2020	195.133	12.348	6.33	138.344	70.94

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 2.95. sebagaimana tersebut di atas, Peserta KB Aktif mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada Tahun 2016 sebanyak 26.461 peserta, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 23.783 peserta KB baru. Tahun 2018 menjadi 15.565 peserta KB baru, dan pada Tahun 2019 turun menjadi 12.923 peserta. Pada Tahun 2020 peserta KB turun lagi menjadi 12.348 peserta KB baru disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga akseptor takut untuk datang ke faskes KB.

## 2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Berdasarkan hasil pendataan keluarga, perkembangan jumlah keluarga sejahtera Tahun 2016-2020 mengalami penurunan sebesar 1.828 keluarga yang menunjukkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten. Tahun 2018 jumlah keluarga sejahtera mengalami peningkatan yang signifikan dan jumlah KS I menurun sangat besar. Kemungkinan yang tadinya KS I sudah meningkat kesejahteraannya. Pada Tahun 2019 jumlah keluarga sejahtera sedikit menurun sebanyak 546 keluarga. Sedangkan KS I meningkat sebesar 59 keluarga. Kemungkinan sebagian mengalami penurunan tingkat kesejahteraan dari Keluarga Sejahtera menjadi KS I. Secara umum jumlah keluarga pra sejahtera terus dapat ditekan. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam



rangka mengentaskan kemiskinan menjadi prioritas utama. Meskipun peningkatan kesejahteraan masyarakat belum mencapai hasil yang optimal, Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016–2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.96.  
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2016–2019

Tahun	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
2016	67.400	83.239	239.583	390.222
2017	80.935	114.736	192.994	388.665
2018	52.688	81.688	238.374	372.750
2019	52.686	81.747	237.828	372.261
2020	52.722	82.267	237.755	372.744

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2020

Tabel 2.97.  
Persentase Keluarga Pra Sejahtera & Sejahtera 1

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Keluarga Pra Sejahtera & Sejahtera 1	33.58	34.08	40.41	43.21	36.21	%

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2020

### 3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2020 pada angka 0,30%. Rata-rata anak yang dilahirkan di Kabupaten Klaten ada 2 orang anak, atau dapat dilihat dari angka TFR 2.1. Namun cakupan pelayanan keluarga berencana semakin menurun karena kurangnya kesadaran pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah. Akan tetapi di sisi lain terdapat peningkatan jumlah pasangan usia subur yang tidak terlayani kebutuhan ber-KB atau yang dikenal dengan istilah *unmet need*, yaitu selain pus yang dikarenakan penundaan maupun tidak ingin anak lagi pada tahun 2020 menjadi 16,95. Hal ini disebabkan adanya pengurangan pemihakan pergerakan pelayanan KB. Jumlah petugas lapangan tiap desa atau yang disebut Pembantu Pembina KB desa (PPKBD) 1 orang tiap desa, yaitu yang bertugas membantu petugas lapangan KB/penyuluh KB dalam melakukan advokasi di wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Klaten. Berikut gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Klaten yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2.98.  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten  
Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.07	1.03	0.46	0.2	0.30	%
Total Fertility Rate (TFR)	-	-	2.1	2.1	2.1	Anak per usia subur
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	78.7	64.93	69.7	71.39	70.9	%
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10.13	9.3	27.3	15.91	16.95	%
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	%

Sumber : Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2020

\* Untuk TFR. DissosP3AKB baru mulai melakukan perhitungan pada tahun 2018 semenjak TFR ini menjadi indikator di Perubahan RPJMD.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk rata-rata per tahun belum mengalami penurunan karena tingginya angka kelahiran dan peningkatan Umur Harapan Hidup. Sedangkan Rata-Rata TFR 2.1 belum mengalami penurunan karena meningkatnya Drop Out KB dan menurunnya CPR di masa Pandemi.

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan; 1). Pada Masa Pandemi kegiatan Pelayan KB bergerak/Safari untuk peserta Non BPJS di batasi sehingga turunnya jumlah Akseptor KB; 2). Pada masa pandemi calon akseptor enggan untuk mengakses faskes karena takut tertular Covid-19.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) pada tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya (2019) dikarenakan: 1). Pada masa pandemi, kegiatan Pelayan KB bergerak/Safari untuk peserta Non BPJS dibatasi sehingga turunnya jumlah Akseptor KB; 2). Pada masa pandemi, calon akseptor peserta BPJS enggan untuk mengakses faskes karena takut tertular Covid-19; 3). Pelayanan KB MKJP pada masa pandemi memerlukan biaya lebih tinggi karena calon akseptor harus dilakukan Rapid Test terlebih dahulu dan Nakes harus menggunakan APD Level 1. Untuk Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan dari tahun ke tahun sama dikarenakan baru

terdapat 1 orang PPKB di setiap Desa sehingga beban pekerjaan tidak sebanding dengan penghargaan yang diberikan.

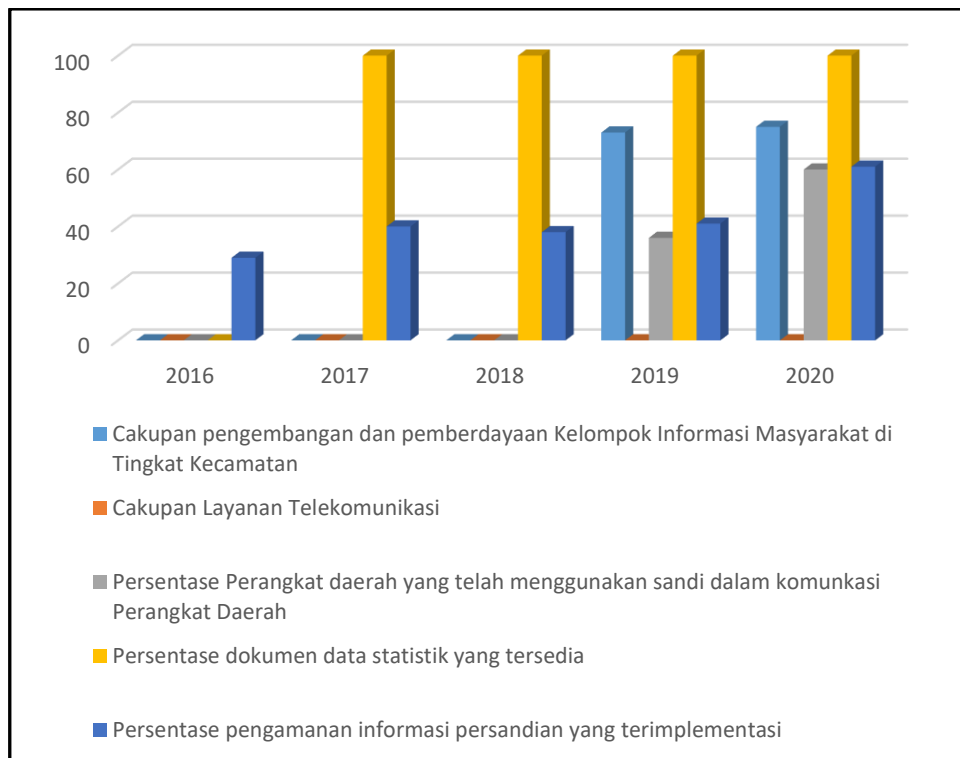
#### **E. Bidang Komunikasi dan Informatika**

Bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten telah memiliki website yaitu [www.klatenkab.go.id](http://www.klatenkab.go.id). sementara untuk warung internet (warnet) sudah menyebar di 26 kecamatan dan telah menjadi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penyiaran radio lokal terdapat 7 stasiun penyiaran (1 milik pemerintah daerah/RSPD, 6 lainnya milik swasta/komunitas), dan terdapat 7 buah surat kabar lokal. Pada Tahun 2017 prosentase sistem berbasis informasi sebanyak 20 sistem informasi. Pada Tahun 2018, sistem berbasis informasi pada Tahun 2018 meningkat menjadi 35 sistem informasi, dan sistem berbasis informasi pada Tahun 2019 meningkat menjadi 39 sistem informasi ditambah 391 jadi sekitar 430 sistem informasi. Sedangkan di Tahun 2020 hanya 20 sistem informasi yaitu SIAP PKK, Awasi Corona, SIMWAS, BUMDES, APIK PARIWISATA, AIDS, Website Profile DISDAGKOP UKM, Website Profil Setwan, Website Profil Bagian Pemerintahan, dan Website Profil Disperwaskim. Kurangnya informasi yang disampaikan di website Kabupaten Klaten disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dalam bidang komunikasi dan informasi. Jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Klaten juga dirasakan masih belum optimal karena masih banyaknya wilayah yang minim akan akses internet. Hal ini juga menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi. Selain itu, belum adanya sistem yang memadai dalam mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi birokrasi menjadi kendala tersendiri bagi Kabupaten Klaten dalam komunikasi antar dinas pemerintahan dan masyarakat. Adapun capaian indikator Kinerja Program Diskominfo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.99.  
Indikator Kinerja Program Diskominfo Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	61,5	73	75
Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	52,2	53,6	56,5
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	-	-	-	36	60
Persentase dokumen data statistik yang tersedia	-	100	100	100	100
Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	29	40	38	41	55

Sumber: Diskominfo Kabupaten Klaten, 2020



Grafik 2.35.  
Indikator Kinerja Program Diskominfo tahun 2016 – 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Diskominfo lima tahun terakhir ini dari lima indikator kinerja yang ada selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), yang mengalami kenaikan adalah cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan sedangkan yang setiap tahunnya tetap adalah Persentase dokumen data statistik yang tersedia. Total dari indikator Kinerja Program Diskominfo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



## F. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten diantaranya meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Data pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100.  
Perkembangan Koperasi dan UKM  
di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020

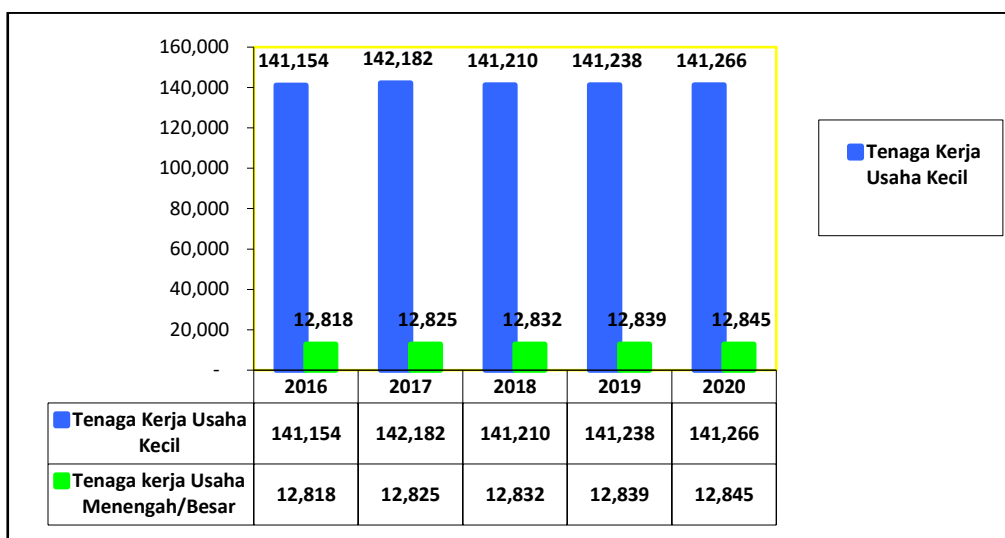
No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koperasi	943	883	886	889	893
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	566	581	710	713	717
4	Koperasi Tidak Aktif	377	302	176	176	176
5	Koperasi Sehat	12	14	8	13	15
6	Koperasi Cukup Sehat	554	567	347	346	352
7	Jumlah Pengusaha	Jumlah ( Orang )				
	a).Pengusaha Mikro/Kecil	34.673	34.680	34.686	50.027	50.070
	b).Pengusaha Menengah	134	135	137	5.030	5.030
8	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah ( Orang )				
	a).Usaha Kecil	141.154	141.182	141.210	141.238	141.266
	b).Usaha Menengah/Besar	12.818	12.825	12.832	12.839	12.845

Sumber: Dinas Dagkop & UMKM dan Disperinaker Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.100 sebagaimana tersebut di atas, perkembangan koperasi aktif mengalami kenaikan yaitu sebesar 713 koperasi di Tahun 2019 dibandingkan jumlah koperasi aktif Tahun 2020 sebesar 717 koperasi. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya pembinaan yang lebih intens kepada pengurus koperasi. Jumlah Mikro/Kecil pada tahun 2019 sebanyak 50.027 mengalami kenaikan menjadi 50.070 pada tahun 2020 dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan pendataan ulang pada tahun 2019 memunculkan *by name by address* untuk masing-masing pelaku usaha.

Dengan adanya kegiatan pendataan ulang tersebut. maka berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja untuk usaha kecil dari 141.238 orang pada Tahun 2019 menjadi 141.266 orang pada tahun 2020.

Sedangkan jumlah tenaga kerja usaha menengah/besar pada tahun 2019 sebanyak 12.839 orang mengalami kenaikan menjadi 12.845 orang pada tahun 2020. Gambaran trend jumlah tenaga kerja di perusahaan kecil dan menengah/besar Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada Grafik 2.36.



Sumber: Disperinaker Kabupaten Klaten, 2020.

Grafik 2.36.

Trend Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar di Kabupaten Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan Grafik 2.36 sebagaimana tersebut di atas, Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif terutama pada usaha kecil. Hal ini disebabkan karena: 1) pemasaran produk. banyak produk-produk yang menumpuk pada para pelaku kecil, yang tentu saja secara tidak langsung akan berdampak pada pemberhentian tenaga kerja; 2) di samping itu juga disebabkan karena faktor usaha musiman, yaitu bahwa pada musim-musim tertentu pelaku usaha akan kebanjiran pesanan sehingga akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan begitu juga untuk sebaliknya di saat sepi pesanan.

Disamping itu telah ditetapkan 7 (tujuh) Produk Unggulan Daerah dengan Keputusan Bupati Nomor 050/84 Tahun 2016 yaitu Batik, Lurik, Konveksi, Mebel, Logam, Keramik dan Tembakau. Di samping itu, Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) Klaster UKM yaitu Klaster Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Mebel, Logam, Handycraft, Makanan Olahan, Lereng Merapi, Desa Wisata dan Minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017.

Pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi *trademark* dan *brand image* bagi Kabupaten Klaten. Dengan adanya pandemik Covid-19 mengakibatkan pelaku usaha maupun lembaga koperasi mengalami kemunduran baik penyediaan bahan baku, modal, tenaga kerja maupun produksinya serta penurunan

omset penjualan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya beberapa kegiatan berbagai macam pelatihan untuk klaster UMKM maupun bagi pengurus koperasi yang ada, perlunya penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi, fasilitasi bantuan bahan baku, peralatan maupun modal usaha bagi UMKM dan Koperasi, fasilitasi PIRT, label halal dan HAKI serta fasilitasi insentif berupa pengurangan atau penundaan pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) .

#### **G. Bidang Statistik**

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Kualitas data diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: akurat, relevan, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), koheren (*coherence*) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial serta mudah diinterpretasi (*interpretability*). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM.

Untuk mewujudkan data dan informasi pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan dokumen Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Input-Output, Profil Desa, Profil Daerah, Evaluasi RKPD, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Semua dokumen ini dimaksudkan sebagai ukuran kinerja daerah untuk setiap tahunnya.

#### **H. Bidang Perpustakaan**

Pada Tahun 2020 jumlah perpustakaan desa sebanyak 51 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 4 unit yang melayani 26 kecamatan. 468 titik lokasi di Kabupaten Klaten dilakukan secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit

sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling.

Dari jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Klaten tersebut, berikut data terkait jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun, dan Jumlah koleksi judul buku perpustakaan.

Tabel 2.101.

Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	40.003	41.225	68.346	83.511	70.878	Orang/ Pengunjung
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	43.979	44.687	45.362	49.786	49.786	Eksemplar
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	60.793	60.793	60.793	60.793	60.793	Orang/ Pengunjung
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	35.535	35.561	35.898	37.457	37.457	Eksemplar

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2020

Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2020 sejumlah 70.878 pengunjung. Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dilaksanakan buka tutup. Hal ini dilakukan untuk keselamatan para pengunjung/Pemustaka. Untuk Perpustakaan keliling dan *car free day* terhenti karena anggaran terasionalisasi untuk penanganan Covid-19 dan obyek lokasi kunjungan di sekolah dengan sistem daring sehingga kegiatan terhenti. Kemudian untuk jumlah dan koleksi buku perpustakaan tidak ada penambahan, karena di tahun 2020 anggaran kegiatan pengadaan bahan pustaka dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat pada tahun 2019 dan 2020 baru 2 (dua) orang sehingga masih diperlukan tenaga perpustakaan yang bersertifikat.

## I. Bidang Kearsipan

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 sebanyak 74.700 arsip, dan pada Tahun 2020 sudah mencapai 120.417 arsip dengan capaian target 8.72%. Penurunan persentasi capaian lebih rendah dari tahun 2019, hal ini dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalisasi untuk penanganan

Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan disesuaikan anggaran yang tersedia.

Perkembangan pengelolaan arsip secara baku SKPD dan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.102.

Data terkait Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	10	10	13	26	8.72	%
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	-		2	2	orang

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2020.

## J. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam galian golongan C, dapat dilihat pada disajikan pada Tabel 2.103. Hal ini sebetulnya merupakan kewenangan Provinsi namun dampak yang dirasakan ada di kabupaten, sehingga data itu perlu ditampilkan. Selain hal itu ada kegiatan fasilitasi terkait bidang energi dan sumber daya mineral pada Bagian Perekonomian Setda misalnya untuk fasilitasi sambungan listrik untuk masyarakat miskin, pembuatan biogas, dan sebagainya

Tabel 2.103.

Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m <sup>3</sup> )	Keterangan
1.	Andesit Karangdowo	Desa Ringin Putih, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	1.421.255	Jumlah deposit layak ditambang, belum banyak dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat	80.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan
3.	Batu Gamping Keras	Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes	180.302	Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan
		Desa Wiro, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	107.020	
4.	Batu gamping Nummulites	Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m <sup>3</sup> )	Keterangan
5.	Batu pasir Tufaan	Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
6.	Gabro dan Diorite	Desa Talang, Kecamatan Bayat; Desa Bawak, Kec. Cawas	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunakan kontruksi dan bahan uruk
7.	Lempung Aluvial	Desa Mlese, Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno	5.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku batu merah
		Desa Menden, Kecamatan Kebonarum	5.800	
		Desa Rejoso, Desa Pakahan, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan.	98.000	
		Desa Basin, Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	575.025	
		Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Nglinggi Kec. Klaten Selatan	97.250	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	55.750	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata
9.	Marmar	Desa Bawak, Kecamatan Cawas	75	Jumlah deposit tidak layak ditambang,
10.	Pasir Vulkanik & Andesit Vulkaniki	Kecamatan Kemalang	1.535.000	Jumlah deposit layak ditambang, kualitas pasir vulkanik sangat baik untuk bahan bangunan
11.	Zeolit	Desa Nengahan, Kec. Bayat	100	Deposit tidak layak ditambang

Sumber: Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten, 2020

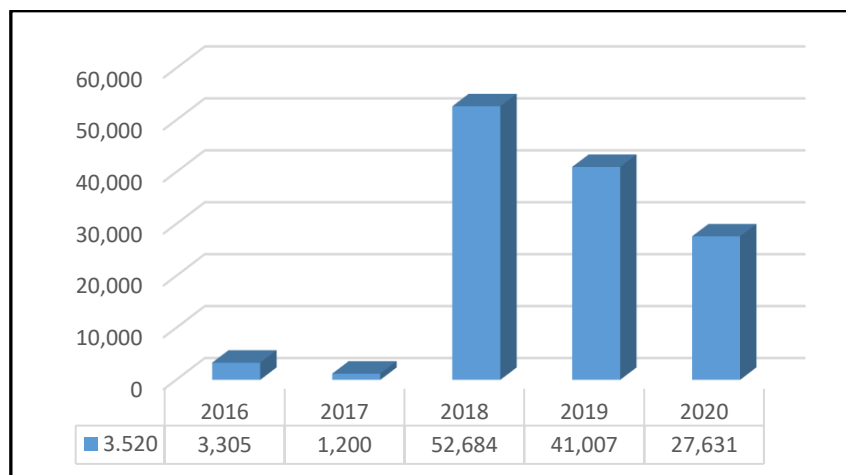
## K. Pertanian

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2019, menerbitkan 41.007 sertifikat sedangkan di tahun 2020 hanya menerbitkan 25.611 sertifikat. Adapun gambaran Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104.  
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2016-2020

No	Detail Kegiatan	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	1.456	1.010	2.703	2.851	1.102
2	Februari	1.099	577	2.529	2.999	1.730
3	Maret	1.006	590	3.097	4.667	6.148
4	April	907	1.565	3.653	5.588	5.667
5	Mei	2.539	1.195	4.545	6.232	3.444
6	Juni	1.691	1.450	3.202	4.927	420
7	Juli	875	2.491	5.040	2.495	1194
8	Agustus	1.236	2.055	5.594	4.818	927
9	September	1.281	2.258	6.209	1.770	1041
10	Oktober	843	11.236	7.556	1.754	1342
11	November	1.189	5.485	3.786	1.226	1286
12	Desember	669	4.365	4.770	1.680	1310
TOTAL		3.305	1.200	52.684	41.007	25.611

Sumber: Kantor ATR Kabupaten Klaten, 2020.



Grafik 2.37.

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018 dan tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan namun tidak signifikan. Karena di tahun 2018 ada program dari Presiden Joko Widodo terkait pemutihan (program sertifikat gratis).

Selain hal tersebut di atas, pada urusan pertanahan juga masih masalah, yaitu masih adanya tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat (Tabel 2.105).

Tabel 2.105  
Tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat

No	Keterangan	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat	Jumlah
1	Tanah/ Bangunan	583	89	672
2	Jalan Lingkungan (ruas)	-	1.032	1.032
3	Jalan Kabupaten (ruas)	4	334	338

Sumber: BPKD Kab Klaten, 2021

### 2.1.3.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

#### A. Administrasi Pemerintahan

Di samping berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan dan kepegawaian.

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Fraksi dan jumlah anggota terdiri dari: 1). Fraksi PDIP Sebanyak 19 orang; 2). Fraksi Golkar 7 orang; 3). Fraksi Gerindra sebanyak 5 orang; 4). Fraksi PAN sebanyak 4 orang; 5). Fraksi Keadilan Sejahtera 5 orang; 6). Fraksi DPN (Demokrat Pembangunan Nasional) 6 orang; 7). Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebanyak 4 orang. Berdasarkan struktur organisasi, DPRD Kabupaten Klaten sebanyak 50 orang terbagi ke dalam: Pimpinan DPRD sebanyak 4 orang dan 4 komisi, Sedangkan komposisi Komisi, terdiri: (i) Komisi I sebanyak 10 orang; (ii) Komisi II sebanyak 12 orang; (iii) Komisi III sebanyak 13 orang; dan (iv) Komisi IV sebanyak 11 orang.

Dalam fungsi pembentukan Perda selama Tahun 2016–2020 telah menghasilkan Perda sejumlah 76 buah dari yang direncanakan sejumlah 80 buah, selanjutnya untuk Keputusan DPRD menghasilkan sejumlah 197 buah Keputusan DPRD dari yang direncanakan sejumlah 205 buah. Untuk Keputusan Pimpinan DPRD sejumlah 50 buah dari yang direncanakan sejumlah 60 buah. Untuk Keputusan Panitia Anggaran sejumlah 34 buah dari yang direncanakan sejumlah 36. Untuk Panitia Musyawarah sejumlah 67 dari yang direncanakan sejumlah 70 buah. dan secara rinci disajikan pada Tabel 2.106.



Tabel 2.106.  
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten  
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Perda	8	18	28	15	7
02. Keputusan DPRD	50	38	49	39	21
03. Keputusan Pimpinan DPRD	17	18	9	4	2
04. Keputusan Badan Anggaran	8	6	6	7	7
05. Keputusan Badan Musyawarah	16	12	13	13	13
Jumlah	99	92	105	78	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 2.106 sebagaimana tersebut di atas, Rerata Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2016-2020 sebanyak 39 Produk Keputusan DPRD. Secara Khusus jumlah Perda rata-rata selama Tahun 2016-2020 sebanyak 15 Perda.

Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah. terdapat beberapa capaian kinerja yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.107.  
Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Klaten	100	100	100	100	100	%
Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100	100	100	100	100	%
Persentase Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100	100	100	100	100	%

Sumber: Setwan DPRD Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian kinerja dari sekretariat daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah 100%, yang artinya sudah tersedia Rencana Kerja Tahunan DPRD, tersusun dan terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam

Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), serta untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD telah sesuai.

### 1) Perkembangan Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara serta Indeks Kabupaten Peduli HAM

Perkembangan penyusunan produk hukum dan penanganan perkara serta indeks Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 2.108.

Tabel 2.108.  
Perkembangan Jumlah Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara serta Indeks Kabupaten Peduli HAM Kab Klaten Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Variabel			
		Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Perkara	Indeks Kabupaten Peduli HAM
1	2016	8	68	4	N/A
2	2017	27	63	4	88.57
3	2018	30	66	6	84.13
4	2019	15	98	6	PEDULI
5	2020	10	73	10	PEDULI

Sumber: Bagian Hukum Kab. Klaten, 2020

Dari tabel 2.108. di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Peraturan Daerah (Perda) terselesaikan di tahun 2020 adalah 10 perda terdiri dari 2 Perda yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Klaten. 3 Perda Luncuran tahun 2019 yang belum terselesaikan dan 5 perda yang terselesaikan di tahun 2020 sesuai dengan propemperda kabupaten Klaten.

Jumlah perkara tertangani pada tahun 2020 sejumlah 10 perkara perdata/PTUN, sedangkan Bagian Hukum juga memberi fasilitasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin yang berpekerja di PN dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Klaten di tahun 2020 bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebanyak 15 Kasus.

Untuk Indeks Kabupaten Peduli HAM penilaian baru dilaksanakan pada tahun 2017, untuk tahun 2017 dan 2018 indek masih menggunakan angka, akan tetapi untuk tahun 2019

dan seterusnya pengukuran indeks kabupaten peduli HAM di ganti dengan kriteria, dimana untuk tahun 2020 Kabupaten Klaten mendapatkan nilai 95,71 dengan kategori PEDULI yaitu :

Tabel 2.109.

Klasifikasi Nilai (SKOR) Indeks Kabupaten Peduli HAM

No.	Indeks	Nilai (Skor)
1	Peduli HAM	75 s/d 100
2	Cukup Peduli HAM	65 s/d 75
3	Mulai Peduli HAM	50 s/d 65
4	Kurang Peduli HAM	< 50

Sumber: *Bagian Hukum Kab. Klaten, 2020*

## 2) Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi pada Tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019. Dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten memulai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 dan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dirilis pada Tahun 2019. Sedangkan untuk penilaian indeks reformasi birokrasi tahun 2019 sampai dengan saat ini belum keluar nilainya.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2019 adalah 57,55 atau kategori “CC” dengan rincian sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 2.108. Sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 masih dalam proses penilaian. dan tahun 2020 baru akan dilaksanakan penilaian pada tahun 2021.



Tabel 2.110.  
 Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi  
 Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,58
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,54
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,05
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,22
5	Penataan Sistem Manajemn SDM	15,00	9,92
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	4,36
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,78
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	25,51
II	Komponen Hasil		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,45
2	Survei Internal Ontegritas Organisasi	6,00	4,86
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,63
4	Opini BPK	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	9,10
Total Komponen Hasil (B)		40,00	32,04
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	57,55

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2019

### 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten dari Tahun 2018 sampai dengan 2019

menunjukkan peningkatan. Rincian penilaian tersebut sebagaimana yang ada dalam Tabel 2.111.

Tabel 2.111.  
Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Kab. Klaten Tahun 2017-2019

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			
			2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	17,60	19,94	20,79	20,79
2	Pengukuran Kinerja	25	11,74	14,83	15,16	15,16
3	Pelaporan Kinerja	15	9,34	9,43	10,21	10,34
4	Evaluasi Eksternal	10	4,66	5,74	5,03	5,29
5	Capaian Kinerja	20	9,68	10,39	10,14	10,49
	Nilai hasil Evaluasi	100	53,02	60,33	61,32	62,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2021

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 menunjukkan nilai yang baik hal ini didukung dengan peningkatan nilai yang cukup tinggi pada komponen perencanaan kinerja. Peningkatan ini dikarenakan kerja keras Perencana Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satunya dengan menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

#### 4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. menetapkan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pada 8 area perubahan sesuai dengan Program Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan pada hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dengan total ukuran sampel sebanyak 250 responden dapat ditarik kesimpulan skor IKM keseluruhan unit layanan sebesar 81,08. Nilai tersebut berada pada rentang skala 76,61 – 88,30 sehingga



dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menilai “Baik” terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Klaten.

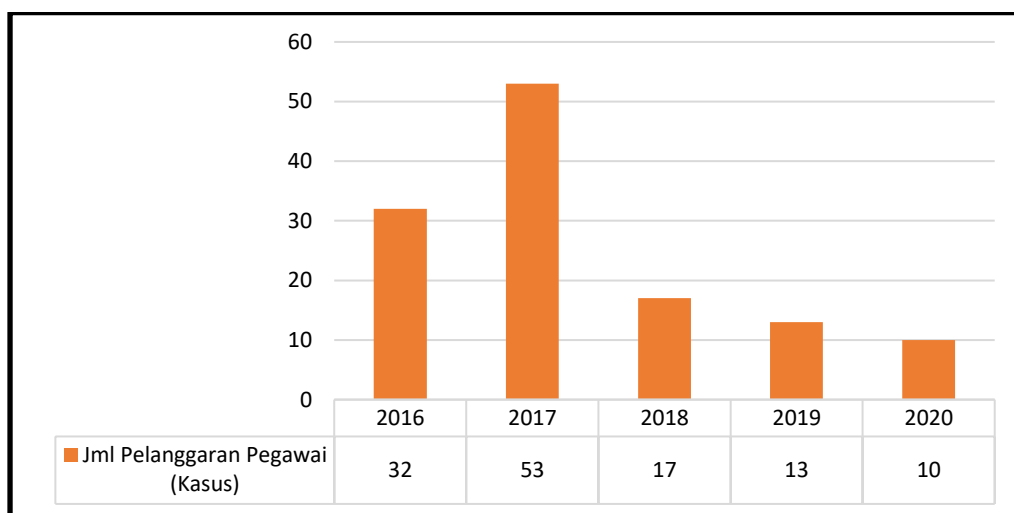
Sedangkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2019 dengan menggunakan variabel 9 unsur pelayanan yang telah dilaksanakan pada 85 Unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,31. Dibandingkan dengan IKM Kabupaten Klaten Tahun 2018 yang bernilai 81,08. maka pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,23. Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada 46 Unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,88. Dibandingkan dengan IKM Kabupaten Klaten Tahun 2019 yang bernilai 81,31; maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,57.

## **B. Pengawasan**

Urusan pengawasan meliputi indikator Persentase tindak lanjut temuan. Persentase pelanggaran pegawai, jumlah temuan BPK dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Terkait pelanggaran pegawai menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan indikator lainnya menjadi wewenang inspektorat daerah.

### **1. Pelanggaran Pegawai**

Jumlah pelanggaran pegawai di Kabupaten Klaten semakin menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 hanya terjadi 10 kasus pelanggaran pegawai.



Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.38.

### Jumlah Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Dari hasil penyelesaian kasus Pelanggaran disiplin pegawai di Kabupaten Klaten kasus tersebut meliputi:

- Pelanggaran disiplin karena penyalahgunaan wewenang;
- Pelanggaran disiplin karena pelanggaran kesusilaan;
- Pelanggaran disiplin karena pelanggaran netralitas ASN.

## 2. Pengawasan Kewenangan Inspektorat

Indikator Persentase tindak lanjut temuan. Jumlah temuan BPK. dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112.

Persentase, Jumlah, dan Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase tindak lanjut temuan	70,50	71,70	75,98	84,36	100,00	%
Jumlah temuan BPK	16	18	18	17	6	temuan
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	95,30	94,61	89,45	85,00	83,61	%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dalam perkembangannya persentase tindak lanjut jumlah temuan semakin meningkat, namun jumlah temuan BPK semakin menurun. Untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK baru mencapai 83,61% di tahun 2020. Temuan yang ditindak lanjuti merupakan akumulasi dari temuan mulai tahun 2009, sehingga sulit ditindak

lanjuti karena pejabat sudah ganti/meninggal sedangkan pejabat yang baru tidak mengetahui datanya.

### **3. Pengawasan (Maturitas SPIP. Level Kapabilitas APIP)**

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa angin segar sekaligus tantangan dalam pengawasan di daerah. PP ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam PP ini diatur penguatan fungsi Inspektorat Daerah dan penugasan Inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah. Inspektorat bisa langsung melakukan pemeriksaan tanpa didahului penugasan dari kepala daerah. Selain itu, diatur pula penambahan Inspektur Pembantu dimana ada Peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu serta mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu.

Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan dalam melaksanakan tugasnya. Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan, konsultasi, dan koordinator pencegahan tindak pidana korupsi. Khusus untuk tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Sebagai koordinator dalam upaya pencegahan korupsi (Inspektorat), tentu tidak akan pernah berhasil optimal jika tanpa berkolaborasi dan melibatkan peran serta pihak lain serta masyarakat..

Dalam melaksanakan tugasnya yang tidak ringan, tentu Inspektorat Klaten juga harus membekali dirinya dengan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 11 Desember 2019 pada 6 elemen yaitu :

- 1) Peran dan layanan
- 2) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 3) Praktik Profesionalisme
- 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- 5) Budaya dan Hubungan Organisasi
- 6) Struktur Tata Kelola



Inspektorat Kabupaten Klaten telah memenuhi kapabilitas level 3 (*integrated*) dengan karakteristik bahwa kebijakan, proses, dan prosedur APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, terintegrasi satu sama lain dalam insfratrstruktur organisasi, dan manajemen serta praktik profesionalisme APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat telah membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko yang bertujuan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil Quality Assurance penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Klaten per tanggal 17 Januari 2020 nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Klaten adalah 3 (terdefinisi).

Capaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 sebagaimana yang ada dalam Tabel 2.113.

Tabel 2.113.  
Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kapabilitas APIP	2	2	2	3	3
2	Maturitas SPIP	1,12	2,29	2,29	3,00	3,00

Sumber: Inspektorat Kab. Klaten, 2020

#### 4. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Model peningkatan Kapabilitas APIP mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)* yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2016-2021, target level Kapabilitas APIP adalah level 3 (*Integrated*) yang diartikan bahwa



APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Capaian Level Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Kabupaten Klaten sebagaimana yang ada dalam Tabel 2.114.

Tabel 2.114.

Capaian Level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kapabilitas APIP	2	2	2	3	3

Sumber: Inspektorat Kab. Klaten, 2020

## 5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada RPJMD Kabupaten Klaten target akhir nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah B yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik. Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana yang ada dalam Tabel 2.115.

Tabel 2.115.

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai AKIP	53,01 (CC)	53,02 (CC)	60,33 (B)	61,32 (B)	N/A

Sumber: Inspektorat Kab. Klaten, 2020

Untuk capaian Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kab Klaten pada tahun 2020 belum ada data yang tersedia, dikarenakan Penilaian atas nilai SAKIP Kabupaten dilaksanakan oleh KemenPANRB, dan sampai saat laporan ini dibuat Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tersebut belum keluar dan nilai baru keluar di Bulan Maret tahun berikutnya.

### C. Perencanaan

Dalam bidang perencanaan pembangunan, perangkat daerah yang bertanggungjawab adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh berikut perkembangan dari bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten.

Tabel 2.116.  
Perkembangan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90	95	96.13	94.5	100	%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90	95	98	98.8	100	%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	%

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terkait ketersediaan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPKPD, dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA konsisten ada selama tahun 2016-2020.

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis urusan perencanaan terus meningkat dari tahun ke tahun

(sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 2.94), dan pada tahun 2020 berhasil berjalan dengan baik karena mempunyai nilai dengan kriteria “Sangat Tinggi” (dengan interval nilai realisasi kinerja  $90\% \leq 100\%$ ). Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja ini di antaranya adalah :

- 1) Penetapan indikator kinerja dalam mencapai sasaran strategis Bappeda sudah berorientasi pada hasil (*outcome*) karena sudah dibuat cascading dari level atas sampai yang terendah.
- 2) Pengukuran indikator lebih jelas karena sudah disesuaikan dengan regulasi terkait sehingga mempunyai rumus penghitungan yang jelas juga.
- 3) Adanya komitmen bersama dalam peningkatan kinerja.

Tabel 2.117.  
Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

<b>Indikator Capaian Kinerja</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90%	90%	88.37%	94.5%	100%
Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	90%	95%%	95.83%	98.8%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Klaten, 2020

#### **D. Keuangan**

##### 1. Opini BPK

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan daerah dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas. dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.118.



Tabel 2.118.  
Opini BPK pada LKPD Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Hasil Audit	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKD Kab. Klaten, 2020

Tabel 2.119.  
Opini BPK pada Laporan Keuangan Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK pada Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKD Kab. Klaten, 2020

Dalam tabel 2.118. dan tabel 2.119 menunjukkan bahwa pada tahun 2018–2020, Hasil Opini BPK Kabupaten Klaten mengalami peningkatan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## 2. Penetapan APBD

Dalam kurun waktu Tahun 2015-2020, Penetapan APBD di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2015-2020 konsisten tepat waktu. Hal ini menunjukkan kinerja perangkat daerah yang baik dan tertib. Berikut gambaran perkembangan penetapan APBD di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.120.  
Perkembangan Penetapan APBD Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

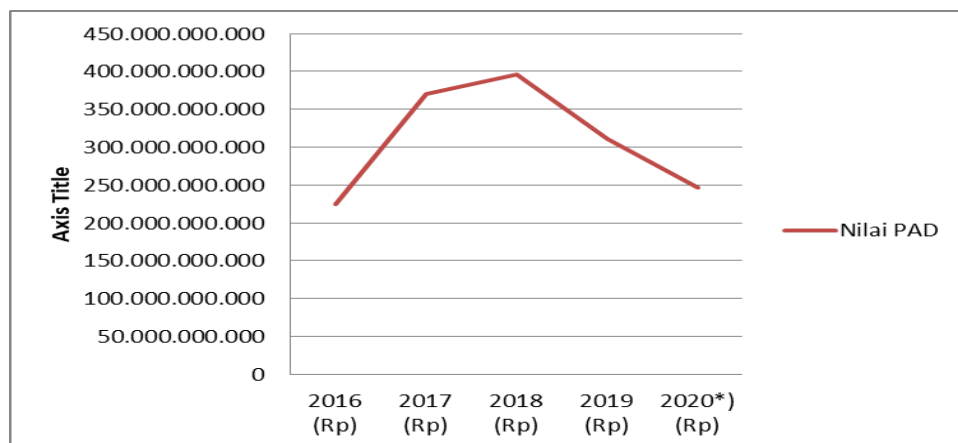
Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu/tdk

Sumber: BPKD Kab. Klaten, 2020

## 3. Persentase PAD terhadap pendapatan

Merupakan penerimaan daerah Kabupaten Klaten yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Keuangan

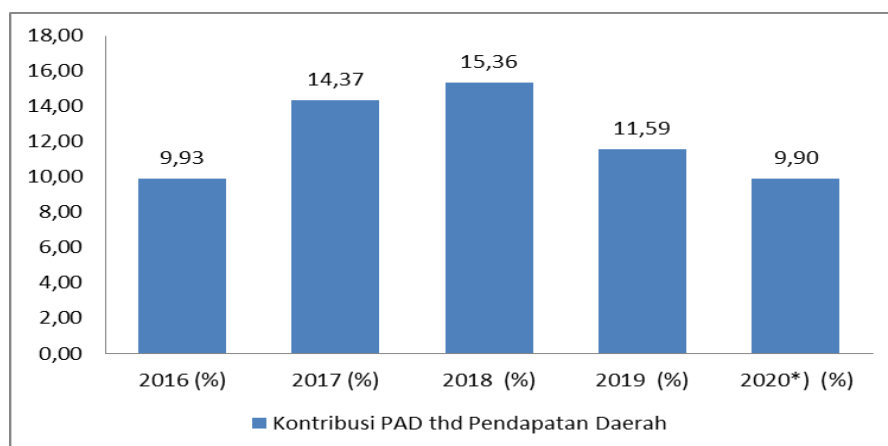
Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Perkembangan PAD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 secara terperinci dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPKD Kabupaten Klaten, 2021

Grafik 2.39.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 2.39, PAD Kabupaten Klaten memiliki angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2016-2018 cenderung naik, namun kemudian semakin menurun hingga tahun 2020 (data semester awal) terlebih di tahun 2020. Terdapat kejadian luar biasa yang dialami seluruh dunia termasuk Kabupaten Klaten. Pandemi Covid-19 melumpuhkan perekonomian sebagian besar wilayah yang terdampak. Kondisi tersebut mempengaruhi nilai PAD Kabupaten Klaten. Kondisi PAD yang semakin menurun tersebut juga mempengaruhi kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dimana untuk lebih jelasnya kontribusi PAD tersebut digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BPKD Kabupaten Klaten, 2020

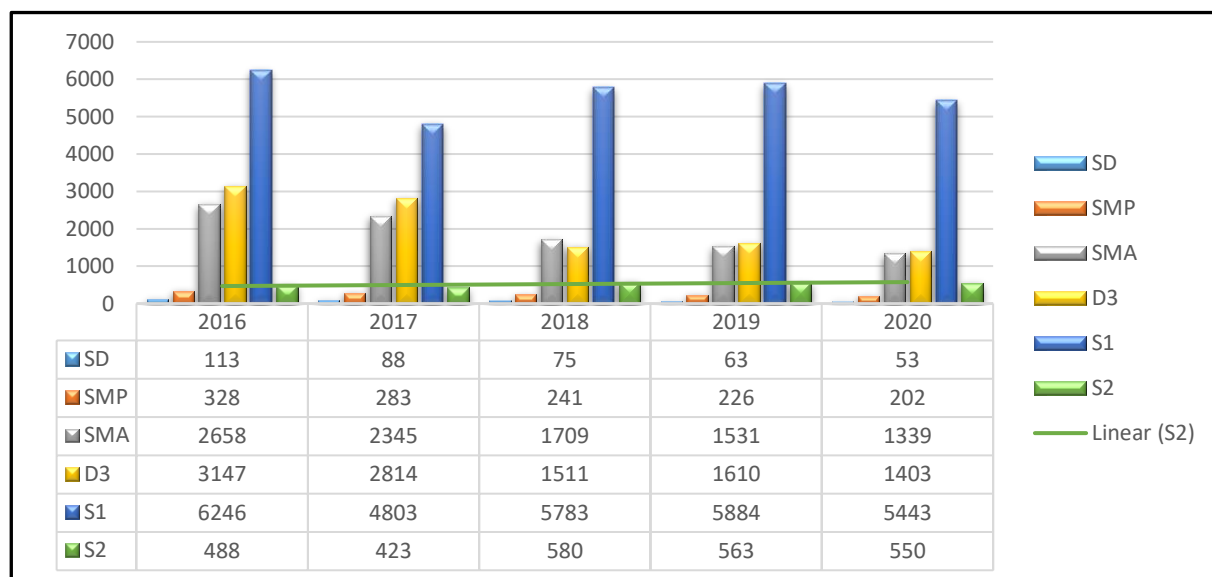
Grafik. 2.40.  
Kontribusi/Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  
Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Pada tahun 2019 telah terjadi penurunan pendapatan asli daerah karena terjadi perubahan kebijakan pengalihan/ pergeseran unsur pendapatan asli daerah serta penentuan besaran target pajak atau retribusi sehingga perlu adanya studi potensi pajak atau retribusi yang komprehensif, inovasi dalam pengelolaan pajak atau retribusi. Selain itu perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta teknologi dalam pemungutan pajak atau retribusi.

## E. Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan

### 1. Kepegawaian

Berdasar data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Klaten, pada Tahun 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 11.010 orang. Berikut gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan:



Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.40.  
Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar jenjang pendidikan para ASN adalah sarjana strata 1. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing.

Jumlah jabatan pada instansi pemerintah di Kabupaten Klaten untuk tahun 2020 jumlahnya menurun jika dibandingkan tahun

2019. Berikut perkembangan jumlah jabatan ASN di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.121.  
Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					SATUAN
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	22	21	27	26	24	ASN
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	4.073	3.450	2.935	2.855	2.664	ASN
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	8.833	7.179	6.963	6.940	6.449	ASN

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020

## 2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing.

Gambaran ASN dan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.122.  
ASN & Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	95,43	78,52	99	116	11,26	%
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	32,29	44,98	52,46	60,25	60,13	%

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase ASN maupun pejabat ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan meningkat setiap tahunnya. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal karena dampak dari pandemi Covid-19. Pihak penyelenggara diklat meniadakan kegiatan diklat/bintek dan kegiatan sejenis di tahun 2020 sampai ada aturan tentang penyelenggaraan diklat secara daring.



Dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur terdapat data ASN yang telah mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123.  
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar di Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020

NO	PERMOHONAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	56	211	450	353	20
2.	Diklat Teknis Fungsional	36	47	312	5649	5050
3.	Bimbingan Teknis	80	42	58		0
4.	Seminar dan sejenisnya	-	-	-	2	0
JUMLAH		172	300	820	6004	5070

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020.

Berdasarkan Tabel 2.123. sebagaimana tersebut di atas, untuk Tahun 2020 kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 8.990 ASN dibandingkan dengan yang telah mengikuti diklat, bintek dan seminar sebesar 42,93 %. Sedang diklat, bintek dan seminar yang mampu dibiayai APBD untuk tahun 2020 sebanyak 70 ASN atau sebesar 0,78% dari seluruh jumlah PNS. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan di hentikannya sementara penyelenggaraan diklat dari instansi penyelenggara diklat di tahun 2020. Disamping data-data kepegawaian di atas, pada bidang urusan kepegawaian juga mempunyai kebijakan-kebijakan terkait manajemen pengelolaan ASN maupun pengadaan ASN seperti pada penjelasan di bawah ini.

### 3. Manajemen pengelolan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Disamping data-data kepegawaian di atas, pada bidang urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan juga mempunyai kebijakan-kebijakan terkait manajemen pengelolaan ASN maupun pengadaan ASN seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.124.  
Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Indeks Profesionalitas ASN	N/a	81,29	62	77,5	79,98	indeks
Indeks Sistem Merit	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	indeks
Persentase ASN yang mengikuti diklat	95,43	78,52	99	116	42,93	%
Persentase layanan sumber daya aparatur	76,74	93,66	93,75	95	104,47	%
Persentase Pembinaan Disiplin ASN	78	48	52	56	100	%

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase informasi kepegawaian yang akurat	98,73	94	90	80	98	%
Persentase Pengembangan Aparatur	66,04	76	83	96	77,74	%

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2020

Permasalahan yang terjadi pada urusan kepegawaian adalah ketersediaan ASN dengan kualifikasi jabatan sesuai formasi yang dibutuhkan, belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN, serta belum terintegrasi secara penuh data kepegawaian.

### 1) Sistem Merit

Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dasar hukum pelaksanaan sistem merit adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- e. Perka KASN Nomor 5 tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN meliputi 8 (delapan) Aspek terdiri dari :

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
- b. Pengadaan Pegawai
- c. Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi
- d. Mutasi, Rotasi dan Promosi
- e. Manajemen Kinerja
- f. Penggajian, penghargaan dan disiplin
- g. Perlindungan dan pelayanan ASN

#### h. Sistem Pendukung

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Merit di Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 di jadwalkan pada bulan Desember 2020 nilai Indeks Sistem Merit Kabupaten Klaten sudah di keluarkan oleh KASN. Hasil sementara Penilaian Mandiri Sistem Merit di Kabupaten Klaten untuk Tahun 2019 yang dilakukan di tahun 2020 sebesar 261,5 berada pada kategori baik. Direncanakan hasil penilaian Merit Sistem 2019 akan dijadikan basic data awal untuk di RPJMD 2021-2025 .

## 2) **Pengadaan CPNS**

Secara umum proses pengadaan CPNS formasi 2019 di Kabupaten Klaten sebagai berikut :

- a. Keseluruhan tahapan proses sampai Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar sudah dilaksanakan sejak tanggal 11 November 2019 sampai 21 Maret 2020.
- b. Hasil seleksi administrasi sebagai berikut: jumlah pelamar 10.269 orang, yang memenuhi syarat setelah melewati masa sanggah 9.485 orang.
- c. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar sebagai berikut peserta yang hadir mengikuti Ujian CAT SKD 8.792 orang, peserta yang telah lolos SKD dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebanyak 1.564.
- d. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) rencana semula akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020, namun karena adanya Pandemi Covid-19, pelaksanaan SKB baru dapat dilaksanakan pada tanggal 11-14 September 2020 dengan peserta yang hadir 1.564 orang. Pelaksanaan SKB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.
- e. Rekonsiliasi integrasi nilai hasil SKD dan SKB oleh Panselnas tanggal 19-23 Oktober 2020. Hasil akhir dari integrasi nilai SKD dan SKB sebanyak 728 orang.
- f. Pemberkasan NIP untuk 728 peserta dilaksanakan tanggal 16-21 November 2020
- g. Persetujuan Teknis pengangkatan CPNS formasi 2019 dengan TMT pada 1 Desember 2020.

#### **h. Indeks Profesionalisme (IP) ASN**

Mendasari Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepegawaian, Indeks Profesionalitas ASN menjadi indikator Tujuan dan Sasaran di Urusan Bidang Kepegawaian. Meskipun di Perubahan Renstra 2016-2021 sudah dimasukkan indikator tersebut, namun mulai dilakukan perhitungan pada tahun 2017 tapi tidak dimasukkan dalam realisasi nilai Indikator Profesionalisme (IP) ASN karena pelaksanaan penilaian baru tahap uji coba dan baru untuk pejabat struktural (catatan: penghitungan nasional oleh BKN). Jadi untuk hasil perhitungan baru dirilis mulai tahun 2018. Yang mana untuk tahun 2018 target IP ASN sebesar 82,06 terealisasi 62,00 dan pada tahun 2019 target IP ASN 84,07 terealisasi 77,50 dan tahun 2020 target IP ASN 87,36 dengan realisasi 78,06.

Evaluasi dari hasil realisasi penilaian IP ASN tahun 2020 dari target 87,36 dan capaian realisasi hanya 78,06 tidak bisa mencapai 100% adalah sebagai berikut :


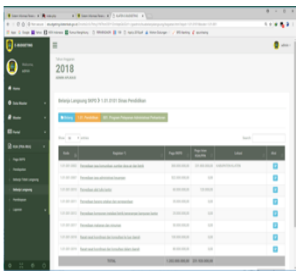

- a. Jumlah keseluruhan ASN yang yang ditargetkan dapat dinilai 100% hanya tercapai kurang lebih 60%. Dan jumlah ASN keseluruhan yang belum melakukan penilaian banyak dari jajaran pendidikan khususnya guru karena untuk kompetensi dan kualifikasi khususnya guru nilainya cukup tinggi sementara 2 (dua) komponen ini (kompetensi dan kualifikasi) menjadi bagian dari penilaian IPP.
- b. Dari hasil pengukuran capaian kinerja untuk IP ASN yang dilakukan Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan dengan Nilai IPP 77,50 meningkat menjadi 79,98.
- c. Jika realisasi dibandingkan dengan target untuk 2020 yaitu realisasi sebesar 78,06 dibandingkan dengan target 87,36 maka prosentase capaian kinerja 89,35% (kategori tinggi).




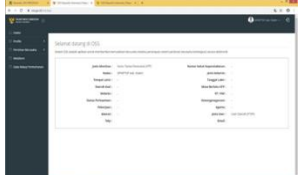


#### **F. Penelitian dan Pengembangan**



Pencapaian target penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 adalah 247 % dengan target di RPJMD jumlah kegiatan inovasi daerah yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 adalah dengan target 19 inovasi terlaksana 47 inovasi dengan rincian inovasi yang terlaksana sebagaimana yang ada dalam Tabel 2.125.



Tabel 2.125.  
Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020

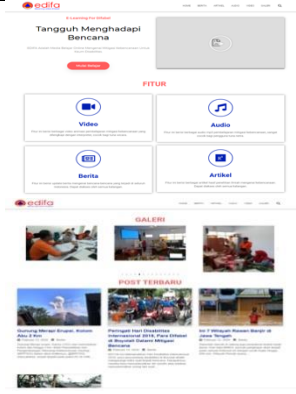

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
1	Roadmap Pengembangan Usaha Rojo Lele Srinar, Srinuk dan Sriten (Penguatan Lumbung Padi Kabupaten)	Pengembangan usaha padi rojolele merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan Klaten sebagai Lumbung Padi Nasional dengan kualitas dan kuantitas produksi pangan yang meningkat pesat yang mana juga menjadi prioritas Smart City Klaten. Upaya dalam penguatan lumbung padi di Kabupaten Klaten juga bertujuan untuk mewujudkan swasembada beras secara berkelanjutan.		DPKPP (Agro Techno Park Kabupaten Klaten) dan BAPPEDA
2	e-Planning e-Budgeting	<a href="http://eplanning.klatenkab.go.id">http://eplanning.klatenkab.go.id</a> . Fokus aplikasi ini dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sistem aplikasi integrasi perencanaan dan penganggaran sudah dibangun di tahun 2018, dengan berbasis web yang dapat diakses di alamat <a href="http://ebudgeting.klatenkab.go.id">http://ebudgeting.klatenkab.go.id</a> Sistem ini digunakan dalam penyusunan dokumen prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan rincian belanja yang disusun menjadi PRA-RKA yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Raperda APBD yang diintegrasikan dalam sistem SIMDA.		Bappeda
3	Pelayanan izin Penelitian, Magang (PKL) dan KKN dengan Sistem Online	Pelayanan izin Penelitian, Magang/PKL dan KKN dengan Sistem Online. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pemohon izin dapat mengajukan izinnya dengan mengirim persyaratannya ke email Bappeda. Kemudian pemohon izin akan mendapatkan konfirmasi dari Bappeda. Pertama apabila persyaratannya sudah benar dan lengkap maka akan dilakukan proses pembuatan surat izin dan akan mengirimkan balik surat izin ke alamat email pemohon. Kedua, apabila persyaratannya ada yang salah atau masih kurang maka pemohon harus melengkapinya atau membenarkannya.		Bappeda


No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
4	Traffic Light ATCS ( Area Traffic Control System)	Melakukan pengembangan sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi pada beberapa simpang di Kabupaten Klaten melalui satu ruang pantau (CCRoom). Pengaturan simpang dapat dilakukan dari CCRoom tanpa harus turun ke lapangan sehingga dapat dengan mudah dan cepat menyikapi kendala dilapangan. Pada simpang Traffic Light ATCS menggunakan sensor jarak antar kendaraan. sehingga kemacetan LL dapat dihindari. selain itu dilengkapi dengan CCTV sehingga akan mempermudah pemantauan dan penyelidikan apabila terjadi pelanggaran ataupun kecelakaan lalu lintas.		Dinas Perhubungan
5	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Online (Pkb Online)	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara online		Dinas Perhubungan
6	Jempol Manis (Jemput Bola Pelayanan Izin Online Aman dan Gratis)	Pelayanan izin usaha secara online. aman dan gratis dengan sistem menjemput bola		DPMPPTSP
7	Sama Kita (satu masukan kita tanggapi)	Sama kita: inovasi dalam melayani masyarakat dalam bidang pengaduan, dimana setiap ada pengaduan selalu dengan cepat kita tanggapi		DPMPPTSP
8	Pelayanan Perijinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	Perizinan berusaha yg diterbitkan oleh lembaga OSS (online single submission) untuk atas nama Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi, peran DPMPPTSP Kab Klaten adalah pendampingan kepada pelaku usaha sampai NIB dan izin komersilnya terbit	  	DPMPPTSP
9	Asikin LKPM (Asistensi dan konsultasi Input laporan kegiatan PM)	untuk pendampingan LKPM kepada pengusaha /UMKM dalam membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan		DPMPPTSP

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
		<p>perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal, LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi, LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan. LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip</p>		
10	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)	Memiliki Sumber data sebagai pengambilan keputusan yang terintegrasi antar OPD dan Data Pusat di Kemdikbud		Kominfo, Capil, BKPPD, Bappeda, Dinsos
11	Satpol PP Go To School	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di seluruh wilayah Kab. Klaten. Maka dapatlah dilihat betapa luasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan-permasalahan pelanggaran perda terjadi merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten yang semuanya harus segera ditangani dan diatasi. Salah satu upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran perda adalah memberikan pendidikan kesadaran hukum secara dini kepada masyarakat. Sasaran konkret upaya tersebut adalah personil Satpol PP terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi penting menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan hukum. Target jangka pendeknya supaya pelajar tertib dalam bersekolah dengan tidak membolos dan mematuhi aturan sekolah.</p>		Satpol PP
12	Satuan Anti Pelanggaran Perda dan Perbup Tingkat Kecamatan (SANGGAR PEDATI)	<p>Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP yang mengamanatkan membentuk Satpol PP unit Kecamatan. Upaya yang akan dilakukan Satpol PP Klaten dalam mengimplementasikan amanat PP tersebut dengan membentuk kegiatan yang berbasis tingkat kecamatan yang melibatkan pemangku wilayah dan masyarakat tingkat kecamatan</p>		Satpol PP


No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
		<p>supaya penegakan perda lebih optimal. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut maka juga akan dibangun suatu aplikasi berbasis digital supaya koordinasi dan pelaporan informasi bekerja efisien yang tentunya masyarakat dapat mengakses untuk memantau dan turut aktif dalam penegakan perda.</p> <p>Upaya terdekatnya dengan membangun SANGGAR PEDATI yang tim pembinanya adalah Kepala SATPOL PP Kab. Klaten dan tim pelaksananya adalah Kasi Trantib Kecamatan dimanan kegiatannya dimulai di Kecamatan Klaten Kota (Kec. Klaten Utara. Kecamatan Klaten Tengah. Kecamatan Klaten Selatan) yang diharapkan nantinya berkembang ke seluruh kecamatan (26 kecamatan) di wilayah Kabupaten Klaten.</p>		
13	Linmas Bantu Bangun Rumah	<p>Satuan Perlindungan Masyarakat atau disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana. serta ikut memelihara keamanan. ketenteraman dan ketertiban masyarakat. kegiatan sosial kemasyarakatan. Di wilayah Kabupaten Klaten masih terdapat penduduk yang belum mempunyai rumah sesuai standar rumah layak huni.</p> <p>Dengan situasi diatas maka dalam rangka pemberdayaan anggota Satlinmas dimana salah satu tugasnya membantu kegiatan sosial kemasyarakatan adalah membantu masyarakat yang tidak mampu untuk dibangun rumahnya agar menjadi rumah layak huni. Kegiatan ini juga berfungsi menggerakkan kembali kepedulian masyarakat lingkungan sekitar bahwa sikap saling membantu merupakan kewajiban</p>		Satpol PP

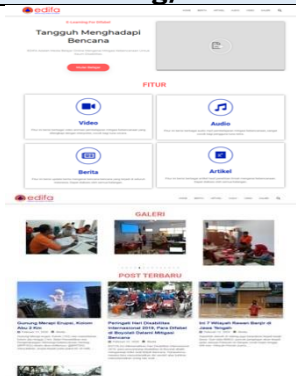



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
		kita semua yang harus dipertahankan.		
14	Damkar Call Center	Hampir setiap hari Pemadam Kebakaran Kab. Klaten menerima laporan kebakaran dan pengaduan sarang tawon. Damkar Kab. Klaten berusaha selalu tanggap akan laporan dan pengaduan tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Meski begitu, masih ada beberapa keluhan dari masyarakat yang merasa sukar menghubungi Damkar Kab. Klaten yang bisa dikarenakan jaraknya yang jauh, kurangnya informasi, dan takut membuat laporan. Upaya mengatasi hal tersebut. Damkar Kab. Klaten berencana membuat aplikasi layanan pengaduan kebakaran dan penyelamatan secara digital. Aplikasi tersebut sebagai layanan pengaduan, pelaporan, dan sosialisasi pencegahan kebakaran yang dapat diakses lewat online oleh warga masyarakat Klaten untuk mempermudah dan mempersingkat menghubungi Damkar Kab. Klaten.		Satpol PP
15	Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana	Tersampainya Informasi Ancaman Bencana di Kabupaten Klaten dan mitigasinya untuk penyandang disabilitas (Edifa.id)		BPBD
16	Taman Eling Waspada Siaga (Wahana Pembelajaran Kebencanaan) bagi Usia Dini	Tersampainya Informasi Ancaman Bencana di Kabupaten Klaten dan mitigasinya untuk anak usia dini <a href="https://www.youtube.com/watch?v=od_jXyvZm0s">https://www.youtube.com/watch?v=od_jXyvZm0s</a>		BPBD
17	Tanda Tangan Elektronik dokumen adminduk	Tanda Tangan Elektronik pada penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menggunakan QR (Quick Record) Code tanpa ada tanda tangan basah dan stempel Dinas. Untuk mengetahui keabsahan/kevalidan data, bisa diketahui dengan memindai menggunakan QR Scanner.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
18	Aplikasi Sipon Keduten Klaten	<p>Pelayanan kependudukan mencari KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Kartu Indentitas Anak (KIA), akte kelahiran dan kematian atau pindah datang, yang dapat dilakukan dengan mudah dari rumah melalui smartphone dengan aplikasi Sipon Keduten alias Sistim Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten. Pelayanan ini dapat diakses pada laman website <a href="http://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id">http://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id</a> dengan memilih menu login dan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat email. Setelah itu pemohon akan mendapatkan balasan kata kunci melalui email untuk bisa mengakses layanan kependudukan yang dikehendaki.</p>		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19	Pelayanan Mobil Keliling Adminduk	<p>1. Mobil pelayanan keliling adminduk bertujuan mengoptimalkan pelayanan adminidtrasi kependudukan di 26 kecamatan se-Kabupaten Klaten serta untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan dokumen kepemilikan administrasi kependudukan Pelayanan dalam mobil keliling adminduk : rekam KTP, cetak KTP, pembaruan data Kartu Keluarga, permohonan pindah datang, permohonan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, pembuatan KIA Peralatan mobil ini difasilitasi jaringan online dan dapat melakukan perekaman data kepedudukan</p>		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20	Pelayanan Kios Adminduk	<p>Kios Pelayanan Adminduk adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Adminduk melalui anjungan dukcapil mandiri, dimana masyarakat bisa langsung memperoleh dokumen adminduk (KTP-El, kartu keluarga, KIA, surat pindah datang, akte pencatatan sipil) dengan catatan telah memenuhi persyaratan</p>		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
21	SMARD	Sistem manajemen Administrasi Desa		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Chatboth konsultasi opd	Layanan Konsultansi Bagi OPD dan Desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Keuangan.		Inspektorat
24	Tunjangan kinerja berdasar dg jumlah laporan keluhan	Proses Bisnis Pengelolaan Keuangan Desa dalam satu aplikasi yang terintegrasi		Inspektorat
25	Integrasi dg e-lapor- dg sistem perencanaan dan penganggaran dg tunjangan kinerja	Proses Bisnis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam satu aplikasi yang terintegrasi diantaranya perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengawasan dan kinerja.		Inspektorat
26	Masyarakat melek hukum	Melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan produk hukum kepada masyarakat sampai ke tingkat Desa		Bagian Hukum
27	Jaringan Dokumentasi Hukum Sampai Ke OPD dan Desa yang terintegrasi	OPD dan Pemerintahan Desa akan dibentuk tim anggota JDIH Kabupaten Klaten, dengan harapan semua produk hukum di OPD dan Pemerintahan Desa bisa di cari dalam satu website kabupaten klaten yaitu <a href="http://jdihklatenkab.go.id">jdihklatenkab.go.id</a>		Bagian Hukum
28	Streaming Siaran Wayang Kulit Malam Selasa Kliwon	Siaran wayang kulit malam Selasa Kliwon sebagai media penyampai informasi pembangunan sosial budaya yang akan maupun telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten. Selain dipancarkan melalui pemancar FM juga diperkuat dengan streaming untuk lebih memudahkan pendengar dan memperluas jangkauan siaran yang tak terbatas karena bisa diakses dimanapun.		Bagian Humas
29	Informasi Agenda Penggunaan Gedung Sunan Pandanaran	Update data penggunaan gedung untuk memudahkan calon konsumen mengetahui hari, tanggal, bulan, dan tahun serta siapa penggunanya yang bersifat dinamis mengikuti pola		Bagian Humas

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
		pemakaian gedung. Informasi disini mencakup besaran tarif yang dikenakan kepada calon konsumen sesuai dengan kegunaannya.		
30	Website Bagian Humas humas.klaten kab.go.id Setda Kabupaten Klaten	Berisi informasi terkait tupoksi dan struktur OPD Bagian Humas, keterbukaan informasi, ikhtisar media sosial yang dimiliki Bagian Humas, agenda kegiatan Bagian Humas, rilis-rilis dari Bagian Humas.		Bagian Humas
31	Akses Berusaha Bag Perempuan Pada Sumber Daya Ekonomi	Kegiatan Ini Merupakan Slaah Satu Upaya Meningkatkan Perekonomian Bagi Masyarakat. Khususnya Perempuan Demi Terpenuhinya Kebutuhan Hidup.		DISSOSP3AK B / BIDANG PPPA
32	Lahir di RSUD Bagas Waras pulang membawa Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga	Melakukan kerjasama dengan Disdukcapil untuk memproses data orang tua dan anak untuk dibuat Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga waktu pasien melahirkan pulang sudah membawa Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.		RSD Bagaswaras Klaten
33	Virtual school – tambahan extra dan konsultasi guru dg media digital	Melakukan kerjasama dengan Diskominfo untuk perancangan media daring konsultasi media Digital		Dinas Pendidikan
34	Memasukan literasi digital ke dalam kurikulum formal mata pelajaran Informatika Pendekatan literasi digital masuk ke dalam pelajaran TIK (kurikulum sekolah)	Melakukan kerjasama dengan Diskominfo untuk replikasi dari Kab/Kota yang sudah berjalan untuk menyesuaikan program Literasi Digital di Kab. Klaten dengan Memasukan literasi digital ke dalam kurikulum formal mata pelajaran Informatika Pendekatan literasi digital masuk ke dalam pelajaran TIK (kurikulum sekolah)		Dinas Pendidikan
35	Pengembangan matur jujur ke dlm aplikasi	Melanjutkan kembali program matur jujur yang berupa buku untuk dikembangkan ke bentuk aplikasi sehingga lebih cepat, praktis dan mudah diakses. Program ini akan dilaksanakan bersama Diskominfo.		Dinas Pendidikan

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
36	Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana	Tersampainya Informasi Ancaman Bencana di Kabupaten Klaten dan mitigasinya untuk penyandang disabilitas (Edifa.id)		BPBD Kab. Klaten
37	SIKK (Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Klaten)	menyajikan jumlah kejadian bencana dan jumlah korban bencana. Tampilan grafik dapat disesuaikan berdasarkan tanggal kejadian yang dibatasi oleh tanggal awal (mulai) hingga tanggal akhir.		BPBD
38	SATU PETA KLATEN	Terintegrasi Seluruh Jenis Peta Klaten (Peta Batas Wilayah, Peta Administrasi, Peta Pendidikan, Peta Jalan Dll) Dalam Satu Aplikasi		DPU & PR
39	Sistem informasi kondisi jalan dan jembatan dan Satu Peta Klaten	Mengetahui tingkat layanan jalan dan jembatan dan menyusun prioritas pada tahun berikutnya		DPU & PR Diskominfo
40	Sistem pelaporan kerusakan jalan dan jembatan	Meningkatnya kecepatan penanganan jalan dan jembatan yang dipelihara		DPU & PR Diskominfo
41	Si Bunga Merapi (Subsidi Bunga untuk Meraih Mimpi)	Program untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Usaha mikro yang layak menerima bantuan subsidi bunga harus dimiliki penduduk Kab. Klaten yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Kab. Klaten.		Bagian Perekonomian
42	TITIP BANDA KU	Titip Bandaku kepanjangan dari Titip Berkas Antik Digitalku. maksudnya Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memberikan layanan inovasi berupa : a. Penyelamatan Arsip Daerah Rawan Bencana baik perorangan maupun lembaga;		Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
		b. Layanan Penitipan Arsip Perorangan; c. Layanan Digitalisasi Arsip Perorangan. Ketiganya merupakan layanan penitipan arsip vital baik perorangan maupun lembaga dalam bentuk digital. dilengkapi Berita Acara Alih Media dan autentikasi arsip yang dialihmediakan.		
43	BEJANAKU (Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku)	Layanan jemput anak PAUD dan TK untuk berkunjung ke perpustakaan dengan menggunakan bus perpustakaan.		Dinas Arsip dan Perpustakaan
44	ULAT KUPU (Usaha Latihan Komputer untuk masyarakat kurang mampu)	Kegiatan pelatihan komputer dasar untuk masyarakat yang kurang mampu.		Dinas Arsip dan Perpustakaan
45	PUSKESWANLING (Pusat Kesehatan Hewan Keliling)	Merupakan kegiatan terpadu meliputi pelayanan kesehatan hewan, penyuluhan dan konsultasi kesehatan hewan. Pelayanan dilaksanakan ke desa – desa menggunakan mobil operasional. Tujuan kegiatan ini adalah mendekatkan pelayanan kepada konsumen / masyarakat, sehingga memudahkan konsumen / masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan hewan dan peternakan.		DPKPP
46	Aplikasi e-Awas Om (Eling Waspada Omo Penyakit) diganti siTopan	Memberikan jawaban atas pertanyaan petani / masyarakat tentang OPT / organisasi pengganggu tanaman (hama penyakit dan gulma tanaman pangan dan hortikultura), Menyediakan atas informasi tentang OPT dan cara pengendalian bagi petani / masyarakat, Menyediakan informasi pertanian secara umum, Memberikan layanan ke		DPKPP

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
		lapangan apabila diperlukan gerakan pengendalian OPT.		
47	Aplikasi BOS	Sistem Pengelolaan Dana Bos berbasis IT Yang Terintegrasi Dengan data Keuangan Daerah		BPKD
48	APL. SENSUS BMD	verifikasi data sensus Barang Milik Daerah yang dulu dilakukan secara manual dan makan banyak waktu. sekarang sdh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sensus.		BPKD
49	SIDIA	Pencocokan dan penghitungan stok opname persediaan yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga laoran persediaan lebih akurat.		BPKD
50	APL.REKONSILIASI	Aplikasi untuk rekonsiliasi Aset Daerah yang dahulu masih dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi. sehingga mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi aset serta laporan lebih akurat		BPKD
51	e-PBB (pbb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB yang harus di bayar oleh Wajib Pajak secara Online dengan internet (Cloud System) caranya cukup memasukkan NJOP PBB		BPKD
52	e-BPHTB (bphtb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui informasi BPHTB secara Online		BPKD
53	Pajak Online	Penambahan Loker pembayaran PBB-P2 yang semula baru bisa lewat Bank Jateng dan Bumdes. di tahun 2019 sudah bisa melalui Tokopedia. Indomaret dan Go Pay		BPKD
54	NAS BPKD	NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang di khususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data. NAS dapat di akses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP/IP		BPKD
55	Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Program untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Usaha mikro yang layak		Bag. Perekonomian

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Data Pendukung/Gambar	Nama OPD
		<p>menerima bantuan subsidi bunga harus dimiliki penduduk Kab. Klaten yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Kab. Klaten, wajib tercantum dalam data base Disdagkop UKM Kab. Klaten, memiliki Ijin Usaha Mikro (IUM) yang diterbitkan kecamatan setempat, usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya pengembangan usaha ekonomi produktif. Wirausaha baru dapat mengakses pinjaman sepanjang telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Plafon pinjaman maksimal Rp. 25 Juta untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif. Pemberian subsidi bunga sebesar 80% dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2019. Prosentase tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur. Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro tahun 2019 adalah PD BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PD BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten. Alokasi dana untuk program ini di tahun 2019 sebesar Rp. 2 M (Dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1.5 M melalui PD BPR Bank Klaten dan Rp. 500 Juta melalui PD BPR BKK Tulung.</p>		

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### 1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2014 – 2018 disajikan pada Tabel 2.126.





Tabel 2.126.  
Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2014– 2018

<b>Rata-rata Pengeluaran Penduduk</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1. Makanan	55,14	51,30	51,23	51,21	48,07
2. Non Makanan	44,86	48,70	48,77	48,79	51,93
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2018.

Berdasarkan Tabel 2.125. sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan sebagian besar pengeluaran penduduk menurut makanan dan non makanan menunjukkan bahwa kebutuhan makan sebagai kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non makan yang sifatnya sekunder. Pemenuhan kebutuhan makanan cenderung menurun, dimana pada Tahun 2014 sebesar 55,14%, dan pada Tahun 2018 menjadi 48,07%. sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada Tahun 2014 sebesar 44,86%. dan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 51,93%.

## 2. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

### A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Jenis kekayaan wisata alam di Kabupaten Klaten antara lain: Deles Indah, Gunung Watu Prau, Pegunungan Kidul, Kawasan Keunikan batuan dan fosil., Umbul Pelem dan Umbul Manten.

### B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Gana), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

### C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung

Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

D. Jumlah Obyek Wisata Dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127.

Jumlah Obyek Wisata. Pengunjung. Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.883.024	183.559	1	1	1.200	2.500
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	1.000	1.500

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.127 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2016–2019 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara. Sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Kenaikan jumlah pengunjung disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyyu. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena banyak obyek wisata yang tidak beroperasi yang merupakan dampak dari wabah Covid-19. Selain itu, untuk event pariwisata tingkat Kabupaten juga hanya diadakan secara terbatas di tingkat Desa/Kecamatan.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 1 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Ke depannya perlu ada pengembangan obyek wisata baru supaya jumlah kunjungan wisata semakin meningkat serta lama kunjungan wisatawan pun semakin lama.



Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar. Untuk wisatawan nusantara hanya berkisar antara Rp. 750.000.- sampai Rp.1.200.000.- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.1.500.000.- sampai Rp.2.500.000.- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128.  
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Target (Rp. 000)					Realisasi (Rp.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perayaan Padusan	52.500	52.500	57.500	63.250	0	52.500	57.500	58.000	64.005	0
2	Perayaan Maleman	28.000	28.000	28.000	30.800	0	28.000	28.000	28.000	30.800	0
3	Perayaan Syawalan	51.700	51.700	53.000	58.300	0	51.700	52.500	53.000	58.500	0
4	Perayaan Yaqowiyu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	14.000	14.000	25.000	25.000	0	14.000	15.600	11.800	4.200	0
6	OMAC	600.000	600.000	1.680.500	1.730.500	450.000	609.976	739.919	953.500	1.689.580	265.788
7	Jombor Permai	65.000	65.000	68.000	74.800	400.000	65.495	68.050	71.750	67.175	423.235
8	Makam Pandanaran	134.000	114.000	180.000	180.000	65.600	143.300	144.500	143.700	161.700	100.400
9	Makam Ronggowar-sito	1.800	1.800	2.000	2.200	0	1.890	2.000	2.050	2.435	0
10	Pemandian Jolotundo	24.200	24.200	77.000	84.700	45.765	24.200	50.170	81.820	120.065	45.765
11	Candi Plaosan	5.000	50.000	100.000	110.000	0	53.883	80.454	220.227	153.027	0
12	Makam Ki Ageng Gribig	3.000	3.000	3.000	3.300	0	3.000	3.030	3.041	4.030	0
13	Lain-lain	21.350	21.350	21.350	21.350	10.000	23.850	13.450	10.980	28.880	216.774,52
	Jumlah	1.000.550	1.025.550	2.295.350	2.384.200	971.365	1.071.794	1.255.173	1.637.868	2.384.397	1.051.962,52

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.128. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi dimana realisasi pendapatan dibandingkan dengan mencapai rata-rata diatas target, namun pada tahun 2018 dan 2020 realisasi tidak memenuhi target. Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah isu pelestarian lingkungan belum menjadi perhatian dalam pembangunan destinasi, petugas pendamping/ *Guide* wisatawan belum optimal.

Dengan ditetapkannya Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan program super prioritas nasional serta dengan adanya wabah pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai sektor, baik sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, tenaga kerja dan jasa (perhotelan, restoran, transportasi dll), yang otomatis akan mempengaruhi tingkat kunjungan

dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah, melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya angka pengangguran bagi pelaku industri pariwisata dan pelaku usaha, dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka tempat wisata maupun untuk berwisata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pelatihan-pelatihan (pelatihan guide, manajemen pariwisata, penguatan kelembagaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dll), peningkatan promosi pariwisata, penataan kembali obyek wisata berbasis kawasan. penguatan kelembagaan kepariwisataan (Pokdarwis, ASITA, Travel agent, pengembangan Tourist Information Centre), menggelar event-event unggulan daerah yang spektakuler. perlu adanya pemaketan pariwisata serta pengembangan desa wisata.

### 3. Pertanian

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah pertanian di Kabupaten Klaten luasnya mencapai 34.682,71 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Untuk lahan non sawah di Kabupaten Klaten terdiri dari penggunaan lahan industri, perdagangan dan perkantoran, permukiman, hutan, ladang/ tegalan dan perairan.

Penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2016-2020 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Perubahan luas Kabupaten Klaten secara administrasi menjadi 70.152,02 Ha di tahun 2020, hal ini berdasarkan pada hasil pengecekan lapangan dan peta administrasi yang mendapat persetujuan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta kesepakatan dengan Kementerian ATR/ BPN. Sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.129. berikut:

Tabel 2.129.  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Permukiman	Industri, Perdagangan dan Perkantoran	Hutan	Ladang/ Tegalan	Sawah	Perairan	Jumlah
1	Prambanan	1.074,74	38,23	0	16,29	1.447,78	32,42	2.609,45
2	Gantiwarno	707,22	0,00	0	73,63	1.841,83	21,76	2.644,44
3	Wedi	930,73	0,00	0	38,64	1.648,62	7,56	2.625,54
4	Bayat	1.860,02	0,00	631,17	341,52	1.189,55	187,70	4.209,96
5	Cawas	1.174,09	0,00	0	33,25	2.367,14	19,05	3.593,53

No	Kecamatan	Permukiman	Industri, Perdagangan dan Perkantoran	Hutan	Ladang/ Tegalan	Sawah	Perairan	Jumlah
6	Trucuk	1.382,45	3,92	0	75,22	2.003,37	3,54	3.468,50
7	Kalikotes	598,36	1,74	17,55	15,48	767,88	9,75	1.410,76
8	Kebonarum	256,63	12,35	0	0,78	767,91	3,95	1.041,62
9	Jogonalan	1.058,27	27,40	0	8,30	1.640,93	25,02	2.759,92
10	Manisrenggo	1.168,64	0,00	0	239,80	1.612,47	39,36	3.060,27
11	Karangnongko	1.133,70	0,00	0	976,59	835,01	3,86	2.949,16
12	Ngawen	652,81	0,53	0	0,00	1.189,38	2,76	1.845,49
13	Ceper	866,14	173,89	0	132,84	1.402,36	1,44	2.576,67
14	Pedan	797,16	7,78	0	332,32	861,51	1,13	1.999,90
15	Karangdowo	844,79	0,00	0	42,04	2.183,60	10,28	3.080,70
16	Juwiring	940,46	19,85	0	55,45	2.063,39	10,86	3.090,02
17	Wonosari	931,84	8,76	0	91,10	2.291,19	17,17	3.340,05
18	Delanggu	601,90	26,42	0	103,10	1.269,80	1,78	2.003,01
19	Polanharjo	560,65	11,88	0	0,00	1.885,53	63,51	2.521,57
20	Karanganom	727,02	8,14	0	63,14	1.757,26	6,11	2.561,67
21	Tulung	1.007,36	4,01	0	691,01	1.717,66	23,95	3.443,99
22	Jatinom	1.361,19	0,00	0	1.799,43	549,67	0,68	3.710,97
23	Kemalang	2.376,44	0,00	901,22	2.583,03	53,80	104,43	6.018,93
24	Klaten Selatan	673,24	5,30	0	14,59	812,81	3,16	1.509,11
25	Klaten Tengah	606,04	26,54	0	35,88	289,15	1,83	959,45
26	Klaten Utara	742,94	52,48	0	88,10	233,10	0,73	1.117,35
Jumlah		<b>25.034,83</b>	<b>429,21</b>	<b>1.549,94</b>	<b>7.851,53</b>	<b>34.682,71</b>	<b>603,81</b>	<b>70.152,02</b>

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB. Namun, setiap tahunnya Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya disajikan pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130  
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian  
Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2016	45,392	33,058	8,910	0,113	3,311	45,392
2017	45,761	40,298	4,515	0	0,948	45,761
2018	63,381	48,897	13,744	0	0,740	63,381

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2019	81,600	55,500	18,200	0,500	7,500	81,600
2020	93,1802	56,1038	10,33	25,516	1,22	93,1802

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131.  
Perkembangan Produksi dan Produktivitas  
Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditas	2016		2017		2018		2019		2020	
		Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)
1	Padi	426.028	57.87	380.268	51.41	459.044	62.19	469.873.51	67.16	449.093.28	63.33
2	Jagung	72.583	74.97	90.343	81.50	81.981	79.66	102.952.94	90.76	99.087.90	89.38
3	Kedelai	2.759	18.12	4.440	19.87	7.026	19.76	2.559.81	16.28	1.039.92	19.12
4	Kacang Tanah	1.784	14.58	1.527	16.79	1.816	14.01	1.495.21	14.42	1.157.73	13.21
5	Kacang Hijau	260	8.72	285	12.50	81	11.31	537.75	15.91	1.984.97	10.77
6	Ubi Kayu	32.224	392.11	9.778	224.99	9.370	261.80	21.078.17	291.13	27.296.04	273.81
7	Ubi Jalar	356	143.55	251	119.28	297	103.67	555.18	128.51	332.89	134.77

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui tingkat produktivitas padi/ bahan pangan utama lokal semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya luas lahan pertanian ke non pertanian pada tahun 2020 sebesar 93,18 Ha serta adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi. Sedangkan produktivitas padi pada Tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 karena implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian.

Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2015 - 2019 disajikan pada Tabel 2.132.

Tabel 2.132.  
Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tembakau Rajangan	2.193.575	1.233.527	1.744.364	1.750.300	1.558.79
2	Tembakau Asepan	1.038.530	1.070.724	1.514.140	2.595.300	2.308.72

No.	JenisKomoditas	Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	TembakauVorstenland	303.930	239.455	129.115	11.600	0
4	Kelapa Dalam	4.097.630	4.697.582	4.588.666	4.048.189	4.322.36
5	Kelapa Hibrida	45.510	45.600	44.133	29.340	29.94
6	Kelapa Deres	99.470	98.740	92.464	87.150	78.84
7	Kopi Arabica	105.250	81.320	81.523	43.320	162.20
8	Kopi Robusta	9.830	9.990	10.150	9.820	12.94
9	Cengkeh	44.220	45.630	47.040	36.500	49.75
10	Lada	13.150	12.110	13.150	11.400	17.70
11	Tebu	6.289.000	3.258.940	824.760	3.316.970	3.202.97

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.132 sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan, dimana produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2016 sebesar 2.193.575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595.300 Ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133.  
Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Sapi Potong	88.343	88.850	100.259	102.431	104.312
2	Sapi Perah	5.795	6.098	6.784	6.443	6.807
3	Kambing	88.343	88.957	96.596	101.402	105.782
4	Domba	38.489	38.570	45.204	46.963	47.562
5	Ayam Bukan Ras	2.801.581	3.256.177	2.245.443	2.532.676	2.109.668
6	Ayam Pedaging	2.898.344	3.385.400	2.475.187	3.896.788	2.489.800
7	Ayam Petelur	867.822	930.234	746.422	832.764	900.342
8	Itik	395.436	575.100	425.473	430.329	397.012
9	Burung Puyuh	451.193	452.332	519.566	535.244	363.563

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.133. sebagaimana tersebut di atas, terlihat pada Tahun 2020 populasi sapi potong mengalami kenaikan sebesar 104.321 ekor jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 102.431 ekor. Hal ini dipengaruhi oleh intensifnya penyuluhan tentang kesehatan hewan dan penggunaan bibit ternak yang baik. Sedangkan produksi peternakan Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134.  
Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Susu (Liter)	4.878.662	5.903.181	4.411.440	4.978.442	4.456.373
2	Daging (Kg)	2.749.351	2.963.800	7.894.670	10.111.868	1.897.720
3	Telur (Butir)*	375.376.131	570.571.719	204.383.632	474.800.851	154.567.112

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.134 sebagaimana tersebut di atas, perkembangan produksi susu, daging dan telur pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019.

Dengan mewabahnya pandemik Covid-19 yang berdampak pada perekonomian termasuk di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang berakibat menurunnya permintaan pasar dan tidak stabilnya harga hasil pertanian dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, menurunnya hasil produksi pertanian. Tidak stabilnya harga pupuk dan pakan ternak dikarenakan *supply* yang tidak normal dan kurangnya tenaga kerja serta kelembagaan petani. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya jaminan pembelian atas hasil pertanian, mendorong pemulihan dan stabilitas harga produk hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, perlunya kreatifitas dan inovasi produk hasil pertanian dan hortikultura, perkebunan dan peternakan menjadi makanan olahan, fasilitasi KUR, fasilitasi bantuan bibit/benih, pupuk, alat mesin pertanian serta peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, menjaga stabilitas harga dan ada jaminan pembelian produk hasil pertanian, perkebunan dan peternakan serta fasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian melalui Jaringan Irigasi Tersier/Jaringan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa.

#### 4. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### A. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus, dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 2.135.

Tabel 2.135.  
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan  
di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Rambu lalu lintas biasa	3.979	buah	81	247	100	227	227	3.435	86,33
2	Rambu RPPJ	200	buah	11	12	13		0	140	70,00
3	Rambu Tipe F	100	buah		12	5		0	43	43,00
4	Marka Jalan	34.965	m2		8.280	9.925	465	5715	42.920	122,75



No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2016	2017	2018	2019	2020		
5	Traffic Light	40	unit				2	0	31	77,50
6	Guardrail	3.000	m	1.060	520	468	200	104	3.240	108,00
7	Paku marka/ mata kucing	97.125	buah					0	1.685	1,73
8	Traffic cone	500	buah	40				0	40	8,00
9	Deliniator	10.000	buah					0	0	0,00
10	Cermin Tikungan	50	buah	10	13	10	30	22	85	170,00
11	Zona Selamat sekolah	50	unit				5	0	5	10,00
12	Lampu kedip	20	buah	5			6	0	11	55,00
13	Rambu elektronik	40	unit	2	6			0	8	20,00
14	Water Barrier	100	buah			26	20	20	66	66,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020

Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136.  
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
01 Mobil Barang	10.657	9.622	9.001	8.553	8.072
02 Mobil Bus					
* Umum	464	397	395	407	391
<i>Bus Besar</i>	44	65	79	63	91
<i>Bus Sedang</i>	131	261	211	224	215
<i>Bus Kecil</i>	289	71	105	120	85
* Bukan Umum	137	105	114	116	97
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	9	6	6	32	7
Jumlah	11.731	10.527	9.911	9.108	8567

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020

Tabel 2.137.  
Data Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Kendaraan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Bus Umum	600	585	600	498	450	489	450	461	450	315
2	Bus Bukan Umum	500	593	500	644	600	711	650	635	600	453

No	Jenis Kendaraan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Mobil Penump. Umum	12	-	12	-	-	-	-	-		-
4	Taksi										-
5	Kendaraan Roda Tiga										-
6	Pick Up	13200	13420	13300	11764	11000	12113	11000	11247	11000	9332
7	Truk	7000	7013	7200	5902	6000	5068	5000	4588	4500	4033
8	Kereta Gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9	Kereta Tempelan	25	20	20	15	15	11	10	19	19	28
10	Traktor Head	30	23	25	21	20	17	15	39	39	43
11	Kend. Khusus	-	2	-	2	2	2	2	3	3	5
Jumlah Total		21367	21656	21657	18846	18087	18411	17127	16992	16611	14209

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.137, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 7 (tujuh) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Jumlah angkutan yang beroperasi dan masuk terminal semakin lama semakin menurun, seiring makin maraknya moda transportasi berbasis aplikasi (gojek, gocar, grab dan sebagainya) serta semakin mudahnya akses untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Data terminal angkutan penumpang umum pada Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.138.

Tabel 2.138.  
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum  
di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Terminal	Alamat	kondisi	Type	Luas	Jumlah bus/ angkutan
1	2	3		4	5	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	80%	C	4500 m <sup>2</sup>	18
2	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	75%	C	3310 m <sup>2</sup>	7
3	Pasar Klaten	Klaten Tengah	75%	C	600 m <sup>2</sup>	15
4	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	75%	C	3168 m <sup>2</sup>	26
5	Tulung	Tulung, Klaten	75%	C	400 m <sup>2</sup>	3
6	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	75%	C	1785 m <sup>2</sup>	0
7	Delanggu	Karang, Klaten	80%	C	7000 m <sup>2</sup>	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020

Sedangkan sebaran terminal di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar 2.12.



Gambar 2.12.  
Peta Sebaran Terminal di Kabupaten Klaten

### B. Pasar

Pasar merupakan sarana pendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana distribusi, penyeimbang harga dan promosi produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya, dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan. Gambaran Jumlah perkembangan Pasar Kios, Los dan Pedagang Tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 2.139.

Tabel 2.139.  
Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
01 Prambanan	2	1	-	101	9	169
02 Gantiwarno	2	1	-	39	18	93
03 Wedi	3	2	-	248	54	803
04 Bayat	3	2	-	276	30	923
05 Cawas	4	4	-	109	23	229
06 Trucuk	2	3	-	118	80	384
07 Kalikotes	1	2	-	20	8	109
08 Kebonarum	1	-	-	8	0	5
09 Jogonalan	1	2	-	60	13	266
10 Manisrenggo	1	2	-	74	5	106
11 Karangnongko	1	-	-	76	4	94
12 Ngawen	1	2	-	20	6	114
13 Cepher	-	1	1	224	53	456
14 Pedan	1	1	-	75	5	281
15 Karangdowo	1	2	-	173	1	456
16 Juwiring	3	1	-	174	6	283
17 Wonosari	2	1	-	50	2	140
18 Delanggu	1	-	-	321	2	208
19 Polanharjo	-	1	-	18	4	5
20 Karanganom	3	-	-	91	8	396
21 Tulung	2	5	-	51	9	122

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
22 Jatinom	2	3	-	189	6	642
23 Kemalang	2	-	-	2	71	1032
24 Klaten Selatan	1	-	-	36	2	138
25 Klaten Tengah	7	-	-	634	16	1987
26 Klaten Utara	3	-	-	61	13	160
Jumlah 2020	50	36	1	3.248	448	9.601
2019	51	35	1	3.248	524	11.752
2018	49	33	2	2.163	922	10.532
2017	49	33	1	5.859	922	17.981
2016	50	41	2	2.993	791	11.293

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dispermasdes Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.139, sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa di Tahun 2020 ada penurunan jumlah los dan pedagang sebanyak 524 los dan 11.752 pedagang jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 524 los dan 11.752 pedagang. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Dengan adanya Covid-19 berdampak juga pada sektor perdagangan dalam negeri seperti adanya pembatasan *Social Distance* (mengurangi tingkat kerumunan massa) untuk pasar tradisional yang umumnya terletak di wilayah kecamatan pada umumnya masyarakat takut untuk berbelanja ke pasar sehingga transaksi berkurang, terganggunya arus barang antar daerah karena diterapkannya Pembatasan Skala Besar-besaran (PSBB). Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya pembangunan maupun revitalisasi pasar daerah, pemberdayaan pedagang lokal atau budaya belanja di warung tetangga, dan juga menjaga kebersihan pasar daerah untuk menjaga kesehatan pasar, serta mengadakan sosialisasi kepada para pedagang terkait penanggulangan Covid-19 untuk menciptakan iklim pasar sehat serta memberikan perlindungan kepada konsumen atau pembeli melalui implementasi kemeterologian serta fasilitasi bantuan kredit usaha.

### C. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jaringan listrik di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2019 KWH terjual sudah mencapai 742.752.198 Kwh dan 3.083.129 Kvarh dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu KWH terjual mencapai 800.543.010 Kwh dan 3.505.183 KVarh. Hal ini disebabkan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Klaten juga

mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 423.234 pelanggan menjadi sebanyak 870.528 pelanggan pada tahun 2020. Gambaran Jumlah KWH Terjual PLN tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.140.

Tabel 2.140.  
Jumlah KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2020	233.003.146	1.452.177	166.454.905	1.390.861	302.690.358	591.614	98.394.601	70.531
2019	212.188.348	1.365.892	158.604.623	987.238	281.819.234	616.630	90.139.993	113.369
2018	194.235.730	1.126.435	147.251.972	688.240	266.553.553	388.355	84.824.367	72.779
2017	184.311.136	950.724	141.280.660	456.741	254.420.528	705.555	80.357.125	40.985
2016	169.113.691	878.502	141.194.438	240.824	250.644.532	1.156.967	78.135.104	67.506

Sumber: Bagian Perekonomian, 2020

Jaringan listrik yang ada di Kabupaten Klaten sudah terlayani oleh PLN. Hal ini dapat dilihat dari adanya garduk induk maupun jaringan distribusi yang berada di sepanjang jalan. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Klaten mencapai 870.528 pelanggan. Sebaran jumlah pelanggan jaringan listrik di Kabupaten Klaten dirinci per cabang pelayanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.141.  
Jumlah Pelanggan PLN Di Kabupaten Klaten Hingga Tahun 2020

No	Cabang/ Ranting	2016	2017	2018	2019	2020
1	Klaten	136.788	141.705	147.163	151.920	156.407
2	Tulung	81.770	86.380	89.203	91.878	94.277
3	Pedan	107.340	111.087	115.564	118.744	122.306
4	Delanggu	55.830	57.226	59.043	60.692	62.274
Jumlah		370.655	381.728	396.398	410.973	435.264

Sumber: Bagian Perekonomian, 2020

#### D. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sepanjang 769.63 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil, dan jalan tanah. Berdasarkan kondisi jalan yang ada, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada dapat dilihat pada Tabel 2.142.

Tabel 2.142.  
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di  
Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Km)

Keadaan		Status Jalan										
		Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten				
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020
I	Jenis Permukaan											
	a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet	33,52	33,52	33,52	41,360	41,360	41,360	753,94	725,29	725,29	689,66	614.8
	b. Berbatu/Macadam	-	-	-	-	-	-	3,16	-	-	-	-
	c. Hotmix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Kerikil	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,1	-
	e. Tanah/Jalan Belum Tembus	-	-	-	-	-	-	12,53	-	-	-	-
	f. Beton	-	-	-	-	-	-	-	41,44	41,44	77,87	101.09
	Jumlah - I	33.52	33,52	33,52	41,360	41,360	41,360	769,63	769,63	769,63	769,63	
II	Kondisi Jalan											
	a. Baik	3,9	3,9	3,9	25,76	25,76	25,76	432,91	470,61	517,27	533,56	475.858
	b. Sedang	29,62	29,62	29,62	15,61	15,61	15,61	190,92	169,03	140,34	128,47	169.532
	c. Rusak	-	-	-	-	-	-	63,51	62,9	56,86	52,04	58.946
	d. Rusak Berat							82,29	67,09	55,16	55,56	11.554
	Jumlah - II	33.52	33,52	33,52	41,37	41,37	41,37	769,63	769,63	769,63	769,63	715,89
III	Kelas Jalan											
	a.Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c.Kelas III	-	-	-	41,360	41,360	41360	-	-	-	-	-
	d.Kelas IIIA	33,52	33,52	33,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	e.Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f.Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-	769,63	769,63	769,63	769,63	715.89
	g.Kelas IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	h.Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah - III	33.52	33,52	33,52	41,36	41,36	41,36	769,63	769,63	769,63	769,63	715,89

Sumber : DPUPR Kabupaten Klaten, 2020

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan seperti terlihat pada Tabel 2.141. Dari Tabel tersebut dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8.100 km; (ii) Kecamatan Pedan 6.100 km; (iii) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5.000 km.

Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; (iii) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko 38.320 km. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.143.

Tabel 2.143.  
Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Klaten Tahun 2019 dalam km)

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prambanan	-	33.801	78.580	43.350
2	Gantiwarno	-	42.540	136.950	27.900
3	Wedi	-	24.880	88.068	48.160
4	Bayat	-	19.990	87.815	93.130
5	Cawas	8.100	37.180	101.215	87.335
6	Trucuk	0.940	32.050	104.635	98.287
7	Kalikotes	-	18.200	84.688	74.373
8	Kebonarum	-	20.440	42.825	10.725
9	Jogonalan	-	21.230	81.141	65.710
10	Manisrenggo	-	21.639	105.840	51.050
11	Karangnongko	-	33.750	74.540	37.735
12	Ngawen	2.900	23.640	64.460	58.700
13	Ceper	5.000	14.990	81.570	77.255
14	Pedan	6.100	24.660	64.520	75.005
15	Karangdowo	-	22.140	107.315	37.319
16	Juwiring	-	29.020	121.645	83.074
17	Wonosari	-	28.070	54.810	57.820
18	Delanggu	-	20.920	57.543	57.415
19	Polanharjo	-	28.560	95.266	56.275
20	Karanganom	-	23.410	100.650	81.088
21	Tulung	6.000	32.490	107.330	79.390
22	Jatinom	4.400	32.170	83.550	98.780
23	Kemalang	-	33.040	137.450	26.100
24	Klaten Selatan	-	24.970	59.280	30.404
25	Klaten Tengah	-	42.880	24.850	13.460
26	Klaten Utara	1.400	29.230	24.500	24.770
	JUMLAH	34.840	715.89	2.171.006	1.494.610

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2020 & DPU PR, 2020

#### E. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten terdapat sarana akomodasi penginapan sebanyak 42 hotel/losmen. Walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan untuk *Tour and Travel* (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 2.144.

Tabel 2.144.  
Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten

Biro Perjalanan	
1. PT Ekapari	10. Persada Indah Tour
2. CV. Dewa Nusantara Tour	11. Sargedde Tour and Travel
3. CV. Pulo Mas Tour	12. Pradana Tour
4. PT. Danita Tour Service	13. Selendang Sutera
5. Adi Tour	14. Bintang Timur
6. Giri Sampurna Putra Tour	15. Galihayu Tour and Travel
7. H and R Tour	16. Astuti Pinastika Tour
8. Multi Pratama	17. Graphindo Tour Travel
9. Sembilan Buana Tour	18. Kharisma Tour

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Klaten, 2020

## 5. Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, dimana tingginya kedua variabel tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

### 1) Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145.  
Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (investor)	21	41	67	870	4.743
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp. dalam ribuan)	62.385.300	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766	698.896.464
Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN) (orang)	136	68	27	21	3
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (persentase)	203	296	-7	733	-64

Sumber: DPMPSTSP Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, kondisi wabah Covid-19 sangat mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Klaten, yang dapat dilihat dari angka kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN tahun 2020 yaitu -64%. Kemudian di indikator lainnya yang juga menunjukkan angka penurunan. Sehingga di tahun 2021 sangat penting bagi pelaku usaha/pelaku investasi/investor dan pemerintah untuk tetap menjaga, mengikuti, dan mengamati perkembangan serangan gelombang kedua Covid-19. Dengan pengamatan dan perhitungan yang tepat, total kerugian dan dampak buruk dapat



diminimalisir, sehingga perkembangan realisasi PMDN Kabupaten Klaten dapat meningkat.

## 2) Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Nilai investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuasi. tentunya juga dikarenakan pengaruh pandemi Covid-19. Terutama dengan adanya pembatasan/*lockdown* membuat segala aktivitas perdagangan baik ekspor maupun impor terkendala. sehingga berdampak kerugian perusahaan yang tidak sedikit. Rasio daya serap tenaga kerja juga menurun. meskipun target jumlah investor PMA tercapai. Hal ini disebabkan karena PMA yang masuk di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 bukan merupakan industri padat karya, melainkan padat modal. Di samping itu, tenaga kerja yang dibutuhkan memiliki kualifikasi tertentu dan kualitas yang tinggi. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146.  
Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMA) (investor)	53	43	39	15	5
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (US\$ dalam ribu)	6.373	10.257	3.091	11.491	4.721
Rasio daya serap tenaga kerja (PMA) (Orang)	28	2	14	224	12
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (prosentase)	1.415	61	-70	272	-59

Sumber: DPMPSTSP Kab. Klaten. 2020

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, dimana semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar pula investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147.  
Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
2015	420.700	5.469.100	27	-86	20.598.400	5	259
2016	6.372.700	82.845.100	53	1.415	62.385.300	21	203
2017	10.257.000	138.469.500	43	61	247.327.200	41	68
2018	3.091.400	41.211.500	39	-70	229.788.500	67	27
2019	11.490.893	160.872.497	15	272	1.914.915.766	870	733
2020	4.721.429	66.100.000	5	-59	698.896.464	4743	-64

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah investasi PMA dan PMDN Tahun 2020 mengalami penurunan. Untuk PMA yaitu sebesar US\$ 4.721.429.- dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar US\$ 11.490.893.-. Sedangkan untuk PMDN yaitu sebesar Rp 698.896.464.253.- dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.914.915.766.292.-. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pandemi Covid-19. Pelaku usaha baik PMDN maupun PMA mengalami kendala dalam melaksanakan usahanya. baik dalam proses konstruksi maupun produksi. Pembatasan jam kerja karyawan dan pembatasan kegiatan ekspor impor membuat proses produksi terhambat sehingga realisasi investasipun menurun.

#### A. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang peranannya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 di sektor perdagangan menyebabkan omset penjualan menurun dikarenakan banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi lemahnya tingkat perlindungan konsumen. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya. Hal ini dapat diantisipasi dengan fasilitasi pameran untuk produk UMKM, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih Cinta Produk Lokal, menerapkan Sistem Penjualan Sistem *Online*, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha.

Gambaran pasar menurut jenisnya dapat dilihat pada terlihat pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148.  
Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
01 Toko Swalayan	398	417	556	573	604
02 Pasar Umum/Rakyat	55	57	85	85	85
03 Pasar Hewan	12	12	12	12	12
04 Pasar Buah	1	1	1	1	1
05 Pasar Sepeda	7	7	4	4	4
06 Pasar Ikan	0	0	0	0	0
07 Lain-Lain / Pasar Burung	12	12	3	3	3
08 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	486	507	662	679	710

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.148 sebagaimana tersebut di atas, terlihat pula bahwa toko swalayan yang paling dominan pada Tahun 2016-2020, dimana selalu ada perkembangan atau bertambah. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan penduduk dan teknologi, serta kondisi iklim usaha yang kondusif di daerah. Di samping itu, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mendirikan toko swalayan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Disamping itu dari sejumlah 50 pasar tradisional milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum di revitalisasi, sampai dengan Tahun 2017 baru terdapat 14 pasar yang direvitalisasi, sedangkan untuk Tahun 2018 ada 3 pasar yang direvitalisasi, dan Tahun 2019 ada 1 pasar yang direvitalisasi, sedangkan di tahun 2020 tidak ada pasar yang direvitalisasi karena dampak pandemi Covid-19.

Kemudian dari sejumlah 2.274 unit usaha di bidang olahan pangan masih banyak yang produksinya belum memiliki PIRT. Sampai dengan Tahun 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM baru dapat memfasilitasi sebanyak 39 UKM dan untuk tahun 2018 sebanyak 20 UKM dan Tahun 2019 sebanyak 60 UKM, sehingga masih banyak UKM yang perlu mendapatkan fasilitasi untuk mendapatkan PIRT.

Cakupan bina kelompok usaha informal di tahun 2019 mengalami peningkatan cukup tinggi, namun di tahun 2020 mengalami penurunan kembali karena dampak pandemi Covid-19. Berikut cakupan bina kelompok usaha informal di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.149.  
Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal (%)	9,77	5,90	7,34	37,38	8,26

Sumber: Disdagkop Kabupaten Klaten, 2020

Selain itu sejalan dengan kebijakan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Metrologi Legal diserahkan kewenangannya dari provinsi ke kabupaten pada Tahun 2018. Dalam hal ini, Kabupaten Klaten telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang yang akan melakukan Tera/Tera Ulang kepada wajib tera dalam rangka optimalisasi perlindungan konsumen demi terwujudnya usaha perdagangan yang aman, tertib dan terkendali. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia guna mendukung kelembagaan unit pengelola meteorologi.

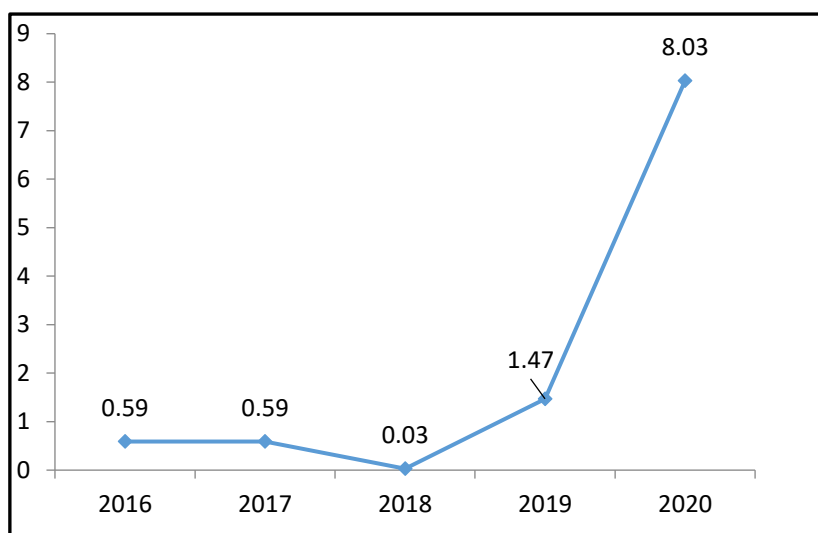
#### B. Perindustrian

Perkembangan perindustrian berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150.  
Realisasi Kinerja Indikator Perindustrian Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertumbuhan Industri	0,59	0,59	0,03	1,47	8,03	%
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	33,74	34,03	34,19	37,03	37,39	%

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2020



Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2020

Grafik 2.41.

#### Pertumbuhan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 cenderung tetap walaupun di tahun 2019 meningkat, namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1). meningkatkan koordinasi pembangunan industri dengan dinas/lembaga lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan fiskal dan pembiayaan sektor industri; 2). implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); 3). perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan 4) penguatan daya beli masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten, sebab dalam hal kontribusi terhadap PDRB kabupaten, sektor ini memiliki cukup peran. Beberapa langkah strategi dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten agar dapat meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, antara lain melalui penurunan besaran uang muka untuk produk pembelian mobil dan motor, mempercepat penyaluran dana bantuan sosial ke masyarakat, serta meningkatkan utilisasi industri dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Dalam komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 37,03% (14.727.480,24 juta) pada Tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 37,39% (14.936.275,20 juta). Basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang

menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan.

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri dimana selama Tahun 2014-2018 yang mengalami peningkatan adalah perusahaan industri tekstil, sedangkan industri lainnya cenderung stabil.

Industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Karanganyam, Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan furniture terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, dan Klaten Utara.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui Pola Klaster, dimana sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari : (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, dan Prambanan; (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo; (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganyam dan Wonosari; (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganyam, Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari; (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat; (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, dan Kemalang; (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang; (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring; (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang; (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo; (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganyam, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen.

Sedangkan untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum,

Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper. Perkembangan jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.151.

Tabel 2.151.  
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
1		2	3	4	5
<b>I</b>	<b>INDUSTRI BESAR / MENENGAH</b>				
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	90	7.727	337.874.160	1.742.048.134
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	49	5.118	250.955.188	1.157.048.530
Sub Jumlah I					
	2020	139	12.845	588.829.348	2.899.096.664
	2019	138	12.839	588.538.936	2.897.649.286
	2018	137	12.832	588.244.960	2.896.201.908
	2017	135	12.825	587.950.984	2.894.754.530
	2016	134	12.818	627.637.166	2.893.307.876
<b>II</b>	<b>INDUSTRI KECIL</b>				
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17.606	71.661	546.127.519	2.277.656
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17.092	69.605	446.074.985	1.861.496.473
Sub Jumlah II					
	2020	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
	2019	34.692	141.238	992.004.183	4.138.549.952
	2018	34.686	141.210	991.805.862	4.138.094.610
	2017	34.680	141.182	991.607.541	4.137.639.268
	2015	34.666	141.125	991.211.017	4.135.984.709
Jumlah I + II					
	2020	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793
	2019	34.830	154.077	1.580.543.119	7.036.199.238
	2018	34.823	154.042	1.580.050.822	7.034.296.518
	2017	34.814	154.007	1.579.558.525	7.032.393.798
	2016	34.807	153.972	1.619.046.425	7.030.119.782

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2020

Berdasarkan Tabel 2.151. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa pertumbuhan industri menengah dan besar pada Tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 1 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 588.829.348.-. Sedangkan untuk industri kecil pada Tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 6 unit dengan nilai investasi sebesar Rp 992.202.504.-

Kemudian untuk industri mebel dari sejumlah 1.322 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan Tahun 2019 baru terdapat 276 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan

eksport mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya. Di sisi lain, dari 34.830 IKM yang memiliki daya saing pada Tahun 2019 baru mencapai 4,5% meningkat jika dibandingkan Tahun 2015 yang sebesar 2,5%. sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

Dengan terdampaknya Covid-19 berakibat pada keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), berkurangnya alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri menurun, terganggunya *supply* bahan baku serta berkurangnya permintaan pasar.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya pelaksanaan di berbagai macam pelatihan industri kluster, pembinaan sentra-sentra industri daerah, perlunya diterapkan teknologi industri yang tepat guna serta peningkatan daya saing industri melalui fasilitasi SNI dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

#### 6. Fokus Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Klaten sudah berada pada tingkat “menengah atas” di mana IPM Kabupaten Klaten sudah mencapai 75,29 pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 sudah mencapai 75,56. IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup; (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152.  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten  
Tahun 2016-2020

Indikator IPM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Usia harapan Hidup (UHH)	76,59	76,62	76,67	76,68	76,78
Angka harapan lama sekolah (HLS)	12,85	12,97	13,13	13,24	13,25
Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,22	8,23	8,24	8,31	8,58
Pengeluaran Riil Per kapita (dlm Ribuan Rp)	11.227	11.369	11.738	12.074	11.921
<b>IPM</b>	<b>73.97</b>	<b>74.25</b>	<b>74.79</b>	<b>75.29</b>	<b>75.56</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2020



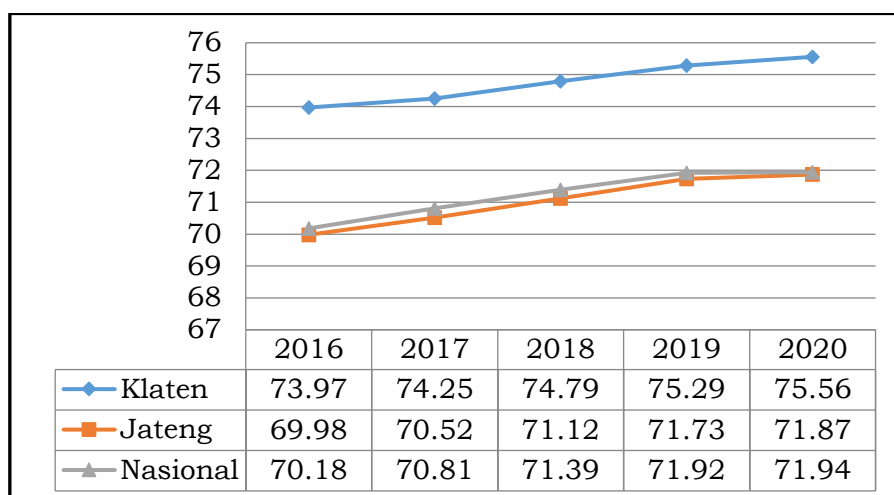
Sedangkan di Kawasan Subosukawonosraten, posisi IPM Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 menempati urutan ke-3 setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.153.  
Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2020

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita (Rp 000)	IPM	Peringkat Provinsi
Klaten	76,78	13,25	8,58	11.921	75,56	3
Boyolali	75,95	12,56	7,84	12.910	74,25	5
Sukoharjo	77,65	13,83	9,34	11.325	76,98	2
Wonogiri	76,16	12,49	7,33	9.286	70,25	7
Sragen	75,71	12,83	7,65	12.589	73,95	6
Karanganya	77,47	13,68	8,56	11.428	75,86	4
Surakarta	77,22	14,87	10,69	14.761	82,21	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2020

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten dari Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Perkembangan IPM Kabupaten Klaten jika disandingkan dengan capaian IPM tingkat Provinsi Jateng dan capaian IPM Nasional adalah seperti tergambar sebagai berikut:



Sumber: BPS Prov. Jateng, 2020

Grafik 2.42.

Capaian IPM Nasional. Provinsi Jateng dan Kabupaten Klaten Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan IPM Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Klaten khususnya di sektor-sektor

pendukung capaian IPM seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

## **2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd SAMPAI TAHUN 2020 DAN REALISASI RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan, yang meliputi: (1) penyusunan; (2) penetapan; (3) pengendalian dan perencanaan; serta (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 23 yang menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sangat diperlukan dalam menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun perbaikan kebijakan ataupun perencanaan pembangunan pada Tahun berikutnya. Untuk itu, informasi akurat dari para pemangku kepentingan khususnya para pelaksana pembangunan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi ini.

### **2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020**

Untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka digunakan indikator kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang terbagi dalam beberapa aspek, fokus dan urusan bidang. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.154.

Tabel 2.154.

## Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan					
					Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Sehat dan Berbudaya	1.1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	a	Angka harapan lama sekolah			13.24	13.25	Pendidikan		
				b	Angka rata-rata lama sekolah			9.50	8.58	Pendidikan		
						1.1.1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	a	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	98.30	98.37	Pendidikan
				b	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	90.00		90.57	Pendidikan			
		1.2	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	a	Meningkatnya Usia Harapan Hidup							Kesehatan
						1.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	a	Menurunnya kasus kematian Ibu	15	17	Kesehatan
								b	Menurunnya Angka Kematian Bayi	10.09 / 1000 KH	9.34	Kesehatan
								c	Menurunnya angka kematian Balita	1.63 / 1000 KH	1.52	Kesehatan
								d	Menurunnya prevalensi gizi buruk (BB/U)	0.83 %	0.9	Kesehatan
						1.2.2	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	a	Usia Harapan Hidup	76.68	76.78	Kesehatan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan				
					Target	Realisasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
	1.3 Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	a	Menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				13.5	13.02	Sosial		
				1.3.1	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	a	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	87	90.32	Sosial	
						b	Persentase penguatan kapasitas PSKS	99	96	Sosial	
						c	Prosentase penduduk miskin	12.78 – 12.28	12.89	Sosial	
	1.4	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	a	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				0.98	0.30 (LPP 2019-2020)	Admindakapil	
					1.4.1	Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	a	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR	2.12	2,1	Kesehatan
	15	Meningkatkan Peran Serta. Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat Berprestasi dan Berbudaya	a	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga						Kepemudaan dan Olahraga	
					1.5.1	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	a	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	1	-13.2	Kepemudaan dan Olahraga
							b	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	2	3.7	Kepemudaan dan Olahraga
					1.5.2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah. Kawasan Cagar Budaya. Situs dan Benda Cagar Budaya	a	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	4	-33.3	Kebudayaan
	b	Persentase Peningkatan Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	10	0			Kebudayaan				
	1.6	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	a	Indeks Kepuasan Masyarakat				70	77.92	Perpustakaan	
					1.6.1	Meningkatnya kunjungan	a	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	5	-64.8	Perpustakaan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan					
					Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
			masyarakat ke perpustakaan									
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2.1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a	Indeks Profesionalitas ASN			83	79.98	Kepegawaian		
				b	Indeks kapasitas fiskal daerah			-	1.238	Keuangan		
				c	Prosentase SDM yang memiliki kualifikasi perencana	2.1.1	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a	Indeks Profesionalitas ASN	83	79.98	Kepegawaian
						2.1.2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	a	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	Keuangan
						2.1.3	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	a	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	90	100	Sekretariat Dewan
						2.1.4	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	a	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	100	100	Perencanaan
		2.2	Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	a	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kearsipan					70	77.92	Kearsipan
						2.2.1	Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	a	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	8.72	Kearsipan
		2.3	Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi	a	Prosentase pemerintah desa yang dibina dalam peningkatan kapasitas dan					53	47	Permasdes

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan		
					Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	pemerintahan desa	tata kelola pemerintahan							
			2.3.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional. transparan dan akuntabel	a	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional. transparan dan akuntabel	87	88	Permasdes
	2.4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif. efisien. transparan dan akuntabel	a	Opini BPK			WTP	WTP	
			2.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	a	Level Maturitas SPIP	3	3	Inspektorat
					b	Level Kapabilitas APIP	3	3	Inspektorat
					c	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	68 (B)	61.32 (B)	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
			2.4.2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	a	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3.05	3.21 (nilai tahun sebelumnya karena nilai tahun 2020 belum rilis dari Kemendagri)	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
			2.4.3	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	a	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	90	90	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
					b	Indeks kabupaten peduli HAM	88	95.71	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
			2.4.4	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	a	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan)	90	97	Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan		
					Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
					dengan target (rencana)				
			2.4.5	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	a	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	100	100	Sekretariat Daerah (Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
			2.4.6	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	a	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	98	95	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
					b	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	98	95	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
					c	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	98	99	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
			2.4.7	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	a	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	95	95	Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
3	Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif inovatif dan berdaya saing berlandaskan	3.1	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat	a	Pertumbuhan Ekonomi		2.0 - 2.8	-1.18	BPS
			3.1.1	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap	a	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12.4	10.57	Pertanian

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan				
					Target	Realisasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal				pertumbuhan ekonomi daerah							
	3.2	Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	a	Prosentase LEM. LED yang aktif dan produktif ( LEM. LED baik yang baru atau yang sudah berjalan dan yang telah di fasilitasi atau dibantu sehingga dapat berproduksi			41	104	Permasdes		
	3.2.1		Meningkatkan peran LEM. LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	a	Prosentase desa yang memiliki LEM. LED dan posyantek			50	42	Permasdes	
	3.3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	a	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				0.53	0	Pariwisata	
			b	Tingkat pertumbuhan ekonomi				2.0 – 2.8	-1,18	BPS	
			c	Pendapatan per kapita (000)					24.193.88	N/A	BPS
			3.3.1	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing kepariwisataaan	a	Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata			25	-56.26%	Pariwisata
			3.3.2	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	a	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB				19.37	19.98
	b	Persentase UMK yang memiliki daya saing						13	11.8	Perdagangan	



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan					
					Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
			3.3.3 Meningkatkan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	a	Prosentase inovasi yang diterapkan	86.36	87.50	Penelitian dan Pengembangan				
			3.3.4 Meningkatkan nilai tambah . produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	a	Rasio daya serap tenaga kerja PMDN	460	3	Penanaman Modal				
				b	Rasio daya serap tenaga kerja PMA	294	12	Penanaman Modal				
				c	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN	2.50	-64	Penanaman Modal				
				d	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA	2.55	-59	Penanaman Modal				
	3.4 Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a	Tingkat pengangguran terbuka			6.05 – 6.75	5.46	Tenaga Kerja				
				3.4.1	Meningkatnya nilai tambah. produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	a	Rasio penduduk yang bekerja	1.06	0.96	Tenaga Kerja		
						b	Angka partisipasi Angkatan kerja	85	68.79	Tenaga Kerja		
			3.4.2	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	a	Besaran buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	75	43.12	Tenaga Kerja			
	3.5 Meningkatkan daya saing produk industri daerah	a	Pertumbuhan Industri			0.62	8.03	Perindustrian				
				b	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB			35.60	37,39	Perindustrian		
						c	Persentase IKM yang memiliki daya saing			8.123	3,54	Perindustrian
								3.5.1	Meningkatnya nilai tambah. produktifitas dan	a	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	35.60

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan		
					Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
			daya saing sektor Perindustrian	b	Persentase IKM yang memiliki daya saing	8.123	3,54	Perindustrian	
4	Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat	4.1	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur public dan sarana prasarana dasar masyarakat	a	Indeks layanan infrastruktur	38.96	41.56	PU PR	
			4.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	a	Indeks layanan infrastruktur	38.96	41.56	PU PR
			4.1.2	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	a	Tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan	52.52	64.83	Perhubungan
			4.1.3	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman			74.05		Kawasan Permukiman
5	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah	5.1	Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	a	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	58.47	52.85	Lingkungan Hidup	
			5.1.1	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	a	Ketaatan terhadap RTRW	79.60	88	PU PR
			5.1.2	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	a	Indeks kualitas air	38.02	36.15	Lingkungan Hidup
					b	Indeks kualitas udara	82.02	76.82	Lingkungan Hidup
					c	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	53.71	42.54	Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan					
					Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
		5.2	Mewujudkan pengurangan resiko bencana	a	Indeks resiko bencana				119	120	Penanggulangan dan Penanganan	
						5.2.1	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	a	Kelas indeks kapasitas bencana	sedang	sedang	Penanggulangan dan Penanganan Bencana
6	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian	6.1	Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	a	Indeks demokrasi				75	N/A	Kesbangpol	
						6.1.1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	a	Indeks demokrasi	75	77.22	Kesbangpol
		6.2	Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	a	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK				70	0	Permasdes	
						6.2.1	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	a	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	66	61	Permasdes
		6.3	Menciptakan ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a	Indeks ketertiban masyarakat				99	98.99	Satpol PP	
						6.3.1	Terwujudnya ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a	Indeks ketertiban masyarakat	99	98.99	Satpol PP
7	Meningkatkan kapasitas	7.1	Meningkatkan kesetaraan	a					96.67	96,17	Sosial	



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		Bidang Urusan			
					Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	7.1.1 Meningkatkan kapasitas perempuan. perlindungan perempuan dan anak	a	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	60.3	69,42	PP dan PA		
				b	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nindya	N/A	PP dan PA		
8 Meningkatkan kapasitas pelayanan publik	8.1 Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	a	Indeks kepuasan layanan masyarakat							
				8.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	a	Indeks kepuasan layanan perhubungan	80,917	79,49	Perhubungan
				8.1.2	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu. tepat mutu. tepat sasaran dan tepat manfaat	a	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	80.00	81.86	Penanaman Modal
	8.1.3	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	a	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Puas	82.92 (smt 2 – th 2020)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	8.2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	a	Persentase partisipasi masyarakat mengikuti program transmigrasi			76	0	Transmigrasi	
			8.2.1	Pengembangan ketransmigrasian	a	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	41,50	5.2	Transmigrasi	

Tabel 2.155.  
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
	<b>1. Urusan Pendidikan</b>								
	1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	43.937	43.937	44.202	100.60	●	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92.99	92.99	80.60	86.68	▼	Dinas Pendidikan
	2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	98.05	98.05	96.02	97.93	●	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	91.53	91.53	100.48	109.78	●	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	87.44	87.44	88.54	101.26	●	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	68.82	68.82	71.14	103.37	●	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	88.88	88.88	92.60	104.19	●	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.01	0.01	0.01	100.00	●	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.08	0.08	0.08	100	●	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SD/MI	%	98.87	98.87	100	101.14	●	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SMP/MTs	%	98.17	98.17	100	101.14	●	Dinas Pendidikan
	3) Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99.74	99.74	99.59	99.85	●	Dinas Pendidikan
	4) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	86	86	87.97	101.28	●	Dinas Pendidikan
		Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98.87	98.87	99.60	100.74	●	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	94.15	94.15	98.52	104.64	●	Dinas Pendidikan
	5) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1: 15	1: 15	1 : 14	98.67	●	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1: 15	1: 15	1 : 15	100.00	●	Dinas Pendidikan
		Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99.74	99.74	99.59	99.85	●	Dinas Pendidikan
	6) Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	89.78	89.78	92.60	103.14	●	Dinas Pendidikan
	7) Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	Penyediaan pendanaan biaya operasi sekolah	siswa	146.656	146.656	136.090	92.80	●	Dinas Pendidikan
	<b>2. Urusan Kesehatan</b>								
	1) Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4)	%	99	99	93.33	94.27	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	%	100	100	96.92	96.92	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	%	100	100	28	97.87	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	98	98	26	92.71	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100	Na	Na	Na	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	99.6	99.6	96.89	97.28	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan BBLR	%	5.02	5.02	5.91	117.73	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Anemia Wanita Usia Subur	%	30	30	15.3	51	▼	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	%	90	90	38	42.22	▼	Dinas Kesehatan	
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia ( >= 60 th)	%	100	100	38.53	38.53	▼	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC	%	100	100	29.98	29.98	▼	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	100	100	16	16	▼	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes mellitus	%	90	90	45	50	▼	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Gangguan jiwa berat	%	100	100	57.08	57.08	▼	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	90	90	88	97.77	●	Dinas Kesehatan	
	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	%	100	100	80	80	▼	Dinas Kesehatan	
	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan	
	Discharded Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	100	69.2	69.2	▼	Dinas Kesehatan	
	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	%	100	100	30	30	▼	Dinas Kesehatan	
	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam	%	100	100	25	25	▼	Dinas Kesehatan	
	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	%	100	100	75	75	▼	Dinas Kesehatan	
	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	95	95	61.2	64.42	▼	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Bias C/DT/TD	%	98	98	C =98.05 DT=94.36 TD=99.15	C =100.05 DT = 96.28 TD=101.17	●	Dinas Kesehatan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3) Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	100	100	98	98	●	Dinas Kesehatan
	4) Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	100	100	71.67	71.67	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100	Na	Na	Na	Dinas Kesehatan
	5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Kebijakan Yang Dibuat	Jumlah / Buah	9	9	3	33.33	▼	Dinas Kesehatan
		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	80	80	6.24	7.8	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan	%	24	24	6.24	26	▼	Dinas Kesehatan
		Proporsi Posyandu Mandiri	%	51	51	7	13.72	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Didampingi SMD MMD	%	100	100	24.92	24.92	▼	Dinas Kesehatan
	6) Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	81	81	3.3	4.07	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Stunting	%	26.8	26.8	12.9	151.86	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Wasting	%	10.2	10.2	5.3	148.04	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Underweight	%	18	18	10.2	143.33	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	%	2.3	2.3	2.9	73.91	▼	Dinas Kesehatan
		Partisipasi Posyandu (D/S)	%	85	85	57.8	143.68	●	Dinas Kesehatan
	7) Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa <i>open defecation free</i> (ODF)	%	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan



Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	%	40	40	Na	Na	Na	Dinas Kesehatan	
	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan	
8)	Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas & RSUD	%	47.06	47.06	Na	Na	Na	Dinas Kesehatan	
9)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase peserta sarasehan dan senam lansia	%	98	98	Na	Na	Na	Dinas Kesehatan	
10)	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	5	5.4	108	●	Dinas Kesehatan	
11)	Pengadaan. Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	/30.000 pend	0.29	0.29	0.29	100	●	Dinas Kesehatan	
	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 pend	0.22	0.22	0.22	100	●	Dinas Kesehatan	
12)	Pengadaan. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	/1.000 pend	1.38	1.38	1.78	128.9	●	Dinas Kesehatan	
13)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	%	70	70	56	80	▼	Dinas Kesehatan	
14)	Manajemen. Informasi. dan Regulasi Kesehatan Persentase pengelolaan SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit)	%	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan	
<b>3.</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								
1)	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	81.90	81.90	63.58	77.63	▼	Dinas PU PR
		Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	67.40	64.41	66.46	103.18	●	Dinas PU PR
2)	Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong	Prosentase panjang talud jalan yang dibangun	%	80.39	80.39	Na	Na	Na	
3)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Prosentase volume jalan yang dipelihara	%	83.17	83.17	83.17	100	●	Dinas PU PR
4)	Penataan Trotoar Jalan	Prosentase rasio trotoar yang tertata	%	59.16	59.16	Na	Na	Na	Dinas PU PR

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
5)	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia	%	100	100	Na	Na	Na	Dinas PU PR
6)	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	30	30	36.17	120.57	●	Dinas PU PR
7)	Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik	%	81.16	81.16	Kewenangan Provinsi			
8)	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang	unit	250	250	Na	Na	Na	Dinas PU PR
9)	Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	81.25	81.25	0	24.62	▼	Dinas PU PR
10)	Pemanfaatan Ruang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Ketataruangan	%	60	60	60	100	●	Dinas PU PR
11)	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	78	78	78	100	●	Dinas PU PR
		persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	%	82.56	2.10	24.15	1.150	●	DPMPPTSP
12)	Program Pembangunan Drainase / gorong-gorong	Prosentase layanan Drainase	%	71.5	72	73	101.38	●	Dinas PU PR
13)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih	%	94.25	94.25	80.16	85.05	▼	Dinas PU PR
		Prosentase layanan Air Limbah	%	96.25	100	100	100	●	Dinas PU PR
14)	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	persentase gedung kantor dan non kantor yang terbangun	%	91.80	100	98.34	98.34	●	Dinas PU PR
15)	Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0	0.14	0.14	100	●	Dinas PU PR
<b>4. Urusan Sosial</b>									

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1) Pemberdayaan fakir Miskin. Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	99	99	90.32	91.23	●	DissosPPPAKB
	2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar. dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	30	30	31	103.33	●	DissosPPPAKB
	3) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase kehadiran pengunjung makam yang bersejarah	%	100	100	100	100	●	DissosPPPAKB
		Persentase difabel. trauma. dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	28	28	28	100	●	DissosPPPAKB
	4) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	100	100	●	DissosPPPAKB
		Prosentase Organisasi /lembaga yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	●	DissosPPPAKB
5) Peningkatan Keagamaan	Prosentasi Kehadiran Masyarakat	%	90	90	3.12	37.92	▼	Bag. Kesra Setda	
6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	2	2	2	100	●	BPBD	
	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang	225	225	225	100	●	BPBD	
	Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	15	15	15	93.3	●	BPBD	
	Sekolah Sungai	Komunitas	3	3	3	100	●	BPBD	
7) Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	●	BPBD	
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	●	BPBD	

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Persentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	%	100	100	100	100	●	BPBD
	8) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	%	0	100	100	100	●	BPBD
	9) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Kawasan Bencana	%	100	100	100	100	●	BPBD
	<b>5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>								
	1) Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/ sosial	Prosentase Rumah Layak Huni	%	98.76	98.76	98.57	99.80	●	Dinas Perwaskim
	2) Pengembangan Perumahan	Jumlah pengembangan PSU (perumahan)	unit/blok	10	10	1	10	▼	Dinas Perwaskim
	<b>6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>								
	1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	98	98	73	74.48	▼	Kesbangpol
		Prosentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100	100	●	Kesbangpol
	2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	prosentase keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara	%	49	49	39	79.59	▼	Satpol PP
		Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba	%	4	4	2	50	▼	Kesbangpol
		Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana	%	100	100	100	100	●	Kesbangpol
	3) Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Anggota korsik yang terlatih	%	100	100	50	50	▼	Satpol PP
		Prosentase pendataan dan pemetaan masalah ketahanan seni budaya, agama, ekonomi, dan kemasyarakatan	%	0	100	Na	Na	Na	Kesbangpol
	4) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	98	98	98	100	●	Satpol PP
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%		0	100	100	●	Satpol PP

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	5)	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	92	92	60.9	66.19	▼	Satpol PP
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman. Keindahan)	%		0	92	100	●	Satpol PP
	6)	Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih	%	12	12	00	25	▼	Satpol PP
	7)	Penanganan Darurat Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	98	98	63	64	▼	
	8)	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase tokoh agama . tokoh masyarakat. tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan	%	10	10	85	100	●	Kesbangpol
	9)	Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	%	6	6	13	216.67	●	Kesbangpol
		Prosentase ormas aktif yang terbina	%	85	85	85	100	●	Kesbangpol	
<b>B.</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>									
	<b>1.</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>								
	1)	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	60	60	50	83.33	▼	Dinas Perinaker
	2)	Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25.40	25.40	21.11	83.11	▼	Dinas Perinaker
	3)	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	80.50	80.50	55.56	69.02	▼	Dinas Perinaker
			Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	‰	6	6	11.98	200	●	Dinas Perinaker
	<b>2.</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
	1)	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	%	70	70	70	100	●	DissosPPPAKB

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	rasio	4.80	4.80	5.68	118.33	▼	DissosPPPAKB
	Rasio perempuan korban kekerasan	rasio	1.35	1.35	3.52	260.74	▼	DissosPPPAKB
3) Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	%	100	100	100	100	●	DissosPPPAKB
<b>3. Urusan Pangan</b>								
1) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)	93	93	84.8	91	●	DPKPP
2) Peningkatan ketahanan pangan	Alokasi pupuk bersubsidi	Ton	88.035	88.035	39.352.21	64.13	▼	DPKPP
	Penerimaan pendapatan DBHCHT	Rupiah	14.964.426.000	14.964.426.000	10.360.189.887	92.02	●	DPKPP
<b>4. Urusan Lingkungan Hidup</b>								
1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	%	83	83	83	100	●	DLHK
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. AMDAL. UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	88	88	88	100	●	DLHK
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	●	DLHK
	Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	%	100	100	100	100	●	DLHK
2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	36	36	36	100	●	DLHK
	Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	%	80	80	80	100	●	DLHK

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	3)	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	70	70	▼	DLHK
	4)	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	%	100	100	50	50	▼	DLHK
	5)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	%	17.21	17.21	50.66	294.36	●	DPU
		Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	ha	0.125	0.125	0.125	100	●	DLHK
	<b>5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									
	1)	Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0.91	0.91	0.98	107.69	●	Dinas Dukcapil
		Cakupan penerbitan KTP	%	90.58	90.58	98.05	108.25	●	Dinas Dukcapil	
		Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun	%	92.18	92.18	91.87	99.66	●	Dinas Dukcapil	
		Keluarga mempunyai KK	%	98	98	97.68	99.67	●	Dinas Dukcapil	
		Penduduk berakte kelahiran	%	95.8	95.8	91.87	95.90	●	Dinas Dukcapil	
		Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	%	265.850	265.850	253.821	95.48	●	Dinas Dukcapil	
		Penerbitan Akte kematian	akta kematian		2.950	2.950	2.922	99.05	●	Dinas Dukcapil
	<b>6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>									
	1)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	89	89	75	84.27	▼	Dinas Permasdes
	2)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	%	87	87	88	101.15	●	Dinas Permasdes

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	3)	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	82	82	64	78.05	▼	Dinas Permasdes
	4)	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	%	64	64	91	142.19	●	Dinas Permasdes
	5)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat		67	67	1.337	1.995.52	●	Dinas Permasdes
	6)	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	%	78	78	78	100	●	Dinas Permasdes
	<b>7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
	1)	Keluarga berencana	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	65.03	65.03	70.9	109.03	●	DissosPPPAKB
			Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	4.98	4.98	9.7	194.78	●	DissosPPPAKB
			Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	%	8.94	8.94	16.95	189.60	●	DissosPPPAKB
	2)	Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun ( <i>age specific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old</i> )	Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun	33	33	0.42	1.27	▼	DissosPPPAKB
	3)	Peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera	%	28	28	36.21	129.32	●	DissosPPPAKB
	<b>8. Urusan Perhubungan</b>									
	1)	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	%	40.03	59.53	61.06	102.57	●	Dinas Perhubungan



Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	87	87	98.42	113.13	●	Dinas Perhubungan
	3) Peningkatan pelayanan angkutan	Indeks kepuasan layanan angkutan umum	indeks	74.82	79.827	79.49	99.58	●	Dinas Perhubungan
	4) Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87.86	87.85	78.06	88.86	▼	Dinas Perhubungan
<b>9.</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>								
	1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	%	55.08	55.08	56.5	102.57	●	Dinas Kominfo
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	84.60	84.60	75	88.65	▼	Dinas Kominfo
		Persentase pelayanan publik dan nonpublik berbasis e-government	%	80	80	69.5	86.87	▼	Dinas Kominfo
	2) Pengembangan Data/Informasi	Persentase dokumen profil daerah yang tersedia	%	83	83	Na	Na	Na	Dinas Kominfo
	3) Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase event kabupaten terpublikasi	%	92	92	66	71.74	▼	Bag. Humas Setda
		Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor	65	65	95	146.15	●	Bag. Humas Setda
		Persentase Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Massa	%	100	100	70	70	▼	Bag. Humas Setda
		Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	%	100	100	70	70	▼	Bag. Humas Setda
		Persentase Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial	%%	100	100	72	72	▼	Bag. Humas Setda
		Persentase publikasi Kepala Daerah melalui penyuluhan dan media papan ruang	%	100	100	65	65	▼	Bag. Humas Setda
		Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui radio	%	90	90	67	74.44	▼	Bag. Humas Setda
		Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya	%	95	95	35	36.84	▼	Bag. Humas Setda



Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4) Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih	%	96.67	96.67	5	5.17	▼	Bag. Humas Setda
	1) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0.40842	0.40842	0.078	19.09	▼	Dinas Dagkop UKM
	2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase promosi produk UKM	%	60	60	2.72	4.53	▼	Dinas Dagkop UKM
	3) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	80.59	80.59	80.3	99.64	●	Dinas Dagkop UKM
11. Urusan Penanaman Modal		Persentase pertumbuhan koperasi	%	0.037	0.037	0.45	121.1	●	Dinas Dagkop UKM
	1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) :							
		PMDN (dlm ribu Rp)	Rp	97.025.624	97.025.624	698.896.464	720.32	●	DPMPTSP
		PMA ( dlm ribu US\$)	US\$	12.437.536	12.437.536	4.721	37.95	▼	DPMPTSP
		Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA) :							
		PMDN	investor	16	16	4.743	29.664	●	DPMPTSP
		PMA	investor	5	5	5	100	●	DPMPTSP
	2) Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja :							
	PMDN	org	460	438	3	1	▼	DPMPTSP	
	PMA	org	294	294	12	4	▼	DPMPTSP	

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi :								
	PMDN	%	2.50	2.50	-64	-68	▼	DPMPTSP	
	PMA	%		2.55	-59	-59	▼	DPMPTSP	
	Lama Proses Perizinan	hari		10	10	100	●	DPMPTSP	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	80	80	81.86	100	●	DPMPTSP	
<b>12</b>	<b>Usuran Kepemudaan dan Olahraga</b>								
	1) Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	69	69	76	110	●	Dinas Parbudpora
	2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	20	20	42	100	●	Dinas Parbudpora
	3) Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Wirausaha Muda yang Dibina (Keluarga Miskin)	%	25	25	Na	Na	Na	Dinas Parbudpora
	4) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba	%	10	10	Na	Na	Na	Dinas Parbudpora
	5) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi	%	83	83	Na	Na	Na	Dinas Parbudpora
	6) Pembinaan pemuda dan olah raga	Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan hari besar nasional	%	20	20	Na	Na	Na	Dinas Parbudpora
<b>13</b>	<b>Usuran Statistik</b>								
	1) Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen data statistik yang tersedia	%	100	100	100	100	●	Dinas Kominfo
<b>14</b>	<b>Usuran Persandian</b>								
	1) Peningkatan persandian daerah	Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	%	25	25	55	220	●	Dinas Kominfo
<b>15</b>	<b>Usuran Kebudayaan</b>								
	1) Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	6	2	33.3	▼	Dinas Parbudpora

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2) Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda. Situs. Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	12	12	5	42	▼	Dinas Parbudpora
	3) Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/ Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	%	30	5	4	80	▼	Dinas Parbudpora
	<b>16. Urusan Perpustakaan</b>								
	1) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat	%	10	5	-64.8	-12.96	▼	Dinas Arpus
	<b>17. Urusan Arsip</b>								
	1) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip	%	5	5	8.72	174.4	●	Dinas Arpus
	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase peningkatan SKPD dan Desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	%	10	10	10	100	●	Dinas Arpus
	3) Perbaiki sistem administrasi kearsipan	Prosentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan	%	10	10	10	100	●	Dinas Arpus
<b>C.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>								
	<b>1. Urusan Kelautan dan Perikanan</b>								
	1) Pengembangan Budi daya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	Ton	31.467	31.467	16.836.69	88	▼	DPKPP
	Pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton	537	537	97.84	34	▼	
	3) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi Ikan	(kg/kapita/tahun)	20.41	31.467	16.836.69	53.50	●	DPKPP
	<b>2. Urusan Pariwisata</b>								
	1) Pengembangan Kemitraan	Persentasi kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	%	12	12	12	100	●	Dinas Parbudpora
	2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentasi kenaikan kunjungan wisatawan	%	10	10	-65.05	-6.50	▼	Dinas Parbudpora

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan	hari	1	1	1	100	●	Dinas Parbudpora
	3) Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	%	28	28	28	100	●	Dinas Parbudpora
	<b>3. Urusan Pertanian</b>								
	1) Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani kelas utama	%	6	6	32.5	541.66	●	DPKPP
	2) Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktifitas Padi	(kwt/ha)	64.01	64.01	63.33	98.94	▼	DPKPP
		Produktifitas Jagung			76.67	89.38	105	●	DPKPP
		Produktifitas Kedelai			12.80	19.12	86	▼	DPKPP
	3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Mengikuti agro ekspo	(kali)	2	2	Na	Na	Na	DPKPP
	4) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	fasilitasi operasional Penyuluh	(orang)	209	209	209	100	●	DPKPP
	5) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tembakau Rajang	(ton)	1.092	1.092	1.558.79	142.75	●	DPKPP
		Produksi Tembakau Asepan	(ton)	946	946	2.308.72	244.06	●	DPKPP
	6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Populasi Sapi	(ekor)	112.973	112.973	111.119	98.36	●	DPKPP
	7) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi	(ton)	3.001	3.001	1.782.72	59.40	▼	DPKPP
	8) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pembinaan usaha peternakan rakyat	(pengusaha)	235	235	193	82.13	▼	DPKPP
	9) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Memfaatkan potensi sumber daya hutan		Kewenangan provinsi					
	10) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Merehabilitasi hutan dan lahan		kewenangan provinsi					

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4. Urusan Perdagangan</b>								
1) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal	%	0.584	0.58	0.29	50	▼	Dinas Dagkop UKM
	Persentase cakupan pelayanan UTP	%	50	50	0	0	▼	Dinas Dagkop UKM
	Inflasi tahunan	%	3.5 % (±1)	3.5 % (±1)	3.62	103.43	●	Dinas Dagkop UKM
	Persentase konsumen yang terlindungi	%	100	100	100	100	●	Dinas Dagkop UKM
2) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi	%	4.082	4.08	Na	Na	Na	Dinas Dagkop UKM
3) Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	69.56	69.56	36.28	52.16	▼	Dinas Dagkop UKM
<b>5. Urusan Perindustrian</b>								
1) Pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	7	7	6.79	96.57	●	Dinas Perinaker
	Debitur penerima KUR	Orang	30.900	30.900	Na	Na	Na	Bagian Perekonomian
2) Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	unit usaha		4	Na	Na	Na	Dinas Perinaker
	Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK	pengrajin		12	Na	Na	Na	Dinas Perinaker
	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	4	4	4.75	118.75	●	Dinas Perinaker
	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	12	12	7.39	61.58	▼	Dinas Perinaker
3) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Laju pengembangan sentra industri	%	0.10	0.10	Na	Na	Na	Dinas Perinaker
<b>6. Urusan Transmigrasi</b>								

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	1) Pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	35	35	Na	Na	Na	Dinas Perinaker	
	2) Transmigrasi lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	%	43	43	Na	Na	Na	Dinas Perinaker	
<b>D.</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
	<b>1. Urusan Perencanaan</b>									
	1) Perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	●	Bappeda	
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	●	Bappeda	
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	●	Bappeda	
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	93.51	93.51	●	Bappeda	
		Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	97.58	97.58	●	Bappeda	
		2) Perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi	%	75	75	775	100	●	Bappeda
			Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi	%	Ada	Ada	Ada Ada	Ada	●	Bappeda
	Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah		%	27.92	27.92	15	54	▼	Bappeda	
	3) Perencanaan sosial dan budaya	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sinosal Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	%	92	92	92	100	●	Bappeda	
		Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	100	100	100	●	Bappeda	
	4) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●	Bappeda	

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	5) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	%	100	100	100	100	●	Bappeda
	<b>2. Urusan Keuangan</b>								
	1) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	7.44	7.44	-1	-0.07%	▼	BPKD
		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	bulan	2	2	2	100	●	BPKD
		Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	bulan	5	5	5	100	●	BPKD
		Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	●	BPKD
		Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	53.5	53.3	56.1	105.25	●	BPKD
		Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	%	84	84	79	94.05	●	
		Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0.72	0	0.54	0.54	▼	BPKD
		Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	1.75	1.58	1.48	93.68	●	BPKD
	<b>3. Urusan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan</b>								
	1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	%	100	100	42.93	42.93	▼	BKPPD
	2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase layanan sumber daya aparatur	%	95	95	104.47	109.96	●	BKPPD
		Prosentase Pembinaan Disiplin ASN	%	100	100	100	100	●	BKPPD



Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase informasi kepegawaian yang akurat	%	100	100	98.00	98.00	●	BKPPD
	Prosentase Pengembangan Aparatur	%	100	100	77.74	77.74	▼	BKPPD
<b>4. Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>								
1) Penelitian dan pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	peserta	30	30	5	16.67	▼	Bappeda
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	jenis inovasi	19	19	34	178.95	●	Bappeda
<b>5. Urusan Pengawasan</b>								
1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level maturitas SPIP	indek 1-5	3	3	3	100	●	Inspektorat
2) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	peningkatan level kapabilitas APIP	indek 1-5	3	3	3	100	●	Inspektorat
3) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	persentase pemeriksaan program tahunan	%	100	100	100	100	●	Inspektorat
<b>6. Fungsi Lainnya</b>								
1) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	%	100	100	100	100	●	Setwan
	Persentase Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM maupun RKPD	%	100	100	100	100	●	Setwan
	Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	%	100	100	100	100	●	Setwan

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase produk Perda terbentuk	%	100	100	100	100	●	Setwan
		Persentase produk pengawasan DPRD	%	100	100	100	100	●	Setwan
		Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	%	100	100	100	100	●	Setwan
	2) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar	%	92	92	96.08	104.44	●	Bag. Organisasi Setda
	3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase jumlah kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)	%	87	87	96.07	110.43	●	Bag. Organisasi Setda
	4) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	●	Bagian Pemerintahan Setda
		Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	74	74	▼	Bag. Humas Setda
		Persentase Pendampingan Keprotokolan Kepala Daerah	%	100	100	74	74	▼	Bag. Humas Setda
	5) Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	%	15	15	15.7	104.6	●	Bag. Pemerintahan Setda
	6) Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kejelasan batas antar kabupaten	Pilar	50	50	32	64	▼	Bag. Pemerintahan Setda
		Jumlah obyek rupa bumi yang terbakar	obyek	50	50	14	28	▼	Bag. Pemerintahan Setda
	7) Peningkatan Koordinasi. Pembinaan. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	%	100	100	100	100	●	Bag. Pemerintahan Setda
	8) Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai	80	80	57.55	71.94	▼	Bag. Organisasi Setda
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	81.5	80	81.88	102.35	●	Bag. Organisasi Setda

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	9) Penataan peraturan perundang undangan	Persentase raperda yang terselesaikan	%	20	20	4	20	▼	Bag. Hukum Setda
		Persentase perda yang terselesaikan	%	20	20	3	15	▼	Bag. Hukum Setda
		Persentase perkada yang terselesaikan	%	50	50	42	84	▼	Bag. Hukum Setda
		Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	%	90	90	62	68.88	▼	Bag. Hukum Setda
	10) Penyuluhan pelayanan bantuan hukum dan HAM	Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM	%	4	4	6	150	●	Bag. Hukum Setda
	11) Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	%	68	68	67	98.53	●	Kecamatan
		Persentase pengumpulan LPJ dana Desa yang tepat waktu	%	70	70	66	94.29	●	Kecamatan
		Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu	%	90	90	67	74.44	▼	Kecamatan
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi di dalam APBD	%	0.9	0.9	0.5	55.5	▼	Kecamatan
	12) Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	%	70	80	70	87.5	▼	Kecamatan
		Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	%	80	80	79	98.75	●	Kecamatan
		Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/LPMK, PKK, karang taruna dan kelompok tani) di desa/kelurahan yang aktif	%	80	80	81	101.25	●	Kecamatan
	13) Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	80	80	70	87.5	▼	Kecamatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan /Program		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Capaian Tahun 2020	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	14) Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan kelurahan	Persentase usulan kegiatan musrenbang kelurahan yang terealisasi di dalam APBD	%	80	80	64	80	▼	Kecamatan
	15) koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi kemasyarakatan kelurahan	Persentase kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	90	90	67	74.44	▼	Kelurahan
	16) koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan kelurahan	Persentase kelembagaan pemerintahan kelurahan yang aktif	%	90	90	48	53.33	▼	Kelurahan
	17) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	%	100	100	100	100	●	Bag. Pembangunan Setda
		Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (capaian)	%	100	98	97	98.97	●	Bag. Pembangunan Setda
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu	%	100	100	100	100	●	Bag. Pembangunan Setda
	18) Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa	Persentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100	100	100	●	Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
		Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	%	100	100	100	100	●	Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	19) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Bahan pokok		9	9	100	●	Bag. Umum Setda
		Kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bulan	12	12	12	100	●	Bag. Umum Setda
	20) Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	%	74	74	89	225.68	●	Bag. Umum Setda

Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020

**Keterangan :**



- : Tercapai ( Capaian  $\geq$  90 % dari Target Tahun 2020)
- ▼ : Tidak Tercapai ( Capaian  $<$  90 % dari target 2020)

Berdasarkan Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2020, dapat diuraikan bahwa Jumlah Indikator Kinerja Program sebanyak 314 yang terdiri dari 187 indikator berstatus tercapai, 101 Indikator berstatus tidak tercapai, 3 Indikator menjadi Kewenangan Provinsi dan 23 Indikator berstatus belum tersedia data (Na).

### **2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### **2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2.156.

Tabel 2.156.  
Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan angka kemiskinan</li> <li>• Peningkatan angka pengangguran</li> <li>• Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.</li> <li>• Daya beli masyarakat menurun</li> <li>• pendapatan masyarakat menurun</li> <li>• kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri, dan UMKM menurun</li> </ul>	Penurunan sektor ekonomi, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19
2	Kualitas pendidikan kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak</li> <li>• Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang pendidikan</li> <li>• Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri, dan isu regrouping</li> <li>• SD Negeri tidak mempunyai tenaga administrasi untuk mengelola administrasi Laporan Dana BOS dan Aset, sehingga guru terbebani dengan tugas administrasi pelaporan BOS dan Aset</li> </ul>	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, serta tenaga pendidik
3	Kualitas kesehatan kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi.</li> <li>• Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya: demam berdarah dengue, malaria, filiarisis</li> <li>• Untuk jenis penyakit menular/ infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: penyakit menular tuberculosis paru,</li> </ul>	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan penyehatan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>kusta penderita PB, diare, infeksi saluran pernafasan atas, HIV, kejadian luar biasa KIPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk</li> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.</li> <li>• Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah. diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi.</li> <li>• Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.</li> </ul>	
4	Pelayanan keluarga berencana belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka drop out KB; dan</li> <li>• Banyak Pasangan usia subur</li> </ul>	Kurangnya kesadaran PUS untuk ber-KB
5	Kesejahteraan sosial belum tercapai untuk seluruh penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;</li> <li>• Meningkatnya kasus pengguna Narkoba. Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS; dan</li> <li>• Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;</li> <li>• Belum adanya Rencana Aksi Daerah untuk mengatasi isu daerah yang berkembang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat</li> </ul>
6	Partisipasi pemuda dan kegiatan olahraga masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program kepemudaan Pemerintah kurang menyentuh kebutuhan Usia produktif</li> <li>• Jiwa kewirausahaan pemuda masih rendah</li> <li>• Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi dan peran pemuda masih kurang</li> <li>• Budaya olahraga masyarakat masih kurang</li> </ul>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
7	Pelestarian seni budaya belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan. nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila belum dirawat dan dipelihara secara aktif akan mengakibatkan culture lag (kemandegan budaya), dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa; dan</li> <li>• Kurangnya pembinaan yang kontinu bagi pengelolaan kekayaan budaya, nilai budaya, dan keberagaman budaya</li> <li>• Terbatasnya pengetahuan tentang sejarah, seni budaya dan tradisi sehingga penerapan nilai luhur budaya Jawa semakin berkurang</li> <li>• Belum terwadahnya para pelaku/ pekerja seni dalam berekspresi mementaskan hasil karyanya</li> <li>• Belum ada icon seni budaya asli Kabupaten Klaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya jejaring seni dan budaya antara pemerintah-swasta-masyarakat</li> <li>• Kegiatan seni budaya belum terorganisir dengan baik</li> </ul>
8	Upaya pelestarian cagar budaya masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran cagar budaya</li> <li>• Banyak benda yang diduga cagar budaya yang belum diinventarisir dan dilestarikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya masih rendah</li> <li>• Belum ada tim ahli cagar budaya</li> </ul>
9	Belum optimalnya pengarsipan dan pelayanan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung</li> <li>• Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan</li> </ul>	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan perpustakaan
10	Kesenjangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kurang meratanya kualitas infrastruktur</li> <li>• sarana pelayanan umum kurang merata</li> <li>• pusat ekonomi tidak merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang konektivitas antar wilayah</li> <li>• pemusatan kegiatan pembangunan hanya diperkotaan</li> <li>• Peningkatan jumlah penduduk</li> </ul>
11	Penurunan kualitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan SDA berlebihan</li> <li>• alihfungsi lahan untuk kegiatan pembangunan</li> <li>• rawan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kegiatan masyarakat</li> </ul>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan</li> <li>• Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDA terbatas. termasuk lahan</li> <li>• perubahan iklim</li> </ul>
12	Kebencanaan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerawanan terhadap bencana alam berupa rawan bencana letusan gunung api, tanah longsor, banjir dan angin topan di Kabupaten Klaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya perencanaan berbasis migasi bencana</li> </ul>
13	Ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan.</li> <li>• Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan.</li> <li>• Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature).</li> <li>• Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property right) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten.</li> <li>• Belum berkembangnya diversifikasi pangan.</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.</li> <li>• Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.</li> <li>• Belum optimalnya sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani. dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengelolaan pertanian. perlu inovasi dalam pengelolaan pertanian</li> <li>• kebutuhan pangan semakin meningkat akibat pertumbuhan jumlah penduduk. namun lahan pertanian semakin berkurang</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan</li> <li>• tingkat konsumsi pangan belum beragam</li> <li>• produktivitas perikanan menurun</li> </ul>	
14	Kontribusi sektor pariwisata belum optimal	Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik	Sektor pariwisata belum dikelola secara optimal.
15	Keterbatasan sektor perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;</li> <li>• Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;</li> <li>• Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;</li> <li>• Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;</li> <li>• Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan</li> <li>• Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan pedagang untuk menjalankan aktivitasnya masih terbatas</li> <li>• Sarana prasarana perdagangan kurang baik dan merata</li> <li>• Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang</li> </ul>
16	Penanaman modal menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya informasi terkait potensi investasi;</li> <li>• Harga tanah peruntukan industri yang tinggi</li> </ul>	Iklim kondusif untuk berinvestasi
17	Rendahnya rasio daya serap tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. sehingga jumlah pengangguran bertambah;</li> <li>• Peluang kerja relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan kualifikasi</li> <li>• Peluang kerja terbatas</li> </ul>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hambatan budaya (feodalisme). masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematkan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;</li> <li>• Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;</li> <li>• Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru. tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;</li> <li>• Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;</li> <li>• Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;</li> <li>• Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;</li> <li>• Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;</li> <li>• Belum tersedianya database ketenagakerjaan.</li> </ul>	
18	Kurangnya penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan.</li> <li>• Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.</li> <li>• Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah</li> <li>• Kebutuhan infrastruktur semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk</li> <li>• Rendahnya kualitas pembangunan dan</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.</li> <li>• Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.</li> <li>• Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.</li> </ul>	<p>pengelolaan bangunan gedung</p>
19	<p>Pelayanan perhubungan kurang optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal</li> <li>• Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C)</li> <li>• Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya</li> <li>• Masih minimnya jumlah Traffic Light ATCS yang telah terkoneksi dengan CCRoom</li> <li>• Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal</li> <li>• Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana prasarana perlengkapan perhubungan belum tersedia sesuai kebutuhan</li> <li>• Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan</li> </ul>
20	<p>Perumahan dan kawasan permukiman yang kurang layak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya rumah tidak layak huni dan merata di setiap kecamatan.</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.</li> <li>• Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.</li> <li>• Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum).</li> <li>• Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan permukiman dan rumah yang kurang layak huni, dan belum didukung sarana prasarana</li> <li>• Peningkatan kebutuhan rumah</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
21	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. fasilitasi kelompok rentan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;</li> <li>• Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</li> <li>• Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai</li> <li>• kaum disabilitas belum mendapatkan pelayanan yang layak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</li> <li>• Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak masih rendah</li> <li>• akses disabilitas belum terakomodir</li> </ul>
22	Transmigrasi menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup:</li> <li>• Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.</li> <li>• Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan penjangingan sampai penempatan transmigrasi; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi</li> <li>• Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas</li> </ul>
23	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kesadaran masyarakat dalam pembangunan masih rendah</li> </ul>
24	Pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa</li> <li>• Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan aset desa</li> <li>• Masih rendahnya kualitas perangkat desa</li> <li>• Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi dan kapasitas sumber daya lokal</li> <li>• Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>• Potensi kawasan perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal</li> </ul>	
25	Optimalisasi hukum dan tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan.</li> <li>• Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor.</li> <li>• Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola</li> <li>• Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.</li> <li>• Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.</li> <li>• Pembangunan berbasis isu. sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: yuridis, sosial dan filosofinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan akuntabilitas kinerja</li> <li>• Penyusunan kebijakan dan regulasi</li> <li>• Supremasi dan penegakan hukum</li> </ul>
26	Ketersediaan ASN yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan</li> <li>• Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.</li> <li>• Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD</li> </ul>	Ketersediaan ASN yang kompeten. inovatif
27	Integrasi perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencana; dan</li> <li>• Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi kinerja.</li> <li>• penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan data dan informasi yang jelas dan mudah diakses. terintegrasi</li> <li>• Ketersediaan ASN yang kompeten. inovatif</li> </ul>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat</li> </ul>	
28	Pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah. termasuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.</li> <li>Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan</li> <li>Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah.</li> <li>keterbatasan penyediaan prasarana telekomunikasi dan informatika</li> </ul>
29	Kondusivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat</li> <li>wawasan kebangsaan</li> <li>kerawanan isu sara, kerukunan beragama</li> <li>kemudahan penyebaran berita atau informasi yang belum tentu benar (tingginya berita hoax)</li> </ul>	Penegakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Sumber: Tim Penyusun, 2020



Permasalahan-permasalahan di atas merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten berdasarkan urusan-urusan daerah yang relevan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi isu-isu strategis. Analisis isu-isu strategis ini yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan.

Adapun isu-isu strategis daerah dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **1. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup**

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, pemberdayaan pemuda. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup adalah pengurangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang semakin menambah jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Oleh sebab itu pada tahun awal RPJMD akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama untuk pemulihan kasus penyakit menular maupun tidak menular akibat pandemi Covid-19. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk peningkatan sarana/fasilitas kesehatan. penyediaan obat dan sarana pendukung medis, ketersediaan tenaga medis, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, hingga pengelolaan terhadap limbah medis yang semakin meningkat akibat pandemi Covid-19.

Pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatif siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan pendidikan Harapannya akan

muncul sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif. sehingga memiliki jiwa kemandirian yang tinggi.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

## **2. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah**

Infrastruktur dan konektivitas wilayah adalah pengelompokan isu permasalahan yang berasal dari permasalahan terkait pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.

Infrastruktur antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan pelayanan air minum aman dan berkelanjutan, sanitasi sehat, pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan limbah industri dan limbah B3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan peningkatan ketersediaan dan kualitas air minum, sanitasi, sampah dan limbah akan meningkatkan kualitas kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan energi baru terbarukan juga menjadi tujuan penyediaan jaringan energi.

Permasalahan infrastruktur dan konektivitas juga terkait dengan penyediaan sarana hunian dan pendukungnya. bagaimana menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas permukiman. Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah yang sudah disusun juga menjadi salah satu permasalahan terkait dengan perwujudan infrastruktur dan rencana pola ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan.

## **3. Kondusivitas Wilayah**

Permasalahan terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah masih tingginya tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran perda. Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan, disamping perlu adanya personil untuk pelaksanaan penertiban, pengawasan dan penegakan perda.

Kondusivitas wilayah juga terkait dengan permasalahan nasionalisme kebangsaan, toleransi beragama yang juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor

perwujudan kondusivitas wilayah, sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

#### **4. Tata Kelola Pemerintahan**

Isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja, penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi.

#### **5. Ketahanan Pangan**

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alihfungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alihfungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Dari sisi konsumsi pangan penduduk perlu ada diversifikasi pangan supaya masyarakat tidak hanya bergantung pada satu bahan pokok.

#### **6. Daya Saing Ekonomi**

Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Penurunan sektor ekonomi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian supaya tidak mengalami penurunan.

Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*), terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten.

#### **7. Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi dan sumber dayanya secara tidak langsung akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam melestarikan kualitas lingkungan, berbagai upaya

pengendalian pencemaran lingkungan hidup perlu dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan dampak buruk di lingkungan sekitar bisa diantisipasi terlebih dahulu, sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali.

Selain isu lingkungan yang diuraikan di atas, isu tata ruang di Kabupaten Klaten lebih mengutamakan konsep tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah utara, tengah dan selatan. Diharapkan dengan adanya rencana struktur ruang kabupaten dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan akan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Sedangkan dengan adanya rencana pola ruang akan dapat mengarahkan lokasi pembangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

#### **8. Mitigasi Bencana**

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Klaten ditetapkan untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor, dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Klaten merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kejadian bencana tanah longsor diakibatkan karena kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan maupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Selain itu, adanya aktivitas yang tidak terkendali seperti eksploitasi alam. Sedangkan menurut Permen ESDM No 11 Tahun 2016, Kawasan rawan bencana gunungapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunungapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya rawan bencana tersebut perlu upaya mitigasi bencana yang efektif untuk dapat mengurangi resiko dampaknya.

#### **9. Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta**

Sesuai arahan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Kabupaten Klaten termasuk dalam



pengembangan jalan bebas hambatan Yogyakarta – Solo (II/6) yang melalui wilayah Kecamatan Polanharjo, Karanganom, Ngawen, Kebonarum, dan Prambanan.

Jalan tol Solo-Yogyakarta membentang dari wilayah Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman, DIY di sebelah barat hingga ke Kecamatan Banyudono Boyolali di sebelah timur. Di bagian timur, jalan tol akan tersambung di Simpang Susun Colomadu dan akan tersambung ke Jalan Tol Semarang–Solo dan Jalan Tol Solo-Ngawi. Sedangkan di barat, jalan tol akan terhubung ke Bandara Internasional Yogyakarta yang menjadi bagian Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap. Tol ini dibangun melayang (elevated) di sepanjang Ring Road Utara Yogyakarta, kemudian berlanjut sepanjang Selokan Mataram hingga sampai ke simpang susun di daerah Maguwoharjo. Dari simpang susun Purwomartani, jalan ini berbelok ke utara lalu timur laut menuju wilayah Kabupaten Klaten di sekitar perbatasan Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Manisrenggo. Dari sana jalan tol melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Ceper, Kecamatan Polanharjo dan Kecamatan Delanggu. Kemudian jalan tol melewati wilayah Kabupaten Boyolali di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit.

Exit tol yang melalui Kabupaten Klaten berada di Desa Kuncen Kecamatan Ceper; Desa Ngawen. Kecamatan Ngawen; Desa Borangan. Kecamatan Manisrenggo; dan Desa Somopuro. Kecamatan Jogonalan. Dengan adanya pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta akan berdampak pada perubahan pola ruang pada lokasi yang akan dijadikan jalur jalan tol dan disekitar exit tol. Dimana sebagian besar lahan yang digunakan sebagai jalur jalan tol berupa lahan pertanian. Total lahan terdampak jalan tol di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang dengan luasan 377.5 hektare. Inlet outlet jalan tol di Kabupaten Klaten melalui:

- Desa Kuncen. Kecamatan Ceper.
- Desa Ngawen. Kecamatan Ngawen.
- Desa Borangan. Kecamatan Manisrenggo.
- Desa Somopuro. Kecamatan Jogonalan.



Sumber: Revisi RTRW Kab Klaten, 2020

Gambar 2.13.  
Rencana Jalan Tol Solo-Yogya

## 10. Pembangunan Kawasan Strategis

Pembangunan kawasan strategis di Kabupaten Klaten antara lain adalah pembangunan KSPN Prambanan dan sekitarnya. KSN Merapi dan sekitarnya. Geo Heritage Bayat dan Rawa Jombor. agropolitan dan minapolitan.

Kawasan Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dunia oleh UNESCO yang termuat dalam dokumen Nomination File World Heritage List No.C-642 tahun 1991. Melihat urgensi kawasan tersebut. PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga telah menetapkan Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya. Dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Klaten menetapkan Kecamatan Prambanan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional. Dengan penetapan Kecamatan Prambanan menjadi PKL tentunya dimaksudkan agar Kecamatan Prambanan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten yang melayani aktivitas skala regional terutama wilayah kecamatan yang ada di sekitarnya. Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Prambanan sebenarnya sudah sesuai dengan rumusan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Saat ini Kecamatan Prambanan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten. Berbagai fasilitas

dengan skala pelayanan regional juga telah berkembang. Selain itu, banyaknya investasi yang akan masuk di Kecamatan Prambanan juga akan dapat memicu pertumbuhan kawasan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRW.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan setiap urusan merupakan kondisi yang belum tercapai dari suatu kondisi berdasarkan indikator kinerja pembangunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **2.3.1.1. Permasalahan Pembangunan Pada Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/ Impact) Pemerintah Daerah**

Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat terkait dengan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran yang secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan permasalahan pada aspek daya saing daerah terkait dengan penurunan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dan menurunnya investasi daerah.





Tabel 2.157.  
Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan  
Masyarakat dan Daya Saing Daerah

Aspek	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan perekonomian akibat pandemi covid-19</li> <li>2. Perlu peningkatan laju pertumbuhan PDB per kapita.</li> <li>3. Perlunya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7-8%.</li> <li>4. Rasio penduduk yang bekerja menurun 0,05</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas sumberdaya manusia</li> <li>• Terbukanya kesempatan kerja</li> <li>• Tingkat pendapatan masyarakat</li> </ul>
Daya Saing Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu peningkatan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi unggulan daerah.</li> <li>2. Penurunan nilai investasi 5%</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi unggulan daerah yang dapat menciptakan branding kabupaten</li> <li>• iklim kondusif untuk berinvestasi</li> </ul>

Sumber: Tim Penyusun, 2020

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesempatan kerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Peningkatan daya saing ekonomi daerah Kabupaten Klaten dapat dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi unggulan untuk dapat meningkatkan pertumbuhannya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan pendapatan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya kualitas sumber daya manusia yang baik dan cerdas dapat tercapai.

### 2.3.1.2. Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Pelayanan Umum Wajib Dasar

#### 1. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak;
- b. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang pendidikan;



- c. Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri, dan belum tuntasnya *regrouping* Sekolah Dasar; dan
- d. SD Negeri tidak mempunyai tenaga administrasi untuk mengelola administrasi Laporan Dana BOS dan Aset, sehingga guru terbebani dengan tugas administrasi pelaporan BOS dan Aset.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
- b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas guru;
- c. Pengisian Kepala Sekolah dengan Diklat penguatan bagi calon Kepala Sekolah; dan
- d. Pengusulan pengangkatan tenaga harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri.

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, dari sisi tenaga pendidik, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 dimana pelayanan pendidikan dilakukan secara daring sehingga memerlukan kesiapan tenaga pendidik dan kesiapan prasarana dan sarana telekomunikasi yang dapat diakses ke seluruh wilayah.

## **2. Kesehatan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi;
- b. Masih ditemui adanya: Angka kesakitan demam berdarah, penemuan infeksi HIV dan AIDS yang setiap tahun cenderung meningkat, adanya ancaman pandemik flu burung, penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya: demam berdarah dengue, malaria, filiarisis, serta penanganan pandemi *Covid-19*;



- c. Beberapa jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker) masih terjadi. Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: penyakit menular tuberculosis paru, kusta penderita PB, diare, infeksi saluran pernafasan atas, HIV, kejadian luar biasa KIPI;
- d. Kondisi gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi; dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan pelayanan penyakit menular maupun tidak menular. Masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut;  
Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut;



- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat karena tonase dan kelas jalan, kurangnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Belum terintegrasinya pembangunan drainase perkotaan sehingga masih sering terjadi banjir di beberapa kawasan;
- d. Masih adanya masyarakat yang kekurangan air bersih karena sulitnya sumber bersih (di Lereng Merapi), serta sumber air asin di beberapa wilayah;
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM; dan
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten, diantaranya:

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama untuk lingkungan masyarakat Lereng Merapi dan kawasan air tanah asin;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja Tim Pembina Jasa Konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat;
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum); dan
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.
- f. Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:
- g. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- h. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- j. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Masih tingginya tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran perda.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- d. Belum adanya sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita hoax sebagai komoditas politik.



Adapun faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan ketentraman ketertiban adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan;
- c. Peningkatan sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita hoax.

## **6. Sosial**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya perencanaan berbasis migasi bencana
- b. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan Kabupaten tangguh komunikasi
- c. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS
- d. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data PMKS
- e. Meningkatnya kasus pengguna Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS;
- f. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain; dan
- g. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya :

- a. Mengurangi Resiko Bencana;
- b. Meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dilaksanakan melalui strategi:
  - 1) Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah;
  - 2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan
  - 3) Peningkatan kapasitas pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- c. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
- d. Perlu adanya verifikasi dan validasi data sehingga intervensi/penanganan terhadap PMKS dapat tepat sasaran,



sinergi dengan sektor lain untuk memberikan jaminan dan perlindungan PMKS, serta kemitraan dengan pihak lain untuk ikut memberikan bantuan sosial ekonomi.

- e. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial;
- f. Penguatan Posyandu Remaja untuk mencegah penggunaan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS; dan
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

### **2.3.1.3. Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Dasar**

#### **1. Tenaga Kerja**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan tenaga kerja di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
- b. Peluang kerja belum bisa menampung kebutuhan pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;



- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
- j. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis *database* ketenagakerjaan secara *online*.





## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

## **3. Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum sinerginya antar pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
- b. Tingginya tingkat pencemaran air oleh limbah domestik

Faktor penentu keberhasilan antara lain :

- a. Peningkatan Sinergitas dan koordinais antara pelaku usaha dan pemerintah dalam pengelolaan lingkunganhidup.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat dan layanan sosial dalam pengendalian air limbah domestik yang bukan hanya menjadi kewenangan Dinas LHK melainkan juga Dinas Perwaskim dab DPU PR, sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.



#### **4. Komunikasi**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki Komunikasi antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

#### **5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait; dan
- c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

- a. Perlu peningkatan kemudahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan optimalisasi sistem pelayanan online.
- b. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- c. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.



## **6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya angka *drop out* KB; dan
- b. Banyak Pasangan Usia Subur.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya :

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

## **7. Perhubungan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang aman, nyaman dan terjangkau;
- b. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C; dan
- c. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal (marka jalan, APILL, rambu, guadril, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum);
- d. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya
- e. Masih minimnya jumlah Traffic Light ATCS yang telah terkoneksi dengan CCRoom

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan perhubungan diantaranya:

- a. Penyediaan layanan angkutan massal yang aman, nyaman dan terjangkau;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendisiplinan pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C
- c. Optimilisasi pemasangan perlengkapan jalan (marka jalan, APILL, rambu, guadril, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum);



- d. Peningkatan kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya;
- e. Peningkatan jumlah Traffic Light ATCS yang telah terkoneksi dengan CCRoom.

## **8. Perpustakaan dan Kearsipan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung; dan
- b. Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk Faktor penentu keberhasilan urusan perpustakaan dan kearsipan diantaranya :

- a. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- b. Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku.

## **9. Penanaman Modal**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
- b. Tingginya harga tanah untuk pengembangan dan penanaman investasi.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional; dan
- b. Mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.

### **2.3.1.4. Permasalahan Pembangunan Pada Layanan Urusan Pilihan**

#### **1. Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perikanan di Kabupaten Klaten adalah :sebagai berikut

- c. Menurunnya produktivitas perikanan;



- d. Pemasaran hasil olahan ikan; dan
- e. Harga pakan ikan mahal

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas bibit ikan;
- b. Pelatihan pengolahan hasil perikanan;
- c. Pelatihan pembuatan pakan ikan

## **2. Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
- d. Masih terbatasnya penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

- f. Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata;
- g. Pengembangan destinasi pariwisata;
- h. Peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

## **3. Pertanian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);



- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program-program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani;
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satuan Kerja (Satker) dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan;
- j. Belum beragam tingkat konsumsi pangan; dan
- k. Menurunnya produktivitas perikanan.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas–varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- e. Penciptaan sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya



kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

#### **4. Perdagangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.
- g. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- h. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan
- i. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL.

#### **5. Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;



- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

## **6. Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup;
- b. Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjangkaran sampai penempatan transmigrasi; dan
- d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

### **2.3.1.4. Permasalahan Pembangunan Pada Penunjang Urusan**

#### **1. Sekretariat DPRD**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :





- a. Belum semua ASN mengikuti Diklat struktural dan fungsional untuk meningkatkan kualitas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kinerjanya.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

## **2. Perencanaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perencanaan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencana;
- b. Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi kinerja;
- c. Penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi; dan
- d. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN perencana;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja; dan
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus didukung base line data dan informasi pembangunan yang akurat, dan tepat manfaat.



### **3. Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan keuangan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan masih ditemukan beberapa temuan penggunaan keuangan Daerah yang efektif dan efisien; dan
- b. Penyajian laporan keuangan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten belum lengkap atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

### **4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Belum semua Pejabat Struktural mengikuti Diklat Struktural sesuai jenjangnya untuk tahun 2020 tidak ada pengiriman Diklatpim (Diklat Struktural) karena adanya pandemic *Covid-19*;
- b. Belum terisinya seluruh kotak jabatan (13%);
- c. Masih dalam kategori sedang nilai IP ASN (78,06);
- d. Belum optimalnya update data Kepegawaian (20%); dan
- e. Belum optimalnya pengembangan aparatur (4%).

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

### **2.3.1.5. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan**

#### **1. Pengawasan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
- b. Proses perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- c. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor; dan
- d. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan;
- b. Mensinergikan atau mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menghubungkan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.

### **BAB III**

#### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Perekonomian dunia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang ada sejak awal tahun. Namun perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan pada triwulan IV 2020. Titik balik pemulihan ekonomi di triwulan IV 2020 ini tercermin dari data ekonomi yang menunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor. Pada triwulan IV 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -2,19% (YoY); membaik dari triwulan sebelumnya (Triwulan III sebesar -3,49% (YoY) dan Triwulan II sebesar -5,32% (YoY)). Tren perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020, diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021.

Perbaikan ekonomi domestik triwulan IV 2020 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan IV 2020, yakni tumbuh -3,61% (YoY) dari -4,05% (YoY) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 2,63%. Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan IV 2020, dari -6,48% (YoY) pada triwulan sebelumnya menjadi -6,15% (YoY), sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor di tengah masih terbatasnya kinerja impor.

Di sisi lapangan usaha, sebagian besar lapangan usaha mengalami perbaikan pada triwulan IV 2020. Lapangan usaha yang terkait dengan kesehatan dan aktivitas *work from home* dan *school from home* tercatat tetap tumbuh positif dan melanjutkan perbaikan, seperti Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, serta Lapangan usaha Jasa Kesehatan. Lapangan usaha Pertanian dan Lapangan usaha Pendidikan juga mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara itu, Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Lapangan usaha Perdagangan yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian terus melanjutkan perbaikan, meski masih terkontraksi.



Data di atas menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Pada triwulan IV tersebut permintaan produk, tingkat konsumsi masyarakat, ekspor produk hingga investasi menunjukkan perbaikan. Sektor yang masih perlu didorong karena masih belum menunjukkan perbaikan adalah sektor impor akibat kondisi perekonomian dunia yang juga masih dalam tahap pemulihan.

Meski begitu, pembalikan arah pertumbuhan ekonomi juga terus semakin nyata seiring dengan ditemukannya vaksin Covid-19. Sektor produksi juga mulai mengalami pembalikan arah. Dari 17 sektor produksi, sudah 12 sektor produksi mengalami perbaikan. Bahkan tiga diantaranya tetap tumbuh positif di masa pandemi ini, yakni pertanian, informasi dan komunikasi dan jasa keuangan. Sementara itu, sektor lain terdampak yang sangat dalam sudah mulai menunjukkan pemulihan seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi, konstruksi dan akomodasi yang masih negatif tetapi mengalami pembalikan arah yang cukup solid.

Untuk tahun 2021, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2021 masih berada di zona negatif. Kinerja perekonomian bakal mengalami kontraksi di kisaran minus 1% hingga minus 0,1%. Namun, pemerintah masih berharap pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2021 bisa mendekati zona netral atau 0%. Sebab, pemerintah telah berupaya untuk mendongkrak kinerja perekonomian dengan beragam insentif serta stimulus. Selain itu, sejak awal tahun 2021 roda perekonomian sudah mulai tergerak serta kegiatan masyarakat juga mulai kembali berjalan meski secara terbatas. Pemerintah di sisi lain juga telah menjalankan program vaksinasi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga diharapkan akan dimulai di triwulan II dan III sehingga diharapkan bisa menyumbang pertumbuhan sebesar minimal 5% di akhir tahun 2021. Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut punya potensi bergeser ke angka yang lebih tinggi di tahun ini bila diiringi dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan insentif yang digelontorkan pemerintah bisa tepat sasaran. Mobilitas masyarakat yang mulai membaik ini diharapkan terjaga, sebab kepercayaan menjadi elemen paling penting jika menerapkan disiplin kesehatan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi sehingga tidak menimbulkan penyebaran Covid-19 yang makin meluas. Bila disiplin kesehatan bisa teratasi, maka penyebaran virus dan perekonomian kembali pulih. Untuk

itu kebijakan ekonomi nasional akan tetap terus dijaga. Pada tahun 2021, pemerintah akan tetap fokus menangani pemulihan ekonomi dimana tantangan yang masih dihadapi pemerintah dalam menghadapi Covid-19 adalah penganggaran untuk ketersediaan vaksinasi.

Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, dan dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 secara keseluruhan maupun program PEN sudah mengalami akselerasi yang signifikan dan terus meningkat sampai akhir bulan Desember 2020 dalam rangka untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, kita berharap masyarakat terus melakukan disiplin di dalam protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Pemerintah tetap akan menjalankan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment di dalam mendukung pengendalian penyebaran Covid-19.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perlambatan perekonomian tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, ataupun tingkat Provinsi Jawa Tengah namun juga seluruh daerah yang ada di Indonesia terutama Kabupaten Klaten. Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2020 diperkirakan akan bergerak di bawah kapasitasnya sehingga lebih rendah dibandingkan 2019. Padahal, kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten tidak begitu jauh berbeda dengan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar imbas wabah Covid-19, padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor konstruksi juga mengalami penurunan akibat terkena dampak penundaan atau



penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Sektor yang diperkirakan tetap bisa bertahan di tengah wabah Covid-19 adalah sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan sangat penting terutama dalam pemenuhan obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan di sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan khususnya pada pemenuhan paket data internet dalam memenuhi kebutuhan selama *work from home* dan *school from home*.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran makro pembangunan pada tahun 2021, seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga, evaluasi dampak Covid-19 dan langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2020 menjadi bagian penting pada perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2021, agar pemulihan ekonomi diharapkan dapat bangkit di tahun 2021.

Prospek perekonomian daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sudah pasti akan dipengaruhi perekonomian nasional. Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 menghadapi tekanan beberapa faktor seperti menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dimana hasil prediksi dari Bank Indonesia, proyeksi PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya akan tumbuh di bawah 5%. Namun proyeksi ini masih sangat dinamis karena tergantung seberapa masif penyebaran Covid-19 dan juga seberapa efektif upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, jika tidak diatasi, akan menghalangi daerah untuk bersaing di era digital dan teknologi tinggi. Kendala lain adalah rendahnya kualitas belanja daerah serta infrastruktur yang masih harus terus ditingkatkan.



Resiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan masih minus, dan Indonesia akan menghadapi ancaman resesi ekonomi yang jelas juga akan mempengaruhi perekonomian daerah.

Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan bahkan bisa sampai pada kasus terburuk jika pandemi tidak bisa tertangani bahkan setelah pelaksanaan program vaksinasi di awal tahun 2021, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun ekonomi di 2022 berpotensi tumbuh tinggi dibandingkan tahun 2021. Asumsi makro tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi di tahun 2022, dimana perlunya sinergisitas antara kebijakan pusat dan daerah. Arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah di tengah atau pasca pandemi Covid-19 harus sinkron dan selaras dengan arah kebijakan pusat. Kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah arah kebijakan belanja daerah yang masih fokus pada pemulihan ekonomi daerah.

Prioritas daerah pada tahun 2022 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenitas dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berhasil secara maksimal tanpa peran serta semua stakeholder, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai target dan sasaran kebijakan, yang semuanya dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.



Kondisi faktual dan dinamika seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2022. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

Tabel 3.1.  
Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Proyeksi Tahun	
		2021	2022
1	PDRB ADHB (Juta Rp)	41.009.163,18	42.706.942,53
	PDRB ADHK (Juta Rp)	27.765.673,71	28.464.437,69
2	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	0,53-1,53	2,02-3,02
3	PDRB per kapita (Rupiah)	34.944.390	36.337.026
4	Inflasi (Persen)	2,5 <sub>+</sub> 1	2,5 <sub>+</sub> 1
5	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Ribu)	278.016.966.312	835.547.112.678
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	6,05-6,75	5,95
7	Kemiskinan (Persen)	14,09	13,49

Sumber: Bappeda Kab Klaten, 2021 (hasil analisis)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkat secara signifikan antara lain dengan mendorong peningkatan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penerapan suku bunga rendah, penyediaan kawasan industri, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif yang didukung dengan tata ruang yang berpihak pada pengembangan dan peningkatan peluang investasi.

Kontribusi lapangan usaha PDRB yang diharapkan tumbuh dan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2022 yaitu Industri Pengolahan/Manufacturing, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selanjutnya proyeksi kontribusi masing-masing lapangan usaha yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2021 dan 2022 berdasarkan komponen Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.  
Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga  
Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2022

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,03	11,04
B	Pertambangan dan Penggalian	2,53	2,51
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	34,18	33,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05
F	Konstruksi	6,20	6,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	16,74	16,53
H	Transportasi dan Pergudangan	1,67	1,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,65	3,76
J	Informasi dan Komunikasi	6,19	6,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,52	3,55
L	Real Estate	1,53	1,52
5	Jasa Perusahaan	0,31	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan	2,28	2,25
P	Jasa Pendidikan	6,68	6,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,48
R	Jasa Lainnya	1,83	1,79

Sumber: Bappeda Kabupaten Klaten, 2021 (hasil analisis)

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2022 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2022 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

- a. Prioritas Kesatu, pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Prioritas Kedua, pada pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;
- c. Prioritas Ketiga, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klaten

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan rancangan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 yang akan ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut.

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah pada kurun waktu tahun 2017-2020 serta proyeksi tahun 2021 yang ditetapkan dalam APBD TA 2021, mengalami fluktuasi yang memiliki kencerungan mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Pendapatan daerah pada kerangka keuangan Kabupaten Klaten masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (*Dana Perimbangan*), hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih rendah. Pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun-tahun sebelumnya (2017-2019). Hal ini disebabkan karena dampak global Pandemi Covid19 yang secara signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi makro. Namun pada APBD Tahun Anggaran 2021, diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 berdasarkan pada optimisme Pemerintah Daerah dalam menghadapi pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi sejalan dengan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional.

Gambaran realisasi pendapatan daerah tahun 2017-2020 serta rencana pendapatan daerah 2021 sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 3.3.  
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 serta Rencana APBD Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	R. 2017#)	R. 2018#)	R. 2019#)	R. 2020#)*)	APBD TA. 2021
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.581.515.295.917,04</b>	<b>2.577.961.130.135,42</b>	<b>2.689.353.252.985,44</b>	<b>2,465,527,410,454.00</b>	<b>2.520.987.884.551,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>371.718.439.306,04</b>	<b>395.884.244.135,42</b>	<b>311.648.401.655,44</b>	<b>329.918.600.998.00</b>	<b>249.063.886.351,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	105.290.677.595,00	115.771.908.527,00	125.444.617.676,00	116,102,371,269.00	103.372.962.000,00
4.1.02	Restribusi Daerah	12.668.781.932,00	13.030.982.654,00	17.296.912.453,00	14,750,798,083.00	13.967.805.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.742.870.570,00	22.811.147.630,00	12.988.398.308,00	17,577,664,499.00	12.197.839.911,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	244.016.109.209,04	244.270.205.324,42	155.918.473.218,44	181.487.767.147.00	119.525.279.440,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.851.429.599.039,00</b>	<b>1.828.029.847.888,00</b>	<b>1.854.302.502.817,00</b>	<b>1.737.350.920.956.00</b>	<b>2.148.491.398.200,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.624.715.625.119,00	1.652.127.767.661,00	1.666.073.637.378,00	1.516.494.102.076,00	1.968.844.129.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	55.646.870.000,00	-	-	57.067.155.000,00	-
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	171.067.103.920,00	175.902.080.227,00	188.228.856.439,00	163.789.663.880,00	179.647.269.200,00



Kode	Uraian	R. 2017#)	R. 2018#)	R. 2019#)	R. 2020#)*)	APBD TA. 2021
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 22SAH</b>	<b>358.367.257.572,00</b>	<b>354.047.038.112,00</b>	<b>523.402.348,513,00</b>	<b>398.257.888.500,00</b>	<b>123.432.600.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	942.739.891,00	22.157.277.976,00	116.297.857.513,00	115.170.740.000,00	13.040.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	357.424.517.681,00	331.889.760.136,00	407.104.491.000,00	283.087.148.500,00	110.392.600.000,00

Sumber: BPKD Kab. Klaten, 2021

Keterangan

#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019

\*) An-Audited



Dari tabel 3.3. terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 84.235.842.480,00 atau turun sebesar 21,28 %. Penurunan ini disebabkan karena 2 (dua) hal:

1. Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian Dana BOS, semula bagian dari PAD berubah menjadi bagian dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Adanya penurunan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jateng.

Di tahun 2020 PAD sudah mengalami peningkatan meskipun kondisi masih pandemi Covid-19, dengan peningkatan sebesar Rp 18.314.860.243,00 atau naik sebesar 5.88% dari tahun sebelumnya. Peningkatan PAD ini disebabkan karena meningkatnya beberapa sumber PAD antara lain:

1. Meningkatnya pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah antara lain Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusda Air Minum, Bagian laba atas penyertaan modal Aneka Usaha, Bagian laba atas penyertaan modal Perusda Bank Klaten, bagian laba atas penyertaan modal Bank Jateng.
2. Meningkatnya Lain-Lain PAD yaitu peningkatan pendapatan Jasa Giro, Pendapatan BLUD dan Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Sejalan dengan dinamika kondisi ekonomi makro pada tahun 2020 serta asumsi tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 tetap optimis pada asumsi kerangka keuangan daerah dengan mempertimbangkan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah yang tetap memperhatikan protokol kesehatan serta meningkatkan koordinasi antar level penyelenggara Pemerintah dan stakeholders terkait. Untuk itu, guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2022 tercapai, perlu ditempuh melalui upaya:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui:
  - ✓ Intensifikasi melalui penerapan online system dalam penerimaan daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*); memutakhirkan data objek pajak; melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*; meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan dukungan sumber daya yang tercukupi.
  - ✓ Ekstensifikasi melalui peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan redistribusi yang tidak relevan.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;



3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
5. Memberikan kemudahan akses perizinan dan non perizinan yang mengarah meningkatnya iklim investasi daerah.

Pendapatan daerah tahun 2022, ditargetkan sebesar Rp.2.552.096.762.395,57 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.31.108.877.844,57 dari rencana tahun 2021 sebesar Rp.2.520.987.884.551,00. Mendasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana target pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022, disajikan sebagaimana tabel berikut:





Tabel 3.4.  
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022

Kode	Uraian	Tahun 2022	Proporsi (%)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.508.342.505.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>274.449.465.000,00</b>	<b>10,94</b>
4.1.01	Pajak Daerah	113.710.259.000,00	4,53
4.1.02	Restribusi Daerah	15.673.215.000,00	0,62
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.273.183.000,00	0,53
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	131.792.808.000,00	5,25
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.124.134.846.000,00</b>	<b>84,68</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.930.813.171.000,00	76,98
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	179.647.269.200,00	7,16
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>123.432.600.000,00</b>	<b>4,92</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000,00	0,52
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.392.600.000,00	4,40

Sumber: BPKD Kab. Klaten, 2021

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah tahun 2022 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol covid 19 dalam pelaksanaan *New Nomal*.
  - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;

- d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2021 diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi karena dampak Covid-19;
  - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2021 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
  - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
  3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
    - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau



- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
  - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2022 dirinci atas jenis:
  - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Sebagai gambaran, realisasi belanja daerah tahun 2017-2020 dan asumsi belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan proyeksi tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.5.  
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 serta Rencana APBD Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	R. 2017#)	R. 2018#)	R. 2019#)	R. 2020#)*)	RENCANA APBD TA 2021	Proyeksi Tahun 2022
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.481.861.743.842,22</b>	<b>2.611.007.499.825,88</b>	<b>2.682.356.733.813,68</b>	<b>2.432.595.827.577,00</b>	<b>2.672.822.301.894,00</b>	<b>2.671.826.951.200,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.481.520.782.617,22</b>	<b>1.521.442.608.529,88</b>	<b>1.609.749.628.450,68</b>	<b>1.572.624.023.329,00</b>	<b>1.856.311.721.298,00</b>	<b>1.859.147.517.200,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.092.314.834.122,40	1.071.242.466.613,00	1.089.951.573.950,00	1.046.020.322.799,00	1.217.830.195.949,00	1.229.477.323.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.108.954.803,82	364.623.107.660,88	438.782.512.762,68	414.526.990.423,00	591.166.498.849,00	578.636.597.000,00
5.1.03	Belanja Subsidi	-	-	122.478.000,00	1.988.515.348,00	2.000.000.000,00	2.024.680.000,00
5.1.04	Belanja Hibah	66.947.268.691,00	84.669.509.256,00	76.001.313.738,00	106.572.669.759,00	37.920.026.500,00	39.422.057.000,00
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	1.149.725.000,00	907.525.000,00	4,891,750,000.00	3.511.725.000,00	7.395.000.000,00	9.586.860.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>364.937.481.638,00</b>	<b>384.574.980.960,00</b>	<b>308.145.403.976,00</b>	<b>157.127.019.874,00</b>	<b>202.968.198.796,00</b>	<b>229.117.780.000,00</b>
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.590.754.081,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>11.000.000.000,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>635.403.479.587,00</b>	<b>704.989.910.336,00</b>	<b>764.461.701.387,00</b>	<b>612.257.830.293,00</b>	<b>598.542.381.800,00</b>	<b>572.51.654.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.970.076.237,00	13.263.553.836,00	14.346.947.667,00	13.255.263.593,00	11.734.076.700,00	12.938.348.000,00
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan	625.433.403.350,00	691.726.356.500,00	750.114.753.720,00	599.002.566.700,00	586.808.305.100,00	559.623.306.000,00

Sumber: BPKD Kab. Klaten, 2021

Keterangan

#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019

\*) An Audited



Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah agar bisa pulih sebagai dampak wabah Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, maka belanja daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diarahkan pada:

1. Pemulihan dan perkuatan perekonomian utamanya pada sektor terdampak (Industri, Pariswisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM) serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
2. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran yang diantaranya sebagai dampak dari pandemik Covid-19 termasuk pada kelompok miskin baru;
3. Peningkatan kualitas SDM pada aspek pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja;



### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada Pembentukan Dana Cadangan dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Secara ringkas gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6.  
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 dan Rencana APBD Tahun Anggaran 2021  
serta Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Kode	Uraian	R. 2017#)	R. 2018#)	R. 2019#)	R. 2020#)*)	Rencana APBD TA. 2021	Proyeksi 2022
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>374.231.954.686,16</b>	<b>455.690.054.002,98</b>	<b>395.265.877.623,52</b>	<b>408.909.001.110,28</b>	<b>208.865.375.343,00</b>	<b>183.484.446.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	374.231.954.686,16	455.690.054.002,98	395.265.877.623,52	382.909.001.110,28	208.865.375.343,00	183.484.446.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	26.000.000.000,00	-	-
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.200.000.000,00</b>	<b>27.249.000.000,00</b>	<b>19.500.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.200.000.000,00	19.249.000.000,00	9.500.000.000,00	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>356.031.954.686,16</b>	<b>428.441.054.002,98</b>	<b>375.765.877.623,52</b>	<b>407.909.001.110,28</b>	<b>189.865.375.343,00</b>	<b>163.484.446.000,00</b>

Sumber : BPKD Kab. Klaten, 2021

Keterangan

#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019

\*) An Audited



## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Klaten berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD pada Tahun 2021-2026, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah serta nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, dimana Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

**Kabupaten Klaten**, Suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Maju**, Merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, social, kependudukan, dan politik;

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan





kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

**Mandiri**, Perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.; serta

**Sejahtera**, Perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur dan bersih, transparan, bertujuan dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan

misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi 6 (enam) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran, yang diuraikan sebagai disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Target 2022
<b>Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian</b>			
<b>1</b>	<b>Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.</b>	▪ <b>Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)</b>	<b>0,65 Indeks</b>
	1) Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	✓ Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan ✓ Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100%  92,40%
<b>Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi</b>			
<b>1</b>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)</b>	▪ <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>60,01 indeks</b>
	1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	✓ Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) ✓ Peringkat/ Nilai SAKIP ✓ Opini Laporan Keuangan ✓ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ✓ Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	81 indeks  62 Nilai WTP Opini 3,2 Indeks  180 Indeks
	2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Indeks
<b>Misi 3: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan</b>			
<b>1</b>	<b>Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan</b>	▪ <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>2,52%</b>
	1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	✓ Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan ✓ Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	1,47%  1,24%

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Target 2022
		✓ Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	2,63%
		✓ Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	3,13%
	2) Meningkatnya investasi daerah	✓ Persentase peningkatan investasi PMDN	10%
		✓ Persentase peningkatan investasi PMA	1%
<b>Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah</b>			
<b>1</b>	<b>Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Infrastruktur wilayah kondisi baik</b></li> <li>▪ <b>Rasio konektivitas</b></li> </ul>	<b>76,11%</b>  <b>0,12 Rasio</b>
	1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Persentase jalan dalam kondisi mantap</li> <li>✓ Persentase drainase dalam kondisi baik</li> <li>✓ Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik</li> </ul>	91,06% 61,47% 41,5%
	2) Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	✓ Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	98,32%
	3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	✓ Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,4%
	4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	✓ Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	0,62 Nilai
<b>Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender</b>			
<b>1</b>	<b>Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b></li> <li>▪ <b>Persentase Penduduk Miskin</b></li> <li>▪ <b>Indeks Pembangunan Gender</b></li> </ul>	<b>76,46 Indeks</b> <b>12,49%</b>  <b>96,66 Indeks</b>
	1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Harapan Lama Sekolah (HLS)</li> <li>✓ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</li> <li>✓ Persentase pemajuan kebudayaan</li> </ul>	13,52 Tahun 8,64 Tahun 5%
	2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	✓ Usia Harapan Hidup (UHH)	76,84 Tahun
	3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Persentase PMKS yang tertangani</li> <li>✓ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</li> <li>✓ Indeks Desa Membangun</li> </ul>	67,5% 5,16% 0,6894 Indeks

<b>Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah</b>		<b>Indikator</b>	<b>Target 2022</b>
	4) Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> <li>✓ Skor Kabupaten Layak Anak</li> </ul>	73,34 Indeks  725 Nilai
<b>Misi 6: Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</b>			
<b>1</b>	<b>Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan</b>	<b>▪ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>54,68 Indeks</b>
	1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indeks Kualitas Air</li> <li>✓ Indeks Kualitas Udara</li> <li>✓ Indeks Kualitas Tutupan Lahan</li> </ul>	36,63 Indeks 77,80 Indeks 42,90 Indeks
	2) Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)</li> </ul>	59,95 Indeks
	3) Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</li> </ul>	0,92 Indeks

#### **4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

Arah prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 fokus pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam mencapai sasaran jangka menengah daerah, yang tetap mempedomani prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Prioritas pembangunan daerah tersebut berisi program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas yang ada dalam Perangkat Daerah dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Jika suatu prioritas pembangunan daerah telah berhasil dicapai, maka tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya. Jadi, suatu program prioritas bisa menjadi prioritas pembangunan daerah jika bisa menjadi daya ungkit yang bernilai strategik pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam cakupan pembangunannya.

#### 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Akibat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Tantangan Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi nasional tetapi juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang.

Tema RKP Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dengan 7 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan prioritas tersebut dia atas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi 2,52%;
- b. Inflasi pada angka 2,5±1;
- c. Tingkat Kemiskinan 8,5-9,0%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,2%;
- e. Rasio Gini 0,376-0,378;
- f. Indeks Pembangunan Manusia 73,44-73,48;
- g. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8-27,1%;
- h. Nilai Tukar Petani/NTP 102-104.

Beberapa Major Project yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.

2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) smelter.
3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Klaten termasuk menjadi salah satu sasaran lokasi pelaksanaan Major Project 10 Daerah Pariwisata Prioritas (DPP), yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prambanan yang merupakan bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga- Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang. Dalam Perpres 79 Tahun 2019, ada dua kegiatan yang secara khusus berada di Kabupaten Klaten, yaitu Revitalisasi Rowo Jombor dan Pengendalian Banjir Sungai Dengkeng Sungai Bengawan Solo Kabupaten Klaten.

#### **4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

RKPD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 merupakan tahun ke 4 (empat) pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang temanya juga diselaraskan dengan RKP Tahun 2022 yang diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendasarkan pada isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 melalui prioritas daerah sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Upaya-upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Angka Kemiskinan turun menjadi 11,42-10,27%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96-5,88%;
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 2,52%;
4. Inflasi pada angka 2,5±1;
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,43;
6. Nilai Tukar Petani 103,56.

Dengan memperhatikan kebijakan pemulihan dampak Covid-19 di Jawa Tengah pada tahun 2020 dan 2021, serta kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022, maka arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 akan disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023 di atas. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2022 mempertimbangkan dampak Covid-19.

#### **4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022**

Kabupaten Klaten termasuk kabupaten yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi serta memperhatikan capaian dan kendala pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Hal ini dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mengingat RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga sedang dalam proses penyusunan, maka penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 8 2022 juga akan dilakukan secara simultan baik proses maupun perumusan substansinya

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022 diarahkan untuk **“Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal”**. Penekanan “Pemulihan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Tahun 2020. Pemulihan ekonomi di tahun 2022 diarahkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur di semua

sektor. Sedangkan makna “Pengembangan Potensi Lokal” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi Lokal

prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada pengembangan ekonomi melalui pengembangan berbagai sektor seperti pertanian, industri, pariwisata dan perdagangan. Hal ini untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan Investasi Daerah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Ekonomi.

Prioritas ini merupakan upaya pengamanan, pemulihan dan penguatan ekonomi lokal pada dunia usaha dan masyarakat terdampak covid dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, BUMD, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui : pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberdayakan kelompok tani wanita, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi selain dari bahan baku beras beserta hasil olahannya (Diversifikasi Pangan), optimalisasi lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui peran serta BumDes, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola kluster, meningkatkan Kreatifitas dan Inovasi produk, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui Gerakan Cinta Produk Lokal, penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi, optimalisasi program padat karya, pemberian insentif untuk KUR dan subsidi bunga bagi pelaku usaha dan kelompok tani, peningkatan promosi investasi dan pariwisata untuk meningkatkan PAD, pengembangan dan pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, meningkatkan peran serta Dunia Usaha melalui Forum CSR dalam mendukung pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;

prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis, meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman, pelayanan air minum dan sanitasi layak,



meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sarpras perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa tengah dan prioritas Nasional yakni infrastruktur. Prioritas ini fokus pada Pembangunan jalan menuju pusat perekonomian dan akses pelayanan dasar, Pembangunan sarana jaringan irigasi di daerah lumbung pangan, Pembangunan kawasan dalam pengembangan antar wilayah, Pembangunan dan Penataan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perhubungan, Peningkatan Akses Antar Daerah dan Wilayah.

3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni kemiskinan dan pengangguran.

kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Berdasarkan data BPS yang telah dibahas di bab 2 menunjukkan dampak pandemi covid-19 mengakibatkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui bantuan sosial, penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada prioritas ini juga dilakukan perluasan lapangan pekerjaan dengan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya yang berdampak pada turunnya angka pengangguran melalui pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas angkatan kerja, pemberian bantuan modal UMKM dan penciptaan wirausaha baru.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni Sumber Daya Manusia yang meliputi:

a. Sosial budaya

- Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan difabel, perlindungan dan

pemberdayaan PMKS, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pengembangan gotong royong, pemberdayaan keluarga dan melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah melalui transmigrasi, peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;

- Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- Mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

b. Peningkatan kualitas kesehatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan dan sarana prasarannya, pemberantasan penyakit menular, pemulihan pasca pandemi Covid-19, peningkatan kesadaran masyarakat dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya kesehatan masyarakat dan lingkungan.

c. Peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah.

d. Peningkatan pengarusutamaan gender

Pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender ini diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Peningkatan pengarusutamaan gender dapat dilihat dari angka peran perempuan dalam pembangunan daerah.



5. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;  
Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Kelestarian Lingkungan Hidup dan penanggulangan bencana yang meliputi:
  - a. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
  - b. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang yang mengacu pada daya dukung dan daya tampung wilayah;
  - c. Meningkatnya akses informasi, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan limbah;
  - e. Meningkatnya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas relawan kebencanaan;
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan  
Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni tata kelola pemerintahan yang meliputi:
  - a. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
  - b. Optimalisasi Implementasi *Smart City* melalui inovasi-inovasi pelayanan publik untuk mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan meningkatkan kepuasan masyarakat;
  - c. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;
  - d. Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan desa dan kapasitas aparatur desa.

Rumusan prioritas tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022, dan juga menjawab isu strategis permasalahan daerah, serta proyeksi dan target pencapaian indikator sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 4.2.  
Sasaran Makro Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022

No.	Sasaran Makro	Proyeksi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	0,53% -1,53%	2,52%
2.	Tingkat Kemiskinan	12,28% -12,78%	12,49%
3.	Laju Inflasi	(2,5±1)%	(2,5±1)%
4.	IPM	76,04%	76,46%
5.	TPT	5,31%±6,00%	5,16%
6.	PDRB Per Kapita	Rp. 34.944.390,-	Rp. 36.337.026,-
7.	IPG	96,14 Indeks	96,66 Indeks

Prioritas dan fokus pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dilakukan sebagai upaya untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan Nasional Tahun 2022. Adapun matrik Keselarasan prioritas pembangunan antar penyelenggaraan pemerintah disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi	No	Prioritas Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PP01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	PP01	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;	PD01	Peningkatan Ekonomi Lokal
PP02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan Wilayah ditujukan untuk meningkatkan	PP02	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;	PD03	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi	No	Prioritas Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.				
PP03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.	PP03	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;	PD04	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PP04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP04	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.	PD06	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PP05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			PP02	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
PP06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			PP05	Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana
PP07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam				

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi	No	Prioritas Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman				

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sinkronisasi prioritas pembangunan Tahun 2022 antara Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sudah menunjukkan adanya konsistensi prioritas pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang ada.

#### **4.3. TELAAH POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD UNTUK RKPD TAHUN 2022**

Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah dokumen telaah tahunan yang memuat isu-isu strategis dan permasalahan, serta analisa pencapaian pembangunan daerah, pencapaian tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD juga merupakan dokumen strategis untuk dijadikan pertimbangan perumusan arah pembangunan daerah tahunan yang berasal dari berbagai masukan, diantaranya bersumber dari: risalah rapat dengar pendapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang selanjutnya diselaraskan dalam rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat lebih fokus pada tahapan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.
2. Prioritas pembangunan tahun 2022 dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.
3. Dalam rangka untuk penyusunan RKPD Tahun 2022 dan dengan memperhatikan permasalahan Pandemi Covid-19, perlu adanya identifikasi permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalisir dan menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat.

Secara umum, analisis permasalahan pembangunan daerah masih tetap terbagi menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:



1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat;  
Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kemampuan produktivitas masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi juga oleh perekonomian daerah dan perekonomian regional maupun nasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada aspek ini antara lain:
  - a. Meskipun sudah mengalami penurunan tetapi tingkat kemiskinan daerah masih dalam kategori cukup tinggi melebihi rata-rata Provinsi maupun Nasional yang belum didukung dengan inovasi-inovasi program percepatan penurunannya, terlebih dengan adanya Pandemi Covid 19 menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap penambahan jumlah penduduk miskin;
  - b. Kurangnya kapasitas dan kompetensi masyarakat dalam menghadapi dunia kerja serta mengakses peluang kerja, yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka belum signifikan untuk ditekan penurunannya;
  - c. Belum meratanya kualitas pendidikan disemua jenjang pendidikan dasar serta standarisasi pendidikan, sarana prasarana pendukungnya, termasuk ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terlebih dengan adanya Pandemi Covid 19 membawa dampak bagi sistem pembelajaran, yang tadinya dengan sistem tatap muka menjadi model Daring/*online*.
  - d. Masih perlu ditingkatkannya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan standarisasi layanan kesehatan yang lebih baik.
  - e. Adanya Pandemi Covid 19 banyak pekerja yang di PHK dan dirumahkan serta menurunnya pendapatan, berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Bidang Pembangunan;  
Dalam bidang pembangunan, dihadapkan dengan belum meratanya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan publik yang dapat mendukung kelancaran perhubungan, arus distribusi barang dan jasa, sentra-sentra produksi dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Hal ini menjadikan perhatian agar dapat dicapai konektivitas antar wilayah yang mendukung pengembangan wilayah;
3. Bidang Ekonomi dan Keuangan;  
Bidang Ekonomi secara makro diarahkan agar Kabupaten Klaten mampu menangkap peluang sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis

potensi lokal. Peluang ini besar mengingat Klaten ditetapkan sebagai bagian pengembangan kawasan strategis ditinjau dari sudut pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten dan koridor Perbatasan Klaten-Sukoharjo-Wonosari/Gunung Kidul. (Kesukosari). Termasuk yang juga perlu diperhatikan adalah Kawasan Strategis Nasional di Wilayah Kecamatan Prambanan, Taman Merapi-Merbabu dan akses Jalan Tol Jogja – Solo.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan pemulihan ekonomi daerah akibat dampak Covid 19 yang membutuhkan waktu cukup lama.

Sementara dari aspek keuangan, kebijakan dan langkah strategis perlu ditempuh untuk mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah. Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, meskipun trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat pada tahun-tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2020 ini agak mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Sedangkan posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan atau transfer, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, ditempuh dengan mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada.

#### 4. Bidang Pemerintahan

Dalam bidang pemerintahan, perlu langkah operasional dan taktis sebagai tindak lanjut dari Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 yang salah satunya adalah mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu juga untuk mendukung tercapainya Misi Pemerintah Kabupaten Klaten yang tertuang dalam RPJMD, yaitu terwujudnya kapasitas pemerintahan yang lebih baik dan bersih (*good and clean governance*).

Target capaian atas misi ini akan ditandai dengan adanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan kelembagaan yang mampu mengakomodasi tuntutan



perubahan sosial dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk mencapai hal tersebut, perlu langkah strategis untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah perlunya pengkajian serta penyempurnaan terhadap SOTK Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kemudian secara spesifik, analisa permasalahan pembangunan daerah tetap terbagi menjadi 3 (tiga) aspek, meliputi 1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 2) Aspek Pelayanan Umum; dan 3) Aspek Daya Saing Daerah.

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kemampuan produktivitas masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi oleh perekonomian daerah dan perekonomian regional maupun nasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada aspek ini antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Klaten masih fluktuatif, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini dapat berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Kontribusi lapangan usaha terhadap laju pertumbuhan PDRB Harga Konstan maupun Harga Berlaku belum terjaga yang salah satunya keterbatasan bahan produksi di dunia usaha dan adanya pandemi Covid-19;
- c. Pengaruh kondisi perekonomian regional dan nasional serta naik turunnya harga-harga pangan, yang menyebabkan Inflasi ditingkat Daerah tidak stabil;
- d. Tingkat kemiskinan daerah yang masih dalam kategori tinggi melebihi rata-rata Provinsi maupun Nasional yang belum didukung dengan inovasi-inovasi program percepatan penurunannya. Disamping itu yang juga perlu diwaspadai adalah terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat pandemi Covid-19;
- e. Kurangnya kapasitas dan kompetensi masyarakat dalam menghadapi dunia kerja dan mengakses peluang kerja yang

menyebabkan tingkat pengangguran terbuka belum signifikan untuk ditekan penurunannya;

- f. Jumlah lapangan kerja yang semakin berkurang dampak dari kondisi demografi yang ada sehingga menyebabkan meningkatnya minat kerja di luar wilayah Kabupaten Klaten serta dampak dari adanya pandemi Covid-19.

2. Aspek Pelayanan Umum;

Pelayanan umum/publik ditekankan terkait fokus pelayanan umum melalui pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan, diklasifikasikan ke dalam urusan bidang, yaitu:

- A. Pendidikan, dihadapkan dengan permasalahan: masih rendahnya rata-rata lama sekolah; tidak meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik; masih rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik; belum meratanya sarana prasarana pendidikan serta belum meratanya kualitas pendidikan, termasuk sistem pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka akibat dampak Pandemi Covid 19.
- B. Kesehatan, menghadapi permasalahan: belum meratanya sarana prasarana kesehatan yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan; keterbatasan jangkauan akses layanan kesehatan; keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan; belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat dan kesadaran akan kesehatan di masyarakat, disamping itu juga adanya wabah atau terjadinya pandemi Covid 19 saat ini yang sangat mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan, sehingga harus tetap mengedepankan protokol kesehatan;
- C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menghadapi permasalahan belum idealnya rasio kualitas kondisi jalan; belum meratanya kuantitas dan kualitas jalan; masih rendahnya rasio kebutuhan ruang terbuka hijau; banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang; Termasuk pengendalian dan pemanfaatan ruang yang harus sesuai dan selaras dengan Revisi RTRW.
- D. Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten masih menjadi permasalahan dalam penyediaan sarana permukiman. Penanganan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menuntaskan persoalan rumah layak huni di Kabupaten Klaten setiap tahunnya mengalami peningkatan,



namun tetap membutuhkan langkah terpadu sehingga semakin optimal.

- E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; persoalan yang masih menjadi pekerjaan besar adalah masih terbatasnya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.
- F. Sosial; Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten. Berbagai langkah telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial namun belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan
- G. Ketenagakerjaan; permasalahan yang dihadapi adalah tingginya pengangguran/ pencari kerja usia angkatan kerja; jumlah tenaga kerja di sektor pertanian semakin menurun; tingkat kesejahteraan tenaga kerja/buruh masih rendah; minat bekerja di luar wilayah Kabupaten Klaten masih tinggi; dan rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, terlebih saat ini adanya trend peningkatan angka pengangguran akibat dampak Pandemi Covid 19.
- H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi persoalan adanya kasus kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual dan penelantaran terhadap perempuan dan anak maupun belum optimalnya peran kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam menangani berbagai persoalan perempuan dan anak. Sehingga kedepan diperlukan adanya ketentuan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
- I. Pangan; Persoalan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas dan kuantitas produk pangan yang mampu bersaing di pasar global baik berbentuk pangan mentah maupun olahan, maupun kelembagaan distribusi pangan belum berperan sebagaimana mestinya, serta belum terwujudnya kemandirian ataupun kedaulatan pangan.
- J. Pertanahan menghadapi persoalan belum semua lahan dilengkapi bukti kepemilikan yang berupa sertifikat, dan masih cukup tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

- K. Lingkungan Hidup menghadapi persoalan belum optimalnya penegakan hukum lingkungan; serta masih rendahnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan.
- L. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dihadapkan pada persoalan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan, masih kurangnya inovasi proses pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat maupun persoalan sentralisasi kewenangan pengadaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menjadikan pelayanan tidak cepat.
- M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih lemahnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa, belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa serta masih belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi dan kapasitas sumber daya lokal
- N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi permasalahan menurunnya kesadaran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mendukung gerakan/Program KB
- O. Perhubungan berhadapan dengan permasalahan belum tersedianya terminal barang/bongkar muat barang, belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor maupun belum optimalnya pengawasan terhadap kelebihan batas muatan dan penataan jalur lalu lintas galian C.
- P. Komunikasi dan Informatika, permasalahan terkait sektor ini adalah masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi ke seluruh wilayah kecamatan serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung *smart city*.
- Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, masih menghadapi persoalan rendahnya kualitas pelaku usaha, Kualitas produk, manajerial dan pengelolaan kelembagaan usaha mikro dan kecil, rendahnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing produk usaha kecil dan mikro, Masih lemahnya kelembagaan klaster UMKM, Masih lemahnya kapasitas kelembagaan koperasi, belum optimalnya penerapan ajakan “Aku Cinta Produk Klaten” termasuk pengembangan motif batik khas Klaten “Sindu Melati”, dan belum

optimalnya pemberdayaan usaha mikro kecil berbasis klaster. Disamping itu dengan terjadinya Pandemi Covid 19 juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan produksi dari produk-produk UMKM maupun Koperasi.

- R. Penanaman Modal menghadapi permasalahan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi guna promosi potensi dan penawaran ber-investasi di daerah maupun masih terbatasnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Klaten serta belum didukung ketersediaan database profil investasi.
- S. Kepemudaan dan Olahraga; permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan dan keolahragaan maupun kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar
- T. Statistik; permasalahan yang dihadapi adalah belum akurat dan terpadunya data dasar statistik dan belum terintegrasinya pengelolaan data spasial
- U. Persandian masih menghadapi permasalahan terbatasnya kapasitas dan jumlah SDM bidang persandian maupun kurangnya sarana dan prasarana pendukung persandian.
- V. Kebudayaan dihadapkan pada persoalan belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal, pelestarian situs dan cagar budaya serta masih lemahnya kelembagaan dan atraksi seni budaya .
- W. Perpustakaan masih berkaitan dengan terbatasnya layanan sehingga minat dan tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah tergolong rendah.
- X. Kearsipan menghadapi permasalahan kurangnya SDM dan sarana prasarana pendukung kerja dan belum optimalnyakesadaran tata kelola kearsipan daerah.
- Y. Kelautan dan Perikanan; perikanan terpadu berbasis sistem minapolitan yang sudah berjalan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.
- Z. Pariwisata menghadapi permasalahan masih rendahnya tata kelola pariwisata, masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan dan kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan. Selain itu sektor Pariwisata juga terdampak akibat adanya pandemic Covid 19.
- AA. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

dihadapkan pada permasalahan belum berkembangnya sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan berbasis agropolitan dan kawasan pertanian, masih lemahnya kapasitas petani/peternak dan kelembagaannya dan masih rendahnya produksi dan produktivitas hasil pertanian/perkebunan dan peternakan. Disamping itu juga kesiapan dan keberlanjutan kelembagaan *Agro Techno Park* (ATP) sebagai pusat inkubasi dan hilirisasi teknologi serta pengembangan padi Rojolele. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sehingga diperlukan adanya ketentuan peraturan berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- BB. Kehutanan menghadapi permasalahan masih adanya lahan kritis; kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan hutan bersama masyarakat serta masih kurang optimalnya perlindungan dan pelestarian satwa yang dilindungi.
  - CC. Energi dan Sumber Daya Mineral dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya tata kelola pertambangan Golongan C maupun belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan.
  - DD. Perdagangan menghadapi permasalahan masih banyaknya pasar tradisional milik daerah yang belum di-revitalisasi, Pengelolaan pasar tradisional masih konvensional maupun belum optimalnya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
  - EE. Perindustrian dihadapkan permasalahan belum berkembangnya Industri Kecil Mikro berbasis produk unggulan daerah, masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM bidang Industri Kecil, Menengah maupun masih rendahnya Industri Kecil Mikro yang memiliki daya saing global. Selain itu juga masih rendahnya sertifikasi tenaga kerja industri. Selain itu sektor industri juga terkena dampak akibat adanya Pandemi Covid 19.
  - FF. Administrasi Pemerintahan menghadapi persoalan masih rendahnya akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja, serta masih adanya deviasi antara target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja yang dilaksanakan
3. Aspek Daya Saing Daerah;  
Aspek daya saing daerah, merupakan aspek yang dilihat dari potensi daerah yang dikelola dan dipergunakan seoptimal mungkin untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan dari aspek ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dihadapkan dengan permasalahan:

- a. Kondisi kemampuan ekonomi dan keuangan daerah yang belum optimal, dilihat dari pengeluaran konsumsi tiap rumah tangga perlu ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan per kapita, serta dari sisi keuangan daerah masih dihadapkan dengan belum mandirinya keuangan daerah, ditinjau dari sektor pendapatan daerah yang masih banyak didominasi pada pos Dana Perimbangan;
  - b. Belum optimalnya pengelolaan sektor-sektor pariwisata unggulan yang mampu menjadi daya saing dan pemicu pertumbuhan perekonomian daerah;
  - c. Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan daerah yang dapat menjadi *brand image* dan *trademark* Kabupaten Klaten;
  - d. Belum meratanya kondisi infrastruktur wilayah;
  - e. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten;
  - f. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM ataupun IKM serta Koperasi.
  - g. Masih minimnya inovasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta dukungan sumber daya manusia (aparatur) yang relatif berkurang dari tahun ke tahun.
4. Isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2022, antara lain :
- a. Masih tingginya tingkat kesenjangan ekonomi yang ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang fluktuatif;
  - b. Belum meratanya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan termasuk tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kesehatan serta ketersediaan tenaga pendidik;
  - c. Adanya kesenjangan pemerataan kualitas infrastruktur yang dapat meningkatkan sektor-sektor pengembangan wilayah serta dampak dari bencana alam, iklim dan cuaca;
  - d. Adanya kondisi pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian serta peningkatan pengelolaan lingkungan yang berdampak pada kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk keselarasan dengan tata ruang;
  - e. Masih rendahnya upaya peningkatan iklim investasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah termasuk penguatan

- perekonomian desa dengan optimalisasi pengelolaan potensi-potensi lokal;
- f. Berkurangnya kualitas, kuantitas, kapasitas dan partisipasi sumber daya manusia dalam rangka pembangunan daerah;
  - g. Perlu adanya peningkatan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung dari kapasitas kelembagaan dan ketatatlaksanaan Perangkat Daerah termasuk aparaturnya;
  - h. Adanya Pandemi Covid-19 selain mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap seluruh sektor-sektor pembangunan, utamanya dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
  - i. Kebutuhan untuk penguatan dan prioritas pembangunan utamanya dibidang kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi daerah dan jaring pengaman sosial akibat dampak Pandemi Covid-19.
5. Dapat meningkatkan pencapaian sasaran makro pembangunan daerah, dengan target untuk tahun 2022 yaitu:
- a. Pertumbuhan Ekonomi, yang semula ditargetkan pada kisaran angka 5,7 – 6,0% dapat diturunkan pada kisaran 0,53-1,53%;
  - b. Tingkat Kemiskinan, dapat tetap diturunkan sebesar 13,39 %;
  - c. Laju Inflasi, dapat tetap terjaga pada kisaran 2,5±1%;
  - d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dapat ditekan pada angka 5,5 %;
  - e. PDRB perkapita mencapai Rp 39 Juta;
  - f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkat menjadi sebesar 76,46 %; dan
  - g. Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkat sebesar 96,46 %;
  - h. Rasio Gini berkisar antara 0,360 – 0,374.



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2022**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada penuntasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta pengembangan potensi lokal.

Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022, rencana kerja pembangunan dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standar belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2022.

Indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2022 juga mempertimbangkan prioritas nasional dalam RPJMN 2019 – 2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (Delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 8 (Delapan) Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur kewilayahan serta 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

#### **A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Urusan pendidikan diarahkan dalam rangka pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 71,00%; Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 92,50%; Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 5,95%. Disamping itu juga dalam rangka mendukung pencapaian target APM SD/MI/Paket A 88,70%; APM SMP/MTs/Paket B 71,35%; APK PAUD 80,90%; Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,65%; Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV 88,10%; Persentase SD berakreditasi minimal B 97,90%; Persentase SMP berakreditasi minimal B 86,50%; Persentase PAUD dan PNF

berakreditasi minimal B 36,75%; APK SD/MI/Paket A 96,45%; APK SMP/MTs/Paket B 98,00%; APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun 1,5%; Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD 100%; Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP 100%; Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD 100%; Rasio guru/murid SD/MI 1:15; Rasio guru/murid SMP/MTs 1:15; Rasio guru/murid PAUD 1:10 dan Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan sebesar 100%.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum;
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

## **2. Kesehatan**

Indikasi program pada urusan kesehatan diharapkan mendukung target indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil 100%; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100%; Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%; Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100%; Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%; Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100%; Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100%; Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%; Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%; Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100%; Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100%; Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100%.

Disamping itu juga untuk mencapai target Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita 11,30%; Cakupan STBM 70%; Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%; Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%; Cakupan balita pneumonia yang ditangani 12%; Penderita diare yang ditangani 6%; Angka Kejadian HIV 0,19/1000

penduduk yang tidak terinfeksi HIV; Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 35/100.000 penduduk; Angka kejadian Malaria < 1/100.000; Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) 10 %; Angka Kejadian DBD 20/100.000; Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage) 95%; Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya 100%; Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya 100%; Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin 100%; Persentase pelayanan lab klinis dan lab air 100%; Persentase Sistem Informasi Kesehatan 60%; Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar 100%; Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar 90%; Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optik dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan 50%; Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan 50% serta Cakupan Desa Siaga Aktif 62%.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana dan prasana dasar masyarakat, Target yang diharapkan di tahun 2022 yaitu Persentase jalan kondisi baik sebesar 67,72%, Persentase jembatan kabupaten kondisi baik sebesar 64,22%; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 0,31%; Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun 70,50%; Persentase pelayanan ketataruangan 100%; Persentase pengendalian pemanfaatan ruang 100%; Persentase RT yang menempati hunian dengan akses air minum layak 94,02%; Persentase TPA/TPAST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik 100%; Persentase RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 1,27%; Persentase drainase perkotaan dalam kondisi

baik 61,47%; Persentase infrastruktur yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh kabupaten/kota 20%; Persentase gedung perkantoran dan Gedung non perkantoran yang dibangun 58%; Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi 10,42%; Persentase dokumen RTBL yang tersusun 20%; Persentase Kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya 20%; Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 100% Sedangkan jbaran program untuk mendukung prioritas tersebut antara lain:

- a. Program Penyelenggaraan Jalan;
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- h. Program Pengembangan Permukiman;
- i. Program Penataan Bangunan Gedung;
- j. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- k. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Sasaran untuk meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman menjadi fokus dari urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Target yang diharapkan di tahun 2022 yaitu Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100%, Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100%, Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani 0,05%; Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani 95,23%; Persentase prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik 49,65%; Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan 23,53%; Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU yang diterbitkan 100%, dengan program-program yang mendukung antara lain:

- a. Program Pengembangan Perumahan;
- b. Program Kawasan Permukiman;
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diarahkan pada sasaran untuk mempertahankan Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terkondisikan 100 %; meningkatkan persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 42%; persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100%; Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 92%; Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada 100%; Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 65%; Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 15 Menit; Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%; Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 72,78%; Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%; Persentase kelompok relawan bencana yang aktif 50%; Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi 61%.

Adapun program - program yang mendukung adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- c. Program Penanggulangan Bencana.

#### **6. Sosial**

Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Sosial diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial, penyempurnaan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi. Indikasi program pada urusan kesehatan diharapkan mendukung pencapaian target Persentase Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas 97%; Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti 65,50%; Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah 88,5%; Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100% dan Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan 100%.

Disamping itu juga untuk mendukung capaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial sebagai berikut ; Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebesar 25%; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 10%; Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 20%; Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 20% dan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial 30%.

Adapun program yang akan dilaksanakan dalam mencapai target di atas antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Rehabilitasi Sosial;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Program Penanganan Bencana;
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

## **B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

Urusan tenaga kerja diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta menurunkan angka pengangguran dengan target Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah 85%; Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 3,75%; Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota 21%; Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan 100%.

Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut di atas antara lain:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Program Hubungan Industrial.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan diarahkan untuk mendukung pemberdayaan sumberdaya perempuan dan anak, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan target Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD sebesar 4%; Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar 100%; Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan 100%; Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak 40,4 %; Persentase desa/kelurahan layak anak 70,1 %; Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar 100%. Program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Program Perlindungan Perempuan;
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- f. Program Perlindungan Khusus Anak.

## **3. Pangan**

Urusan Pangan mengarah pada Ketersediaan pangan utama/beras sebesar 272.990 ton; ketersediaan energi sebesar 3.030 kkal/kapita/hari; ketersediaan protein 85,2 gram/kapita/hari; persentase penanganan daerah rawan pangan sebesar 10%; persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman sebesar 80%; hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di daerah untuk menjaga pasokan atau ketersediaan pangan dan untuk menjaga stabilitas harga sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19, maka target tersebut diterjemahkan dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

#### **4. Pertanahan**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah pemberian izin lokasi di wilayah kabupaten, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian izin lokasi di Kabupaten Klaten telah dilakukan oleh pelayanan perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal, demikian pula program yang dilaksanakan jadi satu dengan penanaman modal. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten dilakukan oleh Kantor ATR Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten lebih diprioritaskan kepada pengadaan lahan untuk pembangunan daerah. Urusan ini lebih diprioritaskan untuk memanfaatkan tanah kas desa. Target tahun 2022 untuk urusan pertanahan antara lain Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan 100%; Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu 100%; Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya 42,50%; Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun 100%. Program terkait urusan pertanahan meliputi:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- d. Program Penatagunaan Tanah.

#### **5. Lingkungan Hidup**

Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Target yang diharapkan di tahun 2022 yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup 100%, Cakupan pemantauan kualitas air 100%, Cakupan pemantauan kualitas udara 100%, Cakupan pemantauan kualitas udara 100%; Persentase kampung iklim yang terbentuk 30%, Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik 100%; Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3 100%; Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang



diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 60%; Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup 100%; Persentase saka kalpataru yang dibina; Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten 3 orang; Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten 100%; Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani 100%; Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani 74,09% dan Persentase jumlah sampah yang berkurang 26%. Indikasi program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- i. Program Pengelolaan Persampahan.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk menata administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten, dengan target di tahun 2022 antara lain : Persentase Perekaman KTP elektronik 99,02%; Cakupan kepemilikan KK 97,9%; Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 50%; Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran 97%; Cakupan penerbitan akta kematian 100%; Cakupan penerbitan akta perkawinan 100%; Cakupan penerbitan akta perceraian 100%; Cakupan penerbitan akta pengesahan anak 100%; Cakupan penerbitan pengangkatan anak 100%. Persentase Ketersediaan database kependudukan 100% ; Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama 17,65%; Persentase ketersediaan profil

kependudukan tahunan 100%. Program-program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain:

- a. Program Pendaftaran Penduduk;
- b. Program Pencatatan Sipil;
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

#### **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk mencapai target di tahun 2021 yaitu: Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 100%; Persentase BUMDes berkembang dan Maju 12,79%; Persentase desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu 100%; Persentase PKK aktif 100%; Persentase Posyandu aktif 100%; Persentase Posyantek aktif 26,67%. Program-program pendukung Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- a. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

#### **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk mencapai target Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan 83,33%; Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan 85,71%; Angka pemakaian kontrasepsi/CPR 71,5%; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) 15,95%; Persentase Anggota BKB yang menjadi peserta KB 82%, Persentase Anggota BKR yang menjadi peserta KB 75,42%, Persentase Anggota BKL yang menjadi peserta KB 64,88%, Persentase Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB 63,29%.

Program pendukung pencapaian target bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

## **9. Perhubungan**

Target yang diharapkan di tahun 2022 yaitu Persentase kecelakaan lalu lintas 0,80%. Pembangunan di bidang urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dan meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan. Program pendukung bidang perhubungan yang akan dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media surat kabar dan media elektronik (radio dan televisi);
- b. Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui website pemerintah;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 60 sistem informasi untuk memberikan kemudahan akses dan data;
- d. Terlaksananya penanganan pelayanan seluruh pengaduan masyarakat; dan
- e. Meningkatnya kemampuan SDM bidang teknologi informasi.

Target yang ingin dicapai tahun 2022 antara lain Presentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 18,18%, Nilai Pemeringkatan keterbukaan informasi publik 100%, Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo 58,82%, Persentase penambahan akses internet di ruang publik 67,50%, dan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 62,96%. Program-program yang akan dilaksanakan pada bidang komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

## **11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Rencana program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan pada Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi sebanyak 23,93%; persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi sebanyak 8,8%; persentase

koperasi aktif sebesar 69,50%; persentase koperasi yang patuh sebanyak 24,83; persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya sebanyak 14,75%; persentase Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak 30,20%; Persentase koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan 18,2%; pertumbuhan usaha mikro sebanyak 0,13%; persentase UMKM yang melakukan kemitraan sebanyak 0,30%; dan persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan sebanyak 3,30%. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mengakibatkan pelaku usaha maupun lembaga koperasi mengalami kemunduran baik untuk penyediaan bahan baku, modal, tenaga kerja maupun produksinya, menurunnya omset penjualan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM); dan
- g. Program Pengembangan UMKM.

## **12. Penanaman Modal**

Urusan ini diorientasikan untuk mencapai target antara lain : Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Investasi sebesar 80%; Persentase Potensi Investasi yang Siap Ditawarkan sebesar 80%; Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sebesar 80%; Persentase Pengendalian Penanaman Modal sebesar 80%; Persentase Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar 80%. Dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak juga pada realisasi investasi baik PMDN maupun PMA dan juga berpengaruh pada pelaksanaan kerjasama di bidang investasi baik di tingkat daerah maupun regional, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diimplementasikan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Program Promosi Penanaman Modal;
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mencapai target Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 1,04%; Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 4,2%; Persentase atlet berprestasi 2,85%. Indikasi Program yang akan dilaksanakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka pencapaian target tersebut meliputi;

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

### **14. Statistik**

Urusan statistik lebih diprioritaskan untuk memperoleh dokumen statistik. Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standart data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia 30%. Program yang dilaksanakan untuk mendukung target tersebut adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

### **15. Persandian**

Urusan persandian lebih diprioritaskan untuk meningkatkan pengamanan informasi persandian yang terimplemtasi. Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik 35% dan Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/ tanda tangan elektronik) dalam komunkasi Perangkat Daerah 29,41% Program yang dilaksanakan untuk mendukung target tersebut adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

### **16. Kebudayaan**

Urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah dengan target Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan 20%; Persentase Pelaku Seni Tradisional yang kompeten 30%; Persentase Pembinaan Sejarah 30%; dan Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan 14%. Adapun program yang direncanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan;



- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- c. Program Pembinaan Sejarah;
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

### **17. Perpustakaan**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perpustakaan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan target Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 49.962 eksemplar dan Persentase perpustakaan yang dibina sebesar 21%.

### **18. Kearsipan**

Pelaksanaan urusan kearsipan diarahkan untuk mencapai target Persentase arsip yang diakuisisi 77%; Persentase pengawasan kearsipan internal 100%; Arsip usul musnah 60 Meter lari dan Persentase arsip yang dialihmediakan sebesar 20%. Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target di bidang kearsipan meliputi:

- a. Program Pengelolaan Arsip;
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

## **C. URUSAN PILIHAN**

### **1. Kelautan dan Perikanan**

Program Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap sebanyak 543 ton; produksi perikanan budidaya sebanyak 29.165 ton; cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum 15%; dan jumlah produk olahan ikan 1.168.588 kg. Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kelautan dan perikanan, yang menyebabkan terjadinya penumpukan hasil perikanan dan meningkatnya harga pakan ikan serta untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, diperlukan adanya pelaksanaan guna mengatasi permasalahan tersebut melalui program dan kegiatan:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; dan
- d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

### **2. Pariwisata**

Urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan Presentase Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola sebanyak 73%, Tingkat Intensitas promosi pariwisata sebanyak 68%;



Jumlah Pelaku Ekraf yang difasilitasi HKI sebanyak 10 orang; Persentase SDM pariwisata yang kompeten sebanyak 25%. Guna mendukung dengan ditetapkannya Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan guna mengatasi adanya dampak pandemi Covid-19 serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya pelaksanaan melalui program:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pemasaran Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

### **3. Pertanian**

Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pertanian adalah Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebanyak 66,99 Ku/Ha; Produktivitas cabe sebanyak 8,98 Ku/Ha; Produktivitas tembakau rajang sebanyak 12,2 Ku/Ha dan Produktivitas tembakau asepan 9,83 Ku/Ha; Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional sebanyak 37%; Persentase Ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian sebanyak 35%; Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) sebanyak 286.000 ekor; Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebanyak 22%; Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya sebanyak 58%; dan Persentase kelompok tani madya dan utama sebanyak 8,63%. Dengan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunnya permintaan pasar dan tidak stabilnya harga hasil pertanian dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, menurunnya hasil produksi pertanian, tidak stabilnya harga pupuk dan pakan ternak dikarenakan suplay yang tidak normal, kurangnya tenaga kerja serta kelembagaan petani. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;



- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

#### **4. Kehutanan**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait urusan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Klaten tidak ada wilayah TAHURA, sehingga untuk urusan ini Kabupaten Klaten di tahun 2022 tidak memiliki kewenangan.

#### **5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral yang merupakan kewenangan kabupaten adalah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Hingga saat ini di Kabupaten Klaten belum ditemukan sumber panas bumi, sehingga tidak ada program bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **6. Perdagangan**

Urusan Perdagangan diorientasikan pada target capaian yaitu Persentase rekomendasi ijin usaha perdagangan yang diterbitkan 83%; Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi sebanyak 42%; Persentase PKL yang terbina sebanyak 43,8%; jumlah pendapatan retribusi pasar sebanyak Rp.4.650.000.000,00; Persentase pasar yang diawasi sebanyak 100%; Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting ( 18 bapokting ) sebanyak 6%; Persentase Kinerja Pupuk sebanyak 96%; Jumlah komoditas yang mampu ekspor sebanyak 2 jenis; Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang sebanyak 65%; dan Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri sebanyak 5 orang. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 di sektor perdagangan menyebabkan omset penjualan menurun, dikarenakan banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi, lemahnya tingkat perlindungan konsumen, perlunya pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;





- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
- d. Program Pengembangan Ekspor;
- e. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen; dan
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

## **7. Perindustrian**

Urusan Perindustrian diorientasikan pada target capaian yaitu Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina sebanyak 17,31%; dan Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebanyak 14,56%. Dengan terdampaknya Covid-19 berakibat pada keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), berkurangnya alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri menurun, terganggunya suplay bahan baku serta berkurangnya permintaan pasar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya implementasi program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
- b. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional.

## **8. Transmigrasi**

Urusan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka pencapaian salah satu tujuan Pemerintah Daerah dalam hal pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi sebesar 75%. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi. Program yang mendukung bidang transmigrasi adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

## **D. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **1. Sekretariat Daerah**

Urusan penunjang pada Sekretariat Daerah diarahkan untuk pencapaian target Persentase dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusun 100%; Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi 100%; Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan standart pelayanan publik 100%; Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik 100%; Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik 100%; Persentase layanan dukungan

administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP 100%; Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama 100%; Persentase Kecamatan mencapai kategori "Wasana" 19,23%; Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100%; Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan 90%; Persentase kasus hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum; Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan 100%; Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement 100%; Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis 100%; Pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah 5%; Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan 5%; Persentase Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti 100%; Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan 100%;

Adapun Program yang untuk mendukung urusan Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Program Administrasi Umum.

## **2. Sekretariat DPRD**

Urusan penunjang pada Sekretariat DPRD diarahkan untuk pencapaian target Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda 75%; Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran 100%; Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan 100%. Program pendukung urusan bidang sekretariat daerah adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

## **3. Perencanaan**

Program prioritas pada urusan bidang perencanaan diharapkan mampu mendukung tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD 100%; status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD 77%; Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan 100%;

Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100%.

Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung urusan bidang perencanaan antara lain:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **4. Keuangan**

Indikasi program pada urusan bidang keuangan mendukung target yaitu Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir) sebanyak 100%; Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati) sebanyak 100%; Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah sebanyak 84%; Persentase barang milik daerah yang teregistrasi sebanyak 100%; dan Rasio PAD sebanyak 10%. Program yang dilaksanakan untuk mendukung target di atas adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Program yang dilaksanakan untuk mendukung urusan keuangan meliputi:

- a. Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **5. Kepegawaian**

Urusan Kepegawaian diarahkan untuk pencapaian target Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi 80%; Persentase Kinerja ASN bernilai baik 90%; Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan 90%; Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah 75%. Program pendukung yang dilaksanakan pada urusan kepegawaian adalah Program Kepegawaian Daerah.

#### **6. Pendidikan dan Pelatihan**

Pelaksanaan urusan bidang Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk pencapaian target persentase ASN yang meningkat kompetensinya 80%. Program yang akan dilaksanakan pada urusan bidang pendidikan dan pelatihan yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### **7. Penelitian dan Pengembangan**



Bidang urusan Penelitian dan Pengembangan difokuskan untuk pencapaian target Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 54,8; Pertumbuhan inovasi perangkat daerah 14,68%. Program yang dilaksanakan untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

#### **8. Pengelolaan Perbatasan**

Program yang dilaksanakan untuk pengelolaan perbatasan adalah Program Pengelolaan Perbatasan.

#### **E. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)**

Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mencapai target Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 s.d 4 terlaksana 100%; Persentase pelaksanaan pengawasan khusus 100%; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1 s.d 4 100% dan Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut didukung dengan program sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

#### **F. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)**

Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mencapai target Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 100%; Persentase lembaga masyarakat aktif 93%; Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan 96%; Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani 96%. Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu 95% dan Persentase desa tertib adminitrasi 94%.

Program yang dilaksanakan di wilayah kecamatan meliputi:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum;
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

#### **G. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)**

Program yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk mencapai target Persentase kelompok masyarakat yang

memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan sebesar 1 %; Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik 2%; Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu 60%; Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan 100%; Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk 34 %; Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar 6 %; Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan 100%.

Program yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan;
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Jabaran rencana program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Daerah tahun 2022 berdasarkan Perangkat Daerah disajikan dalam **LAMPIRAN** Rancangan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

## 5.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022

Ringkasan pagu indikatif pendanaan program dan kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1.  
Ringkasan Pagu Indikatif Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah

<b>NO.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>	<b>PROPORSI %</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	DINAS PENDIDIKAN	932.219.554.000	34,89
2.	DINAS KESEHATAN	392.011.717.000	14,67
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	203.270.931.000	7,61
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.515.005.000	0,58
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.915.241.000	0,33
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.645.693.000	0,40
7.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	25.062.273.000	0,94

<b>NO.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>	<b>PROPORSI %</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
	ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
8.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.275.152.000	0,98
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.267.109.000	0,23
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.720.328.000	0,36
11.	DINAS PERHUBUNGAN	28.575.178.000	1,07
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.061.025.000	0,53
13.	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	25.418.414.000	0,95
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.060.218.000	0,41
15.	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	14.478.174.000	0,54
16.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.997.604.000	0,19
17.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	53.025.945.000	1,98
18.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.275.538.000	0,38
	SEKRETARIAT DAERAH	47.235.019.000	1,77
19.	SEKRETARIAT DPRD	58.740.905.000	2,20
20.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.756.770.000	0,40
21.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	629.077.602.000	23,54
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.831.083.000	0,56
23.	INSPEKTORAT	18.272.978.000	0,68
24.	KECAMATAN PRAMBANAN	3.437.566.000	0,13
25.	KECAMATAN GANTIWARNO	2.836.951.000	0,11
26.	KECAMATAN WEDI	3.593.295.000	0,13
27.	KECAMATAN BAYAT	3.009.549.000	0,11
28.	KECAMATAN CAWAS	3.572.253.000	0,13
29.	KECAMATAN TRUCUK	2.822.658.000	0,11
30.	KECAMATAN KEBONARUM	2.784.093.000	0,10
31.	KECAMATAN JOGONALAN	2.836.869.000	0,11
32.	KECAMATAN MANISRENGGO	3.315.701.000	0,12
33.	KECAMATAN KARANGNONGKO	3.342.776.000	0,13
34.	KECAMATAN CEPER	3.271.916.000	0,12
35.	KECAMATAN PEDAN	3.048.304.000	0,11
36.	KECAMATAN KARANGDOWO	3.286.136.000	0,12
37.	KECAMATAN JUWIRING	3.128.463.000	0,12
38.	KECAMATAN WONOSARI	3.487.752.000	0,13
39.	KECAMATAN DELANGGU	2.980.495.000	0,11
40.	KECAMATAN POLANHARJO	2.914.455.000	0,11
41.	KECAMATAN KARANGANOM	2.959.637.000	0,11
42.	KECAMATAN TULUNG	3.318.274.000	0,12
43.	KECAMATAN JATINOM	4.310.163.000	0,16
44.	KECAMATAN KEMALANG	3.299.273.000	0,12
45.	KECAMATAN NGAWEN	2.935.007.000	0,11
46.	KECAMATAN KALIKOTES	3.061.383.000	0,11
47.	KECAMATAN KLATEN UTARA	6.345.427.000	0,24
48.	KECAMATAN KLATEN TENGAH	11.971.235.000	0,45

<b>NO.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>	<b>PROPORSI %</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
49.	KECAMATAN KLATEN SELATAN	4.090.105.000	0,15
50.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.157.759.000	0,19
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.671.826.951.200</b>	<b>100,00</b>

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Indikator kinerja daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena bisa memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan juga pencapaian keberhasilan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja tahunan juga menunjukkan ketepatan arah kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir tahun 2022 dapat tercapai.

Indikator kinerja daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilihat dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan.

#### **6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan Daerah tahun 2022 ditetapkan target indikator kinerja utama tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2022 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Indikator Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>
1	Indeks Pembangunan Masyarakat	Indeks	0,65
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,01
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,52
4	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	76,11
5	Rasio konektivitas	Rasio	0,12
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM);	Indeks	76,46
7	Persentase Penduduk Miskin	%	12,49
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,46
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	54,68



## 6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek. Jabaran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta target tahun 2022 disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Kabupaten Klaten Tahun 2022

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target
(1)		(2)	(3)
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>		
1)	Indeks Pembangunan Masyarakat	Indeks	0,65
2)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,01
3)	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,52
4)	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	76,11
5)	Rasio konektivitas	Rasio	0,12
6)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM);	Indeks	76,46
7)	Persentase Penduduk Miskin	%	12,49
8)	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,46
9)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	54,68
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>		
<b>1)</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>		
11)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52
12)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,64
<b>2)</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>		
13)	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,84
<b>3)</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
14)	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06
15)	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47
16)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5
18)	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88,4
19)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32
<b>4)</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
19)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32
<b>5)</b>	<b>Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;</b>		
20)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92
21)	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	92,40
<b>6)</b>	<b>Urusan Sosial</b>		
22)	Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5
<b>7)</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>		
23)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16
<b>8)</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>		
24)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	73,34
25)	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	725
<b>9)</b>	<b>Urusan Pangan</b>		
26)	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,50
<b>10)</b>	<b>Urusan Pertanian</b>		
27)	Persentase lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	56,63
<b>11)</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>		
28)	Indeks kualitas air	Indeks	36,63
29)	Indeks kualitas udara	Indeks	77,80

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target
(1)		(2)	(3)
30)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,9
31)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	59,95
<b>12)</b>	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		
31)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	83,28
<b>13)</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
32)	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6894
<b>14)</b>	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
33)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,28
<b>15)</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>		
34)	Kinerja Lalu Lintas ( <i>Level Of Service</i> )	Nilai	0,62
<b>16)</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>		
35)	Indeks SPBE	Indeks	3,2
<b>17)</b>	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>		
36)	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,13
<b>18)</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>		
37)	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	10
38)	Persentase peningkatan investasi PMA	%	1
<b>19)</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>		
40)	Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga	%	38
<b>20)</b>	<b>Urusan Statistik</b>		
41)	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	30
<b>21)</b>	<b>Urusan Persandian</b>		
42)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	60
<b>22)</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>		
43)	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5
<b>23)</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>		
44)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	77,95
<b>24)</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>		
45)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Indeks	77,95
<b>25)</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>		
46)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	29.708
<b>26)</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>		
47)	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,13
<b>27)</b>	<b>Urusan Pertanian</b>		
48)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,63
<b>28)</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>		
49)	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	1,24
<b>29)</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>		
50)	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	1,47
<b>37)</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
51)	Peringkat/ Nilai SAKIP	Skor	62
52)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82
<b>38)</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		
53)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	77,98
<b>31)</b>	<b>Unsur Penunjang Perencanaan</b>		
54)	Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	23,00
<b>32)</b>	<b>Unsur Penunjang Keuangan</b>		
55)	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
<b>33)</b>	<b>Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>		
56)	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	180
<b>34)</b>	<b>Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>		

<b>Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
57)	Indeks Inovasi Daerah	Skor	2.001
<b>39)</b>	<b>Unsur Penunjang Pengawasan</b>		
58)	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	81
<b>37)</b>	<b>Unsur Penunjang Kewilayahan</b>		
59)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	Indeks	80,49
<b>38)</b>	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
60)	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100,00
<b>C</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>		
61)	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,10

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan untuk periode tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 ini membuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja beserta pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan pagu indikatif. RKPD ini disusun untuk menjamin sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang selanjutnya dipedomani pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 menjadi dasar/landasan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 yang dalam hal pentahapan penyusunannya bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Sebagai upaya menjamin keselarasan antar dokumen, perlu ditempuh langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah dan semua masyarakat/stakeholder/pemangku kepentingan berkewajiban mendukung dan turut berpartisipasi dalam penentuan arah pembangunan yang ingin dicapai.
2. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan :
  - a. Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 harus dijadikan acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 serta wajib melakukan harmonisasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.
  - b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan melakukan pendekatan pencapaian kinerja yang akan dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja pembangunan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah berbasis pada indikator kinerja pencapaian tujuan pada masing-masing urusan bidang

- penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian kinerja periode sebelumnya dan isu strategis serta permasalahan pembangunan yang ada.
- c. Dalam hubungan dengan kerangka keuangan daerah, kedudukan RKPD Kabupaten Klaten merupakan pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dalam hal ini Renja Perangkat Daerah menjadi dasar perumusan dan penentuan pagu indikatif/pendanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah wajib merumuskan prioritas pada masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2022 dalam upaya pencapaian target sasaran dirumuskan ke dalam tema RKPD Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal” sehingga penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah diarahkan pada pencapaian tersebut. Keberhasilan pembangunan daerah melalui pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam program pembangunan akan dapat dicapai secara optimal diperlukan dukungan penuh dari semua pihak bersama masyarakat. Selain itu, keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap, mental dan semangat serta tekad keinginan untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera.

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

# **LAMPIRAN**

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

**DAFTAR ISI**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022**

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)</b>		
<b>1.01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
1.01	<i>DINAS PENDIDIKAN</i>	7	7
1.01	<i>TK NEGERI PEMBINA KLATEN</i>	8	8
1.01	<i>SD NEGERI SE-KABUPATEN</i>	8	8
1.01	<i>SMP NEGERI SE-KABUPATEN</i>	8	8
1.01	<i>SPNF SKB KLATEN</i>	8	9
<b>1.02</b>	<b>KESEHATAN</b>		
1.02	<i>DINAS KESEHATAN</i>	9	17
1.02	<i>RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN</i>	17	18
1.02	<i>PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN</i>	18	116
1.03	<b>PEKERJAAN UMUM &amp; PENATAAN RUANG</b>		
1.03	<i>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>	116	124

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>		
1.04	<i>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>	124	128
<b>1.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
1.05	<i>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</i>	128	132
1.05	<i>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</i>	132	135
<b>1.06</b>	<b>SOSIAL</b>		
1.06	<i>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i>	135	140
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB (NON PALAYANAN DASAR)</b>		
<b>2.07</b>	<b>TENAGA KERJA</b>		
2.7	<i>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</i>	141	142
<b>2.08</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
2.08	<i>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i>	142	147



KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2.09</b>	<b>PANGAN</b>		
2.09	<i>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</i>	147	151
<b>2.10</b>	<b>PERTANAHAN</b>		
2.10	<i>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>	151	151
<b>2.11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		
2.11	<i>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</i>	151	156
<b>2.12</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
2.12	<i>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>	156	159
<b>2.13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
2.13	<i>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>	159	162
<b>2.14</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
2.14	<i>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i>	162	165
<b>2.15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>		

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15	<i>DINAS PERHUBUNGAN</i>	165	169
<b>2.16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
2.16	<i>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>	169	172
<b>2.17</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>		
2.17	<i>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN</i>	172	176
<b>2.18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>		
2.18	<i>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</i>	176	179
<b>2.19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
2.19	<i>DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA</i>	179	182
<b>2.20</b>	<b>STATISTIK</b>		
2.20	<i>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>	182	182
<b>2.21</b>	<b>PERSANDIAN</b>		
2.21	<i>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>	182	183
<b>2.22</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>		

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
2.22	<i>DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA</i>	183	185
<b>2.23</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>		
2.23	<i>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</i>	185	186
<b>2.24</b>	<b>KEARSIPAN</b>		
2.24	<i>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</i>	186	187
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
3.25	<i>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</i>	187	188
<b>3.26</b>	<b>PARIWISATA</b>		
3.26	<i>DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA</i>	188	188
<b>3.27</b>	<b>PERTANIAN</b>		
3.27	<i>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</i>	188	196
<b>3.30</b>	<b>PERDAGANGAN</b>		
3.3	<i>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN</i>	197	199

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>3.31</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>		
3.31	<i>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</i>	199	201
<b>3.32</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>		
3.32	<i>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</i>	201	201
<b>4</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH</b>		
4.01	<i>BAGIAN PEMERINTAHAN</i>	201	203
4.01	<i>BAGIAN HUKUM</i>	203	204
4.01	<i>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>	204	206
4.01	<i>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</i>	206	207
4.01	<i>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</i>	207	209
4.01	<i>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</i>	209	210
4.01	<i>BAGIAN UMUM</i>	210	212
4.01	<i>BAGIAN ORGANISASI</i>	213	214
4.01	<i>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</i>	214	215
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	215	218

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>5</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>		
5.01	<i>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>	218	223
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>		
5.02	<i>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH</i>	223	228
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		
5.03	<i>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</i>	228	230
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
5.04	<i>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</i>	230	230
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
5.05	<i>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>	230	231
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
6.01	<i>INSPEKTORAT DAERAH</i>	231	235

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
7.01	<b>KECAMATAN</b>		
7.01	<i>KECAMATAN PRAMBANAN</i>	235	238
7.01	<i>KECAMATAN GANTIWARNO</i>	238	241
7.01	<i>KECAMATAN WEDI</i>	241	244
7.01	<i>KECAMATAN BAYAT</i>	244	247
7.01	<i>KECAMATAN CAWAS</i>	247	251
7.01	<i>KECAMATAN TRUCUK</i>	251	254
7.01	<i>KECAMATAN KEBONARUM</i>	254	257
7.01	<i>KECAMATAN JOGONALAN</i>	257	260
7.01	<i>KECAMATAN MANISRENGGO</i>	260	263
7.01	<i>KECAMATAN KARANGNONGKO</i>	263	266
7.01	<i>KECAMATAN CEPER</i>	266	269
7.01	<i>KECAMATAN PEDAN</i>	269	272
7.01	<i>KECAMATAN KARANGDOWO</i>	272	275
7.01	<i>KECAMATAN JUWIRING</i>	275	279

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
7.01	KECAMATAN WONOSARI	279	282
7.01	KECAMATAN DELANGGU	282	285
7.01	KECAMATAN POLANHARJO	285	289
7.01	KECAMATAN KARANGANOM	289	292
7.01	KECAMATAN TULUNG	292	296
7.01	KECAMATAN JATINOM	296	299
7.01	KELURAHAN JATINOM	299	300
7.01	KECAMATAN KEMALANG	299	303
7.01	KECAMATAN NGAWEN	303	306
7.01	KECAMATAN KALIKOTES	306	309
7.01	KECAMATAN KLATEN UTARA	309	312
7.01	KELURAHAN BARENGLOR	312	314
7.01	KELURAHAN GERGUNUNG	314	315
7.01	KECAMATAN KLATEN TENGAH	315	318
7.01	KELURAHAN BARENG	318	319
7.01	KELURAHAN KABUPATEN	319	320

KODE	BIDANG URUSAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
(1)	(2)	(3)	(4)
7.01	<i>KELURAHAN KLATEN</i>	320	321
7.01	<i>KELURAHAN TONGGALAN</i>	321	322
7.01	<i>KELURAHAN BUNTALAN</i>	322	323
7.01	<i>KELURAHAN MOJAYAN</i>	323	324
7.01	<i>KECAMATAN KLATEN SELATAN</i>	324	327
7.01	<i>KELURAHAN GAYAMPRI</i>	327	329
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
8.01	<i>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>	329	333





Pemerintah Daerah  
Kabupaten Klaten

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2022**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>1.575.481.825.000,0 0</b>				<b>1.930.372.201.000,00</b>	
	<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>932.219.554.000,00</b>				<b>1.027.915.935.000,00</b>	
<b>1.</b>	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>764.300.831.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>758.736.503.000,00</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	<b>100 %</b>	<b>333.600.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>285.000.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun</i>	<b>4,00 Dokumen</b>	18.400.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>4 Dokumen</b>	18.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun</i>	<b>2 Dokumen</b>	46.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>2 Dokumen</b>	40.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun</i>	<b>2 Dokumen</b>	30.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>2 Dokumen</b>	30.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen LKJIP tersusun</i>	<b>1 Dokumen</b>	55.200.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>1 Dokumen</b>	45.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun</i>	<b>3 Dokumen</b>	184.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>3 Dokumen</b>	152.000.000,00	
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	<b>100 %</b>	<b>759.652.283.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>754.224.773.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya</i>	<b>5401 Orang</b>	759.582.283.000,00	Dinas Pendidikan	DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	<b>6000 Orang</b>	754.159.773.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun</i>	<b>4 Dokumen</b>	70.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>4 Dokumen</b>	65.000.000,00	
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</i>	<b>100 %</b>	<b>1.120.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>1.120.000.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun</i>	<b>4 Dokumen</b>	1.120.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>4 Dokumen</b>	1.120.000.000,00	
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</i>	<b>100 %</b>	<b>78.200.000,00</b>	(Dinas Pendidikan, KAB. KLATEN)		<b>100 %</b>	<b>65.000.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<b>5800 Dokumen</b>	78.200.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>5800 Dokumen</b>	65.000.000,00	
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	<b>100 %</b>	<b>1.267.548.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>1.236.210.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia</i>	<b>11 Unit</b>	20.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>21 Unit</b>	22.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia</i>	<b>44 Unit</b>	570.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>74 Unit</b>	557.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia</i>	<b>8 Eksemplar</b>	25.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<b>72 Eksemplar</b>	31.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	242 Kali	72.500.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	315 Kali	72.500.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250 Kali	300.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	276 Kali	303.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	2 Unit	280.048.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	250.000.000,00	
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>455.400.000,00</b>			100 %	<b>250.000.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 Unit	220.800.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	234.600.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	250.000.000,00	
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>818.800.000,00</b>			100 %	<b>1.008.000.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	230.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	281.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	66 Orang	588.800.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	72 Orang	727.000.000,00	
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>575.000.000,00</b>			100 %	<b>547.520.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	250 Unit	230.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	227 Unit	255.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	6 Unit	322.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Unit	265.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1 Unit	23.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	27.520.000,00	
<b>2.</b>	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<i>APM SD/MI/Paket A</i>	88.70 %	<b>52.302.516.000,00</b>			88.95 %	<b>157.148.245.000,00</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
			<i>APM SMP/MTs/Paket B APK PAUD Persentase Penduduk yang berusia &gt;15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV Persentase SD berakreditasi minimal B Persentase SMP berakreditasi minimal B Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs /Paket B APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun</i>	71.35 % 80.90 % 99.65 % 88.10 % 97.90 % 86.50 % 36.75 % 96.45 % 98 % 1.50 %				71.60 % 89.15 % 99.75 % 88.70 % 98 % 86.90 % 36.95 % 96.90 % 98.45 % 1.85 %		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.01.1-1.0-0-0.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik Persentase siswa SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan Persentase SD terakreditasi Persentase guru SD bersertifikat pendidik	70 % 63 % 99.70 % 41 %	17.740.801.000,00			73 % 64 % 99.80 % 42 %	80.218.353.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru dibangun	3 Ruang	644.000.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Ruang	300.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS terbangun	13 Ruang	1.000.000.000,00	SD Negeri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Ruang	700.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan terbangun	1 Unit	156.400.000,00	SD Negeri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Unit	170.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah dibangun	1 Unit	174.800.000,00	SD Negeri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Unit	190.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas direhab	20 Ruang	750.000.000,00	SD Negeri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Ruang	750.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan direhab	6 Ruang	276.000.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Ruang	300.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	20 paket	460.000.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 paket	400.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa sekolah dasar menerima perlengkapan dasar peserta didik	1380 siswa	690.000.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1400 siswa	900.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	56945 Siswa	36.800.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	56945 Siswa	40.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	13 Paket	2.938.841.000,00	SD Negeri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Paket	3.490.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa mengikuti ujian/assessment	16330 Siswa	517.408.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15579 Siswa	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah guru mengikuti workshop/pelatihan	150 Pendidik	276.000.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 Pendidik	300.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jenis lomba siswa	40 Jenis	572.608.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Jenis	500.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jenis pengembangan karir PTK pada jenjang SD	5 Jenis	482.264.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Jenis	450.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD terakreditasi	738 Sekolah	500.000.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	738 Sekolah	500.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			7.139.600.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		69.978.353.000,00	
			Jumlah SD penerima BOS	660 Sekolah				660 Sekolah		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SD	738 Orang	1.126.080.000,00	SD Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	738 Orang	1.000.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik Persentase siswa SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan Persentase SMP terakreditasi Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	77 % 60 % 96 % 55 %	15.110.600.000,00			78 % 61 % 97 % 55.30 %	57.397.972.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir dibangun	5 unit	300.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 unit	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah dibangun	5 unit	300.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 unit	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana SMP dibangun	8 unit	750.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	700.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung SMP direhab	5 unit	500.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	650.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas direhab	7 ruang	500.000.000,00	SMP Negeri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8 ruang	600.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru direhab	7 ruang	500.000.000,00	SMP Negeri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9 ruang	650.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS direhab	7 ruang	500.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 ruang	650.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP direhab	4 ruang	300.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 ruang	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium SMP direhab	4 ruang	300.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3 ruang	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/aula SMP direhab	3 ruang	300.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 ruang	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir direhab	15 unit	300.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah direhab	9 unit	300.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas SMP direhab	5 unit	276.000.000,00	SMP Negeri	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5 unit	300.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan mebel sekolah	8 paket	920.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 paket	1.000.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	10 paket	690.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 paket	500.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa SMP menerima perlengkapan dasar peserta didik	1408 siswa	850.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1408 siswa	900.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan	27098 siswa	138.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27098 siswa	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	7 paket	1.000.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 paket	1.000.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa mengikuti ujian/assessment	15592 siswa	184.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15534 siswa	200.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru mengikuti workshop/pelatihan	115 pendidik	368.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	116 pendidik	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jenis lomba siswa	20 jenis	690.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 jenis	650.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jenis pengembangan karir PTK pada jenjang SMP	5 jenis	460.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 jenis	450.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	116 sekolah	400.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	116 sekolah	850.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP penerima BOS	65 Sekolah	4.008.600.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	65 Sekolah	45.897.972.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SMP	116 sekolah	276.000.000,00	SMP Negeri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	116 sekolah	250.000.000,00	
	<b>1.01.1-1.0-0-0.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<i>Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik Persentase siswa PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan Persentase PAUD terakreditasi Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik</i>	<i>46 % 0.08 % 40.12 % 35.72 %</i>	<b>17.734.496.000,00</b>			<i>46.70 % 1.30 % 42.32 % 55.40 %</i>	<b>17.776.210.000,00</b>	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana dan prasarana PAUD dibangun	1 unit	114.000.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1 unit	75.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru direhab	1 ruang	220.800.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 ruang	100.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD	1 paket	70.000.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	50.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			174.800.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		100.000.000,00	
			Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1 paket				1 paket		
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik mengikuti pembelajaran PAUD	312 Orang	138.000.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Orang	172.980.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah pendidik PAUD mengikuti workshop/pelatihan	300 orang	92.000.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 orang	90.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jenis pengembangan karir PTK jenjang PAUD	5 jenis	132.296.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 jenis	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga PAUD mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen	160 lembaga	276.000.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 lembaga	250.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima BOP	1134 Lembaga	16.332.600.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1150 Lembaga	16.538.230.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02 2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah pengelola Dana BOP PAUD	1134 orang	184.000.000,00	Lembaga PAUD di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1150 orang	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.01.1-1.0-0-0.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sarana dan prasarana PKBM dalam kondisi baik 76 % Persentase siswa PKBM yang menerima pembebasan biaya pendidikan 12 % Persentase PKBM terakreditasi	46 % 76 % 12 %	1.716.619.000,00			48 % 77 % 16 %	1.755.710.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana, prasarana direhab/dibangun	1 Unit	143.219.000,00	SPNF SKB Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	100.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Paket	70.000.000,00	SPNF SKB Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Paket	-	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik mengikuti pendidikan nonformal/kesetaraan	914 orang	55.200.000,00	SPNF SKB Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	914 orang	273.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tutor mengikuti workshop/ pelatihan	200 Orang	69.000.000,00	SPNF SKB Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 Orang	50.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga pendidikan nonformal/ kesetaraan mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen	18 Lembaga	92.000.000,00	SPNF SKB Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Lembaga	100.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PKBM penerima BOP Kesetaraan	10,00 lembaga	1.187.200.000,00	SPNF SKB Klaten	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	10 lembaga	1.132.710.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.02.2.04.20	Rehabilitasi Sedang/Berat laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhab	1 unit	100.000.000,00	SPNF SKB Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	100.000.000,00	
3.	1.01.1-1.0-0-0.01.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD 100 % Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP 100 % Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD 100 %	100 % 100 % 100 %	633.449.000,00			100 % 100 % 100 %	639.527.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.1-1.0-0-0.01.03.2.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	98.50 %	503.449.000,00			99 %	494.527.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum mulok	600 orang	503.449.000,00	SD, SMP	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600 orang	494.527.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.03.2.02	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal	98 %	130.000.000,00			98.50 %	145.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru mengikuti penyusunan Kompetensi Dasar muatan lokal	70 orang	55.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	70 orang	70.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru mengikuti penyusunan silabus muatan lokal	100 orang	75.000.000,00	Dinas Pendidikan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 orang	75.000.000,00	
4.	1.01.1-1.0-0-0.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			12.775.654.000,00				9.177.908.000,00	Dinas Pendidikan
			Rasio guru/murid SD/MI Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio guru/murid PAUD	1 : 15 rasio 1 : 15 rasio 1 : 10 rasio				1 : 15 rasio 1 : 15 rasio 1 : 10 rasio		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.01.1-1.0-0-0.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam	86 %	12.775.654.000,00			88 %	9.177.908.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	10760 Orang	11.275.654.000,00	SD, SMP, PAUD, PNF	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10560 Orang	7.677.908.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam	5000 Orang	1.500.000.000,00	SD, SMP, PAUD, PNF	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5000 Orang	1.500.000.000,00	
5.	1.01.1-1.0-0-0.01.06	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan	100 %	92.504.000,00			100 %	99.152.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.1-1.0-0-0.01.06.2.01	<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	97 %	92.504.000,00			97.25 %	99.152.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidik mengikuti pembinaan dalam penggunaan bahasa dan apresiasi sastra	500 pendidik	46.504.000,00	SD, SMP, PAUD, PNF	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 pendidik	49.152.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis lomba minat dan budaya baca bahasa Jawa	5 Jenis	46.000.000,00	SD, SMP, PAUD, PNF	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Jenis	50.000.000,00	
6.	1.01.1-1.0-0-0.01.0001.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	38.949.000,00			100 %	38.949.000,00	TK Negeri Pembina Klaten
	1.01.1-1.0-0-0.01.0001.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			13.949.000,00				13.949.000,00	
			Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %		(TK Negeri Pembina, KAB. KLATEN)		100 %		
	1.01.1-1.0-0-0.01.0001.1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	2.000.000,00	TK Negeri Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 unit	2.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.0001.1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 Unit	7.000.000,00	TK Negeri Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	7.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.0001.1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	4 Eksemplar	4.949.000,00	TK Negeri Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Eksemplar	4.949.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.0001.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	25.000.000,00	(TK Negeri Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	25.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.0001.1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	8.000.000,00	TK Negeri Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	8.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0.01.0001.1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	1 Orang	17.000.000,00	TK Negeri Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Orang	17.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
7.	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0002.0 2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM SD/MI/Paket A APK SD/MI/Paket A Persentase SD berakreditasi minimal B	88,70 % 96,45 % 97,90 %	62.305.461.000,00			88.95 % 96.90 % 98 %	62.305.461.000,00	SD Negeri
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0002.0 2.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Persentase siswa SD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikan	63 %	62.305.461.000,00	(SDN di Klaten, KAB. KLATEN)		63 %	62.305.461.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0002.1. 01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD penerima BOS	660 Sekolah	62.305.461.000,00	SDN di Klaten	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0 Sekolah	62.305.461.000,00	
8.	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0003.0 2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM SMP/MTs/Paket B APK SMP/MTs /Paket B Persentase SMP berakreditasi minimal B	71,35 % 98,00 % 86,50 %	39.316.690.000,00			71.60 % 98.45 % 86.90 %	39.316.690.000,00	SMP Negeri
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0003.0 2.2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Persentase siswa SMP menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikan	60 %	39.316.690.000,00	(SMPN di Klaten, KAB. KLATEN)		60 %	39.316.690.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0003.1. 01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP penerima BOS	65 Sekolah	39.316.690.000,00	SMPN di Klaten	DAK Non Fisik-BOS Reguler	65 Sekolah	39.316.690.000,00	
9.	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	308.500.000,00			100 %	308.500.000,00	SPNF SKB Klaten
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.0 1.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	35.500.000,00	(SKB Cawas Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	35.500.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 Unit	8.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	8.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	6 Unit	10.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	10.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	30 Eksemplar	2.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Eksemplar	2.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	15 Kali	12.500.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Kali	12.500.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	26 Kali	3.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	26 Kali	3.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.0 1.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	30.000.000,00	(SKB Cawas Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	30.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	30.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	30.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.0 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			103.000.000,00				103.000.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		(SKB cawas Klaten, KAB. KLATEN)		100 %		
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	23.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	23.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	16 Unit	15.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Unit	15.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.1. 01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	65.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6500 Orang	65.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0.0-0.01.0004.0 1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	140.000.000,00	(SKB Cawas Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.01.1-1.0-0-0-0.01.0004.1. 01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	2 Unit	5.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	5.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0-0.01.0004.1. 01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	3 Unit	130.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	130.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0-0.01.0004.1. 01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	5 Unit	5.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	5.000.000,00	
10.	1.01.1-1.0-0-0-0.01.0004.0 2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK PAUD Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs /Paket B APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	80,90 % 99,65 % 96,45 % 98,00 % 1,50 %	145.000.000,00			89,15 % 99,75 % 96,90 % 98,45 % 1,85 %	145.000.000,00	SPNF SKB Klaten
	1.01.1-1.0-0-0-0.01.0004.0 2.2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Persentase siswa PAUD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %	20.000.000,00	(SKB Cawas Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	20.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0-0.01.0004.1. 01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik mengikuti pembelajaran PAUD	27 Orang	20.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 Orang	20.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0-0.01.0004.0 2.2.04	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Persentase siswa SKB menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %	125.000.000,00	(SKB Cawas Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	125.000.000,00	
	1.01.1-1.0-0-0-0.01.0004.1. 01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik mengikuti pendidikan nonformal/kesetaraan	314 Orang	125.000.000,00	SKB Cawas Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	314 Orang	125.000.000,00	
	1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			392.011.717.000,00				677.744.627.000,00	
1.	1.02.1-2.0-0-0-0.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	18.848.753.000,00			100 %	294.320.104.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.1-2.0-0-0-0.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	145.000.000,00			100 %	220.590.000,00	
	1.02.1-2.0-0-0-0.01.1.02.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	20.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	95.590.000,00	
	1.02.1-2.0-0-0-0.01.1.02.01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	2 dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	50.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0-0-0.01.1.02.01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	2 dokumen	30.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0-0-0.01.1.02.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1 dokumen	15.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0-0-0.01.1.02.01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	29 dokumen	30.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	29 dokumen	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0-0-0.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	12.141.630.000,00			100 %	156.570.675.000,00	
	1.02.1-2.0-0-0-0.01.1.02.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	101 orang	12.021.630.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	101 orang	156.450.675.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	60.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	60.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	125 dokumen	40.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	125 dokumen	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	20.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</i>	100 %	<b>185.000.000,00</b>			100 %	<b>110.000.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	101 Orang	110.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	101 Orang	110.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	145 stel	75.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 stel	-	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>469.000.000,00</b>			100 %	<b>479.000.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	25.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 unit	30.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	130000 eksemplar	39.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	130000 eksemplar	39.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	600 kali	125.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600 kali	125.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 kali	260.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>2.450.000.000,00</b>			100 %	<b>452.000.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	73 unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 unit	200.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20 unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	200.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 unit	-	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit	50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	52.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>2.550.000.000,00</b>			100 %	<b>5.565.000.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	6000 eksemplar	15.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6000 eksemplar	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	385.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	400.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	163 orang	2.150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	234 orang	5.150.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>788.123.000,00</b>			100 %	<b>671.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar</i>	47 unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	47 unit	153.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar</i>	47 unit	275.475.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	47 unit	273.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel terpelihara</i>	15 unit	20.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara</i>	20 unit	25.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 unit	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara</i>	3 unit	317.648.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	200.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<i>Persentase layanan BLUD sesuai SOP</i>	100 %	<b>120.000.000,00</b>			100 %	<b>130.251.839.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.01 2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	1 layanan	120.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	69 layanan	130.251.839.000,00	
<b>2.</b>	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>70.157.739.000,00</b>			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>78.299.275.000,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
			<i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	100 % 100 %				100 % 100 %		
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>27.650.000.000,00</b>				<b>29.906.748.000,00</b>	
			<i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara</i>	100 %				100 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.02	Pembangunan Puskesmas	<i>Jumlah gedung puskesmas terbangun</i>	3 unit	8.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3 unit	8.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	<i>Jumlah gedung puskesmas terehab</i>	2 unit	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	1.400.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Jumlah puskesmas pembantu terehab</i>	7 unit	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	1.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasyankes tersedia	2 unit	8.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Insentif Daerah	2 unit	7.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan tersedia	2 jenis	650.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2 jenis	650.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan tersedia	20 unit	2.350.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	20 unit	4.296.748.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan dikalibrasi	30 unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	30 unit	110.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin tersedia	20 jenis	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	20 jenis	3.500.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai tersedia	20 jenis	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	20 jenis	3.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	2 jenis	300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 jenis	300.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		250.000.000,00	
			Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpelihara	2 jenis				2 jenis		
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan</b>	<i>Persentase balita gizi buruk Prevalensi balita gizi kurang</i>	0.45 % 8 % 4.80 %	<b>42.175.239.000,00</b>			0.40 % 7.80 %	<b>48.034.527.000,00</b>	
			<i>Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional sesuai standar</i>	73.53 % 100 %				88.24 % 100 %		
			<i>Persentase puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga</i>							
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah kasus kematian ibu terlacak dan teraudit kematian maternal	231,00 orang 20,00 kasus	900.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	231 orang 20,00 kasus	650.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin mendapat jaminan persalinan Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin	400,00 orang 98,00 orang	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	400 orang 98,00 orang	200.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan pelayanan bayi baru lahir	68,00 orang	300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	68 orang	300.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu balita Jumlah kasus kematian bayi/balita yang terlacak dan teraudit kematian neonatal	60,00 orang 50,00 orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 orang 50,00 orang	1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	34,00 orang	60.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 orang	66.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia produktif Jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan terlatih pelayanan posbindu	34,00 orang 68,00 orang	220.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 orang 68,00 orang	120.939.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia lanjut	34,00 orang	75.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 orang	500.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan hipertensi	68,00 orang	80.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	68 orang	88.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan diabetes mellitus	68,00 orang	90.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	68 orang	99.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan orang dalam gangguan jiwa	10,00 orang	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 orang	220.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah layanan yang dapat mengakses pemeriksaan TCM	10,00 layanan	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 layanan	165.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah layanan VCT terbentuk	10,00 layanan	805.400.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 layanan	860.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	160.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 jenis	676.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 jenis	710.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan, kader, Lintas Program, Lintas Sektoral terlatih dan mendapat pembinaan kesehatan gizi masyarakat Jumlah kasus gizi buruk yang terlacak	350,00 orang 40,00 kasus	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	350 orang 40,00 kasus	150.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	34 puskesmas	350.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 puskesmas	850.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis Jumlah Dokumen Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan tersusun	34 puskesmas 1 dokumen	1.025.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	34 puskesmas 0 dokumen	2.200.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	10 kali	700.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 kali	1.750.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02 2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	25 puskesmas	87.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 puskesmas	290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	34 puskesmas	180.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 puskesmas	498.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah jenis kegiatan pengelolaan upaya kesehatan khusus	4 jenis	415.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 jenis	415.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	900.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 jenis	1.590.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah penduduk mendapat jaminan kesehatan	1264262 orang	25.987.374.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1276905 orang	28.208.123.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah frekuensi pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	75 Kali	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80 Kali	263.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah pasien terlayani	3750 orang	1.050.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3850 orang	1.135.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasyankes tereakreditasi	34 fasyankes	2.210.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	35 fasyankes	2.510.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	680.465.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 jenis	1.020.465.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kasus Kegawatdaruratan Yang Tertangani	200 kasus	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	240 kasus	1.300.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>100 %</b>	<b>255.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>280.500.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Buku Profil Kesehatan dan Buku Saku Kesehatan Tercetak	120 buku	40.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120 buku	44.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Instansi Mengelola Informasi Kesehatan	35 unit	40.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 unit	44.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	2 Unit	175.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	192.500.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes</b>	<b>100 %</b>	<b>77.500.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>77.500.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit dan Fasyankes dikeluarkan rekomendasi perijinannya	85 unit	38.750.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	90 unit	38.750.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan meningkat mutu pelayanannya	1 unit	38.750.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 unit	38.750.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar</b>	<b>100 % 90 %</b>	<b>330.000.000,00</b>			<b>100 % 92 %</b>	<b>2.149.602.000,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan</b>	<b>100 %</b>	<b>60.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>66.000.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan dikeluarkan	1500 rekomendasi	30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1550 rekomendasi	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.03 2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah perizinan praktik tenaga kesehatan dibina dan diawasi	100 lokasi	30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 lokasi	33.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	120.000.000,00			100 %	1.933.602.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.03 2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM dan Profil SDM	2 dokumen	60.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	66.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.03 2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	60.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 kategori	1.867.602.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kompetensi Teknis SDM tingkat kabupaten	100 %	150.000.000,00			100 %	150.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.03 2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional	2 kali	150.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kali	150.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	50 % 50 %	326.780.000,00			50 % 50 %	355.283.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang diberikan izin dan diawasi	100 %	80.000.000,00			100 %	88.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.04 2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi	50 lokasi	40.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 lokasi	44.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.04 2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			40.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		44.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	300 lokasi				300 lokasi		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.2.02	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	<i>Persentase Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</i>	100 %	25.000.000,00			100 %	27.500.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	<i>Jumlah sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) diterbitkan</i>	5 Sertifikat	25.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Sertifikat	27.500.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<i>Persentase terlaksananya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	100 %	40.000.000,00			100 %	44.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<i>Jumlah P-IRT dibina dan diawasi</i>	50 lokasi	40.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 lokasi	44.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<i>Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	100 %	50.000.000,00			100 %	55.823.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	<i>Jumlah Tempat Pengolahan Makanan bersertifikat yang diawasi</i>	40 Lokasi	50.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Lokasi	55.823.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.2.05	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<i>Persentase terlaksananya penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	100 %	101.780.000,00			100 %	106.960.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	<i>Jumlah Lokasi Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan</i>	40 lokasi	101.780.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 lokasi	106.960.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.2.06	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<i>Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	100 %	30.000.000,00			100 %	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.04 2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk makanan minuman IRT yang diperiksa	20 produk	30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 produk	33.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	532.200.000,00			62 %	804.118.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.05.2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten	12 kebijakan	300.000.000,00			13 kebijakan	396.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.05 2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	50 kali	300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 kali	396.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.05.2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	97 %	82.200.000,00			98 %	100.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.05 2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	25 Kali	82.200.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 Kali	100.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	150.000.000,00			100 %	308.118.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.1.02.05 2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	245,00 orang	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	245 orang	308.118.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	80.098.343.000,00			100 %	80.098.343.000,00	RSUD Bagas Waras
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 1.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 %	75.590.000,00	(RSUD Bagas Waras, KAB. KLATEN)		100 %	75.590.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	7 dokumen	75.590.000,00	RSUD Bagas Waras	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 dokumen	75.590.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	12.022.753.000,00	(RSUD Bagas Waras, KAB. KLATEN)		100 %	12.022.753.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	91,00 orang	12.022.753.000,00	RSUD Bagas Waras	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	165,00 orang	12.022.753.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	3.000.000.000,00	(RSUD Bagas Waras, KAB. KLATEN)		100 %	3.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	70 orang	3.000.000.000,00	RSUD Bagas Waras	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	71 orang	3.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	65.000.000.000,00	(RSUD Bagas Waras, KAB. KLATEN)		100 %	65.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	33 pelayanan	65.000.000.000,00	RSUD Bagas Waras	Pendapatan dari BLUD	33 pelayanan	65.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase RSUD terakreditasi minimal madya</i>	100 %	3.922.496.000,00			100 %	3.922.496.000,00	RSUD Bagas Waras
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 2.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara</i>	100 %	3.422.496.000,00	(RSUD Bagas Waras, KAB. KLATEN)		100 %	3.422.496.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Alat Kesehatan tersedia</i>	5 jenis	1.922.496.000,00	RSUD Bagas Waras	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 jenis	1.922.496.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	<i>Jumlah Jenis Obat dan vaksin tersedia</i>	10,00 jenis	500.000.000,00	RSUD Bagas Waras	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10,00 jenis	500.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	<i>Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai tersedia</i>	10,00 jenis	1.000.000.000,00	RSUD Bagas Waras	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10,00 jenis	1.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)</i>	100 %	500.000.000,00	(RSUD Bagas Waras, KAB. KLATEN)		100 %	500.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	<i>Jumlah jenis kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana</i>	3 jenis	500.000.000,00	RSUD Bagas Waras	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 jenis	500.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<i>Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar</i>	90 %	1.000.000.000,00			92 %	1.000.000.000,00	RSUD Bagas Waras
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK</i>	100 %	1.000.000.000,00	(RSUD Bagas Waras, KAB. KLATEN)		100 %	1.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0001.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	<i>Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar</i>	11 kategori	1.000.000.000,00	RSUD Bagas Waras	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 kategori	1.000.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	4.381.602.100,00			100 %	4.381.602.100,00	Puskesmas Klaten Utara
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	3.089.477.200,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.089.477.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	27 orang	3.089.477.200,00	Puskesmas Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 orang	3.089.477.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<i>Persentase layanan BLUD sesuai SOP</i>	100 %	1.292.124.900,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.292.124.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	1 layanan	1.292.124.900,00	Puskesmas Klaten Utara	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.292.124.900,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	710 orang	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	710 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	67 orang	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	67 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	91 orang	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	91 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	287 orang	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	287 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1155 orang	25.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1155 orang	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	2 kali	15.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 kali	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	9.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	9.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkontrol	17 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	7.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	7.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Klaten Utara
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Klaten Utara
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0002.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.910.021.600,00			100 %	4.910.021.600,00	Puskesmas Klaten Tengah
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.324.224.100,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.324.224.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	28 orang	3.324.224.100,00	Puskesmas Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	28 orang	3.324.224.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.585.797.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.585.797.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.585.797.500,00	Puskesmas Klaten Tengah	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.585.797.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	333.257.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	333.257.600,00	Puskesmas Klaten Tengah
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	333.257.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	333.257.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	4736 orang	37.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4736 orang	37.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	500 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	500 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	1863 orang	37.257.600,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1863 orang	37.257.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	436 orang	20.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	436 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	14646 orang	15.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14646 orang	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	4200 orang	15.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4200 orang	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	2 kali	19.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 kali	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	6.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkontrol	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Klaten Tengah
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendetayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Klaten Tengah
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0003.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Klaten Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.666.688.000,00			100 %	5.666.688.000,00	Puskesmas Klaten Selatan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.943.005.400,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.943.005.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	31 orang	3.943.005.400,00	Puskesmas Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	31 orang	3.943.005.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.723.682.600,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.723.682.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.723.682.600,00	Puskesmas Klaten Selatan	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.723.682.600,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	2079 orang	45.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2079 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	18.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	20.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Klaten Selatan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Klaten Selatan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0004.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Klaten Selatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.921.284.100,00			100 %	4.921.284.100,00	Puskesmas Kalikotes
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.528.764.200,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.528.764.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	27 orang	3.528.764.200,00	Puskesmas Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 orang	3.528.764.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.392.519.900,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.392.519.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.392.519.900,00	1392519830	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.392.519.900,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	4224 orang	33.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4224 orang	33.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	500 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1750 orang	35.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1750 orang	35.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	436 orang	20.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	436 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	13207 orang	13.526.600,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13207 orang	13.526.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	4200 orang	15.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4200 orang	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	2 kali	15.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 kali	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkontrol	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Kalikotes
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Kalikotes
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0005.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Kalikotes	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.370.828.800,00			100 %	5.370.828.800,00	Puskesmas Ngawen
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.314.480.100,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.314.480.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	28 orang	3.314.480.100,00	Puskesmas Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	28 orang	3.314.480.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.056.348.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.056.348.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.056.348.700,00	Puskesmas Ngawen	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.056.348.700,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	381.944.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	381.944.600,00	Puskesmas Ngawen
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	381.944.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	381.944.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	5376 orang	42.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5376 orang	42.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	569 orang	11.363.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	569 orang	11.363.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2000 orang	40.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2000 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	405 orang	18.581.600,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	405 orang	18.581.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	19527 orang	20.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19527 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	5600 orang	20.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5600 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	2079 orang	45.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2079 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	27.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	27.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	29.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	29.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	20.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Ngawen
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Ngawen
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0006.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Ngawen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.158.819.600,00			100 %	4.158.819.600,00	Puskesmas Kebonarum
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.222.820.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.222.820.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	23 orang	3.222.820.500,00	Puskesmas Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23 orang	3.222.820.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	935.999.100,00	(KAB. KLATEN)		100 %	935.999.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	935.999.100,00	Puskesmas Kebonarum	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	935.999.100,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	1064 orang	12.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1064 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	19.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	2 kali	15.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 kali	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkontrol	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Kebonarum
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Kebonarum
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0007.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Kebonarum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.446.461.100,00			100 %	7.446.461.100,00	Puskesmas Wedi
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.742.885.300,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.742.885.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	42 orang	4.742.885.300,00	Puskesmas Wedi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	42 orang	4.742.885.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.703.575.800,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.703.575.800,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.703.575.800,00	Puskesmas Wedi	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.703.575.800,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	1064 orang	12.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1064 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	19.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	2079 orang	45.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2079 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	20.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	31.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	31.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	22.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	22.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Wedi
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Wedi
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0008.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Wedi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.909.450.100,00			100 %	5.909.450.100,00	Puskesmas Jogonalan 1
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.943.234.200,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.943.234.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	34 orang	3.943.234.200,00	Puskesmas Jogonalan 1	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 orang	3.943.234.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.966.215.900,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.966.215.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.966.215.900,00	Puskesmas Jogonalan 1	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.966.215.900,00	





NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	1112 orang	12.539.600,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1112 orang	12.539.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	19.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	20.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	31.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	31.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	22.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	22.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Jogonalan 1
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Jogonalan 1
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0009.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Jogonalan 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.487.813.200,00			100 %	4.487.813.200,00	Puskesmas Jogonalan 2
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.767.085.900,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.767.085.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 orang	2.767.085.900,00	Puskesmas Jogonalan 2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 orang	2.767.085.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.720.727.300,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.720.727.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.720.727.300,00	Puskesmas Jogonalan 2	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.720.727.300,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	1112 orang	12.539.600,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1112 orang	12.539.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	16.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	20.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	31.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	31.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Jogonalan 2
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Jogonalan 2
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0010.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Jogonalan 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.069.590.300,00			100 %	7.069.590.300,00	Puskesmas Gantiwarno
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.296.510.200,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.296.510.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	37 orang	4.296.510.200,00	Puskesmas Gantiwarno	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	37 orang	4.296.510.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.773.080.100,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.773.080.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.773.080.100,00	Puskesmas Gantiwarno	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.773.080.100,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	16.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	2079 orang	45.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2079 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	20.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	31.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	31.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Gantiwarno
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Gantiwarno
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0011.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Gantiwarno	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.331.549.800,00			100 %	5.331.549.800,00	Puskesmas Prambanan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.588.273.400,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.588.273.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	31 orang	3.588.273.400,00	Puskesmas Prambanan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	31 orang	3.588.273.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.743.276.400,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.743.276.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.743.276.400,00	Puskesmas Prambanan	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.743.276.400,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	347.609.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	347.609.600,00	<b>Puskesmas Prambanan</b>
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i>	10 % 98.09 %	347.609.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 %	347.609.600,00	
			<i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	94.1 %		(KAB. KLATEN)		94.6 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	4736 orang	37.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4736 orang	37.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	900 orang	12.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	900 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	250 orang	5.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	250 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	1881 orang	37.609.600,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1881 orang	37.609.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	436 orang	20.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	436 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	11717 orang	12.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11717 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	3360 orang	12.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3360 orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	1064 orang	12.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1064 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	19.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	19.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	23.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	23.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Prambanan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Prambanan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0012.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Prambanan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.748.044.600,00			100 %	4.748.044.600,00	Puskesmas Kebondalem Lor
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.362.759.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.362.759.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	27 orang	3.362.759.500,00	Puskesmas Kebondalem Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 orang	3.362.759.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.385.285.100,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.385.285.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.385.285.100,00	Puskesmas Kebondalem Lor	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.385.285.100,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	710 orang	8.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	710 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	67 orang	8.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	67 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	91 orang	8.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	91 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	287 orang	8.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	287 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	924 orang	20.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	924 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	16.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	1 kali	10.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 kali	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	8.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	9.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	9.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	7.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	7.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Kebondalem Lor
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Kebondalem Lor
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0013.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.028.634.900,00			100 %	7.028.634.900,00	Puskesmas Manisrenggo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.671.886.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.671.886.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	40 orang	4.671.886.000,00	Puskesmas Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 orang	4.671.886.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.356.748.900,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.356.748.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.356.748.900,00	Puskesmas Manisrenggo	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.356.748.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 % 100 %	545.000.000,00			100 % 100 %	545.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %						
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 2.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	<b>545.000.000,00</b>	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	<b>545.000.000,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	7680 orang	60.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	7680 orang	60.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	450 orang	6.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	450 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	250 orang	5.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	250 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2750 orang	55.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	2750 orang	55.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			32.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		32.000.000,00	
			<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	698 orang				698 orang		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	29291 orang	30.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	29291 orang	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	11200 orang	40.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	11200 orang	40.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2762 orang	10.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2762 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	1757 orang	20.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1757 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	16.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	2764 orang	60.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2764 orang	60.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	25.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	36.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	36.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	4 kali	56.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4 kali	56.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	20.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Manisrenggo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<i>Cakupan Desa Siaga Aktif</i>	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Manisrenggo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0014.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Manisrenggo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	7.073.170.300,00			100 %	7.073.170.300,00	Puskesmas Kemalang
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	3.838.808.300,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.838.808.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	34 orang	3.838.808.300,00	Puskesmas Kemalang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 orang	3.838.808.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<i>Persentase layanan BLUD sesuai SOP</i>	100 %	3.234.362.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.234.362.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	3.234.362.000,00	Puskesmas Kemalang	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	3.234.362.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	390.433.500,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	390.433.500,00	Puskesmas Kemalang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 2.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	<b>390.433.500,00</b>	<i>(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)</i>		10 % 98.11 % 94.6 %	<b>390.433.500,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	5504 orang	43.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5504 orang	43.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	572 orang	11.433.500,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	572 orang	11.433.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2150 orang	43.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2150 orang	43.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	458 orang	21.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	458 orang	21.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	19527 orang	20.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19527 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			21.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		21.000.000,00	
			<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	5880 orang				5880 orang		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan</i>	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan</i>	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan</i>	69 orang	6.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	69 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan</i>	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	2079 orang	45.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2079 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	32.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	32.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	28.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	28.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Kemalang
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Kemalang
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0015.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Kemalang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.456.914.300,00			100 %	5.456.914.300,00	Puskesmas Karangnongko
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.658.570.300,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.658.570.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	31 orang	3.658.570.300,00	Puskesmas Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	31 orang	3.658.570.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.798.344.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.798.344.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.798.344.000,00	Puskesmas Karangnongko	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.798.344.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	323.608.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	323.608.600,00	Puskesmas Karangnongko
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	10 % 98.09 % 94.1 %	323.608.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	323.608.600,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	3840 orang	30.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3840 orang	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	605 orang	12.082.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	605 orang	12.082.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1500 orang	30.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1500 orang	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	436 orang	20.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	436 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	13207 orang	13.526.600,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13207 orang	13.526.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	4200 orang	15.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4200 orang	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampangi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupresure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Karangnongko
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Karangnongko
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0016.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Karangnongko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.687.332.400,00			100 %	5.687.332.400,00	Puskesmas Jatinom
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.859.258.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.859.258.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	33 orang	3.859.258.700,00	Puskesmas Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	33 orang	3.859.258.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.828.073.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.828.073.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.828.073.700,00	Puskesmas Jatinom	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.828.073.700,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	369.603.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	369.603.600,00	Puskesmas Jatinom
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i>	10 % 98.09 %	369.603.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 %	369.603.600,00	
			<i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	94.1 %		(KAB. KLATEN)		94.6 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	5760 orang	45.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5760 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	600 orang	12.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	600 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2100 orang	42.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2100 orang	42.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	436 orang	20.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	436 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	12306 orang	12.603.600,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12306 orang	12.603.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	5320 orang	19.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5320 orang	19.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	444 orang	5.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	444 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	69 orang	6.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	69 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	19.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	25.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkontrol	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Jatinom
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Jatinom
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0017.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Jatinom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.677.736.100,00			100 %	4.677.736.100,00	Puskesmas Kayumas
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.794.908.400,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.794.908.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	23 orang	2.794.908.400,00	Puskesmas Kayumas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23 orang	2.794.908.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.882.827.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.882.827.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.882.827.700,00	Puskesmas Kayumas	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.882.827.700,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	324.121.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	324.121.600,00	Puskesmas Kayumas
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	324.121.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	324.121.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	3328 orang	26.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3328 orang	26.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	750 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	750 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	605 orang	12.082.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	605 orang	12.082.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	1350 orang	27.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1350 orang	27.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	436 orang	20.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	436 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	11755 orang	12.039.600,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11755 orang	12.039.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	2800 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2800 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	19.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Kayumas
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Kayumas
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0018.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Kayumas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.601.853.700,00			100 %	6.601.853.700,00	Puskesmas Karanganom
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.319.624.400,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.319.624.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	39 orang	4.319.624.400,00	Puskesmas Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	39 orang	4.319.624.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.282.229.300,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.282.229.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.282.229.300,00	Puskesmas Karanganom	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.282.229.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 % 100 %	368.382.600,00			100 % 100 %	368.382.600,00	Puskesmas Karanganom

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	<i>100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %</i>				<i>100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %</i>		
<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 2.2.02</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	<i>10 % 98.09 % 94.1 %</i>	<b>368.382.600,00</b>	<i>(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)</i>		<i>10 % 98.11 % 94.6 %</i>	<b>368.382.600,00</b>	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	<i>5760 orang</i>	45.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>5760 orang</i>	45.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	<i>375 orang</i>	5.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>375 orang</i>	5.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	<i>600 orang</i>	12.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>600 orang</i>	12.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	<i>2250 orang</i>	45.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>2250 orang</i>	45.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	<i>545 orang</i>	25.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>545 orang</i>	25.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	<i>15622 orang</i>	16.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>15622 orang</i>	16.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	<i>3360 orang</i>	12.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>3360 orang</i>	12.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	<i>2209 orang</i>	8.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>2209 orang</i>	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	444 orang	5.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	444 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	96 orang	11.382.600,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	96 orang	11.382.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	69 orang	6.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	69 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	16.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	25.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Karanganom
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Karanganom
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0019.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Karanganom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.749.978.600,00			100 %	4.749.978.600,00	Puskesmas Tulung
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.243.251.700,00	(Puskesmas Tulung, KAB. KLATEN)		100 %	3.243.251.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	26 orang	3.243.251.700,00	Puskesmas Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	26 orang	3.243.251.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.506.726.900,00	(Puskesmas Tulung, KAB. KLATEN)		100 %	1.506.726.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.506.726.900,00	Puskesmas Tulung	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.506.726.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	372.656.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	372.656.600,00	Puskesmas Tulung



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 2.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	<b>372.656.600,00</b>	<i>(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)</i>		10 % 98.11 % 94.6 %	<b>372.656.600,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	5376 orang	42.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5376 orang	42.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	614 orang	12.274.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	614 orang	12.274.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2250 orang	45.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2250 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	545 orang	25.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	545 orang	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	15622 orang	16.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15622 orang	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	3360 orang	12.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3360 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan</i>	444 orang	5.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	444 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan</i>	96 orang	11.382.600,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	96 orang	11.382.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan</i>	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan</i>	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	19.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	19.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Tulung
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Tulung
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0020.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Tulung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.054.124.200,00			100 %	5.054.124.200,00	Puskesmas Majegan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.581.961.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.581.961.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	30 orang	3.581.961.500,00	Puskesmas Majegan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 orang	3.581.961.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.472.162.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.472.162.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.472.162.700,00	Puskesmas Majegan	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.472.162.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	379.611.700,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	379.611.700,00	Puskesmas Majegan
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	10 % 98.09 % 94.1 %	379.611.700,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	379.611.700,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	5760 orang	45.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5760 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	735 orang	9.792.200,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	735 orang	9.792.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	700 orang	14.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	700 orang	14.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2250 orang	45.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2250 orang	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	436 orang	20.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	436 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	15622 orang	16.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15622 orang	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	4042 orang	14.436.900,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4042 orang	14.436.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	444 orang	5.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	444 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	96 orang	11.382.600,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	96 orang	11.382.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	19.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1848 orang	40.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1848 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	19.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Majegan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Majegan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0021.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Majegan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.721.455.400,00			100 %	5.721.455.400,00	Puskesmas Polanharjo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.091.758.100,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.091.758.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	36 orang	4.091.758.100,00	Puskesmas Polanharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	36 orang	4.091.758.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.629.697.300,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.629.697.300,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.629.697.300,00	Puskesmas Polanharjo	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.629.697.300,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	445.336.500,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	445.336.500,00	Puskesmas Polanharjo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i>	10 % 98.09 %	445.336.500,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 %	445.336.500,00	
			<i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	94.1 %		(KAB. KLATEN)		94.6 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	7680 orang	60.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7680 orang	60.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	996 orang	20.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	996 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2550 orang	51.055.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2550 orang	51.055.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	698 orang	32.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	698 orang	32.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	22456 orang	23.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22456 orang	23.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	2879 orang	10.281.500,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2879 orang	10.281.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	444 orang	5.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	444 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	19.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	19.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	924 orang	20.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	924 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	25.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	44.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	44.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	4 kali	41.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4 kali	41.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Polanharjo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Polanharjo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0022.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Polanharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.705.953.300,00			100 %	8.705.953.300,00	Puskesmas Delanggu
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	5.790.074.200,00	(KAB. KLATEN)		100 %	5.790.074.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	54 orang	5.790.074.200,00	Puskesmas Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	54 orang	5.790.074.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.915.879.100,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.915.879.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.915.879.100,00	Puskesmas Delanggu	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.915.879.100,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	416.692.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	416.692.600,00	Puskesmas Delanggu
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	416.692.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	416.692.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	6141 orang	48.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6141 orang	48.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	300 orang	4.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	300 orang	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	650 orang	13.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	650 orang	13.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2235 orang	44.692.600,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2235 orang	44.692.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	676 orang	31.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	676 orang	31.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	19527 orang	20.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19527 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	3360 orang	12.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3360 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1017 orang	22.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1017 orang	22.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	22.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	22.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	42.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	42.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	4 kali	46.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4 kali	46.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	12.000.000,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Delanggu
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Delanggu
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0023.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Delanggu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.533.879.700,00			100 %	8.533.879.700,00	Puskesmas Juwiring
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	5.053.984.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	5.053.984.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	45 orang	5.053.984.000,00	Puskesmas Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 orang	5.053.984.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	3.479.895.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.479.895.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	3.479.895.700,00	Puskesmas Juwiring	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	3.479.895.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 % 100 %	571.761.600,00			100 % 100 %	571.761.600,00	Puskesmas Juwiring

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	571.761.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	571.761.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	7522 orang	58.761.600,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7522 orang	58.761.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	600 orang	8.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	600 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	900 orang	18.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	900 orang	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2750 orang	55.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2750 orang	55.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	1013 orang	47.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1013 orang	47.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	29291 orang	30.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29291 orang	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	4480 orang	16.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4480 orang	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	3314 orang	12.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3314 orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	1774 orang	20.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1774 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	28.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	28.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.623.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.623.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1386 orang	30.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1386 orang	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	38.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	38.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	57.377.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	57.377.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	4 kali	60.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4 kali	60.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	12.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	4.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Juwiring
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Juwiring
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0024.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Juwiring	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.610.433.300,00			100 %	5.610.433.300,00	Puskesmas Wonosari I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.922.017.900,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.922.017.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	34 orang	3.922.017.900,00	Puskesmas Wonosari I	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 orang	3.922.017.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.688.415.400,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.688.415.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.688.415.400,00	Puskesmas Wonosari I	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.688.415.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	250.615.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	250.615.600,00	Puskesmas Wonosari I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 2.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	<b>250.615.600,00</b>	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	<b>250.615.600,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	2511 orang	19.615.600,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2511 orang	19.615.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	500 orang	10.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	500 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	1000 orang	20.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1000 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	371 orang	17.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	371 orang	17.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	9764 orang	10.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9764 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	2240 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2240 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan</i>	710 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	710 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan</i>	67 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	67 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan</i>	91 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	91 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan</i>	287 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	287 orang	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	7.377.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	7.377.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1046 orang	22.623.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1046 orang	22.623.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	2 kali	14.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 kali	14.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	9.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	9.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	7.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	7.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Wonosari I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Wonosari I	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Wonosari I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0025.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	





NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	1536 orang	12.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1536 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	439 orang	8.765.500,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	439 orang	8.765.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	600 orang	12.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	600 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	371 orang	17.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	371 orang	17.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	9764 orang	10.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9764 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	2240 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2240 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	710 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	710 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	67 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	67 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	91 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	91 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	287 orang	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	287 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.176.200,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.176.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	4.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	740 orang	16.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	740 orang	16.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	25.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	2 kali	14.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 kali	14.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampangi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	9.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	9.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	7.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	7.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Wonosari II
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Wonosari II
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0026.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Wonosari II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.306.663.100,00			100 %	5.306.663.100,00	Puskesmas Ceper
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.309.011.600,00				3.309.011.600,00	
			Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		(KAB. KLATEN)		100 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	29 orang	3.309.011.600,00	Puskesmas Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	29 orang	3.309.011.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.997.651.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.997.651.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.997.651.500,00	Puskesmas Ceper	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.997.651.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 %	310.241.600,00			100 % 100 %	310.241.600,00	Puskesmas Ceper
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i>	10 % 98.09 %	310.241.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 %	310.241.600,00	
			<i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	94.1 %		(KAB. KLATEN)		94.6 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	2944 orang	23.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2944 orang	23.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	250 orang	5.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	250 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	1250 orang	25.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1250 orang	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	441 orang	20.202.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	441 orang	20.202.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	11755 orang	12.039.600,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11755 orang	12.039.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	2800 orang	10.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2800 orang	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	115 orang	15.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	115 orang	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	15.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	4.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1109 orang	24.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1109 orang	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	35.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	35.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Ceper
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Ceper
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0027.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Ceper	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.705.900.200,00			100 %	4.705.900.200,00	Puskesmas Jambu Kulon
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.072.536.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.072.536.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	27 orang	3.072.536.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 orang	3.072.536.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.633.364.200,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.633.364.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.633.364.200,00	Puskesmas Jambu Kulon	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.633.364.200,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	321.257.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	321.257.600,00	Puskesmas Jambu Kulon
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	321.257.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	321.257.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	3200 orang	25.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3200 orang	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	750 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	750 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	500 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	500 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	1301 orang	26.016.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1301 orang	26.016.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	441 orang	20.202.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	441 orang	20.202.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	11755 orang	12.039.600,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11755 orang	12.039.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	2800 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2800 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	4.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1109 orang	24.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1109 orang	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	40.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	24.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	27.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	27.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	9.000.000,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	9.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Jambu Kulon
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Jambu Kulon
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0028.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Jambu Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.437.281.200,00			100 %	7.437.281.200,00	Puskesmas Pedan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.535.074.600,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.535.074.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	41 orang	4.535.074.600,00	Puskesmas Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	41 orang	4.535.074.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.902.206.600,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.902.206.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.902.206.600,00	Puskesmas Pedan	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.902.206.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 % 100 %	472.893.500,00			100 % 100 %	472.893.500,00	Puskesmas Pedan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	<i>100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %</i>				<i>100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %</i>		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	<i>10 % 98.09 % 94.1 %</i>	472.893.500,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		<i>10 % 98.11 % 94.6 %</i>	472.893.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	7680 orang	60.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7680 orang	60.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	600 orang	8.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	600 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	200 orang	4.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 orang	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2750 orang	55.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2750 orang	55.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	785 orang	36.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	785 orang	36.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	24409 orang	25.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24409 orang	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	5040 orang	18.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5040 orang	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	4970 orang	18.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4970 orang	18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	1055 orang	11.893.500,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1055 orang	11.893.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	93 orang	11.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	93 orang	11.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	217 orang	6.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	217 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	20.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	4.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	924 orang	20.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	924 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	18.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	51.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	51.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	36.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	36.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdamping asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	40.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	7.000.000,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	7.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	<b>Puskesmas Pedan</b>
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Pedan
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0029.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Pedan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9.468.419.500,00			100 %	9.468.419.500,00	Puskesmas Karangdowo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	5.149.483.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	5.149.483.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	47 orang	5.149.483.000,00	Puskesmas Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	47 orang	5.149.483.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	4.318.936.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.318.936.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	4.318.936.500,00	Puskesmas Karangdowo	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	4.318.936.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	468.600.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	468.600.600,00	Puskesmas Karangdowo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 2.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	<b>468.600.600,00</b>	<i>(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)</i>		10 % 98.11 % 94.6 %	<b>468.600.600,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	7040 orang	55.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7040 orang	55.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	375 orang	5.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	375 orang	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	200 orang	4.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 orang	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	2400 orang	48.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2400 orang	48.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	872 orang	40.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	872 orang	40.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	24409 orang	25.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24409 orang	25.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			18.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		18.000.000,00	
			<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	5040 orang				5040 orang		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	4970 orang	18.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4970 orang	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan</i>	1029 orang	11.600.600,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1029 orang	11.600.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan</i>	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan</i>	137 orang	12.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	137 orang	12.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan</i>	434 orang	12.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	434 orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	20.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	924 orang	20.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	924 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	57.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	57.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	4 kali	53.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4 kali	53.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupresure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	23.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	23.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	7.000.000,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	7.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Karangdowo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Karangdowo
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0030.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Karangdowo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.841.785.100,00			100 %	6.841.785.100,00	Puskesmas Cawas I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.496.078.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.496.078.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	39 orang	4.496.078.500,00	Puskesmas Cawas 1	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	39 orang	4.496.078.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.345.706.600,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.345.706.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.345.706.600,00	Puskesmas Cawas 1	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.345.706.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	307.774.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	307.774.600,00	Puskesmas Cawas I
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	10 % 98.09 % 94.1 %	307.774.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	307.774.600,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	2816 orang	22.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2816 orang	22.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	225 orang	3.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	225 orang	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	200 orang	4.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 orang	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1100 orang	22.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1100 orang	22.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	502 orang	23.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	502 orang	23.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	12841 orang	13.151.600,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12841 orang	13.151.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	2800 orang	10.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2800 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			10.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10.000.000,00	
			Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang				887 orang		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	4.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1109 orang	24.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1109 orang	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	35.623.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	35.623.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	4 kali	44.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4 kali	44.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			5.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		5.000.000,00	
			Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas				1 puskesmas		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	15.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	5.000.000,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.207.500,00			100 %	42.207.500,00	Puskesmas Cawas I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Cawas I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.0 5.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0031.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Cawas 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.255.401.100,00			100 %	5.255.401.100,00	Puskesmas Cawas II
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 1.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			3.568.406.000,00				3.568.406.000,00	
			Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		(KAB. KLATEN)		100 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	30 orang	3.568.406.000,00	Puskesmas Cawas 2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 orang	3.568.406.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	1.686.995.100,00	(KAB. KLATEN)		100 %	1.686.995.100,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	1.686.995.100,00	Puskesmas Cawas 2	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	1.686.995.100,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	238.708.200,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	238.708.200,00	Puskesmas Cawas II
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i>	10 % 98.09 %	238.708.200,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 %	238.708.200,00	
			<i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	94.1 %		(KAB. KLATEN)		94.6 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	1573 orang	12.281.500,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1573 orang	12.281.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	225 orang	3.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	225 orang	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	200 orang	4.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 orang	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	400 orang	8.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	400 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	327 orang	15.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	327 orang	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	7811 orang	8.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7811 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	1960 orang	7.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1960 orang	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	925 orang	10.426.700,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	925 orang	10.426.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	51 orang	6.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	51 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	69 orang	6.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	69 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	217 orang	6.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	217 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	8.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	4.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	786 orang	17.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	786 orang	17.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	10.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	42.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	42.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	34.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	34.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampangi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	13.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	13.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPi	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	5.000.000,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	5.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<i>Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</i>	<b>100 %</b>	<b>42.207.500,00</b>			<b>100 %</b>	<b>42.207.500,00</b>	<b>Puskesmas Cawas II</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Cawas II
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0032.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Cawas 2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.468.735.400,00			100 %	6.468.735.400,00	Puskesmas Trucuk I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.869.329.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.869.329.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	33 orang	3.869.329.000,00	Puskesmas Trucuk 1	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	33 orang	3.869.329.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.0 1.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.599.406.400,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.599.406.400,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.599.406.400,00	Puskesmas Trucuk 1	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.599.406.400,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil</i> <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i> <i>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i> <i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	312.827.600,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	312.827.600,00	Puskesmas Trucuk I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.0 2.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i> <i>Cakupan Kunjungan Bayi</i> <i>Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan</i>	10 % 98.09 % 94.1 %	312.827.600,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	312.827.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	2304 orang	18.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2304 orang	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	225 orang	3.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	225 orang	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	200 orang	4.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 orang	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	792 orang	15.827.600,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	792 orang	15.827.600,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	502 orang	23.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	502 orang	23.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	9764 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9764 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	2800 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2800 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	84 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	84 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	112 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	18.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	18.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			4.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4.000.000,00	
			Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis				3 jenis		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1109 orang	24.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1109 orang	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	45.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	45.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	37.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	37.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampangi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	21.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	21.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	5.000.000,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	5.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<i>Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</i>	<b>100 %</b>	<b>42.207.500,00</b>			<b>100 %</b>	<b>42.207.500,00</b>	<b>Puskesmas Trucuk I</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			42.207.500,00				42.207.500,00	
			Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMM	100 %		(KAB. KLATEN)		100 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.521.700,00			62 %	4.521.700,00	Puskesmas Trucuk I
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0033.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Trucuk 1	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.058.115.800,00			100 %	5.058.115.800,00	Puskesmas Trucuk II
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.004.416.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.004.416.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	23 orang	3.004.416.000,00	Puskesmas Trucuk 2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23 orang	3.004.416.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	2.053.699.800,00	(KAB. KLATEN)		100 %	2.053.699.800,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	2.053.699.800,00	Puskesmas Trucuk 2	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	2.053.699.800,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 % 100 %	315.797.000,00			100 % 100 %	315.797.000,00	Puskesmas Trucuk II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 2.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	10 % 98.09 % 94.1 %	315.797.000,00	(KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN) (KAB. KLATEN)		10 % 98.11 % 94.6 %	315.797.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	3161 orang	24.690.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3161 orang	24.690.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	240 orang	3.207.800,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	240 orang	3.207.800,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	200 orang	4.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 orang	4.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1100 orang	22.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1100 orang	22.000.000,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			23.131.600,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		23.131.600,00	
			Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	505 orang				505 orang		
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	12841 orang	13.151.600,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12841 orang	13.151.600,00	
1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	2800 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2800 orang	10.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	8.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2209 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	887 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	887 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	82 orang	9.792.200,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	82 orang	9.792.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	114 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	114 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	362 orang	10.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	362 orang	10.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	14.823.800,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	14.823.800,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	4.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1109 orang	24.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1109 orang	24.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			15.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		15.000.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas				1 puskesmas		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	36.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	36.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	36.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	36.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkontrol	17 jenis	21.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	21.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	5.000.000,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	5.000.000,00	
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<i>Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</i>	100 %	<b>42.207.500,00</b>			100 %	<b>42.207.500,00</b>	<b>Puskesmas Trucuk II</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.207.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.207.500,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.207.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			4.521.700,00				4.521.700,00	Puskesmas Trucuk II
			Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %				62 %		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.521.700,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0034.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.521.700,00	Puskesmas Trucuk II	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.521.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.310.555.800,00			100 %	8.310.555.800,00	Puskesmas Bayat
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.441.668.000,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.441.668.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	39 orang	4.441.668.000,00	Puskesmas Bayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39 orang	4.441.668.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %	3.868.887.800,00	(KAB. KLATEN)		100 %	3.868.887.800,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 layanan	3.868.887.800,00	Puskesmas Bayat	Pendapatan dari BLUD	1 layanan	3.868.887.800,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	408.165.900,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	408.165.900,00	Puskesmas Bayat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i> <i>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i> <i>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
	<b>1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 2.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prevalensi anemia pada ibu hamil</i>	10 %	<b>408.165.900,00</b>	<b>(KAB. KLATEN)</b>		10 %	<b>408.165.900,00</b>	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar</i>	3224 orang	25.184.700,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3224 orang	25.184.700,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	225 orang	3.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	225 orang	3.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	200 orang	4.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 orang	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	1000 orang	20.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1000 orang	20.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah</i>	567 orang	26.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	567 orang	26.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan</i>	46773 orang	47.921.200,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	46773 orang	47.921.200,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar</i>	3640 orang	13.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3640 orang	13.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			10.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10.000.000,00	
			<i>Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan</i>	2750 orang				2750 orang		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan</i>	710 orang	8.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	710 orang	8.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<i>Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan</i>	101 orang	12.060.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	101 orang	12.060.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan</i>	69 orang	6.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	69 orang	6.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan</i>	217 orang	6.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	217 orang	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	30.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	30.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	4.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 jenis	4.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	1294 orang	28.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1294 orang	28.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	1 puskesmas	15.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	15.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	1 puskesmas	70.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	70.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	35.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 kali	35.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			5.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		5.000.000,00	
			Jumlah puskesmas terdampangi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	1 puskesmas				1 puskesmas		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	1 puskesmas	5.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	28.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 jenis	28.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	1 puskesmas	2.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 puskesmas	2.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	5.000.000,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 jenis	5.000.000,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	42.206.500,00			100 %	42.206.500,00	Puskesmas Bayat
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 3.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	42.206.500,00	(KAB. KLATEN)		100 %	42.206.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	42.206.500,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 kategori	42.206.500,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62 %	4.518.900,00			62 %	4.518.900,00	Puskesmas Bayat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.518.900,00	(KAB. KLATEN)		100 %	4.518.900,00	
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.0035.1. 02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	4.518.900,00	Puskesmas Bayat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 orang	4.518.900,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			203.270.931.000,00				177.795.890.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	34.387.212.000,00			100 %	33.058.592.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	175.000.000,00			100 %	175.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	5 dokumen	100.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 dokumen	100.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	3 dokumen	75.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 dokumen	75.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	24.814.556.000,00			100 %	24.814.556.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	319 orang	24.293.756.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	319 orang	24.293.756.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	160.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	160.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	30.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	30.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	2 dokumen	310.800.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	310.800.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	20.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	20.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			620.000.000,00				575.000.000,00	
			Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %				100 %		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 stel	155.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 stel	160.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian	290 dokumen	35.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	290 dokumen	35.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik	2 aplikasi	100.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 aplikasi	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	330.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80 orang	305.000.000,00	
	<b>1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>1.158.500.000,00</b>			100 %	<b>998.500.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	8 unit	20.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	20.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	24 unit	420.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24 unit	260.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	10 unit	53.500.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	53.500.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	2000 eksemplar	100.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2000 eksemplar	100.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 eksemplar	15.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	15.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	144 kali	100.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	144 kali	100.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			450.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		450.000.000,00	
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 kali				73 kali		
	<b>1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>2.568.036.000,00</b>			100 %	<b>2.198.036.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	2 unit	1.429.936.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	1.079.936.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	270.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	250.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit	868.100.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	868.100.000,00	
	<b>1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>2.215.000.000,00</b>			100 %	<b>2.215.000.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	300 eksemplar	15.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 eksemplar	15.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	600.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	600.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	84 unit	150.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	84 unit	150.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	43 orang	1.450.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	43 orang	1.450.000.000,00	
	<b>1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>2.836.120.000,00</b>			100 %	<b>2.082.500.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			350.000.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	22 unit				22 unit		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	2 unit	32.500.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	32.500.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	7 unit	2.453.620.000,00	DPUPR Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	1.700.000.000,00	
	<b>1.03.1-3.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</i>	0.31 %	<b>12.065.689.000,00</b>			0.31 %	<b>18.026.658.000,00</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>1.03.1-3.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Prosentase embung yang berfungsi dengan baik</i>	76.57 %	<b>910.000.000,00</b>			80.38 %	<b>800.000.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.02 2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan	1 dokumen	75.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 dokumen	-	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.02 2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kabupaten	1 dokumen	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	50.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.02 2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah bahan operasi dan pemeliharaan yang tersedia Jumlah sarana prasarana yang ditangani secara darurat	5100 buah 10 Lokasi	675.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5100 buah 10 Lokasi	620.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.02 2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hidrologi dan kualitas air yang tersusun	2 dokumen	30.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	40.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.02 2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan pengelolaan SDA yang terbina	50 P3A/GP3A	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 P3A/GP3A	60.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.02 2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi teknis (Rekomtek) dan evaluasi pemanfaatan SDA WS kewenangan Kabupaten yang tersusun	1 dokumen	30.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	30.000.000,00	
	<b>1.03.1-3.0-0.0-0.01.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</i>	0.31 %	<b>11.155.689.000,00</b>			0.31 %	<b>17.226.658.000,00</b>	





NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.02 2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi yang tersusun	1 dokumen	40.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	40.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	94.02 %	1.357.390.000,00			95.59 %	1.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			1.357.390.000,00				1.900.000.000,00	
			Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	94 %				96 %		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.03 2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Kegiatan yang didukung dana operasional Pendukung DAK Bidang Air Minum	1 kegiatan	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	100.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.03 2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana air minum	3 Desa	1.000.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Desa	1.500.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.03 2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang didukung Dana Operasional Mendukung Kegiatan PAMSIMAS	1 kegiatan	157.390.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	200.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.03 2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah pembinaan yang dilakukan	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	100.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	100 %	1.307.117.000,00			100 %	1.188.968.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.307.117.000,00			100 %	1.188.968.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.04 2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah lokasi pembangunan TPS-3R	2 Lokasi	1.107.117.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Lokasi	988.968.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.04 2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah Kegiatan yang didukung Dana operasional Pendukung DAK Bidang Sanitasi	2 kegiatan	200.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	200.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	1.27 %	5.127.918.000,00			1.48 %	4.107.570.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.127.918.000,00			100 %	4.107.570.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.05 2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen pendataan IPAL komunal	1 dokumen				2 dokumen		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.05 2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	1 kegiatan	150.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.05 2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan yang didukung Dana operasional Pendukung DAK Bidang Sanitasi dan SANIMAS	2 kegiatan	700.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	700.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.05 2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah sarana prasarana pengangkut tinja yang di adakan	5 unit	2.700.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	1.700.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.05 2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah lumpur tinja terangkut ke IPLT Lumpur Tinja	824000 liter	400.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	878000 liter	500.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.05 2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Lokasi IPLT yang dipelihara	1 lokasi	927.918.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 lokasi	857.570.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	61.47 %	251.369.000,00			61.46 %	220.299.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	61 %	251.369.000,00			61 %	220.299.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.06 2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	251.369.000,00	Dinas Pekerjaan Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	220.299.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	58 % 10.42 %	48.866.038.000,00			60 % 20.83 %	17.501.489.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>			48.866.038.000,00				17.501.489.000,00	
			Prosentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	100 %				100 %		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.08 2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Kegiatan yang didukung dana operasional penyelenggaraan bangunan gedung	1 kegiatan	600.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	500.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.08 2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah yang terlaksana	3 bangunan	45.266.038.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 bangunan	14.841.489.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.08 2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang terehabilitasi, terenovasi dan ubahsui	1 bangunan	3.000.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 bangunan	2.160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<i>Persentase dokumen RTBL yang tersusun Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya</i>	20 % 20 %	100.548.000,00			20 % 25 %	95.757.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.09.2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Dokumen Penataan bangunan dan lingkungan yang tersusun</i>	1 %	100.548.000,00			100 %	95.757.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	<i>Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan</i>	1 kegiatan	100.548.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	95.757.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<i>Persentase jalan kondisi baik Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik</i>	67.72 % 64.22 %	97.344.238.000,00			67.82 % 65.81 %	99.379.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase jalan kondisi baik</i>	67.72 %	97.344.238.000,00			67.82 %	99.379.675.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<i>Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalanserta perencanaan teknis yang tersusun</i>	1 Dokumen	75.000.000,00	Ruas jalan se-Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	150.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	<i>Jumlah dokumen update database jalan dan jembatan yang tersusun</i>	2 Dokumen	586.034.000,00	Ruas jalan se-Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	586.034.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	<i>Panjang jalan yang dilebarkan</i>	10 Km	32.500.000.000,00	Ruas jalan se-Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Km	28.000.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	<i>Panjang jalan yang direkonstruksi</i>	12 Km	41.000.000.000,00	Ruas jalan se-Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 Km	43.600.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	<i>Jumlah ruas jalan yang dipelihara</i>	60 ruas	18.683.204.000,00	Ruas jalan se-Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	65 ruas	19.043.641.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	<i>Jumlah jembatan yang diganti</i>	1 jembatan	8.000.000.000,00	Ruas jalan se-Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 jembatan	8.000.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	<i>Jumlah jembatan yang dilebarkan</i>	1 jembatan	0	Ruas jalan se-Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 jembatan	0	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<i>Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	100 %	251.369.000,00			100 %	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.11.2.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<i>Persentase pelatihan tenaga terampil kontruksi yang diselenggarakan</i>	1 %	251.369.000,00			100 %	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.11 2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Jumlah Tenaga Terampil yang terlatih</i>	200 orang	251.369.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 orang	200.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<i>Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun Persentase pelayanan ketataruangan Persentase pengendalian pemanfaatan ruang</i>	70.50 % 100 % 100 %	<b>2.212.043.000,00</b>			70.50 % 100 % 100 %	<b>2.116.882.000,00</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang ditetapkan</i>	75 %	<b>512.043.000,00</b>			75 %	<b>531.882.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan dalam rangka Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten</i>	1 kegiatan	312.043.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	281.882.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	<i>Jumlah kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang yang ditetapkan</i>	1 kebijakan	100.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kebijakan	125.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	<i>Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang terlaksana</i>	13 kali	100.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 kali	125.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.2.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase perencanaan tata ruang daerah</i>	66 %	<b>850.000.000,00</b>			66 %	<b>625.000.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten</i>	1 kegiatan	750.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	500.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	<i>Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang</i>	1 kegiatan	100.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	125.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase pelayanan ketataruangan</i>	100 %	<b>450.000.000,00</b>			100 %	<b>475.000.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah yang terlaksana</i>	10 kali	100.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kali	125.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	<i>Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dikembangkan</i>	1 sistem	350.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 sistem	350.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase pengendalian pemanfaatan ruang</i>	100 %	<b>400.000.000,00</b>			100 %	<b>485.000.000,00</b>	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan</i>	10 kali	75.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kali	100.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan</i>	10 kali	200.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kali	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan	100 Persen	25.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Persen	50.000.000,00	
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.1.03.12 2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang yang dilaksanakan	100 Persen	100.000.000,00	DPUPR KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Persen	135.000.000,00	
	<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>14.961.993.000,00</b>				<b>14.454.667.000,00</b>	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	<b>8.726.510.000,00</b>			100 %	<b>8.455.688.000,00</b>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	<b>60.000.000,00</b>			100 %	<b>50.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	50 dokumen	25.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 dokumen	15.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	4 dokumen	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 dokumen	10.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	4 dokumen	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 dokumen	10.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	10 dokumen	5.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 dokumen	5.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	50 dokumen	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 dokumen	10.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>4.930.000.000,00</b>			100 %	<b>4.924.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	48 orang	4.750.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48 orang	4.750.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	150.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	150.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	2 dokumen	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	7.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	5.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 dokumen	5.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Tersusun	10 dokumen	5.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 dokumen	5.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	25 dokumen	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 dokumen	7.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</i>	100 %	<b>20.000.000,00</b>			100 %	<b>20.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	5.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	1 dokumen	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	10.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun	1 dokumen	5.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</i>	100 %	<b>125.000.000,00</b>			100 %	<b>75.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 stel	15.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 stel	15.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	10.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 orang	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 orang	10.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 orang	90.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 orang	40.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>335.000.000,00</b>			100 %	<b>261.688.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	50 unit	20.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 unit	20.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	60 unit	25.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 unit	25.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	10 unit	20.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	20.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	40 eksemplar	25.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 eksemplar	25.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	50 eksemplar	15.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 eksemplar	15.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	50 kali	30.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 kali	30.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	200.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 kali	126.688.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>100.000.000,00</b>			100 %	<b>100.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	25 unit	50.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	50.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit	50.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	50.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>2.630.000.000,00</b>			100 %	<b>2.630.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	100 eksemplar	15.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1500 eksemplar	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	1.365.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	1.365.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 unit	50.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	50.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	52 orang	1.200.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	52 orang	1.200.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>526.510.000,00</b>			100 %	<b>395.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	12 unit	260.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 unit	260.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	20 unit	10.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	10.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	20 unit	25.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	10.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	166.510.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	50.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit	65.000.000,00	Disperwaskim Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	65.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<i>Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</i>	100 % 100 %	<b>2.138.174.000,00</b>			100 % 100 %	<b>2.170.000.000,00</b>	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<i>Presentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata</i>	100 %	<b>100.000.000,00</b>			100 %	<b>50.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02 2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi yang tersusun	1 dokumen	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	50.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.02</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase korban bencana atau relokasi yang mengikuti sosialisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program</i>	120 %	<b>1.213.174.000,00</b>			195 %	<b>1.250.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02 2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	100 orang	111.641.000,00	Disperwaskim Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 orang	100.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02 2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk	20 orang	1.001.533.000,00	Disperwaskim Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 orang	1.100.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02 2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Koorminasi Penerima dan jenis Layanan	10 Kali	100.000.000,00	Disperwaskim Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kali	50.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase rumah korban bencana yang terbangun dan/ atau terehabilitasi</i>	16 %	<b>370.000.000,00</b>			18 %	<b>370.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang terehabilitasi	13 unit	200.000.000,00	Disperwaskim Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 unit	200.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang terbangun	3 unit	170.000.000,00	Disperwaskim Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	170.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.05</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<i>Persentase rumah susun umum yang terkelola</i>	2 %	<b>255.000.000,00</b>			2 %	<b>300.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Rumah Susun terfasilitasi	2 blok	230.000.000,00	Disperwaskim Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 blok	275.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 kegiatan	25.000.000,00	Disperwaskim Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	25.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.06</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<i>Jumlah izin pembangunan dan perumahan yang diterbitkan</i>	1 rekomendasi	<b>100.000.000,00</b>			1 rekomendasi	<b>100.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25 kali	100.000.000,00	Disperwaskim Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 kali	100.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.07</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>			<b>100.000.000,00</b>				<b>100.000.000,00</b>	
			<i>Jumlah sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan</i>	10 dokumen				10 dokumen		
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	25 kali	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 kali	100.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<i>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani</i>	0.05 %	<b>1.457.938.000,00</b>			0.05 %	<b>1.100.000.000,00</b>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<i>Persentase penanganan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang dilakukan</i>	7 %	<b>607.938.000,00</b>			7 %	<b>250.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi permukiman kumuh tersusun	1 dokumen	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	100.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh yang dilakukan	12 kali	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	100.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP tersusun	1 dokumen	407.938.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	50.000.000,00	
	<b>1.04.1-4.0-0.0-0.01.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<i>Persentase RTLH di kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang terehabilitasi</i>	5 %	<b>850.000.000,00</b>			5 %	<b>850.000.000,00</b>	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni terehabilitasi	30 unit	750.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	30 unit	750.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kerja Sama/ MoU Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5 MoU	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 MoU	100.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<i>Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani</i>	95.23 %	2.337.728.000,00			96.43 %	2.428.979.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.04.2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>			2.337.728.000,00				2.428.979.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<i>Jumlah RTLH yang diperbaiki diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha</i>	185 unit	2.225.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	188 unit	2.350.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<i>Jumlah kerjasama/ MoU Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan PSU</i>	1 MoU	112.728.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 MoU	78.979.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<i>Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan</i>	49.65 % 23.53 %	301.643.000,00			62.24 % 38.61 %	300.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<i>Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan</i>	49.65 %	301.643.000,00			62.24 %	300.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan tersusun</i>	1 dokumen	101.643.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	100.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Penunjang Fungsi Hunian	<i>Jumlah PSU yang tersedia</i>	1 PSU	0	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 PSU	0	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	<i>Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan</i>	10 kali	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kali	100.000.000,00	
	1.04.1-4.0-0.0-0.01.1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	<i>Jumlah pelaksanaan verifikasi dan penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang</i>	10 kali	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 kali	100.000.000,00	
	1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			19.560.934.000,00				19.048.444.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	7.350.102.000,00			100 %	7.219.144.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	30.000.000,00			100 %	20.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun</i>	7 Dokumen	15.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen LKjIP tersusun</i>	10 Dokumen	15.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>6.569.761.000,00</b>			100 %	<b>6.564.761.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	55 Orang	6.539.761.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55 Orang	6.539.761.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun</i>	468 Dokumen	15.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	468 Dokumen	15.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	15 Dokumen	15.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Dokumen	10.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</i>	100 %	<b>165.000.000,00</b>			100 %	<b>95.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	190 Stel	160.000.000,00	Satpol dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	115 Stel	90.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian</i>	15 Dokumen	5.000.000,00	Satpol dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	5.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>96.000.000,00</b>			100 %	<b>103.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia</i>	2 Unit	4.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Unit	8.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	20 Unit	10.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Unit	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia</i>	3 Eksemplar	9.500.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Eksemplar	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia</i>	3 Eksemplar	2.500.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Eksemplar	5.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi</i>	20 Kali	10.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	15 Kali	60.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Kali	60.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>60.000.000,00</b>			100 %	<b>20.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang diadakan</i>	4 Unit	10.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan</i>	1 Unit	50.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	10.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>57.908.000,00</b>			100 %	<b>60.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Surat terkirim</i>	1500 Eksemplar	2.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1500 Eksemplar	5.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar</i>	12 Bulan	25.908.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	25.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar</i>	3 Orang	30.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Orang	30.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>371.433.000,00</b>				<b>356.383.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara</i>	100 %				100 %		
1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01 2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar</i>	10,00 Unit	346.383.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11,00 Unit	346.383.000,00	
1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01 2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara</i>	1 Unit	15.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	
1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01 2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	2 Unit	5.050.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	5.000.000,00	
1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.01 2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara</i>	15 Unit	5.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	5.000.000,00	
1.05.1-5.0-0.0-0.03.02		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada</i>	42 % 100 % 92 % 100 %	1.053.352.000,00			43 % 100 % 92.40 % 100 %	1.211.224.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.1-5.0-0.0-0.03.02.2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman Cakupan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100 % 100 %	780.617.000,00			100 % 100 %	899.590.000,00	
1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.01.01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<i>Jumlah kegiatan pengamanan di wilayah kabupaten klaten</i>	70 Kegiatan	608.617.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	85 Kegiatan	654.590.000,00	
1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.01.02		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<i>Jumlah pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ( penertiban dalam pemasangan reklame,spanduk,baliho dan penertiban pedagang kaki lima)</i>	20 Kegiatan	15.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Kegiatan	30.000.000,00	
1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.01.03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas</i>	5 Kegiatan	5.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kegiatan	10.000.000,00	
1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.01.04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah pemberdayaan personil Linmas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	1000 Orang	100.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 Orang	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur terfasilitasi kapasitas SDM dan Jumlah pelaksanaan korsik	50 Orang	40.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	79 Orang	80.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	5 Kegiatan	10.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Kegiatan	20.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada tersedia	3 Kegiatan	2.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Kegiatan	5.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Persentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten Persentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 % 100 %	267.735.000,00			100 % 100 %	301.634.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten	10 Kegiatan	17.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Kegiatan	25.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			205.735.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		231.634.000,00	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan siaga tugas satuan polisi pamong praja	440 Orang				440 Orang		
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Kegiatan	45.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Kegiatan	45.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.02.2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina	100 %	5.000.000,00			100 %	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.02 2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	27 Orang	5.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 Orang	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65 % 15 Menit 100 %	511.787.000,00			70 % 15 Menit 100 %	594.909.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.04.2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100 %	474.000.000,00			100 %	520.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Pemadam Kebakaran Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	45.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terfasilitasi dan Pelayanan pemadaman kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran	29 Orang	455.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	29 Orang	455.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	8 Kegiatan	4.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kegiatan	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional	27 Orang	5.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 Orang	10.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan	100 %	<b>11.000.000,00</b>			100 %	<b>14.909.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah data bangunan gedung di kabupaten Klaten	5 Kegiatan	6.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Kegiatan	5.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	20 Kegiatan	5.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Kegiatan	9.909.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran	100 %	<b>11.787.000,00</b>			100 %	<b>20.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran	4 Kegiatan	6.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Kegiatan	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	6 kegiatan	5.787.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 kegiatan	10.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.03.04.2.05</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	<b>15.000.000,00</b>			100 %	<b>40.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang yang terlaksana	10 Kegiatan	5.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kegiatan	10.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana tersedia	2 Unit	5.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	20.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.03.1.05.04 2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah peningkatan kompetensi aparatur	75 Orang	5.000.000,00	Satpol PP dan Damkar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Orang	10.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>5.598.213.000,00</b>			100 %	<b>5.823.494.000,00</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	85 %	<b>50.000.000,00</b>			85 %	<b>55.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	30.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	5 dokumen	20.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 dokumen	20.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>4.027.493.600,00</b>			100 %	<b>4.047.494.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	30 Orang	3.977.493.600,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Orang	3.977.494.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	50.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	70.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>277.000.000,00</b>			100 %	<b>296.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	30 unit	30.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	35.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	30 Unit	40.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Unit	50.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	30 eksemplar	40.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 eksemplar	44.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7.000.000,00	
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	6 Eksemplar				6 Eksemplar		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	12 kali	70.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	70.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Kali	90.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Kali	90.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	80 %	<b>110.219.400,00</b>			80 %	<b>160.000.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Unit	50.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	50.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	60.219.400,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	110.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>423.500.000,00</b>			100 %	<b>437.500.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat terkirim	1000 Eksemplar	7.500.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 Eksemplar	7.500.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	165.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	170.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 Unit	125.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	130.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	7 Orang	126.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Orang	130.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>710.000.000,00</b>				<b>827.500.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %				100 %		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar</i>	29 Unit	500.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	29 Unit	550.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel terpelihara</i>	3 Unit	5.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Unit	7.500.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara</i>	2 Unit	30.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	90.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	7 Unit	175.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Unit	180.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi</i>	100 % 72.78 % 50 % 61 %	5.047.480.000,00			100 % 73 % 51 % 62 %	4.199.673.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<i>prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman</i>	72.80 %	552.480.000,00			72.80 %	50.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun</i>	1 Dokumen	225.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	-	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	<i>Jumlah desa yang menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) yang dilaksanakan</i>	5 Desa	327.480.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Desa	50.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>			2.895.000.000,00				2.720.000.000,00	
			<i>Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terlayani terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</i>	10 %				10 %		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal</i>	1 Dokumen	100.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	<i>jumlah warganegara yang mendapat pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana</i>	1420 Orang	500.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1420 Orang	500.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	<i>Jumlah jenis peralatan perlindungan dan penanganan bencana yang tersedia Jumlah peralatan perlindungan dan penanganan bencana (breakdown ke item) yg terpelihara</i>	50 Paket 5 Jenis	535.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Paket 5 Jenis	495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi antar stakeholder	1 Kegiatan	350.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	350.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yg dibentuk	4 Desa	200.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Desa	200.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen buku data tahunan rehabilitasi dan rekonstruksi	1 Dokumen	500.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	500.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Pendidikan dan Pelatihan untuk TRC	12 Kegiatan	310.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	320.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	200.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Kegiatan	100.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	55.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan kedaruratan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	100.000.000,00	BPBD KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	
	<b>1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	prosentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana	100 %	<b>1.600.000.000,00</b>			100 %	<b>1.429.673.000,00</b>	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah droping air yang diberikan dalam respon cepat bencana kekeringan dana siap pakai	800 Tangki 1 Kegiatan	800.000.000,00	KABUPATEN KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	800 Tangki 1 Kegiatan	729.673.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah pencarian, pertolongan evakuasi bencana yg dilaksanakan Hibah SAR	177 Kejadian 1 Kegiatan	500.000.000,00	KABUPATEN KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	177 Kejadian 1 Kegiatan	350.000.000,00	
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.1.05.03 2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kejadian bencana yg mendapatkan penanganan logistik penyelamatan dan evakuasi	13 jenis	300.000.000,00	KABUPATEN KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 jenis	350.000.000,00	
	<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>13.456.696.000,00</b>				<b>13.412.638.000,00</b>	
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	<b>6.975.508.000,00</b>			100 %	<b>6.714.946.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	<b>60.000.000,00</b>			100 %	<b>60.000.000,00</b>	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	9 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	45.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.01.2.0 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>5.606.008.000,00</b>			100 %	<b>5.415.446.000,00</b>	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	43 Orang	5.591.008.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 Orang	5.400.446.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun</i>	12 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	5.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun</i>	4 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5.000.000,00	
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.01.2.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>278.000.000,00</b>			100 %	<b>283.000.000,00</b>	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia</i>	5 Unit	4.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	4.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	970 Unit	25.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	970 Unit	30.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia</i>	4 Unit	5.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	5.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia</i>	200 Eksemplar	20.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 Eksemplar	20.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia</i>	24 Eksemplar	4.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24 Eksemplar	4.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			60.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		60.000.000,00	
			<i>Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi</i>	48 Kali				48 Kali		
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	214 Kali	160.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	214 Kali	160.000.000,00	
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>350.000.000,00</b>			100 %	<b>255.000.000,00</b>	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan</i>	1 Unit	275.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan</i>	2 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	180.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan</i>	10 Unit	25.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Unit	75.000.000,00	
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>313.000.000,00</b>			100 %	<b>333.000.000,00</b>	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Surat Terkirim</i>	300 Eksemplar	3.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 Eksemplar	3.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar</i>	12 Bulan	100.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	110.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar</i>	11 orang	210.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 orang	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	368.500.000,00			100 %	368.500.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			258.500.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		258.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	39 Unit				40 Unit		
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 Unit	75.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	75.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	10.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	10.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	25 Unit	25.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 Unit	25.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	97 %	1.578.595.000,00			97.50 %	1.591.777.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	97 %	1.578.595.000,00			98 %	1.591.777.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan kapasitas	26 orang	680.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	26 orang	693.600.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 lembaga	848.595.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 lembaga	843.177.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 2.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan kapasitas	5 orang	50.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	55.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	65.50 %	3.038.191.000,00			66 %	3.010.816.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	25 %	2.653.191.000,00			30 %	2.545.816.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jenis disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang mendapat bimbingan sosial	4 Jenis	2.016.541.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Jenis	2.052.116.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.	283 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	340 Orang	15.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	283 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	340 Orang	60.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah lembaga pemberi layanan data dan pengaduan Jumlah keluarga anak rentan yang mendapatkan pelayanan	2 Lembaga 200 Keluarga	524.650.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Lembaga 210 Keluarga	330.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang diberikan layanan kedaruratan	10 Orang	17.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Orang	18.700.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	45 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	55.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.	283 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	340 Orang	15.000.000,00	
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.04.2.0 2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<i>Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	30 %	<b>385.000.000,00</b>			35 %	<b>465.000.000,00</b>	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan permakanan	45 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	55.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang mendapat layanan bimbingan sosial	45 orang	230.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 orang	240.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	45 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	55.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.	45 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	45 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	55.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 4.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	45 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	5.000.000,00	
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<i>Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)</i>	88.50 %	<b>402.190.000,00</b>			89 %	<b>515.938.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.05.2.0 2</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase PMKS Fakir Miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial</i>	80 %	<b>402.190.000,00</b>			80 %	<b>515.938.000,00</b>	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang terverifikasi dan validasi	200000 Keluarga	102.190.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	210000 Keluarga	105.585.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan	240 desa	100.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	260 desa	110.353.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 5.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial	60000 Keluarga	100.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60000 Keluarga	100.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	10 lembaga	100.000.000,00	Dinas Sosial PPPA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 lembaga	200.000.000,00	
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<i>Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</i>	100 %	<b>1.291.281.000,00</b>			100 %	<b>1.395.730.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.06.2.0 1</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial</i>	30 %	<b>1.261.031.000,00</b>			31 %	<b>1.362.455.000,00</b>	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	220 Orang	182.031.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	230 Orang	180.555.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	220 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	230 Orang	110.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	10 unit	100.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	100.000.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan bantuan sosial/penanganan khusus	220 Orang	829.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	230 Orang	911.900.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	220 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	230 Orang	60.000.000,00	
	<b>1.06.1-6.2-8.2-14.06.06.2.0 2</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Taruna Siaga yang diberdayakan</i>	80 %	<b>30.250.000,00</b>			80 %	<b>33.275.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	50 Orang	30.250.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	33.275.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			170.931.000,00				183.431.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %				100 %		
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.07.2.0 1	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	30 %	170.931.000,00			32 %	183.431.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 7.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	4 Unit	100.931.000,00	Taman Makam Pahlawan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	108.431.000,00	
	1.06.1-6.2-8.2-14.06.1.06.0 7.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	4 Unit	70.000.000,00	Taman Makam Pahlawan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	75.000.000,00	
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			142.490.044.000,00				144.962.451.100,00	
	2.07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			2.538.823.000,00				3.815.002.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	85 %	135.739.000,00			87 %	20.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.02.2.0 1	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun	100 %	135.739.000,00			100 %	20.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.02.07.0 2.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun	1 Dokumen	135.739.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	20.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	3.75 %	744.051.000,00			4.12 %	830.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.03.2.0 1	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0 %	704.051.000,00			0 %	750.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.02.07.0 3.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan	120 Orang	704.051.000,00	Kabupaten Klaten	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	120 Orang	750.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.03.2.0 2	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>			40.000.000,00				80.000.000,00	
			Persentase LPK yang terakreditasi	11.96 %				13.04 %		
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.02.07.0 3.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	20 Lembaga	40.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Lembaga	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<i>Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota</i>	21 %	1.251.816.000,00			22.50 %	2.538.905.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.04.2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	400.000.000,00			100 %	1.480.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	<i>Jumlah jenis fasilitasi Pelayanan Antar Kerja</i>	3 Jenis	100.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Jenis	80.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	<i>Jumlah wirausaha baru</i>	60 Orang	300.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	260 Orang	1.400.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.04.2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<i>Persentase penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online</i>	71 %	225.000.000,00			72 %	233.905.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	<i>Jumlah laporan Informasi Pasar Kerja (IPK)</i>	13 Laporan	25.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Laporan	33.905.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	<i>Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Job Fair</i>	1 kegiatan	200.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	200.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.04.2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat</i>	100 %	600.000.000,00			100 %	800.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	<i>Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</i>	80 Orang	600.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80 Orang	800.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.04.2.05	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase notifikasi TKA</i>	60 %	26.816.000,00			60 %	25.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	16 Perusahaan	26.816.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Perusahaan	25.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<i>Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan</i>	100 %	407.217.000,00			100 %	426.097.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.05.2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</i>	49.43 %	30.000.000,00			53.97 %	51.097.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan</i>	218 Perusahaan	30.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	238 Perusahaan	51.097.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.05.2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.66 %	377.217.000,00			13.32 %	375.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	50 Perusahaan	70.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Umum	50 Perusahaan	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.0 5.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Kasus	30.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kasus	30.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.0 5.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			27.217.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25.000.000,00	
			Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang tercatat dan anggota Serikat Pekerja/Serikat	30 Lembaga				30 Lembaga		
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.0 5.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	1 LKS	80.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 LKS	80.000.000,00	
	2.07.3-31.2-7.0-0.05.2.07.0 5.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Lembaga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	50 Lembaga	170.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Lembaga	170.000.000,00	
	<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>1.429.583.000,00</b>				<b>1.427.243.000,00</b>	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.02	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0.40 %	<b>200.894.000,00</b>			0.60 %	<b>232.964.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.02.2.0 1	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	70 %	<b>71.094.000,00</b>			75 %	<b>87.964.000,00</b>	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 2.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2 kali	10.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kali	15.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 2.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	1 kali	10.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kali	10.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 2.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Jenis Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	4 Jenis	15.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Jenis	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 2.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD/Kelurahan/Desa yang mengikuti pelatihan PPRG	20 OPD	36.094.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 OPD	47.964.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.02.2.0 2	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>82.300.000,00</b>				<b>90.000.000,00</b>	
			Persentase organisasi kemasyarakatan aktif dalam Pemberdayaan Perempuan	30 %				32 %		
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 2.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	22.800.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Orang	25.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 2.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50 orang	59.500.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 orang	65.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.02.2.0 3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif	25 %	<b>47.500.000,00</b>			30 %	<b>55.000.000,00</b>	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 2.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KIE tentang Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan	300 Orang	47.500.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 Orang	55.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	100 %	<b>234.677.000,00</b>			100 %	<b>228.359.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.03.2.0 1	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani sesuai standar	100 %	<b>37.373.000,00</b>			100 %	<b>36.055.000,00</b>	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 3.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan/Kekerasan terhadap perempuan	3 kali	26.095.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4 kali	26.095.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 3.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Frekuensi Rakor penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	12 kali	11.278.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	9.960.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.03.2.0 2	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>187.304.000,00</b>				<b>187.304.000,00</b>	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota yang tertangani sesuai</i>	100 %				100 %		
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 3.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia</i>	10 lembaga	10.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 lembaga	10.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 3.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 kali	177.304.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4 kali	177.304.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.03.2.0 3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat penguatan dan pengembangan</i>	100 %	10.000.000,00			100 %	5.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 3.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	15 orang	5.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 orang	5.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 3.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peserta pelatihan manajemen kasus bagi lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan</i>	10 orang	5.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 orang	-	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<i>Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan</i>	100 %	175.958.000,00			100 %	138.728.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.04.2.0 1	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 %	140.958.000,00			35 %	138.728.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 4.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			70.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		70.000.000,00	
			<i>Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak</i>	30 orang				35 orang		
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 4.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah frekuensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 kali	70.958.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kali	68.728.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.04.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan	100 %	10.000.000,00			0 %		-
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 4.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya	10 lembaga/organi sasi	10.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 lembaga/organi sasi		-
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.04.2.0 3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan dalam keluarga/rumah tangga yang terlayani sesuai standar	100 %	25.000.000,00			0 %		-
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 4.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta fasilitasi pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	10 desa	25.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 desa		-
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	40.40 %	30.165.000,00			46.20 %	34.703.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyajikan data gender dan anak	45 %	30.165.000,00			55 %	34.703.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 5.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			8.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10.000.000,00	
			Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia	1 dokumen				1 dokumen		
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 5.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data pilah gender	20 OPD	22.165.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 OPD	24.703.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase desa/kecamatan layak anak	70.10 %	300.838.000,00			76.30 %	308.234.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.06.2.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD, Ormas/LSM/PT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PUHA	30 %	72.638.000,00			30 %	72.234.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 6.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak	39 OPD	52.638.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 OPD	51.234.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 6.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	40 orang	20.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 orang	21.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.06.2.0 2	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan</i>	65 %	<b>228.200.000,00</b>			65 %	<b>236.000.000,00</b>	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 6.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 kali	148.200.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 kali	155.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 6.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 lembaga	80.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 lembaga	81.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			<b>487.051.000,00</b>				<b>484.255.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<i>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar</i>	100 %				100 %		
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.07.2.0 1	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Sekolah Ramah Anak ( Mempunyai Kebijakan anti kekerasan di Sekolah)</i>	22 %	<b>273.304.000,00</b>			32 %	<b>273.304.000,00</b>	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 7.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	4 kali	96.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kali	96.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 7.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	177.304.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	100 orang	177.304.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.07.2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang terlayani	100 %	167.652.000,00			100 %	161.856.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 7.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	10 lembaga	102.652.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 lembaga	96.856.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 7.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 kali	60.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kali	60.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 7.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	30 orang	5.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 orang	5.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.07.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			46.095.000,00				49.095.000,00	
			Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	35 %				40 %		
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 7.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 kali	10.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kali	11.000.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 7.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 kali	26.095.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4 kali	26.095.000,00	
	2.08.1-6.2-8.2-14.06.2.08.0 7.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	12 kali	10.000.000,00	Dinas Sosial PP PA dan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	12.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.026.033.000,00				2.125.102.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<i>Ketersediaan pangan utama / beras</i>	272990 Ton	774.216.000,00			275720 Ton	667.999.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.02.2.01	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan</i>	30 %	774.216.000,00			47.83 %	667.999.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	<i>jumlah kelompok lumbung pangan yang difasilitasi penguatan kelembagaan jumlah lumbung pangan yang dibangun</i>	10 kelompok 1 unit	424.216.000,00	Ds Tambak Karangdowo Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kelompok 1 unit	317.999.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur			50.000.000,00	Ds Tambak Karangdowo Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		50.000.000,00	
			<i>Jumlah lantai jemur yang dibangun</i>	1 unit				1 unit		
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	<i>Jumlah RMU dan rumah RMU yang dibangun</i>	2 unit	300.000.000,00	Ds Tambak Karangdowo Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2 unit	300.000.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<i>Ketersediaan energi Ketersediaan protein</i>	3030 K.kal/kapita/hari 85.20 Gram/kapita/hari	1.050.721.000,00			3045 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	1.234.011.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.03.2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<i>Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya</i>	14 %	480.721.000,00			33.33 %	699.011.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 3.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah penerima bantuan pemanfaatan pekarangan	12 lokasi/kelompok	300.000.000,00	Desa Tarubasan, Karangjoho Kec. Karanganom, Desa Kalangan Pedan, Ds Tlobong Delanggu, Ds Sidowarno Wonosari, Ds Karangwungu Karangdowo, Ds Sajen Trucuk, Desa Brajan Prambanan, Ds Dukuh, Ds Jambakan Bayat, Ds Randulanang Jatinom, Desa Granting Jogonalan.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 lokasi/kelompok	475.000.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 3.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah pemantauan harga pangan dan bazar pasar murah yang dilakukan	3 kali	50.000.000,00	Desa Tarubasan, Karangjoho Kec. Karanganom, Desa Kalangan Pedan, Ds Tlobong Delanggu, Ds Sidowarno Wonosari, Ds Karangwungu Karangdowo, Ds Sajen Trucuk, Desa Brajan Prambanan, Ds Dukuh, Ds Jambakan Bayat, Ds Randulanang Jatinom, Desa Granting Jogonalan.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kali	60.000.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 3.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan	4 kelompok	50.000.000,00	Desa Tarubasan, Karangjoho Kec. Karanganom, Desa Kalangan Pedan, Ds Tlobong Delanggu, Ds Sidowarno Wonosari, Ds Karangwungu Karangdowo, Ds Sajen Trucuk, Desa Brajan Prambanan, Ds Dukuh, Ds Jambakan Bayat, Ds Randulanang Jatinom, Desa Granting Jogonalan.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 kelompok	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 3.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	<i>jumlah promosi hasil produksi pertanian yang diikuti</i>	4 kali	80.721.000,00	Desa Tarubasan, Karangjoho Kec. Karangnom, Desa Kalangan Pedan, Ds Tlobong Delanggu, Ds Sidowarno Wonosari, Ds Karangwungu Karangdowo, Ds Sajen Trucuk, Desa Brajan Prambanan, Ds Dukuh, Ds Jambakan Bayat, Ds Randulanang Jatinom, Desa Granting Jogonalan.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kali	89.011.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.03.2.0 2	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan</i>	100 %	30.000.000,00			100 %	45.000.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 3.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah rapat koordinasi dewan ketahanan pangan yang diselenggarakan</i>	1 kali	30.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kali	45.000.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.03.2.0 4	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<i>Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan</i>	20 %	540.000.000,00			40 %	490.000.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 3.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<i>jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal jumlah kelompok penerima fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari/ P2L</i>	100 orang 7 kelompok	540.000.000,00	Desa Kemudo, Jarum, Pomah, Glagah, Tangkil, Jungkare dan Beji	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	100 orang 7 kelompok	490.000.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>			145.794.000,00				158.643.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			<i>Persentase penanganan daerah rawan pangan</i>	10 %				12 %		
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.04.2.0 2	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<i>jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani</i>	5 lokasi	145.794.000,00			6 lokasi	158.643.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 4.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah peserta kelompok afinitas yang dibina</i>	20 orang	45.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 orang	60.000.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 4.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah pengadaan beras untuk gudang cadangan pangan</i>	10 Ton	100.794.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Ton	98.643.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<i>Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman</i>	80 %	55.302.000,00			81 %	64.449.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.05.2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan segar	20 %	55.302.000,00			40 %	64.449.000,00	
	2.09.2-9.3-27.0-0.02.2.09.0 5.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produsen pangan segar dan pangan olahan yang dibina	100 orang	55.302.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 orang	64.449.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			553.012.000,00				387.456.000,00	
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	100 %	201.095.000,00			100 %	98.728.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus sengketa tanah garapan terselesaikan	100 %	201.095.000,00			100 %	98.728.000,00	
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.2.10.04 .2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	1 kegiatan	201.095.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	98.728.000,00	
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	100 %	100.548.000,00			100 %	98.728.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah yang dilakukan	100 %	100.548.000,00			100 %	98.728.000,00	
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.2.10.05 .2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 kali	100.548.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	98.728.000,00	
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	100 %	251.369.000,00			100 %	190.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat yang terfasilitasi pensertifikatannya (tanah pemda)	100 %	251.369.000,00			100 %	190.000.000,00	
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.2.10.10 .2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	12 kali	151.369.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	90.000.000,00	
	2.10.1-4.0-0.0-0.01.2.10.10 .2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	12 kali	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	100.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			26.275.152.000,00				26.051.960.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.263.185.000,00			100 %	5.202.913.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	75.000.000,00			100 %	75.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	50.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1 dokumen	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	25.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.0 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3.372.000.000,00</b>				<b>3.383.000.000,00</b>	
			<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	22 orang	3.300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 orang	3.333.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	72.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	50.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</i>	100 %	<b>100.000.000,00</b>			100 %	<b>50.000.000,00</b>	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	50.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>475.000.000,00</b>			100 %	<b>475.000.000,00</b>	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	25.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	10 unit	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	100.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	6 eksemplar	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 eksemplar	40.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	7 eksemplar	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 eksemplar	20.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	70 kali	90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	70 kali	90.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 kali	200.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>128.654.000,00</b>			100 %	<b>100.000.000,00</b>	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	128.654.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	100.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>537.500.000,00</b>			100 %	<b>537.500.000,00</b>	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1000 eksemplar	7.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 eksemplar	7.500.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	200.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	25 orang	330.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 orang	330.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>575.031.000,00</b>			100 %	<b>582.413.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	15 unit	325.031.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	326.943.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 unit	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	155.470.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	10 unit	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	100.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	<b>452.464.000,00</b>			100 %	<b>594.654.000,00</b>	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.02.2.0 1</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Presentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	33 %	<b>152.464.000,00</b>			67 %	<b>300.000.000,00</b>	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 2.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun	1 dokumen	152.464.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	300.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.02.2.0 2</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Persentase Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	100 %	<b>300.000.000,00</b>			100 %	<b>294.654.000,00</b>	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 2.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan yang tersusun	1 dokumen	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	294.654.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Cakupan pemantauan kualitas air Cakupan pemantauan kualitas udara Presentase kampung iklim yang terbentuk	100 % 100 % 30 %	<b>1.829.963.000,00</b>			100 % 100 % 40 %	<b>1.609.768.000,00</b>	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.03.2.0 1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase peantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	100 %	<b>370.000.000,00</b>			100 %	<b>309.768.000,00</b>	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 3.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik pengujian kualitas air dan udara	17 titik	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 titik	189.768.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 3.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi	2 dokumen 1 lokasi	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen 1 lokasi	50.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 3.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	1 unit	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	70.000.000,00	
	<b>2.11.2-11.0-0.0-0.01.03.2.0 2</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			<b>1.459.963.000,00</b>				<b>1.300.000.000,00</b>	
			Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %				100 %		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 3.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kajian Lingkungan Jumlah Alat/sistem pemantauan kualitas air/udara secara kontinyu, otomatis dan online (Onlimo)	4,00 dokumen 1 unit	1.459.963.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen 0 unit	1.300.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	100 %	5.716.120.000,00			100 %	5.822.395.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.04.2.0 1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupate/Kota	100 %	5.716.120.000,00			100 %	5.822.395.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 4.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun/ditetapkan/dievaluasi	2 dokumen	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	90.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 4.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara rutin	48 lokasi	5.406.120.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48 lokasi	5.672.395.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 4.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan taman keanekaragaman hayati yang tersusun (MIH)	1 laporan	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 laporan	60.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	100 %	100.548.000,00			100 %	59.322.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.05.2.0 1	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani	60 %	100.548.000,00			70 %	59.322.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 5.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemantauan pelaku usaha / kegiatan	15 pelaku usaha	50.548.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 pelaku usaha	29.322.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 5.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Rekomendasi Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	15 pelaku usaha				10 pelaku usaha		
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	60 %	100.548.000,00			65 %	79.152.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.06.2.0 1	<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	5 %	100.548.000,00			5 %	79.152.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 6.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan	30 pelaku usaha	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 pelaku usaha	40.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 6.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	30 pelaku usaha	50.548.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 pelaku usaha	39.152.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Persentase saka kalpataru yang dibina	100 % 100 %	100.548.000,00			100 % 100 %	98.897.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.08.2.0 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga yang dilakukan	50 %	100.548.000,00			100 %	98.897.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 8.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah saka pramuka yang dibina	300 orang	100.548.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 orang	98.897.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	3 orang	351.916.000,00			3 orang	396.606.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	100 %				100 %		
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.09.2.0 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	351.916.000,00			3 jenis	396.606.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.0 9.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	351.916.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 jenis	396.606.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani Persentase jumlah sampah yang berkurang	74.09 % 26 %	12.359.860.000,00			76.32 % 28 %	12.188.253.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.11.2.0 1	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	74 %	12.359.860.000,00			76 %	12.188.253.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.1 1.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jalur pengangkutan TPA	30 jalur	7.667.290.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 jalur	7.600.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.1 1.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan	10 kelompok	650.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kelompok	630.000.000,00	
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.1 1.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tersedia	4 jenis	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 jenis	380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.11.2-11.0-0.0-0.01.2.11.1 1.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah yang diadakan	5 Jenis	3.642.570.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Jenis	3.578.253.000,00	
	<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>6.267.109.000,00</b>				<b>5.930.017.100,00</b>	
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>5.263.185.000,00</b>				<b>5.202.913.000,00</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %				100 %		
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.0 1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	<b>16.000.000,00</b>			100 %	<b>16.000.000,00</b>	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	6 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	5.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	7 Dokumen	6.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	6.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.0 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	<b>4.484.048.951,00</b>			100 %	<b>4.484.048.951,00</b>	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	33 Orang	4.469.048.951,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	33 Orang	4.469.048.951,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	15.000.000,00	
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	<b>28.000.000,00</b>			100 %	<b>28.000.000,00</b>	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	506 Orang	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	506 Orang	10.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	18.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	18.000.000,00	
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	<b>137.283.000,00</b>			100 %	<b>137.283.000,00</b>	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15 Unit	9.373.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	9.373.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	80 Unit	30.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80 Unit	30.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia	1 Unit	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	4.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	7 Eksemplar	14.350.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Eksemplar	14.350.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	4 Eksemplar	4.560.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Eksemplar	4.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	75 Kali	30.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 Kali	30.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	45.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 Kali	45.000.000,00	
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>75.000.000,00</b>			100 %	<b>14.728.000,00</b>	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	18 Unit	75.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 Unit	14.728.000,00	
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>421.803.049,00</b>			100 %	<b>421.803.049,00</b>	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1100 Eksemplar	30.908.049,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1100 Eksemplar	30.908.049,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			197.245.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		197.245.000,00	
			<i>Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar</i>	12 Bulan				12 Bulan		
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar</i>	9 Orang	193.650.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Orang	193.650.000,00	
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>101.050.000,00</b>			100 %	<b>101.050.000,00</b>	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	30 Unit	72.800.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Unit	72.800.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	75 Unit	28.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 Unit	28.250.000,00	
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<i>Persentase Perekaman KTP Elektronik Cakupan kepemilikan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA</i>	99.02 % 97.90 % 50 %	<b>643.259.000,00</b>			99.03 % 98 % 60 %	<b>647.730.000,00</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>2.12.2-12.0-0.0-0.01.02.2.0 1</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<i>Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk Persentase ke-valid-an data kependudukan Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA</i>	100 % 100 % 100 %	<b>638.259.000,00</b>			100 % 100 % 100 %	<b>642.730.000,00</b>	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 2.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk	5 Dokumen	609.559.000,00	Dinas Dukcapil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	606.056.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 2.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan jenis verifikasi validasi data adminduk Disdukcapil	5 Data	20.000.000,00	Dinas Dukcapil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Data	27.974.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 2.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			8.700.000,00	Dinas Dukcapil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8.700.000,00	
			<i>Jumlah dan jenis penerbitan SKPWNI, SKTT</i>	2 dokumen				2 dokumen		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.02.2.0 3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 %	5.000.000,00			100 %	5.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 2.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan KK pindah datang	140 orang	5.000.000,00	Dinas Dukcapil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	140 orang	5.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran. Cakupan penerbitan akta kematian Cakupan penerbitan akta perkawinan Cakupan penerbitan akta perceraian Cakupan penerbitan akta pengesahan anak Cakupan penerbitan pengangkatan anak	97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	326.478.000,00			98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	45.492.100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.03.2.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	100 %	320.478.000,00			100 %	39.492.100,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 3.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan Penerbitan akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, dan akta kematian	210 Dokumen 450 dokumen 30 dokumen	320.478.000,00	Dinas Dukcapil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	210 Dokumen 450 dokumen 30 dokumen	39.492.100,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.03.2.0 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	100 %	6.000.000,00	(Dinas Dukcapil Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	6.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 3.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah frekuensi fasilitasi/penyelesaian akta kelahiran	36 kali	6.000.000,00	Dinas Dukcapil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	36 kali	6.000.000,00	
			Jumlah frekuensi fasilitasi/penyelesaian akta perkawinan dan perceraian Jumlah frekuensi fasilitasi/penyelesaian akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	12 kali 24 kali				12 kali 24 kali		
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase ketersediaan database kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100 % 17.65 %	20.110.000,00			100 % 22 %	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.04.2.0 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfaatan data Persentase Jumlah Inovasi pelayanan Persentase jumlah perjanjian kerjasama	100 % 100 % 100 %	5.110.000,00			100 % 100 % 100 %	5.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 4.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama	5 Dokumen	5.110.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.04.2.0 2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	5.000.000,00			100 %	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 4.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk	1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.04.2.0 3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	10.000.000,00			100 %	10.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 4.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah aplikasi pendukung adminduk yang dikembangkan	2 Aplikasi	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Aplikasi	10.000.000,00	
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan profil kependudukan tahunan	100 %	14.077.000,00			100 %	13.882.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.05.2.0 1	Penyusunan Profil Kependudukan			14.077.000,00				13.882.000,00	
			Jumlah Jenis Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	2 Jenis				2 Jenis		
	2.12.2-12.0-0.0-0.01.2.12.0 5.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	2 Dokumen	14.077.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	13.882.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.720.328.000,00				10.199.742.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.949.214.000,00			100 %	5.211.881.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.445.772.000,00			100 %	4.445.772.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	29 Orang	4.445.772.000,00	Dispermasdes Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 Orang	4.445.772.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	183.274.000,00			100 %	229.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	4 Unit	2.980.000,00	Dispermasdes Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	4.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	28 Unit	28.328.000,00	Dispermasdes Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	28 Unit	35.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	77850 Eksemplar	23.355.000,00	Dispermasdes Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	116667 Eksemplar	35.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 Eksemplar	2.724.000,00	Dispermasdes Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Eksemplar	5.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	40 Kali	27.200.000,00	Dispermasdes Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	70 Kali	50.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			98.687.000,00	Dispermasdes Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100.000.000,00	
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Kali				100 Kali		
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	98.233.000,00			100 %	143.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1500 Eksemplar	2.000.000,00	Dispermasdes Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2000 Eksemplar	3.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	40.000.000,00	Dispermasdes Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	50.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	10 Orang	56.233.000,00	Dispermasdes Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Orang	90.000.000,00	
	<b>2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara</i>	100 %	<b>221.935.000,00</b>			100 %	<b>394.109.000,00</b>	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	22 Unit	85.056.000,00	Dispermasdes Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 Unit	150.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	86.147.000,00	Dispermasdes Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	154.109.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	50.732.000,00	Dispermasdes Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	90.000.000,00	
	<b>2.13.2-13.0-0.0-0.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<i>Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</i>	100 %	<b>57.924.000,00</b>			100 %	<b>99.152.000,00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
	<b>2.13.2-13.0-0.0-0.01.03.2.0 1</b>	<b>Fasilitas Kerja Sama Antar Desa</b>	<i>Persentase desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</i>	100 %	<b>57.924.000,00</b>			100 %	<b>99.152.000,00</b>	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 3.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa dalam kawasan perdesaan	5 Desa	57.924.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Desa	99.152.000,00	
	<b>2.13.2-13.0-0.0-0.01.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu</i>	12.79 % 100 %	<b>4.097.353.000,00</b>			15.86 % 100 %	<b>4.103.602.000,00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
	<b>2.13.2-13.0-0.0-0.01.04.2.0 1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya</i>	11 %	<b>4.097.353.000,00</b>			7 %	<b>4.103.602.000,00</b>	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi keuangan desa.	391 Desa	3.373.767.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	391 Desa	3.358.602.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum tentang desa yang terfasilitasi	2 Peraturan Bupati	91.410.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Peraturan Bupati	110.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan musrenbangdes	391 Desa	24.500.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	391 Desa	30.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	280 Orang	100.000.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 Orang	100.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pembinaan Jumlah UPK yang mendapatkan pembinaan Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pembinaan	80 Bumdes 5 UPK 8 Pasar Desa	186.176.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80 Bumdes 5 UPK 8 Pasar Desa	30.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang di angkat	274 Orang	100.000.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Orang	-	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa	391 Desa	94.000.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	391 Desa	50.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			12.500.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50.000.000,00	
			jumlah kasus pengelolaan aset desa yang terfasilitasi	26 kasus				26 kasus		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	<i>jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas</i>	363 BPD	100.000.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	363 BPD	325.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 4.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah desa yang mengisi aplikasi epdeskel</i>	401 Desa/Kel	15.000.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	401 Desa/Kel	50.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<i>Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif</i>	100 % 100 % 26.67 %	<b>615.837.000,00</b>			100 % 100 % 29.41 %	<b>785.107.000,00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.05.2.0 1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang terfasilitasi Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan</i>	100 % 100 % 100 % 100 %	<b>615.837.000,00</b>			100 % 100 % 100 % 100 %	<b>785.107.000,00</b>	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 5.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Satgas Pelestarian Adat Sosial Budaya yang Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya terfasilitasi</i>	10 Lembaga	32.000.000,00	Desa di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Lembaga	50.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 5.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			130.000.000,00	Desa di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		150.000.000,00	
			<i>Jumlah kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang ditingkatkan Jumlah Lembaga pemberdayaan masyarakat ( LPMD ) Desa yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga Desa /Kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah posyandu yang terbina Jumlah BP SPAMS yang terbina</i>	1955 Kader 80 LPMD 80 Orang 2313 Posyandu 100 BP- SPAMS				120 Kader 80 LPMD 80 Orang 2313 Posyandu 100 BP- SPAMS		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 5.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG yang menerapkan ilmu hasil pelatihan Keikutsertaan dalam Pameran TTG Tingkat Nasional Jumlah Posyantek yang difasilitasi	80 Orang 1 Event 2 Posyantek	54.225.000,00	Desa di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80 Orang 1 Event 2 Posyantek	50.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 5.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan Gerakan Gotong Royong Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan TMMD dan KBMKB	401 Desa/Kel 6 Desa	96.259.000,00	Desa di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	401 Desa/Kel 6 Desa	150.000.000,00	
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.2.13.0 5.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa binaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga terfasilitasi	52 Desa	303.353.000,00	Desa di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	52 Desa	385.107.000,00	
	<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>10.175.994.000,00</b>				<b>10.197.405.000,00</b>	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	83.33 % 85.71 %	<b>465.334.000,00</b>			100 % 85.71 %	<b>460.338.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.02.2.0 1	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			<b>34.034.000,00</b>				<b>27.538.000,00</b>	
			Persentase kesesuaian kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	80 %				85 %		
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 2.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah institusi pendidikan kerjasama kependudukan	2 institusi/ lembaga	34.034.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 institusi/ lembaga	27.538.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.02.2.0 2	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Dokumen Data kependudukan dan KB tersusun	100 %	<b>431.300.000,00</b>			100 %	<b>432.800.000,00</b>	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 2.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Kebijakan terkait Kependudukan	2 kali	31.500.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kali	32.000.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 2.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2 dokumen	15.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 2.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk	71 rumah data kependudukan	10.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	71 rumah data kependudukan	10.000.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 2.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Profil kependudukan	2 kali	374.800.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kali	374.800.000,00	
	<b>2.14.1-6.2-8.2-14.06.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	71.50 % 15.95 %	<b>8.782.305.000,00</b>			72 % 15.45 %	<b>8.821.602.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>2.14.1-6.2-8.2-14.06.03.2.0 1</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Persentase kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	100 %	<b>1.805.960.000,00</b>			100 %	<b>1.969.000.000,00</b>	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mitra kerja	5 kali	40.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 kali	44.000.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan terdistribusi	5 Jenis	257.692.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5 Jenis	257.692.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi KIE Luar Gedung	35 kali	67.308.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 kali	67.308.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KKBPK yang dilakukan pengelolaan operasional dan sarannya	23 unit	1.440.960.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	24 unit	1.600.000.000,00	
	<b>2.14.1-6.2-8.2-14.06.03.2.0 2</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna	100 %	<b>1.924.800.000,00</b>			100 %	<b>1.924.800.000,00</b>	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah frekuensi penggerakan kader	4 kali	1.924.800.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4 kali	1.924.800.000,00	
	<b>2.14.1-6.2-8.2-14.06.03.2.0 3</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	43 %	<b>3.716.937.000,00</b>			43 %	<b>3.593.194.000,00</b>	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	84 faskes	255.300.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	88 faskes	255.300.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP	2600 akseptor	2.191.376.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2700 akseptor	2.067.633.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan pemasangan alat kontrasepsi	9 kasus	5.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 kasus	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB tersedia	10 unit	1.122.313.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	10 unit	1.122.313.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			90.068.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		90.068.000,00	
			Jumlah frekuensi pembinaan kelompok remaja	4 kali				6 kali		
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah frekuensi pelayanan KB Bergerak menggunakan mobil unit pelayanan	5 kali	52.880.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 kali	52.880.000,00	
	<b>2.14.1-6.2-8.2-14.06.03.2.0 4</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Cakupan Kampung KB yang dilakukan pembinaan	80 %	<b>1.334.608.000,00</b>			82 %	<b>1.334.608.000,00</b>	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terbentuk	10 buah	50.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 buah	50.000.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 3.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah lokasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	26 lokasi	1.284.608.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	26 lokasi	1.284.608.000,00	
	<b>2.14.1-6.2-8.2-14.06.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	82 % 75.42 % 64.88 % 63.29 % 0 indeks	<b>928.355.000,00</b>			83 % 75.92 % 65.38 % 63.79 % 0 indeks	<b>915.465.000,00</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>2.14.1-6.2-8.2-14.06.04.2.0 1</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	70 %	<b>918.355.000,00</b>			75 %	<b>905.465.000,00</b>	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 4.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang terbeli	15 unit	230.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	15 unit	230.000.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 4.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			594.800.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		594.800.000,00	
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	15 kelompok				15 kelompok		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 4.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 kali	63.555.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 kali	50.665.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 4.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah frekuensi Advokasi dan Promosi IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	3 kali	30.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kali	30.000.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	presentase linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS	30 %	10.000.000,00			40 %	10.000.000,00	
	2.14.1-6.2-8.2-14.06.2.14.0 4.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Frekuensi pembinaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR,UPPKS) bersama mitra kerja/ormas	3 kali	10.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA dan KB Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kali	10.000.000,00	
	<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			<b>28.575.178.000,00</b>				<b>35.621.696.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	98.86 %	20.761.238.000,00			99.14 %	28.033.696.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	13.000.000,00			100 %	13.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	8 Dokumen	13.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	13.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.584.130.000,00				5.584.130.000,00	
			Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %				100 %		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	51 Orang	5.524.130.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	51 Orang	5.524.130.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	60.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	60.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	175.000.000,00			100 %	175.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 stel	175.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	150 stel	175.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	500.000.000,00			100 %	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	15.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	15.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	84 unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	84 unit	150.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	17 eksemplar	130.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 eksemplar	130.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 eksemplar	55.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 eksemplar	55.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	72 kali	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	72 kali	50.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 kali	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 kali	100.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	92 %	<b>195.000.000,00</b>			94 %	<b>150.000.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	5 unit	45.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 unit	-	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	20 unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	150.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>13.694.108.000,00</b>			100 %	<b>21.111.566.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	3500 eksemplar	4.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3500 eksemplar	4.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	11.472.108.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	18.889.566.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	92 orang	2.218.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	92 orang	2.218.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>600.000.000,00</b>			100 %	<b>500.000.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	33 unit	330.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	33 unit	330.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	100.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			70.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		70.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	21 unit				21 unit		
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<i>Persentase kecelakaan lalu lintas</i>	0.80 %	<b>7.813.940.000,00</b>			0.70 %	<b>7.588.000.000,00</b>	Dinas Perhubungan
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang tersusun dan tersosialisasi</i>	1 dokumen	<b>130.000.000,00</b>			0 dokumen	-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan tersusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	-	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan tersosialisasi	1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	-	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi pengendalian terlaksana	12 Kali	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Kali	-	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 2</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang Persentase prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik Persentase Traffic light ATCS terbangun</i>	63 % 98 % 0 %	<b>4.305.000.000,00</b>			73 % 98 % 100 %	<b>4.843.000.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan tersedia	15 jenis	1.315.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 jenis	1.903.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan terpelihara	10 jenis	2.990.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 jenis	2.940.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 3</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<i>Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan</i>	83 Unit	<b>50.000.000,00</b>			83 Unit	<b>75.000.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal tipe C terpelihara	1 unit	50.000.000,00	Terminal Tipe C Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	75.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 4</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>			<b>910.000.000,00</b>				<b>910.000.000,00</b>	
			<i>Persentase kapling parkir yang terkola dengan baik</i>	31 %				31 %		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Titik Kapling Parkir terkelola E-Parkir	5 titik	80.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 titik	80.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan, penertiban dan pengawasan parkir	31 lokasi	830.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	31 lokasi	830.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 5</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<i>Nilai SKM Pelayanan Pengujian Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum</i>	81.08 % 88 %	<b>955.000.000,00</b>			81.76 % 88 %	<b>1.105.000.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor tersedia	1 Unit	450.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	600.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penguji kompeten yang terfasilitasi	12 Orang	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Orang	50.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor tersedia	12000 Paket	305.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12000 Paket	305.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor terpelihara	13 Unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Unit	150.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 6</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase rekayasa lalu lintas tertangani</i>	100 %	<b>978.940.000,00</b>			100 %	<b>250.000.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan Lomba Tertib Lalu Lintas	1 Kali	395.540.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kali	10.000.000,00	
			Jumlah perlintasan bidang kereta api terjaga Jumlah pengawalan dan pengamanan lalu lintas	1 Lokasi 120 Kali				1 Lokasi 120 Kali		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penertiban Galian golongan C terlaksana Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru terlaksana Jumlah Car Free Day Kabupaten Klaten	156 Kali 6 Posko 26 Kali	543.400.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	156 Kali 6 Posko 26 Kali	200.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota terlaksana	12 Kali	40.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	40.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 7</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase dampak lalu lintas tertangani</i>	81 %	<b>45.000.000,00</b>			82 %	<b>45.000.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah sidang dokumen andalalin terlaksana	18 Kali	30.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Kali	30.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang terawasi	18 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Dokumen	15.000.000,00	
	<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 8</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<i>Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi Persentase pelanggaran LLAJ</i>	40 % 50 %	<b>120.000.000,00</b>			60 % 46 %	<b>90.000.000,00</b>	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah PPNS LLAJ	1 Orang	30.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Orang	30.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terlaksana	24 Kali	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24 Kali	10.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10.000.000,00	
			Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana	24 Kali				24 Kali		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan	3 Orang 3 Orang	60.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Orang 3 Orang	30.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota terlaksana	12 Kali	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.0 9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan bus sekolah	13.33 %	300.000.000,00			26.67 %	250.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bus Sekolah Beroperasi Jumlah Bis Mudik Lebaran Beroperasi	2 Unit 20 Unit	300.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit 2 Unit	250.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.1 1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Perkotaan yang aktif	12.50 %	10.000.000,00			18.75 %	10.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Perkotaan yang aktif	3 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.1 2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek pedesaan yang aktif	56.25 %	10.000.000,00			62.50 %	10.000.000,00	
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.2.15.0 2.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Trayek pedesaan yang aktif	11 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 Dokumen	10.000.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			13.709.108.000,00				13.458.200.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.711.128.000,00			100 %	7.654.487.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	105.000.000,00			100 %	105.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	12 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	75.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	4 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	15.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	2 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	15.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.792.528.000,00			100 %	3.815.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	27 Orang	3.652.528.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 Orang	3.675.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Bulan	100.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	18 dokumen	25.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 dokumen	25.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	2 dokumen	15.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	15.000.000,00	
	<b>2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</i>	100 %	<b>2.500.000.000,00</b>			100 %	<b>2.500.000.000,00</b>	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Kegiatan	2.500.000.000,00	Seluruh wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	30 Kegiatan	2.500.000.000,00	
	<b>2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>375.000.000,00</b>			100 %	<b>375.000.000,00</b>	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	15 Unit	100.000.000,00	Seluruh wilayah Republik Indonesia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	100.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	10 eksemplar	50.000.000,00	Seluruh wilayah Republik Indonesia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 eksemplar	50.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu difasilitasi	50 kali	75.000.000,00	Seluruh wilayah Republik Indonesia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 kali	75.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Kali	150.000.000,00	Seluruh wilayah Republik Indonesia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Kali	150.000.000,00	
	<b>2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>405.000.000,00</b>			100 %	<b>324.487.000,00</b>	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10 Unit	140.000.000,00	Dinas Kominfo Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Unit	124.487.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 Unit	265.000.000,00	Dinas Kominfo Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Unit	200.000.000,00	
	<b>2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>123.600.000,00</b>			100 %	<b>125.000.000,00</b>	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1500 eksemplar	10.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1500 eksemplar	10.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	13.600.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	15.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	4 Orang	100.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	100.000.000,00	
	<b>2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>410.000.000,00</b>			100 %	<b>410.000.000,00</b>	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	14 Unit	210.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Unit	210.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 Unit	150.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	150.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	15 Unit	50.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Unit	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<i>Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Presentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat</i>	18.18 % 100 %	1.754.879.000,00			36.36 % 100 %	1.735.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat</i>	100 %	1.754.879.000,00			100 %	1.735.150.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	<i>Jumlah kebijakan yang dirumuskan</i>	2 Kebijakan	25.000.000,00	Diskominfo Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kebijakan	25.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	<i>Jumlah layanan aduan yang tertangani</i>	100 Layanan Aduan	75.000.000,00	Diskominfo Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	105 Layanan Aduan	75.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	<i>Jumlah pemberitaan daerah</i>	240 berita	454.879.000,00	Diskominfo Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	260 berita	435.150.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			250.000.000,00	Diskominfo Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		250.000.000,00	
			<i>Jumlah media yang dikelola</i>	2 media				2 media		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	<i>Jumlah badan publik kategori informatif</i>	3 badan publik	75.000.000,00	Diskominfo Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 badan publik	75.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	2 Organisasi	250.000.000,00	Diskominfo Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Organisasi	250.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	<i>Jumlah desa blank spot yang mendapatkan layanan telekomunikasi</i>	6 desa	225.000.000,00	Diskominfo Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 desa	225.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	<i>Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan papan ruang</i>	170 informasi	400.000.000,00	Diskominfo Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	180 informasi	400.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<i>Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</i>	58.82 % 67.50 % 62.96 %	4.243.101.000,00			62.75 % 75 % 72.22 %	4.068.563.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	100 %	3.593.101.000,00			100 %	3.518.563.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<i>Jumlah OPD terlayani sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah titik wifi di ruang publik yang terpasang</i>	51 OPD 2 titik	3.593.101.000,00	Seluruh OPD Se Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	51 OPD 3 titik	3.518.563.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.03.2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase layanan publik dan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik (layanan SPBE)</i>	60 %	650.000.000,00			65 %	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 3.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	1. BKPPD 2. Bappeda 3. Dinkes 4. Dukcapil 5. Disdagkop	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50.000.000,00	
			<i>Jumlah OPD yang terintegrasi datanya dengan sistem pusat data</i>	<i>5 OPD</i>				<i>11 OPD</i>		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 3.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</i>	<i>16 layanan</i>	450.000.000,00	1. BKPPD 2. Bappeda 3. Dinkes 4. Dukcapil 5. Disdagkop	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>18 layanan</i>	450.000.000,00	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 3.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi persiapan evaluasi penilaian smart city</i>	<i>8 Kegiatan</i>	100.000.000,00	1. BKPPD 2. Bappeda 3. Dinkes 4. Dukcapil 5. Disdagkop	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>8 Kegiatan</i>	-	
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.2.16.0 3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</i>	<i>20 Orang</i>	50.000.000,00	1. BKPPD 2. Bappeda 3. Dinkes 4. Dukcapil 5. Disdagkop	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>25 Orang</i>	50.000.000,00	
	<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			<b>20.355.850.000,00</b>				<b>20.980.127.000,00</b>	
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>100 %</i>	<b>19.385.564.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>19.449.508.000,00</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan</b>
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2. 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	<i>100 %</i>	<b>25.000.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>40.500.000,00</b>	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun</i>	<i>6 Dokumen</i>	20.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>6 Dokumen</i>	35.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17. 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun</i>	<i>5 Dokumen</i>	5.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>5 Dokumen</i>	5.500.000,00	
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2. 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<b>14.673.325.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>14.610.508.000,00</b>	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.511.325.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		14.446.508.000,00	
			<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan</i>	<i>146 Orang</i>				<i>146 Orang</i>		
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu</i>	<i>12 Bulan</i>	140.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>12 Bulan</i>	140.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17. 01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun</i>	<i>12 Dokumen</i>	20.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>12 Dokumen</i>	22.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17. 01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun</i>	<i>44 Dokumen</i>	2.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>44 Dokumen</i>	2.000.000,00	
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2. 03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</i>	<i>100 %</i>	<b>3.000.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>3.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun	24 Dokumen	3.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	3.000.000,00	
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi</i>	100 %	<b>4.500.000,00</b>			100 %	<b>5.000.000,00</b>	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	4.500.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	5.000.000,00	
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</i>	100 %	<b>52.000.000,00</b>			100 %	<b>52.000.000,00</b>	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	2.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Orang	50.000.000,00	
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>514.000.000,00</b>			100 %	<b>580.000.000,00</b>	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 unit	40.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 unit	50.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	57 unit	100.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	100.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	1 unit	10.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	5.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	10 eksemplar	150.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 eksemplar	150.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 eksemplar	4.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	5.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	100 Kali	60.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Kali	70.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 kali	150.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	90 kali	200.000.000,00	
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>480.540.000,00</b>			100 %	<b>375.000.000,00</b>	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 unit	250.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	275.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	40 unit	125.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 unit	50.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 unit	105.540.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	50.000.000,00	
	<b>2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>3.318.199.000,00</b>			100 %	<b>3.403.500.000,00</b>	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	500 eksemplar	3.199.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 eksemplar	3.500.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	395.000.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	400.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	207 Orang	2.920.000.000,00	Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	207 Orang	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	315.000.000,00			100 %	380.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	56 unit	210.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	56 unit	250.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	10 unit	15.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	10.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	100.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	38 unit	40.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	20.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	23.93 % 8.80 %	50.274.000,00			26.82 % 9.30 %	39.661.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan ijin Usaha Simpan Pinjam yang memperoleh Rekomendasi	23.93 %	25.274.000,00			26.82 %	19.661.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	25.274.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	19.661.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh Rekomendasi	8.80 %	25.000.000,00			9.30 %	20.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Koperasi	25.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Koperasi	20.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif Persentase koperasi yang patuh	69.50 % 24.83 %	150.822.000,00			71.20 % 25.90 %	69.406.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang diperiksa dan terawasi	100 %	150.822.000,00			14.29 %	69.406.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota dan pengurus koperasi yang terbina	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Orang	49.406.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	100 koperasi	822.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 koperasi	20.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			75.411.000,00				69.406.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Persentase KSP/USP yang terilai kesehatan kopersinya	14.75 %				17 %		
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	14.75 %	75.411.000,00			17 %	69.406.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	100 unit	75.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 unit	20.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dinilai termasuk dalam kriteria untuk memperoleh penghargaan	1,00 unit	411.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 unit	49.406.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			140.000.000,00			31.60 %	99.152.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Manajer Koperasi yang terlatih	2 Orang	140.000.000,00			100 Orang	99.152.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100 Orang	140.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Orang	99.152.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			10.822.000,00			18.90 %	19.831.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang terbina dan terlindungi	18.20 %	10.822.000,00			18.90 %	19.831.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah Koperasi yang telah mengakses Lembaga Keuangan</i>	130 unit	10.822.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	135 unit	19.831.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			492.683.000,00				935.708.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			<i>Pertumbuhan usaha mikro Persentase UMKM yang melakukan kemitraan</i>	0.13 % 0.30 %				0.14 % 0.32 %		
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.07.2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<i>Persentase UMKM yang terbina</i>	340 %	492.683.000,00			0.78 %	935.708.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<i>Jumlah UMKM yang terdata (pengembangan e-umkm)</i>	10000 UKM	40.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55000 UKM	450.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	<i>Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi mendapatkan sertifikat PIRT dan hak merk</i>	160 UKM	150.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	160 UKM	165.000.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<i>Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih</i>	180 Orang	302.683.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	180 Orang	320.708.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<i>Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan</i>	3.30 %	50.274.000,00			3.50 %	297.455.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<i>Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi / Pendampingan</i>	3 %	50.274.000,00			3.50 %	297.455.000,00	
	2.17.2-17.3-30.0-0.03.2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	<i>Jumlah mikro yang terbina</i>	300 Orang	50.274.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 Orang	297.455.000,00	
	2.18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			11.060.218.000,00				4.815.214.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	8.747.625.000,00			100 %	3.630.353.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	10.000.000,00			100 %	5.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000,00	DPMPPTSP kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5.000.000,00	
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun</i>	10 Dokumen				10 Dokumen		
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	3.422.625.000,00			100 %	2.492.953.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	30 orang	3.347.625.000,00	DPMPTSP kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 orang	2.482.953.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	75.000.000,00	DPMPTSP kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	10.000.000,00	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</i>	80 %	<b>20.000.000,00</b>			80 %	<b>100.000.000,00</b>	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	60 stel	20.000.000,00	DPMPTSP kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 stel	100.000.000,00	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	85 %	<b>784.800.000,00</b>			85 %	<b>307.400.000,00</b>	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	20.000.000,00	Kab. Klaten,DIY,DKI,Jawa Tengah,Luar Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	5.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	65 unit	100.000.000,00	Kab. Klaten,DIY,DKI,Jawa Tengah,Luar Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	65 unit	65.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	10 unit	250.000.000,00	Kab. Klaten,DIY,DKI,Jawa Tengah,Luar Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	50.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	12 eksemplar	100.000.000,00	Kab. Klaten,DIY,DKI,Jawa Tengah,Luar Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 eksemplar	65.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	3 eksemplar	14.800.000,00	Kab. Klaten,DIY,DKI,Jawa Tengah,Luar Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 eksemplar	7.400.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu difasilitasi	120 kali	175.000.000,00	Kab. Klaten,DIY,DKI,Jawa Tengah,Luar Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	130 kali	42.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 Kali	125.000.000,00	Kab. Klaten,DIY,DKI,Jawa Tengah,Luar Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 Kali	73.000.000,00	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</i>	80 %	<b>3.650.000.000,00</b>			80 %	-	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	50 Unit	500.000.000,00	DPMPTSP dan MPP	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 unit	3.150.000.000,00	DPMPTSP dan MPP	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 unit	-	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah tepat waktu</i>	80 %	<b>570.000.000,00</b>			80 %	<b>515.000.000,00</b>	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	10,00 Eksemplar	10.000.000,00	DPMPTSP dan MPP	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.100,00 Eksemplar	5.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar	12 bulan	100.000.000,00	DPMPTSP dan MPP	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	75.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	15 orang	460.000.000,00	DPMPTSP dan MPP	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 orang	435.000.000,00	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah terpelihara</i>	80 %	<b>290.200.000,00</b>			80 %	<b>210.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinanya terbayar	21 unit	140.000.000,00	DPMPTSP kab. klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 unit	100.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	15 Unit	30.000.000,00	DPMPTSP kab. klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara/terehabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	DPMPTSP kab. klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	50.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara/terehabilitasi	60 Unit	70.200.000,00	DPMPTSP kab. klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Unit	60.000.000,00	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<i>Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi</i>	80 %	<b>301.643.000,00</b>			80 %	<b>133.855.000,00</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.02.2.0 1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah</i>	80 %	<b>111.643.000,00</b>			80 %	<b>60.000.000,00</b>	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 2.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan	1 Kebijakan	51.643.000,00	DPMPTSP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kebijakan	30.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 2.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah evaluasi	1 Dokumen	60.000.000,00	DPMPTSP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30.000.000,00	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.02.2.0 2</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Peta Potensi Investasi yang disusun</i>	2 %	<b>190.000.000,00</b>			100 %	<b>73.855.000,00</b>	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 2.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPM	1 Dokumen	95.000.000,00	DPMPTSP kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	-	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 2.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang disusun	1 dokumen	95.000.000,00	DPMPTSP kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	73.855.000,00	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<i>Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan</i>	80 %	<b>703.832.000,00</b>			80 %	<b>208.218.000,00</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.03.2.0 1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase promosi investasi yang terlaksana</i>	80 %	<b>703.832.000,00</b>			100 %	<b>208.218.000,00</b>	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 3.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen strategi	1 Dokumen	203.832.000,00	Jawa tengah,DKI,Kabupaten Klaten,luar jawa,DIY	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 3.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilakukan	5 kegiatan	500.000.000,00	Jawa tengah,DKI,Kabupaten Klaten,luar jawa,DIY	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 kegiatan	198.218.000,00	
	<b>2.18.2-18.0-0.0-0.01.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<i>Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal</i>	80 %	<b>351.916.000,00</b>			80 %	<b>173.515.000,00</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80 %	351.916.000,00			80 %	173.515.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 4.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah jenis pelayanan yang tersedia	3 Jumlah izin	250.000.000,00	DPMPTSP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Jumlah izin	75.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 4.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	4642,00 izin	51.916.000,00	DPMPTSP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4642 izin	48.515.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 4.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah kegiatan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	2 Kegiatan	50.000.000,00	DPMPTSP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	50.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pengendalian penanaman modal	80 %	628.422.000,00			80 %	619.697.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.05.2.0 1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	80 %	628.422.000,00			80 %	619.697.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 5.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang terpantau	150 Perusahaan	303.422.000,00	Perusahaan yang ada di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	150 Perusahaan	315.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 5.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang terbina	150 Perusahaan	315.000.000,00	Perusahaan yang ada di Kab. Klaten	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	150 Perusahaan	294.697.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 5.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan termonitor	150 Perusahaan	10.000.000,00	Perusahaan yang ada di Kab. Klaten	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	150 Perusahaan	10.000.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	80 %	326.780.000,00			80 %	49.576.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.06.2.0 1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase updating data	80 %	326.780.000,00			100 %	49.576.000,00	
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.2.18.0 6.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ketersediaan data	64 data	326.780.000,00	DPMPTSP kab. klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	64 data	49.576.000,00	
	2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			2.607.580.000,00				2.682.046.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<i>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</i>	1.04 % 4.20 %	<b>648.531.000,00</b>			1.08 % 4.45 %	<b>629.612.000,00</b>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.02.2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina</i>	20 %	<b>538.531.000,00</b>			20 %	<b>514.612.000,00</b>	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	<i>Jumlah Fasilitas Kepemudaan Pemuda Pelopor</i>	20 Orang	20.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Orang	30.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	<i>Jumlah Wirausaha Muda Pemula yang terbentuk</i>	50 Pengusaha Muda	110.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55 Pengusaha Muda	65.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pemuda Kader yang terpilih</i>	5 Orang	35.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	25.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	<i>Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pemahaman Bahaya Narkoba</i>	250 Orang	220.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	225 Orang	211.081.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perencanaan Pembangunan Kepemudaan yang Tersusun</i>	1 Kegiatan	18.531.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	18.531.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	<i>Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan</i>	1 Unit	10.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	15.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	<i>Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Memperoleh Penghargaan</i>	1 Orang	5.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	20.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	<i>Jumlah Pemuda Kader yang dilatih Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	10 Orang	35.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Orang	40.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	<i>Jumlah Paskibraka yang dilatih</i>	10 Orang	85.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Orang	90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan	20 %	110.000.000,00			20 %	115.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			20.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kemitraan Wirausaha Pemula	20 Kegiatan				60 Kegiatan		
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	20 Organisasi	90.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Organisasi	90.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<i>persentase atlet berprestasi</i>	2.85 %	1.959.049.000,00			4.29 %	2.052.434.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana	25 %	1.257.043.000,00			25 %	1.360.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga yang diselenggarakan secara terkoordinasi, tersinkronisasi	1 Organisasi	10.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Organisasi	10.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terkoordinasi, tersinkronisasi dan dilaksanakan Pemberdayaan	2 Kegiatan	1.047.043.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	1.150.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang tersedia	1 Unit	200.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	200.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah</i>	100 %	510.666.000,00			100 %	525.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	2 Event	150.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Event	175.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	750 Orang	200.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 Orang	200.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kejuaraan	150 Orang	160.666.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	150 Orang	150.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<i>Persentase Prestasi Olahraga</i>	25 %	136.340.000,00			25 %	137.434.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang Mengikuti Seleksi	20 Orang	26.340.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Orang	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pemusatan Latihan	20 Orang	20.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Orang	20.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pembinaan	25 Orang	50.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 Orang	50.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Insan Olahraga yang Mendapatkan Penghargaan Olahraga	50 Peserta	25.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Peserta	25.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Terkoordinasi dan Tersinkronisasi	1 Data	15.000.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Data	12.434.000,00	
	<b>2.19.2-22.2-19.3-26.04.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<i>Presentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan</i>	25 %	<b>55.000.000,00</b>			25 %	<b>30.000.000,00</b>	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	1 Kegiatan	20.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	20.000.000,00	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang diberdayakan	1 Organisasi	10.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Organisasi	-	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang dikembangkan	1 Kegiatan	15.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Kegiatan	-	
	2.19.2-22.2-19.3-26.04.2.1 9.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Olahraga Tradisional yang dimanfaatkan	1 Kegiatan	10.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	10.000.000,00	
	<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>201.095.000,00</b>				<b>247.879.000,00</b>	
	<b>2.20.2-16.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<i>Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia</i>	30 %	<b>201.095.000,00</b>			40 %	<b>247.879.000,00</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
	<b>2.20.2-16.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Ketersediaan Data Sektoral</i>	75 %	<b>201.095.000,00</b>			75 %	<b>247.879.000,00</b>	
	2.20.2-16.0-0.0-0.01.2.20.0 2.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral	136 data	101.095.000,00	Dinas Kominfo Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	140 data	127.879.000,00	
	2.20.2-16.0-0.0-0.01.2.20.0 2.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Produsen Data Statistik Sektoral	38 OPD	100.000.000,00	Dinas Kominfo Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 OPD	120.000.000,00	
	<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>150.822.000,00</b>				<b>178.473.000,00</b>	
	<b>2.21.2-16.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<i>Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah</i>	35 % 29.41 %	<b>150.822.000,00</b>			38 % 39.22 %	<b>178.473.000,00</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>
	<b>2.21.2-16.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diamankan</i>	25 %	<b>150.822.000,00</b>			30 %	<b>178.473.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.21.2-16.0-0.0-0.01.2.21.0 2.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	500 Informasi	100.822.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	510 Informasi	118.473.000,00	
	2.21.2-16.0-0.0-0.01.2.21.0 2.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 layanan	50.000.000,00	Dinas Kominfo Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 layanan	60.000.000,00	
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			<b>1.846.555.000,00</b>				<b>1.843.793.000,00</b>	
	<b>2.22.2-22.2-19.3-26.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			<b>1.156.296.000,00</b>				<b>1.165.029.000,00</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata</b>
			<i>Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan</i>	20 %				25 %		
	<b>2.22.2-22.2-19.3-26.04.02. 2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Komunitas Budaya yang Dibina dan Dikembangkan</i>	100 %	<b>500.000.000,00</b>			100 %	<b>515.029.000,00</b>	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2 2.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Adat Istiadat dan Ritus yang dilindungi	3 Objek	350.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Objek	365.029.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2 2.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pelaku Adat Istiadat dan Ritus yang dibina	40 Orang	150.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Orang	150.000.000,00	
	<b>2.22.2-22.2-19.3-26.04.02. 2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi</i>	100 %	<b>656.296.000,00</b>			100 %	<b>650.000.000,00</b>	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2 2.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah data pokok kebudayaan yang tersusun dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	1 Kegiatan	256.296.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	250.000.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2 2.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang dibina	1 Kelompok	350.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kelompok	350.000.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2 2.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan Kesenian Tradisional	1 penghargaan	50.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 penghargaan	50.000.000,00	
	<b>2.22.2-22.2-19.3-26.04.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<i>Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten</i>	30 %	<b>150.822.000,00</b>			40 %	<b>188.388.000,00</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata</b>
	<b>2.22.2-22.2-19.3-26.04.03. 2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase pelaku seni tradisional yang terbina</i>	100 %	<b>150.822.000,00</b>			100 %	<b>188.388.000,00</b>	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2 2.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Pelaku Kesenian Tradisional yang dilakukan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	50.822.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	68.388.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2 2.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Pelaku Seni Tradisional tersertifikasi	15 Orang	50.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Orang	60.000.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2 2.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2 Sanggar	50.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Sanggar	60.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.04	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<i>Persentase Pembinaan Sejarah</i>	30 %	120.657.000,00			35 %	133.431.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.04.2.01	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal</i>	100 %	120.657.000,00			100 %	133.431.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2.2.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Karya Ilmiah Masyarakat tentang Sejarah Lokal</i>	40 Karya	60.657.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Karya	73.431.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2.2.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	<i>Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Sejarah</i>	10 penayangan	60.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 penayangan	60.000.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<i>Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan</i>	14 %	418.780.000,00			17 %	356.945.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.05.2.01	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan</i>	100 %	203.780.000,00			100 %	126.945.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2.2.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	<i>Jumlah TACB yang terbentuk dan Objek Cagar Budaya yang didaftarkan dan dikaji</i>	11 Objek	128.780.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 Objek	126.945.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2.2.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	<i>Jumlah Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya yang diterbitkan</i>	5 Objek	75.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Objek	-	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.05.2.02	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu</i>	100 %	215.000.000,00			100 %	230.000.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2.2.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang diselamatkan</i>	10 Objek	120.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Objek	130.000.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2.2.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang diteliti</i>	3 Objek	80.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Objek	100.000.000,00	
	2.22.2-22.2-19.3-26.04.2.2.2.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya			15.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	
			<i>Jumlah cagar budaya yang terkelola</i>	1 objek				0 objek		
	2.23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>			215.125.000,00				223.951.000,00	
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<i>Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina</i>	49962 Eksemplar 21 %	215.125.000,00			51962 Eksemplar 22 %	223.951.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase pelaksanaan pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah</i>	5 %	54.172.000,00			10 %	61.998.000,00	
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	<i>Jumlah Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dibina, dimonitor dan dievaluasi</i>	18 perpustakaan	20.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 perpustakaan	17.998.000,00	
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perpustakaan desa/sekolah dan rumah baca masyarakat dibina dan dimonitor</i>	10 perpustakaan	10.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 perpustakaan	16.000.000,00	
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan peningkatan kapasitas</i>	180 orang	8.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	180 orang	8.000.000,00	
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	<i>Jumlah penambahan koleksi buku/ bahan pustaka</i>	95 Eksemplar	16.172.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Eksemplar	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan	5 %	160.953.000,00			10 %	161.953.000,00	
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokasi dan jenis Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta	30 lokasi	150.953.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 lokasi	150.953.000,00	
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial terlaksana	32 orang	10.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 orang	11.000.000,00	
	<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>			<b>4.782.479.000,00</b>				<b>4.777.145.000,00</b>	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.504.015.000,00			100 %	4.471.148.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	7.500.000,00			100 %	7.500.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	7 dokumen	7.500.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 dokumen	7.500.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.043.930.000,00			100 %	4.043.930.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	32 orang	4.043.930.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 orang	4.043.930.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	58.500.000,00			100 %	58.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	6 unit	5.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 unit	5.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	15 unit	8.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	8.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	15 unit	5.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	5.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia	5 eksemplar	6.500.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 eksemplar	5.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu difasilitasi	20 kali	14.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 kali	15.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	20.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 kali	20.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	291.218.000,00			100 %	286.218.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	500 eksemplar	5.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 eksemplar	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	101.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	101.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	16 orang	185.218.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 orang	180.218.000,00	
	<b>2.24.2-23.2-24.0-0.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>102.867.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>75.500.000,00</b>	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	27 unit	62.846.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27 unit	65.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya terpelihara	6 unit	4.521.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 unit	-	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	15.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	5.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	15.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 unit	-	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	8 unit	5.500.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	5.500.000,00	
	<b>2.24.2-23.2-24.0-0.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase arsip yang diakuisisi</b> <b>Persentase pengawasan kearsipan internal</b>	<b>77 %</b> <b>100 %</b>	<b>231.845.000,00</b>			<b>78 %</b> <b>100 %</b>	<b>247.453.000,00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>
	<b>2.24.2-23.2-24.0-0.02.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase peningkatan OPD yang dibina Tata Kelola kearsipannya</b>	<b>5 %</b>	<b>207.275.000,00</b>			<b>10 %</b>	<b>222.883.000,00</b>	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis	1 OPD	75.152.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 OPD	72.883.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina dan diaudit kearsipannya dan jumlah produk hukum	55 OPD/produk Hukum	132.123.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 OPD/produk Hukum	150.000.000,00	
	<b>2.24.2-23.2-24.0-0.02.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis milik OPD yang diakuisisi</b>	<b>5 %</b>	<b>19.070.000,00</b>			<b>10 %</b>	<b>19.070.000,00</b>	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis sudah diakuisisi, arsip rusak sudah dipreservasi, dan dibuatkan sarana temu balik arsip statis	20 Dokumen	19.070.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	19.070.000,00	
	<b>2.24.2-23.2-24.0-0.02.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>5 %</b>	<b>5.500.000,00</b>			<b>20 %</b>	<b>5.500.000,00</b>	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pameran dalam rangka penyebaran Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN tersedia	1 Pameran	5.500.000,00	Luar wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Pameran	5.500.000,00	
	<b>2.24.2-23.2-24.0-0.02.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Arsip usul musnah</b> <b>Persentase arsip yang dialihmediakan</b>	<b>60 Meter Lari</b> <b>20 %</b>	<b>46.619.000,00</b>			<b>60 Meter Lari</b> <b>20.91 %</b>	<b>58.544.000,00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Arsip kategori musnah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan	5 %	12.999.000,00			5 %	19.474.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian arsip Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	50 Meter lari	6.999.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Meter lari	9.474.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan	60 Meter lari	6.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 Meter lari	10.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota yang terlindungi dan terselamatkan	5 %	20.420.000,00			10 %	20.420.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip di daerah bencana yang dievakuasi dan diidentifikasi	50 arsip	20.420.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 arsip	20.420.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Kenaikan Jumlah Arsip Terakuisisi	5 %	4.100.000,00			5 %	4.100.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terakuisisi dari OPD yang digabung	60 Meter lari	4.100.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 Meter lari	4.100.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentikasi Arsip statis Kabupaten/kota yang telah dialih media	5 %	4.550.000,00			10 %	10.000.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			4.550.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10.000.000,00	
			Jumlah arsip statis yang telah dinilai serta ditetapkan autentisitasnya	20 arsip				25 arsip		
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase Jumlah arsip yang dinyatakan hilang dan diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip	1 %	4.550.000,00			1 %	4.550.000,00	
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah daftar arsip statis OPD yang diakuisisi yang telah dinilai dan ternyata belum lengkap terakuisisi dan kemudian dinyatakan hilang	1 daftar	4.550.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 daftar	4.550.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			73.823.230.000,00				73.922.932.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.156.297.000,00				1.507.103.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	543 Ton	30.165.000,00			547 Ton	49.576.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.03.2.0 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	cakupan bina kelompok nelayan	33 %	30.165.000,00			36 %	49.576.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.3.25.0 3.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	jumlah kelompok nelayan yang dibina	2 Poknel	30.165.000,00	Rowo jombor Desa Krakitan Bayat Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Poknel	49.576.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Produksi perikanan budidaya	29165 Ton	975.310.000,00			30039 Ton	1.274.096.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.04.2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	5 %	150.310.000,00			7 %	364.096.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.3.25.0 4.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah peserta pemberdayaan pokdakan di kawasan sentra/kawasan minapolitan	100 orang	150.310.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	170 orang	364.096.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.04.2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	26.42 %	825.000.000,00			38.80 %	910.000.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.3.25.0 4.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang tersedia	20 paket	700.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	22 paket	750.000.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.3.25.0 4.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah produksi benih ikan	1000000 ekor	75.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1100000 ekor	100.000.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.3.25.0 4.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah pokdakan yang menerima bantuan benih dan indukan ikan	10 pokdakan	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 pokdakan	60.000.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum	15 %	50.274.000,00			23 %	74.364.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.05.2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum	2 Lokasi	50.274.000,00			3 Lokasi	74.364.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.3.25.0 5.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan yang ditebarkan diperairan umum	100000 Ekor	50.274.000,00	Perairan umum Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	140000 Ekor	74.364.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah produk olahan ikan	1168588 kg	100.548.000,00			1191958 kg	109.067.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.06.2.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	20 %	100.548.000,00			40 %	109.067.000,00	
	3.25.2-9.3-27.0-0.02.3.25.0 6.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah frekuensi pembinaan dan pelatihan berbasis ikan dan kampanye gemarikan yang dilaksanakan	4 kali	100.548.000,00	Kec Kemalang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kali	109.067.000,00	
	3.26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>			10.024.039.000,00				9.951.673.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %	7.790.032.000,00			100 %	7.526.190.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			407.360.000,00				158.585.000,00	
			<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %				100 %		
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun</i>	10 Dokumen	393.360.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	145.585.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun</i>	10 Dokumen	14.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	13.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>	100 %	5.752.222.000,00			100 %	5.852.222.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya</i>	45 orang	5.752.222.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 orang	5.852.222.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	336.800.000,00			100 %	339.750.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	60 unit	140.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 unit	140.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia</i>	7,00 eksemplar	60.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 eksemplar	60.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	9 Eksemplar	6.400.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Eksemplar	6.350.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi</i>	36 Kali	65.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	36 Kali	65.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	145 Kali	65.400.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	145 Kali	68.400.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	173.050.000,00			100 %	160.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah mebel yang diadakan</i>	13 Unit	14.550.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan</i>	5 Unit	158.500.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	160.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	525.500.000,00			100 %	525.500.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Surat Terkirim</i>	1000 eksemplar	3.500.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 eksemplar	3.500.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan</i>	12 Bulan	170.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	170.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor jasa pelayanan umum kantor terbayarkan</i>	26 Orang	352.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	26 Orang	352.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	595.100.000,00			100 %	490.133.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar</i>	22,00 Unit	220.100.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 Unit	220.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/ terpelihara	3 Unit	250.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	170.033.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	51 Unit	125.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Unit	100.000.000,00	
	<b>3.26.2-22.2-19.3-26.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<i>Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata</i>	73 %	<b>1.923.918.000,00</b>			74 %	<b>2.121.755.000,00</b>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	<b>3.26.2-22.2-19.3-26.04.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Desa Wisata yang terbentuk</i>	70 %	<b>110.000.000,00</b>			72 %	<b>110.000.000,00</b>	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan KDH tentang Desa Wisata yang diterbitkan	5 SK	30.000.000,00	Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 SK	30.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dikembangkan	7 Lokasi	30.000.000,00	Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Lokasi	30.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	50 Lokasi	50.000.000,00	Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Lokasi	50.000.000,00	
	<b>3.26.2-22.2-19.3-26.04.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<i>Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola</i>	3 Lokasi	<b>25.000.000,00</b>			3 Lokasi	<b>30.000.000,00</b>	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	10.000.000,00	Prambanan sekitarnya dan rowo jombor sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Lokasi	10.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	30 Orang	15.000.000,00	Prambanan sekitarnya dan rowo jombor sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 Orang	20.000.000,00	
	<b>3.26.2-22.2-19.3-26.04.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola</i>	82 %	<b>1.748.918.000,00</b>			83 %	<b>1.941.755.000,00</b>	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata yang Tersusun	2 Dokumen	150.000.000,00	Destinasi Pariwisata di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	210.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	2 Lokasi	20.000.000,00	Destinasi Pariwisata di Klaten	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Lokasi	20.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang difasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	6 Lokasi	1.553.918.000,00	Destinasi Pariwisata di Klaten	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Lokasi	1.681.755.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 Kelompok	5.000.000,00	Destinasi Pariwisata di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kelompok	5.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	2 Lokasi	20.000.000,00	Destinasi Pariwisata di Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Lokasi	25.000.000,00	
	<b>3.26.2-22.2-19.3-26.04.02.2.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Usaha Pariwisata Terbina</i>	50 %	<b>40.000.000,00</b>			60 %	<b>40.000.000,00</b>	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan	20 Dokumen	15.000.000,00	Usaha Pariwisata di Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	15.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2 6.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	13 Usaha	25.000.000,00	Usaha Pariwisata di Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Usaha	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<i>Tingkat intensitas promosi pariwisata</i>	68 %	155.849.000,00			70 %	155.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.03.2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<i>Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis</i>	402 Konten	155.849.000,00			442 Konten	155.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2.6.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya dalam rangka Promosi Pariwisata yang dirilis</i>	5 Media	70.849.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Media	70.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2.6.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti</i>	2 Event	50.000.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Event	50.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2.6.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang terlaksana</i>	1 Usaha	35.000.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Usaha	35.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<i>Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI</i>	10 Orang	40.219.000,00			15 Orang	29.746.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.04.2.02	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<i>Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan</i>	1 Sektor	40.219.000,00			3 Sektor	29.746.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2.6.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	<i>Jumlah Pelaku ekraf yang mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	10 Orang	30.000.000,00	wilayah di Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Orang	24.746.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2.6.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</i>	1 Dokumen	10.219.000,00	wilayah di Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<i>Persentase SDM pariwisata yang kompeten</i>	25 %	114.021.000,00			30 %	118.982.000,00	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.05.2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<i>Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi</i>	400 Orang	114.021.000,00			475 Orang	118.982.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2.6.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Jumlah SDM Pariwisata yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan</i>	250 Orang	44.021.000,00	Wilayah di Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	300 Orang	48.982.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2.6.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<i>Jumlah Stakeholder Bidang Pariwisata yang Berpartisipasi dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	4 Stakeholder	40.000.000,00	Wilayah di Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	4 Stakeholder	40.000.000,00	
	3.26.2-22.2-19.3-26.04.3.2.6.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	<i>Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	30 Orang	30.000.000,00	Wilayah di Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Orang	30.000.000,00	
	3.27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			49.843.615.000,00				49.289.543.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	82 %	37.707.530.000,00			82 %	38.432.844.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01.2.0 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun</i>	100 %	70.000.000,00			100 %	75.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun</i>	12 dokumen	55.000.000,00	DPKPP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 dokumen	60.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun</i>	7 dokumen	15.000.000,00	DPKPP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 dokumen	15.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01.2.0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	36.015.530.000,00			100 %	36.162.844.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan</i>	319 orang	35.860.530.000,00	DPKPP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	319 orang	35.987.844.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>jumlah pembayaran honor PPTK</i>	12 bulan	155.000.000,00	DPKPP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	175.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01.2.0 3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</i>	100 %	25.000.000,00			100 %	25.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>jumlah barang milik daerah yang diamankan</i>	4 unit	25.000.000,00	DPKPP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 unit	25.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01.2.0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</i>	100 %	65.000.000,00			100 %	135.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan per undang-undangan</i>	35 orang	65.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 orang	135.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01.2.0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</i>	90 %	392.000.000,00			90 %	580.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia</i>	16 unit	20.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	40.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	65 unit	127.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	65 unit	200.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia</i>	14 eksemplar	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 eksemplar	55.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>jumlah kunjungan tamu terfasilitasi</i>	60 kali	65.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 kali	125.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	100 kali	130.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120 kali	160.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01.2.0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</i>	90 %	55.000.000,00			90 %	75.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan</i>	40 unit	55.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 unit	75.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01.2.0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</i>	90 %	775.000.000,00			90 %	780.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>jumlah surat terkirim</i>	5000 eksemplar	10.000.000,00	DPKPP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5000 eksemplar	10.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang terbayar</i>	12 bulan	170.000.000,00	DPKPP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	175.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar</i>	38 orang	595.000.000,00	DPKPP Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	38 orang	595.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	90 %	310.000.000,00			90 %	600.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perijinannya terbayar	300 unit	125.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 unit	250.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	150.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	275.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya terehabilitasi/terpelihara	40 unit	35.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 unit	75.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas cabe Produktivitas tembakau rajang Produktivitas tembakau asepan	66.99 Ku/Ha 8.98 Ku/Ha 12.20 Ku/Ha 9.83 Ku/Ha	1.985.812.000,00			67.01 Ku/Ha 9.06 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha	1.375.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.02.2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produksi padi Produksi jagung Produksi kedele Produksi cabe Produksi tembakau rajang Produksi tembakau asepan	458539 Ton 101257 Ton 1052 Ton 630.40 Ton 1620 Ton 2335 Ton	700.812.000,00			459885 Ton 101554 Ton 1061 Ton 636.92 Ton 1640 Ton 2335 Ton	475.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 2.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	jumlah kelompok penerima bantuan alsintanbun	15 kelompok	400.000.000,00	Desa Gumul, Karangnongko. Desa Wiro, Bayat. Desa Tijayan, Manisrenggo.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 kelompok	400.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 2.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah kelompok penerima bantuan bibit hortikultura Jumlah pengelola sarana pertanian yang dibina Jumlah bantuan sarana pertanian yang diberikan	3 kelompok 26 kecamatan 30 unit	300.812.000,00	Desa Gumul, Karangnongko. Desa Wiro, Bayat. Desa Tijayan, Manisrenggo.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kelompok 26 kecamatan 20 unit	75.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.02.2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kab. Klaten	15 %	1.285.000.000,00			15 %	900.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 2.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	jumlah luasan penanaman dan pengembangan benih padi varietas unggul rojolele jumlah kawasan pertanian terpadu berbasis teknologi	10 Ha 1 lokasi	900.000.000,00	UPT ATP Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Ha 1 lokasi	550.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 2.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	jumlah luasan pengembangan padi dan jagung jumlah demplot budidaya pertanian organik berbasis kawasan pertanian organik	120 Ha 10 unit	385.000.000,00	UPT ATP Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 Ha 15 unit	350.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)	37 % 35 % 286000 ekor	8.147.870.000,00			38 % 42 % 288384 ekor	7.217.783.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.03.2.0 1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan LP2B/KP2B	32000 Ha	565.000.000,00			32000 Ha	805.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) dan atau Peraturan Bupati (Perbup) LP2B yang disusun	1,00 dokumen	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	200.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah peta LP2B yang disusun	1 dokumen	15.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	100.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah bantuan alat panen/pasca panen tembakau yang diberikan	15 unit	450.000.000,00	Kab. Klaten	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	15 unit	505.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian			7.282.870.000,00				5.837.783.000,00	
			Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi	31 %				47 %		
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi tanah dangkal/tanah dalam yang dibangun/direhabilitasi	15 unit/lokasi	3.134.359.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20 unit/lokasi	3.377.783.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	jumlah embung yang dibangun/direhabilitasi	5 unit/lokasi	600.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2 unit/lokasi	240.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhabilitasi	4 km	858.511.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5 km	900.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah dam parit yang dibangun/direhabilitasi	4 unit/lokasi	480.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2 unit/lokasi	240.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	jumlah long storage yang dibangun/direhabilitasi	4 unit/lokasi	360.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2 unit/lokasi	180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah BPP kecamatan yang dibangun/renovasi dan penyediaan sarana pendukungnya	2 unit/lokasi	1.200.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2 unit/lokasi	250.000.000,00	
			jumlah penyediaan sarana keinformasian penyuluhan pertanian	26 unit				26 unit		
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	9 unit/lokasi	650.000.000,00	Kab. Klaten	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9 unit/lokasi	650.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.03.2.0 3	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan fasilitas pengelolaan bibit ternak	23.50 %	300.000.000,00			38.72 %	575.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 3.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	jumlah bantuan ternak domba/kambing yang diterima kelompok tani jumlah peternak sapi potong dan sapi perah yang dibina	140,00 ekor 300 orang	300.000.000,00	Kecamatan Jatinom, Tulung, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Gantiwarno, Ngawen, Wedi dan Bayat.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 ekor 300 orang	575.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	22 %	673.668.000,00			22 %	961.769.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.04.2.0 1	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis	90 %	203.668.000,00			91 %	316.769.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 4.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah ternak yang mendapat pelayanan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	6000 ekor	203.668.000,00	26 Kecamatan di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6515 ekor	316.769.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.04.2.0 2	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan gangguan reproduksi	88 %	175.000.000,00			88 %	300.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 4.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan IB	10000 ekor	175.000.000,00	Kecamatan Jatinom, Tulung, Prambanan, Wedi, Gantiwarno, Pedan, Bayat, Karangnongko, Manisrenggo, Kemalang dan Trucuk.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10000 ekor	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.04.2.0 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan	40 %	195.000.000,00			40 %	195.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 4.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah usaha peternakan dan pengolahan hasil temak yang dibina	90 unit usaha	150.000.000,00	26 kecamatan di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	90 unit usaha	150.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 4.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah lokasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan/bahan pangan asal temak	10 lokasi	45.000.000,00	26 kecamatan di Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 lokasi	45.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.04.2.0 5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase temak ruminansia besar yang dipotong di rumah potong hewan	100 %	100.000.000,00			100 %	150.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 4.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	jumlah pemotongan ternak di rumah potong hewan	1950 ekor	100.000.000,00	RPH Kota dan RPH Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2000 ekor	150.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya	58 %	553.011.000,00			60 %	717.575.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.05.2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT	58 %	553.011.000,00			60 %	717.575.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 5.2.01.01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah jenis pestisida untuk pengendalian OPT	6 jenis	378.011.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 jenis	542.575.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 5.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah pengembangan/pembaharuan aplikasi pengendalian OPT jumlah kelompok/brigade pengendali hama tanaman	1 kali 5 kelompok	175.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kali 5 kelompok	175.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase kelompok tani madya dan utama	8.63 %	775.724.000,00			9.13 %	584.572.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.07.2.0 1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	jumlah kelompok tani kelas pemula jumlah kelompok tani kelas lanjut jumlah kelompok tani kelas madya	1055 poktan 535 poktan 135 poktan	775.724.000,00			1055 poktan 535 poktan 135 poktan	584.572.000,00	
			jumlah kelompok tani kelas utama	9 poktan				9 poktan		
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 7.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	184 orang	129.224.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	184 orang	143.072.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 7.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah peserta/petani tembakau yang dilatih jumlah petani yang mengikuti pelatihan dan temu karya agribisnis jumlah kelompok tani yang dinilai kelas kemampuannya	90 orang 230 orang 200 poktan	380.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 orang 250 orang 200 poktan	175.000.000,00	
	3.27.2-9.3-27.0-0.02.3.27.0 7.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah BPP yang mendapatkan fasilitasi pendataan pertanian	26 BPP	266.500.000,00	Kab. Klaten	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	26 BPP	266.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			5.062.564.000,00				5.307.056.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<i>Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan</i>	83 %	21.897.000,00			90 %	34.703.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.02.2. 01	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<i>Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang terbit</i>	100 izin	6.897.000,00			210 izin	14.703.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30. 02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>jumlah pemenuhan komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terfasilitasi</i>	100 izin	6.897.000,00	KAB. KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 izin	14.703.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.02.2. 02	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<i>prosentase Tanda Daftar Gudang yang terbit</i>	62 %	5.000.000,00			65 %	5.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30. 02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	<i>jumlah fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang</i>	5 kali	5.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 kali	5.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.02.2. 03	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<i>Jumlah surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit</i>	2 STPW	5.000.000,00			2 STPW	10.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30. 02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	<i>jumlah pengusaha yang terfasilitasi pengurusan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik</i>	1 Orang	2.500.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Orang	5.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30. 02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	<i>jumlah pengusaha yang terfasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri</i>	1 Orang	2.500.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Orang	5.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.02.2. 06	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<i>prosentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terkendali</i>	2 %	5.000.000,00			5 %	5.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30. 02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	<i>Persentase Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yang terawasi</i>	2 %	5.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 %	5.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<i>Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang terbina Jumlah pendapatan retribusi pasar</i>	42 % 43.80 % 4650000000 Rp	4.000.000.000,00			46 % 51.40 % 4700000000 Rp	4.511.388.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.03.2. 01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<i>Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola</i>	21 unit	3.700.000.000,00			22 unit	4.311.388.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terevitalisasi	1 unit	3.600.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	4.261.388.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya yang terfasilitasi pengelolannya	51 unit	100.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	51 unit	50.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang terbina	950 orang	300.000.000,00			1250 orang	200.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola Pasar yang dibina	250 Orang	200.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	250 Orang	100.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang dibina	700 Orang	100.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 Orang	100.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase pasar yang diawasi Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting ( 18 bapokting ) Persentase Kinerja Pupuk	100 % 6 % 96 %	186.013.000,00			100 % 6 % 96 %	158.643.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting ( 18 bapokting )	6 %	141.013.000,00			6 %	98.643.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan	350 Orang	141.013.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	350 Orang	98.643.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting yg terkendali	18 Jenis	35.000.000,00			18 Jenis	50.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah yang terlaksana	5 Kali	35.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	prosentase Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang terawasi	96 %	10.000.000,00			96 %	10.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	jumlah Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang terawasi	5 Jenis	10.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Jenis	10.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2 jenis	251.369.000,00			2 jenis	197.540.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event pameran yang diselenggarakan	3 event	251.369.000,00			5 event	197.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk ekspor yang dikembangkan	1 Jenis	50.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Jenis	50.000.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang nasional yang diikuti	3 Kali	151.369.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kali	97.540.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang terbina	15 Orang	50.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Orang	50.000.000,00	
	<b>3.30.2-17.3-30.0-0.03.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<i>Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang</i>	65 %	<b>361.971.000,00</b>			70 %	<b>109.025.000,00</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	<b>3.30.2-17.3-30.0-0.03.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<i>Jumlah UTTP metrologi terlaksana</i>	8000 Objek	<b>361.971.000,00</b>			8500 Objek	<b>109.025.000,00</b>	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	260 kali	351.971.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	260 kali	99.025.000,00	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1 kegiatan	10.000.000,00	KAB.KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	10.000.000,00	
	<b>3.30.2-17.3-30.0-0.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			<b>241.314.000,00</b>				<b>295.757.000,00</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			<i>Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri</i>	5 Orang				14 Orang		
	<b>3.30.2-17.3-30.0-0.03.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<i>Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	5 Kali	<b>241.314.000,00</b>			7 Kali	<b>295.757.000,00</b>	
	3.30.2-17.3-30.0-0.03.3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event pameran terlaksana	3 Kali	241.314.000,00	JAWA	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kali	295.757.000,00	
	<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			<b>7.404.908.000,00</b>				<b>7.505.654.000,00</b>	
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	<b>5.011.879.000,00</b>			100 %	<b>6.206.770.000,00</b>	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	<b>25.000.000,00</b>			100 %	<b>30.000.000,00</b>	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	5.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	4 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	10.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	7 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	15.000.000,00	
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>4.039.159.000,00</b>			100 %	<b>5.169.650.000,00</b>	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	30 Orang	4.039.159.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	38 Orang	5.169.650.000,00	
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>279.700.000,00</b>			100 %	<b>304.000.000,00</b>	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		21.000.000,00	
			<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia</i>	50 unit				50 unit		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	20 unit	25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	30.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	46800 eksemplar	14.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50000 eksemplar	15.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	48 eksemplar	5.200.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55 eksemplar	8.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	30 Kali	30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 Kali	40.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440 Kali	184.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 Kali	190.000.000,00	
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.01.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>125.400.000,00</b>			100 %	<b>120.000.000,00</b>	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	20 unit	125.400.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	120.000.000,00	
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.01.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>184.620.000,00</b>			100 %	<b>184.620.000,00</b>	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar</i>	12 Bulan	30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	30.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar</i>	14 Orang	154.620.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Orang	154.620.000,00	
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.01.2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>358.000.000,00</b>			100 %	<b>398.500.000,00</b>	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar</i>	13 unit	232.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	272.500.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara</i>	60 unit	126.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 unit	126.000.000,00	
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<i>Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina</i>	17.31 %	<b>2.292.481.000,00</b>			21.44 %	<b>1.199.732.000,00</b>	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	<b>3.31.3-31.2-7.0-0.05.02.2.0 1</b>	<b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase IKM yang terkoordinasi</i>	7.54 %	<b>2.292.481.000,00</b>			10.01 %	<b>1.199.732.000,00</b>	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 2.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	<i>Jumlah pelaksanaan pembangunan sumber daya industri yang terfasilitasi</i>	60 IKM	300.000.000,00	Melikan, Wedi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 IKM	200.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 2.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	<i>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	1 lokasi	1.000.000.000,00	Melikan, Wedi	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1 lokasi	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 2.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri yang terkoordinasi	330 IKM	892.481.000,00	Melikan, Wedi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	210 IKM	589.732.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 2.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah pembangunan industri yang terevaluasi	150 IKM	100.000.000,00	Melikan, Wedi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	150 IKM	110.000.000,00	
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	14.56 %	100.548.000,00			18.13 %	99.152.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.04.2.0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			100.548.000,00				99.152.000,00	
			Persentase IKM yang sudah berizin	8.34 %				8.67 %		
	3.31.3-31.2-7.0-0.05.3.31.0 4.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30 IKM	100.548.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 IKM	99.152.000,00	
	3.32	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>			331.807.000,00				361.903.000,00	
	3.32.3-31.2-7.0-0.05.03	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi	75 %	331.807.000,00			80 %	361.903.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	3.32.3-31.2-7.0-0.05.03.2.0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase transmigran yang lolos seleksi	85 %	331.807.000,00			87 %	361.903.000,00	
	3.32.3-31.2-7.0-0.05.3.32.0 3.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU / Kerjasama Antar Daerah	2 Dokumen	70.000.000,00	Prov DIY dan Prov Jateng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	65.000.000,00	
	3.32.3-31.2-7.0-0.05.3.32.0 3.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemberangkatan transmigrasi	20 KK	161.807.000,00	Prov DIY dan Prov Jateng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 KK	196.903.000,00	
	3.32.3-31.2-7.0-0.05.3.32.0 3.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi penyuluhan transmigrasi	5 Lokasi	50.000.000,00	Prov DIY dan Prov Jateng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Lokasi	50.000.000,00	
	3.32.3-31.2-7.0-0.05.3.32.0 3.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mengikuti pelatihan	20 Orang	50.000.000,00	Prov DIY dan Prov Jateng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Orang	50.000.000,00	
	4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			105.975.924.000,00				106.107.640.000,00	
	4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			47.235.019.000,00				47.235.019.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100 %	1.544.161.000,00			100 %	1.544.161.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.242.685.000,00	(Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	1.242.685.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	7 orang	1.242.685.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 orang	1.242.685.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>199.000.000,00</b>	<i>(Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>199.000.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	33 unit	25.000.000,00	Luar Wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	33 unit	25.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	800 eksemplar	29.000.000,00	Luar Wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	800 eksemplar	29.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	1.440 eksemplar	5.000.000,00	Luar Wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.440 eksemplar	5.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	20 kali	15.000.000,00	Luar Wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 kali	15.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 kali	125.000.000,00	Luar Wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	90 kali	125.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>23.706.000,00</b>	<i>(Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>23.706.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	6,00 unit	23.706.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,00 unit	23.706.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>78.770.000,00</b>	<i>(Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>78.770.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	5,00 unit	55.680.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5,00 unit	55.680.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	33 unit	23.090.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 unit	23.090.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<i>Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase KECAMATAN mencapai KATEGORI "WASANA"</i>	100 % 19,23 %	<b>282.443.000,00</b>			100 % 30,77 %	<b>282.443.000,00</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana Persentase administrasi Kewilayahan yang dikelola	100 % 100 %	210.443.000,00	(Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN) (Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)		100 % 100 %	210.443.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan	4 obyek	15.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 obyek	15.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Administrasi Kecamatan, Batas Wilayah dan Obyek Rupa Bumi)	4 obyek	64.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 obyek	64.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan fasilitasi pelaksanaan Otonomi daerah ( LKPJ, LPPD, RLPPD, Laporan Penerapan SPM, dan EPPD )	5 Laporan	131.443.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Laporan	131.443.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang terlaksana	100 %	72.000.000,00	(Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	72.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi obyek kerjasama dalam negeri	6 obyek	68.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 obyek	68.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah evaluasi obyek kerjasama	2 obyek	4.000.000,00	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 obyek	4.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100 %	1.869.619.000,00			100 %	1.869.619.000,00	Bagian Hukum
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.731.417.000,00	(bagian hukum, KAB. KLATEN)		100 %	1.731.417.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	13 orang	1.731.417.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 orang	1.731.417.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	53.300.000,00	(bagian hukum, KAB. KLATEN)		100 %	53.300.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	50 unit	5.000.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 unit	5.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	100 eksemplar	5.000.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 eksemplar	5.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	360 eksemplar	1.800.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	360 eksemplar	1.800.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	60 kali	5.000.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 kali	5.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 kali	35.000.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 kali	35.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	350 dokumen	1.500.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	350 dokumen	1.500.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	29.678.000,00	(bagian hukum, KAB. KLATEN)		100 %	29.678.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit	3.000.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	3.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	5,00 Unit	1.500.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5,00 Unit	1.500.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2,00 unit	25.178.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,00 unit	25.178.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2 .09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	100 %	<b>55.224.000,00</b>	(bagian hukum, KAB. KLATEN)		100 %	<b>55.224.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	4,00 unit	49.134.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4,00 unit	49.134.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	20 unit	6.090.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	6.090.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan Persentase kasus Hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum</b>	90 % 90 %	<b>603.284.000,00</b>			90 % 90 %	<b>603.284.000,00</b>	<b>Bagian Hukum</b>
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.02.2 .03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan Prosentase kasus hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum Persentase produk hukum yang diinformasikan</b>	90 % 90 % 100 %	<b>603.284.000,00</b>	(bagian hukum, KAB. KLATEN) (bagian hukum, KAB. KLATEN) (bagian hukum, KAB. KLATEN)		90 % 90 % 100 %	<b>603.284.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang ditetapkan ( Surat Keputusan, PERBUP DAN PERDA )	350,00 produk hukum	220.000.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	350,00 produk hukum	220.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah dan desa yang diselesaikan	8 perkara	208.284.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 perkara	208.284.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan/atau dipublikasikan	350 dokumen	175.000.000,00	bagian hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	375 dokumen	175.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP</b>	100 %	<b>2.078.702.000,00</b>			100 %	<b>2.078.702.000,00</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2 .02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	100 %	<b>1.634.352.000,00</b>	(Bagian Kesra, KAB. KLATEN)		100 %	<b>1.634.352.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	11,00 Orang	1.607.352.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11,00 Orang	1.607.352.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01 .01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	27.000.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	27.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2 .06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	100 %	<b>95.350.000,00</b>	(Bagian Kesra, KAB. KLATEN)		100 %	<b>95.350.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	45 Unit	11.816.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 Unit	11.816.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	48000 Eksemplar	14.450.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	43300 Eksemplar	14.450.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	20160 Eksemplar	3.084.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22160 Eksemplar	3.084.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	37 kali	28.000.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	37 kali	28.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	38.000.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 kali	38.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.01.2 .07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>32.750.000,00</b>				<b>32.750.000,00</b>	
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %		(Bagian Kesra, KAB. KLATEN)		100 %		
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	20 unit	19.000.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	19.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2,00 Unit	13.750.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,00 Unit	13.750.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.01.2 .08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	<b>265.322.000,00</b>	(Bagian Kesra, KAB. KLATEN)		100 %	<b>265.322.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1.500 Eksemplar	5.400.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Eksemplar	5.400.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12 Bulan	170.000.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	170.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	15,00 Unit	12.000.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15,00 Unit	12.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	77.922.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	77.922.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.01.2 .09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	<b>50.928.000,00</b>	(Bagian Kesra, KAB. KLATEN)		100 %	<b>50.928.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	6,00 Unit	50.928.000,00	Bagian Kesra	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6,00 Unit	50.928.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dibagi Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dalam Satu Tahun dikali 100	100 %	<b>2.463.158.000,00</b>			100 %	<b>2.463.158.000,00</b>	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.02.2 .02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	100 %	<b>2.463.158.000,00</b>	(Bag Kesra, KAB. KLATEN)		100 %	<b>2.463.158.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Terlaksananya Pendampingan rohani/hari besar keagamaan kepala daerah dengan Forkompimda, Eksekutif, ASN, Tokoh Agama, Majelis Taklim dan Kegiatan Qori/Qoriah, Hafid/Hafidzah, Organisasi Keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pelayanan Jamaah Haji, Operasional Masjid Pemda dan Fasilitasi Bantuan Tempat Ibadah	234,00 kali	1.935.821.000,00	Bagian Kesra dan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	234,00 kali	1.935.821.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan Sosial terlaksana	35 Kali	478.677.000,00	Bagian Kesra dan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 Kali	478.677.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.03.4.01 .02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan Masyarakat	46,00 Kali	48.660.000,00	Bagian Kesra dan Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	46,00 Kali	48.660.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<i>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP</i>	<i>100 persen</i>	<b>1.521.920.000,00</b>			<i>100 persen</i>	<b>1.521.920.000,00</b>	<b>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>
	<b>4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.01.2 .02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<b>1.378.780.000,00</b>	<i>(Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)</i>		<i>100 %</i>	<b>1.378.780.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	8 orang	1.312.780.000,00	Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 orang	1.312.780.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor KPA, PPTKA, PPA SKP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu	12 bulan	66.000.000,00	Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	66.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.01.2 .06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<b>44.900.000,00</b>	<i>(Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)</i>		<i>100 %</i>	<b>44.900.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	15,00 unit	14.000.000,00	Luar dan dalam daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	14.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	3.100,00 eksemplar	14.030.000,00	Luar dan dalam daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	480 eksemplar	14.030.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 kali	16.870.000,00	Luar dan dalam daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 kali	16.870.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.01.2 .07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<b>30.000.000,00</b>	<i>(Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)</i>		<i>100 %</i>	<b>30.000.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	17,00 unit	30.000.000,00	Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,00 unit	30.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.01.2 .09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	<i>100 %</i>	<b>68.240.000,00</b>	<i>(Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)</i>		<i>100 %</i>	<b>68.240.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	6,00 unit	53.240.000,00	Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6,00 unit	53.240.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	13 unit	15.000.000,00	Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 unit	15.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD kepada Pemerintah Daerah BUMD kepada Pemerintah Daerah Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Persentase Rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah yang Ditindaklanjuti Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan	5 % 100 % 100 % 5 % 100 %	3.065.808.000,00			5 % 100 % 100 % 5 % 100 %	3.065.808.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.03.2 .01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah	5 %	2.851.538.000,00	(Bag Perekonomian, KAB. KLATEN)		5 %	2.851.538.000,00	
			Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Persentase Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	100 % 100 % 5 %		(Kab Klaten, KAB. KLATEN) (Kab Klaten, KAB. KLATEN) (Kab Klaten, KAB. KLATEN)		100 % 100 % 5 %		
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Jumlah BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis	6.273.182.160 rp 35 unit	150.000.000,00	Kab. Klaten, Prov. Jateng dan Pusat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.586.841.268 rp 35 unit	150.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	4 rekomendasi	265.000.000,00	Kab. Klaten, Prov. Jateng dan Pusat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 rekomendasi	265.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	50.400 orang	2.436.538.000,00	Kab. Klaten, Prov. Jateng dan Pusat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	52.920 orang	2.436.538.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.03.2 .04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 %	214.270.000,00	(Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	214.270.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan pelaksanaan KP3 dan DBHCHT	3 dokumen	149.760.000,00	Kab. Klaten, Prov. Jateng dan Pusat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 dokumen	149.760.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.04.4.01 .03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan energi dan air	2 dokumen	64.510.000,00	Kab. Klaten, Prov. Jateng dan Pusat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	64.510.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.05.01	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100 %	1.484.056.000,00			100 %	1.484.056.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	2.000.000,00	(Bag Pembangunan, KAB. KLATEN)		100 %	2.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	2,00 Dokumen	2.000.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,00 Dokumen	2.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.274.923.000,00				1.274.923.000,00	
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		(Bag Pembangunan Setda Klaten, KAB. KLATEN)		100 %		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	8,00 Orang	1.258.392.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8,00 Orang	1.258.392.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12,00 Bulan	16.531.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12,00 Bulan	16.531.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	109.523.000,00	(Bag Pembangunan Setda Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	109.523.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	328 Eksemplar	1.476.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	328 Eksemplar	1.476.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kali	108.047.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Kali	108.047.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	18.600.000,00	(Bag Pembangunan Setda Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	18.600.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	6 Unit	7.000.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	7.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2,00 Unit	11.600.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,00 Unit	11.600.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	79.010.000,00	(Bag Pembangunan Setda Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	79.010.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	5,00 Unit	72.760.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5,00 Unit	72.760.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	13,00 Unit	6.250.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13,00 Unit	6.250.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	100 %	386.987.000,00			100 %	386.987.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03.2 .02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase Administrasi Pembangunan	100 %	386.987.000,00	(Bag Pembangunan Setda Kab Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	386.987.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan program	51 Perangkat Daerah	36.009.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	51 Perangkat Daerah	36.009.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Peraturan bupati tentang buku petunjuk pelaksanaan Pembangunan yang diterbitkan Jumlah pelaku jasa kontruksi/pengelola kegiatan yg mendapatkan pembinaan kompetensi teknis Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan keuangan sesuai target Jumlah Peraturan bupati tentang buku petunjuk pelaksanaan Pembangunan yang disosialisasikan	1 Perbup 250 Orang 51 Perangkat Daerah 1 Perbup	238.617.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Perbup 250 Orang 0 Perangkat Daerah 1 Perbup	238.617.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01 .03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang dimonitor dan dievaluasi kegiatannya Jumlah rakor perkembangan pelaksanaan kegiatan OPD yg dilaksanakan sesuai jadwal	51 Perangkat Daerah 4 Kali	112.361.000,00	Bagian Pembangunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	51 Perangkat Daerah 4 Kali	112.361.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100 %	2.706.767.000,00			100 %	2.706.767.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.2 .02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.431.934.000,00	(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, KAB. KLATEN)		100 %	2.431.934.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	18 orang	2.428.034.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 orang	2.428.034.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	3 bulan	3.900.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 bulan	3.900.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.2 .06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	52.387.000,00	(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	52.387.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30 unit	12.196.000,00	Bagian pengadaan Barang dan jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	12.196.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	150 eksemplar	5.000.000,00	Bagian pengadaan Barang dan jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	150 eksemplar	5.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	360 eksemplar	1.233.000,00	Bagian pengadaan Barang dan jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	720 eksemplar	1.233.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	10,00 kali	6.840.000,00	Bagian pengadaan Barang dan jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10,00 kali	6.840.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 kali	27.118.000,00	Bagian pengadaan Barang dan jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 kali	27.118.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.2 .07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	175.186.000,00	(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	175.186.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 unit	2.750.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	2.750.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2,00 unit	172.436.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8,00 unit	172.436.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	1.500.000,00	(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	1.500.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12 eksemplar	1.500.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 eksemplar	1.500.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	45.760.000,00	(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	45.760.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	5,00 unit	38.380.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5,00 unit	38.380.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	16 unit	7.380.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 unit	7.380.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan Dengan E-procurement	100 %	627.460.000,00			100 %	627.460.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	100 %	627.460.000,00	(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	627.460.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket yang dilelangkan atau di Tenderkan	100 paket	531.312.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 paket	531.312.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah OPD dan Penyedia yang dilayani Pengadaan secara Elektronik	351,00 OPD dan Penyedia	72.103.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	351,00 OPD dan Penyedia	72.103.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa	1 kegiatan	24.045.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	24.045.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100 %	21.764.547.000,00			100 %	21.764.547.000,00	Bagian Umum
			Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	100 %				100 %		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	66.000.000,00	(Setda Kab Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	66.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	7 dokumen	66.000.000,00	Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 dokumen	66.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	7.119.504.000,00	(Bag Umum dan Sekretariat, KAB. KLATEN)		100 %	7.119.504.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	57,00 Orang	6.894.264.000,00	Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	57,00 Orang	6.894.264.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12,00 bulan	165.240.000,00	Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12,00 bulan	165.240.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	400 dokumen	55.000.000,00	Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	400 dokumen	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 dokumen	5.000.000,00	Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,00 dokumen	5.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase barang milik daerah pada sekretariat daerah teradministrasi dengan baik</i>	100 %	<b>5.000.000,00</b>	(Setda Kab Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	<b>5.000.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	16 dokumen	5.000.000,00	Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 dokumen	5.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</i>	100 %	<b>5.000.000,00</b>	(Setda Kab Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	<b>5.000.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	5.000.000,00	Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 dokumen	5.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>2.158.491.000,00</b>	(Bag Umum Setda Kab Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	<b>2.158.491.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	75 unit	281.000.000,00	Luar dan dalam kab klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 unit	281.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	60 unit	150.000.000,00	Luar dan dalam kab klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 unit	150.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	89 unit	50.000.000,00	Luar dan dalam kab klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	89 unit	50.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia	1 unit	25.000.000,00	Luar dan dalam kab klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	25.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	119477 eksemplar	100.000.000,00	Luar dan dalam kab klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	119477 eksemplar	100.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	11380 eksemplar	42.000.000,00	Luar dan dalam kab klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11380 eksemplar	42.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	160 kali	860.491.000,00	Luar dan dalam kab klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	160 kali	860.491.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	812,00 Kali	650.000.000,00	Luar dan dalam kab klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	795,00 Kali	650.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>222.628.000,00</b>	(Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin Bup/Wabup, KAB. KLATEN)		100 %	<b>222.628.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan <i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	1 unit 1 unit	72,628,000,00	(Bagian Umum Setda Kab Klaten, KAB. KLATEN)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit unit	0	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4 unit	50.000.000,00	Bag Umum dan Rumdin	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	50.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan <i>Pengadaan sarana dan prasara pendukung gedung kantor/bangunan lainnya</i>	661,00 unit 661 unit	100,000,000,00	(Bag Umum dan Rumdin, KAB. KLATEN)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	668,00 unit unit	150,000,000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>5.761.260.000,00</b>	(Bag Umum Setda Kab Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	<b>5.761.260.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	2.490 eksemplar	72.500.000,00	Dalam dan Luar Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2.490 eksemplar	72.500.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12,00 bulan	2.300.000.000,00	Dalam dan Luar Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12,00 bulan	2.300.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10.824,00 unit	250.000.000,00	Dalam dan Luar Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10.874,00 unit	250.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	140,00 Orang	3.138.760.000,00	Dalam dan Luar Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	140,00 Orang	3.138.760.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2 .09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>2.158.088.000,00</b>	<i>(Bag Umum Setda Kab Klaten &amp; Rumdin Bup/Wabup, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>2.158.088.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	7 unit	325.700.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin Bup/Wabup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	325.700.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	35,00 unit	940.000.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin Bup/Wabup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35,00 unit	940.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	100 unit	30.000.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin Bup/Wabup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 unit	30.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 unit	695.138.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin Bup/Wabup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	695.138.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	141 unit	167.250.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin Bup/Wabup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	101 unit	167.250.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2 .11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<i>Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>2.018.576.000,00</b>	<i>(Bag Umum Setda Kab Klaten, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>2.018.576.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	268.576.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	268.576.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	24 stel	100.000.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24 stel	100.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2,00 Orang	100.000.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,00 Orang	100.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersedia	12 bulan	1.550.000.000,00	Bag Umum Setda Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	1.550.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2 .12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah</i>	100 %	<b>2.250.000.000,00</b>	<i>(Rumdin Bupati/Wabup, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>2.250.000.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12,00 bulan	1.510.000.000,00	Rumdin Wabup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12,00 bulan	1.510.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01 .01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia	12,00 bulan	740.000.000,00	Rumdin Wabup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12,00 bulan	740.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	100 % 100 % 100 % 100 %	2.219.630.000,00			100 % 100 % 100 % 100 %	2.219.630.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.765.305.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. KLATEN)		100 %	1.765.305.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	12 Orang	1.765.305.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang	1.765.305.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	75.968.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. KLATEN)		100 %	75.968.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	41 Unit	12.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	41 Unit	12.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	640 Eksemplar	6.084.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	640 Eksemplar	6.084.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	36 Eksemplar	3.084.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Eksemplar	3.084.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	4 Kali	3.800.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Kali	3.800.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kali	51.000.000,00	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Kali	51.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	4.000.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. KLATEN)		100 %	4.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1,00 Unit	4.000.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,00 Unit	4.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	1.237.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. KLATEN)		100 %	1.237.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	200 Eksemplar	1.237.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Eksemplar	1.237.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	44.220.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. KLATEN)		100 %	44.220.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	1,00 Unit	39.880.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,00 Unit	39.880.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 Unit	4.340.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	4.340.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	100 %	328.900.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. KLATEN)		100 %	328.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01 .01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Hasil Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	84.300.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	84.300.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01 .01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.000.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	90.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01 .01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	128.400.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	128.400.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.4.01 .01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	26.200.000,00	Bagian Organisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	26.200.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<i>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP</i>	100 %	<b>4.616.477.000,00</b>			100 %	<b>4.616.477.000,00</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN</i>	100 %	<b>2.301.002.000,00</b>	<i>(Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>2.301.002.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.289.002.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.289.002.000,00	
			<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	19 orang				19 orang		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPS SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu</i>	12 Bulan	12.000.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	12.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>224.187.000,00</b>	<i>(Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>224.187.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	62,00 unit	35.000.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	62,00 unit	35.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia</i>	850 eksemplar	35.000.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	850 eksemplar	35.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia</i>	96 eksemplar	14.405.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	96 eksemplar	14.405.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi</i>	18 kali	25.000.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 kali	25.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	240 kali	114.782.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	220 kali	114.782.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>50.000.000,00</b>	<i>(Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)</i>		100 %	<b>50.000.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah mebel yang diadakan</i>	1 unit	25.000.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	25.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan</i>	2,00 unit	25.000.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,00 unit	25.000.000,00	
	<b>4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>156.384.000,00</b>				<b>156.384.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintah daerah tepat waktu	100 %		(Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)		100 %		
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.09.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	23.500.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	23.500.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.09.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	2 orang	132.884.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 orang	132.884.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.09.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %	<b>84.000.000,00</b>	(Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)		100 %	<b>84.000.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.09.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	14,00 unit	84.000.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14,00 unit	84.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.09.01.2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Keprotokol yang sesuai dengan SOP Persentase Pelaksanaan Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang sesuai SOP Persentase Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan SOP	100 % 100 % 100 %	<b>1.800.904.000,00</b>	(Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN) (Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN) (Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten, KAB. KLATEN)		100 % 100 % 100 %	<b>1.800.904.000,00</b>	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.09.4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah fasilitas Keprotokol yang sesuai dengan SOP	350 kegiatan	415.000.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	340 kegiatan	415.000.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.09.4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitas komunikasi pimpinan yang sesuai SOP	350 kegiatan	630.728.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	350 kegiatan	630.728.000,00	
	4.01.4-1.0-0-0-0.01.09.4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan yang sesuai SOP	1.720 kegiatan	755.176.000,00	Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.720 kegiatan	755.176.000,00	
	<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>58.740.905.000,00</b>				<b>58.872.621.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0-0-0.01.01	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	<b>40.345.207.000,00</b>			100 %	<b>39.112.570.000,00</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
	4.02.4-2.0-0-0-0.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 %	<b>25.000.000,00</b>			100 %	<b>26.250.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0-0-0.01.4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	9 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	26.250.000,00	
	4.02.4-2.0-0-0-0.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	<b>4.517.666.000,00</b>			100 %	<b>4.222.666.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0-0-0.01.4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	40 Orang	4.492.666.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	39 Orang	4.192.666.000,00	
	4.02.4-2.0-0-0-0.01.4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	12 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	30.000.000,00	
	4.02.4-2.0-0-0-0.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	<b>722.976.000,00</b>			100 %	<b>872.976.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0-0-0.01.4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Unit	12.935.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	12.935.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia	7 Unit	19.450.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Unit	19.450.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	35000 Eksemplar	35.250.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35000 Eksemplar	35.250.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	483 Eksemplar	134.982.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	483 Eksemplar	134.982.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	80 Kali	202.825.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	85 Kali	202.825.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Kali	317.534.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	115 Kali	467.534.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>650.000.000,00</b>			100 %	<b>150.000.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	130 Unit	250.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	7,00 Unit	400.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	150.000.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>1.165.814.000,00</b>			100 %	<b>1.130.731.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	8000 Eksemplar	45.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8000 Eksemplar	45.000.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	431.145.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	431.145.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	35 Unit	91.676.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 Unit	91.676.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum eterbayar	18 Orang	597.993.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Orang	562.910.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>1.296.882.000,00</b>			100 %	<b>1.296.882.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	5 Unit	206.601.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	206.601.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	21 Unit	332.070.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 Unit	332.070.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	40 Unit	51.250.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Unit	51.250.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 Unit	386.372.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	386.372.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	14 Unit	320.589.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Unit	320.589.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<i>Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD</i>	100 %	<b>30.510.153.000,00</b>			100 %	<b>30.360.153.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan	50 Orang	29.911.879.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	29.911.879.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut DPRD	250 Stel	544.098.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 Stel	394.098.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Medical Check Up DPRD	50 Orang	54.176.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Orang	54.176.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase DPRD terlayani administrasinya</b>	<b>100 %</b>	<b>1.456.716.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>1.052.912.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi Fraksi DPRD	7 Fraksi	81.854.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Fraksi	81.854.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Risalah Rapat Paripurna DPRD yang tersusun Jumlah Publik Hearing/dialog dengan Tokoh Masyarakat/Agama yang dilaksanakan	80 Dokumen 48 Kegiatan	903.804.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	64 Dokumen 48 Kegiatan	500.000.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.01 2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			471.058.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		471.058.000,00	
			Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	9 Jenis				9 Jenis		
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<i>Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan</i>	75 % 100 % 100 %	<b>18.395.698.000,00</b>			75 % 100 % 100 %	<b>19.760.051.000,00</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<i>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan</i>	100 %	<b>4.718.902.000,00</b>			100 %	<b>4.878.697.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02 2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dibahas dan tersusun	20 Dokumen	692.710.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	692.710.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02 2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Raperda yang dibahas	8 Raperda	3.536.192.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Raperda	4.065.987.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02 2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	4 Dokumen	80.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	40.000.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02 2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD terfasilitasi	4 Dokumen	160.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	80.000.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02 2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tatib DPRD yang ditetapkan	1 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	-	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<i>Persentase kebijakan Anggaran yang dibahas</i>	100 %	<b>964.912.000,00</b>			100 %	<b>1.164.912.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02 2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah frekuensi pembahasan APBD	6 Kali	964.912.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Kali	1.164.912.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<i>Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan terawasi</i>	100 %	<b>3.889.056.000,00</b>			100 %	<b>4.493.500.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02 2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			926.346.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1.026.346.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi	16 OPD				16 OPD		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang diawasi	7 OPD	912.358.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 OPD	1.212.358.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat terawasi	5 OPD	1.072.349.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 OPD	1.072.198.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian terawasi	6 OPD	978.003.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 OPD	1.182.598.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<i>Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas</i>	100 %	<b>2.458.263.000,00</b>			100 %	<b>2.659.513.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah peserta pendalaman tugas DPRD	300 Orang	1.897.655.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 Orang	2.097.655.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis Publikasi dan Dokumentasi Dewan	10 jenis	261.608.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 jenis	262.858.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	7 Orang	299.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Orang	299.000.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<i>Persentase reses yang dilaksanakan</i>	100 %	<b>2.854.460.000,00</b>			100 %	<b>2.854.460.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD tersusun	3 Dokumen	30.000.000,00	Seluruh Kecamatan di kabupaten klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan	3,00 Kali	2.824.460.000,00	Seluruh Kecamatan di kabupaten klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kali	2.824.460.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<i>Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan</i>	100 %	<b>597.216.000,00</b>			100 %	<b>247.216.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD			350.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			-
			Jumlah Kode Etik DPRD tersusun	2 Dokumen				0 Dokumen		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan pelaksanaan Kode Etik DPRD	6 Kali	247.216.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Kali	247.216.000,00	
	<b>4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<i>Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya</i>	100 %	<b>2.912.889.000,00</b>			100 %	<b>3.461.753.000,00</b>	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksanakan	25 Kali	350.000.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 Kali	350.000.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13 Kali	929.666.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Kali	1.129.667.000,00	
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah frekuensi fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	30 Kali	1.633.223.000,00	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 Kali	1.982.086.000,00	
<b>5</b>		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>654.665.455.000,00</b>				<b>653.957.930.000,00</b>	
<b>5.01</b>		<b>PERENCANAAN</b>			<b>9.942.336.000,00</b>				<b>9.905.395.000,00</b>	
<b>5.01.5-1.5-5.0-0.02.01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %	<b>6.139.666.000,00</b>			100 %	<b>6.155.521.000,00</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	<b>115.000.000,00</b>			100 %	<b>115.000.000,00</b>	
5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	2 Dokumen	50.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 Dokumen	25.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	40.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	40.000.000,00	
	<b>5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>5.114.364.000,00</b>			100 %	<b>5.216.328.000,00</b>	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	32 Orang	5.054.364.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 Orang	5.156.328.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	10.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	10.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	40 Dokumen	50.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Dokumen	50.000.000,00	
	<b>5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>257.826.000,00</b>			100 %	<b>257.000.000,00</b>	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	9 unit	10.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	10.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	24 unit	25.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	25.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	14 unit	10.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	10.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	50000 Eksemplar	15.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50000 Eksemplar	15.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	23000 Eksemplar	7.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23000 Eksemplar	7.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	30 Kali	40.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Kali	40.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150.826.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		150.000.000,00	
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali				50 Kali		
	<b>5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>98.860.000,00</b>			100 %	<b>38.000.000,00</b>	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5 unit	28.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	28.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 unit	70.860.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	10.000.000,00	
	<b>5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>238.186.000,00</b>			100 %	<b>213.763.000,00</b>	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1500 surat	10.000.000,00	BAPPEDA kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1500 surat	10.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	142.600.000,00	BAPPEDA kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	118.177.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	3 orang	85.586.000,00	BAPPEDA kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 orang	85.586.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	315.430.000,00			100 %	315.430.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	34 unit	230.390.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 unit	230.390.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	25 unit	10.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	10.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit				1 unit		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 unit	25.040.000,00	BAPPEDA Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	25.040.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 77 %	2.228.751.000,00			100 % 78 %	2.197.807.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.02.2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan	100 %	1.606.617.000,00			100 %	1.587.807.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen (RKPD, RPJMD, RPJPD) analisis pembangunan daerah	1 Dokumen	75.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	75.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen (RPJMD, RKPD dan RPJPD) yang ditelaah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	100.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan	1 kegiatan	100.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Forum SKPD/Lintas SKPD Bidang yang dilaksanakan	3 kegiatan	150.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	131.190.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	250.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan yang disusun	1 dokumen	100.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	831.617.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	831.617.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik	100 %	312.134.000,00			100 %	300.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6 dokumen	312.134.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 dokumen	300.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.02.2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersusun	100 %	310.000.000,00			100 %	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02 2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	210.000.000,00	BAPPEDA KAB KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 dokumen	210.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.02 2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	100.000.000,00	BAPPEDA KAB KLATEN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Wilayah Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 % 100 %	<b>1.573.919.000,00</b>			100 % 100 %	<b>1.552.067.000,00</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasikan	100 %	<b>458.569.000,00</b>			100 %	<b>450.000.000,00</b>	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Kali	83.569.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Kali	75.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Kali	40.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kali	40.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Kali	25.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	25.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang tersinergitas dan terharmonisasi	1 Dokumen	50.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Kali	100.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24 Kali	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Kali	50.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	50.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Kali	25.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	25.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersinergitas dan terharmonisasi	1 Dokumen	85.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	85.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan	100 %	<b>465.350.000,00</b>			100 %	<b>465.350.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Kali	100.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 Kali	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			50.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50.000.000,00	
			Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Kali				10 Kali		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Kali	40.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Kali	40.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersinergitas dan terharmonisasi	1 Dokumen	100.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Kali	100.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Kali	25.350.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	25.350.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Kali	25.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Kali	25.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersinergitas dan terharmonisasi	1 dokumen	25.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	25.000.000,00	
	<b>5.01.5-1.5-5.0-0.02.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<i>Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang terkoordinasikan</i>	100 %	<b>650.000.000,00</b>			100 %	<b>636.717.000,00</b>	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Kali	100.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	100.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			50.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50.000.000,00	
			Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	12 Kali				12 Kali		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 Kali	25.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kali	25.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersinergitas dan terharmonisasi	1 Dokumen	50.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	20 Kali	150.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	150.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Kali	50.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	50.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Kali	25.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kali	25.000.000,00	
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.5.01.03 2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersinergitas dan terharmonisasi	1 dokumen	200.000.000,00	Bappeda Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	186.717.000,00	
	<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>			<b>629.077.602.000,00</b>				<b>628.412.480.000,00</b>	
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %	<b>20.286.904.000,00</b>			100 %	<b>20.269.964.000,00</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah</b>
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	70 %	<b>30.000.000,00</b>			71 %	<b>31.214.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3 Dokumen	15.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	15.607.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 Dokumen	15.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.607.000,00	
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN</i>	100 %	<b>17.653.430.000,00</b>			100 %	<b>17.882.924.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	97 Orang	17.538.470.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	97 Orang	17.766.470.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor PA SKPD dan PPTKA	12 bulan	114.960.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	116.454.000,00	
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</i>	100 %	<b>301.000.000,00</b>			100 %	<b>304.913.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	73 Unit	301.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	73 Unit	304.913.000,00	
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>416.902.000,00</b>			100 %	<b>422.321.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	7 Unit	15.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Unit	15.195.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	48 Unit	50.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48 Unit	50.650.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	16 Unit	10.902.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Unit	11.043.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	11 eksemplar	50.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 eksemplar	50.650.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	8 eksemplar	10.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 eksemplar	10.130.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	100 Kali	100.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Kali	101.300.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	151.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Kali	152.963.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	1000 dokumen	30.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 dokumen	30.390.000,00	
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	<b>100 %</b>	<b>330.447.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>53.250.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	12 Unit	330.447.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	53.250.000,00	
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	<b>100 %</b>	<b>270.275.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>273.789.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	300 eksemplar	4.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 eksemplar	4.052.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	190.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	192.470.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	76.275.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	77.267.000,00	
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	<b>100 %</b>	<b>1.284.850.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>1.301.553.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.174.750.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1.190.022.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	95 Unit				95 Unit		
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	50 Unit	6.850.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 Unit	6.939.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 Unit	50.000.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	50.650.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	60 Unit	53.250.000,00	BPKD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 Unit	53.942.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<i>Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir) Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati) Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah</i>	100 % 100 % 84 %	<b>603.137.876.000,00</b>			100 % 100 % 84.50 %	<b>602.495.713.000,00</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah</b>
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<i>Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati</i>	100 %	<b>2.054.000.000,00</b>			100 %	<b>2.080.702.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Jumlah dokumen KUA PPAS yang tersusun</i>	2 Dokumen	105.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	106.365.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS yg tersusun</i>	2 Dokumen	105.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	106.365.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun</i>	52 Dokumen	35.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	52 Dokumen	35.455.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun</i>	52 Dokumen	50.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	52 Dokumen	50.650.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun</i>	52 Dokumen	10.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	52 Dokumen	10.130.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun</i>	52 Dokumen	15.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	52 Dokumen	15.195.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Jumlah peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun</i>	2 Dokumen	760.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	769.880.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun</i>	2 Dokumen	924.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	936.012.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peserta yang dilatih penganggaran APBD</i>	120 Orang	50.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120 Orang	50.650.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<i>Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah</i>	84.50 %	<b>720.477.000,00</b>			85 %	<b>729.843.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Frekuensi Pengelolaan Kasda</i>	12 Kali	73.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kali	73.949.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah Bendel SPD</i>	900 Bandel	19.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	900 Bandel	19.247.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Frekuensi Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	12 Kegiatan	119.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	120.547.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D, SPB, SP2B yang diterbitkan	12000 Kegiatan	96.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12000 Kegiatan	97.248.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Frekuensi Pengelolaan piutang dan utang daerah	12 Kegiatan	41.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	41.533.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang diterbitkan	3500 Kegiatan	164.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3500 Kegiatan	166.132.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Perda/Perbup Yang Tersusun	2,00 Perda/Perbup	36.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Perda/Perbup	36.468.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembinaan	2 Kali	172.477.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kali	174.719.000,00	
	<b>5.02.5-2.0-0.0-0.04.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<i>Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)</i>	100 %	<b>1.321.977.000,00</b>			100 %	<b>1.339.163.000,00</b>	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran tersusun	1 Jenis Dokumen	121.977.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Jenis Dokumen	123.563.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang disusun	2 Jenis Dokumen	200.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis Dokumen	202.600.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Jenis Data yang dikelola	1 Jenis Dokumen	100.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Jenis Dokumen	101.300.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 Sisdur	750.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Sisdur	759.750.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	2 Jenis Dokumen	150.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis Dokumen	151.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus)	99 %	599.041.422.000,00			99 %	598.346.005.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 .2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Frekuensi Sosialisasi dan penyerahan pagu bantuan keuangan	2 Kegiatan	581.133.052.889,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	579.090.353.320,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 .2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	41 %	5.000.000.000,00	BPKD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	42 %	5.065.000.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.02 .2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase pencairan belanja bagi hasil	85 %	12.908.369.111,00	BPKD Kab Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85 %	14.190.651.680,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	100 %	2.873.931.000,00			100 %	2.870.870.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	80 %	2.873.931.000,00			100 %	2.870.870.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.03 .2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Jenis Dokumen Standarisasi yang tersusun	3 Jenis Dokumen	275.000.000,00	Kab Klaten dan sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Jenis Dokumen	278.575.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.03 .2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Jenis Dokumen	150.000.000,00	Kab Klaten dan sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis Dokumen	151.950.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.03 .2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang teramankan	310,00 Buah	500.000.000,00	Kab Klaten dan sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	310 Buah	506.500.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.03 .2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	frekuensi pengawasan/pengendalian barang	5 UPB	50.000.000,00	Kab Klaten dan sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 UPB	50.650.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.03 .2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelolaan Barang terkelola	930,00 UPB	843.887.000,00	Kab Klaten dan sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	930,00 UPB	814.436.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.03 .2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang Yg Direkonsiliasi	930,00 UPB	150.000.000,00	Kab Klaten dan sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	930,00 UPB	151.950.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.03 .2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus barang yang terbina	930 Orang	905.044.000,00	Kab Klaten dan sekitarnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	930 Orang	916.809.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Rasio PAD	10 %	2.778.891.000,00			10.50 %	2.775.933.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.04.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Rasio PAD	10 %	2.778.891.000,00			11 %	2.775.933.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.04 .2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi penyuluhan pajak daerah	30 Kali	472.500.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Kali	478.643.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.04 .2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasara pengelolaan pajak daerah yang terpelihara	3 Sistem	673.200.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Sistem	681.952.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.04 .2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Frekuensi Pendataan	15 Kegiatan	118.500.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Kegiatan	120.040.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.04 .2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Frekuensi kegiatan update data Wajib Pajak daerah	12 Kegiatan	413.707.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	419.085.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.04 .2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	300.716.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	304.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.04 2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	<i>Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah, intensifikasi pajak daerah dan pemberian hadiah pajak daerah</i>	30 <i>Bandel</i>	772.752.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 <i>Bandel</i>	743.714.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.04 2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Frekuensi Pemeriksaan Pajak Daerah dan Frekuensi Penertiban Reklame</i>	12 <i>Kegiatan</i>	16.300.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 <i>Kegiatan</i>	16.512.000,00	
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.5.02.04 2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<i>Frekuensi Monitoring Retribusi Daerah</i>	12 <i>Kegiatan</i>	11.216.000,00	Wilayah Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 <i>Kegiatan</i>	11.362.000,00	
	<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			<b>8.125.242.000,00</b>				<b>8.316.125.000,00</b>	
	<b>5.03.5-3.5-4.0-0.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	<b>6.018.874.000,00</b>			100 %	<b>6.044.269.000,00</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
	<b>5.03.5-3.5-4.0-0.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5.104.755.000,00</b>				<b>5.298.269.000,00</b>	
			<i>Persentase Pembayaran Gaji Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>	100 %				100 %		
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan</i>	41 <i>orang</i>	5.054.755.000,00	BKPPPD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	41 <i>orang</i>	5.248.269.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu</i>	12 <i>Bulan</i>	50.000.000,00	BKPPPD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 <i>Bulan</i>	50.000.000,00	
	<b>5.03.5-3.5-4.0-0.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>500.000.000,00</b>			100 %	<b>450.000.000,00</b>	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	59 <i>Unit</i>	48.000.000,00	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	60 <i>Unit</i>	48.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia</i>	6 <i>Eksemplar</i>	57.000.000,00	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 <i>Eksemplar</i>	57.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi</i>	1226 <i>Kali</i>	95.000.000,00	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1226 <i>Kali</i>	95.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	222 <i>Kali</i>	300.000.000,00	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	222 <i>Kali</i>	250.000.000,00	
	<b>5.03.5-3.5-4.0-0.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>218.119.000,00</b>			100 %	<b>100.000.000,00</b>	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan</i>	7 <i>Unit</i>	218.119.000,00	BKPPD Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 <i>Unit</i>	100.000.000,00	
	<b>5.03.5-3.5-4.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>24.000.000,00</b>			100 %	<b>24.000.000,00</b>	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			24.000.000,00	DKI Jakarta, Jawa tengah, DIY, Jabar, Jatim	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24.000.000,00	
			<i>Jumlah Surat terkirim</i>	8350 <i>Eksemplar</i>				8350 <i>Eksemplar</i>		
	<b>5.03.5-3.5-4.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	90 %	<b>172.000.000,00</b>			85 %	<b>172.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	19 Unit	75.000.000,00	BKPPD Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Unit	75.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	95 Unit	97.000.000,00	BKPPD Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	95 Unit	97.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi Persentase Kinerja ASN bernilai baik Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	80 % 90 % 90 % 75 %	2.106.368.000,00			80 % 90 % 80 % 75 %	2.271.856.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.02.2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase ASN yang pensiun tepat waktu Persentase Data ASN yang dikelola dengan baik Persentase terpenuhinya Calon ASN yang sesuai Formasi	100 % 94 % 80 %	965.668.000,00			100 % 94 % 80 %	1.121.156.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon ASN yang sesuai Formasi	1000 CASN	611.468.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 CASN	780.556.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN Purna tugas yang menerima SK Pensiun	773 ASN	70.600.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	682 ASN	70.600.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang terfasilitasi	1 Lembaga	10.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Lembaga	10.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			57.400.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		60.000.000,00	
			Jumlah Aplikasi Yang dikelola	3 Aplikasi				3 Aplikasi		
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang dikelola	9000 Data	216.200.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9000 Data	200.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.02.2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang terselesaikan tepat waktu Persentase ASN yang ditempatkan sesuai Kualifikasi dan kompetensinya	95 % 75 %	452.300.000,00			95 % 75 %	452.300.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan	500 ASN	226.000.000,00	BKPPD Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 ASN	226.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	1300 SK	226.300.000,00	BKPPD Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1300 SK	226.300.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.02.2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan Persentase ASN yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan	100 % 80 %	508.400.000,00			100 % 80 %	508.400.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan	300 ASN	400.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 ASN	400.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan	200 ASN	50.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 ASN	50.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02 .2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	300 Pejabat Fungsional	58.400.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 Pejabat Fungsional	58.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kasus Pelanggaran disiplin dan perceraian yang terselesaikan Persentase Sasaran Kerja Pegawai yang di nilai dan di evaluasi	90 % 90 %	180.000.000,00			80 % 90 %	190.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Sasaran Kerja Pegawai ASN yang bernilai baik	9000 ASN	40.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9000 ASN	50.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan ASN Yang Mendapatkan Penghargaan	75 ASN	25.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 ASN	25.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran disiplin Yang terselesaikan	7 Kasus	60.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Kasus	60.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian ASN yang terselesaikan	5 Izin	25.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Izin	25.000.000,00	
	5.03.5-3.5-4.0-0.01.5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah OPD yang di Monitoring dan di sidak	55 OPD	30.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55 OPD	30.000.000,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6.705.841.000,00				6.594.711.000,00	
	5.04.5-3.5-4.0-0.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	80 %	6.705.841.000,00			80 %	6.594.711.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.5-3.5-4.0-0.01.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis	80 %	617.909.000,00			80 %	594.711.000,00	
	5.04.5-3.5-4.0-0.01.5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis	220 ASN	617.909.000,00	DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	285 ASN	594.711.000,00	
	5.04.5-3.5-4.0-0.01.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	86 %	6.087.932.000,00			80 %	6.000.000.000,00	
	5.04.5-3.5-4.0-0.01.5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	1100 CASN dan ASN	6.087.932.000,00	DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	890 CASN dan ASN	6.000.000.000,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			814.434.000,00				729.219.000,00	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			814.434.000,00				729.219.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	54.80 % 14.68 %				59.40 % 15 %		
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana	100 %	224.434.000,00			100 %	180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	120.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	120.000.000,00	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	-	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen data kelitbangan dan peraturan yang tersusun	1 Dokumen	64.434.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60.000.000,00	
	<b>5.05.5-1.5-5.0-0.02.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<i>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terlaksana</i>	100 %	<b>200.000.000,00</b>			100 %	<b>200.000.000,00</b>	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang terlaksana	1 Dokumen	150.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	150.000.000,00	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja yang terlaksana	1 Dokumen	50.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	
	<b>5.05.5-1.5-5.0-0.02.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<i>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana</i>	100 %	<b>215.000.000,00</b>			100 %	<b>175.000.000,00</b>	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terlaksana	1 Dokumen	50.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	-	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			165.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		175.000.000,00	
			Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang terlaksana	1 Dokumen				1 Dokumen		
	<b>5.05.5-1.5-5.0-0.02.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<i>Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terlaksana</i>	100 %	<b>175.000.000,00</b>			100 %	<b>174.219.000,00</b>	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	120.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	102.219.000,00	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil-Hasil Kelitbangan yang tersosialisasi dan terdiseminasi	1 Dokumen Hasil Kelitbangan	40.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen Hasil Kelitbangan	40.000.000,00	
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang terfasilitasi	1 HAKI	15.000.000,00	Bappeda Kab. Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 HAKI	32.000.000,00	
	<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>18.272.978.000,00</b>				<b>18.121.238.000,00</b>	
	<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			<b>18.272.978.000,00</b>				<b>18.121.238.000,00</b>	
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %	<b>12.700.640.000,00</b>			100 %	<b>12.582.811.000,00</b>	<b>Inspektorat</b>
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun</i>	100 %	<b>56.000.000,00</b>			100 %	<b>57.120.000,00</b>	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3 dokumen	10.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 dokumen	10.200.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD tersusun	1 dokumen	3.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	3.060.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	1 dokumen	3.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	3.060.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD tersusun	1 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD tersusun	1 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	12 dokumen	25.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 dokumen	25.500.000,00	
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>8.824.151.000,00</b>			100 %	<b>8.881.895.000,00</b>	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	54 orang	8.794.151.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	54 orang	8.851.295.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD yang tersusun	12 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 dokumen	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumentasi akuntansi SKPD yang tersusun	12 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 dokumen	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	4 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD tersusun	16 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 dokumen	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	12 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 dokumen	5.100.000,00	
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>50.600.000,00</b>				<b>50.700.000,00</b>	
			<i>persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	228 stel	45.600.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	228 stel	45.600.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	4 dokumen	5.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	5.100.000,00	
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>702.000.000,00</b>			100 %	<b>785.000.000,00</b>	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	210 unit	50.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	210 unit	51.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	3150 unit	100.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3150 unit	120.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga tersedia	20 unit	20.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	20.400.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik tersedia	450 unit	20.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	450 unit	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia</i>	66650 <i>eksemplar</i>	60.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	66650 <i>eksemplar</i>	80.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia</i>	3624 <i>eksemplar</i>	12.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3624 <i>eksemplar</i>	12.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>jumlah kunjungan tamu terfasilitasi</i>	225 <i>kali</i>	80.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	225 <i>kali</i>	91.600.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	200 <i>kali</i>	350.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 <i>kali</i>	380.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10.000.000,00	
			<i>jumlah arsip dinamis pada SKPD tertata</i>	100 <i>dokumen</i>				100 <i>dokumen</i>		
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan opemerintah daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>1.358.000.000,00</b>			100 %	<b>1.249.196.000,00</b>	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan</i>	4 <i>unit</i>	550.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 <i>unit</i>	650.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan</i>	24 <i>unit</i>	495.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 <i>unit</i>	286.196.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan</i>	12 <i>unit</i>	313.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 <i>unit</i>	313.000.000,00	
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>720.000.000,00</b>			100 %	<b>745.400.000,00</b>	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Surat Terkirim</i>	1300 <i>Eksemplar</i>	20.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1300 <i>Eksemplar</i>	20.400.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar</i>	12 <i>bulan</i>	300.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 <i>bulan</i>	325.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar</i>	14 <i>orang</i>	400.000.000,00	Inspektorat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 <i>orang</i>	400.000.000,00	
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>989.889.000,00</b>			100 %	<b>813.500.000,00</b>	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar</i>	25,00 <i>unit</i>	425.720.000,00	Wilayah Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 <i>unit</i>	425.720.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>jumlah mebel terpelihara</i>	32,00 <i>unit</i>	5.000.000,00	Wilayah Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 <i>unit</i>	5.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara</i>	158,00 <i>unit</i>	132.680.000,00	Wilayah Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	158 <i>unit</i>	132.680.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ Terpelihara</i>	1 <i>unit</i>	426.489.000,00	Wilayah Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 <i>unit</i>	250.000.000,00	
	<b>6.01.6-1.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<i>Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4 Persentase pelaksanaan pengawasan khusus</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>1.256.843.000,00</b>			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	<b>1.267.977.000,00</b>	<b>Inspektorat</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100 %	866.843.000,00			100 %	867.177.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah laporan audit kinerja	8 dokumen	55.000.000,00	OPD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 dokumen	56.100.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan audit keuangan	8 dokumen	55.000.000,00	OPD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 dokumen	55.257.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan reviu Kinerja	58 dokumen	150.000.000,00	OPD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	58 dokumen	150.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan reviu keuangan	223 dokumen	190.000.000,00	OPD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	223 dokumen	190.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Audit Desa	72 dokumen	266.843.000,00	OPD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	72 dokumen	266.843.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI/APIP	84 dokumen	150.000.000,00	OPD Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	86 dokumen	148.977.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase aduan/kerugian daerah yang di tindaklanjuti	100 %	390.000.000,00			100 %	400.800.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Kasus	40.000.000,00	Wilayah Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kasus	40.800.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan audit tujuan tertentu	71 Dokumen	350.000.000,00	Wilayah Kab Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	71 Dokumen	360.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4 Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.315.495.000,00			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.270.450.000,00	Inspektorat
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	100 %	2.000.000.000,00			100 %	1.963.450.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang di tetapkan	5 dokumen	900.000.000,00	Pulau Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 dokumen	863.450.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pengawas yang mendapatkan peningkatan kapasitas (orang)	54 orang	1.100.000.000,00	Pulau Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	54 orang	1.100.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	66 Nilai	2.315.495.000,00			68 Nilai	2.307.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pendampingan dan asistensi	50 dokumen	1.000.000.000,00	Pulau Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 dokumen	1.000.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Pada Perangkat Daerah	51 dokumen	242.000.000,00	Pulau Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	51 dokumen	247.000.000,00	
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (dokumen)	15 dokumen	750.000.000,00	Pulau Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 dokumen	750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.6.01.03 2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 dokumen	323.495.000,00	Pulau Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 dokumen	310.000.000,00	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			<b>95.959.736.200,00</b>				<b>106.040.868.900,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>			<b>95.959.736.200,00</b>				<b>106.040.868.900,00</b>	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	<b>2.983.351.000,00</b>			100 %	<b>2.915.749.000,00</b>	Kecamatan Prambanan
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	<b>8.500.000,00</b>			100 %	<b>4.500.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>2.640.172.000,00</b>			100 %	<b>2.641.672.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	23 Orang/Bulan	2.627.672.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23 Orang/Bulan	2.627.672.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	5.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4.500.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	19 Dokumen				19 Dokumen		
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>76.000.000,00</b>			100 %	<b>64.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Jenis	10.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Jenis	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	19 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Unit	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	4 Eksemplar	9.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Eksemplar	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	250 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	250 Orang	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kegiatan	22.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Kegiatan	10.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>76.483.000,00</b>			100 %	<b>36.281.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	8 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 Unit	51.483.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	36.281.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>92.696.000,00</b>			100 %	<b>93.296.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1200 eks	3.500.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1200 eks	3.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	26.400.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	27.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	8 Orang	62.796.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Orang	62.796.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>89.500.000,00</b>			100 %	<b>76.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	18 Unit	54.500.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Unit	60.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Unit	6.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	<b>3.345.000,00</b>			100 %	<b>4.290.000,00</b>	<b>Kecamatan Prambanan</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	<b>3.345.000,00</b>			100 %	<b>4.290.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	3 Jenis	3.345.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Jenis	4.290.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	<b>158.842.000,00</b>			95 %	<b>164.096.000,00</b>	<b>Kecamatan Prambanan</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	<b>158.842.000,00</b>			100 %	<b>164.096.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	16 Desa	14.520.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	15.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	16 Desa	144.322.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	148.596.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	<b>89.804.000,00</b>			96 %	<b>92.608.000,00</b>	<b>Kecamatan Prambanan</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	96 %	21.504.000,00			96 %	84.608.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 Kegiatan	15.504.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	78.108.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Kegiatan	6.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	6.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	68.300.000,00			100 %	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Kegiatan	68.300.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	28.154.000,00			96 %	29.678.000,00	Kecamatan Prambanan
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			28.154.000,00				29.678.000,00	
			Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	2 Kegiatan	28.154.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	29.678.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	174.070.000,00			97 % 95 %	193.230.000,00	Kecamatan Prambanan
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	174.070.000,00			100 %	193.230.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Desa	22.416.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	24.658.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	16 Desa	18.469.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	20.316.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Desa	10.338.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	10.029.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.01.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	16 Desa	122.847.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	138.227.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	<b>2.433.721.000,00</b>			100 %	<b>2.414.208.000,00</b>	Kecamatan Gantiwarno
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun</i>	98 %	<b>11.000.000,00</b>			100 %	<b>11.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen				4 dokumen		
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	2,00 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Laporan	4.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	98 %	<b>2.118.373.000,00</b>			98 %	<b>2.118.373.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16 Orang	2.086.373.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Orang	2.086.373.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor KPA , PPTKA, PPA, SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 orang	27.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 orang	27.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	16 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Dokumen	5.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu</i>	98 %	<b>60.600.000,00</b>			98 %	<b>60.600.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	10 Jenis	10.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Jenis	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	13.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	1 Eks	4.500.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Eks	4.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	3,00 Eks	3.100.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Eks	3.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10.000.000,00	
			Jumlah Tamu Terfasilitasi	250 Kali				250 Kali		
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	20.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Kali	20.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu</i>	100 %	<b>40.000.000,00</b>			100 %	<b>20.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 unit	10.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	4 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	116.000.000,00			100 %	116.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	275 Eks	1.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	275 Eks	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayar	12 Bulan	15.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	7 Orang	100.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Orang	100.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	87.748.000,00			100 %	88.235.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara Serta Pajak dan Perizinannya Terbayar	9 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Unit	60.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			1.500.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1.985.000,00	
			Jumlah mebel yang terpelihara	4 unit				4 unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	4 unit	5.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terehabilitasi / Terpelihara	1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Terpelihara	2 unit	3.248.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	3.250.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	7 unit	3.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	8.044.000,00			100 %	8.428.000,00	Kecamatan Gantiwarno
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	97 %	8.044.000,00			97 %	8.428.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	8.044.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	8.428.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	121.707.000,00			95 %	149.972.000,00	Kecamatan Gantiwarno
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	97 %	121.707.000,00			97 %	149.972.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	16 Desa	15.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			106.707.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		134.972.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	16 Desa				16 Desa		
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	115.630.000,00			96 %	114.025.000,00	Kecamatan Gantiwarno
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	96 %	75.630.000,00			97 %	74.025.000,00	
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 Kegiatan	60.000.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	60.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	15.630.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	14.025.000,00	
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	97 %	40.000.000,00			97 %	40.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Kegiatan	40.000.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Kegiatan	40.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	40.208.000,00			96 %	44.605.000,00	Kecamatan Gantiwarno
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	96 %	40.208.000,00			96 %	44.605.000,00	
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	2 Kegiatan	38.708.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	43.105.000,00	
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			1.500.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1.500.000,00	
			Jumlah Desa Yang Tertangani Konflik Sesuai Ketentuan Peraturan Peundang-Undangan	16 Desa				16 Desa		
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	117.641.000,00			97 % 95 %	120.965.000,00	Kecamatan Gantiwarno
	7.01.7-1.0-0-0-0.02.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	98 %	117.641.000,00			98 %	120.965.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Desa	10.000.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	16 Desa	20.000.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	21.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Desa	9.000.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Desa	8.000.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Rekomendasi	1.500.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Rekomendasi	1.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	16 Desa	66.141.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	64.265.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.06 2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama desa dengan Pihak ketiga	5 Kegiatan	1.500.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Kegiatan	1.700.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.02.7.01.06 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Kegiatan	1.500.000,00	KECAMATAN GANTIRWANO	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	1.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3.174.311.000,00</b>				<b>3.120.753.000,00</b>	<b>Kecamatan Wedi</b>
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				100 %		
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 %	<b>9.000.000,00</b>			100 %	<b>9.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	4 dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	2.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	<b>2.842.292.000,00</b>			100 %	<b>2.748.023.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	21 Orang	2.839.292.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 Orang	2.745.023.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	3.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	<b>77.600.000,00</b>			100 %	<b>59.900.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	12 unit	10.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 unit	17.800.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	15000 Eks	4.500.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17000 Eks	5.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	3 Eksemplar	3.100.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Eksemplar	3.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	7 kali	8.700.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 kali	8.700.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 kali	33.500.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	180 kali	25.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah Tepat Waktu</i>	100 %	<b>46.500.000,00</b>			100 %	<b>92.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit	6.500.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 unit	57.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 unit	40.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	35.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>95.100.000,00</b>			100 %	<b>99.100.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	275 Eksemplar	1.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	275 Eksemplar	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12 bulan	23.100.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	23.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	5 Orang	71.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	75.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>103.819.000,00</b>			100 %	<b>112.730.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perijinannya terbayar	10 unit	56.940.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	70.430.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	17 unit	1.779.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	1.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesen Terpelihara	5 unit	3.600.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	3.600.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/Terpelihara	1 unit	40.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	30.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	15 unit	1.500.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	7.200.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	<b>5.028.000,00</b>			100 %	<b>9.916.000,00</b>	Kecamatan Wedi
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	<b>5.028.000,00</b>			100 %	<b>9.916.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 jenis	5.028.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 jenis	9.916.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.03.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	<b>100.548.000,00</b>			95 %	<b>161.122.000,00</b>	Kecamatan Wedi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100.548.000,00			100 %	161.122.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	19 Desa	15.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	19.622.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	19 Desa	85.548.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	141.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	203.207.000,00			96 %	156.461.000,00	Kecamatan Wedi
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	134.907.000,00			100 %	127.161.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 Kegiatan	107.300.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	102.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	27.607.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	25.161.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	68.300.000,00			100 %	29.300.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Kegiatan	68.300.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	29.300.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	25.137.000,00			96 %	25.284.000,00	Kecamatan Wedi
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang diselenggarakan	100 %	25.137.000,00			100 %	25.284.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	2 Kegiatan	20.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	19.784.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19 Desa	5.137.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %	85.064.000,00			97 % 95 %	99.581.000,00	Kecamatan Wedi
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	85.064.000,00			100 %	99.581.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	19 Desa	6.964.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	6.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	19 Desa	16.600.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	16.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	19 Desa	10.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	10.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	19 Desa	10.000.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	11.081.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.03.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	19 Desa	41.500.000,00	KECAMATAN WEDI	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	55.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	2.548.409.000,00			100 %	2.531.814.000,00	Kecamatan Bayat
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun</i>	100 %	5.000.000,00			100 %	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun</i>	4 dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1.000.000,00	
			<i>Jumlah dokumen LKjIP tersusun</i>	1 dokumen				1 dokumen		
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu</i>	100 %	2.212.237.000,00			100 %	2.195.514.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</i>	16 Orang	2.197.237.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Orang	2.180.514.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu</i>	12 bulan	10.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun</i>	5 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	103.872.000,00			100 %	104.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia</i>	15 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	8300 Eksemplar	15.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8300 Eksemplar	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	100 kali	28.872.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	250 kali	29.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	370 kali	40.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	370 kali	40.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>37.000.000,00</b>				<b>37.000.000,00</b>	
			<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 unit	7.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Unit	30.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>123.300.000,00</b>			100 %	<b>123.300.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	800 eksemplar	6.000.000,00	Kecamatan bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	850 eksemplar	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar</i>	12 Bulan	22.000.000,00	Kecamatan bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	22.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar</i>	7 Orang	95.300.000,00	Kecamatan bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Orang	95.300.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepelihara</i>	100 %	<b>67.000.000,00</b>			100 %	<b>67.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar</i>	9 Unit	18.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Unit	19.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel terpelihara</i>	30 unit	7.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara</i>	2 unit	5.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			25.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25.000.000,00	
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/Terpelihara</i>	1 Unit				1 Unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/Terpelihara</i>	20 unit	6.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara</i>	20 unit	6.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	6.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.04.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	<b>5.028.000,00</b>			100 %	<b>4.958.000,00</b>	<b>Kecamatan Bayat</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	5.028.000,00			100 %	4.958.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	3 Jenis	5.028.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Jenis	4.958.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	219.824.000,00			95 %	218.134.000,00	Kecamatan Bayat
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	219.824.000,00			100 %	218.134.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	18 desa	19.197.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	18 Desa	200.627.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	198.134.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	130.712.000,00			96 %	133.855.000,00	Kecamatan Bayat
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			105.712.000,00				108.855.000,00	
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	7 Kegiatan	86.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Kegiatan	88.855.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	19.712.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	25.000.000,00			100 %	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Kegiatan	25.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	16.088.000,00			96 %	15.805.000,00	Kecamatan Bayat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %	16.088.000,00			100 %	15.805.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	2 Kegiatan	16.088.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	15.805.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	89.488.000,00			97 % 95 %	90.666.000,00	Kecamatan Bayat
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	89.488.000,00			100 %	90.666.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Desa	8.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	18 Desa	16.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	16.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	9.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Desa	8.488.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	8.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18 rekomendasi	8.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 rekomendasi	8.091.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.04.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	18 desa	40.000.000,00	Kecamatan Bayat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	41.075.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.056.788.000,00				3.045.961.000,00	Kecamatan Cawas
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	100 %	6.000.000,00			100 %	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	14 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Dokumen	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP Tersusun	2 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	2.723.428.000,00			100 %	2.720.114.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.707.428.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.712.114.000,00	
			Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	21 Orang				21 Orang		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendaharan Pengeluaran, Bendaharan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 bulan	10.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	14 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	2 dokumen	1.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 dokumen	-	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu</i>	100 %	<b>86.000.000,00</b>			100 %	<b>90.314.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	6 Unit	6.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia	35 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 Unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	5 Eksemplar	15.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Eksemplar	16.314.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 eksemplar	4.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	12 Kali	30.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	35.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	20.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120 Kali	20.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>60.000.000,00</b>				<b>50.000.000,00</b>	
			<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	4 unit	15.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8 Unit	45.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Unit	40.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu</i>	100 %	<b>141.860.000,00</b>			100 %	<b>140.033.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1000 eksemplar	7.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1000 eksemplar	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	4 Bulan	36.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Bulan	36.033.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	7 Orang	98.860.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Orang	100.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara</i>	100 %	<b>39.500.000,00</b>			100 %	<b>39.500.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Unit	17.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	30 unit	2.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	10 unit	7.500.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 Unit				1 Unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	5.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>10.055.000,00</b>				<b>9.916.000,00</b>	<b>Kecamatan Cawas</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	<b>10.055.000,00</b>			100 %	<b>9.916.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	3 Jenis	10.055.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Jenis	9.916.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>253.034.000,00</b>				<b>256.969.000,00</b>	<b>Kecamatan Cawas</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	<b>253.034.000,00</b>			100 %	<b>256.969.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	20 desa	18.200.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 desa	18.200.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan	20 Desa	234.834.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Desa	238.769.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>115.630.000,00</b>				<b>118.982.000,00</b>	<b>Kecamatan Cawas</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	<b>96.630.000,00</b>			100 %	<b>102.500.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			86.630.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		90.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	9 kegiatan				9 kegiatan		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	12.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	<b>19.000.000,00</b>			100 %	<b>16.482.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18 kegiatan	19.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 kegiatan	16.482.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>15.083.000,00</b>				<b>19.831.000,00</b>	<b>Kecamatan Cawas</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	100 %	<b>15.083.000,00</b>			100 %	<b>19.831.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	20 Kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kegiatan	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.05 2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20 desa	5.083.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 desa	7.831.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>121.663.000,00</b>				<b>139.804.000,00</b>	<b>Kecamatan Cawas</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.05.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	<b>121.663.000,00</b>			100 %	<b>139.804.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7.500.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7.500.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Desa				20 Desa		
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Daerah	20 Desa	16.663.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Desa	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Desa	12.500.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Desa	12.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20 desa	5.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 desa	17.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20 desa	5.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 desa	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 rekomendasi	5.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 rekomendasi	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	20 desa	50.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 desa	52.304.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	20 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.05.7.01.06 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Cawas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 kegiatan	5.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	<b>2.380.309.000,00</b>			100 %	<b>2.374.659.000,00</b>	<b>Kecamatan Trucuk</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	<b>8.000.000,00</b>			100 %	<b>8.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	4 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>2.100.789.751,00</b>			100 %	<b>2.100.790.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	13 Orang	2.064.789.751,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Orang	2.064.790.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu. Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	15.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 Dokumen	13.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	13.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	8.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	8.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>52.822.249,00</b>			100 %	<b>49.629.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	5 Unit	2.500.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 Unit	5.090.249,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	4.997.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5.000.000,00	
			<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia</i>	<i>110000 Eks</i>				<i>110000 Eks</i>		
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia</i>	<i>36 eks</i>	4.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>36 eks</i>	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi</i>	<i>6 Kali</i>	15.100.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>6 Kali</i>	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>10 Kali</i>	21.132.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>10 Kali</i>	17.632.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<b>52.000.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>52.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang diadakan</i>	<i>7 unit</i>	40.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>7 unit</i>	40.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan</i>	<i>2 Unit</i>	12.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>2 Unit</i>	12.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	<i>100 %</i>	<b>124.900.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>125.400.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Surat Terkirim</i>	<i>600 eks</i>	4.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>600 eks</i>	4.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar</i>	<i>12 Bulan</i>	18.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>12 Bulan</i>	18.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar</i>	<i>7 Orang</i>	102.900.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>7 Orang</i>	102.900.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	<i>100 %</i>	<b>41.797.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>38.840.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara Serta Pajak dan Perizinannya Terbayar</i>	<i>13 Unit</i>	13.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>13 Unit</i>	13.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara</i>	<i>2 unit</i>	2.957.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>0 unit</i>	-	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara</i>	<i>2 Unit</i>	14.840.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>2 Unit</i>	14.840.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara</i>	<i>10 unit</i>	11.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>10 unit</i>	11.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	<i>100 %</i>	<b>10.055.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>10.890.000,00</b>	<b>Kecamatan Trucuk</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.06.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	<i>100 %</i>	<b>10.055.000,00</b>			<i>100 %</i>	<b>10.890.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan</i>	<i>3 Jenis</i>	10.055.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<i>3 Jenis</i>	10.890.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	221.847.000,00			95 %	224.717.000,00	Kecamatan Trucuk
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	221.847.000,00			100 %	224.717.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	18 desa	20.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	21.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			201.847.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		203.717.000,00	
			<i>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	18 Desa				18 Desa		
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	98.738.000,00			96 %	95.186.000,00	Kecamatan Trucuk
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	88.738.000,00			100 %	88.186.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	4 kegiatan	72.238.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kegiatan	72.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	3 Kegiatan	16.500.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	16.186.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	10.000.000,00			100 %	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	30.165.000,00			96 %	30.000.000,00	Kecamatan Trucuk
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	100 %	30.165.000,00			100 %	30.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	4 Kegiatan	30.165.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>81.544.000,00</b>				<b>81.665.000,00</b>	<b>Kecamatan Trucuk</b>
			<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %				97 % 95 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	<b>81.544.000,00</b>			100 %	<b>81.665.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	18 Desa	7.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	7.165.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	18 Desa	7.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	18 Desa	4.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	18 Desa	7.000.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.06.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	18 desa	56.544.000,00	Kecamatan Trucuk	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	56.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	<b>2.410.645.000,00</b>			100 %	<b>2.418.902.000,00</b>	<b>Kecamatan Kebonarum</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	<b>4.500.000,00</b>			100 %	<b>4.500.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun</i>	4 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONARUM	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen LKjIP tersusun</i>	2 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN KEBONARUM	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>2.113.012.000,00</b>			100 %	<b>2.152.012.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</i>	15 Orang	2.101.012.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Orang	2.140.012.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu</i>	12 Bulan	10.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun</i>	2 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>85.528.000,00</b>			100 %	<b>75.785.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia</i>	15 Unit	3.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 Unit	20.067.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	12.240.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	3 Eksemplar	15.441.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Eksemplar	13.525.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 Eksemplar	1.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Eksemplar	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	350 Kali	15.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	350 Kali	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Kali	31.020.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Kali	31.020.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.07.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>25.000.000,00</b>				<b>21.000.000,00</b>	
			<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	21.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</i>	100 %	<b>133.605.000,00</b>			100 %	<b>121.605.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1200 Eksemplar	10.500.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1200 Eksemplar	6.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 Bulan	20.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	7 Orang	103.105.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Orang	95.105.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Tepelihara</i>	100 %	<b>49.000.000,00</b>			100 %	<b>44.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	11 Unit	34.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 Unit	30.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	4 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	4 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	9.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.07.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	<b>5.028.000,00</b>			100 %	<b>4.958.000,00</b>	<b>Kecamatan Kebonarum</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.07.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>5.028.000,00</b>				<b>4.958.000,00</b>	
			<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 jenis	5.028.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 jenis	4.958.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	125.761.000,00			95 %	125.006.000,00	Kecamatan Kebonarum
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	125.761.000,00			100 %	125.006.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	7 Desa	25.685.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	26.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	7 Desa	100.076.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	99.006.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	127.092.000,00			96 %	127.311.000,00	Kecamatan Kebonarum
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	7 %	107.092.000,00			7 %	107.311.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	7 Kegiatan	87.092.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Kegiatan	85.311.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	7 Kegiatan	20.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Kegiatan	22.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	7 %	20.000.000,00			7 %	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	7 Kegiatan	20.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Kegiatan	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	34.292.000,00			96 %	34.808.000,00	Kecamatan Kebonarum
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	7 %	34.292.000,00			7 %	34.808.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	7 Kegiatan	29.292.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Kegiatan	29.808.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	7 Desa	5.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %	81.275.000,00			97 % 95 %	81.080.000,00	Kecamatan Kebonarum
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	81.275.000,00			100 %	81.080.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	7 Desa	10.500.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	10.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	7 Desa	7.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			7.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7.000.000,00	
			<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	7 Desa				7 Desa		
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	7 Desa	7.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.06 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	7 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	7 Rekomendasi	5.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Rekomendasi	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	7 Desa	34.775.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	34.580.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.07.7.01.06 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	<i>Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi</i>	7 Kegiatan	7.000.000,00	Kecamatan Kebonarum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Kegiatan	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	2.512.099.000,00			100 %	2.391.846.000,00	Kecamatan Jogonalan
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	12.000.000,00			100 %	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun</i>	4 Dokumen	6.000.000,00	Kec. Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Dokumen LKJIP Tersusun</i>	1 Dokumen	6.000.000,00	Kec. Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	2.086.675.000,00			100 %	2.052.313.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.083.675.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.049.313.000,00	
			<i>Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</i>	17 Orang				17 Orang		
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun</i>	4 dokumen	3.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	81.966.000,00			100 %	52.933.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	10 unit	5.266.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	5.265.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20 unit	15.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	2 Eksemplar	4.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Eksemplar	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	1 Eksemplar	1.300.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Eksemplar	1.300.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	12 kali	21.400.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	12.368.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	35.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %	157.858.000,00			100 %	109.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit	70.858.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	60.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 Unit	87.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	49.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	108.000.000,00			100 %	103.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	750 Eksemplar	8.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	750 Eksemplar	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayar	12 Bulan	20.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	6 Orang	80.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Orang	80.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	65.600.000,00			100 %	62.600.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	7 unit	30.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	27.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	8 Unit	10.600.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Unit	10.600.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	25.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	5.028.000,00			100 %	9.916.000,00	Kecamatan Jogonalan
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	5.028.000,00			100 %	9.916.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 jenis	5.028.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 jenis	9.916.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	141.772.000,00			95 %	182.439.000,00	Kecamatan Jogonalan
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	141.772.000,00			100 %	182.439.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	18 Desa	11.772.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	9.439.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	18 Desa	130.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	173.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	87.477.000,00			96 %	90.228.000,00	Kecamatan Jogonalan
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	95 %	82.477.000,00			95 %	85.228.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 Kegiatan	76.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	76.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Jenis Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Jenis	6.477.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	9.228.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	5.000.000,00			100 %	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Kegiatan	5.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			12.066.000,00				24.788.000,00	Kecamatan Jogonalan
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %				96 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %	12.066.000,00			100 %	24.788.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	2 kegiatan	10.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.05 2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18 Desa	2.066.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	4.788.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 95 %	<b>78.427.000,00</b>			97 % 96 %	<b>115.906.000,00</b>	Kecamatan Jogonalan
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	<b>78.427.000,00</b>			100 %	<b>115.906.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Desa	15.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	umlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	18 Desa	15.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	21.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset	18 Desa	8.427.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	6.906.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Desa	5.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkat dan pemberhentian Perangkat Desa	3,00 rekomendasi	5.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 rekomendasi	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.08.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	18 Desa	30.000.000,00	Kec Jogonalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	50.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>2.966.799.000,00</b>			100 %	<b>2.986.303.000,00</b>	Kecamatan Manisrenggo
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	<b>7.000.000,00</b>			100 %	<b>7.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentase pembayaran gaji, tunjangan, ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	<b>2.555.168.152,00</b>			100 %	<b>2.606.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	0 Orang/Bulan	2.549.168.152,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Orang/Bulan	2.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	2 bulan	3.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 bulan	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	3.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>130.630.848,00</b>			100 %	<b>95.303.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	5 Jenis	4.480.848,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Jenis	5.865.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	18 unit	36.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 unit	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	15000 eksemplar	20.150.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16000 eksemplar	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	360 kali	30.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	360 kali	35.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	40.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 kali	24.438.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.09.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>66.000.000,00</b>			100 %	<b>67.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	9.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	6 unit	57.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 unit	57.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>101.000.000,00</b>			100 %	<b>103.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	500 Eks	5.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 Eks	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 Bulan	20.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pelayanan Umum Kantor Terbayar	5 Orang	76.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	78.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>107.000.000,00</b>				<b>108.000.000,00</b>	
			<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9 unit	57.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 unit	57.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	5 unit	5.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	40.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	6 unit	5.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	5.028.000,00			100 %	4.958.000,00	Kecamatan Manisrenggo
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	5.028.000,00			100 %	4.958.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	5.028.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	4.958.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	90.493.000,00			95 %	92.211.000,00	Kecamatan Manisrenggo
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	90.493.000,00			100 %	92.211.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	16 desa	10.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	16 Desa	80.493.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	82.211.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	155.849.000,00			96 %	153.685.000,00	Kecamatan Manisrenggo
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	120.849.000,00			100 %	118.685.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	16 kegiatan	110.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 kegiatan	110.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 kegiatan	10.849.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 kegiatan	8.685.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	35.000.000,00			100 %	35.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 kegiatan	35.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 kegiatan	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	18.099.000,00			96 %	17.848.000,00	Kecamatan Manisrenggo
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	100 %	18.099.000,00			100 %	17.848.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.05 .2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	16 kegiatan	15.099.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 kegiatan	14.848.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.05 .2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	16 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %	79.433.000,00			97 % 95 %	78.330.000,00	Kecamatan Manisrenggo
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	79.433.000,00			100 %	78.330.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.06 .2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	16 Desa	10.433.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	9.330.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.06 .2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	16 Desa	13.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	13.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.06 .2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	16 Desa	4.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.06 .2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	16 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.06 .2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	16 Desa	2.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.06 .2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	7 rekomendasi	14.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 rekomendasi	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.09.7.01.06 .2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	16 Desa	26.000.000,00	Kecamatan Manisrenggo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	38.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			2.966.425.000,00				2.947.300.000,00	Kecamatan Karangnongko
			<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	9.000.000,00			100 %	11.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun</i>	14 Dokumen	7.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Dokumen	7.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	4.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>2.610.000.000,00</b>			100 %	<b>2.609.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	22 Orang	2.603.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 Orang	2.603.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksana Tugas ASN Terpenuhi Administrasinya	22 Orang	2.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 Orang	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	18 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Dokumen	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>93.268.000,00</b>			100 %	<b>81.120.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	12 Jenis	6.320.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Jenis	6.320.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	10 Jenis	22.600.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Jenis	16.600.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	3 Eksemplar	16.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Eksemplar	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	1 Eksemplar	1.200.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Eksemplar	1.200.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	12 Kali	12.148.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 kali	35.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	180 kali	35.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>50.000.000,00</b>			100 %	<b>50.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	10 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	50.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>102.800.000,00</b>			100 %	<b>109.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	750 Eks	2.800.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	750 Eks	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 Bulan	36.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	36.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	4 Orang	64.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Orang	70.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>101.357.000,00</b>			100 %	<b>87.180.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	10 Unit	74.180.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	74.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	5 unit	3.600.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 Unit	23.577.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	10.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	<b>5.028.000,00</b>			100 %	<b>9.916.000,00</b>	Kecamatan Karangnongko
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	<b>5.028.000,00</b>			100 %	<b>9.916.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	5.028.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	9.916.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	<b>80.438.000,00</b>			95 %	<b>80.313.000,00</b>	Kecamatan Karangnongko
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	<b>80.438.000,00</b>			100 %	<b>80.313.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	14 Desa	10.438.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	10.313.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	14 Desa	70.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	70.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	<b>194.359.000,00</b>			96 %	<b>191.647.000,00</b>	Kecamatan Karangnongko
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	2 %	<b>125.000.000,00</b>			2 %	<b>125.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	100.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	25.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	25.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.10.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	14 %	<b>69.359.000,00</b>			14 %	<b>66.647.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.10.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14 Kegiatan	69.359.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Kegiatan	66.647.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
	7.01.7-1.0-0.0-10.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	25.137.000,00			96 %	24.788.000,00	Kecamatan Karangnongko
	7.01.7-1.0-0.0-10.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	2 %	25.137.000,00			2 %	24.788.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-10.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	2 Kegiatan	20.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-10.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	19 Desa	5.137.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	4.788.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-10.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</i>	95 %	71.389.000,00			97 %	70.207.000,00	Kecamatan Karangnongko
			<i>Persentase desa tertib administrasi</i>	94 %				95 %		
	7.01.7-1.0-0.0-10.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	71.389.000,00			0 %	70.207.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-10.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	14 Desa	5.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-10.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	14 Desa	15.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-10.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	14 Desa	6.389.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	5.207.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-10.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	14 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-10.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	14 Desa	35.000.000,00	Kecamatan Karangnongko	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	35.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	2.742.481.000,00			100 %	2.739.167.000,00	Kecamatan Ceper
	7.01.7-1.0-0.0-11.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	9.000.000,00			100 %	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun</i>	4 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen LKjIP tersusun</i>	1 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			2.526.052.000,00				2.526.052.000,00	
			<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %				100 %		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	18 orang	2.511.052.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 orang	2.511.052.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	10.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	18 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Dokumen	5.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>55.429.000,00</b>			100 %	<b>56.500.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 unit	4.429.000,00	Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 unit	4.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20 unit	9.000.000,00	Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	2 eksemplar	5.000.000,00	Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 eksemplar	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	12 kali	22.000.000,00	Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 kali	22.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	15.000.000,00	Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 Kali	16.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>20.000.000,00</b>			100 %	<b>20.115.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 unit	20.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	20.115.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>102.000.000,00</b>			100 %	<b>102.500.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	800 eksemplar	4.500.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	810 eksemplar	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	30.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	30.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 orang	67.500.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	67.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>30.000.000,00</b>			100 %	<b>25.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	7 unit	10.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	25 unit	5.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	15.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	5.028.000,00			100 %	7.437.000,00	Kecamatan Ceper
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	5.028.000,00			100 %	7.437.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	100 jenis	5.028.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 jenis	7.437.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	178.630.000,00			95 %	180.116.000,00	Kecamatan Ceper
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	178.630.000,00			100 %	180.116.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	18 Desa	178.630.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	180.116.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	61.543.000,00			96 %	70.603.000,00	Kecamatan Ceper
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	11.000.000,00			100 %	15.900.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 kegiatan	11.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	15.900.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	50.543.000,00			100 %	54.703.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18 kegiatan	50.543.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 kegiatan	54.703.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	5.028.000,00			96 %	8.924.000,00	Kecamatan Ceper
	7.01.7-1.0-0.0-0.11.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %	5.028.000,00			100 %	8.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-11.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	3 kegiatan	2.500.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	3.565.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.7.01.05 2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18 desa	2.528.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	5.359.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	<b>279.206.000,00</b>			97 % 95 %	<b>283.263.000,00</b>	<b>Kecamatan Ceper</b>
	7.01.7-1.0-0.0-11.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	<b>279.206.000,00</b>			100 %	<b>283.263.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-11.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Desa	188.900.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	188.900.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	18 Desa	15.506.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	18.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	15.000.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	16.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-11.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	18 desa	59.800.000,00	Kecamatan Ceper	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	60.363.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	<b>2.667.820.000,00</b>			100 %	<b>2.654.529.000,00</b>	<b>Kecamatan Pedan</b>
	7.01.7-1.0-0.0-12.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	<b>12.000.000,00</b>			100 %	<b>12.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	5 dokumen	7.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 dokumen	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	<b>2.351.018.000,00</b>			100 %	<b>2.357.018.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16 Orang	2.329.018.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Orang	2.334.018.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	11.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	5 dokumen	5.500.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 dokumen	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	2 dokumen	5.500.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	5.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>48.000.000,00</b>			100 %	<b>40.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 Unit	13.000.000,00	Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	4 Kali	5.000.000,00	Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Kali	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30.000.000,00	Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		27.000.000,00	
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Kali				4 Kali		
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>25.522.000,00</b>			100 %	<b>20.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	25.522.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	20.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>144.280.000,00</b>			100 %	<b>145.280.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	600 eksemplar	5.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600 eksemplar	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	19.600.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	20.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	6 Orang	119.680.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Orang	120.180.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>87.000.000,00</b>			100 %	<b>80.231.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	12 Unit	42.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Unit	42.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	2 unit	4.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	2 unit	5.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			26.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		21.231.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 Unit				2 Unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 unit	10.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	5.028.000,00			100 %	7.437.000,00	<b>Kecamatan Pedan</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	5.028.000,00			100 %	7.437.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan</i>	3 jenis	5.028.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 jenis	7.437.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	196.929.000,00			95 %	196.591.000,00	<b>Kecamatan Pedan</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	196.929.000,00			100 %	196.591.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	14 desa	16.073.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 desa	16.318.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	14 Desa	180.856.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	180.273.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	115.630.000,00			96 %	116.008.000,00	<b>Kecamatan Pedan</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	85.630.000,00			100 %	86.008.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	4 Kegiatan	80.630.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	81.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	3 Kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	5.008.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	30.000.000,00			100 %	30.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	4 Kegiatan	30.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	30.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.12.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	25.258.000,00			96 %	25.856.000,00	<b>Kecamatan Pedan</b>



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-12.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %	25.258.000,00			100 %	25.856.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	4 Kegiatan	25.258.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	25.856.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	37.639.000,00			97 % 95 %	34.974.000,00	Kecamatan Pedan
	7.01.7-1.0-0.0-12.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	37.639.000,00			100 %	34.974.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			5.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Desa				14 Desa		
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	14 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Desa	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14 desa	5.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 desa	4.940.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14 Rekomendasi	7.000.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Rekomendasi	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-12.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	14 desa	14.639.000,00	Kecamatan Pedan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 desa	13.034.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.808.727.000,00			100 %	2.779.293.000,00	Kecamatan Karangdowo
	7.01.7-1.0-0.0-13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.000.000,00			100 %	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-13.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	5 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-13.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	2.566.438.000,00			100 %	2.542.793.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-13.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 Orang	2.539.438.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 Orang	2.515.793.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	15.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	4.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>45.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>45.500.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 Unit	3.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	200 Eksemplar	8.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 Eksemplar	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 Eksemplar	3.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Eksemplar	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	20 Kali	9.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	9.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	12.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kali	12.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>42.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>30.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel			10.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	
			Jumlah Mebel yang diadakan	2 Unit				0 Unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4 Unit	32.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	30.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>103.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>112.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	600 Eksemplar	13.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600 Eksemplar	16.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	2 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	21.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	70.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	75.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>46.289.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>43.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	1 Unit	4.289.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Unit	-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 Unit	12.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	13.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	10 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	15.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.13.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>4.022.000,00</b>				<b>3.967.000,00</b>	<b>Kecamatan Karangdowo</b>
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	4.022.000,00			100 %	3.967.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	4.022.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	3.967.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.13.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>Kecamatan Karangdowo</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	93 %	288.572.000,00			95 %	262.752.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	19 Desa	13.572.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	12.752.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	19 Desa	275.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	250.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.13.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>Kecamatan Karangdowo</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	117.950.000,00			100 %	110.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	1 Kegiatan	77.950.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	75.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	40.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	35.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.13.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>66.865.000,00</b>				<b>55.000.000,00</b>	<b>Kecamatan Karangdowo</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %				97 % 95 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	66.865.000,00			100 %	55.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 Desa	8.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	19 Desa	9.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Desa	8.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Desa	9.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 Rekomendasi	7.865.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Rekomendasi	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.13.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	19 desa	25.000.000,00	Kecamatan Karangdowo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.859.871.000,00			100 %	2.808.663.000,00	Kecamatan Juwiring
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	11.372.000,00			100 %	6.376.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD tersusun	2 dokumen	980.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	980.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD tersusun	1 dokumen	3.060.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.060.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD tersusun	1 dokumen	626.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	626.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1 dokumen	3.060.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.060.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1 dokumen	626.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	626.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 dokumen	2.394.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.398.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	1 dokumen	626.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	626.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.378.231.000,00			100 %	2.378.231.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	19 Orang	2.365.158.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Orang	2.365.158.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD yang tersusun	29 dokumen	2.398.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	29 dokumen	2.398.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.385.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.385.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	626.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	626.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	1 dokumen	626.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	626.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD tersusun	3 dokumen	7.412.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 dokumen	7.412.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	626.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	626.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.14.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</i>	100 %	<b>1.820.000,00</b>			100 %	<b>1.252.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	626.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	626.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun	2 dokumen	1.194.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	626.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.14.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</i>	100 %	<b>146.064.000,00</b>			100 %	<b>126.744.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	3.600.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	3.600.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1170 orang	142.464.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1170 orang	123.144.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>99.149.000,00</b>			100 %	<b>119.149.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	7 unit	5.466.000,00	Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 unit	5.466.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	11 unit	23.058.000,00	Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 unit	23.058.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.080.000,00	Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.080.000,00	
			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	10 eksemplar				10 eksemplar		
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	1 eksemplar	1.800.000,00	Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 eksemplar	1.800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	20 kali	38.000.000,00	Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 kali	38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 kali	28.745.000,00	Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	150 kali	48.745.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	30.000.000,00			100 %	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 unit	30.000.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	102.767.000,00			100 %	107.161.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1200 eksemplar	8.582.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1200 eksemplar	8.582.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar</i>	12 bulan	30.000.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	38.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar</i>	5 orang	64.185.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	60.579.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	90.468.000,00			100 %	54.750.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	11 unit	13.600.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 unit	19.750.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	10 unit	14.880.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	30.000.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 unit	-	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Terehabilitasi/ Terpelihara	8 unit	31.988.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	7.453.000,00			100 %	7.350.000,00	Kecamatan Juwiring
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	7.453.000,00			100 %	7.350.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	3 jenis	7.453.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 jenis	7.350.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	64.005.000,00			95 %	93.623.000,00	Kecamatan Juwiring
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	64.005.000,00			100 %	93.623.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	19 desa	30.349.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			33.656.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		58.623.000,00	
			<i>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	19 desa				19 desa		
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	98.923.000,00			96 %	90.729.000,00	Kecamatan Juwiring
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	90.105.000,00			100 %	82.450.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah kegiatan sinergitas di kecamatan</i>	1 kegiatan	81.826.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	74.171.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	2 kegiatan	8.279.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	8.279.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	8.818.000,00			100 %	8.279.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1 kegiatan	8.818.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	8.279.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	21.064.000,00			96 %	12.562.000,00	Kecamatan Juwiring
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	100 %	21.064.000,00			100 %	12.562.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	2 kegiatan	14.615.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	6.228.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.7.01.05 2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			6.449.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6.334.000,00	
			<i>Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	19 desa				19 desa		
	7.01.7-1.0-0.0-0.14.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %	77.147.000,00			97 % 95 %	82.701.000,00	Kecamatan Juwiring

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-14.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	77.147.000,00			100 %	82.701.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-14.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 desa	7.412.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	7.733.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-14.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	19 desa	12.884.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	16.884.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-14.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 desa	8.279.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	8.279.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-14.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 desa	8.279.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	5.208.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-14.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 desa	626.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 desa	-	
	7.01.7-1.0-0.0-14.7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 rekomendasi	1.047.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 rekomendasi	900.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-14.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	19 desa	30.391.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	32.797.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-14.7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 kegiatan	8.229.000,00	Kecamatan Juwiring	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	10.900.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.055.396.000,00			100 %	3.041.458.000,00	Kecamatan Wonosari
	7.01.7-1.0-0.0-15.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	10.000.000,00			100 %	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-15.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-15.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-15.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.751.764.000,00			100 %	2.752.458.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-15.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 Orang	2.723.264.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 Orang	2.723.458.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-15.7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	22.500.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	23.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-15.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-15.7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	3.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	31.000.000,00			100 %	31.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15 Unit	3.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	35 Unit	8.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 Unit	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	5 eksemplar	5.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 eksemplar	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	130 Kali	5.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 Kali	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 kali	10.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kali	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	24.000.000,00			100 %	24.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit	4.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	123.000.000,00			100 %	124.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	850 eksemplar	10.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	850 eksemplar	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	26.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	27.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	6 Orang	87.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Orang	87.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.632.000,00				100.000.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8 Unit	51.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Unit	51.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	2 unit	2.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	6 unit	6.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 unit	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	4 Unit	26.632.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	11.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	10.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 unit	20.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	6.033.000,00			100 %	5.950.000,00	Kecamatan Wonosari
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	6.033.000,00			100 %	5.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan</i>	12 Jenis	6.033.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Jenis	5.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	225.227.000,00			95 %	228.049.000,00	Kecamatan Wonosari
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			225.227.000,00				228.049.000,00	
			<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	18 Desa	35.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	35.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	18 Desa	190.227.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	193.049.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	120.657.000,00			96 %	118.982.000,00	Kecamatan Wonosari
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	100.657.000,00			100 %	98.982.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	1 kegiatan	80.657.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	78.982.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	3 Kegiatan	20.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	20.000.000,00			100 %	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	12 Kegiatan	20.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	10.055.000,00			96 %	29.746.000,00	Kecamatan Wonosari

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.055.000,00				29.746.000,00	
			Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	1 Kegiatan	5.055.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	24.746.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18 Desa	5.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	70.384.000,00			97 % 95 %	54.322.000,00	Kecamatan Wonosari
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	70.384.000,00			100 %	54.322.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Desa	15.384.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	18 Desa	15.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	15.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	9.322.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	18 desa	5.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.15.7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 rekomendasi	10.000.000,00	Kecamatan Wonosari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 rekomendasi	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.583.222.000,00			100 %	2.517.317.000,00	Kecamatan Delanggu
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.000.000,00			100 %	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	8 dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	2 dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu	100 %	2.265.174.420,00			100 %	2.265.191.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	0 Orang	2.240.575.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Orang	2.240.592.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	21.599.420,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	21.599.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	5 dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 dokumen	3.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>48.001.400,00</b>			<b>100 %</b>	<b>47.800.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	15 Unit	3.951.400,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	10 unit	11.750.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	11.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	6 eksemplar	7.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 eksemplar	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	200 kali	10.500.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 kali	10.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	14.800.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 kali	14.800.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>16.800.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>16.800.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	4 unit	16.800.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 unit	16.800.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>121.784.180,00</b>			<b>100 %</b>	<b>121.784.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	800 eksemplar	5.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	800 eksemplar	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	24.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	24.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	7 orang	92.784.180,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 orang	92.784.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>124.462.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>58.742.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8 unit	15.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	104.062.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	38.342.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	5.400.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	5.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	3.017.000,00			100 %	2.975.000,00	Kecamatan Delanggu
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	3.017.000,00			100 %	2.975.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan</i>	2 Jenis	3.017.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	2.975.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	172.572.000,00			95 %	223.031.000,00	Kecamatan Delanggu
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	172.572.000,00			100 %	223.031.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	1 desa	22.443.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 desa	22.443.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	16 Desa	150.129.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	200.588.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	163.243.000,00			96 %	169.900.000,00	Kecamatan Delanggu
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	145.243.000,00			100 %	151.900.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	16 kegiatan	78.289.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 kegiatan	84.946.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	16 Kegiatan	66.954.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Kegiatan	66.954.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	18.000.000,00			100 %	18.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	16 kegiatan	18.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 kegiatan	18.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.16.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	24.878.000,00			96 %	28.358.000,00	Kecamatan Delanggu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-16.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %	24.878.000,00			100 %	28.358.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-16.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	16 Kegiatan	24.878.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Kegiatan	28.358.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-16.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	33.563.000,00			97 % 95 %	39.041.000,00	Kecamatan Delanggu
	7.01.7-1.0-0.0-16.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	33.563.000,00			100 %	39.041.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-16.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			5.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Desa				16 Desa		
	7.01.7-1.0-0.0-16.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	16 Desa	12.563.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	21.041.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-16.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-16.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Desa	5.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 Desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-16.7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Rekomendasi	3.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Rekomendasi	-	
	7.01.7-1.0-0.0-16.7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Delanggu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.522.015.000,00			100 %	2.510.794.000,00	Kecamatan Polanharjo
	7.01.7-1.0-0.0-17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	8.000.000,00			100 %	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-17.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	4 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Polanharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-17.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Polanharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.182.736.000,00			100 %	2.161.244.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-17.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	18 Orang	2.167.736.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Orang	2.146.244.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA , PPTK, PPA, SKPD, Bendahara,	12 bulan	10.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	5.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>85.000.000,00</b>			100 %	<b>78.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Unit	7.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	5500 Eksemplar	9.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5500 Eksemplar	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 eksemplar	4.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	25.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	25.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80 Kali	25.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>56.150.000,00</b>			100 %	<b>60.150.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel			6.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang diadakan	6 unit				6 unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	7 Unit	50.150.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Unit	50.150.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>119.400.000,00</b>			100 %	<b>117.400.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	750 eks	8.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	770 eks	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	26.400.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	26.400.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	6 Orang	85.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Orang	85.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>70.729.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>88.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	11 unit	21.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 unit	21.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	56 unit	9.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	56 unit	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	5 unit	5.729.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	30.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	50.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	10 unit				10 unit		
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.17.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100 %</b>	<b>5.028.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>4.958.000,00</b>	<b>Kecamatan Polanharjo</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.17.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100 %</b>	<b>5.028.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>4.958.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	5.028.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	4.958.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.17.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>93 %</b>	<b>173.294.000,00</b>			<b>95 %</b>	<b>208.119.000,00</b>	<b>Kecamatan Polanharjo</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.17.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100 %</b>	<b>173.294.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>208.119.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	18 desa	18.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	18.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	18 Desa	155.294.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	190.119.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	110.554.000,00			96 %	102.622.000,00	Kecamatan Polanharjo
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	92.554.000,00			100 %	92.122.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.04 .2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	18 kegiatan	74.554.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 kegiatan	74.122.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.04 .2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			18.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18.000.000,00	
			<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	2 Kegiatan				2 Kegiatan		
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	18.000.000,00			100 %	10.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.04 .2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	18 kegiatan	18.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 kegiatan	10.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	16.088.000,00			96 %	10.865.000,00	Kecamatan Polanharjo
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	100 %	16.088.000,00			100 %	10.865.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.05 .2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	2 Kegiatan	16.088.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	10.865.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %	87.476.000,00			97 % 95 %	87.767.000,00	Kecamatan Polanharjo
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	87.476.000,00			100 %	87.767.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.06 .2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	18 Desa	8.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.06 .2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	18 Desa	11.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	9.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Desa	8.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18 rekomendasi	8.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 rekomendasi	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	18 desa	33.476.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 desa	31.767.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.06 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.17.7.01.06 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	5.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.444.832.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>2.427.743.000,00</b>	<b>Kecamatan Karanganom</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100 %</b>	<b>8.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>8.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>2.202.524.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>2.212.524.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	100 orang	2.178.943.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 orang	2.188.943.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksana Tugas ASN Terpenuhi Administrasinya	12 bulan	15.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 dokumen	7.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	1.581.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.581.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>60.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>62.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	5 unit	2.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	15 unit	10.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	5 eksemplar	4.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 eksemplar	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 eksemplar	2.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	200 kali	28.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 kali	23.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali	14.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 kali	21.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>15.000.000,00</b>				<b>15.000.000,00</b>	
			<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	5.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 unit	10.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	10.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>81.000.000,00</b>			100 %	<b>81.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	600 eksemplar	8.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600 eksemplar	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	23.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	23.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	3 orang	50.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 orang	50.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>presentasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>78.308.000,00</b>			100 %	<b>49.219.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	8 unit	20.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	5 unit	7.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	3 unit	8.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4.219.000,00	
			<i>Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara</i>	2 unit				2 unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	10 unit	15.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara</i>	10 unit	18.308.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	10.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.18.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	<b>5.028.000,00</b>			100 %	<b>4.958.000,00</b>	<b>Kecamatan Karanganom</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	5.028.000,00			100 %	4.958.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 jenis	5.028.000,00	kecamatan karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 jenis	4.958.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	241.314.000,00			95 %	247.879.000,00	Kecamatan Karanganom
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	241.314.000,00			100 %	247.879.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	19 Desa	16.314.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	12.879.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	19 desa	225.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	235.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	120.657.000,00			96 %	138.812.000,00	Kecamatan Karanganom
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			115.657.000,00				133.812.000,00	
			Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	1 Kegiatan	50.657.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	58.812.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	65.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	75.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	5.000.000,00			100 %	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.18.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	13.072.000,00			96 %	12.890.000,00	Kecamatan Karanganom

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-18.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	2 %	13.072.000,00			2 %	12.890.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	1 Kegiatan	8.072.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	7.890.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19 Desa	5.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	134.734.000,00			97 % 95 %	143.269.000,00	Kecamatan Karanganom
	7.01.7-1.0-0.0-18.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	134.734.000,00			100 %	143.269.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	19 Desa	18.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Desa	18.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 desa	10.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 desa	15.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19 desa	5.734.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 desa	8.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 rekomendasi	7.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 rekomendasi	7.495.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	19 desa	52.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 desa	60.774.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-18.7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 kegiatan	4.000.000,00	Kecamatan Karanganom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.907.270.000,00				2.899.055.000,00	Kecamatan Tulung

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %				100 %		
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.19.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	<b>7.000.000,00</b>			100 %	<b>7.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun</i>	5 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen LKJIP tersusun</i>	2 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.19.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>2.585.190.000,00</b>			100 %	<b>2.584.690.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan</i>	12 orang	2.565.190.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 orang	2.565.190.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu</i>	12 Bulan	15.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	14.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun</i>	4 dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun</i>	1 dokumen	1.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	<b>56.700.000,00</b>			100 %	<b>61.700.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	2 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.700.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8.700.000,00	
			<i>Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi</i>	5 Kali				5 Kali		
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 Kali	33.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Kali	33.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>34.400.000,00</b>			100 %	<b>22.185.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang diadakan</i>	2 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan</i>	5 Unit	29.400.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	15.185.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat Waktu</i>	100 %	<b>160.483.000,00</b>			100 %	<b>162.980.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Surat Terkirim</i>	1145 eksemplar	5.402.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1145 eksemplar	6.980.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang terbayar</i>	12 Bulan	16.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	16.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar</i>	6 Orang	139.081.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Orang	140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100 %	63.497.000,00			100 %	60.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara serta Pajak dan Perijinannya terbayar	12 Unit	18.475.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Unit	18.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	5 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi /Terpelihara	2 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Terpelihara/ Terehabilitasi	2 unit	10.022.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	3.017.000,00			100 %	2.975.000,00	Kecamatan Tulung
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	3.017.000,00			100 %	2.975.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	3 Jenis	3.017.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Jenis	2.975.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	205.352.000,00			95 %	203.261.000,00	Kecamatan Tulung
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	205.352.000,00			100 %	203.261.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	18 Desa	14.300.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	18 Desa	191.052.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	188.261.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	101.553.000,00			96 %	111.050.000,00	Kecamatan Tulung
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	90.553.000,00			100 %	100.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 kegiatan	84.553.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	94.050.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Kegiatan	6.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	11.000.000,00			100 %	11.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 kegiatan	11.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	11.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	15.083.000,00			96 %	14.788.000,00	Kecamatan Tulung
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	90 %	15.083.000,00			95 %	14.788.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	1 Kegiatan	15.083.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	14.788.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	85.999.000,00			97 % 95 %	84.988.000,00	Kecamatan Tulung
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	85.999.000,00			100 %	84.988.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Desa	8.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	18 Desa	11.530.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	11.800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	5.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18 Rekomendasi	5.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Rekomendasi	5.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	18 Desa	44.469.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	43.188.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.19.7.01.06 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	18 Kegiatan	2.000.000,00	Kecamatan Tulung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Kegiatan	2.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.20.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	<b>2.555.111.000,00</b>			100 %	<b>3.250.932.000,00</b>	<b>Kecamatan Jatinom</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	<b>10.000.000,00</b>			100 %	<b>10.500.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	4.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.307.326.000,00</b>				<b>2.954.059.000,00</b>	
			<i>Persentase Pembayaran gaji,tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	18 Orang/bulan	2.287.326.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	28 Orang/bulan	2.934.059.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran ,Bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran pembantu dan Bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	10.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	18 dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 dokumen	5.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	0 %	<b>62.300.000,00</b>			100 %	<b>57.224.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	3 unit	3.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	25 Unit	12.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55 Unit	14.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	200 eksemplar	6.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200 eksemplar	8.310.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	3 eksemplar	1.300.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 eksemplar	1.756.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	500 Kali	20.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	450 Kali	19.180.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Kali	20.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55 Kali	10.478.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	40.000.000,00			100 %	37.012.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	4 unit	22.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	12.012.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	18.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	104.485.000,00			100 %	110.597.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	900 eksemplar	4.409.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600 eksemplar	2.968.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	4 jenis	28.076.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 jenis	54.515.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	6 Orang	72.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	53.114.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	31.000.000,00			100 %	81.540.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	9 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Unit	31.540.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	6 unit	6.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	50.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	45.247.000,00			100 %	44.619.000,00	Kecamatan Jatinom
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	45.247.000,00			100 %	44.619.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	45.247.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Jenis	44.619.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	287.000.000,00			95 %	448.803.000,00	Kecamatan Jatinom
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	285.000.000,00			100 %	294.720.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	17 Desa	270.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 Desa	290.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	17 Desa	15.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 Desa	4.720.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	1 %	2.000.000,00			1 %	154.083.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.03 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Desa	2.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Desa	154.083.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	106.581.000,00			96 %	104.333.000,00	Kecamatan Jatinom
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	71.581.000,00			100 %	69.108.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 Kegiatan	50.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	50.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Kegiatan	21.581.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	19.108.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	35.000.000,00			100 %	35.225.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 kegiatan	35.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 kegiatan	35.225.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	45.247.000,00			96 %	34.704.000,00	Kecamatan Jatinom
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinasi dan pembina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %	45.247.000,00			100 %	34.704.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	3 Kegiatan	40.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	30.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.05 2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Yang Tertangani Konflik sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	17 Desa	5.247.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 Desa	4.704.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	63.848.000,00			97 % 95 %	62.783.000,00	Kecamatan Jatinom
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	63.848.000,00			100 %	62.783.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10.000.000,00	
			<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	17 Desa				17 Desa		
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	17 Desa	7.500.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 Desa	7.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.06 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	17 Desa	31.348.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 Desa	30.283.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	1 rekomendasi	2.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 rekomendasi	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	18 Desa	9.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Desa	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.06 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	<i>Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi</i>	1 Kegiatan	2.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.7.01.06 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	1 Kegiatan	2.000.000,00	Kecamatan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	2.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	<b>734.866.000,00</b>			100 %	<b>734.866.000,00</b>	<b>Kelurahan Jatinom</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 %	<b>2.000.000,00</b>	<i>(Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom)</i>		100 %	<b>2.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01 .01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun</i>	2 dokumen	1.000.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 dokumen	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01 .01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun</i>	1 dokumen	1.000.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>613.813.000,00</b>	<i>(Kelurahan jatinom, Jatinom, Kec. Jatinom)</i>		100 %	<b>613.813.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</i>	8,00 orang	613.813.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 orang	613.813.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	<b>16.240.000,00</b>	<i>(Kelurahan Jatinom, Jatinom, Kec. Jatinom)</i>		100 %	<b>16.240.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	10 unit	5.000.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia</i>	3 eksemplar	2.100.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 eksemplar	2.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia</i>	3 eksemplar	360.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 eksemplar	360.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi</i>	110 kali	3.800.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100,00 kali	3.800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	55 kali	4.980.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	55 kali	4.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	73.610.000,00	(Kelurahan Jatinom, Jatinom, Kec. Jatinom)		100 %	73.610.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	29.870.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	29.870.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	5 orang	43.740.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	43.740.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	29.203.000,00	(Kelurahan Jatinom, Jatinom, Kec. Jatinom)		100 %	29.203.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.400.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1.400.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit				1 unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	27.803.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	27.803.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	472.263.000,00			95 %	472.263.000,00	Kelurahan Jatinom
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100 %	472.263.000,00	(Kelurahan Jatinom, Jatinom, Kec. Jatinom)		100 %	472.263.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2,00 kegiatan	12.680.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	200,00 kegiatan	12.680.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	10,00 Paket	359.249.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 Paket	359.249.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.20.01.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	8,00 Lembaga	100.334.000,00	Kelurahan Jatinom	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8,00 Lembaga	100.334.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.844.494.000,00			100 %	2.845.928.000,00	Kecamatan Kemalang
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	12.000.000,00			100 %	7.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	4.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP tersusun	0,00 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			2.549.263.000,00				2.549.263.000,00	
			Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	20 Orang	2.522.263.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Orang	2.522.263.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	20 orang	26.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 orang	26.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	1.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.21.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>51.500.000,00</b>			100 %	<b>49.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	10,00 Jenis	2.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Jenis	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20 Unit	9.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Unit	8.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	3 Eks	7.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Eks	6.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	3 Eksemplar	3.500.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Eksemplar	3.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	400 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	400 Orang	8.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kegiatan	20.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	20.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.21.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>60.000.000,00</b>				<b>60.000.000,00</b>	
			<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	2 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	60.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.21.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>105.100.000,00</b>			100 %	<b>105.165.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1200 Eksemplar	4.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1200 Eksemplar	4.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	4,00 Jenis	25.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Jenis	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	5 Jasa	76.100.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Jasa	76.165.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.21.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>66.631.000,00</b>			100 %	<b>75.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	15,00 Unit	33.631.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	40.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	33.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	5.028.000,00			100 %	5.950.000,00	Kecamatan Kemalang
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	5.028.000,00			100 %	5.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan</i>	2 Jenis	5.028.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	5.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	157.860.000,00			95 %	184.496.000,00	Kecamatan Kemalang
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	157.860.000,00			100 %	184.496.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	13 Desa	12.860.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Desa	13.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	13 Desa	145.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	171.496.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	138.052.000,00			96 %	48.585.000,00	Kecamatan Kemalang
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	131.052.000,00			100 %	48.585.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	13 Kegiatan	96.400.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Kegiatan	48.585.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	13 Kegiatan	34.652.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Kegiatan	-	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	7.000.000,00			0 %	-	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			7.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	
			<i>Jumlah koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik</i>	1 Kegiatan				0 Kegiatan		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	20.110.000,00			96 %	17.848.000,00	Kecamatan Kemalang
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	13 %	20.110.000,00			13 %	17.848.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.05 .2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	2 Kegiatan	12.110.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	9.848.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.05 .2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	13 Desa	8.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Desa	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %	133.729.000,00			97 % 95 %	135.500.000,00	Kecamatan Kemalang
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	133.729.000,00			100 %	135.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.06 .2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	13 Desa	20.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Desa	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.06 .2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	13 Desa	20.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Desa	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.06 .2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	13 Desa	8.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Desa	8.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.06 .2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			15.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15.000.000,00	
			<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	13 Desa				13 Desa		
	7.01.7-1.0-0.0-0.21.7.01.06 .2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	13 Desa	70.729.000,00	KECAMATAN KEMALANG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Desa	72.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	2.480.551.000,00			100 %	2.454.548.000,00	Kecamatan Ngawen
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	12.000.000,00			100 %	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun</i>	4 dokumen	7.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen LKJIP tersusun</i>	1 dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	2.186.528.000,00			100 %	2.186.528.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16 orang	2.186.528.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16 orang	2.186.528.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>95.100.000,00</b>			100 %	<b>97.600.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	10 unit	5.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20 unit	8.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	50 eksemplar	10.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 eksemplar	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan Tamu Terfasilitasi	25 kali	37.100.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 kali	37.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 kali	35.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80 kali	37.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>28.503.000,00</b>			100 %	-	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 unit	28.503.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 unit	-	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>100.000.000,00</b>			100 %	<b>100.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	250 eksemplar	2.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	250 eksemplar	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	26.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	26.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 orang	72.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	72.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>58.420.000,00</b>			100 %	<b>58.420.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8 unit	45.920.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	45.920.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.500.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara	10 unit				10 unit		
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.22.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	<b>10.055.000,00</b>			100 %	<b>9.916.000,00</b>	<b>Kecamatan Ngawen</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.22.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	<b>10.055.000,00</b>			100 %	<b>9.916.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 jenis	10.055.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 jenis	9.916.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	85 %	197.763.000,00			86 %	133.855.000,00	Kecamatan Ngawen
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	197.763.000,00			100 %	133.855.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	13 desa	21.077.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 desa	20.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	13 desa	176.686.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 desa	113.855.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	152.983.000,00			100 %	138.011.000,00	Kecamatan Ngawen
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	10.000.000,00			100 %	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			142.983.000,00				133.011.000,00	
			Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	142.983.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	133.011.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	94 % 85 %	93.655.000,00			95 % 86 %	64.373.000,00	Kecamatan Ngawen
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	93.655.000,00			100 %	64.373.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 desa	10.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	13 desa	10.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 desa	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 desa	10.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 desa	9.373.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 2.01.05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 desa	7.000.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	13 desa	56.655.000,00	Kecamatan Ngawen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 desa	30.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	<b>2.692.875.000,00</b>			100 %	<b>2.674.775.000,00</b>	<b>Kecamatan Kalikotes</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>7.000.000,00</b>				<b>6.000.000,00</b>	
			<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP Tersusun	1 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>2.336.465.000,00</b>			100 %	<b>2.309.205.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	18 orang	2.325.465.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 orang	2.298.205.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	5.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	7 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>77.910.000,00</b>			100 %	<b>79.570.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	10 Unit	3.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	40 Unit	17.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Unit	15.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		13.000.000,00	
			<i>Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia</i>	3010 Eksemplar				3010 Eksemplar		
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	48 Eksemplar	1.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48 Eksemplar	1.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	9 Kali	15.410.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Kali	18.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Kali	28.500.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	160 Kali	28.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>85.000.000,00</b>			100 %	<b>85.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit	45.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Unit	45.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	40.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>108.500.000,00</b>			100 %	<b>109.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	500 Eksemplar	2.500.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 Eksemplar	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 Bulan	26.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	26.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	4 Orang	80.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Orang	80.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>78.000.000,00</b>			100 %	<b>86.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	10 Unit	14.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	14.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	8 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	48.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	6.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Unit	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	6 Unit	8.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Unit	8.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	<b>3.017.000,00</b>			100 %	<b>2.975.000,00</b>	<b>Kecamatan Kalikotes</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	<b>3.017.000,00</b>			100 %	<b>2.975.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	3.017.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	2.975.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	<b>204.916.000,00</b>			95 %	<b>231.519.000,00</b>	<b>Kecamatan Kalikotes</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	<b>204.916.000,00</b>			100 %	<b>231.519.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			13.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		13.500.000,00	
			<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	7 Desa				7 Desa		
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	7 Desa	191.916.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	218.019.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	<b>97.531.000,00</b>			96 %	<b>92.707.000,00</b>	<b>Kecamatan Kalikotes</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	<b>88.531.000,00</b>			100 %	<b>88.707.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	4 Kegiatan	68.531.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	68.207.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	3 Kegiatan	20.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	20.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	<b>9.000.000,00</b>			100 %	<b>4.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	3 Kegiatan	9.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	4.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	<b>6.033.000,00</b>			96 %	<b>8.411.000,00</b>	<b>Kecamatan Kalikotes</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.23.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	100 %	<b>6.033.000,00</b>			100 %	<b>8.411.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			6.033.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8.411.000,00	
			<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	3 Kegiatan				3 Kegiatan		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %	57.011.000,00			97 % 95 %	57.457.000,00	Kecamatan Kalikotes
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	57.011.000,00			100 %	57.457.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	7 Desa	3.811.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	7 Desa	15.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	15.457.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	7 Desa	5.200.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	2 rekomendasi	2.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 rekomendasi	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	7 Desa	26.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Desa	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.06 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	<i>Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi</i>	1 Kegiatan	3.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.23.7.01.06 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	1 Kegiatan	2.000.000,00	Kecamatan Kalikotes	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	2.936.722.000,00			100 %	4.856.666.000,00	Kecamatan Klaten Utara
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	100 %	4.500.000,00			100 %	3.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun</i>	4 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen LKJIP tersusun</i>	2 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	2.617.722.000,00			100 %	4.354.859.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</i>	44 orang	2.612.722.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 orang	4.352.359.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun</i>	4 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	1.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun</i>	2 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu</i>	100 %	59.500.000,00			100 %	74.513.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	11 unit	2.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 unit	4.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	59 unit	4.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	59 unit	15.009.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	6 eksemplar	3.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 eksemplar	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	14 eksemplar	2.500.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 eksemplar	4.214.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	600 kali	18.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	630 kali	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217 kali	30.000.000,00	Kabupaten Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	217 kali	19.790.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>35.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>30.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	17 unit	35.000.000,00	kecamatan klaten utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 unit	30.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>146.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>356.219.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	100 eksemplar	1.000.000,00	kecamatan klaten utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 eksemplar	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	55.000.000,00	kecamatan klaten utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	84.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	20 orang	90.000.000,00	kecamatan klaten utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 orang	269.719.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>74.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>37.575.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	14,00 unit	11.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 unit	13.075.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	10 unit	3.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 unit	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 unit	60.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	16.500.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100 %</b>	<b>4.022.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>3.967.000,00</b>	<b>Kecamatan Klaten Utara</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100 %</b>	<b>4.022.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>3.967.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.02 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	4.022.000,00	kecamatan klaten utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	3.967.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	134.240.000,00			95 %	124.500.000,00	Kecamatan Klaten Utara
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	100 %	134.240.000,00			100 %	124.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Kelurahan/Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	8,00 Desa/Kelurahan	7.500.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8,00 Desa/Kelurahan	7.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kelurahan/Desa yang dilakukan Pembinaan</i>	8 Desa/Kelurahan	126.740.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Desa/Kelurahan	117.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %	103.564.000,00			96 %	100.639.000,00	Kecamatan Klaten Utara
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	98 %	98.000.000,00			98 %	97.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			95.000.000,00	kecamatan klaten utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95.000.000,00	
			<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan Klaten Utara</i>	12 kegiatan				12 kegiatan		
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	2 kegiatan	3.000.000,00	kecamatan klaten utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	96 %	5.564.000,00			96 %	3.139.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	12 kegiatan	5.564.000,00	Kecamatan klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	3.139.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	6.033.000,00			96 %	5.454.000,00	Kecamatan Klaten Utara
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	97 %	6.033.000,00			97 %	5.454.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	3 kegiatan	4.033.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	3.454.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.05 2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8 Desa	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Desa	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	123.674.000,00			97 % 95 %	131.872.000,00	Kecamatan Klaten Utara
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	123.674.000,00			100 %	131.872.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 Desa	18.674.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Desa	16.872.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	6 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Desa	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	6 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Desa	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Desa	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 Desa	-	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Desa	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Desa	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6 rekomendasi	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 rekomendasi	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	8 Desa	80.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Desa	90.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.7.01.06 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	6 Kegiatan	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Kegiatan	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	979.670.000,00			100 %	979.670.000,00	Kelurahan Barenglor
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.01.2 .02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	814.474.000,00			100 %	814.474.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			806.974.000,00	Kelurahan Barenglor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		806.974.000,00	
			Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	4 orang				4 orang		
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.01 .01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran pembantu dan Bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	7.500.000,00	Kelurahan Barenglor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	7.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.01.2 .06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	14.419.000,00			100 %	14.419.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3,00 Unit	1.000.000,00	Kelurahan Bareng lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	23 unit	7.379.000,00	Kelurahan Bareng lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23 unit	7.379.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	2 eksemplar	1.000.000,00	Kelurahan Bareng lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	10 eksemplar	800.000,00	Kelurahan Bareng lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 eksemplar	800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	100 kali	2.000.000,00	Kelurahan Bareng lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 kali	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,00 Kali	2.240.000,00	Kelurahan Bareng lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	2.240.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.01.2 .07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100 Persen</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(Kelurahan Barenglor, Barenglor, Kec. Klaten Utara)</b>		<b>100 Persen</b>	<b>25.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 Unit	25.000.000,00	Kelurahan Barenglor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	25.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.01.2 .08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>112.697.000,00</b>				<b>112.697.000,00</b>	
			<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>		
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	10.000.000,00	Kelurahan Bareng Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	8 orang	102.697.000,00	Kelurahan Bareng Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 orang	102.697.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.01.2 .09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>13.080.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>13.080.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan pajaknya terbayar	1,00 unit	1.240.000,00	Kelurahan Bareng Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,00 unit	1.240.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor terpelihara	4 unit	11.840.000,00	Kelurahan Bareng Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 unit	11.840.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>93 %</b>	<b>585.164.500,00</b>			<b>95 %</b>	<b>585.164.500,00</b>	<b>Kelurahan Barenglor</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.03.2 .02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan</b>	<b>100 %</b>	<b>585.164.500,00</b>			<b>100 %</b>	<b>585.164.500,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1,00 Kelurahan	5.300.000,00	Kelurahan Bareng Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,00 Kelurahan	5.300.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	7,00 Paket	369.264.500,00	Kelurahan Bareng Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 Paket	369.264.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.01.7.01 .03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	10 kegiatan	210.600.000,00	Kelurahan Bareng Lor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kegiatan	210.600.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>992.673.000,00</b>				<b>992.673.000,00</b>	<b>Kelurahan Gergunung</b>
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				100 %		
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.01.2 .02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	<b>872.342.000,00</b>			100 %	<b>872.342.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	5 orang	872.342.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	872.342.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.01.2 .06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	<b>12.559.000,00</b>			100 %	<b>12.559.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	1.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	10 unit	2.086.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	2.086.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	2 eksemplar	1.773.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	1.773.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	2 eksemplar	1.650.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	1.650.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	150 kali	3.000.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	150 kali	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Kali	2.550.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 Kali	2.550.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.01.2 .07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 Persen	<b>4.000.000,00</b>	(Kelurahan Gergunung, Klaten Utara)		100 Persen	<b>4.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	4.000.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	4.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.01.2 .08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	<b>91.022.000,00</b>			100 %	<b>91.022.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	14.000.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	14.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	6 orang	77.022.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 orang	77.022.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.01.2 .09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	<b>12.750.000,00</b>			100 %	<b>12.750.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit	750.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	750.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	11.000.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor terpelihara	1 unit	1.000.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	479.664.500,00			95 %	479.664.500,00	Kelurahan Gergunung
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100 %	479.664.500,00			100 %	479.664.500,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1 kegiatan	6.000.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	5 Paket	369.264.500,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Paket	369.264.500,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.24.02.7.01 .03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan	10,00 Lembaga	104.400.000,00	Kelurahan Gergunung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Lembaga	104.400.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.242.566.000,00			100 %	8.940.799.200,00	Kecamatan Klaten Tengah
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	964.000,00			100 %	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	500.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1 Dokumen	464.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.914.110.000,00			100 %	7.508.737.200,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	12,00 Orang	1.913.360.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	71 Orang	7.508.387.200,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 Dokumen	750.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	350.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	65.252.000,00			100 %	251.991.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	17 Unit	2.752.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 Unit	7.652.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30 Unit	17.500.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Unit	62.379.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	6502 Eksemplar	5.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8552 Eksemplar	21.850.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	84 kali	20.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	74 kali	64.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886 kali	20.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	988 kali	95.610.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	38.000.000,00			100 %	197.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	8 unit	8.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 unit	55.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	12 Unit	30.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Unit	142.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	120.000.000,00			100 %	759.771.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	30.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	116.360.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	41 Orang	90.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Orang	643.411.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	104.240.000,00			100 %	221.800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	12 Unit	33.240.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Unit	58.800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		23.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	19 unit				29 unit		
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 Unit	50.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	65.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	2 unit	15.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 unit	50.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	7 unit	3.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	26 unit	24.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	2.011.000,00			100 %	1.488.000,00	Kecamatan Klaten Tengah
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	2.011.000,00			100 %	1.488.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	2.011.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	1.488.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	145.000.000,00			95 %	147.500.000,00	Kecamatan Klaten Tengah
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	145.000.000,00			100 %	147.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	9 Desa/Kelurahan	5.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Desa/Kelurahan	7.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	9 Desa/Kelurahan	140.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Desa/Kelurahan	140.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>103.564.000,00</b>				<b>107.084.000,00</b>	<b>Kecamatan Klaten Tengah</b>
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %				96 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	<b>100.564.000,00</b>			100 %	<b>102.084.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas di Kecamatan	12 kegiatan	90.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	90.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 kegiatan	10.564.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kegiatan	12.084.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %	<b>3.000.000,00</b>			100 %	<b>5.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.04 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 kegiatan	3.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	<b>15.083.000,00</b>			96 %	<b>14.873.000,00</b>	<b>Kecamatan Klaten Tengah</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinsi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	96 %	<b>15.083.000,00</b>			9 %	<b>14.873.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	3 kegiatan	15.083.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	14.873.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi	95 % 94 %	<b>158.363.000,00</b>			97 % 95 %	<b>163.515.000,00</b>	<b>Kecamatan Klaten Tengah</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	158.363.000,00			100 %	163.515.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Desa	25.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Desa	25.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	3 Desa	12.500.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Desa	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Desa/Kelurahan	10.000.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Desa/Kelurahan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	9 Desa/Kelurahan	110.863.000,00	Kantor Kecamatan Klaten Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 Desa/Kelurahan	113.515.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.183.392.700,00			100 %	1.183.392.700,00	<b>Kelurahan Bareng</b>
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.055.035.700,00			100 %	1.055.035.700,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	8,00 orang	1.055.035.700,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 orang	1.055.035.700,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	40.907.000,00			100 %	40.907.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30 unit	7.550.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	7.550.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	10 eksemplar	2.357.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 eksemplar	2.357.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.000.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1.000.000,00	
			Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	12 eksemplar				12 eksemplar		
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	15,00 kali	15.000.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 kali	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167 Kali	15.000.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	167 Kali	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	83.500.000,00			100 %	83.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	10.000.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	5 orang	73.500.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	73.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	3.950.000,00			100 %	3.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit	3.950.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	3.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	445.000.000,00			95 %	445.000.000,00	<b>Kelurahan Bareng</b>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100 %	445.000.000,00			100 %	445.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 kegiatan	10.000.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	2,00 Paket	322.200.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,00 Paket	322.200.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.01.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan	7,00 Lembaga	112.800.000,00	Kelurahan Bareng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 Lembaga	112.800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	920.634.700,00			100 %	920.634.700,00	Kelurahan Kabupaten
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	780.620.700,00			100 %	780.620.700,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	8,00 orang	780.620.700,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 orang	780.620.700,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	29.564.000,00			100 %	29.564.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30 unit	12.000.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	10 eksemplar	2.964.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 eksemplar	2.964.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	12 eksemplar	2.000.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 eksemplar	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	7,00 kali	7.500.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 kali	7.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167 Kali	5.100.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	167 Kali	5.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	104.500.000,00			100 %	104.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	16.500.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	16.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	6 orang	88.000.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5,00 orang	88.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	5.950.000,00			100 %	5.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit	3.950.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	3.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	2 Unit	2.000.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	457.865.000,00			95 %	457.865.000,00	Kelurahan Kabupaten
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100 %	457.865.000,00			100 %	457.865.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01 .03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 kegiatan	9.187.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	9.187.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01 .03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	10 Paket	328.678.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Paket	328.678.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.02.7.01 .03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan	7,00 Lembaga	120.000.000,00	Kelurahan Kabupaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 Lembaga	120.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	<b>1.115.592.700,00</b>			100 %	<b>1.115.592.700,00</b>	<b>Kelurahan Klaten</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	<b>964.320.700,00</b>			100 %	<b>964.320.700,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	8,00 orang	964.320.700,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 orang	964.320.700,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	<b>28.940.000,00</b>			100 %	<b>28.940.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30,00 unit	7.000.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	7.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	500 eksemplar	2.500.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 eksemplar	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	10 kali	9.440.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kali	9.440.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Kali	10.000.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120 Kali	10.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>117.532.000,00</b>			100 %	<b>117.532.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	15.000.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	7,00 orang	102.532.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 orang	102.532.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	100 %	<b>4.800.000,00</b>			100 %	<b>4.800.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit	3.950.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	3.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	2 Unit	850.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	850.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	<b>443.822.000,00</b>			95 %	<b>443.822.000,00</b>	<b>Kelurahan Klaten</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<i>Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan</i>	100 %	<b>443.822.000,00</b>			100 %	<b>443.822.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1 kegiatan	10.225.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	10.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	10 Paket	329.197.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 Paket	329.197.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.03.7.01 .03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan	7,00 Lembaga	104.400.000,00	Kelurahan Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 Lembaga	104.400.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>1.059.220.700,00</b>			<b>100 %</b>	<b>1.059.220.700,00</b>	<b>Kelurahan Tonggalan</b>
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	<b>100 %</b>	<b>867.082.700,00</b>			<b>100 %</b>	<b>867.082.700,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	5 orang	867.082.700,00	Kelurahan Tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	867.082.700,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	<b>100 %</b>	<b>54.068.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>54.068.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30,00 unit	9.568.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	9.568.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	10 eksemplar	5.000.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 eksemplar	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	12 eksemplar	2.500.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 eksemplar	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	12 kali	12.000.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	100,00 Kali	25.000.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Kali	25.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	<b>100 Persen</b>	<b>10.000.000,00</b>	<i>(Kelurahan Tonggalan, Klaten Tengah)</i>		<b>100 Persen</b>	<b>10.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit	10.000.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	10.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	<b>100 %</b>	<b>99.120.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>99.120.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	12.000.000,00	Kelurahan Tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	6 orang	87.120.000,00	Kelurahan Tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 orang	87.120.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	<b>100 %</b>	<b>28.950.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>28.950.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit	3.950.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	3.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	2,00 Unit	2.500.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	1,00 Unit	15.000.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	1,00 Unit	5.000.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor terpelihara	2 unit	2.500.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	472.995.000,00			95 %	472.995.000,00	Kelurahan Tonggalan
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<i>Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan</i>	100 %	472.995.000,00			100 %	472.995.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	1 kegiatan	10.000.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun</i>	5 Paket	324.795.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Paket	324.795.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.04.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan</i>	4 kegiatan	138.200.000,00	kelurahan tonggalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 kegiatan	138.200.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	1.086.916.700,00			100 %	1.086.916.700,00	Kelurahan Buntalan
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %	953.557.700,00			100 %	953.557.700,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</i>	8,00 orang	953.557.700,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 orang	953.557.700,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	26.409.000,00			100 %	26.409.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia</i>	4 Unit	2.445.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	2.445.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	30,00 unit	3.255.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	3.255.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia</i>	10 eksemplar	1.297.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 eksemplar	1.297.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia</i>	12 eksemplar	1.592.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 eksemplar	1.592.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi</i>	8 kali	8.820.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 kali	8.820.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100,00 Klai	9.000.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	167 Klai	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 Persen	9.900.000,00	(Kelurahan Buntalan, Klaten Tengah)		100 Persen	9.900.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang diadakan</i>	1 Unit	9.900.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	9.900.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	88.100.000,00			100 %	88.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar</i>	12 bulan	14.600.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	14.600.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar</i>	5 orang	73.500.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	73.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	100 %	8.950.000,00			100 %	8.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01 .01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit	3.950.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	3.950.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor terpelihara	5 unit	5.000.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	559.942.000,00			95 %	559.942.000,00	Kelurahan Buntalan
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.03.2 .02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100 %	559.942.000,00			100 %	559.942.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01 .03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 kegiatan	15.000.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01 .03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	2 Paket	328.262.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	328.262.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.05.7.01 .03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan	7,00 Lembaga	216.680.000,00	Kelurahan Buntalan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 Lembaga	216.680.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.119.656.700,00			100 %	1.119.656.700,00	Kelurahan Mojayan
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.01.2 .02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	968.055.700,00			100 %	968.055.700,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	8,00 orang	968.055.700,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 orang	968.055.700,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.01.2 .06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	20.749.000,00			100 %	20.749.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01 .01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	8,00 Unit	2.650.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Unit	2.650.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01 .01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30,00 unit	3.782.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 unit	3.782.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01 .01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	10 eksemplar	2.024.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 eksemplar	2.024.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	12 eksemplar	1.593.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 eksemplar	1.593.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	12 kali	5.700.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	5.700.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167 Kali	5.000.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	167 Kali	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.01.2 .07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 Persen	11.990.000,00	(Kelurahan Mojayan, Klaten Tengah)		100 Persen	11.990.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01 .01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 Unit	11.990.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	11.990.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	116.362.000,00			100 %	116.362.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	100,00 Eksemplar	2.143.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Eksemplar	2.143.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.419.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		13.419.000,00	
			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan				12 bulan		
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	6 orang	100.800.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 orang	100.800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	2.500.000,00			100 %	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit	2.500.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	439.610.000,00			95 %	439.610.000,00	Kelurahan Mojayan
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100 %	439.610.000,00			100 %	439.610.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 kegiatan	10.000.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	10.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	2 Paket	329.470.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	329.470.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.25.06.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan	7,00 Lembaga	100.140.000,00	Kelurahan Mojayan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,00 Lembaga	100.140.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.240.597.000,00			100 %	3.195.042.000,00	Kecamatan Klaten Selatan
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.000.000,00			100 %	8.200.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	14 Dokumen				14 Dokumen		
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	2 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.200.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.948.403.000,00			100 %	2.763.665.500,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	14 Orang	1.941.403.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14 Orang	2.756.665.500,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	12 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	12 Dokumen	3.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>66.460.000,00</b>			100 %	<b>68.014.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	5.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 unit	6.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	12 unit	12.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	36 unit	16.250.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	30,00 eksemplar	5.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 eksemplar	7.100.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	3 eksemplar	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 eksemplar	3.764.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	225 Kali	15.460.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	255 Kali	21.800.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	27.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25 Kali	13.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</i>	100 %	<b>12.000.000,00</b>			100 %	<b>16.200.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	1 unit	12.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	16.200.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>91.654.000,00</b>			100 %	<b>187.133.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	6.600 eksemplar	2.250.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.600 eksemplar	3.050.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	20.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	35.750.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	69.404.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Orang	148.333.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>114.080.000,00</b>			100 %	<b>151.829.500,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9,00 unit	58.430.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 unit	60.530.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	6 unit	15.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 unit	16.312.500,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	3 unit	2.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 unit	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 unit	25.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	46.587.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	10.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	18.400.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 unit	3.650.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</i>	100 %	10.043.000,00			100 %	9.916.000,00	Kecamatan Klaten Selatan
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<i>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</i>	100 %	10.043.000,00			100 %	9.916.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan</i>	2 Jenis	10.043.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Jenis	9.916.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	160.225.000,00			95 %	157.297.500,00	Kecamatan Klaten Selatan
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<i>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>	93 %	160.225.000,00			95 %	157.297.500,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa</i>	12,00 Desa/Kelurahan	7.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12,00 Desa/Kelurahan	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Pembinaan</i>	12,00 Desa/Kelurahan	153.225.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12,00 Desa/Kelurahan	149.297.500,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			105.565.000,00				95.186.000,00	Kecamatan Klaten Selatan
			<i>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</i>	96 %				96 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<i>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</i>	100 %	102.000.000,00			100 %	95.186.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</i>	12 kegiatan	90.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	90.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	2 kegiatan	12.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	5.186.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</i>	100 %	3.565.000,00			0 %	-	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	5 kegiatan	3.565.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0 kegiatan	-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</i>	96 %	12.066.000,00			96 %	11.899.000,00	Kecamatan Klaten Selatan
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</i>	100 %	12.066.000,00			100 %	11.899.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.05 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara</i>	3 kegiatan	12.066.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	11.899.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<i>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</i>	95 % 94 %	159.619.000,00			97 % 95 %	168.260.000,00	Kecamatan Klaten Selatan
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<i>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	100 %	159.619.000,00			100 %	168.260.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	12 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Desa	12.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa</i>	12 Desa	59.260.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Desa	62.260.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	12 Desa	3.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Desa	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	11 Desa	6.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Desa	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	11 Desa	6.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 Desa	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	11 rekomendasi	10.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 rekomendasi	6.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya</i>	12 Desa	56.489.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Desa	60.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	<i>Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi</i>	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.7.01.06 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	3 Kegiatan	3.870.000,00	Kecamatan Klaten Selatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	5.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	930.871.000,00			100 %	930.871.000,00	Kelurahan Gayamprit
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.01.2 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			784.781.000,00				784.781.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100 %				100 %		
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya</i>	5 orang	784.781.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 orang	784.781.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	<b>24.880.000,00</b>			100 %	<b>24.880.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia</i>	5 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	1.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	24,00 unit	6.200.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24 unit	6.200.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia</i>	4 Unit	2.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	2.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia</i>	13,00 eksemplar	2.500.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 eksemplar	2.500.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia</i>	2 eksemplar	1.680.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 eksemplar	1.680.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi</i>	170 kali	9.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	170 kali	9.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	20 Kali	2.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Kali	2.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</i>	100 Persen	<b>6.000.000,00</b>	<i>(Kelurahan Gayamprit, Klaten Selatan)</i>		100 Persen	<b>6.000.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia</i>	3 Unit	6.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	6.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>101.960.000,00</b>			100 %	<b>101.960.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Surat Terkirim</i>	500 Eksemplar	1.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500 Eksemplar	1.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar</i>	12 bulan	15.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	15.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia</i>	11 Unit	8.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 Unit	8.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar</i>	6 orang	77.960.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 orang	77.960.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	100 %	<b>13.250.000,00</b>			100 %	<b>13.250.000,00</b>	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar</i>	1 unit	3.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 unit	3.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah mebel yang terpelihara</i>	5 Unit	2.250.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	2.250.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor terpelihara</i>	11 unit	8.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11 unit	8.000.000,00	
	<b>7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	93 %	<b>471.119.000,00</b>			95 %	<b>471.119.000,00</b>	Kelurahan Gayamprit

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100 %	471.119.000,00			100 %	471.119.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7.119.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7.119.000,00	
			Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 kegiatan				2 kegiatan		
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	2 Paket	346.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	346.000.000,00	
	7.01.7-1.0-0.0-0.26.01.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan	4 Lembaga	118.000.000,00	Kelurahan Gayamprit	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Lembaga	118.000.000,00	
	<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>5.157.759.000,00</b>				<b>5.073.274.000,00</b>	
	<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>5.157.759.000,00</b>				<b>5.073.274.000,00</b>	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.212.356.000,00			100 %	3.069.756.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	20.000.000,00			100 %	10.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	2 Dokumen	20.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.717.397.000,00			100 %	2.717.397.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	13 Orang	2.642.397.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13 Orang	2.642.397.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	75.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	75.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	137.446.000,00			100 %	131.446.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.000.000,00	
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Unit				10 Unit		
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	49 Unit	10.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	49 Unit	10.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	20000 Eksemplar	10.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20000 Eksemplar	10.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	1680 Eksemplar	4.440.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1680 Eksemplar	4.440.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	220 Kali	5.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	220 Kali	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77 Kali	106.006.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	70 Kali	100.006.000,00	
	<b>8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</i>	100 %	<b>84.619.000,00</b>			100 %	<b>84.619.000,00</b>	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	750 Eksemplar	1.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	750 Eksemplar	1.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	23.200.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan	23.200.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	4 Orang	60.419.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Orang	60.419.000,00	
	<b>8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</i>	100 %	<b>252.894.000,00</b>			100 %	<b>126.294.000,00</b>	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	7 Unit	39.479.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Unit	25.479.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	2 unit	203.246.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	98.135.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 Unit	10.169.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	2.680.000,00	
	<b>8.01.8-1.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<i>Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan</i>	1 % 0 %	<b>22.121.000,00</b>			4 % 4 %	<b>51.517.000,00</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	<b>8.01.8-1.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<i>Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan</i>	75 %	<b>22.121.000,00</b>			100 %	<b>51.517.000,00</b>	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.02 2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara	1 Kali	20.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kali	50.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.02 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1 Kali	2.121.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kali	1.517.000,00	
	<b>8.01.8-1.0-0.0-0.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<i>Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu</i>	2 % 60 %	<b>1.142.027.000,00</b>			4 % 65 %	<b>1.121.213.000,00</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	8.01.8-1.0-0-0-01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.142.027.000,00				1.121.213.000,00	
			<i>Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di daerah yang dilaksanakan</i>	100 %				100 %		
	8.01.8-1.0-0-0-01.8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik di Daerah</i>	1 Dokumen	5.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0-0-01.8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	<i>Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	3 Kali	1.126.027.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kali	1.108.213.000,00	
	8.01.8-1.0-0-0-01.8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Frekuensi Koordinasi di Bidang pendidikan politik di daerah</i>	1 Kali	5.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Kali	5.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0-0-01.8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bantuan keuangan partai politik</i>	9 Kali	6.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Kali	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<i>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan</i>	100 %	402.190.000,00			100 %	412.309.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<i>Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan</i>	33 %	402.190.000,00			100 %	412.309.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	1 Kali	402.190.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kali	412.309.000,00	
5.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<i>Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar</i>	34 % 6 %	52.285.000,00			67 % 12 %	77.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<i>Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan</i>	50 %	52.285.000,00			100 %	77.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di</i>	1 Kali	50.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Kali	75.000.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang FKUB dan P4GN terlaksana</i>	1 Kali	2.285.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Kali	2.000.000,00	
6.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<i>Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan Persentase deteksi dini potensi konflik sosial</i>	100 % 0 %	326.780.000,00			100 % 80 %	341.479.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<i>Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan</i>	17 %	326.780.000,00			100 %	341.479.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				8	9	10	11	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.06 .2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Frekuensi Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah terlaksana</i>	12 Kali	96.780.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	91.479.000,00	
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.8.01.06 .2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana</i>	12 Kali	230.000.000,00	Kesbangpol Klaten	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Kali	250.000.000,00	
<b>J U M L A H</b>									<b>3.038.558.535.000,00</b>	
					<b>2.671.826.951.200,00</b>					